djp







LAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2018
AUDITED

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILI (021) 5225140; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
email pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND - 1414 /PJ.01/2019

Yth.	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari	:	Sekretaris Direktorat Jenderal
Sifat	:	Sangat Segera
Lampiran	:	Satu Set
Hal	:	Laporan Keuangan BA 015 Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2018 *Audited*
Tanggal	:	21 Mei 2019

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, bersama ini disampaikan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2018 *Audited*. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2018 *Audited* tersebut terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Peni Hirjanto

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

Kp. : PJ.013/PJ.0134/2019

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Pajak:

1. **Sampul Luar**

   Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

2. **Sampul Dalam**

   Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

3. **Kata Pengantar**

   Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.

4. **Daftar Isi**

   Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. **Pernyataan Tanggung Jawab**

   Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sbb :

   a. pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan;
   b. pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP; dan
   c. pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

6. **Ringkasan**

   Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari :

   a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja dan Pendapatan
   b. Ringkasan Neraca
   c. Ringkasan Laporan Operasional
   d. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas
   e. Ringkasan CaLK

7. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja bruto setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAIBA yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu (*audited*).
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).

8. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal tertentu.

a. Untuk periode semesteran, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).
b. Untuk periode tahunan, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).

9. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).

10. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

a. Untuk periode semesteran, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).

b. Untuk periode tahunan, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).

11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas :

a. Pendahuluan

Memuat hal-hal yang terdiri dari:

- Dasar Hukum
- Kebijakan Teknis
- Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- Kebijakan Akuntansi

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

c. Penjelasan pos-pos Neraca.

- Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional

- Untuk penjelasan Laporan Operasional Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

e. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
   - Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.
   - Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

f. Pengungkapan Penting Lainnya

   Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada Kantor Wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:
   - Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
   - Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

12. Lampiran Laporan Keuangan

a. Neraca Percobaan
b. LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
c. LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
d. Neraca
e. Laporan Operasional
f. Laporan Perubahan Ekuitas

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 21 Mei 2019

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Peni Hirjanto

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN i
TINGKAT ESELON I i
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
RINGKASAN 1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1
2. NERACA 2
3. LAPORAN OPERASIONAL 2
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 3
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 4
A. PENJELASAN UMUM 10
A.1. DASAR HUKUM 10
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 11
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 18
A.4. BASIS AKUNTANSI 21
A.5. DASAR PENGUKURAN 21
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI 21
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 30
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN 30
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 30
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 53
B.3.1. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS PENERIMAAN DALAM NEGERI 53
B.3.2. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS BELANJA DALAM NEGERI 56
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA 58
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA 58
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA 59
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 110
D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 110
D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL 119
D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 120
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 123
E.1 EKUITAS AWAL 123

E.2 SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL 123
E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 123
E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 123
E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 124
E.6. EKUITAS AKHIR 125
F. CATATAN PENTING LAINNYA 126
F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK 126
F.2. SENGKETA PAJAK 129
F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS 131
F.4. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 134
F.5. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI) 135
F.6. PENATAUSAHAAN ASET 135
F.7. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI 139
F.8. REKENING PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2018 139

Lampiran Laporan Keuangan

- Neraca Percobaan
- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas

djp

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDRAL
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609 ; FAKSIMILE (021) 5734793; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 21 Mei 2019

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Peni Hirjanto

djp

RINGKASAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.313.347.887.239.719,00 atau sebesar 92,23 persen dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp1.423.999.938.462.000,00 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.313.322.214.394.922,00 atau mencapai 92,23 persen dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp25.672.844.797,00 atau mencapai 577,53 persen dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp6.734.369.688.357,00 atau 90,50 persen dari anggarannya sebesar Rp7.441.587.985.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018		31 Desember 2017		% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.423.999.938.462.000	1.313.347.887.239.719	1.283.569.760.793.408	1.151.077.845.435.275	14,10
Belanja	7.441.587.985.000	6.734.369.688.357	6.518.655.742.000	6.234.464.194.451	8,02

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp64.939.453.943.600,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp27.328.146.180.659,00. Aset Tetap sebesar Rp37.462.975.636.990,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp148.332.125.951,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp24.619.816.889.275,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp40.319.637.054.325,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2. berikut:

Tabel I.2.
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / (Turun)
Aset	**64.939.453.943.600**	**64.492.506.435.128**	**0,69**
Aset Lancar	27.328.146.180.659	26.723.372.549.600	2,26
Selain Piutang Perpajakan	336.073.388.931	288.764.978.196	16,38
Piutang Perpajakan Neto	26.992.072.791.728	26.434.607.571.404	2,11
Aset Tetap	37.462.975.636.990	37.611.572.423.959	(0,40)
Piutang Jangka Panjang	-	37.241.243	(100,00)
Aset Lainnya	148.332.125.951	157.524.220.326	(5,84)
Kewajiban	**24.619.816.889.275**	**17.263.042.737.946**	**42,62**
Kewajiban Jangka Pendek	24.619.816.889.275	17.263.042.737.946	42,62
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak (UKPP)	24.604.009.233.369	17.248.585.899.463	42,64
Selain UKPP	15.807.655.906	14.456.838.483	9,34
Ekuitas	**40.319.637.054.325**	**47.229.463.697.182**	**(14,63)**
Ekuitas	40.319.637.054.325	47.229.463.697.182	(14,63)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.285.787.971.176.348,00. Sedangkan jumlah beban operasional pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.133.099.566.831,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2018 senilai Rp1.269.654.871.609.517,00. Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2018 terdapat surplus sebesar Rp135.925.364.123,00 sehingga entitas mengalami surplus LO sebesar Rp1.269.790.796.973.640,00 pada 31 Desember 2018. Pada 31 Desember 2018 surplus LO mengalami kenaikan sebesar Rp126.972.741.239.781,00 dari 31 Desember 2017.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.3. berikut:

Tabel I.3.
Laporan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	**1.285.787.971.176.348**	**1.169.991.635.653.375**	**115.796.335.522.973**	**9,90**
Pendapatan Perpajakan	1.285.775.473.431.374	1.169.977.035.007.202	115.798.438.424.172	9,90
Pendapatan Negara Bukan Pajak	12.497.744.974	14.600.646.173	(2.102.901.199)	(14,40)
Beban Operasional	**16.133.099.566.831**	**27.187.334.603.702**	**(11.054.235.036.871)**	**(40,66)**
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	**1.269.654.871.609.517**	**1.142.804.301.049.673**	**126.850.570.559.844**	**11,10**
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	**5.128.764.701**	**2.829.351**	**5.125.935.350**	**181.170,01**
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**130.796.599.422**	**13.751.854.835**	**117.044.744.587**	**851,12**
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**135.925.364.123**	**13.754.684.186**	**122.170.679.937**	**888,21**
Surplus / (Defisit) – LO	**1.269.790.796.973.640**	**1.142.818.055.733.859**	**126.972.741.239.781**	**11,11**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp47.229.463.697.182,00. Penurunan ekuitas pada 31 Desember 2018 sebesar Rp6.909.826.642.857,00. Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp40.319.637.054.325,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.4.berikut:

Tabel I.4.
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Ekuitas Awal	**47.229.463.697.182**	**23.700.106.897.795**	**23.529.356.799.387**	**99,28**
Surplus/Defisit – LO	**1.269.790.796.973.640**	**1.142.818.055.733.859**	**126.972.741.239.781**	**11,11**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	29.955.816.135.460	25.579.615.548.979	4.376.200.586.481	17,11
Transaksi Antar Entitas	(1.306.656.439.751.957)	(1.144.868.314.483.451)	(161.788.125.268.506)	(14,13)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	**(6.909.826.642.857)**	**23.529.356.799.387**	**(30.439.183.442.244)**	**(129,37)**
Ekuitas Akhir	**40.319.637.054.325**	**47.229.463.697.182**	**(6.909.826.642.857)**	**(14,63)**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

djp

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
			Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A	**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**	**B.2.1.**				
A.1	Penerimaan Perpajakan	B.2.1.2.	1.423.995.493.162.000	1.313.322.214.394.922	92,23	1.151.028.064.274.849
A.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.3.	4.445.300.000	25.672.844.797	577,53	49.781.160.426
A.3	Penerimaan Hibah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN		**1.423.999.938.462.000**	**1.313.347.887.239.719**	**92,23**	**1.151.077.845.435.275**
B	**BELANJA NEGARA**	**B.2.2.**				
B.1	Belanja Pegawai	B.2.2.4.	2.473.721.820.000	2.400.520.430.763	97,04	2.301.811.200.048
B.2	Belanja Barang	B.2.2.5.	3.991.228.444.000	3.792.354.372.694	95,02	3.621.582.600.559
B.3	Belanja Modal	B.2.2.6.	976.637.721.000	541.494.884.900	55,44	311.070.393.844
	JUMLAH BELANJA		**7.441.587.985.000**	**6.734.369.688.357**	**90,50**	**6.234.464.194.451**

djp

NERACA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NERACA
Per 31 Desember 2018 dan 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1.	400.884.959	475.898.919
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2.	32.450.722	11.800.540
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2.1.3.	121.230.933.293	56.899.350.176
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.2.1.4.	255.496.173	566.529.066
Piutang Perpajakan	C.2.1.5.	68.090.740.725.765	54.160.090.238.676
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.2.1.5.	(41.098.667.934.037)	(27.725.482.667.272)
Piutang Perpajakan (Netto)	C.2.1.5.	26.992.072.791.728	26.434.607.571.404
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.6.	121.646.902	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.2.1.6.	(608.235)	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.2.1.6.	121.038.667	-
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi	C.2.1.7.	44.204.985	44.808.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.7.	(221.025)	(224.040)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	C.2.1.7.	43.983.960	44.583.960
Persediaan	C.2.1.8.	213.988.601.157	230.766.815.535
JUMLAH ASET LANCAR		**27.328.146.180.659**	**26.723.372.549.600**
ASET TETAP			
Tanah	C.2.2.1.	30.513.082.118.507	30.560.848.847.468
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2.	5.033.638.332.737	4.888.740.018.318
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3.	6.350.977.037.134	6.295.130.265.102
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4.5.6.	52.401.905.655	50.871.947.750
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.7.8.	4.627.741.604	7.609.789.809
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.9.	151.901.409.029	78.422.698.733
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(4.643.652.907.676)	(4.270.051.143.221)
JUMLAH ASET TETAP		**37.462.975.636.990**	**37.611.572.423.959**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.1.	719.559.620	691.309.821
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.2.3.2.	(719.559.620)	(654.068.578)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.2.3.2.	-	37.241.243
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**-**	**37.241.243**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1.	424.555.022.710	421.503.504.074
Aset Lain-lain	C.2.4.2.	525.172.940.657	461.534.158.232
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.2.4.2.	(801.395.837.416)	(725.513.441.980)
JUMLAH ASET LAINNYA		**148.332.125.951**	**157.524.220.326**
JUMLAH ASET		**64.939.453.943.600**	**64.492.506.435.128**

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1.	14.440.788.207	13.216.148.018
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.2.	24.604.009.233.369	17.248.585.899.463
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.5.3.	965.982.740	757.350.896
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4.	400.884.959	475.898.919
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5.	-	7.440.650
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**24.619.816.889.275**	**17.263.042.737.946**
JUMLAH KEWAJIBAN		**24.619.816.889.275**	**17.263.042.737.946**
EKUITAS			
Ekuitas	C.2.6	40.319.637.054.325	47.229.463.697.182
JUMLAH EKUITAS		**40.319.637.054.325**	**47.229.463.697.182**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**64.939.453.943.600**	**64.492.506.435.128**

djp

LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1.		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1.		
PENDAPATAN PERPAJAKAN	D.1.1.1.		
Penerimaan PPh		731.862.897.059.516	662.384.817.019.592
Penerimaan PPN PPnBM		526.978.008.864.154	479.398.124.117.652
Penerimaan PBB		20.136.546.791.758	17.128.469.834.287
Pendapatan BPHTB		-	1.216.911.547
Penerimaan Pajak Lainnya		6.798.020.715.946	11.064.407.124.124
Jumlah Pendapatan Perpajakan		**1.285.775.473.431.374**	**1.169.977.035.007.202**
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1.1.2.		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		12.497.744.974	14.600.646.173
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		**12.497.744.974**	**14.600.646.173**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**1.285.787.971.176.348**	**1.169.991.635.653.375**
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2.		
Beban Pegawai	D.1.2.1.	2.401.925.173.509	2.298.480.578.507
Beban Persediaan	D.1.2.2.	195.543.375.619	202.211.090.958
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3.	2.229.458.220.539	2.205.074.801.926
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4.	451.407.514.645	458.575.675.037
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5.	705.500.408.520	666.004.355.548
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.1.2.6.	141.109.986.410	153.272.755.475
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7.	611.619.584.470	565.000.069.522
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.8.	9.396.535.303.119	20.638.715.266.729
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**16.133.099.566.831**	**27.187.334.603.702**
SUPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.2	**1.269.654.871.609.517**	**1.142.804.301.049.673**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3		
SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.3.a.		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.b.	8.504.660.305	6.791.422.524
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.c.	3.375.895.604	6.788.593.173
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		**5.128.764.701**	**2.829.351**
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.d.	220.552.696.530	150.467.709.485
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.e.	89.756.097.108	136.715.854.650
Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**130.796.599.422**	**13.751.854.835**
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**135.925.364.123**	**13.754.684.186**
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL		**1.269.790.796.973.640**	**1.142.818.055.733.859**

djp

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	**E.1**	**47.229.463.697.182**	**23.700.106.897.795**
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	E.2	1.269.790.796.973.640	1.142.818.055.733.859
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	29.955.816.135.460	25.579.615.548.979
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	1.628.000	19.569.326
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	945.902.567	25.505.269.581.847
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	(39.269.586.602)	51.051.501.675
LAIN-LAIN	E.4.5	29.994.138.191.495	23.274.896.131
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(1.306.656.439.751.957)	(1.144.868.314.483.451)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**(6.909.826.642.857)**	**23.529.356.799.387**
EKUITAS AKHIR	**E.6**	**40.319.637.054.325**	**47.229.463.697.182**

djp

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.03/2015 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas dan Panas Bumi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 185/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
17. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Keuangan;
18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara Pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak; dan
21. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-72/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Direktorat Jenderal Pajak.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PROFIL, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017, maka kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut.

a. Kedudukan

   Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

b. Tugas Pokok

   Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:

   1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
   2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
   3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
   4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
   5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
   6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
   7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Struktur Organisasi di Direktorat Jenderal Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar V.A.2.a.
Struktur Organisasi DJP



Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 44.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan organisasi terbesar dalam lingkup Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah.

Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini.

1. Kantor Pusat DJP

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut.

a. Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
b. Direktorat Peraturan Perpajakan I, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB.
c. Direktorat Peraturan Perpajakan II, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan bimbingan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
e. Direktorat Penegakan Hukum, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
g. Direktorat Keberatan dan Banding, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang keberatan dan banding.
h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan,dan Hubungan Masyarakat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
j. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
l. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.
m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
n. Direktorat Perpajakan Internasional, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.

o. Direktorat Intelijen Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
p. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
q. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
r. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
s. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

2. Kantor Wilayah DJP

DJP memiliki kantor wilayah (kanwil) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan. Total seluruh Kanwil DJP adalah sebanyak 34 unit. Unit kanwil dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah, DJP memiliki total 352 unit KPP. Jumlah ini bertambah 11 unit KPP dari sebelumnya 341 unit KPP setelah saat mulai operasi (SMO) pada tanggal 1 Oktober 2018. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
b. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing, penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
c. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil (remote) yang tidak terjangkau oleh KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar diseluruh Indonesia terdapat 204 unit.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Di lingkungan DJP terdapat unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;

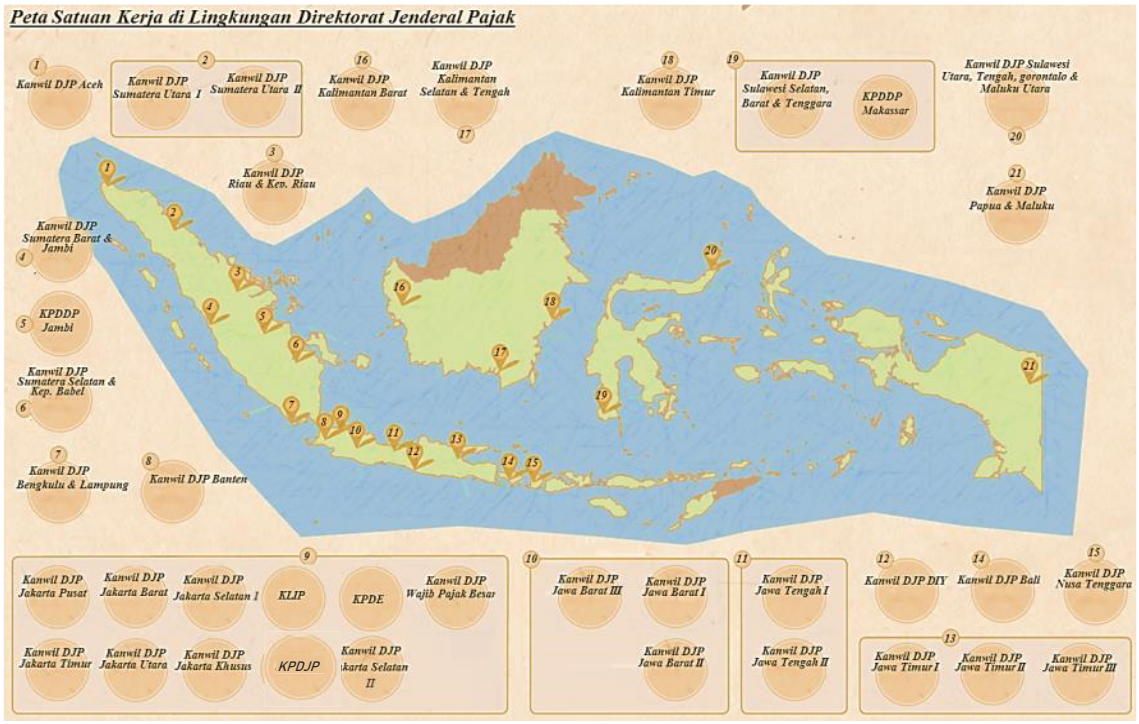
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan di Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
c. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi.
d. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga terjadi penambahan satuan kerja dari semula sejumlah 587 Satuan Kerja (termasuk instansi pusat) pada Tahun 2017 menjadi 596 satuan kerja. Jumlah keseluruhan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.A.2.
Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2018

Jenis	Kanwil DJP	KPP WP Besar	KPP Madya	KPP Pratama	KP2KP	Instansi Pusat dan UPT	Jumlah
Jumlah	34	4	29	319	204	6	596

Gambar V.A.2.b.
Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2018



Berdasarkan PMK 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan negara dari sektor pajak, serta meningkatkan kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak akan ada penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018 sehingga menjadi 34 Kantor Wilayah, 4 KPP Wajib Pajak Besar, 29 KPP Madya, 319 KPP Pratama dan 204 KP2KP.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2019 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker KP2KP dilakukan penggabungan dengan DIPA Satker KPP induknya, sebagaimana telah ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2419/AG/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Namun demikian, penggabungan DIPA tersebut tidak menghapus KP2KP selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

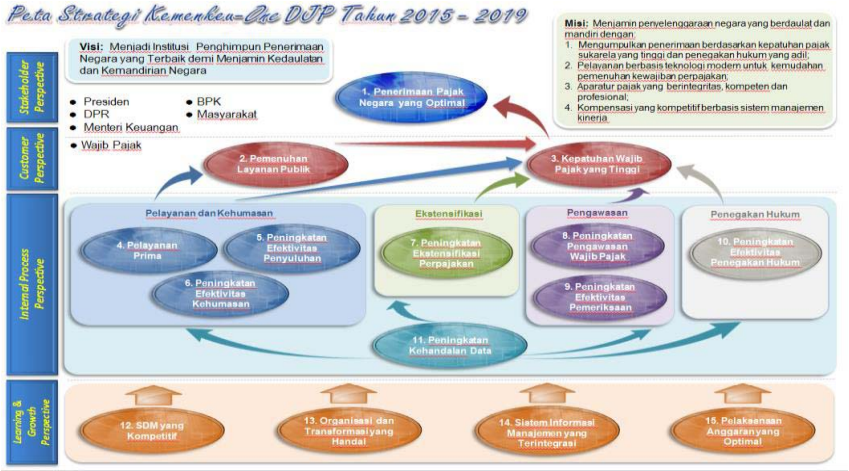
Sehubungan dengan penggabungan DIPA Satker KP2KP, Direktorat Jenderal pajak telah menerbitkan surat edaran nomor 23/PJ/2018 tentang Persiapan Pelaksanaan Penggabungan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kantor Pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Ruang Lingkup Penggabungan DIPA KP2KP meliputi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran, penatausahaan BMN, dan laporan keuangan. Jumlah KP2KP yang digabung DIPAnya ke KPP induknya ditahun 2019 berjumlah 204 KP2KP.

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2010-2015 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2015-2019 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Gambar V.A.2.c.
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2018



Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: Sumber Daya Manusia yang kompetitif, organisasi dan transformasi yang handal, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pelaksanan anggaran yang optimal masing-masing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya, terdiri dari: pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan wajib pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan kehandalan data. Selanjutnya dari proses tersebut ditunjang dengan pemenuhan layanan publik diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah **'Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara'**.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi **'Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan**:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja'.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari Stakeholder, Customer, Internal Process, dan Learning and Growth. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks kepuasan publik atas layanan DJP;
3. Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan;
4. Indeks efektivitas peraturan;
5. Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan;
6. Tingkat efektivitas kehumasan;
7. Persentase penyampaian SPT melalui e-Filing;
8. Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran;
9. Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti;
10. Audit Coverage Ratio;
11. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint audit*;
12. Persentase pencairan piutang pajak;
13. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21);
14. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak;
15. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti;
16. Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti;
17. Persentase data eksternal teridentifikasi;
18. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;
19. Persentase implementasi inisiatif RBTK;
20. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK;
21. Indeks Persepsi Integritas;
22. Tingkat downtime sistem TIK;
23. Persentase kapabilitas tata kelola TIK; dan
24. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran;

Pencapaian terhadap ke-24 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2018 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2018 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp7.441.587.985.000,00.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 596 unit kantor yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.A.3.a. berikut:

Tabel V.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – SAK

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
000	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
000	Kantor Pelayanan Data Eksternal (KPDE)	1
010	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	22
020	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	25
050	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	29
060	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	19
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	13
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	23
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	19
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	23
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	23
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	14
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	15
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	37
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	28
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	13
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	23
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	23
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	9
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	11
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	9
Jumlah		**596**

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 596 unit kantor yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah Satuan Kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel V.A.3.b. berikut:

Tabel V.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
000	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
000	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
000	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
000	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP)	1
000	Kantor Pelayanan Data Eksternal (KPDE)	1
010	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	22
020	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
030	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	20
040	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	25
050	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	29
060	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	27
070	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	21
080	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
090	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	10
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	19
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	13
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	23
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarata	19
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	23
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	23
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	14
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	28
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	15

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan kerja
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	37
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	28
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	13
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	23
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	23
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	9
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	11
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	9
Jumlah		**596**

A.4. BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh kebijakan sebagai berikut:

a. untuk pencatatan Penerimaan Perpajakan Berupa PPh Migas dan Non Migas dalam bentuk valas dan pajak-pajak lainnya yang diterima melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), dokumen yang digunakan antara lain daftar nominatif MPN, SSP, nota kredit Bank Indonesia atau dokumen lain yang dianggap sah;
b. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan PPh Ditanggung Pemerintah antara lain Surat Setoran Pajak (SSP);
c. untuk mencatat penerimaan PPN dan PPnBM, PBB, dan Pendapatan Pajak Lainnya dokumen yang digunakan adalah daftar nominatif penerimaan pajak pada MPN dan dokumen lain yang dianggap sah;
d. dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan PNBP adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan dokumen lain yang dianggap sah;
e. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengembalian pendapatan dalam laporan keuangan berupa Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) yang diperoleh dari KPPN dan masing-masing telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam database MPN, pemotongan SPM, atau database SAI dan PNBP serta pengembalian pendapatan dengan data transaksi dalam SAU.

Pendapatan – Laporan Operasional

Pendapatan-Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

(i) Pengakuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:
   a) Surat Tagihan Pajak;
   b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
   d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;

e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui setelah melewati masa jatuh tempo dari:
   a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
   b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;
   c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
   d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
   e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
   f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
   g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
   h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
   i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
   j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
   k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
   l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
   m) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
   n) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
   o) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas

piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan :

a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d. kualitas macet apabila:
   (i) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
   (ii) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Tabel V.A.6.a
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Penyisihan
Lancar	Penyisihan piutang tak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5‰
Kurang lancar	10% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Diragukan	50% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Macet	100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Secara khusus kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tanggal 25 Januari 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

Menurut PER-39/PJ/2013 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas lancar apabila:
   (i) mempunyai umur piutang sampai dengan 4 bulan dan belum diterbitkan Surat Paksa; atau
   (ii) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.

b. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila:
   (i) mempunyai umur piutang lebih dari 4 bulan sampai dengan 1 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
   (ii) telah diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran/ Penundaan Pembayaran Pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut;
   (iii) telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
   (iv) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa sampai dengan 1 tahun; atau

(v) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

c. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas diragukan apabila:
   (i) mempunyai umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
   (ii) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
   (iii) telah dilaksanakan penyitaan dengan jumlah keseluruhan nilai Barang Sitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan piutang pajak yang menjadi dasar penyitaan yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita;
   (iv) sedang diajukan upaya hukum;
   (v) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dalam proses pailit atau proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

d. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas macet apabila:
   (i) mempunyai umur piutang lebih dari 2 tahun dan belum diterbitkan Surat Paksa;
   (ii) telah diterbitkan Surat Paksa dengan umur Surat Paksa lebih dari 2 tahun;
   (iii) Wajib Pajak berstatus Non Efektif (NE);
   (iv) terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sedang dilakukan proses hukum oleh instansi yang berwenang yang meliputi penyidikan, penyelidikan, ataupun penuntutan terkait tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
   (v) dalam waktu kurang dari 58 hari hak penagihannya akan daluwarsa;
   (vi) hak penagihannya telah daluwarsa; atau
   (vii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan.

e. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 (satu) tahun dan ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.

f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran digolongkan dalam kualitas macet apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun dan belum ada kepastian penyelesaian dari Direktorat Jenderal Anggaran.

g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur piutang pajak sampai dengan 1 (satu) tahun.

h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

i. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun.

j. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak digolongkan dalam kualitas macet apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 5 (lima) tahun.

Penyisihan piutang pajak tidak tertagih ditetapkan sebesar:

a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(i) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan asset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan

(ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Berdasarkan Buletin Teknis 15 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual Untuk renovasi aset milik sendiri jika renovasi tersebut belum selesai pada akhir periode pelaporan maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap.

Untuk renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelapor, jika renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Jika sampai dengan akhir tangal pelaporan renovasi tersebut belum selesai atau belum diserahterimakan maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik. Jika pada akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan ke pemilik maka entitas pelapor akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Apabila dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca entitas pelapor dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Untuk renovasi aset tetap bukan milik-diluar entitas pelaporan, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.6.b
Penggolongan Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNBP pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright)*, paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

a. Penerimaan Perpajakan

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Belanja Negara

a. Belanja Rupiah Murni

b. Belanja PNBP

Penjelasan per pos atas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut dijelaskan dalam subbab selanjutnya.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

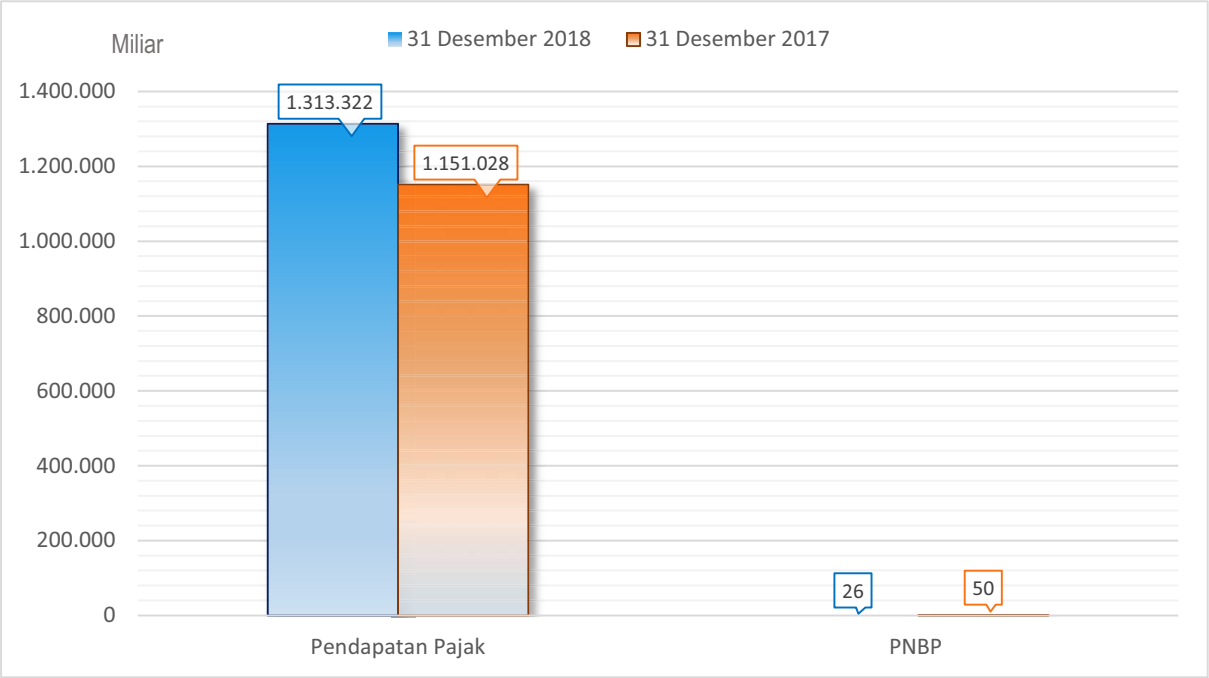
Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.432.222.234.482.300,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp118.874.347.242.581,00 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp1.313.347.887.239.719,00 atau mencapai 92,23 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.423.999.938.462.000,00. Dibandingkan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.151.077.845.435.275,00 maka pendapatan neto Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp162.270.041.804.444,00 atau 14,10 persen. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp162.294.150.120.073,00 dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp24.108.315.629,00.

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Neto Tahun Anggaran 2018 dan 2017 sebagaimana Tabel V.B.2.1. dan Grafik V.B.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak	1.423.995.493.162.000	1.313.322.214.394.922	92,23	1.151.028.064.274.849	14,10
PNBP	4.445.300.000	25.672.844.797	577,53	49.781.160.426	(48,43)
Jumlah	**1.423.999.938.462.000**	**1.313.347.887.239.719**	**92,23**	**1.151.077.845.435.275**	**14,10**

Grafik V.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam miliaran rupiah)



B.2.1.1. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Per Kantor Wilayah

Realisasi Pendapatan Negara yang terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel V.B.2.1.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Negara Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	Turun
Instansi Pusat	10.123.753.757.000	10.120.049.412.982	99,96	8.964.376.199.061	12,89
Kanwil DJP Aceh	5.315.619.752.000	4.477.096.557.007	84,23	4.549.902.687.896	(1,60)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	20.023.581.456.000	21.080.745.847.373	105,28	19.702.651.874.069	6,99
Kanwil DJP Sumatera Utara II	6.004.394.528.000	5.597.241.410.950	93,22	5.263.111.446.892	6,35
Kanwil DJP Riau	17.217.019.201.000	15.890.296.925.577	92,29	20.804.766.456.434	(23,62)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	11.384.923.065.000	10.390.490.329.068	91,27	9.435.108.586.905	10,13
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	16.054.779.447.000	15.188.354.676.118	94,60	13.907.623.028.769	9,21
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	10.443.113.994.000	9.364.258.733.956	89,67	8.460.032.613.702	10,69
Kanwil DJP Jakarta Pusat	78.326.818.617.000	77.509.826.696.046	98,96	69.855.319.682.552	10,96
Kanwil DJP Jakarta Barat	46.294.872.678.000	43.810.760.053.462	94,63	38.292.869.477.527	14,41
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	52.700.276.321.000	56.561.635.579.640	107,33	46.471.873.580.022	21,71
Kanwil DJP Jakarta Timur	26.585.878.159.000	26.970.137.505.591	101,45	21.934.716.326.951	22,96

Nama Satker	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	Turun
Kanwil DJP Jakarta Utara	35.557.772.276.000	35.061.953.051.183	98,61	29.221.738.183.890	19,99
Kanwil DJP Jakarta Khusus	229.437.396.534.000	228.385.065.034.778	99,54	205.746.901.548.784	11,00
Kanwil DJP Banten	50.805.307.004.000	48.778.617.228.913	96,01	41.157.254.841.729	18,52
Kanwil DJP Jawa Barat I	32.431.047.289.000	30.042.099.120.312	92,63	27.084.861.119.258	10,92
Kanwil DJP Jawa Barat II	40.499.680.165.000	41.988.458.602.144	103,68	34.601.659.384.634	21,35
Kanwil DJP Jawa Tengah I	32.167.685.927.000	27.792.751.004.311	86,40	26.390.732.937.270	5,31
Kanwil DJP Jawa Tengah II	12.508.099.480.000	11.773.823.522.941	94,13	10.239.391.432.148	14,99
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	5.484.003.646.000	5.107.621.229.450	93,14	4.456.151.908.049	14,62
Kanwil DJP Jawa Timur I	46.895.935.067.000	42.442.402.121.333	90,50	38.200.570.430.287	11,10
Kanwil DJP Jawa Timur II	21.976.851.248.000	20.572.525.797.516	93,61	18.582.552.150.343	10,71
Kanwil DJP Jawa Timur III	31.537.959.301.000	30.022.205.658.364	95,19	26.579.580.715.715	12,95
Kanwil DJP Kalimantan Barat	7.294.116.475.000	6.596.151.032.607	90,43	5.969.761.599.116	10,49
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	14.639.323.590.000	13.777.072.952.795	94,11	12.152.460.699.241	13,37
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	20.853.992.486.000	20.425.362.823.926	97,94	17.312.684.268.830	17,98
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	14.079.349.775.000	12.942.297.418.148	91,92	11.785.176.247.519	9,82
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	10.138.335.938.000	8.741.137.440.235	86,22	8.367.748.208.930	4,46
Kanwil DJP Bali	10.533.054.816.000	9.846.832.029.873	93,49	8.587.312.742.664	14,67
Kanwil DJP Nusa Tenggara	5.961.211.323.000	5.367.617.731.399	90,04	5.009.712.549.914	7,14
Kanwil DJP Papua dan Maluku	11.716.605.318.000	9.963.495.785.834	85,04	9.698.157.257.989	2,74
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	433.264.566.888.000	471.383.575.042.350	108,80	415.345.913.943.159	13,49
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	29.854.841.038.000	30.002.338.582.500	100,49	23.606.211.280.183	27,10
Kanwil DJP Jawa Barat III	19.196.743.348.000	18.385.538.747.987	95,77	14.509.872.141.928	26,71
Kanwil DJP Kepulauan Riau	6.691.028.555.000	5.862.398.795.631	87,62	-	100,00
Jumlah Penerimaan Bruto	**1.423.999.938.462.000**	**1.432.222.234.482.300**	**100,58**	**1.262.248.757.552.360**	**13,47**
Jumlah Pengembalian Pendapatan	**-**	**118.874.347.242.581**	**-**	**111.170.912.117.085**	**6,93**
Jumlah Penerimaan Neto	**1.423.999.938.462.000**	**1.313.347.887.239.719**	**92,23**	**1.151.077.845.435.275**	**14,10**

*Kanwil DJP Kepulauan Riau merupakan kanwil pecahan dari Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau sehingga belum terdapat penerimaan Tahun 2017

B.2.1.2. Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel IV.B.2.1.2.a. berikut:

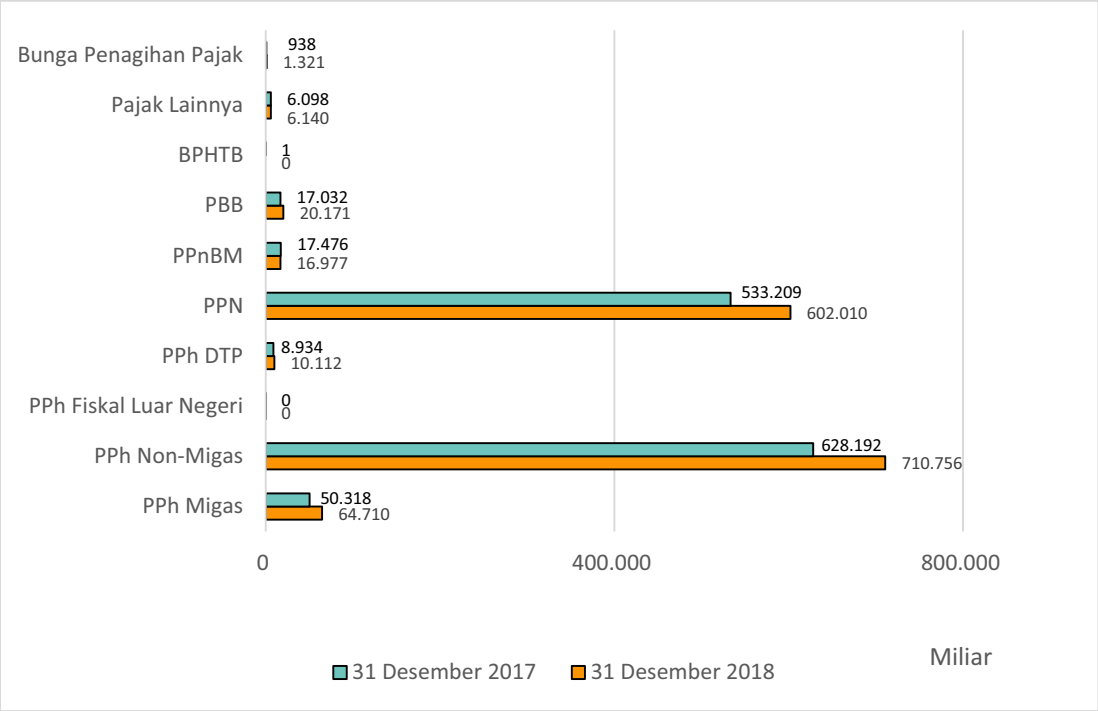
Tabel V.B.2.1.2.a.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan PPh Migas	**38.134.050.000.000**	**64.709.832.784.054**	**169,69**	**50.318.432.979.318**	**28,60**
PPh Minyak Bumi	12.834.823.694.000	26.557.751.498.882	206,92	16.601.827.101.698	59,97
PPh Gas Bumi	25.299.226.306.000	38.118.280.365.523	150,67	33.711.719.503.816	13,07
PPh Migas Lainnya	-	33.800.919.649	100,00	4.886.373.804	591,74
Pendapatan PPh Non-Migas	**806.877.581.104.000**	**710.755.955.624.890**	**88,09**	**628.192.133.552.706**	**13,14**
PPh Pasal 21	164.932.930.000.000	135.067.093.043.566	81,89	117.849.718.307.659	14,61
PPh Pasal 22	19.779.417.828.000	18.088.753.105.986	91,45	16.189.855.805.960	11,73
PPh Pasal 22 Impor	60.914.795.038.000	54.729.591.277.294	89,85	43.158.540.898.555	26,81
PPh Pasal 23	50.883.948.472.000	39.922.502.908.788	78,46	34.718.547.599.346	14,99
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	22.209.410.000.000	9.456.374.480.421	42,58	7.857.702.873.613	20,35
PPh Pasal 25/29 Badan	284.909.436.487.000	285.113.519.423.141	100,07	241.578.210.901.664	18,02
PPh Pasal 26	57.203.006.978.000	52.373.456.397.410	91,56	47.647.035.516.449	9,92
PPh Final	142.645.646.471.000	115.860.172.237.089	81,22	107.043.900.178.915	8,24
PPh Non Migas Lainnya	3.398.989.830.000	144.492.751.195	4,25	12.148.621.470.545	(98,81)
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	**-**	**355.936.972**	**100,00**	**349.728.807**	**1,78**
PPh Fiskal Luar Negeri	-	355.936.972	100,00	349.728.807	1,78
Pendapatan PPh DTP	**10.121.831.058.000**	**10.111.777.655.463**	**99,90**	**8.933.799.207.486**	**13,19**
PPh Pasal 21 DTP	-	12.987.522	100,00	132.161.316	(90,17)
PPh Pasal 22 DTP	-	167.200	100,00	219.978	(23,99)
PPh Pasal 22 Impor DTP	-	-	-	-	-
PPh Pasal 23 DTP	503.387.000	503.900.818	100,10	614.833.045	(18,04)
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi DTP	-	-	-	-	-
PPh Pasal 25/29 Badan DTP	1.902.979.488.000	1.892.910.800.778	99,47	1.702.566.558.147	11,18
Pend. PPh Pasal 26 DTP	8.218.348.183.000	8.218.348.183.000	100,00	7.230.485.435.000	13,66
PPh Final DTP	-	1.616.145	100,00	-	100,00
Pendapatan PPN	**524.198.886.228.000**	**602.009.741.320.789**	**114,84**	**533.208.662.942.911**	**12,90**
PPN Dalam Negeri	344.603.467.748.000	415.485.971.242.335	120,57	384.018.867.804.699	8,19
PPN Impor	179.280.834.931.000	186.403.790.728.258	103,97	149.038.967.341.459	25,07
PPN Lainnya	314.583.549.000	119.979.350.196	38,14	150.827.796.753	(20,45)
Pendapatan PPnBM	**17.602.243.772.000**	**16.977.162.041.044**	**96,45**	**17.476.063.390.643**	**(2,85)**
PPnBM Dalam Negeri	13.320.528.887.000	12.834.095.043.005	96,35	13.572.032.506.035	(5,44)
PPnBM Impor	4.188.953.411.000	4.108.032.880.889	98,07	3.796.753.895.090	8,20
PPnBM Lainnya	92.761.474.000	35.034.117.150	37,77	107.276.989.518	(67,34)
Pendapatan PBB	**17.369.101.000.000**	**20.170.645.388.488**	**116,13**	**17.032.442.445.504**	**18,42**
PBB Perkebunan	1.648.612.667.000	2.213.778.793.077	134,28	2.188.294.019.536	1,16
PBB Kehutanan	364.385.090.000	761.402.519.155	208,96	599.312.405.427	27,05

Uraian	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
PBB Pertambangan Minerba	1.578.290.012.000	2.255.675.736.914	142,92	1.682.212.667.800	34,09
PBB Pertambangan Migas	13.513.597.122.000	14.540.480.330.129	107,60	12.273.800.343.071	18,47
PBB Pertambangan Panas Bumi	264.210.468.000	313.275.381.204	118,57	253.462.867.931	23,60
PBB Lainnya	5.641.000	86.032.628.009	1.525.130,79	35.360.141.739	143,30
Pendapatan BPHTB	**-**	**-**	**-**	**1.216.911.547**	**(100,00)**
BPHTB	-	-	-	1.216.911.547	(100,00)
Pendapatan Pajak Lainnya	**8.261.117.543.000**	**6.139.865.408.491**	**74,32**	**6.098.255.197.160**	**0,68**
Bea Meterai	2.733.140.734.000	1.470.432.796.442	53,80	1.367.224.381.348	7,55
Penjualan Benda Materai	4.614.090.247.000	3.985.405.294.453	86,37	3.715.003.305.722	7,28
PPn Batubara	660.545.114.000	656.409.788.263	99,37	982.575.599.538	(33,19)
Pajak Tidak Langsung Lainnya	253.341.448.000	27.617.529.333	10,90	33.451.910.552	(17,44)
Bunga Penagihan Pajak	**1.430.682.457.000**	**1.321.216.928.463**	**92,35**	**937.604.548.006**	**40,91**
Bunga Penagihan PPh	927.467.870.000	797.113.685.456	85,95	676.053.377.240	17,91
Bunga Penagihan PPN	501.131.035.000	519.797.175.181	103,72	260.855.739.111	99,27
Bunga Penagihan PPnBM	717.759.000	1.166.073.449	162,46	493.203.415	136,43
Bunga Penagihan PTLL	1.365.793.000	3.139.994.377	229,90	202.228.240	1.452,70
Bunga Penagihan PPh DTP	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	**1.423.995.493.162.000**	**1.432.196.553.088.654**	**100,58**	**1.262.198.960.904.088**	**13,47**
Jumlah Pengembalian Pajak	-	**118.874.338.693.732**	-	**111.170.896.629.239**	**6,93**
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	**1.423.995.493.162.000**	**1.313.322.214.394.922**	**92,23**	**1.151.028.064.274.849**	**14,10**

Realisasi penerimaan pajak neto yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1.313.322.214.394.922,00 dan estimasi penerimaan pajak neto untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.423.995.493.162.000,00. Nilai realisasi penerimaan pajak neto sebesar Rp1.313.322.214.394.922,00 pada Aplikasi e-Rekon&LK tidak memperhitungkan akun Pendapatan PBB Pedesaan (411311) sebesar Rp396.446.920,00 dan akun Pendapatan BPHTB (411411) sebesar Rp34.155.863,00, hal tersebut dikarenakan Aplikasi untuk menyusun laporan keuangan tidak mengakomodasi akun tersebut. Pendapatan tersebut di atas berasal dari wajib pajak yang tidak teridentifikasi NPWPnya dan jenis penerimaan tersebut sudah tidak ditatausahakan lagi oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah Pengalihan PBB Pedesaan, Perkotaan dan BPHTB ke Pemerintah Daerah.

Grafik V.B.2.1.2.
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam miliaran rupiah)



Secara umum penerimaan pajak neto di Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp 1.313,32 triliun atau tumbuh 14,10% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan di Tahun Anggaran 2018 ini lebih banyak ditopang oleh masih positifnya kondisi sektoral utama yaitu sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertambangan, dan Jasa Keuangan.
Beberapa kondisi yang turut berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak di Tahun Anggaran 2018, antara lain peningkatan harga komoditas, khususnya hasil tambang, peningkatan impor bahan baku dan barang modal, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pasca program *tax amnesty*, termasuk peningkatan jumlah Wajib Pajak, peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang mengakibatkan meningkatnya nilai ketetapan pajak, peningkatan pembayaran dividen di beberapa sektor usaha dibanding periode yang sama tahun lalu, peningkatan setoran PPh Migas sebagai akibat meningkatnya nilai kurs dan ICP, peningkatan pembayaran gaji di beberapa sektor usaha maupun belanja gaji APBN dan APBD, serta adanya kegiatan pilkada serentak dan pegelaran piala dunia sepak bola juga menyumbang peningkatan aktivitas perekonomian di Indonesia.

Adapun gambaran umum penerimaan beberapa jenis pajak utama pada Tahun Anggaran 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 neto pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp134,91 triliun, tumbuh 14,56% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja Agustus 2018 (67,26%) dibandingkan dengan Agustus 2016 (66,67%). Jumlah penduduk berkerja pada Agustus 2018 adalah 124,01 juta orang, bertambah 2,99 juta orang dari Agustus 2017. Selain itu, jumlah pekerja informal juga mengalami penurunan sebesar 0,19% dibandingkan Agustus 2017.

2) Pajak Penghasilan Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 neto pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp18,01 triliun, tumbuh 11,36% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Pertumbuhan ini ditopang oleh kuatnya kondisi ekonomi secara umum yang mengakibatkan tingginya pertumbuhan setoran Masa (31,81%) dengan kontribusi 51,5% dari total penerimaan PPh Pasal 22.

3) Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor neto pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp54,73 triliun, tumbuh 26,81% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Pertumbuhan yang lebih tinggi dari Tahun 2017 ini ditopang oleh peningkatan impor baik dari segi volume dan nilai transaksi. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga ikut mendorong meningkatnya nilai impor. Peningkatan nilai impor barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal masing-masing sebesar 22,03%, 20,06%, dan 19,54%. Di sisi lain, peningkatan tarif PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 yang mulai berlaku tanggal 13 September 2018 mengakibatkan perlambatan impor di triwulan terakhir, namun penerimaan PPh Pasal 22 Impor mengalami kenaikan.

4) Pajak Penghasilan Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 neto pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp39,74 triliun, tumbuh 16,86% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Pertumbuhan ini ditopang oleh meningkatnya aktivitas utama secara umum pada sektor-sektor utama dan peningkatan jumlah WP Bayar sebanyak 6%. Keberhasilan tindakan *effort* terlihat pada realisasi pembayaran SKP dan STP yang tumbuh 130,76% dari Tahun 2017. Pembagian dividen korporasi pun tetap meningkat mengikuti tren tahun sebelumnya dengan pertumbuhan PPh Pasal 23 atas Dividen mencapai 30,13%.

5) Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP neto pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp9,41 triliun, tumbuh 20,50% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Pertumbuhan ini ditopang oleh positifnya kinerja aktivitas usaha secara umum yang mendukung baiknya setoran masa dan tahunan yang tumbuh di atas pertumbuhan penerimaan pajak nasional.

6) Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan neto pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp252,13 triliun, tumbuh 22,07% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja yang baik dari sektor usaha utama. Tingginya keuntungan selisih kurs akibat melemahnya nilai rupiah mendongkrak kinerja sektor Jasa Keuangan yang tumbuh 16,60%. Sementara kinerja sektor Pertambangan yang meningkat 103,89% ditopang oleh melonjaknya harga komoditas tambang utama. Hasil kegiatan *effort* DJP berupa pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum juga tumbuh sangat baik sebesar 25,75%.

7) Pajak Penghasilan Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 neto pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp50,64 triliun, tumbuh 15,90% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Kinerja yang baik ini disebabkan oleh baiknya pertumbuhan hampir di semua jenis setoran. PPh Pasal 26 atas bunga, jasa, serta SKP dan STP yang mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Tahun 2017. Selain itu, pertumbuhan yang positif ini juga didukung oleh turunnya restitusi hingga 47,37%.

8) Pajak Penghasilan Final

Realisasi penerimaan PPh Final neto pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp115,46 triliun, tumbuh 8,60% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Pertumbuhan ini ditopang oleh mulai meningkatnya suku bunga deposito sejak Juni 2018 yang meningkatkan setoran PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan. Jasa konstruksi menunjukkan peningkatan sebesar sejalan dengan peningkatan PDB nominal Konstruksi. Setoran PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan, yang mengalami pertumbuhan negatif di Tahun 2017, mencatat percepatan pertumbuhan sebesar 2,32% sebagai dampak meningkatnya indeks harga dan permintaan terhadap properti komersial. Di sisi lain, penurunan tarif PPh Final atas Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu sejak 1 Juli 2018, meskipun mampu menumbuhkan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran, mengakibatkan PPh Final untuk setoran jenis ini mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -2,40%.

9) Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPN DN neto pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp333,92 triliun, tumbuh 6,23% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Pertumbuhan positif ini ditopang oleh baiknya konsumsi dalam negeri baik oleh pemerintah ataupun rumah tangga. Meskipun demikian, pertumbuhan PPN DN ini lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan Tahun 2017. Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan PPN Impor yang menjadi kredit pajak serta kebijakan percepatan restitusi yang mulai berlaku di bulan April 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 menyebabkan meningkatnya restitusi PPN baik dari segi nilai ataupun jumlah WP penerimanya. Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan restitusi meningkat sampai 34,07%(y-o-y) di semester kedua, dan secara keseluruhan, restitusi tumbuh 17,11% di Tahun 2018.

10) Pajak Pertambahan Nilai Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor neto pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp186,39 triliun, tumbuh 25,07% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Sejalan dengan kinerja PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor juga mencatat pertumbuhan positif karena tingginya volume dan nilai impor di Tahun 2018, serta depresiasi nilai rupiah yang ikut menambah besaran nilai impor. Pertumbuhan ini juga didukung oleh meningkatnya kinerja *effort* yang tercermin dari meningkatnya penerimaan dari SKPKB sebesar 603,52%. Akan tetapi, kinerja positif ini cukup tertahan dengan meningkatnya restitusi sebesar 119,18%.

11) Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Realisasi penerimaan PPnBM neto pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp16,88 triliun, turun 1,85% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Jika dirinci lebih lanjut, PPnBM DN mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,74% dan PPnBM Impor mencatat pertumbuhan positif sebesar 8,20%. Pertumbuhan negatif PPnBM DN disebabkan oleh melemahnya penjualan jenis mobil yang terutang PPnBM serta menurunnya hasil pemeriksaan dan penagihan sebesar -69,11%. Sedangkan pertumbuhan positif PPnBM Impor ditopang oleh meningkatnya volume dan nilai impor barang mewah serta depresiasi nilai rupiah terhadap dollar AS.

12) Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi penerimaan PBB neto pada Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp19,44 triliun, tumbuh 15,95% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Pertumbuhan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja di Tahun 2017 yang mencatat pertumbuhan negatif. Kontribusi penerimaan PBB terbesar datang dari sektor pertambangan yang secara umum sektoral mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi di Tahun 2018.

13) Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya pada Tahun Anggaran 2018 mencatat pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017. Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan pertumbuhan negatif di Tahun 2017. Realisasi penerimaan Pajak Lainnya sebagian besar didominasi oleh Bea Meterai dan Penjualan Benda Meterai yang keduanya mengalami pertumbuhan sebesar 7,55% dan 7,28% di Tahun 2018 dan mampu mengimbangi penurunan penerimaan dari PPn Batubara dan Bunga Penagihan PPh.

Penerimaan Pajak Dalam Negeri per Kantor Wilayah dapat dilihat pada Tabel V.B.2.1.2.b. berikut:

Tabel V.B.2.1.2.b.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	Turun
Instansi Pusat	10.121.831.058.000	10.113.615.196.530	99,92	8.933.666.779.147	13,21
Kanwil DJP Aceh	5.315.576.974.000	4.476.846.212.814	84,22	4.549.802.742.030	(1,60)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	20.023.523.310.000	21.080.187.987.402	105,28	19.702.401.071.841	6,99
Kanwil DJP Sumatera Utara II	6.004.354.612.000	5.597.026.568.541	93,22	5.262.782.123.627	6,35
Kanwil DJP Riau	17.216.951.233.000	15.890.072.153.638	92,29	20.804.520.867.545	(23,62)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	11.384.858.192.000	10.389.891.679.418	91,26	9.434.625.115.516	10,13
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	16.054.645.570.000	15.186.506.753.518	94,59	13.906.820.222.319	9,20
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	10.443.036.961.000	9.363.958.869.276	89,67	8.459.455.437.175	10,69
Kanwil DJP Jakarta Pusat	78.326.753.180.000	77.509.313.574.181	98,96	69.854.760.115.426	10,96
Kanwil DJP Jakarta Barat	46.294.778.767.000	43.810.504.228.345	94,63	38.292.442.553.607	14,41
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	52.700.085.837.000	56.561.482.481.918	107,33	46.471.528.142.536	21,71
Kanwil DJP Jakarta Timur	26.585.774.302.000	26.969.960.857.212	101,45	21.934.465.316.247	22,96
Kanwil DJP Jakarta Utara	35.557.710.712.000	35.061.715.117.054	98,61	29.221.484.868.384	19,99
Kanwil DJP Jakarta Khusus	229.437.299.229.000	228.384.232.616.829	99,54	205.746.510.307.990	11,00
Kanwil DJP Banten	50.805.211.765.000	48.778.091.134.790	96,01	41.156.809.737.670	18,52
Kanwil DJP Jawa Barat I	32.430.870.564.000	30.041.322.327.198	92,63	27.084.266.944.714	10,92
Kanwil DJP Jawa Barat II	40.499.624.330.000	41.987.651.399.614	103,67	34.601.210.894.933	21,35
Kanwil DJP Jawa Tengah I	32.167.579.948.000	27.792.185.519.303	86,40	26.389.849.562.372	5,31
Kanwil DJP Jawa Tengah II	12.508.049.536.000	11.772.519.869.795	94,12	10.238.838.785.085	14,98
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	5.483.972.797.000	5.107.237.718.117	93,13	4.455.693.529.925	14,62
Kanwil DJP Jawa Timur I	46.895.802.576.000	42.441.233.009.632	90,50	38.197.328.784.722	11,11
Kanwil DJP Jawa Timur II	21.976.754.172.000	20.571.989.815.981	93,61	18.582.044.995.789	10,71
Kanwil DJP Jawa Timur III	31.537.903.491.000	30.021.014.054.460	95,19	26.578.975.862.923	12,95
Kanwil DJP Kalimantan Barat	7.294.089.818.000	6.595.736.188.952	90,43	5.969.247.546.872	10,50
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	14.639.285.326.000	13.776.715.820.514	94,11	12.152.311.711.077	13,37

Nama Satker	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	Turun
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	20.853.958.958.000	20.424.813.050.152	97,94	17.312.267.763.402	17,98
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	14.079.229.306.000	12.941.428.388.873	91,92	11.784.773.178.836	9,81
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	10.138.303.536.000	8.740.425.629.234	86,21	8.367.459.484.140	4,46
Kanwil DJP Bali	10.532.984.643.000	9.846.591.104.518	93,48	8.587.049.989.549	14,67
Kanwil DJP Nusa Tenggara	5.961.149.641.000	5.366.761.069.477	90,03	5.006.697.264.202	7,19
Kanwil DJP Papua dan Maluku	11.716.547.496.000	9.963.200.350.368	85,04	9.697.749.290.655	2,74
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	433.264.553.607.000	471.383.217.265.254	108,80	415.345.783.804.348	13,49
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	29.854.764.736.000	30.001.931.356.392	100,49	23.605.802.140.667	27,10
Kanwil DJP Jawa Barat III	19.196.662.998.000	18.384.814.480.670	95,77	14.509.533.968.817	26,71
Kanwil DJP Kepulauan Riau	6.691.013.981.000	5.862.359.238.684	87,62	0	100,00
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	**1.423.995.493.162.000**	**1.432.196.553.088.654**	**100,58**	**1.262.198.960.904.088**	**13,47**
Jumlah Pengembalian Pajak	**-**	**118.874.338.693.732**	**-**	**111.170.896.629.239**	**6,93**
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	**1.423.995.493.162.000**	**1.313.322.214.394.922**	**92,23**	**1.151.028.064.274.849**	**14,10**

B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

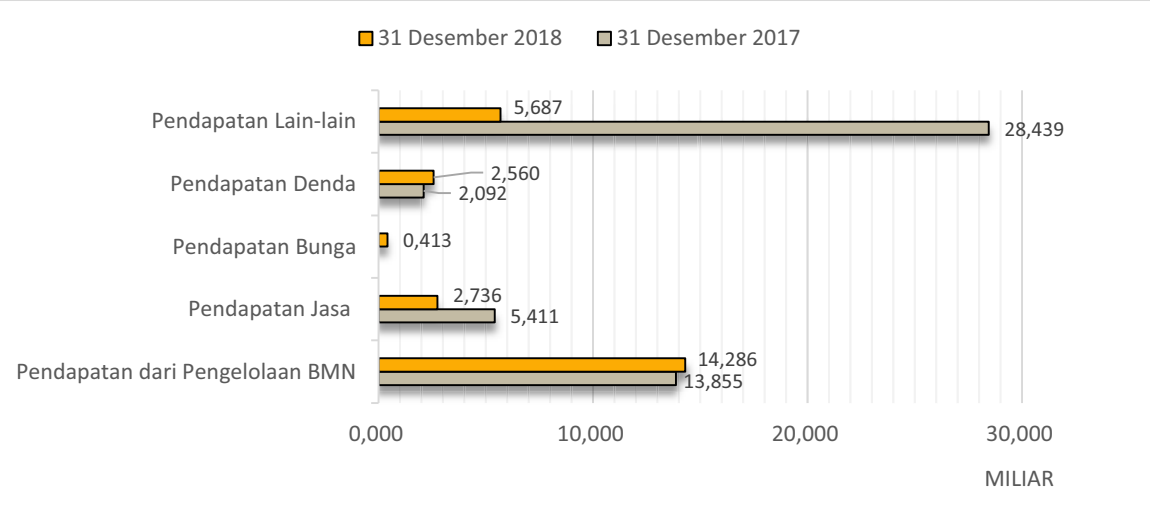
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp25.672.844.797,00 atau 577,53 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.445.300.000,00. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah sebagaimana Tabel V.B.2.1.3. dan Grafik V.B.2.1.3 berikut:

Tabel V.B.2.1.3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	Naik/
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	(Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	**832.080.000**	**14.286.278.047**	**1.716,94**	**13.854.512.825**	**3,12**
Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	21.255.000	104.919.620	493,62	-	**100,00**
Penjualan Lainnya	-	-	-	101.025.464	**(100,00)**
dari Penjualan Tanah. Gedung. dan Bangunan	1.776.000	10.912.500	614,44	51.824.500	**(78,94)**
dari Penjualan Peralatan dan Mesin	6.581.000	2.492.582.999	100,00	864.901.031	**188,19**
dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	215.625.000	6.001.164.806	2.783,15	5.874.696.993	**2,15**
Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	586.707.000	5.669.327.951	966,30	3.951.386.027	**43,48**
Sewa Peralatan dan Mesin	108.000	-	0,00	-	**100,00**
dari Pemanfaatan BMN Lainnya	28.000	7.370.171	100,00	3.010.678.810	**(99,76)**
Pendapatan Jasa Lainnya	**-**	**361.929.005**	**100,00**	**2.905.260.829**	**(87,54)**
Jasa Lainnya	-	361.929.005	100,00	2.905.260.829	**(87,54)**
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	**1.352.145.000**	**2.786.932.751**	**206,11**	**3.176.100.494**	**(12,25)**
Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	180.372.000	5.857.872	3,25	14.052.919	**(58,32)**
Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	-	0,00	1.388.112	**(100,00)**

Uraian	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	Naik/
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	(Turun) %
Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	1.028.805.000	2.368.096.627	230,18	2.491.262.422	**(4,94)**
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	123.530.000	412.796.434	334,17	658.515.225	**(37,31)**
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	19.438.000	181.818	0,94	10.881.816	**(98,33)**
Pendapatan Denda	**11.485.000**	**2.559.690.199**	**22.287,25**	**2.092.074.758**	**22,35**
Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	11.485.000	1.384.123.720	12.051,58	2.092.074.758	**(33,84)**
Denda Lainnya	-	1.175.566.479	100,00	-	**100,00**
Pendapatan Lain-Lain	**2.249.590.000**	**5.686.563.644**	**252,78**	**27.768.699.366**	**(79,52)**
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	6.636.000	878.455.498	13.237,73	1.108.989.945	**(20,79)**
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	140.779.000	2.038.795.471	100,00	6.384.012.318	**(68,06)**
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	503.201.259	100,00	19.319.179.237	**(97,40)**
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	319.646.000	737.120.918	230,61	829.176.396	**(11,10)**
Anggaran Lain-lain	1.782.529.000	1.528.990.498	85,78	127.341.470	**1.100,70**
Jumlah PNBP Bruto	**4.445.300.000**	**25.681.393.646**	**577,72**	**49.796.648.272**	**(48,43)**
Jumlah Pengembalian PNBP		**8.548.849**		**15.487.846**	(44,80)
Jumlah PNBP Neto	**4.445.300.000**	**25.672.844.797**	**577,53**	**49.781.160.426**	**(48,43)**

Grafik V.B.2.1.3.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam miliaran rupiah)



B.2.1.4. Pengembalian Pendapatan Negara

Dari total penerimaan yang telah disebutkan diatas, pada Tahun Anggaran 2018 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp118.874.347.242.581,00. Pengembalian pendapatan tersebut terdiri dari pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp118.874.338.693.732,00 dan pengembalian pendapatan PNBP sebesar Rp8.548.849,00. Total pengembalian pendapatan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017

sebesar Rp111.170.912.117.085,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.703.435.125.496,00 atau sebesar 6,93 persen.

Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (*recurring*), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian. Pengembalian Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah sebagaimana Tabel V. B.2.1.4. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.
Pengembalian Pendapatan Negara
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Pajak	118.874.338.693.732	111.170.896.629.239	7.703.442.064.493	6,93
Pengembalian PNBP	8.548.849	15.487.846	(6.938.997)	(44,80)
Jumlah	**118.874.347.242.581**	**111.170.912.117.085**	**7.703.435.125.496**	**6,93**

Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

B.2.1.4.a. Pengembalian Pendapatan Pajak

Pengembalian Pendapatan Pajak per jenis penerimaan sebagaimana Tabel V.B.2.1.4.a. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
PPh Migas	42.985.833	2.678.108.534	(2.635.122.701)	(98,39)
PPh Non-Migas	35.591.602.053.412	40.647.047.070.536	(5.055.445.017.124)	(12,44)
PPh Fiskal Luar Negeri	23.617.200	0	23.617.200	100,00
PPh DTP	22.065.014	0	22.065.014	100,00
PPN	81.626.294.137.842	69.681.798.219.323	11.944.495.918.519	17,14
PPnBM	99.456.209.740	279.893.523.410	(180.437.313.670)	(64,47)
PBB	726.127.950.650	262.095.508.348	464.032.442.302	177,05
Pajak Lainnya	38.948.000	60.000.000	(21.052.000)	(35,09)
Bunga Penagihan Pajak	830.730.726.041	297.324.199.088	533.406.526.953	179,40
Jumlah	**118.874.338.693.732**	**111.170.896.629.239**	**7.703.442.064.493**	**6,93**

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp118.874.338.693.732,00 serta pengembalian pendapatan pajak periode-periode sebelumnya merupakan produk dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengembalian Pendapatan Pajak per Kantor Wilayah dijelaskan sebagaimana Tabel V.B.2.1.4.1.b. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.1.b.
Pengembalian Pendapatan Pajak Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik/
	Realisasi	Realisasi	Turun
Instansi Pusat	0	0	0,00
Kanwil DJP Aceh	115.238.946.102	132.873.141.960	(13,27)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	3.880.140.404.968	3.046.454.006.324	27,37
Kanwil DJP Sumatera Utara II	466.210.116.967	363.930.690.468	28,10
Kanwil DJP Riau	1.171.587.103.014	1.032.144.978.501	13,51
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	831.391.185.900	479.066.357.081	73,54
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	2.006.816.005.249	1.382.138.347.320	45,20
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	220.914.769.136	224.219.209.380	(1,47)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	10.816.843.406.506	6.895.287.188.302	56,87
Kanwil DJP Jakarta Barat	2.164.068.139.235	1.518.069.740.372	42,55
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	6.366.259.024.943	4.141.162.091.315	53,73
Kanwil DJP Jakarta Timur	1.158.303.460.172	1.156.351.745.595	0,17
Kanwil DJP Jakarta Utara	1.085.933.149.842	1.316.261.169.377	(17,50)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	18.456.059.807.319	21.308.344.244.938	(13,39)
Kanwil DJP Banten	2.503.785.612.273	1.862.792.827.989	34,41
Kanwil DJP Jawa Barat I	1.680.062.485.141	1.417.356.134.960	18,53
Kanwil DJP Jawa Barat II	2.599.118.070.036	2.800.372.793.567	(7,19)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.129.930.071.720	807.542.340.483	39,92
Kanwil DJP Jawa Tengah II	350.730.229.336	239.886.223.929	46,21
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	110.228.484.828	87.658.981.397	25,75
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.658.260.093.119	1.157.324.202.572	43,28
Kanwil DJP Jawa Timur II	1.414.240.185.818	1.285.231.802.851	10,04
Kanwil DJP Jawa Timur III	462.296.072.848	456.631.919.791	1,24
Kanwil DJP Kalimantan Barat	132.628.342.076	161.706.547.812	(17,98)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	610.689.884.699	464.729.288.801	31,41
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	1.242.356.352.064	1.060.812.516.665	17,11
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	444.421.514.420	514.688.000.491	(13,65)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	146.242.657.955	174.225.103.131	(16,06)
Kanwil DJP Bali	268.516.717.042	212.184.063.752	26,55
Kanwil DJP Nusa Tenggara	87.699.920.893	119.183.372.339	(26,42)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	421.169.317.953	277.261.192.838	51,90
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	52.407.504.200.035	53.570.292.692.877	(2,17)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	1.752.189.009.587	1.266.829.204.247	38,31
Kanwil DJP Jawa Barat III	548.816.988.837	237.884.507.814	130,71
Kanwil DJP Kepulauan Riau	163.686.963.699	0	100,00
Jumlah Pengembalian Pajak	**118.874.338.693.732**	**111.170.896.629.239**	**6,93**

*Kanwil DJP Kepulauan Riau merupakan kanwil pecahan dari Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau sehingga pada Tahun 2017 belum terdapat pengembalian pajak

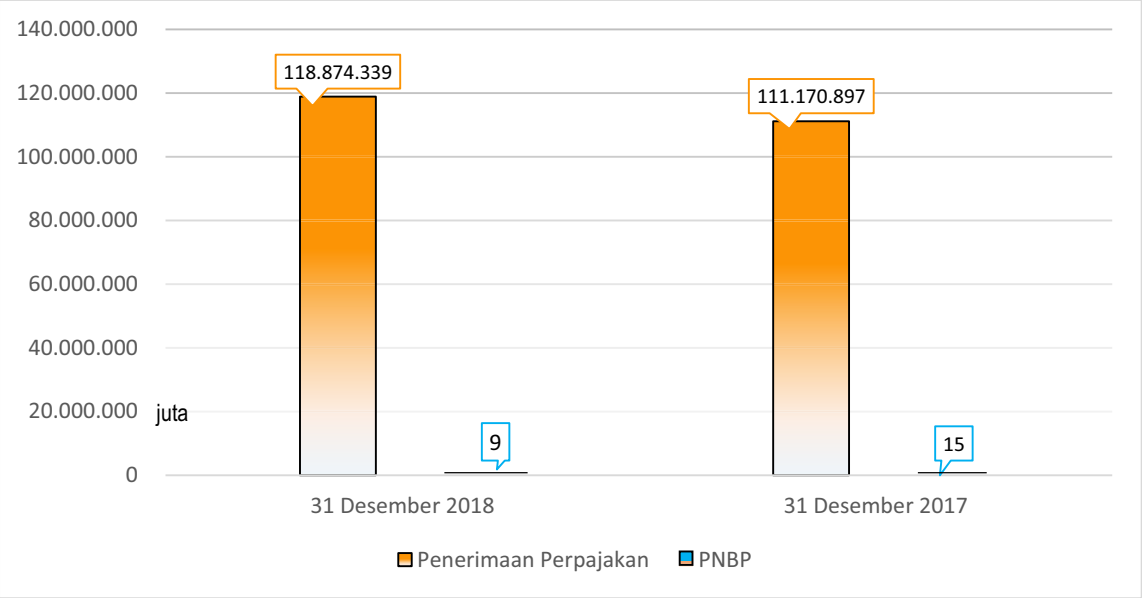
B.2.1.4.b Pengembalian Pendapatan PNBP

Pengembalian Pendapatan PNBP per jenis penerimaan sebagaimana Tabel V.B.2.1.4. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.
Pengembalian Pendapatan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	7.675.616	0	7.675.616	100,00
Lain-lain	873.233	15.487.846	(14.614.613)	(94,36)
Jumlah	**8.548.849**	**15.487.846**	**(6.938.997)**	**(44,80)**

Grafik V.B.2.1.4.
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



B.2.2. Belanja Negara

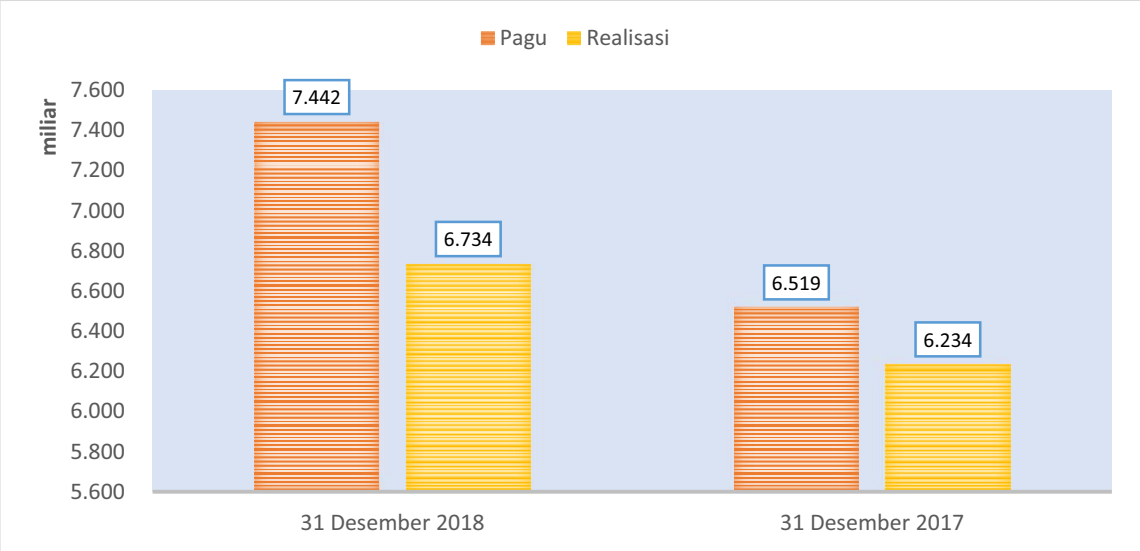
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan ekonomis namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit kantor wilayah, dan jenis belanja.

B.2.2.1. Belanja

Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan pengembalian belanja adalah sebesar Rp6.734.369.688.357,00 atau 90,50 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp7.441.587.985.000,00. Realisasi belanja neto Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp499.905.493.906,00 atau 8,02 persen dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2017 sebesar

Rp6.234.464.194.451,00. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp98.709.230.715,00, Belanja Barang sebesar Rp170.771.772.135,00 dan Belanja Modal sebesar Rp230.424.491.056,00. Kenaikan realisasi belanja disebabkan oleh tercapainya keluaran riil pada Satuan Kerja serta adanya optimalisasi dan efisiensi anggaran. Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2018 dan 2017 sebagaimana Grafik V.B.2.2.1 berikut:

Grafik V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam miliaran rupiah)



Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Rupiah Murni	7.441.352.425.000	6.734.244.385.527	90,50	6.230.847.774.048	8,08
Hibah Luar Negeri	235.560.000	125.302.830	53,19	3.616.420.403	(96,54)
Jumlah	**7.441.587.985.000**	**6.734.369.688.357**	**90,50**	**6.234.464.194.451**	**8,02**

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.2. berikut:

Tabel V.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat	2.611.136.071.000	2.135.966.980.346	81,80	1.953.585.621.964	9,34
Kanwil DJP Aceh	95.745.268.000	90.878.321.218	94,92	81.484.940.055	11,53
Kanwil DJP Sumatera Utara I	128.258.030.000	123.863.418.759	96,57	118.536.927.501	4,49
Kanwil DJP Sumatera Utara II	103.041.384.000	99.199.153.750	96,27	94.897.381.131	4,53
Kanwil DJP Riau	136.376.966.000	130.328.328.064	95,56	173.534.675.071	(24,90)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	130.431.836.000	126.030.608.416	96,63	116.832.681.995	7,87
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	166.742.385.000	159.688.306.736	95,77	181.120.355.581	(11,83)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	116.122.139.000	113.820.827.158	98,02	105.266.368.540	8,13
Kanwil DJP Jakarta Pusat	194.489.419.000	182.980.244.271	94,08	179.127.104.545	2,15
Kanwil DJP Jakarta Barat	147.464.050.000	140.878.914.989	95,53	124.790.424.906	12,89
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	112.635.465.000	104.882.248.520	93,12	104.563.118.867	0,31
Kanwil DJP Jakarta Timur	117.693.688.000	113.042.735.563	96,05	107.964.649.661	4,70
Kanwil DJP Jakarta Utara	124.973.427.000	116.932.275.761	93,57	93.623.479.730	24,90
Kanwil DJP Jakarta Khusus	155.453.363.000	149.832.635.354	96,38	144.463.405.067	3,72
Kanwil DJP Banten	176.906.065.000	167.997.154.041	94,96	154.941.202.577	8,43
Kanwil DJP Jawa Barat I	223.615.533.000	214.831.412.534	96,07	186.043.404.874	15,47
Kanwil DJP Jawa Barat II	141.665.155.000	136.873.250.257	96,62	125.984.120.448	8,64
Kanwil DJP Jawa Tengah I	199.981.659.000	192.683.275.288	96,35	189.259.696.142	1,81
Kanwil DJP Jawa Tengah II	166.644.489.000	159.401.371.094	95,65	151.898.672.799	4,94
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	77.001.974.000	71.905.739.015	93,38	75.421.564.770	(4,66)
Kanwil DJP Jawa Timur I	143.413.772.000	138.303.267.129	96,44	136.092.807.129	1,62
Kanwil DJP Jawa Timur II	175.475.428.000	170.657.583.467	97,25	161.208.088.710	5,86
Kanwil DJP Jawa Timur III	179.982.679.000	172.608.674.789	95,90	166.918.191.360	3,41
Kanwil DJP Kalimantan Barat	93.232.925.000	87.465.774.090	93,81	72.670.166.643	20,36
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	136.977.506.000	130.455.827.392	95,24	111.228.940.370	17,29
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	134.399.544.000	127.727.478.726	95,04	104.160.698.433	22,63
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	217.768.476.000	205.938.436.300	94,57	193.748.132.967	6,29
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	147.748.495.000	141.123.905.036	95,52	140.344.933.255	0,56
Kanwil DJP Bali	102.057.097.000	95.370.388.272	93,45	91.826.067.709	3,86
Kanwil DJP Nusa Tenggara	142.795.651.000	133.685.699.184	93,62	130.690.837.416	2,29
Kanwil DJP Papua dan Maluku	128.414.434.000	120.162.499.857	93,57	115.058.810.802	4,44
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	99.828.285.000	95.534.900.376	95,70	85.069.445.337	12,30
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	125.534.575.000	116.827.064.852	93,06	111.694.137.691	4,60
Kanwil DJP Jawa Barat III	209.580.142.000	192.220.589.932	91,72	150.413.140.405	27,80
Kanwil DJP Kepulauan Riau	78.000.610.000	74.270.397.821	95,22	-	100,00
Jumlah Belanja	**7.441.587.985.000**	**6.734.369.688.357**	**90,50**	**6.234.464.194.451**	**8,02**

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

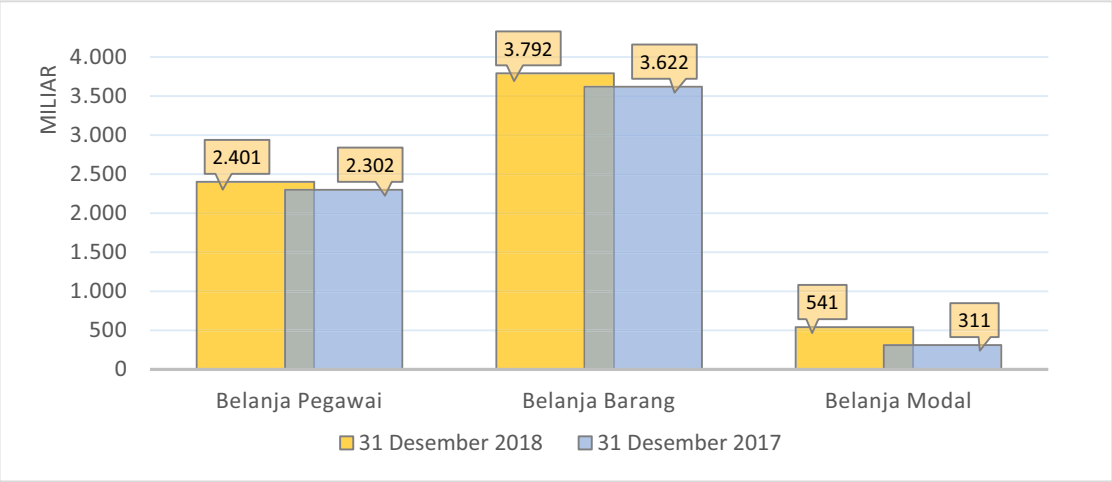
Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi Belanja neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel V.B.2.2.3. berikut:

Tabel V.B.2.2.3.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

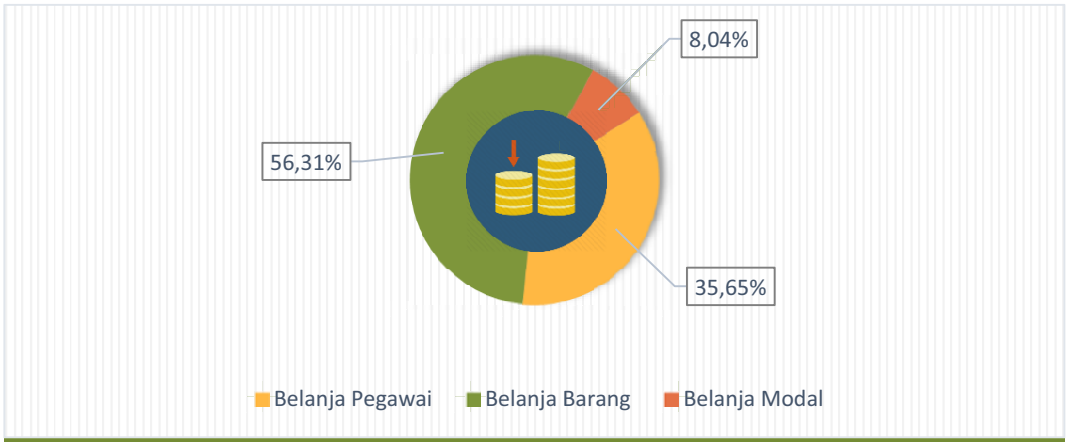
Uraian	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	2.473.721.820.000	2.400.520.430.763	97,04	2.301.811.200.048	4,29
Belanja Barang	3.991.228.444.000	3.792.354.372.694	95,02	3.621.582.600.559	4,72
Belanja Modal	976.637.721.000	541.494.884.900	55,44	311.070.393.844	74,07
Jumlah	**7.441.587.985.000**	**6.734.369.688.357**	**90,50**	**6.234.464.194.451**	**8,02**

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2017 sebagaimana Grafik V.B.2.2.3.a. dan komposisi realisasi belanja sebagaimana Grafik V.B.2.2.3.b.berikut:

Grafik V.B.2.2.3.a.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam miliaran rupiah)



Grafik V.B.2.2.3.b.
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2018



B.2.2.4. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp2.400.520.430.763,00 yang berarti 97,04 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.473.721.820.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp98.709.230.715,00 atau 4,29 persen dari Tahun Anggaran 2017.

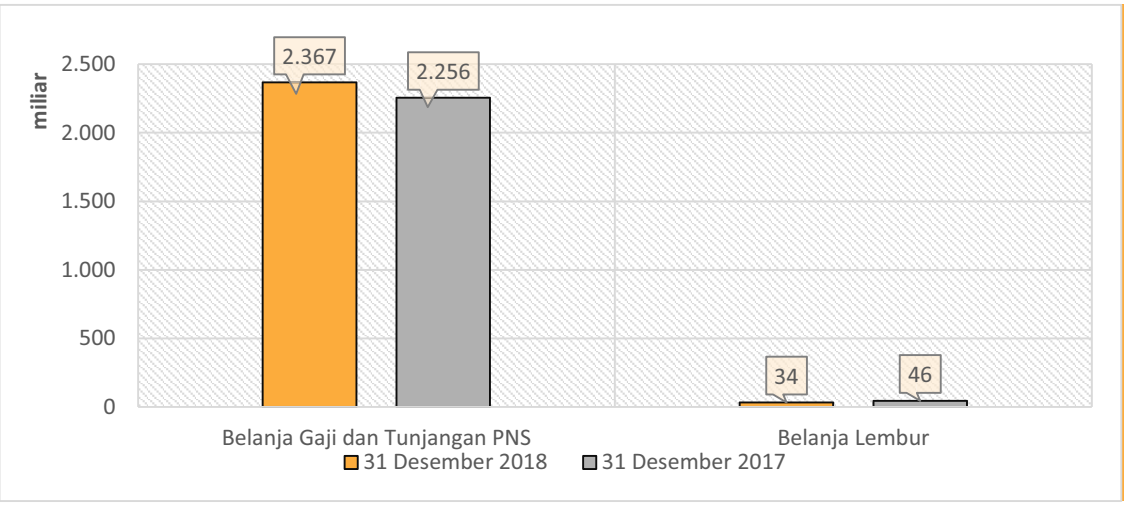
Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Tabel V.B.2.2.4. berikut:

Tabel V.B.2.2.4.
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	**2.421.494.850.000**	**2.366.613.293.891**	**97,73**	**2.255.741.167.570**	**4,92**
Belanja Gaji Pokok PNS	1.698.379.293.000	1.677.056.610.593	**98,74**	1.632.425.516.751	**2,73**
Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.413.000	25.986.972	**77,78**	25.097.408	**3,54**
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	110.151.382.000	107.299.535.861	**97,41**	97.523.301.046	**10,02**
Belanja Tunj. Anak PNS	34.172.530.000	32.968.729.900	**96,48**	29.876.859.688	**10,35**
Belanja Tunj. Struktural PNS	46.443.615.000	44.735.675.820	**96,32**	42.056.199.840	**6,37**
Belanja Tunj. Fungsional PNS	43.978.456.000	42.396.435.000	**96,40**	36.378.320.000	**16,54**
Belanja Tunj. PPh PNS	3.822.028.000	1.682.324.913	**44,02**	2.297.316.875	**(26,77)**
Belanja Tunj. Beras PNS	90.895.579.000	87.769.522.954	**96,56**	85.922.793.110	**2,15**
Belanja Uang Makan PNS	305.747.505.000	291.781.757.729	**95,43**	255.642.263.685	**14,14**
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	232.250.000	197.150.000	**84,89**	215.725.000	**(8,61)**
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	2.848.920.000	2.784.895.000	**97,75**	2.775.440.000	**0,34**
Belanja Tunj. Lain-lain	1.084.000	-	**0,00**	-	**0,00**
Belanja Tunjangan Umum PNS	84.788.795.000	77.914.669.149	**91,89**	70.602.334.167	**10,36**
Belanja Lembur	**52.226.970.000**	**33.907.136.872**	**64,92**	**46.070.032.478**	**(26,40)**
Belanja Uang Lembur	52.226.970.000	33.907.136.872	**64,92**	46.070.032.478	**(26,40)**
Realisasi Belanja Pegawai Neto	**2.473.721.820.000**	**2.400.520.430.763**	**97,04**	**2.301.811.200.048**	**4,29**

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp98.709.230.715,00 atau 4,29 persen dari Tahun Anggaran 2017 terjadi karena penambahan jumlah pegawai selama Tahun 2018.

Grafik V.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam miliaran rupiah)



B.2.2.5. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Neto Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp3.792.354.372.694,00 atau 95,02 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.991.228.444.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp170.771.772.135,00 atau 4,72 persen dari Tahun Anggaran 2017. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Tabel V.B.2.2.5. berikut:

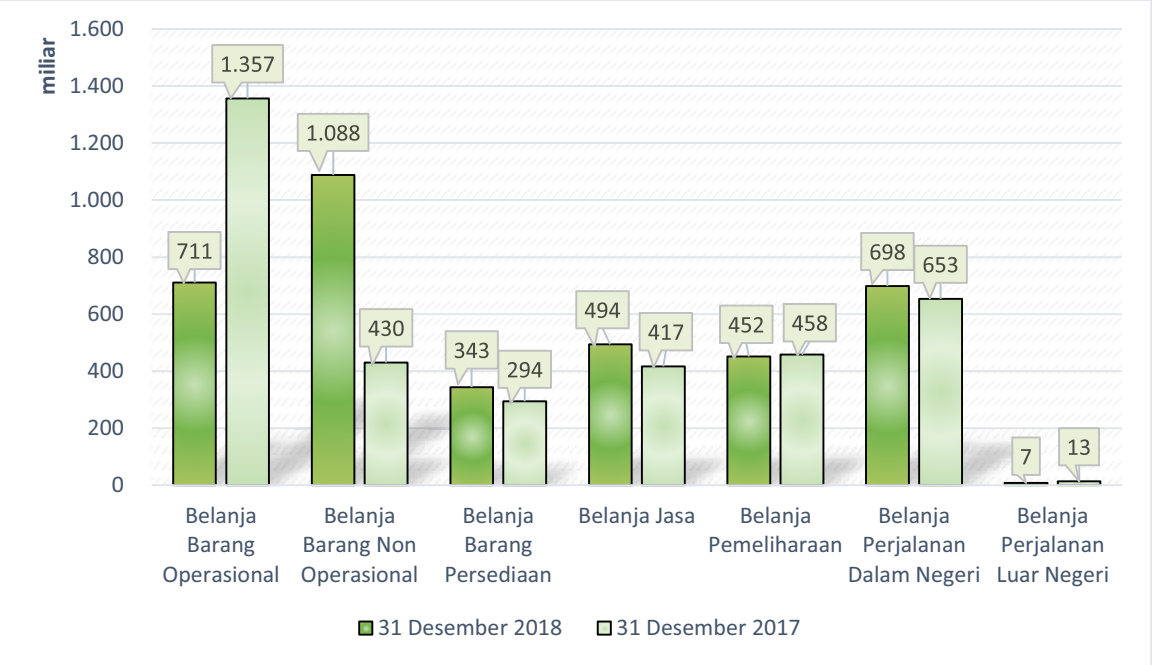
Tabel V.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Barang Operasional	**739.934.940.000**	**710.727.271.570**	**96,05**	**1.357.212.918.173**	**(47,63)**
Belanja Keperluan Perkantoran	414.235.374.000	403.634.459.378	97,44	358.247.247.411	12,67
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4.747.165.000	4.340.161.138	91,43	5.089.307.292	(14,72)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	120.873.693.000	113.881.829.502	94,22	107.022.987.313	6,41
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	68.879.489.000	66.669.152.198	96,79	63.994.927.420	4,18
Belanja Barang Operasional Lainnya	131.199.219.000	122.201.669.354	93,14	822.858.448.737	(85,15)
Belanja Barang Non Operasional	**1.138.228.217.000**	**1.087.809.702.101**	**95,57**	**430.098.871.401**	**152,92**
Belanja Bahan	126.661.611.000	106.701.387.392	84,24	102.196.381.764	4,41
Belanja Honor Output Kegiatan	18.296.221.000	13.081.633.544	71,50	14.008.327.500	(6,62)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	993.270.385.000	968.026.681.165	97,46	313.894.162.137	208,39
Belanja Barang Persediaan	**350.291.691.000**	**343.126.782.800**	**97,95**	**293.906.797.853**	**16,75**
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	187.568.352.000	180.951.382.672	96,47	185.796.221.402	(2,61)
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	161.792.866.000	161.779.095.800	99,99	107.174.865.000	50,95
Belanja Barang Persediaan Lainnya	930.473.000	396.304.328	42,59	935.711.451	(57,65)

Uraian	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Jasa	**524.304.332.000**	**493.548.067.759**	**94,13**	**416.658.717.918**	**18,45**
Belanja Langganan Listrik	176.686.016.000	170.451.305.400	96,47	174.435.806.007	(2,28)
Belanja Langganan Telepon	22.498.398.000	20.236.280.295	89,95	19.858.200.992	1,90
Belanja Langganan Air	8.340.143.000	7.466.817.356	89,53	6.852.920.669	8,96
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	683.572.000	637.590.773	93,27	384.326.788	65,90
Belanja Jasa Konsultan	1.550.000.000	1.510.025.000	97,42	1.596.059.000	(5,39)
Belanja Sewa	228.709.507.000	221.207.993.535	96,72	142.943.822.932	54,75
Belanja Jasa Profesi	31.412.426.000	20.222.173.731	64,38	17.942.404.556	12,71
Belanja Jasa Lainnya	54.424.270.000	51.815.881.669	95,21	52.645.176.974	(1,58)
Belanja Pemeliharaan	**472.215.759.000**	**451.643.509.944**	**95,64**	**457.710.878.066**	**(1,33)**
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195.799.981.000	190.483.141.098	97,28	190.735.256.412	(0,13)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	939.747.000	804.669.794	85,63	652.377.292	23,34
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.539.840.000	1.436.638.040	93,30	1.695.545.860	(15,27)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	263.510.439.000	249.746.090.731	94,78	252.264.349.957	(1,00)
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	190.000.000	189.896.355	99,95	639.529.420	(70,31)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.077.016.000	4.312.083.732	84,93	1.867.157.088	130,94
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	6.493.795.715	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Jaringan	737.502.000	658.835.244	89,33	142.155.500	363,46
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	-	-	-	979.686.000	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Lainnya	4.421.234.000	4.012.154.950	90,75	2.241.024.822	79,03
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	**757.329.125.000**	**698.058.178.011**	**92,17**	**653.209.238.535**	**6,87**
Belanja Perjalanan Biasa	651.949.926.000	614.009.315.920	94,18	563.362.161.523	8,99
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.407.933.000	50.342.239.895	79,39	53.167.981.772	(5,31)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.245.660.000	2.297.516.738	54,11	3.612.679.551	(36,40)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.725.606.000	31.409.105.458	83,26	33.066.415.689	(5,01)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	**8.924.380.000**	**7.440.860.509**	**83,38**	**12.785.178.613**	**(41,80)**
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	8.924.380.000	7.440.860.509	83,38	12.785.178.613	(41,80)
Realisasi Belanja Barang Neto	**3.991.228.444.000**	**3.792.354.372.694**	**95,02**	**3.621.582.600.559**	**4,72**

Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar 4,72 persen di atas terjadi antara lain karena terdapat peningkatan belanja sewa untuk kantor baru dan peningkatan pencetakan benda meterai dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran Belanja Barang tidak terserap seluruhnya disebabkan oleh adanya implementasi kebijakan penghematan dan efisiensi anggaran oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Grafik V.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang Neto
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam miliaran rupiah)



B.2.2.6. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Neto Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp541.494.884.900,00 yang berarti 55,44 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp976.637.721.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp230.424.491.056,00 atau 74,07 persen dari Tahun Anggaran 2017. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Tabel V.B.2.2.6. berikut:

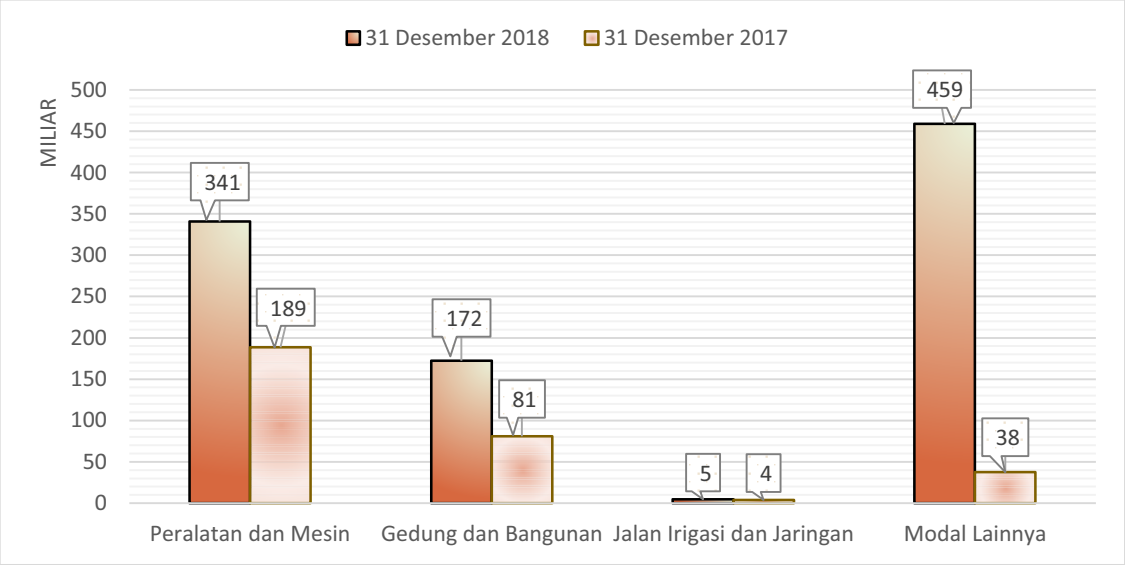
Tabel V.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**340.668.742.000**	**328.575.243.625**	96,45	**188.582.423.295**	**74,23**
Peralatan dan Mesin	340.194.802.000	328.138.379.600	96,46	188.539.867.195	74,04
Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	-	27.545.100	(100,00)
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	9.200.000	8.400.000	91,30	6.600.000	27,27
Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-	2.130.000	(100,00)
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	464.740.000	428.464.025	92,19	6.281.000	6.721,59
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**172.405.609.000**	**159.812.303.040**	92,70	**80.888.392.263**	**97,57**
Gedung dan Bangunan	68.349.791.000	64.297.414.043	94,07	76.561.494.299	(16,02)
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	80.498.000	14.770.000	18,35	-	100,00

Uraian	31 Desember 2018		%	31 Desember 2017	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	80.134.000	24.631.500	30,74	38.493.000	(36,01)
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	103.895.186.000	95.475.487.497	91,90	4.288.404.964	2.126,36
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	**4.570.938.000**	**4.491.297.935**	98,26	**3.971.331.200**	**13,09**
Jalan dan Jembatan	-	-	-	6.300.000	(100,00)
Jaringan	4.011.959.000	3.951.213.451	98,49	3.965.031.200	(0,35)
Bahan Baku Jaringan	86.226.000	82.065.500	95,17	-	100,00
Penambahan Nilai Jaringan	472.753.000	458.018.984	96,88	-	100,00
Belanja Modal Lainnya	**458.992.432.000**	**48.616.040.300**	10,59	**37.628.247.086**	**29,20**
Lainnya	458.992.432.000	48.616.040.300	10,59	35.180.672.086	38,19
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	-	-	-	2.447.575.000	(100,00)
Realisasi Belanja Modal Neto	**976.637.721.000**	**541.494.884.900**	**55,44**	**311.070.393.844**	**74,07**

Anggaran Belanja Modal tidak terserap seluruhnya antara lain disebabkan oleh adanya gagal lelang atas proses Pengadaan Barang/Jasa yang terjadi pada Tahun Anggaran 2018.

Grafik V.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal Neto
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam miliar rupiah)



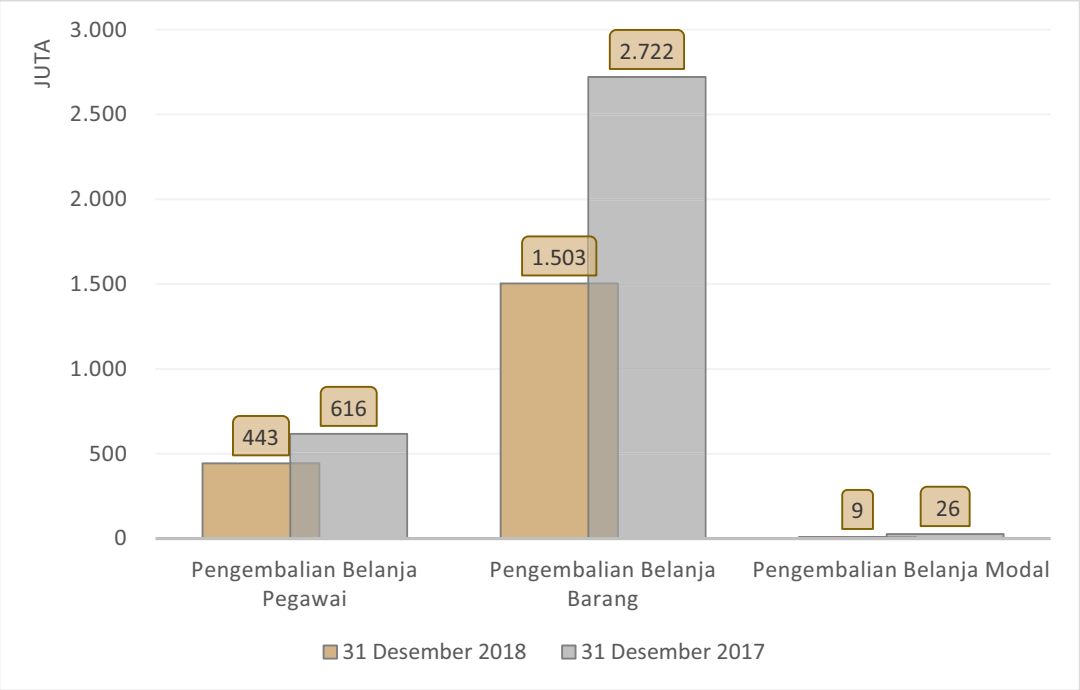
B.2.2.7. Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.955.835.893,00 atau turun sebesar 41,86 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.363.726.102,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel V.B.2.2.7. berikut:

Tabel V.B.2.2.7.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	443.478.294	615.929.594	(172.451.300)	(28,00)
Pengembalian Belanja Barang	1.502.889.599	2.721.536.508	(1.218.646.909)	(44,78)
Pengembalian Belanja Modal	9.468.000	26.260.000	(16.792.000)	(63,95)
Jumlah	**1.955.853.893**	**3.363.726.102**	**(1.407.890.209)**	**(41,86)**

Grafik V.B.2.2.7.
Realisasi Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

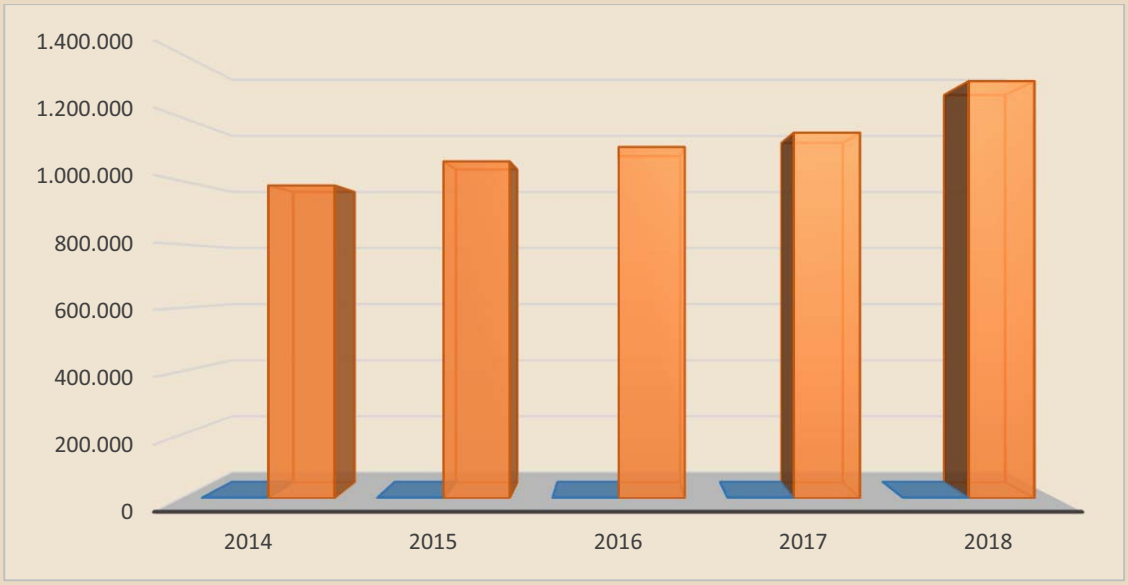
B.3.1. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS PENERIMAAN DALAM NEGERI

Realisasi penerimaan neto sejumlah Rp1.313.347.887.239.719,00 atau sebesar 92,23 persen di Tahun Anggaran 2018 merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir dari segi nominal. Hal tersebut ditunjang dari tingginya capaian pendapatan PPh Migas, PPh Non-Migas, PPN, dan PBB yang dapat digambarkan pada Tabel dan Grafik V.B.3.1.1 sebagaimana dibawah ini:

Tabel V.B.3.1.1
Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2014 - 2018
(dalam miliar rupiah)

TA	PENERIMAAN PAJAK			PNBP			TOTAL		
	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%
2014	1.072.376,35	985.129,79	91,86	4,80	15,56	324,15	1.072.381,26	985.145,35	91,87
2015	1.294.258,67	1.060.860,57	81,97	6,10	77,51	1266,00	1.294.264,80	1.060.938,08	81,97
2016	1.355.203,52	1.105.970,04	81,61	6,43	17,30	269,05	1.355.209,95	1.105.987,34	81,61
2017	1.283.565,86	1.151.028,06	89,67	3,90	49,80	1277,13	1.283.569,76	1.151.077,85	89,68
2018	1.423.995,49	1.313.322,21	92,23	4,45	25,67	577,53	1.423.999,94	1.313.347,89	92,23

Grafik V.B.3.1.1
Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2014 - 2018
(dalam miliar rupiah)



Dari Penerimaan Pajak Neto sejumlah Rp1.313.322.214.394.922,00 terdapat pemindahbukuan yang terjadi selama 2018 atas pembayaran pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp23.750.903.077.486,00. Realisasi Penerimaan Pajak Setelah Pemindahbukuan Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel V.B.3.1.2. berikut:

Tabel V.B.3.1.2.
Realisasi Penerimaan Pajak Setelah Pemindahbukuan Per Kantor Wilayah
Tahun Anggaran 2018
(Dalam Rupiah)

Nama Satker	Realisasi Neto	Realisasi Neto setelah PBK
KPDJP	10.113.615.196.530	10.113.615.196.530
Kanwil DJP Aceh	4.361.607.266.712	4.363.553.951.098
Kanwil DJP Sumatera Utara I	17.200.047.582.434	17.162.982.614.298
Kanwil DJP Sumatera Utara II	5.130.816.451.574	5.140.985.144.257
Kanwil DJP Riau	14.718.485.050.624	14.717.631.393.659
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	9.558.500.493.518	9.550.751.146.977
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	13.179.690.748.269	13.135.781.729.859
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	9.143.044.100.140	9.141.184.227.802
Kanwil DJP Jakarta Pusat	66.692.470.167.675	66.780.764.751.175
Kanwil DJP Jakarta Barat	41.646.436.089.110	41.642.851.097.028
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	50.195.223.456.975	50.168.306.635.426
Kanwil DJP Jakarta Timur	25.811.657.397.040	25.819.865.153.656
Kanwil DJP Jakarta Utara	33.975.781.967.212	33.985.195.368.625
Kanwil DJP Jakarta Khusus	209.928.172.809.510	210.066.087.418.969
Kanwil DJP Banten	46.274.305.522.517	46.264.662.100.043
Kanwil DJP Jawa Barat I	28.361.259.842.057	28.341.034.587.837
Kanwil DJP Jawa Barat II	39.388.533.329.578	39.355.898.859.082
Kanwil DJP Jawa Tengah I	26.662.255.447.583	26.658.057.707.382
Kanwil DJP Jawa Tengah II	11.421.789.640.459	11.424.014.242.295
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	4.997.009.233.289	4.994.392.670.561
Kanwil DJP Jawa Timur I	40.782.972.916.513	40.797.571.987.162
Kanwil DJP Jawa Timur II	19.157.749.630.163	19.181.922.396.475
Kanwil DJP Jawa Timur III	29.558.717.981.612	29.550.683.775.570
Kanwil DJP Kalimantan Barat	6.463.107.846.876	6.455.152.136.937
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	13.166.025.935.815	13.078.450.831.999
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	19.182.456.698.088	19.209.077.638.383
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	12.497.006.874.453	12.509.409.699.576
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	8.594.182.971.279	8.513.865.867.336
Kanwil DJP Bali	9.578.074.387.476	9.586.828.278.986
Kanwil DJP Nusa Tenggara	5.279.061.148.584	5.271.610.114.844
Kanwil DJP Papua dan Maluku	9.542.031.032.415	9.542.164.551.287
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	418.975.713.065.219	419.019.681.716.324
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	28.249.742.346.805	28.253.187.972.702
Kanwil DJP Jawa Barat III	17.835.997.491.833	17.819.555.510.048
Kanwil DJP Kepulauan Riau	5.698.672.274.985	5.705.435.920.734
Jumlah Penerimaan	**1.313.322.214.394.922**	**1.313.322.214.394.922**

INFORMASI APBN 2019

APBN 2019

Adil, sehat, dan mandiri dimana defisit dijaga pada angka 1,84% dengan *primary balance* mendekati Rp0

APBN 2019 | Outlook 2018 | triliun Rupiah

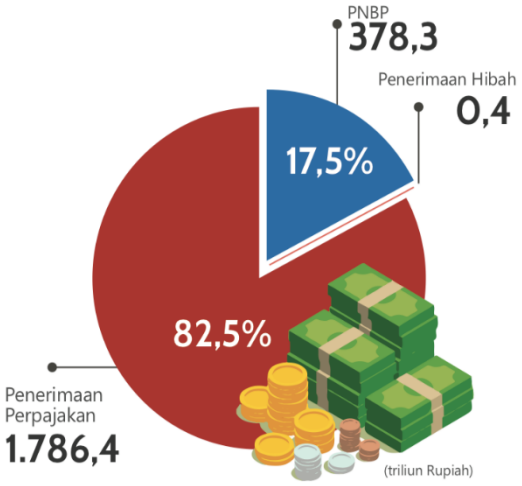


Pendapatan Negara

Rp2.165,1 T

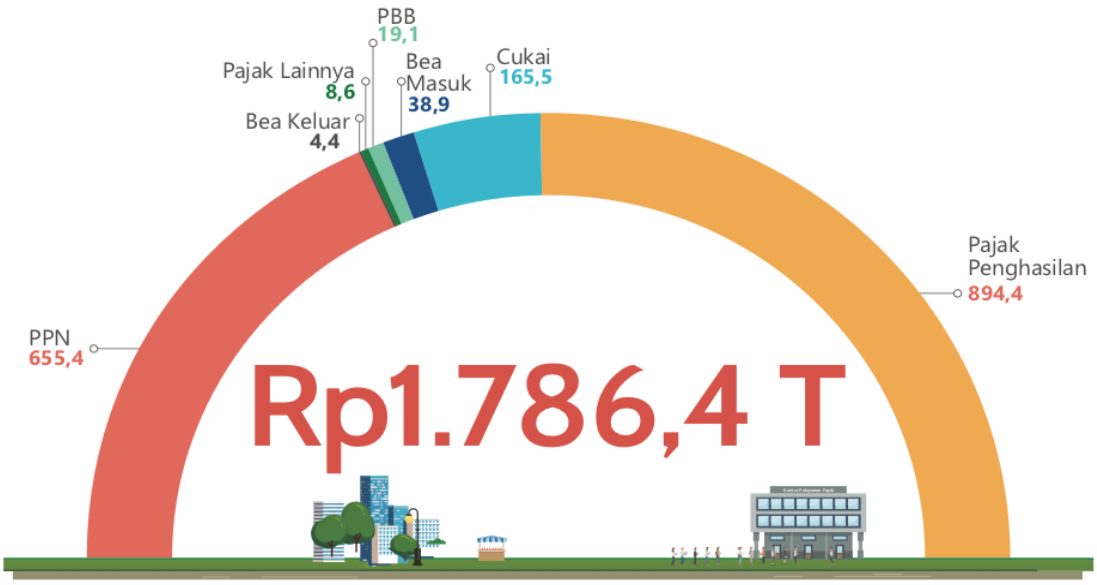
Pajak Sumber Utama Pendapatan

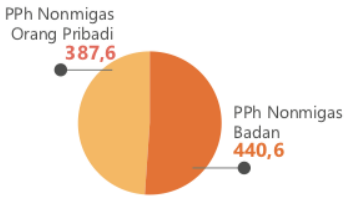
Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyempurnaan regulasi dan IT Pajak serta PNBP terus dioptimalkan dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat

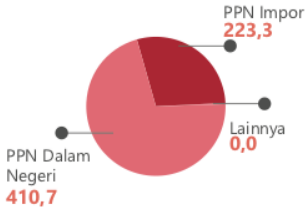


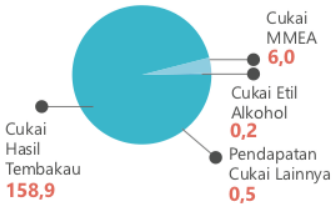
Penerimaan Perpajakan

PPh dan PPN merupakan kontribusi utama, sebesar 50,1% dan 36,
terhadap penerimaan perpajakan









PPh Nonmigas
Kenaikan PPh Non Migas didominasi oleh PPh Nonmigas Badan

PPN
Kenaikan PPN didukung oleh upaya pemerintah mendorong konsumsi rumah tangga

Cukai
Kenaikan cukai didorong oleh penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan program penertiban rokok ilegal

Sumber: Buku Informasi APBN 2019

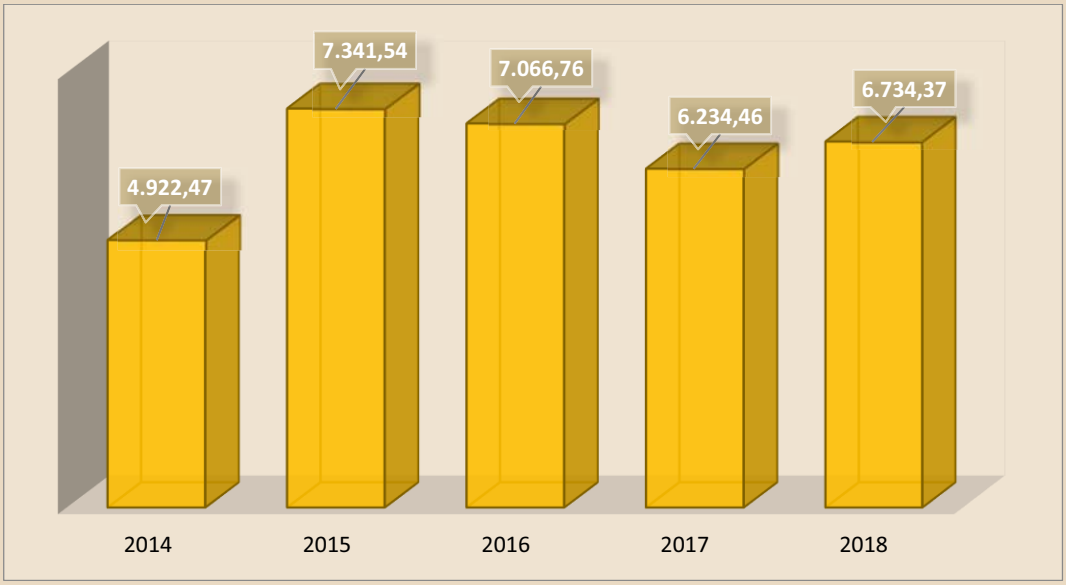
B.3.2. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS BELANJA DALAM NEGERI

Realisasi belanja neto untuk Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp6.734.369.688.357,00 atau sebesar 90,50 persen dari pagu yang dianggarkan. Realisasi belanja neto Tahun 2018 secara nominal lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Realisasi belanja neto dalam 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik dan tabel sebagaimana dibawah ini:

Tabel V.B.3.2.
Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2014 - 2018
(dalam miliar rupiah)

TA	BELANJA PEGAWAI (51)			BELANJA BARANG (52)			BELANJA MODAL (53)			TOTAL BELANJA		
	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
2014	1.781,86	1.716,44	96,33	3.019,48	2.804.17	92,87	458,23	401.86	87,7	5.259,58	4.922,47	93.59
2015	2.025,94	1.932,76	95,40	5.070,71	4.233,58	83,49	2.015,92	1.175,20	58,3	9.112,57	7.341,54	80,56
2016	2.327,28	2.254,91	96,89	4.755,83	4.373,76	91,97	537,15	438,09	81,6	7.620,26	7.066,76	92,74
2017	2.379,16	2.301,81	96,75	3.806,93	3.621,58	95,13	332,57	311,07	93,5	6.518,66	6.234,46	95,64
2018	2.473,72	2.400,52	97,04	3.991,23	3.792,4	95,02	976,64	541,49	55,44	7.441,59	6.734,37	90,50

Grafik V.B.3.2.
Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2014 - 2018
(dalam miliaran rupiah)



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagaimana Tabel V.C.1 berikut:

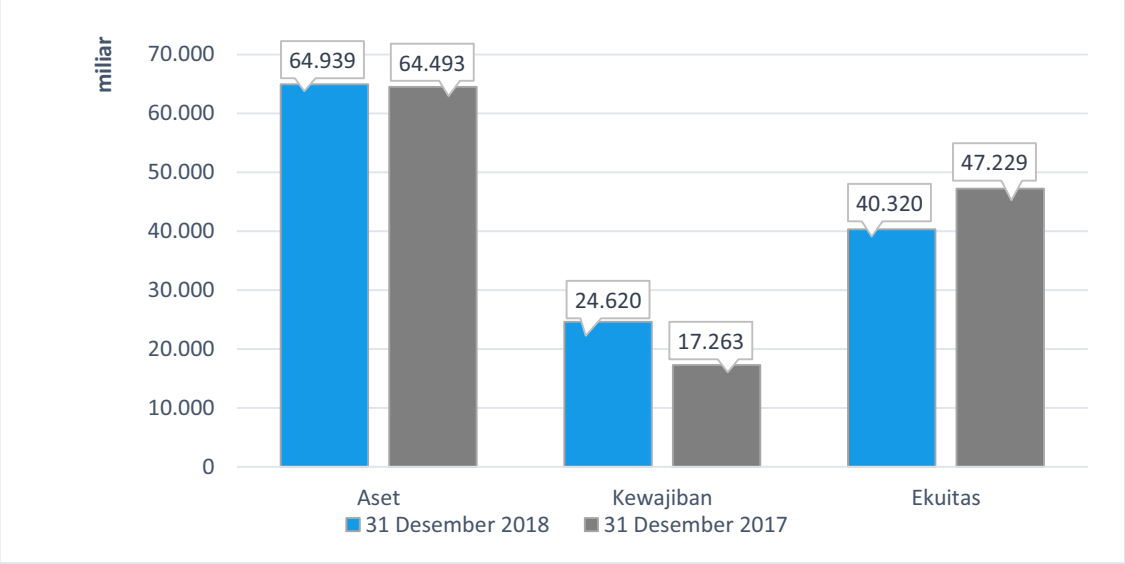
Tabel V.C.1
Neraca
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Aset	64.939.453.943.600	64.492.506.435.128	446.947.508.472	0,69
Kewajiban	24.619.816.889.275	17.263.042.737.946	7.356.774.151.329	42,62
Ekuitas	40.319.637.054.325	47.229.463.697.182	(6.909.826.642.857)	(14,63)

Jumlah Aset Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp69.939.453.943.600,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp27.328.146.180.659,00, Aset Tetap sebesar Rp37.462.975.636.990.00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp148.332.125.951,00. Jumlah Kewajiban Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp24.619.816.889.275,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp40.319.637.054.325,00.

Jumlah Aset Per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp446.947.508.472,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp64.492.506.435.128,00. Kenaikan tersebut disertai oleh kenaikan Kewajiban sebesar Rp7.356.774.151.329,00 dan penurunan Ekuitas sebesar Rp6.909.826.642.857,00. Grafik komposisi Neraca sebagaimana Grafik V.C.1 berikut:

Grafik V.C.1
Komposisi Neraca
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam miliar rupiah)



C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

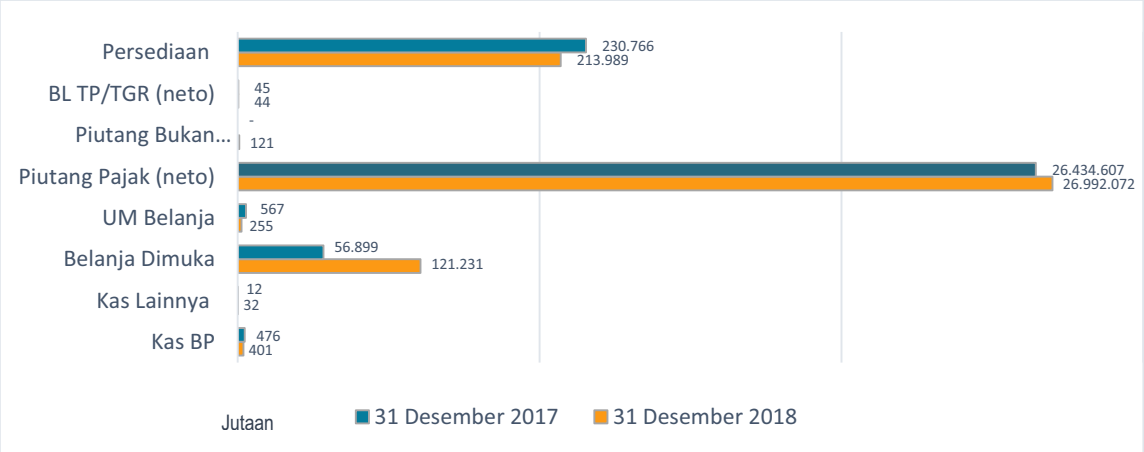
C.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp27.328.146.180.659,00 dan Rp26.723.372.549.600,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1. berikut:

Tabel V.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	400.884.959	475.898.919	(75.013.960)	(15,76)
Kas Lainnya dan Setara Kas	32.450.722	11.800.540	20.650.182	174,99
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	121.230.933.293	56.899.350.176	64.331.583.117	113,06
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	255.496.173	566.529.066	(311.032.893)	(54,90)
Piutang Perpajakan (neto)	26.992.072.791.728	26.434.607.571.404	557.465.220.324	2,11
Piutang Bukan Pajak (neto)	121.038.667	-	121.038.667	0,00
Bagian Lancar TP/TGR (neto)	43.983.960	44.583.960	(600.000)	(1,35)
Persediaan	213.988.601.157	230.766.815.535	(16.778.214.378)	(7,27)
Jumlah	**27.328.146.180.659**	**26.723.372.549.600**	**604.773.631.059**	**2,26**

Grafik V.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2018 sebesar Rp400.884.959,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut lebih rendah sebesar Rp75.013.960,00 atau 15,76 persen dari saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp475.898.919,00.

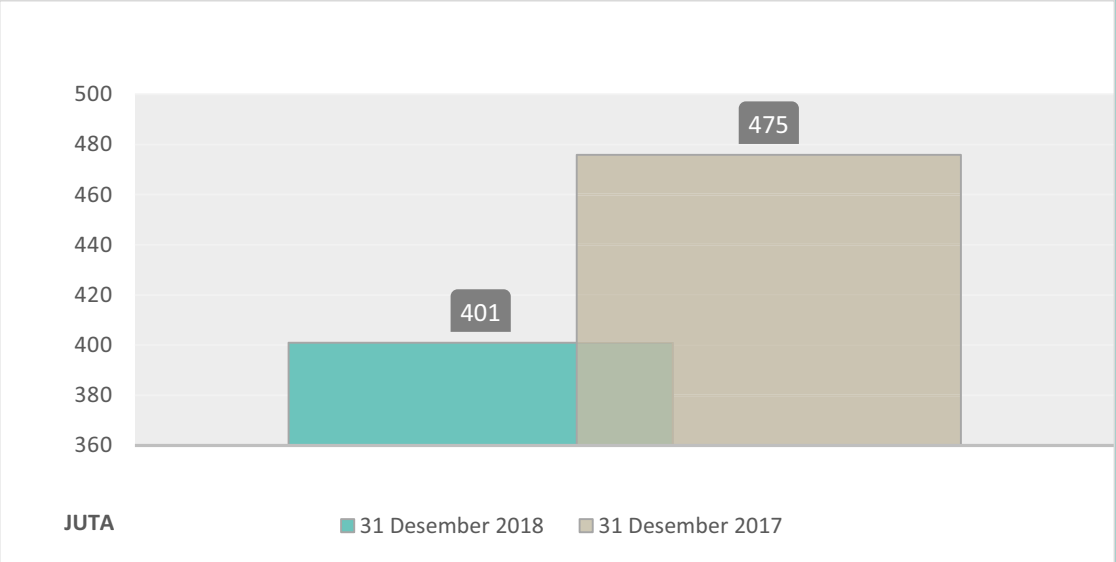
Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan permintaan UP bulan berikutnya dan Saldo *Value Added Tax* (VAT) *Refund For Tourist*. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.1.
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	36.073.000	-	36.073.000	100,00
Kanwil DJP Riau	-	364.000	(364.000)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	1.146.982	50.000.000	(48.853.018)	(97,71)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	99.512	43.063.262	(42.963.750)	(99,77)
Kanwil DJP Jakarta Barat	10.612.800	4.000	10.608.800	265.220,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	-	2.611.700	(2.611.700)	(100,00)
Kanwil DJP Banten	200.000.000	200.000.000	-	-
Kanwil DJP DI Yogyakarta	15.000.000	15.000.000	-	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	17.313.683	17.313.683	-	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	10.220	-	10.220	100,00
Kanwil DJP Bali	61.918.762	92.838.374	(30.919.612)	(33,30)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	9.660.000	7.200.000	2.460.000	34,17
Kanwil DJP Papua dan Maluku	49.050.000	47.503.900	1.546.100	3,25
Jumlah	**400.884.959**	**475.898.919**	**(75.013.960)**	**(15,76)**

*Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo VAT *Refund* serta terdapat beberapa satuan kerja yang menyetorkan pada Tahun 2019.

Grafik V.C.2.1.1.
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



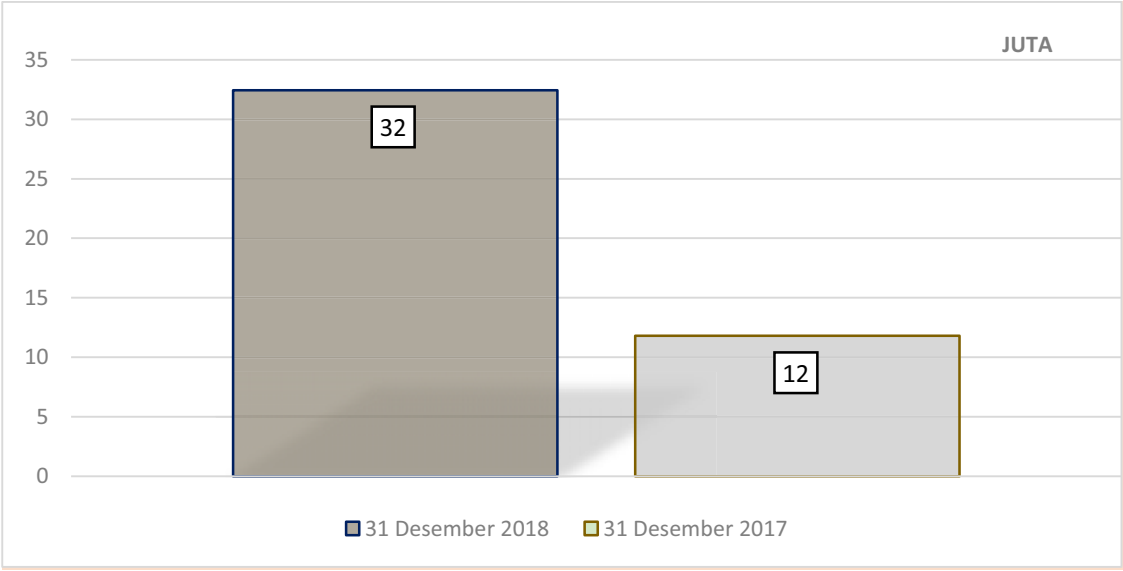
C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp32.450.722,00 yang berasal dari dana yang dikuasai Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pegawai per 31 Desember 2018. Jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp11.800.540,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp20.650.182,00 atau mencapai 174,99 persen.

Tabel V.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	-	198.200	(198.200)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	-	120.000	(120.000)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	191.850	(191.850)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Barat	-	6.855.000	(6.855.000)	(100,00)
Kanwil DJP Banten	-	4.329.150	(4.329.150)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat I	-	3	(3)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat II	2.137.500	5.535	2.131.965	38.517,89
Kanwil DJP Jawa Tengah I	712.500	-	712.500	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	1.000.000	-	1.000.000	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	-	75.600	(75.600)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	18.000	(18.000)	(100,00)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	28.600.722	-	28.600.722	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	-	7.202	(7.202)	(100,00)
Jumlah	**32.450.722**	**11.800.540**	**20.650.182**	**174,99**

Grafik V.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



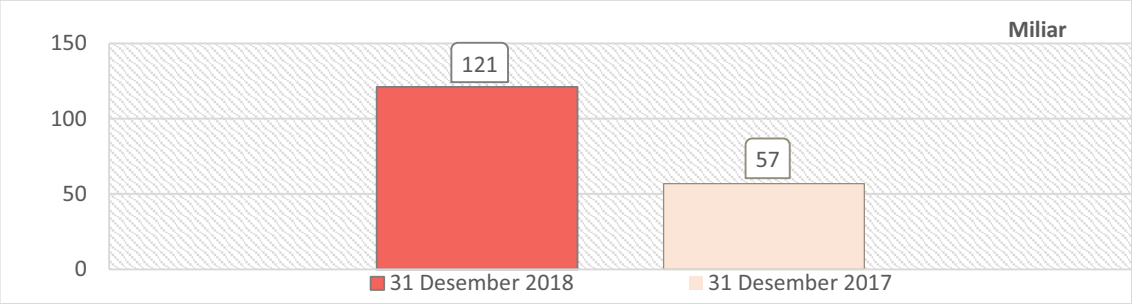
C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp121.230.933.293,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp56.899.350.176,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar 113,06 persen atau sebesar Rp64.331.583.117,00.

Tabel V.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	-	25.000.000	(25.000.000)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	55.440.000	55.440.000	-	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	344.484.258	651.600.365	(307.116.107)	(47,13)
Kanwil DJP Riau	8.947.702.324	5.709.362.512	3.238.339.812	56,72
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	198.712.039	214.264.001	(15.551.962)	(7,26)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	652.530.861	951.632.721	(299.101.860)	(31,43)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	1.520.386.111	601.052.445	919.333.666	152,95
Kanwil DJP Jakarta Barat	18.052.820.580	7.099.283.433	10.953.537.147	154,29
Kanwil DJP Jakarta Timur	2.962.195.434	2.962.195.434	-	-
Kanwil DJP Jakarta Utara	16.344.919.169	5.583.333	16.339.335.836	292.644,84
Kanwil DJP Jakarta Khusus	174.929.700	-	174.929.700	100,00
Kanwil DJP Banten	14.247.889.439	7.806.916.761	6.440.972.678	82,50
Kanwil DJP Jawa Barat I	11.137.500	-	11.137.500	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	3.825.000.000	-	3.825.000.000	100,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	800.000.000	2.000.000.000	(1.200.000.000)	(60,00)
Kanwil DJP Jawa Timur II	1.186.670.500	30.250.000	1.156.420.500	3822,88
Kanwil DJP Jawa Timur III	177.750.000	291.000.000	(113.250.000)	(38,92)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	1.805.833.300	209.671.700	1.596.161.600	761,27
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.274.750.000	1.522.750.000	752.000.000	49,38
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	7.024.381.100	450.750.000	6.573.631.100	1.458,38
Kanwil DJP Sulawesi Selatan. Barat dan Tenggara	508.666.667	663.333.333	(154.666.666)	(23,32)
Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo dan Maluku Utara	-	371.795	(371.795)	(100,00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	1.795.000.000	1.051.250.000	743.750.000	70,75
Kanwil DJP Papua dan Maluku	-	890.291.668	(890.291.668)	(100,00)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	64.402.800	374.398.064	(309.995.264)	(82,80)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	9.619.727.333	6.746.694.444	2.873.032.889	42,58
Kanwil DJP Jawa Barat III	16.996.419.178	16.586.258.167	410.161.011	2,47
Kanwil DJP Kepulauan Riau	11.639.185.000	-	11.639.185.000	100,00
Jumlah	**121.230.933.293**	**56.899.350.176**	**64.331.583.117**	**113,06**

Grafik V.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam miliaran rupiah)



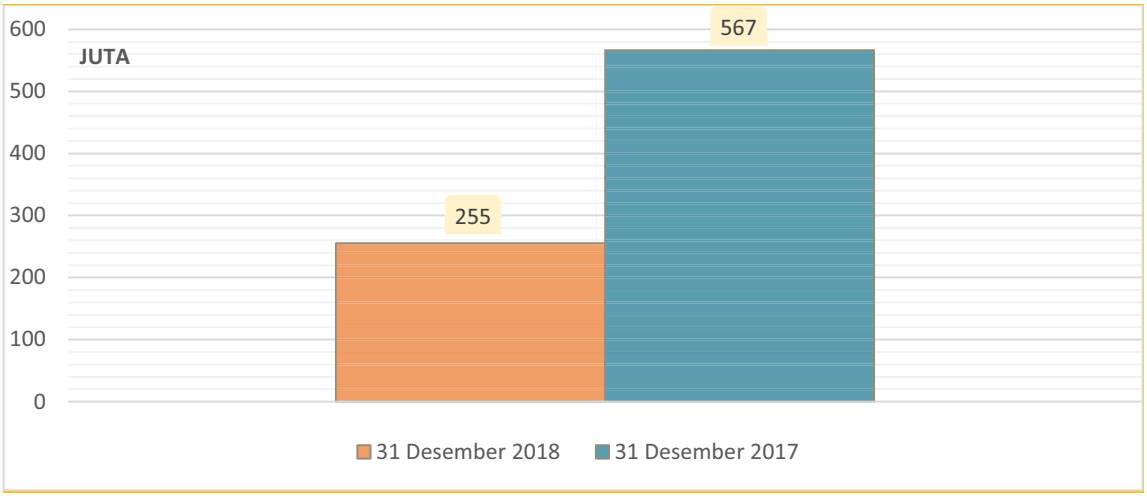
C.2.1.4. Uang Muka Belanja (*prepayment*)

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp255.496.173,00 dan per 31 Desember 2017 sebesar Rp566.529.066,00.

Tabel V.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
KPDJP	2.002.034	-	-	-
Kanwil DJP Aceh	9.137.670	3.664.800	5.472.870	149,34
Kanwil DJP Sumatera Utara I	3.480.050	18.404.570	(14.924.520)	(81,09)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	-	2.155.840	(2.155.840)	(100,00)
Kanwil DJP Riau	14.181.456	29.979.982	(15.798.526)	(52,70)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	7.927.345	79.389.425	(71.462.080)	(90,01)
Kanwil DJP SumselBabel	20.163.806	84.689.016	(64.525.210)	(76,19)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	37.468.890	3.899.200	33.569.690	860,94
Kanwil DJP Jakarta Pusat	6.804.360	-	6.804.360	100,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	-	3.423.520	(3.423.520)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat I	2.621.940	16.459.550	(13.837.610)	(84,07)
Kanwil DJP Jawa Barat II	21.671.334	26.053.070	(4.381.736)	(16,82)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	43.334.559	115.011.302	(71.676.743)	(62,32)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	1.341.390	9.943.340	(8.601.950)	(86,51)
Kanwil DJP DI Yogyakarta	3.643.050	15.388.230	(11.745.180)	(76,33)
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.576.040	11.346.610	(9.770.570)	(86,11)
Kanwil DJP Jawa Timur II	1.926.257	94.362.522	(92.436.265)	(97,96)
Kanwil DJP Jawa Timur III	22.861.879	26.082.089	(3.220.210)	(12,35)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	13.799.140	7.961.310	5.837.830	73,33
Kanwil DJP Sulselbartra	27.337.940	10.927.840	16.410.100	150,17
Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo dan Maluku Utara	14.217.033	-	14.217.033	100,00
Kanwil DJP Bali	-	3.811.720	(3.811.720)	(100,00)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	1.510.900	(1.510.900)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat III	-	2.064.230	(2.064.230)	(100,00)
Jumlah	**255.496.173**	**566.529.066**	**(311.032.893)**	**(54,90)**

Grafik V.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



C.2.1.5. Piutang Pajak

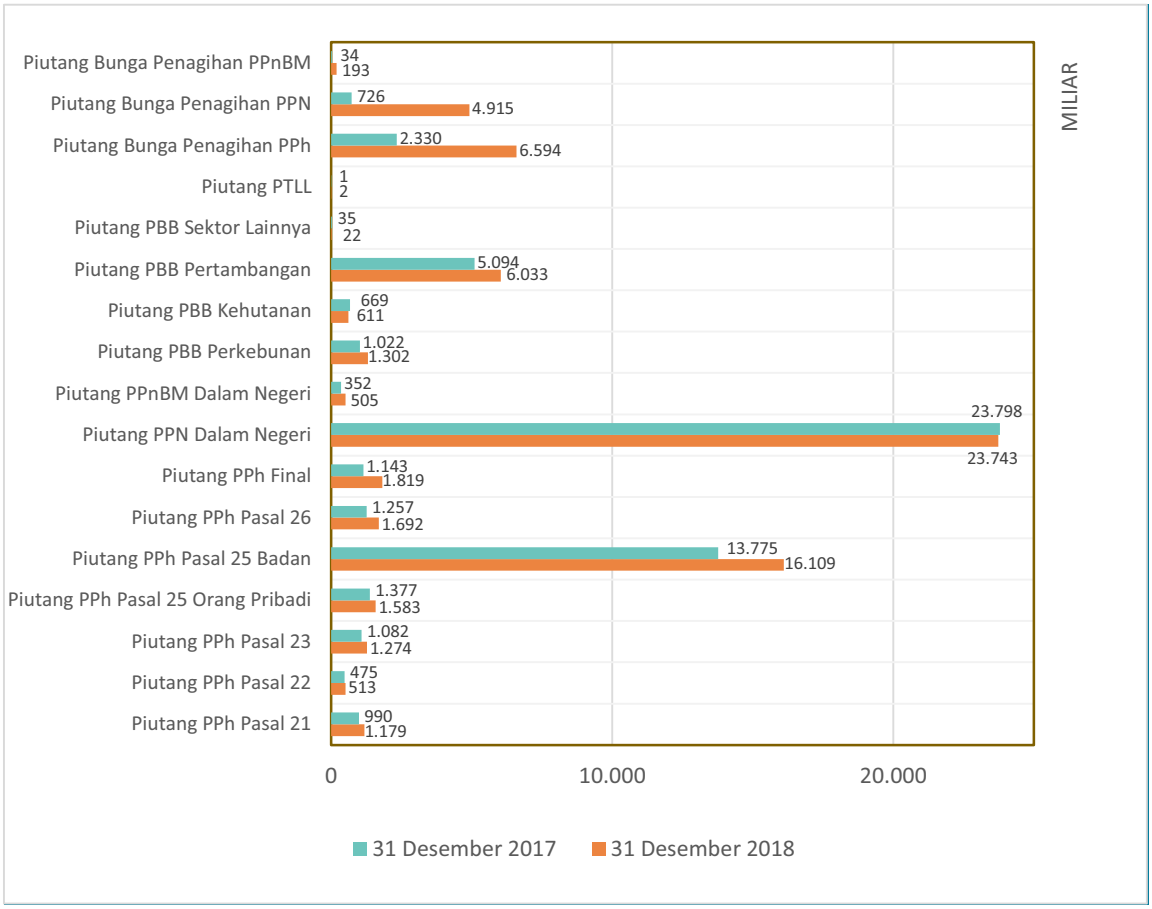
Jumlah Piutang Pajak Bruto per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp68.090.740.725.765,00. Jumlah total piutang tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi sampai dengan 31 Desember 2018 belum mendapat pelunasan. Rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak, berdasarkan Kanwil dan berdasarkan umur piutang pajak sebagaimana tabel berikut:

Grafik V.C.2.1.5.
Piutang Pajak Per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PPh Pasal 21	1.179.013.937.280	989.815.356.183	189.198.581.097	19,11
Piutang PPh Pasal 22	513.491.595.695	475.164.708.249	38.326.887.446	8,07
Piutang PPh Pasal 23	1.274.118.662.166	1.082.058.604.109	192.060.058.057	17,75
Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.583.276.185.064	1.376.615.838.778	206.660.346.286	15,01
Piutang PPh Pasal 25 Badan	16.109.153.823.702	13.774.975.667.801	2.334.178.155.901	16,95
Piutang PPh Pasal 26	1.692.189.385.192	1.257.358.573.103	434.830.812.089	34,58
Piutang PPh Final	1.818.771.827.092	1.143.290.999.747	675.480.827.345	59,08
Piutang PPN Dalam Negeri	23.743.183.930.888	23.797.562.832.870	(54.378.901.982)	(0,23)
Piutang PPnBM Dalam Negeri	504.887.065.463	352.047.482.317	152.839.583.146	43,41
Piutang PBB Perkebunan	1.302.383.004.670	1.021.515.758.737	280.867.245.933	27,50
Piutang PBB Kehutanan	611.275.366.842	669.097.951.966	(57.822.585.124)	(8,64)
Piutang PBB Pertambangan	6.033.394.958.747	5.094.428.435.136	938.966.523.611	18,43
PBB Sektor Lainnya	21.618.657.418	34.791.239.897	(13.172.582.479)	(37,86)
Piutang PTLL	2.025.634.020	1.241.815.000	783.819.020	63,12

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bunga Penagihan PPh	6.594.205.443.940	2.330.021.852.638	4.264.183.591.302	183,01
Piutang Bunga Penagihan PPN	4.914.538.121.192	725.910.453.592	4.188.627.667.600	577,02
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	193.213.126.394	34.192.668.553	159.020.457.841	465,07
Jumlah	**68.090.740.725.765**	**54.160.090.238.676**	**13.930.650.487.089**	**25,72**

Grafik V.C.2.1.5.a.
Perbandingan Piutang Pajak Per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam miliaran rupiah)



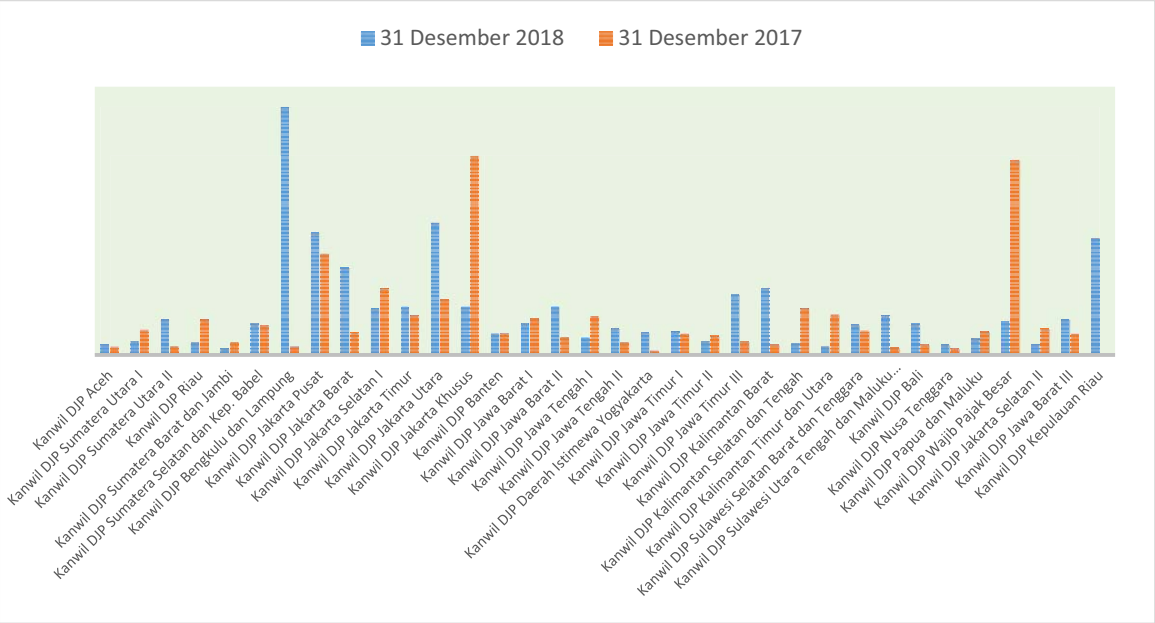
Tabel V.C.2.1.5.b.
Rincian Piutang Pajak Per Kanwil
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	459.088.780.581	357.998.242.056	101.090.538.523	28,24
Kanwil DJP Sumatera Utara I	605.400.733.315	1.129.873.217.134	(524.472.483.820)	(46,42)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	1.614.352.387.442	388.941.359.508	1.225.411.027.933	315,06

Nama Kanwil	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Riau	549.188.513.743	1.594.343.703.654	(1.045.155.189.912)	(65,55)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	293.420.485.449	583.015.444.495	(289.594.959.048)	(49,67)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel	1.412.295.691.587	1.333.294.280.987	79.001.410.600	5,93
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	11.094.201.579.722	372.412.198.167	10.721.789.381.552	2.879,01
Kanwil DJP Jakarta Pusat	5.465.665.779.301	4.514.903.994.318	950.761.784.986	21,06
Kanwil DJP Jakarta Barat	3.904.886.787.533	1.006.968.982.684	2.897.917.804.852	287,79
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	2.087.768.237.794	2.994.076.672.351	(906.308.434.558)	(30,27)
Kanwil DJP Jakarta Timur	2.155.254.782.367	1.755.732.053.401	399.522.728.967	22,76
Kanwil DJP Jakarta Utara	5.908.854.977.667	2.501.732.313.201	3.407.122.664.467	136,19
Kanwil DJP Jakarta Khusus	2.147.984.766.389	8.892.164.612.166	(6.744.179.845.778)	(75,84)
Kanwil DJP Banten	967.833.739.060	977.032.365.504	(9.198.626.443)	(0,94)
Kanwil DJP Jawa Barat I	1.410.168.653.887	1.637.735.511.330	(227.566.857.443)	(13,90)
Kanwil DJP Jawa Barat II	2.174.841.714.675	781.496.457.023	1.393.345.257.651	178,29
Kanwil DJP Jawa Tengah I	798.327.644.565	1.725.537.664.131	(927.210.019.562)	(53,73)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	1.198.633.580.196	558.828.191.483	639.805.388.714	114,49
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	1.010.181.667.856	194.741.517.142	815.440.150.715	418,73
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.068.983.512.494	953.447.757.745	115.535.754.748	12,12
Kanwil DJP Jawa Timur II	612.498.177.225	863.229.472.635	(250.731.295.409)	(29,05)
Kanwil DJP Jawa Timur III	2.705.760.504.321	602.428.517.852	2.103.331.986.467	349,14
Kanwil DJP Kalimantan Barat	2.986.302.557.702	464.499.439.726	2.521.803.117.974	542,91
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	539.057.000.216	2.100.611.433.666	(1.561.554.433.451)	(74,34)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	389.899.639.295	1.811.974.659.055	(1.422.075.019.761)	(78,48)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	1.350.006.976.087	1.100.262.925.029	249.744.051.061	22,70
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah dan Maluku Utara	1.761.849.206.440	330.199.772.136	1.431.649.434.308	433,57
Kanwil DJP Bali	1.390.870.715.024	462.310.246.110	928.560.468.912	200,85
Kanwil DJP Nusa Tenggara	469.249.799.975	300.541.264.004	168.708.535.971	56,13
Kanwil DJP Papua dan Maluku	719.207.039.639	1.052.261.146.599	(333.054.106.960)	(31,65)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.511.424.029.666	8.688.173.599.270	(7.176.749.569.606)	(82,60)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	479.868.186.721	1.176.975.423.047	(697.107.236.327)	(59,23)
Kanwil DJP Jawa Barat III	1.616.417.673.159	952.345.801.067	664.071.872.093	69,73
Kanwil DJP Kepulauan Riau	5.230.995.204.672	-	5.230.995.204.686	100,00
Jumlah	**68.090.740.725.765**	**54.160.090.238.676**	**13.930.650.487.089**	**25,72**

Kanwil DJP Kepulauan Riau merupakan kanwil pecahan dari Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau sehingga belum terdapat piutang Tahun 2017.

Grafik V.C.2.1.5.b.
Perbandingan Piutang Pajak Per Kanwil DJP
Per 31 Desember 2018 dan 2017



Piutang pajak berdasarkan umur disajikan dalam tabel IV.C.2.1.5.c. Umur piutang pajak digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih.

Tabel IV.C.2.1.5.c.
Rincian Piutang Pajak Per Umur
Per 31 Desember 2018
(dalam ribuan rupiah)

Umur Piutang	Jumlah
Sampai dengan 1 Tahun	20.034.437.397.709
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	13.692.771.024.198
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	9.816.500.915.744
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	7.219.314.358.630
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	4.698.796.747.629
Lebih dari 5 Tahun	12.628.920.281.855
Jumlah	**68.090.740.725.765**

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp68.090.740.725.765,00 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp41.098.667.934.037,00 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp26.992.072.791.728,00. Perhitungan nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih per 31 Desember 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.5.d.
Piutang Pajak Neto
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	68.090.740.725.765	54.160.090.238.676	13.930.650.487.089	25,72
Penyisihan Piutang Pajak	(41.098.667.934.037)	(27.725.482.667.272)	(13.373.185.266.765)	48,23
Piutang Pajak Netto	26.992.072.791.728	26.434.607.571.404	557.465.220.324	2,11

Dalam menghitung Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak diatas, terdapat nilai sitaan/ jaminan yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bahwa dalam rangka melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyitaan terhadap harta benda Wajib Pajak sebagai jaminan piutang pajak yang tidak/belum dilunasi Wajib Pajak. Nilai estimasi harga pasar aset Wajib Pajak yang dilakukan penyitaan yang belum dilakukan penjualan secara lelang dan atau penjualan yang dikecualikan dari lelang per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp60.873.840.551,00 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.5.e.
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Piutang Pajak (Rp)	Barang Sitaan/Agunan	Dasar Penyisihan Piutang Pajak	Persentase Penyisihan	Nilai Penyisihan Piutang Pajak
Lancar	9.275.649.913.097	-	9.275.649.913.097	0,50%	46.376.276.190
Kurang Lancar	11.953.231.335.348	13.788.581.038	11.939.442.754.310	10%	1.193.944.275.431
Diragukan	13.937.323.456.557	24.469.785.775	13.912.853.670.782	50%	6.956.426.835.391
Macet	32.924.536.020.763	22.615.473.738	32.901.920.547.025	100%	32.901.920.547.025
Jumlah	**68.090.740.725.765**	**60.873.840.551**	**68.029.866.885.214**		**41.098.667.934.037**

Sengketa Pajak

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak, yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp177.652.417.652.198,00.

Nilai nominal ketetapan pajak/keputusan/putusan yang menjadi sengketa pajak tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai piutang pajak per 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, khusus untuk sengketa pajak keberatan, nilai nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak tersebut adalah atas nilai ketetapan pajak awal, bukan atas nilai piutang pajak atau tunggakan pajak yang belum dibayar. Kedua, nominal ketetapan pajak yang menjadi sengketa pajak untuk SKPKB/SKPKBT hasil pemeriksaan tahun pajak 2008 dan seterusnya, sebagian nilai dalam SKPKB/SKPKBT tersebut yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak belum diakui sebagai piutang pajak.

Daluwarsa Piutang Pajak

Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada 2017 dilakukan penghapustagihan piutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 5 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp5.231.748.984.942,00 dari 5 Kanwil dengan rincian pada tabel IV.C.2.1.5.f. dan atas piutang pajak yang tersebut dihapustagihkan (dikeluarkan dari laporan keuangan).

Tabel IV.C.2.1.5.f.
Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Sumatera Utara I	874/KMK.03/2018	26 Desember 2018	200	80.964.566.866
Kanwil DJP Sumatera Utara II	923/KMK.03/2018	31 Desember 2018	1.554	22.260.217.365
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	866/KMK.03/2018	21 Desember 2018	2.992	984.935.512.823
Kanwil DJP Jakarta Khusus	899/KMK.03/2018	31 Desember 2018	1.472	4.107.340.349.958
Kanwil DJP Kalimantan Barat	875/KMK.03/2018	26 Desember 2018	1.551	36.248.337.930
Total			**7.769**	**5.231.748.984.942**

Pada tahun 2018 saldo piutang pajak yang dihapusbukukan sebesar Rp23.545.731.800.089,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.208.465.044.850,00 dari saldo 2017 sebesar Rp32.754.196.844.932,00 yang disajikan pada tabel IV.C.2.1.5.g. berikut.

Tabel IV.C.2.1.5.g.
Rincian Piutang Pajak Daluwarsa
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

DALUWARSA	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Daluwarsa Penagihan	21.394.853.200.854	21.837.706.811.738	(442.853.610.884)	(2,03)
Daluwarsa Penetapan	2.150.878.599.235	10.916.490.033.201	(8.765.611.433.966)	(80,30)
Total	**23.545.731.800.089**	**32.754.196.844.939**	**(9.208.465.044.850)**	**(28,11)**

Penurunan saldo piutang pajak yang dihapusbukukan senilai Rp9.208.465.044.850,00 disebabkan oleh adanya penghapustagihan piutang pajak, pembayaran/pelunasan oleh Wajib Pajak dan penghitungan kembali daluwarsa piutang pajak serta adanya penambahan daluwarsa piutang pajak pada Tahun 2018. Perhitungan rincian perubahan status daluwarsa dapat dilihat pada tabel Tabel IV.C.2.1.5.h.

Tabel IV.C.2.1.5.h.
Rincian Perubahan Status Daluwarsa
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

31 Desember 2017		31 Desember 2018		Perubahan Nilai
Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai	
Daluwarsa Penagihan	621.501.443.551,98	Belum Daluwarsa	-	
	21.213.503.685.595,40	Daluwarsa Penagihan	15.397.138.425.271,60	
	2.701.682.591,00	Daluwarsa Penetapan	2.040.043.550,00	
Total Daluwarsa Penagihan	**21.837.706.811.738,30**	**Total Daluwarsa**	**15.399.178.468.821,60**	**6.438.528.342.916,73**
Daluwarsa Penetapan	7.256.884.429.646,74	Belum Daluwarsa	-	
	1.579.864.856.426,92	Daluwarsa Penagihan	1.363.248.024.844,32	
	2.079.740.747.126,85	Daluwarsa Penetapan	1.615.837.495.960,69	
Total Daluwarsa Penetapan	**10.916.490.033.200,50**	**Total Daluwarsa**	**2.979.085.520.805,01**	**7.937.404.512.395,49**
Grand Total	**32.754.196.844.938,80**	**Grand Total**	**18.378.263.989.626,60**	**14.375.932.855.312,20**

Dari total hapus buku Tahun 2018 sebesar Rp23.545.731.800.089,00, senilai Rp18.378.263.989.626,60 berasal dari Tahun 2017 dan penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp5.167.467.810.463,69 dengan rincian sebagaimana tabel IV.C.2.1.5.i.

Tabel IV.C.2.1.5.i.
Rincian Nilai Daluwarsa Tahun Berjalan per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Daluwarsa Penagihan	Daluwarsa Penetapan	Total
Piutang PPh Pasal 21	104.481.008.138,02	174.558.385,56	104.655.566.523,58
Piutang PPh Pasal 22	13.946.140.190,07	984.964,00	13.947.125.154,07
Piutang PPh Pasal 23	106.100.531.924,92	64.398.517,00	106.164.930.441,92
Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	94.249.405.967,56	380.233.391,00	94.629.639.358,56
Piutang PPh Pasal 25 Badan	1.171.013.333.670,51	2.179.903.023,60	1.173.193.236.694,11
Piutang PPh Pasal 26	85.899.823.839,68	187.637.481,00	86.087.461.320,68
Piutang PPh Final	246.437.694.747,86	633.923.238,16	247.071.617.986,02
Piutang PPN Dalam Negeri	2.163.922.265.846,43	50.309.788.281,00	2.214.232.054.127,43
Piutang PPnBM Dalam Negeri	21.776.853.859,00	6.553.225.278,00	28.330.079.137,00
Piutang PBB Perkebunan	59.774.640.464,50	3.978.025.562,00	63.752.666.026,50
Piutang PBB Kehutanan	43.345.286.921,00	19.222.894.986,00	62.568.181.907,00
Piutang PBB Pertambangan	254.924.684.775,00	60.170.825.007,00	315.095.509.782,00
Piutang Bunga Penagihan PPh	175.846.151.436,00	328.519.958.304,34	504.366.109.740,34
Piutang Bunga Penagihan PPN	92.725.244.184,48	60.624.703.305,00	153.349.947.489,48
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	23.684.775,00	-	23.684.775,00
Total	**4.634.466.750.740,03**	**533.001.059.723,66**	**5.167.467.810.463,69**

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 248.503 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp83.514.611.978.805,- dan US$953.466.142. Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.5.j.
Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPKBT
Terbit 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Data	Nilai Ketetapan Pajak	Nilai Setuju	Nilai Tidak Setuju
PPh Final	IDR	70.290	6.059.092.433.684	1.237.839.170.756	4.821.253.262.928
	USD	13	25.574.777	10.733.841	14.840.936
PPh Pasal 21	IDR	16.531	2.119.367.528.952	1.089.014.659.370	1.030.352.869.582
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 22	IDR	2.600	1.967.832.136.875	494.271.760.096	1.473.560.376.779
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 23	IDR	34.591	6.395.152.601.047	1.677.038.792.802	4.718.113.808.245
	USD	2	181.998	4.625	177.373
PPh Pasal 25 Badan	IDR	7.007	26.192.419.076.089	5.277.029.225.364	20.915.389.850.725
	USD	329	927.709.368	125.624.843	802.084.525
Pph Pasal 25 OP	IDR	2.957	623.050.170.156	329.538.654.607	293.511.515.549
	USD	-	-	-	-
Pph Pasal 26	IDR	3.773	4.536.487.011.007	1.100.179.416.165	3.436.307.594.842
	USD	-	-	-	-
PPN	IDR	110.286	35.514.020.301.861	8.113.984.733.539	27.400.035.568.322
	USD	-	-	-	-
PPnBM	IDR	44	81.336.050.783	48.570.482.071	32.765.568.712
	USD	-	-	-	-
Bea Materai	IDR	80	25.854.668.351	6.503.024.351	19.351.644.000
	USD	-	-	-	-
Total	**IDR**	**248.159**	**83.514.611.978.805**	**19.373.969.919.121**	**64.140.642.059.684**
	USD	**344**	**953.466.142**	**136.363.309**	**817.102.834**

Pelaksanaan penagihan pajak mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Atas ketetapan yang telah disetujui oleh Wajib Pajak, penagihan pajak dapat langsung dilakukan secara aktif atau *hard collection* dilaksanakan dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, yang dilanjutkan dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak. Setelah Surat Paksa disampaikan, penagihan pajak dapat dilanjutkan dengan pemblokiran, penyitaan, pencegahan maupun penyanderaan. Sedangkan atas ketetapan yang belum disetujui, penagihan aktif dilakukan setelah terbit keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Upaya menagih pajak secara *soft collection* juga dilaksanakan sebagai upaya alternatif dan pendukung selain menggunakan cara penagihan pajak secara *hard collection*. Contoh dari kegiatan *soft collection* adalah himbauan persuasif baik melalui undangan tatap muka maupun melalui telepon dan sarana komunikasi lainnya oleh petugas juru sita.

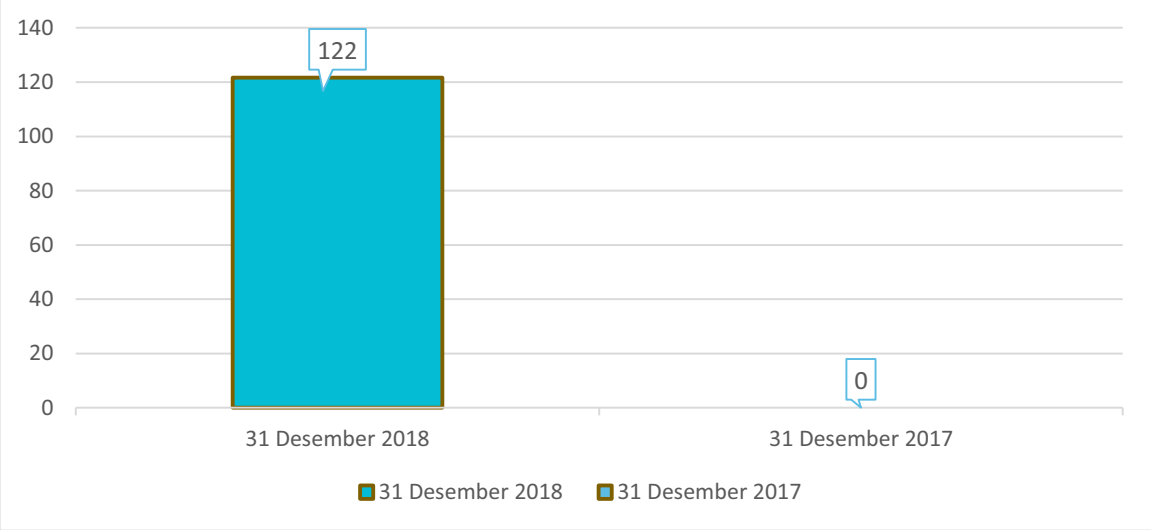
C.2.1.6. Piutang Bukan Pajak

Jumlah Piutang Bukan Pajak Bruto Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp121.646.902,00, sedangkan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak Tahun 2018 seluruhnya berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel V.C.2.1.6.a
Perbandingan Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak	121.646.902	-	121.646.902	100,00

Grafik V.C.2.1.6.
Perbandingan Piutang Bukan Pajak Neto
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp608.235,00 dan Rp0,00 yang merupakan estimasi atas piutang bukan pajak yang tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo penyisihan berasal dari penyisihan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perhitungan penyisihan piutang bukan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.b
Penyisihan Piutang Bukan Pajak - Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	121.646.902	-	121.646.902	100,00
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(608.235)	-	(608.235)	(100,00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	**121.038.667**	**-**	**121.038.667**	**100,00**

Tabel V.C.2.1.6.c
Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak - Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	Piutang Bukan Pajak (Bruto)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	Piutang Bukan Pajak (Netto)
Lancar	121.646.902	0,5%	(608.235)	121.038.667
Kurang Lancar	-	10%	-	-
Diragukan	-	50%	-	-
Macet	-	100%	-	-
Jumlah	**121.646.902**		**(608.235)**	**121.038.667**

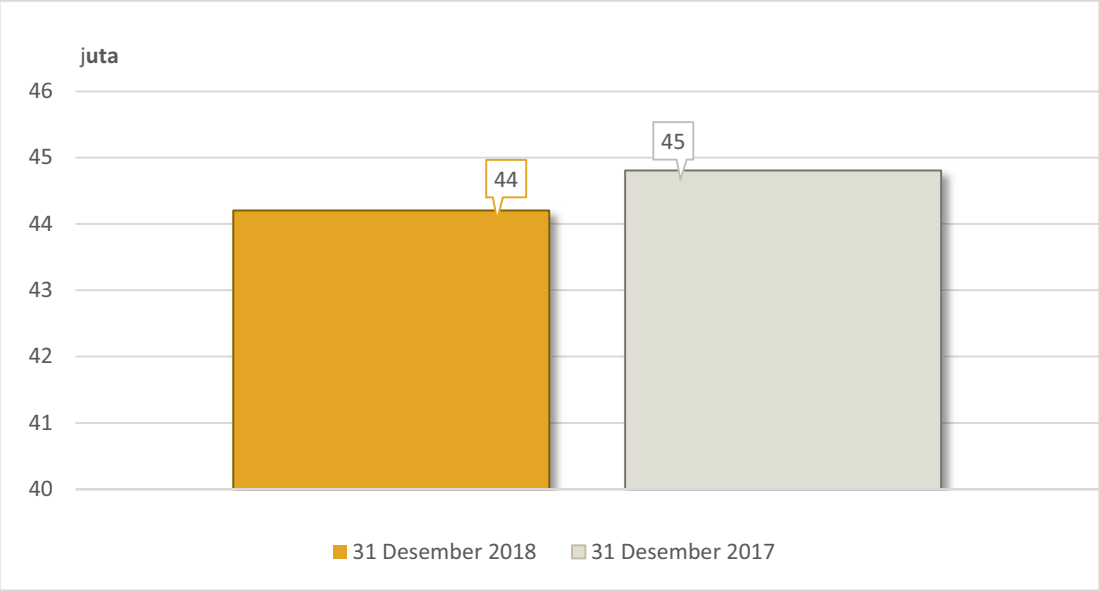
C.2.1.7. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (BL-TP/TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2018 sebesar Rp44.204.985,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp44.808.000,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp603.015,00 atau sebesar 1,35 persen. Daftar BL-TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.7.a
Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	44.204.985	44.808.000	(603.015)	(1,35)

Grafik V.C.2.1.7.a
Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan BL-TP/TGR Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp221.025,00 dan Rp224.040.00. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.7.b
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	44.204.985	44.808.000	(603.015)	(1,35)
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	(221.025)	(224.040)	(3.015)	(1,35)
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	**43.983.960**	**44.583.960**	**(600.000)**	**(1,35)**

Tabel V.C.2.1.7.c
Perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	BL TP/TGR (Bruto)	% Penyisihan	Penyisihan BL TP/TGR	BL TP/TGR (Netto)
Lancar	44.204.985	0,5%	221.025	43.983.960
Kurang Lancar	-	10,0%	-	-
Diragukan	-	50,0%	-	-
Macet	-	100,0%	-	-
Jumlah	**44.204.985**	**-**	**221.025**	**43.983.960**

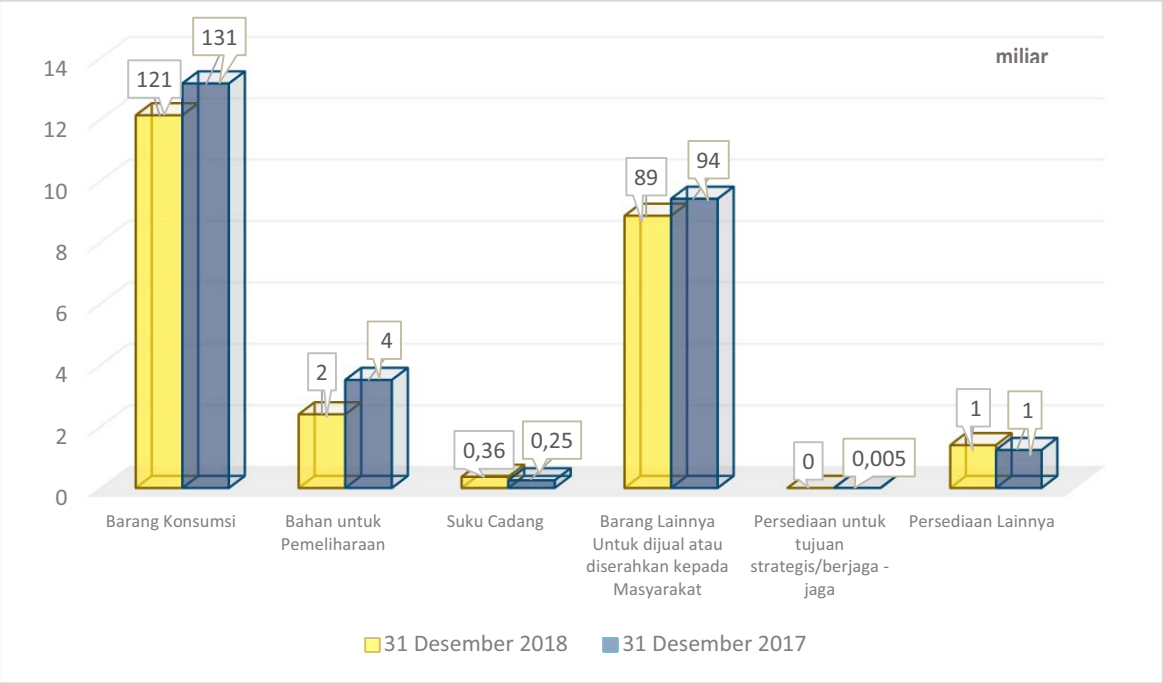
C.2.1.8 Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp213.988.601.157,00. Nilai persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya per 31 Desember 2018 sebagaimana Tabel V.C.2.1.8 dan Grafik V.C.2.1.8 berikut:

Tabel V.C.2.1.8.
Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	121.308.783.499	131.675.986.726	(10.367.203.227)	(7,87)
Bahan untuk Pemeliharaan	2.391.474.685	3.507.997.425	(1.116.522.740)	(31,83)
Suku Cadang	362.372.703	249.054.117	113.318.586	45,50
Barang Lainnya Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	88.536.417.594	94.095.068.922	(5.558.651.328)	(5,91)
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	-	5.185.178	(5.185.178)	(100,00)
Persediaan Lainnya	1.389.552.676	1.233.523.167	156.029.509	12,65
Jumlah Persediaan	**213.988.601.157**	**230.766.815.535**	**(16.778.214.378)**	**(7,27)**

Grafik V.C.2.1.8.
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam miliaran rupiah)



Nilai Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak merupakan saldo persediaan benda meterai yang terdiri dari kopur Rp3.000,- dan Rp6.000,-. Nilai yang disajikan dalam neraca tersebut menggunakan nilai perolehan/pengadaan yaitu untuk kopur Rp3.000,- dan kopur Rp6.000,- sebesar Rp246,- sesuai dengan paket pengadaan yang terealisasi. Untuk detil jumlah akhir persediaan benda meterai adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kopur Rp.3.000		Kopur Rp.6.000		Jumlah	
		Keping	Rupiah	Keping	Rupiah	Keping	Rupiah
1	Persediaan benda meterai di gudang pusat Bandung per 31 Desember 2018	10.900.050	2.681.412.300	218.400.600	53.726.547.600	229.300.650	56.407.959.900
2	Persediaan benda meterai di SPV Keuangan per 31 Desember 2018	8.839.864	2.174.606.544	109.234.324	26.871.643.704	118.074.188	29.046.250.248
3	Persediaan benda meterai titipan per 31 Desember 2018	2.605.043	640.840.578	7.803.879	1.919.754.234	10.408.922	2.560.594.812
4	Jumlah Total Benda Meterai Baik per 31 Desember 2018	22.344.957	5.496.859.422	335.438.803	82.517.945.538	357.783.760	88.014.804.960

Dari nilai persediaan tersebut tidak terdapat persediaan benda meterai usang/rusak.

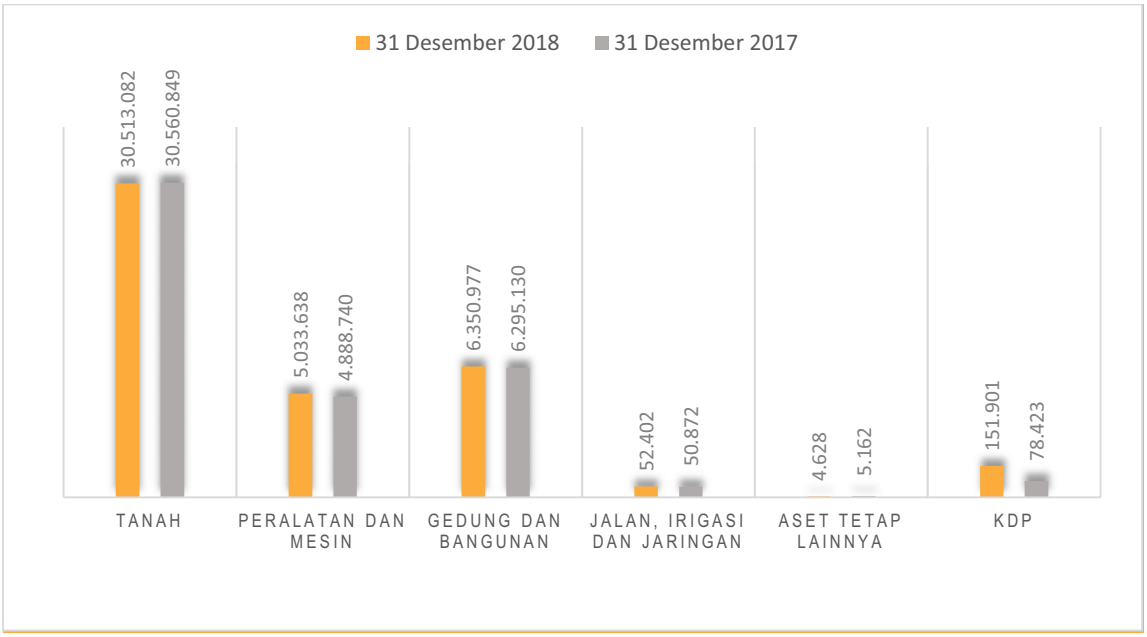
C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp37.462.975.636.990,00. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagaimana Tabel V.C.2.2 di bawah ini.

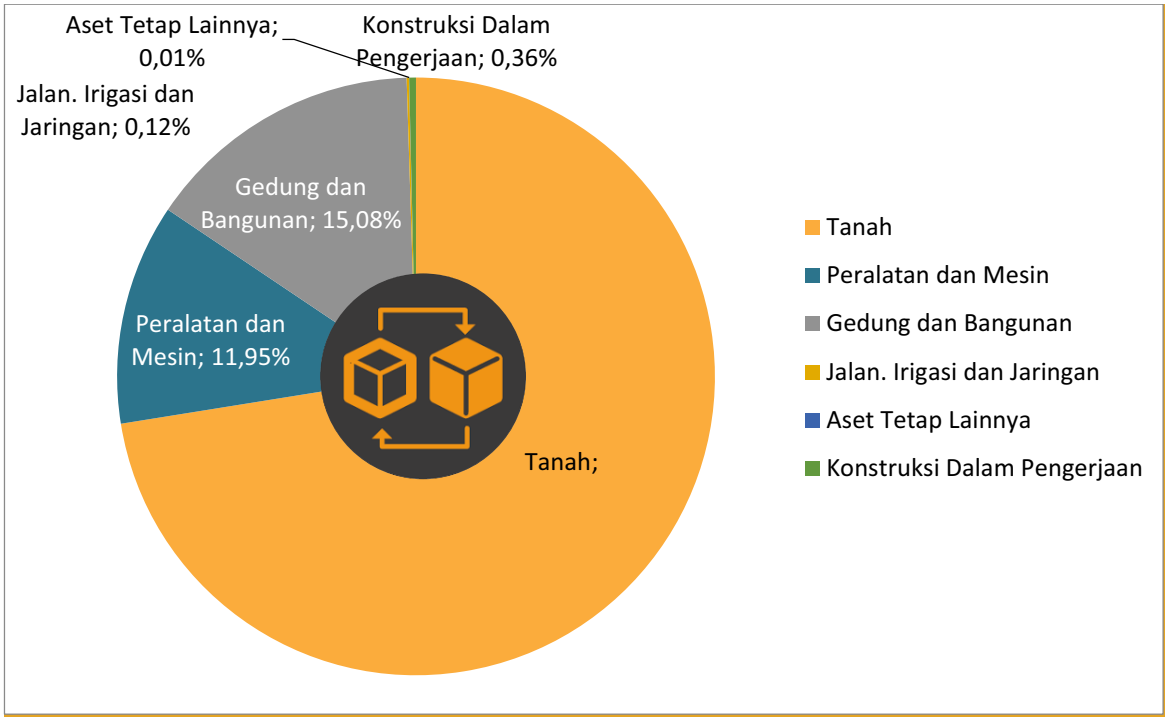
Tabel V.C.2.2.
Aset Tetap
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Tanah	30.513.082.118.507	30.560.848.847.468	(47.766.728.961)	(0,16)
Peralatan dan Mesin	5.033.638.332.737	4.888.740.018.318	144.898.314.419	2,96
Gedung dan Bangunan	6.350.977.037.134	6.295.130.265.102	55.846.772.032	0,89
Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Jalan dan Jembatan	8.355.614.800	8.988.937.054	(633.322.254)	(7,05)
Irigasi	7.018.063.800	7.040.130.800	(22.067.000)	(0,31)
Jaringan	37.028.227.055	34.842.879.896	2.185.347.159	6,27
Aset Tetap Lainnya				
Aset Tetap Renovasi	-	2.447.575.000	(2.447.575.000)	(100,00)
Aset Tetap Lainnya	4.627.741.604	5.162.214.809	(534.473.205)	(10,35)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	151.901.409.029	78.422.698.733	73.478.710.296	93,70
Total Aset Tetap Bruto	**42.106.628.544.666**	**41.881.623.567.180**	**225.004.977.486**	**0,54**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018 (selain tanah)	**(4.643.652.907.676)**	**(4.270.051.143.221)**	**(373.601.764.455)**	**8,75**
Nilai Buku Aset Tetap	**37.462.975.636.990**	**37.611.572.423.959**	**(148.596.786.969)**	**(0,40)**

Grafik V.C.2.2.a.
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



Grafik V.C.2.2.b.
Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2018



Per 31 Desember 2018 terdapat realisasi belanja modal neto sebesar Rp541.494.884.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	MAK	Uraian	Realisasi Belanja Modal
1.	5311	Belanja Modal Tanah	-
2.	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	328.575.243.625
3.	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.812.303.040
4.	5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.491.297.935
5.	5361	Belanja Modal Lainnya	48.616.040.300
JUMLAH			**541.494.884.900**

C.2.2.1. Tanah

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.513.082.118.507,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.766.728.961,00 atau 0,16 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp30.560.848.847.468,00. Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.1.a berikut:

Tabel V.C.2.2.1.a.
Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	13.145.297.260.170	13.145.297.260.170	-
KPDDP Jambi	21.373.517.000	21.373.517.000	-
KPDDP Makassar	94.343.750.000	94.343.750.000	-
Kanwil DJP Aceh	137.293.166.000	141.168.681.000	2,82
Kanwil DJP Sumatera Utara I	603.456.167.000	603.456.167.000	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	238.244.023.000	238.244.023.000	-
Kanwil DJP Riau	261.649.203.500	179.823.222.000	(31,27)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	306.956.044.000	307.536.803.045	0,19
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	548.068.244.000	548.353.844.938	0,05
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	202.560.261.000	202.620.761.000	0,03
Kanwil DJP Jakarta Pusat	1.399.832.792.352	1.399.832.792.352	-
Kanwil DJP Jakarta Barat	677.932.951.000	677.932.951.000	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	706.859.121.000	706.859.121.000	-
Kanwil DJP Jakarta Timur	498.595.599.000	498.595.599.000	-
Kanwil DJP Jakarta Utara	279.298.634.000	279.298.634.000	-
Kanwil DJP Banten	708.830.683.000	708.830.683.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	894.080.550.000	894.080.550.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat II	426.731.890.000	422.081.644.000	(1,09)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	714.307.468.500	714.307.468.500	-
Kanwil DJP Jawa Tengah II	573.108.701.860	535.880.861.860	(6,50)
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	296.639.118.000	296.639.118.000	-
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.248.913.692.504	1.248.913.692.504	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	671.193.810.000	671.193.810.000	-
Kanwil DJP Jawa Timur III	726.410.393.000	726.410.392.000	-
Kanwil DJP Kalimantan Barat	403.222.195.000	401.585.413.000	(0,41)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	410.102.502.000	410.102.502.000	-
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	718.830.430.000	718.221.055.000	(0,08)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	511.855.252.000	512.109.743.577	0,05
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	549.383.309.521	543.001.660.500	(1,16)
Kanwil DJP Bali	377.797.605.000	377.797.605.000	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	315.281.069.326	315.281.069.326	-
Kanwil DJP Papua dan Maluku	413.939.699.000	411.746.799.000	(0,53)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	522.601.972.000	522.601.972.000	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	469.343.929.000	469.343.929.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	486.513.844.735	486.513.844.735	-
Kanwil DJP Kepulauan Riau	-	81.701.179.000	100,00
Jumlah	**30.560.848.847.468**	**30.513.082.118.507**	**(0,16)**

Mutasi Tanah per 31 Desember 2018 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.2.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah
Per 31 Desember 2018

	Uraian	Kuantitas	Rupiah
	SALDO AWAL	**3.443.117**	**30.560.848.847.468**
	Mutasi Tambah:		
100	Penambahan Saldo Awal	6.210	2.432.620.000
102	Transfer Masuk	387.613	479.367.776.622
103	Hibah (Masuk)	12.208	945.851.560
106	Pembatalan Penghapusan	1.566	713.822.000
107	Reklasifikasi Masuk	14.286	119.502.794.000
203	Koreksi Perubahan Kondisi	4.901	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	7.413	-
	Mutasi Keluar:		
222	Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi (-)	(1.227)	-
225	Koreksi Kesalahan input IP	-	(1.000)
301	Penghapusan	(1.566)	(713.822.000)
302	Transfer Keluar	(390.608)	(519.734.097.622)
304	Reklasifikasi Keluar	(15.182)	(119.502.794.000)
305	Koreksi Pencatatan	(9.003)	(10.778.878.521)
	Saldo per 31 Desember 2018	**3.459.728**	**30.513.082.118.507**

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2018 Rp30.513.082.118.507,00 mengalami penurunan sebesar Rp47.766.728.961,00 atau 0,16 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp30.560.848.847.468,00. Kuantitas Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2018 sejumlah 3.459.728 meter persegi.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5.033.638.332.737,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.2. berikut:

Tabel V.C.2.2.2.a
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	1.000.320.408.048	1.148.475.660.974	14,81
PPDDP	83.764.665.093	84.533.936.593	0,92
KPDE	12.704.588.164	13.598.939.365	7,04
KLIP	6.507.532.823	8.022.024.453	23,27
KPDDP Makassar	18.205.764.124	41.503.249.927	127,97
KPDDP Jambi	41.530.156.247	19.031.981.782	(54,17)
Kanwil DJP Aceh	82.368.257.286	85.255.867.974	3,51
Kanwil DJP Sumatera Utara I	100.360.850.632	100.333.919.669	(0,03)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	103.926.728.161	105.483.168.286	1,50
Kanwil DJP Riau	125.631.296.336	89.237.267.817	(28,97)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	104.638.163.536	110.486.596.638	5,59
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	140.218.484.078	140.141.403.875	(0,05)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	99.584.230.131	98.953.613.023	(0,63)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	201.081.398.481	192.600.446.373	(4,22)
Kanwil DJP Jakarta Barat	102.565.871.835	102.871.705.473	0,30
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	97.294.381.801	96.300.234.732	(1,02)
Kanwil DJP Jakarta Timur	89.210.262.243	86.011.204.461	(3,59)
Kanwil DJP Jakarta Utara	84.694.639.707	83.526.690.242	(1,38)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	89.069.029.943	85.499.264.612	(4,01)
Kanwil DJP Banten	110.729.524.576	108.565.042.501	(1,95)
Kanwil DJP Jawa Barat I	166.482.326.719	161.826.067.044	(2,80)
Kanwil DJP Jawa Barat II	116.051.286.954	107.452.045.631	(7,41)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	183.570.717.586	176.893.734.986	(3,64)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	121.119.743.814	121.390.230.253	0,22
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	58.463.084.004	59.784.511.335	2,26
Kanwil DJP Jawa Timur I	131.109.188.206	130.089.862.221	(0,78)
Kanwil DJP Jawa Timur II	160.787.626.211	166.742.294.976	3,70
Kanwil DJP Jawa Timur III	148.102.644.242	147.380.950.596	(0,49)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	68.752.334.669	72.046.154.419	4,79
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	109.809.357.501	114.372.505.171	4,16
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	92.351.831.707	97.319.285.553	5,38
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	165.625.049.041	167.958.872.480	1,41
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	129.435.293.943	129.244.500.720	(0,15)
Kanwil DJP Bali	80.804.516.185	83.405.308.212	3,22
Kanwil DJP Nusa Tenggara	123.688.635.366	125.133.926.156	1,17
Kanwil DJP Papua dan Maluku	85.703.911.116	84.526.551.387	(1,37)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	87.722.954.759	82.122.923.951	(6,38)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	71.159.638.821	71.584.970.070	0,60
Kanwil DJP Jawa Barat III	93.593.644.229	93.944.841.760	0,38
Kanwil DJP Kepulauan Riau	-	39.986.577.046	100,00
Saldo	**4.888.740.018.318**	**5.033.638.332.737**	**2,96**
Akum. Penyusutan	**(4.105.020.850.480)**	**(4.242.737.268.018)**	**3,35**
Nilai Buku	**783.719.167.838**	**790.901.064.719**	**0,92**

Tabel V.C.2.2.2.b
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2018

	Uraian	Kuantitas	Rupiah
	Saldo Awal	**596.763**	**4.888.740.016.918,00**
	Mutasi Tambah:		
100	Koreksi Saldo Awal	62	2.421.355.540,00
101	Pembelian	19.851	148.774.823.891,00
102	Transfer Masuk	33.899	230.822.943.121,00
103	Hibah (Masuk)	2	15.200.000,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4.134	166.611.963.999,00
106	Pembatalan Penghapusan	2	37.162.000,00
107	Reklasifikasi Masuk	522	4.417.668.676,00
112	Perolehan Lainnya	2	5.300.000,00
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	968	7.858.300.871,00
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	95	613.040.645,00
202	Pengembangan Nilai Aset	-	34.827.055.071,00
203	Koreksi Perubahan Kondisi	-	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-	97.328.000,00
209	Transaksi Normalisasi BMN	53	423.547.550,00
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	-	-
	Mutasi Kurang:		
301	Penghapusan	(1.723)	(6.620.520.473,00)
302	Transfer Keluar	(29.164)	(216.604.975.259,00)
303	Hibah (Keluar)	(1)	(29.726.136,00)
304	Reklasifikasi Keluar	(104)	(3.887.699.136,00)
305	Koreksi Pencatatan	(15)	(273.561.750,00)
306	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(86)	(240.565.503,00)
308	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(1)	(41.167.000,00)
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-	-
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(34.750)	(224.329.158.288,00)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	-

	Uraian	Kuantitas	Rupiah
921	Internal Transfer Keluar	(5.263)	(61.734.107.828,00)
922	Internal Transfer Masuk	5.263	61.734.107.828,00
S02	Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran	-	-
	Saldo Per 31 Desember 2018	**590.509**	**5.033.638.332.737,00**

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.033.638.332.737,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.242.737.268.018,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp790.901.064.719,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp144.898.314.419,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 2,96 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.888.740.018.318,00.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp6.350.977.037.134,00. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana tabel V.C.2.2.3. berikut:

Tabel V.C.2.2.3.a.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
KPDJP	1.234.833.240.528	1.240.078.482.551	0,42
PPDDP	77.110.112.300	77.110.112.300	-
KPDDP Jambi	56.960.948.400	56.960.948.400	-
KPDDP Makassar	69.766.924.000	71.360.257.750	2,28
Kanwil DJP Aceh	76.991.559.856	78.569.985.309	2,05
Kanwil DJP Sumatera Utara I	198.070.167.193	198.049.167.193	(0,01)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	81.155.467.600	81.058.414.600	(0,12)
Kanwil DJP Riau	88.047.199.796	51.715.431.280	(41,26)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	126.191.887.419	130.639.879.408	3,52
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	180.722.003.984	183.152.285.155	1,34
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	100.674.024.597	101.315.588.569	0,64
Kanwil DJP Jakarta Pusat	437.249.840.000	437.249.840.000	-
Kanwil DJP Jakarta Barat	177.040.825.000	177.234.714.701	0,11
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	153.223.969.000	148.438.473.806	(3,12)
Kanwil DJP Jakarta Timur	87.755.492.000	87.755.492.000	-
Kanwil DJP Jakarta Utara	131.076.338.000	131.076.338.000	-
Kanwil DJP Jakarta Khusus	180.061.008.000	180.061.008.000	-

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
Kanwil DJP Banten	116.429.907.000	117.571.519.443	0,98
Kanwil DJP Jawa Barat I	165.140.788.152	187.453.207.350	13,51
Kanwil DJP Jawa Barat II	102.730.460.412	103.027.103.412	0,29
Kanwil DJP Jawa Tengah I	180.854.207.670	180.946.495.670	0,05
Kanwil DJP Jawa Tengah II	135.453.515.000	134.670.903.750	(0,58)
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	95.051.621.000	95.286.769.600	0,25
Kanwil DJP Jawa Timur I	155.836.098.000	158.043.656.000	1,42
Kanwil DJP Jawa Timur II	240.325.900.900	240.746.034.900	0,17
Kanwil DJP Jawa Timur III	204.695.521.755	198.810.056.496	(2,88)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	64.584.292.000	64.336.070.000	(0,38)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	108.901.036.000	116.854.897.970	7,30
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	156.240.831.970	159.175.698.429	1,88
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	167.856.009.018	195.793.501.638	16,64
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	193.453.868.659	184.220.475.000	(4,77)
Kanwil DJP Bali	85.490.302.903	87.489.069.703	2,34
Kanwil DJP Nusa Tenggara	95.151.527.246	95.337.647.901	0,20
Kanwil DJP Papua dan Maluku	246.102.811.600	235.622.965.000	(4,26)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	157.504.886.000	157.504.886.000	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	94.284.964.000	94.284.964.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	72.110.708.144	76.088.047.090	5,52
Kanwil DJP Kepulauan Riau	-	35.886.648.760	100,00
Saldo	**6.295.130.265.102**	**6.350.977.037.134**	**0,89**
Akum. Penyusutan	**(148.977.685.685)**	**(381.901.235.225)**	**156,35**
Nilai Buku	**6.146.152.579.417**	**5.969.075.801.909**	**(2,88)**

Tabel V.C.2.2.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2018

	Uraian	Kuantitas	Rupiah
000	**Saldo Awal**	**4.804**	**6.295.130.265.102**
	Mutasi Tambah:		
100	Koreksi Saldo Awal	3	247.330.023
101	Pembelian	1	193.889.701
102	Transfer Masuk	566	186.359.386.083
103	Hibah (Masuk)	2	407.505.000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	9	33.443.574.683
106	Pembatalan Penghapusan	2	98.288.000
107	Reklasifikasi Masuk	42	17.772.168.873
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1	197.148.600
120	Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	2	70.511.000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	47.120.000
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	6	470.557.000
199	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	1	7.026.344
202	Pengembangan Nilai Aset	-	5.161.512.245
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-	(1.121.260.059)
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-	51.466.567
208	Pengembangan Melalui KDP	-	46.159.013.198
209	Transaksi Normalisasi BMN	(4)	(332.203.945)
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-	(15.139.087)
225	Koreksi Kesalahan input IP	-	894.437.000
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	-	-
228	Koreksi Penyusutan Karena 225	-	-
290	Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	-	-
	Mutasi Keluar:		
301	Penghapusan	(3)	(99.300.000)
302	Transfer Keluar	(539)	(187.939.960.283)
304	Reklasifikasi Keluar	(82)	(22.297.288.873)
305	Koreksi Pencatatan	(32)	(19.089.561.038)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(49)	(4.839.449.000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	-
S02	Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran	-	-
	Saldo per 31 Desember 2018	**4.731**	**6.350.977.037.134**

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.350.977.037.134,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp381.901.235.225,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp5.969.075.801.909,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp55.846.772.032,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 0,89 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp6.295.130.265.102,00.

C.2.2.4. Jalan dan Jembatan

Nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.355.614.800,00. Rincian mutasi Jalan dan Jembatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.2.4. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.a.
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	93.320.000	93.320.000	-
Kanwil DJP Aceh	113.150.000	113.150.000	-
Kanwil DJP Sumatera Utara I	1.092.765.000	1.092.765.000	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	621.103.470	596.951.000	(3,89)
Kanwil DJP Riau	95.612.000	95.612.000	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	847.813.784	613.644.000	(27,62)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	33.885.000	33.885.000	-
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	289.221.000	289.221.000	-
Kanwil DJP Banten	231.038.000	231.038.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	115.981.000	115.981.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat II	39.687.000	39.687.000	-
Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.065.679.800	2.065.679.800	-
Kanwil DJP Jawa Tengah II	436.659.000	436.659.000	-
Kanwil DJP Kalimantan Barat	72.180.000	72.180.000	-
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	64.807.000	64.807.000	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	985.375.000	985.375.000	-
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	1.618.609.000	1.243.609.000	(23,17)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	172.051.000	172.051.000	-
Saldo	**8.988.937.054**	**8.355.614.800**	**(7,05)**
Akum. Penyusutan	**(2.526.421.781)**	**(4.557.198.812)**	**(80,38)**
Nilai Buku	**6.462.515.273**	**3.798.415.988**	**41,22**

Tabel V.C.2.2.4.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	**44.666**	**8.988.937.054**
	Mutasi Tambah:		
102	Transfer Masuk	7.450	755.892.000
	Mutasi Keluar:		
302	Transfer Keluar	(7.450)	(755.892.000)
305	Koreksi Pencatatan	(5.614)	(631.067.973)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(86)	(2.254.281)
	Saldo per 31 Desember 2018	**38.966**	**8.355.614.800**

Saldo Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.355.614.800,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.557.198.812,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp3.798.415.988,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp633.322.254,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 7,05% persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp8.988.937.054,00.

C.2.2.5. Irigasi

Nilai Irigasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.018.063.800,00. Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5. berikut:

Tabel V.C.2.2.5.a.
Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	26.305.000	26.305.000	-
KPDDP Jambi	1.149.986.000	1.149.986.000	-
Kanwil DJP Aceh	117.864.000	115.064.000	(2,38)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	27.335.000	27.335.000	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	18.736.000	18.736.000	-
Kanwil DJP Riau	236.488.000	231.941.000	(1,92)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	153.532.000	144.032.000	(6,19)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	20.662.000	20.662.000	-
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	312.669.000	312.669.000	-
Kanwil DJP Jakarta Pusat	12.483.000	12.483.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	90.454.000	80.687.000	(10,80)
Kanwil DJP Jawa Barat II	3.464.000.000	3.464.000.000	-
Kanwil DJP Jawa Tengah I	234.309.000	234.309.000	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	379.373.000	379.373.000	-
Kanwil DJP Jawa Timur III	8.675.000	8.675.000	-
Kanwil DJP Kalimantan Barat	94.653.000	94.653.000	-
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	209.322.000	209.322.000	-
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	8.036.000	8.036.000	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	168.060.000	168.060.000	-
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	90.658.800	90.658.800	-
Kanwil DJP Bali	21.194.000	21.194.000	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	10.342.000	10.342.000	-
Kanwil DJP Papua dan Maluku	183.656.000	183.656.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	1.338.000	1.338.000	-
Kanwil DJP Kepulauan Riau	-	4.547.000	-
Saldo	**7.040.130.800**	**7.018.063.800**	**(0,31)**
Akum. Penyusutan	**(247.297.545)**	**(655.758.237)**	**165,17**
Nilai Buku	**6.792.833.255**	**6.362.305.563**	**(6,34)**

Tabel V.C.2.2.5.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Irigasi Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	**77**	**7.040.130.800**
	Mutasi Tambah:		
102	Transfer Masuk	8	179.484.000
107	Reklasifikasi Masuk	1	5.564.000
	Mutasi Keluar		
302	Transfer Keluar	(8)	(179.484.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(5.564.000)
305	Koreksi Pencatatan	(1)	(9.500.000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2)	(12.567.000)
	Saldo per 31 Desember 2018	**74**	**7.018.063.800**

Saldo Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.018.063.800,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp655.758.237,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp6.362.305.563,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp22.067.000,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 0,31 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.040.130.800,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2018 sebanyak 74 unit, yang terdiri atas 34 unit bangunan air bersih/baku, 19 unit bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, 2 unit bangunan air irigasi, 13 unit bangunan air kotor, 5 unit bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam, dan 1 unit bangunan pengairan pasang surut.

C.2.2.6. Jaringan

Nilai Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp37.028.227.055,00. Rincian mutasi Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.2.6.a.
Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	12.046.733.028	12.046.733.028	-
KPDDP Makassar	20.625.000	4.950.000	(76,00)
KPDDP Jambi	4.950.000	20.625.000	316,67
Kanwil DJP Aceh	126.316.808	126.316.808	-
Kanwil DJP Sumatera Utara I	599.920.577	599.920.577	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	357.878.010	557.393.810	55,75
Kanwil DJP Riau	975.915.562	696.953.762	(28,58)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	247.612.300	247.612.300	-
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	356.998.800	356.998.800	-
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	84.705.500	84.705.500	-
Kanwil DJP Jakarta Pusat	103.482.408	103.482.408	-
Kanwil DJP Jakarta Barat	43.191.500	196.091.500	354,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	593.369.000	593.369.000	-
Kanwil DJP Jakarta Timur	119.632.000	328.134.000	174,29
Kanwil DJP Jakarta Utara	74.671.000	74.671.000	-
Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	96.800.000	-
Kanwil DJP Banten	172.289.810	406.039.810	135,67
Kanwil DJP Jawa Barat I	126.956.250	126.956.250	-
Kanwil DJP Jawa Barat II	440.401.302	440.401.302	-
Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.451.105.612	2.451.105.612	-
Kanwil DJP Jawa Tengah II	745.312.000	745.312.000	-
Kanwil DJP Jawa Timur I	41.497.000	41.497.000	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	328.828.210	328.828.210	-
Kanwil DJP Jawa Timur III	710.549.260	811.794.360	14,25
Kanwil DJP Kalimantan Barat	168.518.350	592.502.600	251,60
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	3.256.958.535	2.868.587.519	(11,92)
Kanwil DJP Kalimantan Timur	86.027.450	354.427.450	311,99
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	1.032.065.045	1.028.215.045	(0,37)
Kanwil DJP Sulut Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	4.451.229.394	4.929.367.419	10,74
Kanwil DJP Bali	393.978.243	393.978.243	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	621.416.292	621.416.292	-
Kanwil DJP Papua dan Maluku	3.377.359.950	3.746.062.950	10,92
Kanwil DJP Jawa Barat III	682.385.700	682.385.700	-
Kanwil DJP Kepulauan Riau	-	324.591.800	-
Saldo	**34.842.879.896**	**37.028.227.055**	**6,27**
Akum. Penyusutan	**(13.219.869.810)**	**(13.737.970.504)**	**3,92**
Nilai Buku	**21.623.010.086**	**23.290.256.551**	**7,71**

Tabel V.C.2.2.6.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	**1.334**	**34.842.879.896**
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	31	2.792.824.334
102	Transfer Masuk	49	1.359.466.897
202	Pengembangan Nilai Aset	0	126.877.325

	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	Mutasi Keluar:		
302	Transfer Keluar	(48)	(1.317.432.897)
304	Reklasifikasi Keluar	(3)	(730.504.500)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2)	(45.884.000)
	Saldo per 31 Desember 2018	**1.361**	**37.028.227.055**

Saldo Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp37.028.227.055,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp13.737.970.504,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp23.290.256.551,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.185.347.159,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 6,27 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp34.842.879.896,00.

C.2.2.7. Aset Tetap Renovasi

Jumlah Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.7a. berikut

Tabel V.C.2.2.7a.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Renovasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jawa Barat III	2.447.575.000,00	-	-
Saldo Per 31 Desember 2018	**5.162.214.809**	**4.627.741.604**	**(100,00)**

Tabel V.C.2.2.7a.b
Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2018

	Saldo Awal	**1**	**2.447.575.000,00**
	Mutasi Kurang:		
302	Transfer Keluar	1	2.447.575.000,00
	Saldo Per 31 Desember 2018		**0,00**

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dikarenakan pada pertengahan tahun 2018 Kanwil DJP Jawa Barat III telah menyelesaikan Renovasi Gedungnya dan telah di transfer keluar.

C.2.2.8. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.627.741.604,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.7. berikut:

Tabel V.C.2.2.7.a
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	1.579.703.905	1.638.922.315	3,75
PPDDP	59.404.615	59.404.615	-
Kanwil DJP Aceh	38.350.000	38.350.000	-
Kanwil DJP Sumatera Utara I	97.475.280	97.475.280	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.330.000	3.330.000	-
Kanwil DJP Riau	317.675.558	31.872.000	(89,97)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	73.046.258	73.046.258	-
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	15.746.955	15.746.955	-
Kanwil DJP Jakarta Pusat	203.063.466	151.963.466	(25,16)
Kanwil DJP Jakarta Barat	8.250.000	8.250.000	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	144.892.600	144.892.600	-
Kanwil DJP Jakarta Timur	8.925.000	8.925.000	-
Kanwil DJP Jakarta Utara	1.540.000	1.540.000	-
Kanwil DJP Jakarta Khusus	85.996.889	85.996.889	-
Kanwil DJP Banten	20.050.200	20.050.200	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	641.614.700	640.614.700	(0,16)
Kanwil DJP Jawa Barat II	49.645.000	49.645.000	-
Kanwil DJP Jawa Tengah I	155.029.000	155.029.000	-
Kanwil DJP Jawa Tengah II	146.549.352	146.549.352	-
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	14.585.000	14.585.000	-
Kanwil DJP Jawa Timur I	53.545.800	53.545.800	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	60.151.165	60.151.165	-
Kanwil DJP Jawa Timur III	3.156.700	3.156.700	-
Kanwil DJP Kalimantan Barat	3.372.250	3.372.250	-
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	63.317.408	63.317.408	-
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	13.200.000	13.200.000	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan. Barat. dan Tenggara	102.440.000	72.500.000	(29,23)
Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	953.145.734	441.494.119	(53,68)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Bali	83.895.640	83.895.640	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	38.535.446	38.535.446	-
Kanwil DJP Papua dan Maluku	84.232.388	84.232.388	-
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	2.789.500	2.789.500	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	21.240.000	21.240.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	14.319.000	14.319.000	-
Kanwil DJP Kepulauan Riau	-	285.803.558	-
Saldo Per 31 Desember 2018	**5.162.214.809**	**4.627.741.604**	**(10,35)**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	**(59.017.920)**	**(63.476.880)**	**7,56**
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	**5.103.196.889**	**4.564.264.724**	**(10,56)**

Tabel V.C.2.2.7.b
Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2018

	Saldo Awal	**4.481**	**5.157.146.809,00**
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	20	59.254.250,00
102	Transfer Masuk	33	163.124.004,00
107	Reklasifikasi Masuk	2	1.400,00
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	35.840,00
203	Koreksi Perubahan Kondisi	91	-
	Mutasi Kurang	**Kuantitas**	**Rupiah**
302	Transfer Keluar	(29)	(120.027.904,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(63)	(636.860.795,00)
S02	Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran	-	-

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.627.741.604,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp63.476.880,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp4.564.264.724,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp534.473.205,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 10,35 persen dari saldo akhir TA 2017 sebesar Rp5.162.214.809,00.

C.2.2.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Gedung dan Bangunan yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai sampai dengan akhir periode pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp151.901.409.029,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.8. berikut:

Tabel V.C.2.2.8.
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018
(Dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	48.269.730	38.606.549.311	79.880,87
Kanwil DJP Aceh	3.632.073.460	3.632.073.460	-
Kanwil DJP Banten	-	186.565.000	100,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	971.584.149	100,00
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	22.386.129.592	22.386.129.592	-
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	104.433.400	104.433.400	-
Kanwil DJP Kalimantan Timur	853.241.949	853.241.949	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	9.464.752.495	-	(100)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	40.770.812.107	43.436.902.491	6,54
Kanwil DJP Papua dan Maluku	-	3.296.237.849	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	1.162.986.000	38.020.850.647	3.169,24
Kanwil DJP Kepulauan Riau	-	406.841.181	100,00
Jumlah	**78.422.698.733**	**151.901.409.029**	**93,70**

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp73.478.710.296,00 atau 93,70 persen jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp78.422.698.733,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp151.901.409.029,00 dengan Rincian Informasi sebagai berikut:

Satker	Pekerjaan	Kontrak Pelaksaaan Pekerjaan				Nilai KDP
		Nomor dan Tanggal Kontrak	Penyedia	Jangka Waktu Pelaksanaan		
				Mulai	Akhir	
KANWIL DJP JAWA BARAT III	PEMBANGUNAN GEDUNG TAHAP I KANWIL DJP JAWA BARAT III, KPP MADYA BOGOR, KPP PRATAMA BOGOR	SPK-03/WPJ.33/BD.08/MDL/2018 TANGGAL 26 APRIL 2018	PT. YODYA KARYA (PERSERO) WILAYAH III DKI JAKARTA	26/04/2018	22/10/2018	38.020.650.647
		SPK-02/WPJ.33/BD.08/MDL/2018 TANGGAL 26 APRIL 2018	PT. WULAN CIPTA SEJATI	26/04/2018	22/10/2018	
		SPK-01/WPJ.33/BD.08/MDL/2018 TANGGAL 26 APRIL 2018	CV. GRIYA LOKA	26/04/2018	22/10/2018	
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PERENCANAAN RENOVASI RN	SPK-01/PJ.014/PRC-RENOV	PT. ABDI NUSA KREASI	TIDAK DILANJUTKAN		38.606.549.311
	PERBAIKAN DAN PENAMBAHAN SISTEM ME DAN RUANG PIMPINAN	PRJ-06/PJ.015/2018	PT. PENTAS MENARA KOMINDO	26/06/2018	31/12/2018	
		PRJ-05/PJ.015/2018	PT. MITRAPLAN KONSULTAN	03/12/2017	30/01/2018	
		PRJ-04/PJ.015/2018	PT. HUDA TATA SARANA	03/12/2017	30/01/2018	
KPP PRATAMA TANJUNG PINANG	RENOVASI RUMAH DINAS DAN SARANA PENDUKUNGNYA	SPK-002/WPJ.02/KP.07/RRD/2018	CV.ARICO GRAHA ABADI KONSULTAN	06/09/2018	19/11/2018	406.841.181
		PRJ-001/WPJ.02/KP.07/RRD/2018	CV. TITIAN REJEKI	06/09/2018	19/11/2018	
		SPK-01/WPJ.02/KP.07/RRD/2018	CV.ALMATRA BUANA	02/04/2018	21/04/2018	
KPP PRATAMA AMBON	RENOVASI RUMAH DINAS PAJAK	S-PERJ-1/WPJ.18/KP.01/PPK/2018	CV.CAROLIV	19/04/2018	18/05/2018	3.296.237.849
		S-PERJ-4/WPJ.18/KP.01/PPK/2018	CV.BRILLYAND CONSULTAN	14/08/2018	11/12/2018	
		S-PERJ-2/WPJ.18/KP.01/PPK/2018	CV. LEVCA	12/07/2018	09/10/2018	
		S-PERJ-3/WPJ.18/KP.01/PPK/2018	CV. HITAM PUTIH	05/08/2018	02/12/2018	
		S-PERJ-3/WPJ.18/KP.01/PPK/2018	FA.DANION INTI SEJAHTERA	14/08/2018	11/12/2018	
KPP PRATAMA KUPANG	RENOVASI RUMAH DINAS DAN PAGAR KPP PRATAMA KUPANG TAHUN 2018	PRJ-02/WPJ.31/PPK.04/PWSN.RENOV.RD/2018	CV, BUNGA BAKUNG	06/09/2018	14/12/2018	Rp.2.769.669.419
		PRJ-03/WPJ.31/PPK.04/PWSN.RENOV.RD/2018	CV. INDO PLANNO	23/08/2018	05/09/2018	
		PRJ-01/WPJ.31/PPK.04/PWSN.RENOV.RD/2018	CV. DESAKON	03/05/2018	23/05/2018	
KPP PRATAMA TANJUNG REDEP	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG	SPJ-01/WPJ.14/KP.07/2013	CV. RASAKARSA CIPTA MULIA	01/08/2013	28/11/2013	853.241.949
		ADD.KONT-020 01 AGUSTUS 2012	PT. RSU	01/08/2012	03/12/2012	Rp.21.632.271.120

Satker	Pekerjaan	Kontrak Pelaksaaan Pekerjaan				Nilai KDP
		Nomor dan Tanggal Kontrak	Penyedia	Jangka Waktu Pelaksanaan		
				Mulai	Akhir	
KPP PRATAMA ATAMBUA	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	23A/WPJ.31/KP.10/PPK/2012	CV DIAGONAL ENGINEERING	18/08/2012	19/02/2013	
		18/WPJ.31/KP.10/PPK/2012 31 JULI 2012	CV RIMBUN SEKAWAN UTAMA	31/07/2012	19/02/2013	
		03/WPJ.31/KP.10/PPK-GD/2016	PT. WIRATAMA GRAHA RAHATJA, PT MUSTIKA	12/08/2016	16/12/2016	
KPP MADYA SEMARANG	PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR	SPK-1/WPJ.10/KP.10/PERENCANAAN/2018	CV. CITRA ARSITAMA	25/05/2018	22/06/2018	Rp.971.584.149
		PRJ-002/WPJ.10/KP.10/PPK.KONS/2018	CV. TIARA LESTARI	15/08/2018	07/09/2018	
		SPK-01/WPJ.10/KP.10/PENGAWASAN/ 2018	CV.FASA CONSULTANT	02/09/2018	07/09/2018	
		PRJ-001/WPJ.10/KP.10/PPK.KONS/2018	CV. TIARA LESTARI	10/092018	08/12/2018	
KPP PRATAMA ENDE	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	01/WPJ.31/KP.08/2011 01 AGUSTUS 2011	CV. TIGA SATU TIGA	01/08/2011	27/12/2011	Rp.18.974.583.952.
		25/WPJ.31/KP.08/2012 14 MEI 2012	PT. CIPTA EKA PURI	14/05/2011	31/12/2012	
		26/WPJ.31/KP.08/2012 14 MEI 2012	CV.KONINDO	14/05/2011	31/12/2012	
		024/WPJ.31/KP.08/2015 20 AGUSTUS 2015	CV DESEN KONSULTAN	20/0820/15	27/11/2015	
		KONTRAK-45/WPJ.31/KP.08/2015 08 NOPEMBER 2015	CV.ADITHYA	20/08/2015	24/12/2015	
		SPK-023/WPJ.31/KP.08/2015 19 AGUSTUS 2015	CV.LIANA GRAHA SENTOSA	19/08/2015	26/11/2015	
		SPK-02/WPJ.31/KP.08/2016	PT. CIPTA EKA PURI	10/02/2016	31/12/2016	
KPP PRATAMA WATES	PEMBANGUNAN GEDUNG	SPK-03/WPJ.23/KP.04/2016	PT. JAPAYASA PRIMA KONSTRUKSINDO	14/06/2017	10/12/2017	Rp.22.386.129.592
KPP Pratama Pondok Aren	Paket Pekerjaan Pengadaan Pasang Baru Listrik PLN KPP Pratama Pondok Aren	SPK nomor SPK-2/WPJ.08/KP.1001/PPK/2018 tanggal 24 Oktober 2018	PT. PLN (PERSERO)	29/10/2018	10/11/2018	Rp.186.565.000
KPP PRATAMA BANJARBARU	PERENCANAAN	SPK.26/WPJ.29/KP.0201/2015	CV. PRESMATEK CONSULTANT	28/09/2015	12/10/2015	34.155.000
KANWIL DJP NUSA TENGGARA	PERENCANAAN	SPK-188/WPJ/BG.01/PPK/2015	CV. JASA INTI PERSADA	15/04/2015	19/05/2015	Rp.23.484.000
KPP PRATAMA SUBULUSSALAM	PEMBANGUNAN GEDUNG	S-630/WPJ.25/KP.0701/2009 TANGGAL 24 MARET 2009 S-767/WPJ.25/KP.0701/2009	PT MITRA PERDANA	25/03/2009	9/12/2009	3.632.073.460
			PT JAYA TATA BERSAMA	20/04/2009	10/12/2009	
KPP PRATAMA PANGKALAN BUN	PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS	S-707/WPJ.29/KP.07/2013	PT. MEGASURYA KONSULTAN	24/04/2013	23/05/2013	Rp.70.278.400
KPP PRATAMA RABA BIMA	Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor	S-098/WPJ.31/PPK.04/2015	CV. Geo Dase Consultan	01 Februari 2015	01 April 2015	Rp.36.894.000

C.2.3. Piutang Jangka Panjang

C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp719.559.620,00. Sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 2017 sebesar Rp691.309.821,00 sehingga TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp28.249.799,00.

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp719.559.620,00 dan Rp654.068.578,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Tabel V.C.2.3.1.
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
TP TGR (Bruto)	719.559.620	691.309.821	28.249.799	4,09
Penyisihan TP TGR	(719.559.620)	(654.068.578)	(28.249.779)	4,09
TP TGR (Netto)	-	37.241.243	(37.241.243)	(100,00)

C.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan). Aset Lainnya neto per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp148.332.125.951,00.

Tabel V.C.2.4.
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	424.555.022.710	421.503.504.074	3.051.518.636	0,72
Aset Lain-lain	525.172.940.657	461.534.158.232	63.638.782.425	13,79
Total Aset Lainnya Bruto	**949.727.963.367**	**883.037.662.306**	**66.690.301.061**	**7,55**
Akumulasi Penyusutan	**(462.733.777.542)**	**(406.319.653.480)**	**(56.414.124.062)**	**13,88**
Akumulasi Amortisasi	**(338.662.059.874)**	**(319.193.788.500)**	**(19.468.271.374)**	**6,10**
Nilai Buku Aset Lainnya	**148.332.125.951**	**157.524.220.326**	**(9.192.094.375)**	**(5,84)**

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah Rp424.555.022.710,00 yang terdiri dari: *Software*, Lisensi dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan penjelasan sebagaimana dibawah ini.

C.2.4.1.1. *Software*

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - *Software* pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp231.696.255.518,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.1.1 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.1.a
Rincian Aset Tak Berwujud – *Software* Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	*SOFTWARE*		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	201.256.774.219	192.203.645.513	(4,50)
PPDDP	28.300.656.527	28.300.656.527	-
KPDE	3.839.000.000	3.839.000.000	-
KLIP	183.967.937	1.871.766.687	917,44
Kanwil DJP Aceh	355.866.500	355.866.500	-
Kanwil DJP Sumatera Utara I	25.520.000	25.520.000	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	124.397.900	124.397.900	-
Kanwil DJP Riau	304.582.937	227.477.732	(25,32)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	67.421.159	91.034.859	35,02
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	43.263.200	42.777.300	(1,12)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	513.690.650	19.738.100	(96,16)
Kanwil DJP Jakarta Barat	455.602.045	280.898.330	(38,35)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	155.731.071	115.582.281	(25,78)
Kanwil DJP Jakarta Timur	130.982.280	130.982.280	-
Kanwil DJP Jakarta Utara	124.645.530	6.052.750	(95,14)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	83.269.000	61.369.000	(26,30)
Kanwil DJP Jawa Barat I	308.461.645	303.511.645	(1,60)
Kanwil DJP Jawa Barat II	11.050.000	11.050.000	-
Kanwil DJP Jawa Tengah I	282.863.200	87.999.200	(68,89)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	84.046.600	84.046.600	-
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	76.879.000	76.879.000	-
Kanwil DJP Jawa Timur I	138.166.600	138.166.600	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	549.790.450	549.790.450	-
Kanwil DJP Kalimantan Barat	9.173.780	88.802.120	868,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	751.110.360	750.548.700	(0,07)
Kanwil DJP Kalimantan Timur	141.296.000	67.976.000	(51,89)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	48.930.000	64.930.000	32,70
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	323.844.488	180.253.041	(44,34)
Kanwil DJP Bali	168.843.476	37.952.500	(77,52)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	375.025.893	462.013.893	22,79
Kanwil DJP Papua dan Maluku	76.257.619	76.257.619	-
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	369.349.311	335.116.156	(9,27)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	337.584.030	337.584.030	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	74.327.000	269.507.000	262,60
Kanwil DJP Kepulauan Riau	-	77.105.205	-
Saldo	**240.092.370.407**	**231.696.255.518**	**(3,50)**
Akum. Amortisasi	**(229.999.530.502)**	**(221.176.793.948)**	**(3,99)**
Nilai Buku	**10.092.839.905**	**10.519.461.570**	**4,05**

Tabel V.C.2.4.1.1.b
Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud – *Software*
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

	Mutasi Tambah:	Kuantitas	Rupiah
000	Saldo Awal	15.320	240.092.370.407,00
	Mutasi Tambah		
100	Koreksi Saldo Awal	1	199.100.000,00
101	Pembelian	73	3.084.856.850,00
102	Transfer Masuk	347	199.587.482,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	2.183.850.000,00
107	Reklasifikasi Masuk	105	117.931.638,00
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	9	22.504.782.997,00
202	Pengembangan Nilai Aset	-	103.105.000,00
	Mutasi Kurang:	**Kuantitas**	**Rupiah**
301	Penghapusan	(71)	(174.703.715,00)
302	Transfer Keluar	(236)	(157.643.163,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(10.862)	(36.456.981.978,00)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	-
921	Internal Transfer Keluar	(184)	(132.821.902.155,00)
922	Internal Transfer Masuk	184	132.821.902.155,00
S02	Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran	-	-
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2018	**4.687**	**231.696.255.518,00**

Saldo Aset Tak Berwujud – Software per 31 Desember 2018 sebesar Rp231.696.255.518,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.396.114.889,00 atau 3,50 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp240.092.370.407,00.

C.2.4.1.2. Lisensi

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp192.633.173.516,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel V.C.2.4.1.2 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.2.a
Rincian Aset Tak Berwujud – Lisensi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	169.598.769.264	180.982.401.384	6,71
KLIP	11.238.289.880	11.238.289.880	-
Kanwil DJP Aceh	-	58.256.000	-
Kanwil DJP Riau	11.985.819	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	11.985.819	11.985.819	-
Kanwil DJP Jakarta Pusat	24.211.000	12.105.500	(50,00)
Kanwil DJP Jakarta Barat	24.211.000	18.158.250	(25,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan	42.249.569	36.196.819	(14,33)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jakarta Timur	60.527.500	60.527.500	-
Kanwil DJP Jakarta Utara	12.078.500	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	6.052.750	6.052.750	-
Kanwil DJP Banten	23.971.638	23.971.638	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	30.749.999	30.749.999	-
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	22.274.925	22.274.925	-
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	126.108.345	18.158.250	(85,60)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	54.115.707	54.115.707	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	47.943.276	47.943.276	-
Kanwil DJP Kepulauan Riau	-	11.985.819	-
Saldo	**181.335.524.991**	**192.633.173.516**	**6,23**
Akum. Amortisasi	**(58.307.469.397)**	**(74.118.270.372)**	**27,12**
Nilai Buku	**123.028.055.594**	**118.514.903.100**	**(3,80)**

Tabel V.C.2.4.1.2.b
Rincian Aset Tak Berwujud – Lisensi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

	Mutasi Tambah:	Kuantitas	Rupiah
000	Saldo Awal	2.435	181.335.524.991,00
101	Pembelian	9	1.000.176.001,00
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	78	10.640.582.120,00
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-	23.330.519.740,00
	Mutasi Kurang	Kuantitas	Rupiah
301	Penghapusan	(1)	(6.052.750,00)
305	Koreksi Pencatatan	(2)	(23.529.389.741,00)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(161)	(138.186.845,00)
921	Internal Transfer Keluar	(80)	(45.625.596.120,00)
922	Internal Transfer Masuk	80	45.625.596.120,00
	Saldo Per 31 Desember 2018	**2358**	**192.633.173.516**

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi Per 31 Desember 2018 sebesar Rp192.633.173.516,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.297.648.525,00 atau 6,23 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2017.

C.2.4.1.3 Aset Tak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp225.593.676,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.1.3. berikut:

Tabel V.C.2.4.1.3
Rincian Aset Tak Berwujud – Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	2.108.676	152.093.676	7.112,76
KLIP	55.000.000	55.000.000	-
Kanwil DJP Jakarta Timur	13.750.000	13.750.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	4.750.000	4.750.000	-
Saldo	**75.608.676**	**225.593.676**	**198,37**

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya Per 31 Desember 2018 sebesar Rp225.593.676,00 mengalami kenaikan sebesar 198,37% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2017.

C.2.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan atau tidak lagi digunakan dalam operasional kantor. Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 sebesar Rp525.172.940.657,00. Pada Laporan Keuangan Tahun 2017 Aset Lain-lain disajikan menjadi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan.

Tabel V.C.2.4.8.
Jenis Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	481.068.152.661	429.532.278.642	51.535.874.019	12,00
Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	44.104.787.996	32.001.879.590	12.102.908.406	37,82
Total Aset Lain-Lain	**525.172.940.657**	**461.534.158.232**	**63.638.782.425**	**13,79**

C.2.4.2.a. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2018 sebesar Rp481.068.152.661,00. Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp462.733.777.542,00.

Tabel V.C.2.4.2.a
Rincian Aset Lain Lain – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET LAIN-LAIN (ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN)		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	129.447.727.426	103.934.926.328	(19,71)
PPDDP	3.983.403.083	3.983.403.083	-
KPDDP Makassar	112.348.355	26.906.320	(76,05)
Kanwil DJP Aceh	11.324.643.449	11.464.033.891	1,23
Kanwil DJP Sumatera Utara I	2.859.507.358	5.890.523.971	106,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	6.363.728.711	8.124.494.586	27,67
Kanwil DJP Riau	9.028.277.468	7.441.431.292	(17,58)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	13.113.534.522	12.580.951.087	(4,06)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	7.357.590.263	12.109.730.068	64,59
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	7.417.058.664	11.545.084.013	55,66
Kanwil DJP Jakarta Pusat	7.194.348.842	8.917.796.475	23,96
Kanwil DJP Jakarta Barat	7.201.204.853	6.153.055.012	(14,56)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	6.256.323.871	9.260.178.361	48,01
Kanwil DJP Jakarta Timur	8.573.088.561	13.031.978.811	52,01
Kanwil DJP Jakarta Utara	6.319.651.211	6.236.186.705	(1,32)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	3.717.978.516	4.997.007.222	34,40
Kanwil DJP Banten	11.278.471.611	14.355.908.820	27,29
Kanwil DJP Jawa Barat I	9.923.536.589	18.010.769.445	81,50
Kanwil DJP Jawa Barat II	10.132.773.409	16.226.677.755	60,14
Kanwil DJP Jawa Tengah I	12.007.530.629	17.721.258.338	47,58
Kanwil DJP Jawa Tengah II	7.372.166.646	9.253.061.620	25,51
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	5.320.241.574	6.483.675.734	21,87
Kanwil DJP Jawa Timur I	13.533.931.286	17.528.147.447	29,51
Kanwil DJP Jawa Timur II	9.859.739.104	10.875.805.394	10,31
Kanwil DJP Jawa Timur III	29.911.146.985	15.376.523.771	(48,59)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	4.885.488.117	8.532.942.619	74,66
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	11.525.587.442	14.110.064.795	22,42
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	15.297.856.428	16.527.187.975	8,04
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	9.007.349.382	12.533.470.691	39,15

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET LAIN-LAIN (ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN)		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	14.375.671.089	21.362.962.708	48,60
Kanwil DJP Bali	5.846.482.245	9.567.241.609	63,64
Kanwil DJP Nusa Tenggara	8.948.232.346	11.505.052.308	28,57
Kanwil DJP Papua dan Maluku	10.462.735.142	13.599.050.486	29,98
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	1.519.066.629	4.225.654.562	178,17
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	3.000.231.009	3.750.107.485	24,99
Kanwil DJP Jawa Barat III	5.053.625.827	8.387.356.468	65,97
Kanwil DJP Kepulauan Riau	-	5.437.545.406	100,00
Saldo	**429.532.278.642**	**481.068.152.661**	**12,00**
Akum. Penyusutan	**(325.259.079.455)**	**(462.733.777.542)**	**42,27**
Nilai Buku	**104.273.199.187**	**18.334.375.119**	**(82,42)**

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2018 sebesar Rp481.068.152.661,00 mengalami kenaikan sebesar Rp51.535.874.019,00 atau 12,00 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp429.532.278.642,00.

C.2.4.2.b. Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan

Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.104.787.996,00. Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp43.366.995.554,00.

Tabel V.C.2.4.2.b
Rincian Aset Lain Lain – Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET LAIN-LAIN (ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN)		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	27.885.833.997	40.403.025.203	44,89
Kanwil DJP Aceh	34.441.188	34.441.188	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	201.300	201.300	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	36.036.971	35.433.071	(1,68)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	5.717.800	6.203.700	8,50
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	34.222.160	34.222.160	(0,99)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	50.613.750	539.616.300	966,15
Kanwil DJP Jakarta Barat	1.179.559.504	334.902.850	(71,61)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	617.948.773	664.150.313	7,48
Kanwil DJP Jakarta Utara	304.227.990	249.116.840	(18,12)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET LAIN-LAIN (ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN)		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	30.263.750	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Barat I	110.650.100	201.182.410	81,82
Kanwil DJP Jawa Tengah II	115.925.200	31.625.000	(72,72)
Kanwil DJP Jawa Timur I	33.576.450	33.576.450	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	266.048.500	237.967.150	(10,55)
Kanwil DJP Jawa Timur III	137.488.500	-	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	38.550.300	10.671.540	(72,32)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	828.037.140	828.598.800	0,07
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	154.634.830	289.603.006	87,28
Kanwil DJP Bali	-	32.349.328	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	41.773.725	41.773.725	-
Kanwil DJP Papua dan Maluku	65.723.912	65.723.912	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	16.543.750	16.543.750	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	13.860.000	13.860.000	-
Saldo	**32.001.879.590**	**44.104.787.996**	**37,82**
Akum. Amortisasi s.d. 31 Desember 2018	**(30.904.681.476)**	**(43.366.995.554)**	**40,33**
Nilai Buku Per 31 Desember 2018	**1.097.198.114**	**737.792.442**	**(32,76)**

Saldo Aset Tidak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.104.787.996,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.102.908.406,00 atau 37,82 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp32.001.879.590,00.

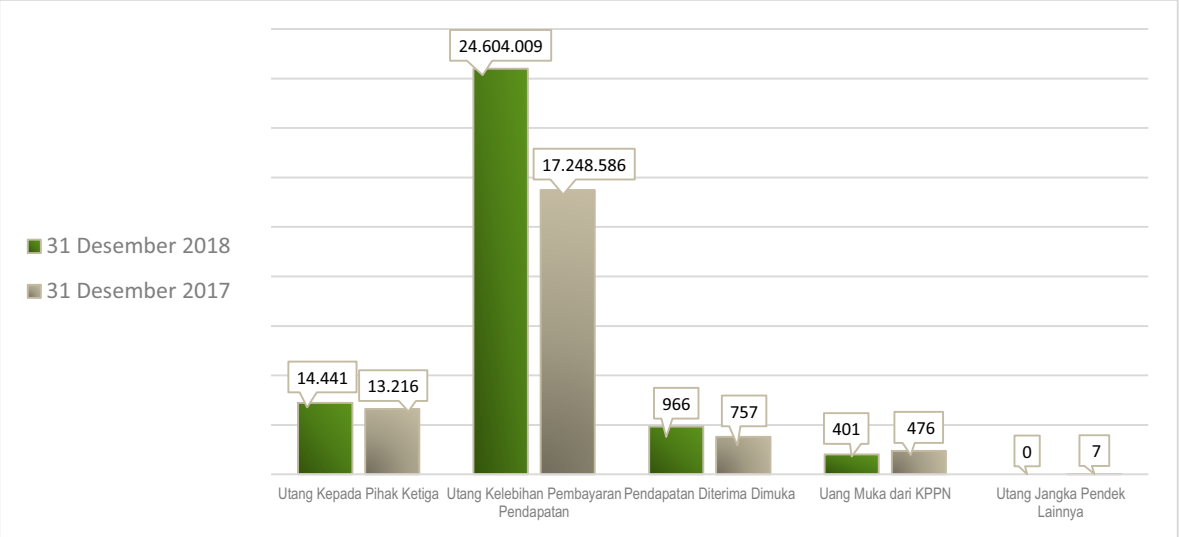
C.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 sebesar Rp24.619.816.889.275,00 sedangkan per 31 Desember 2017 sebesar Rp17.263.042.737.946,00. Kewajiban ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagaimana berikut.

Tabel V.C.2.5.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	14.440.788.207	13.216.148.018	1.224.640.189	9,27
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	24.604.009.233.369	17.248.585.899.463	7.355.423.333.906	42,64
Pendapatan Diterima Dimuka	965.982.740	757.350.896	208.631.844	27,55
Uang Muka dari KPPN	400.884.959	475.898.919	(75.013.960)	(15,76)
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	7.440.650	(7.440.650)	(100,00)
Jumlah	**24.619.816.889.275**	**17.263.042.737.946**	**7.356.774.151.329**	**42,62**

Grafik V.C.2.5
Kewajiban Jangka Pendek Per Jenis Utang
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



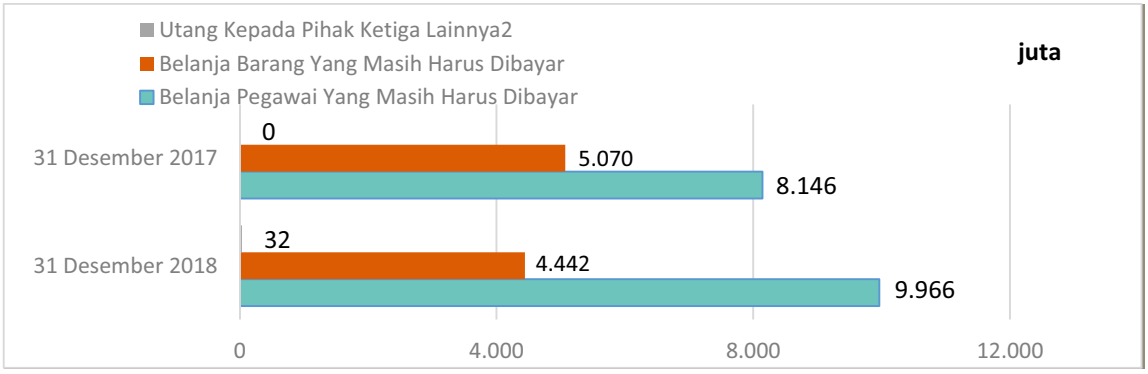
C.2.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp14.440.788.207,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.224.640.189,00 atau 9,27 persen dari kondisi per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp13.216.148.018,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	9.966.204.318	8.146.129.481	1.820.074.837	22,34
Belanja barang yang masih harus dibayar	4.442.133.167	5.070.000.537	(627.867.370)	(12,38)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	32.450.722	18.000	32.432.722	180.181,79
Jumlah	**14.440.788.207**	**13.216.148.018**	**1.224.640.189**	**9,27**

Grafik V.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



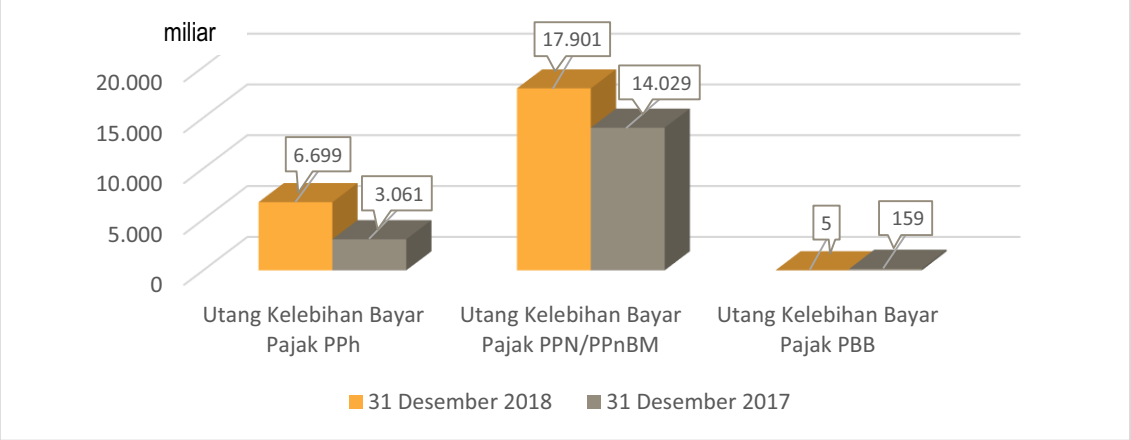
C.2.5.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp24.604.009.233.369,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2018 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.5.2. dan Grafik V.C.2.5.2. berikut:

Tabel V.C.2.5.2
Perbandingan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	6.698.614.305.724	3.060.829.238.985	3.637.785.066.739	118,85
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	17.900.745.312.320	14.028.757.147.028	3.871.988.165.292	27,60
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	4.649.615.325	158.999.513.450	(154.349.898.125)	(97,08)
Jumlah	**24.604.009.233.369**	**17.248.585.899.463**	**7.355.423.333.906**	**42,64**

Grafik V.C.2.5.2
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam miliaran rupiah)



Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan berdasarkan Kantor Wilayah DJP disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.2b
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Berdasarkan Kantor Wilayah DJP
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	4.930.106.450	4.106.162.138	823.944.312	20,07
Kanwil DJP Sumatera Utara I	1.338.524.958.339	979.911.950.661	358.613.007.678	36,60
Kanwil DJP Sumatera Utara II	29.315.755.412	29.666.889.485	(351.134.073)	(1,18)
Kanwil DJP Riau	363.334.631.629	218.994.434.138	144.340.197.491	65,91
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	308.471.499.367	162.191.850.905	146.279.648.462	90,19
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel	546.489.771.007	352.320.028.874	194.169.742.133	55,11
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	9.714.743.969	21.060.973.857	(11.346.229.888)	(53,87)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	847.574.408.778	1.777.436.775.776	(929.862.366.998)	(52,31)
Kanwil DJP Jakarta Barat	89.857.647.600	87.191.030.287	2.666.617.313	3,06
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	560.129.909.133	488.624.610.324	71.505.298.809	14,63
Kanwil DJP Jakarta Timur	98.417.886.148	70.495.433.683	27.922.452.465	39,61
Kanwil DJP Jakarta Utara	100.747.134.103	82.934.960.388	17.812.173.715	21,48
Kanwil DJP Jakarta Khusus	7.360.230.068.946	3.323.684.124.347	4.036.545.944.599	121,45
Kanwil DJP Banten	118.156.083.023	263.620.581.614	(145.464.498.591)	(55,18)
Kanwil DJP Jawa Barat I	247.350.874.717	170.986.418.857	76.364.455.860	44,66
Kanwil DJP Jawa Barat II	271.903.968.699	195.412.728.274	76.491.240.425	39,14
Kanwil DJP Jawa Tengah I	244.397.618.785	75.835.326.700	168.562.292.085	222,27
Kanwil DJP Jawa Tengah II	72.312.486.550	39.431.273.839	32.881.212.711	83,39
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	3.720.391.373	4.745.375.120	(1.024.983.747)	(21,60)
Kanwil DJP Jawa Timur I	151.112.521.889	52.064.255.344	99.048.266.545	190,24
Kanwil DJP Jawa Timur II	142.678.467.409	74.195.105.944	68.483.361.465	92,30
Kanwil DJP Jawa Timur III	20.330.760.135	33.472.930.053	(13.142.169.918)	(39,26)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	59.027.444.655	29.152.982.831	29.874.461.824	102,47
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	108.169.303.982	28.868.375.541	79.300.928.441	274,70
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	99.512.476.712	30.365.937.127	69.146.539.585	227,71
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	40.152.262.467	16.991.967.246	23.160.295.221	136,30
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah dan Maluku Utara	6.918.461.432	13.391.781.505	(6.473.320.073)	(48,34)
Kanwil DJP Bali	20.603.003.341	8.035.440.352	12.567.562.989	156,40
Kanwil DJP Nusa Tenggara	419.851.598	2.139.418.613	(1.719.567.015)	(80,38)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	14.801.638.369	159.799.695.718	(144.998.057.349)	(90,74)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	10.795.851.546.048	8.195.477.882.457	2.600.373.663.591	31,73
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	480.846.665.010	218.342.118.548	262.504.546.462	120,23
Kanwil DJP Jawa Barat III	40.740.004.624	24.158.851.617	16.581.153.007	68,63
Kanwil DJP Kepulauan Riau	7.264.881.670	13.478.227.300	(6.213.345.630)	(46,10)
Jumlah	**24.604.009.233.369**	**17.248.585.899.463**	**7.355.423.333.906**	**42,64**

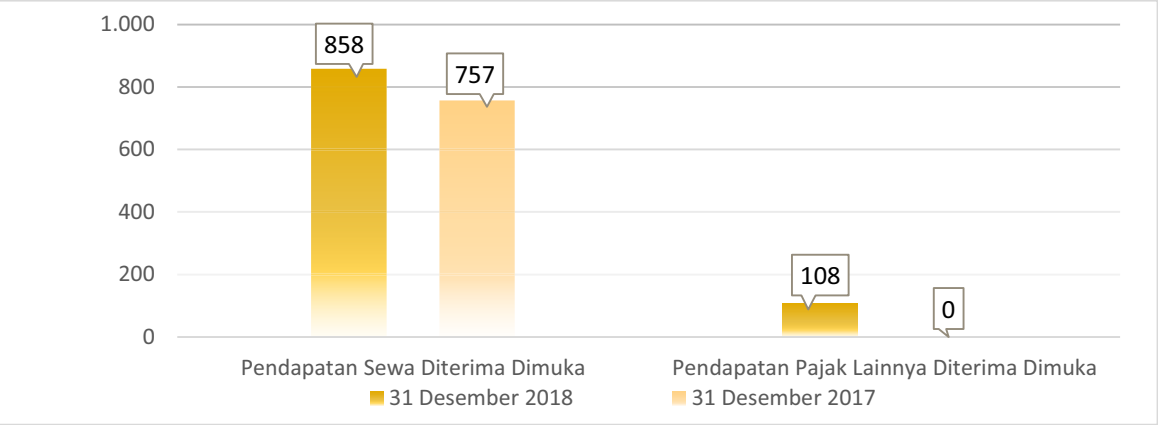
C.2.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan PNBP yang diterima dimuka per 31 Desember 2018 sebesar Rp965.982.740,00 sedangkan jumlah per 31 Desember 2017 sebesar Rp757.350.896,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp208.631.844,00 atau 27,55 persen.

Tabel V.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	858.282.740	757.350.896	100.931.844	13,33
Pendapatan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	107.700.000	-	107.700.000	100,00
Jumlah	**965.982.740**	**757.350.896**	**208.631.844**	**27,55**

Grafik V.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam jutaan rupiah)



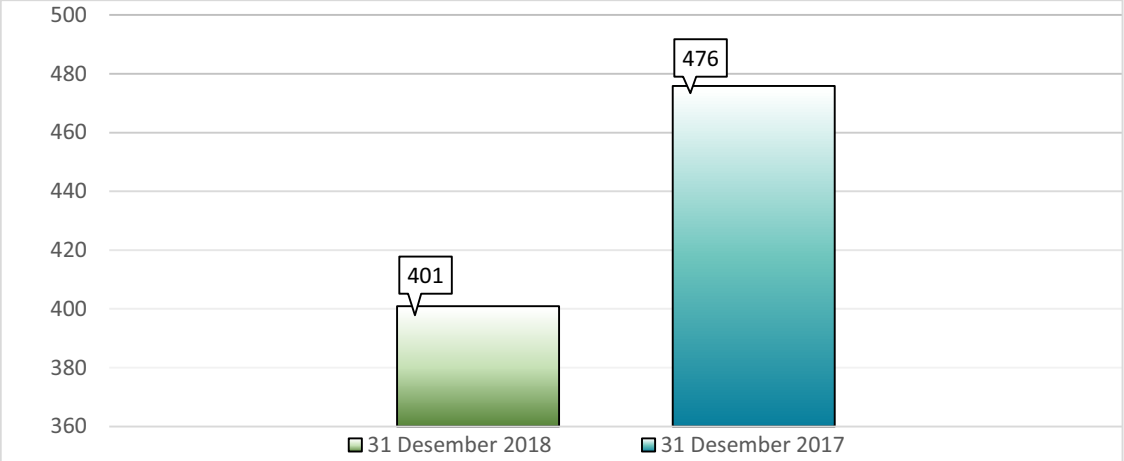
C.2.5.4. Uang Muka dari KPPN

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 sebesar Rp400.884.959,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2017 sebesar Rp475.898.919,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp75.013.960,00 atau 15,76 persen. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel V.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Uang Muka dari KPPN	400.884.959	475.898.919	(75.013.960)	(15,76)

Grafik V.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



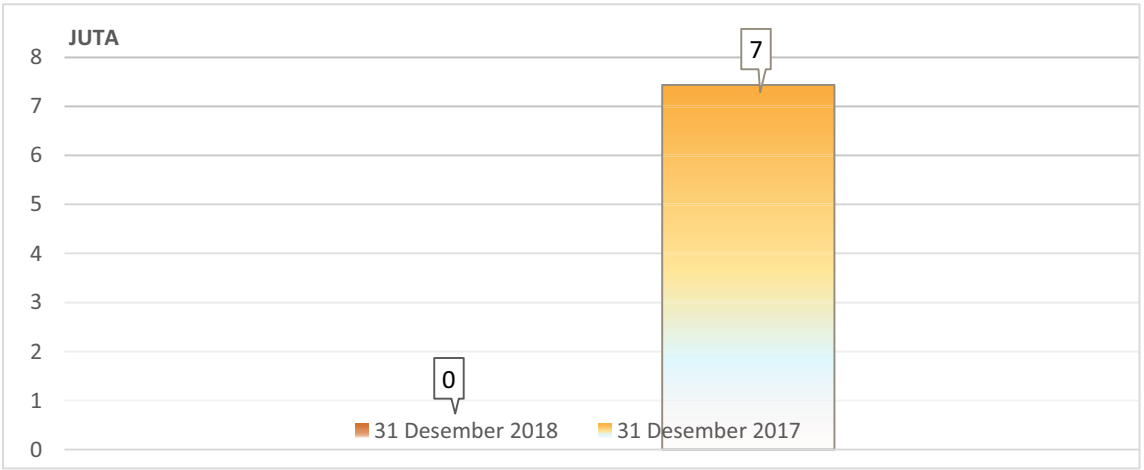
C.2.5.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 dan pada 31 Desember 2017 terdapat saldo sebesar Rp7.440.650,00 yang merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor. Perbandingannya disajikan pada Tabel V.C.2.5.5. dan Grafik V.C.2.5.5. berikut:

Tabel V.C.2.5.5.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-	7.440.650	(7.440.650)	(100,00)

Grafik V.C.2.5.5.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



C.2.6. Ekuitas

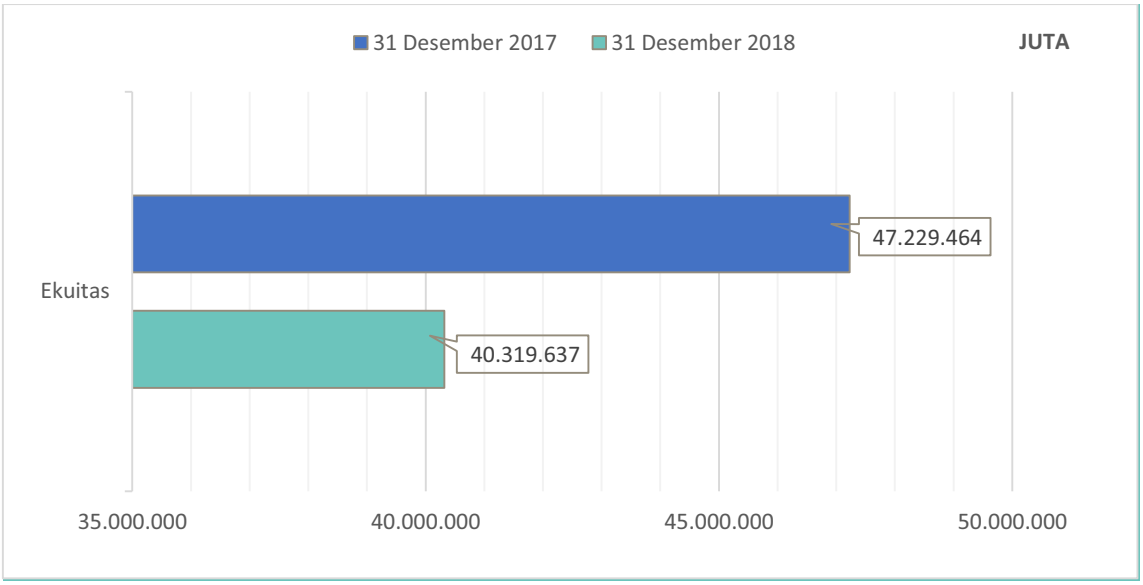
Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.319.637.054.325,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2017 sebesar Rp47.229.463.697.182,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp6.909.826.642.857,00 atau 14,63 persen. Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.6. dan Grafik V.C.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Ekuitas	40.319.637.054.325	47.229.463.697.182	(6.909.826.642.857)	(14,63)

Secara umum, penurunan ekuitas disebabkan oleh penambahan aset lebih kecil dari penambahan kewajiban.

Grafik V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam jutaan rupiah)



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional terdiri dari (1) Pendapatan Perpajakan; (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan (3) Pendapatan Hibah. Realisasi Pendapatan Operasional Direktorat Jenderal Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp1.285.787.971.176.348,00 dan Rp1.169.991.635.653.375,00. Pendapatan Operasional tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan sebagaimana Tabel V.D.1.1. berikut.

Tabel V.D.1.1.
Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan LO Pajak	1.285.775.473.431.374	1.169.977.035.007.202	115.798.438.424.172	9,90
Pendapatan LO PNBP	12.497.744.974	14.600.646.173	(2.102.901.199)	(14,40)
Jumlah	**1.285.787.971.176.348**	**1.169.991.635.653.375**	**115.796.335.522.973**	**9,90**

D.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2018 terdiri dari Pendapatan PPh sebesar Rp731.862.897.059.516,00; Pendapatan PPN dan PPnBM sebesar Rp526.978.008.864.154,00; Pendapatan PBB sebesar Rp20.136.546.791.758,00; Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp6.798.020.715.946,00. Jumlah Pendapatan Perpajakan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1.285.775.473.431.374,00 mengalami kenaikan sebesar Rp115.798.438.424.172,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp1.169.977.035.007.202,00. Rincian Pendapatan Perpajakan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.
Pendapatan Perpajakan Per Jenis Pajak
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh	**731.862.897.059.516**	**662.384.817.019.592**	**69.478.080.039.924**	**10,49**
Pendapatan PPh Minyak Bumi	26.557.094.272.269	16.607.135.959.156	9.949.958.313.113	59,91
Pendapatan PPh Gas Bumi	38.118.280.365.523	33.711.719.503.816	4.406.560.861.707	13,07
Pendapatan PPh Migas Lainnya	33.800.919.649	4.604.623.804	29.196.295.845	634,06
Pendapatan PPh Pasal 21	134.918.491.786.219	118.232.109.781.647	16.686.382.004.572	14,11
Pendapatan PPh Pasal 22	18.036.931.666.751	16.193.970.914.029	1.842.960.752.722	11,38
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	54.726.798.284.622	43.156.712.595.480	11.570.085.689.142	26,81
Pendapatan PPh Pasal 23	36.885.174.569.421	35.528.626.703.126	1.356.547.866.295	3,82
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	9.511.668.574.521	7.321.389.939.374	2.190.278.635.147	29,92
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	240.638.465.110.601	218.520.440.033.635	22.118.025.076.966	10,12
Pendapatan PPh Pasal 26	49.134.847.249.977	46.195.666.837.559	2.939.180.412.418	6,36

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh Final	113.047.874.567.462	105.893.884.322.644	7.153.990.244.818	6,76
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	141.479.051.817	12.084.406.869.029	(11.942.927.817.212)	(98,83)
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	235.050.235	349.728.807	(114.678.572)	(32,79)
Pendapatan PPh Pasal 21 DTP	12.987.522	132.161.316	(119.173.794)	(90,17)
Pendapatan PPh Pasal 22 DTP	167.200	219.978	(52.778)	(23,99)
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor DTP	(2.462.000)	-	-	-
Pendapatan PPh Pasal 23 DTP	503.900.818	614.833.045	(110.932.227)	(18,04)
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	1.892.891.197.764	1.702.566.558.147	190.324.639.617	11,18
Pendapatan PPh Pasal 26 DTP	8.218.348.183.000	7.230.485.435.000	987.862.748.000	13,66
Pendapatan PPh Final DTP	1.616.145	-	-	-
Pendapatan PPN dan PPnBM	**526.978.008.864.154**	**479.398.124.117.652**	**47.579.884.746.502**	**9,92**
Pendapatan PPN Dalam Negeri	323.715.962.911.317	312.942.569.311.304	10.773.393.600.013	3,44
Pendapatan PPN Impor	186.393.300.217.987	149.032.997.537.454	37.360.302.680.533	25,07
Pendapatan PPN Lainnya	68.355.639.470	150.814.235.849	(82.458.596.379)	(54,68)
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	12.718.712.605.741	13.367.715.729.437	(649.003.123.696)	(4,86)
Pendapatan PPnBM Impor	4.106.643.372.489	3.796.750.314.090	309.893.058.399	8,16
Pendapatan PPnBM Lainnya	(24.965.882.850)	107.276.989.518	(132.242.872.368)	(123,27)
Pendapatan PBB	**20.136.546.791.758**	**17.128.469.834.287**	**3.008.076.957.471**	**17,56**
Pendapatan PBB Perkebunan	2.390.974.894.103	2.258.996.189.377	131.978.704.726	5,84
Pendapatan PBB Kehutanan	694.128.495.659	693.240.372.820	888.122.839	0,13
Pendapatan PBB Pertambangan Minerba	2.125.365.813.228	1.798.108.620.064	327.257.193.164	18,20
Pendapatan PBB Pertambangan Migas	14.540.480.330.129	12.071.509.430.753	2.468.970.899.376	20,45
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	313.275.381.204	253.462.867.931	59.812.513.273	23,60
Pendapatan PBB Lainnya	72.321.877.435	53.152.353.342	19.169.524.093	36,07
Pendapatan BPHTB	**-**	**1.216.911.547**	**(1.216.911.547)**	(100,00)
Pendapatan BPHTB	-	1.216.911.547	(1.216.911.547)	(100,00)
Pendapatan Pajak Lainnya	**6.798.020.715.946**	**11.064.407.124.124**	**(4.266.386.408.178)**	**(38,56)**
Pendapatan Bea Meterai	1.470.393.848.442	1.367.164.381.348	103.229.467.094	7,55
Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	3.985.405.294.453	3.785.684.479.195	199.720.815.258	5,28
Pendapatan PPn Batubara	656.409.788.263	982.575.599.538	(326.165.811.275)	(33,19)
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	28.230.225.569	33.820.989.027	(5.590.763.458)	(16,53)
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	166.418.719.567	2.391.952.222.219	(2.225.533.502.652)	(93,04)
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	461.616.438.839	2.456.144.037.079	(1.994.527.598.240)	(81,21)
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	26.406.406.436	46.863.187.478	(20.456.781.042)	(43,65)
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	3.139.994.377	202.228.240	2.937.766.137	1.452,70
Jumlah	**1.285.775.473.431.374**	**1.169.977.035.007.202**	**115.798.438.424.172**	**9,90**

Pendapatan Perpajakan yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan yang berakhir 31 Desember 2017. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan secara kas serta kenaikan piutang.

D.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp12.497.744.974,00 dan Rp14.600.646.173,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Rincian PNBP tersebut disajikan dalam Tabel V.D.1.1.2.a berikut:

Tabel V.D.1.1.2.a.
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	104.919.620	-
Pendapatan Penjualan Lainnya	-	101.025.464
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.560.898.187	3.857.896.083
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	7.370.171	3.010.678.810
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.850.667	13.903.224
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	2.368.096.627	2.491.262.422
Pendapatan Jasa Lainnya	361.929.005	2.905.260.829
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.384.123.720	2.092.074.758
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.528.990.498	127.156.471
Pendapatan Denda Lainnya	1.175.566.479	-
Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	1.388.112
Jumlah	**12.497.744.974**	**14.600.646.173**

D.1.2. Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak

Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis beban terdiri atas: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih, dan Beban Lain-lain. Realisasi Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.133.099.566.831,00. Komposisi realisasi Beban Operasional menurut jenis beban sebagaimana disajikan Tabel V.D.1.2. berikut:

Tabel V.D.1.2.
Realisasi Beban Operasional Menurut Jenis Beban
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Beban Pegawai	2.401.925.173.509	2.298.480.578.507	103.444.595.002	4,50
Beban Persediaan	195.543.375.619	202.211.090.958	(6.667.715.339)	(3,30)
Beban Barang dan Jasa	2.229.458.220.539	2.205.074.811.926	24.383.408.613	1,11
Beban Pemeliharaan	451.407.514.645	458.575.675.037	(7.168.160.392)	(1,56)
Beban Perjalanan Dinas	705.500.408.520	666.004.355.548	39.496.052.972	5,93
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	141.109.986.410	153.272.755.475	(12.162.769.065)	(7,94)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	611.619.584.470	565.000.069.522	46.619.514.948	8,25
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	9.396.535.303.119	20.638.715.266.729	(11.242.179.963.610)	(54,47)
Jumlah	**16.133.099.566.831**	**27.187.334.603.702**	**(11.054.235.036.871)**	**(40,66)**

D.1.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.401.925.173.509,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel V.D.1.2.1 berikut:

Tabel V.D.1.2.1.
Rincian Beban Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Gaji Pokok PNS	1.678.664.403.091	1.627.713.349.232
Beban Pembulatan Gaji PNS	25.987.784	25.032.573
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	107.272.531.647	97.547.635.132
Beban Tunj. Anak PNS	32.960.194.678	29.883.635.770
Beban Tunj. Struktural PNS	44.732.914.660	42.056.961.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	42.376.180.000	36.406.305.000
Beban Tunj. PPh PNS	1.679.986.215	2.298.867.234
Beban Tunj. Beras PNS	87.830.855.934	85.816.971.550
Beban Uang Makan PNS	291.357.773.959	257.427.165.735
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	197.150.000	215.725.000
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	2.784.895.000	2.775.440.000
Beban Tunjangan Umum PNS	78.126.768.519	70.315.848.404
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	-	12.066.249
Beban Uang Lembur	33.915.532.022	45.985.575.628
Jumlah	**2.401.925.173.509**	**2.298.480.578.507**

Persentase kenaikan terbesar pada beban pegawai terdapat pada Beban Tunjangan Fungsional PNS yaitu sebesar 16,4 persen.

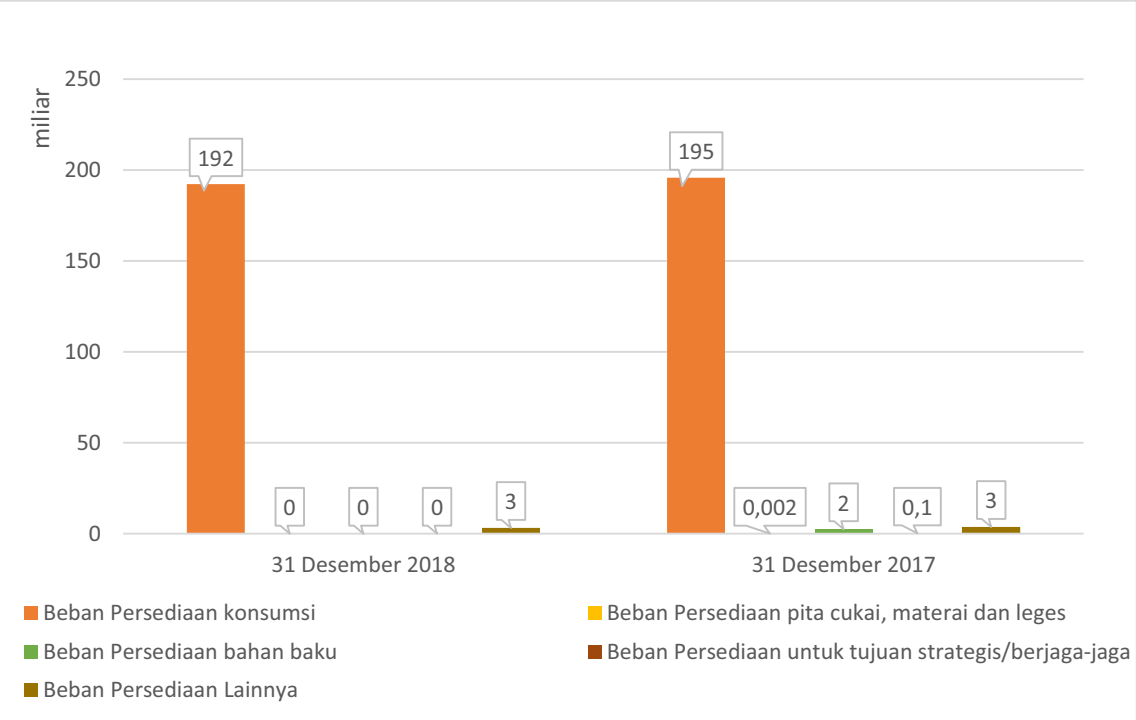
D.1.2.2. Beban Persediaan

Beban persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp195.543.375.619,00.

Tabel V.D.1.2.2.
Rincian Beban Persediaan
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Persediaan konsumsi	192.274.757.224	195.779.197.371
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	2.604.000
Beban Persediaan bahan baku	-	2.529.447.029
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	118.467.500
Beban Persediaan Lainnya	3.268.618.395	3.781.375.058
Jumlah Beban Persediaan	**195.543.375.619**	**202.211.090.958**

Grafik V.D.1.2.2.
Realisasi Beban Persediaan
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam miliaran rupiah)



D.1.2.3. Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Barang dan Jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.229.458.220.539,00.

Tabel V.D.1.2.3.
Realisasi Beban Barang dan jasa
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Keperluan Perkantoran	403.678.490.022	358.128.883.896
Beban Pengadaan Bahan Makanan	-	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	4.342.161.138	5.089.307.292
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	113.998.590.189	107.251.643.158
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	66.669.152.198	63.990.097.420
Beban Barang Operasional Lainnya	120.950.494.079	820.138.175.886
Beban Bahan	106.423.524.752	102.258.846.563
Beban Honor Output Kegiatan	13.081.633.544	14.013.647.500
Beban Barang Non Operasional Lainnya	967.739.631.164	313.896.150.767
Beban Langganan Listrik	169.587.985.486	173.636.512.072
Beban Langganan Telepon	20.208.160.490	19.825.265.992
Beban Langganan Air	7.417.249.397	6.908.486.120
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	637.590.773	388.680.288
Beban Jasa Pos dan Giro	262.016.051	150.177.913
Beban Jasa Konsultan	1.510.025.000	1.596.059.000
Beban Sewa	158.255.838.192	147.193.187.029
Beban Jasa Profesi	20.217.273.731	17.947.304.556
Beban Jasa Lainnya	51.815.881.669	52.645.176.974
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2.662.522.664	17.209.500
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**2.229.458.220.539**	**2.205.074.811.926**

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp451.407.514.645,00 disajikan dalam tabel berikut:

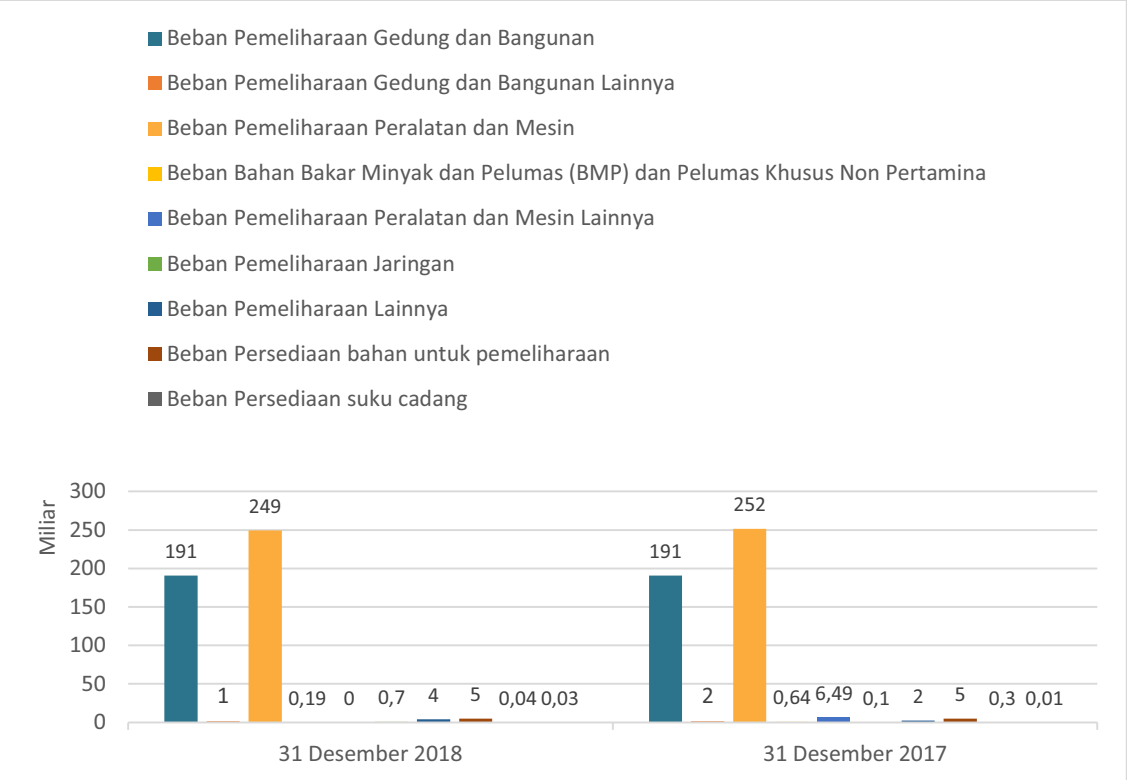
Tabel V.D.1.2.4.
Rincian Beban Pemeliharaan
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190.869.638.854	190.744.692.120
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.436.638.040	1.695.545.860
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	249.418.852.094	251.602.999.426
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	189.896.355	639.529.420

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	6.493.795.715
Beban Pemeliharaan Jaringan	658.835.244	142.155.500
Beban Pemeliharaan Lainnya	4.012.154.950	2.241.024.822
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.748.927.084	4.754.895.790
Beban Persediaan suku cadang	41.755.524	251.755.384
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	30.816.500	9.281.000
Jumlah Beban Pemeliharaan	**451.407.514.645**	**458.575.675.037**

Persentase kenaikan beban pemeliharaan yang signifikan terdapat pada Beban Pemeliharaan Jaringan yaitu sebesar 363,46 persen.

Grafik V.D.1.2.4.
Realisasi Beban Pemeliharaan
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam miliaran rupiah)



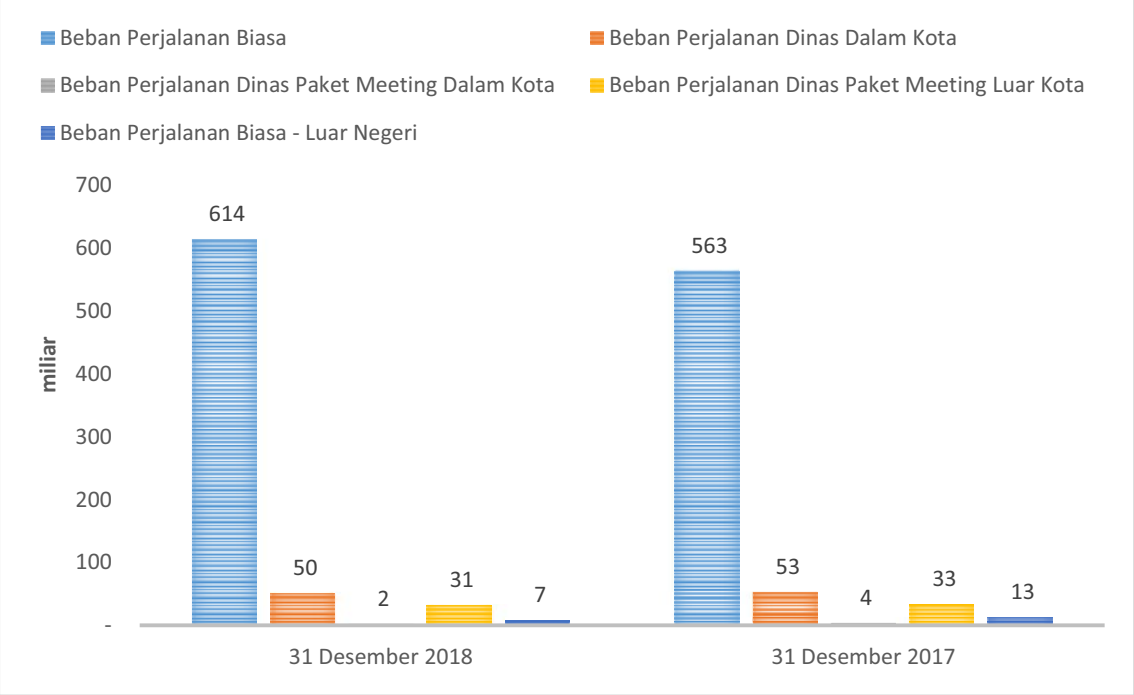
D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp705.500.408.520,00 dan Rp666.004.355.548,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Tabel Beban Perjalanan Dinas untuk Periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam tabel V.D.1.2.1.5. berikut:

Tabel V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Perjalanan Biasa	614.010.685.920	563.372.099.923
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.342.239.895	53.167.981.772
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.297.516.738	3.612.679.551
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31.409.105.458	33.066.415.689
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	7.440.860.509	12.785.178.613
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**705.500.408.520**	**666.004.355.548**

Grafik V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam miliaran rupiah)



D.1.2.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp141.109.986.410,00 dan Rp153.272.755.475,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.D.1.2.6.
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	141.109.986.410	153.272.755.475
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	**141.109.986.410**	**153.272.755.475**

D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp611.619.584.470,00 dan Rp565.000.069.522,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam Tabel V.D.1.2.7. berikut:

Tabel V.D.1.2.7.
Beban Penyusutan dan Amortisasi
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	342.633.051.689	326.782.923.142
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	235.151.840.374	209.235.656.662
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.450.822.445	2.333.415.362
Beban Penyusutan Irigasi	419.149.582	333.981.959
Beban Penyusutan Jaringan	938.289.694	891.779.098
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.458.960	4.458.960
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan	7.508.495.921	7.477.925.130
Beban Amortisasi Software	5.098.882.114	4.531.733.689
Beban Amortisasi Lisensi	17.097.310.576	13.051.468.042
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	317.283.115	356.727.478
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**611.619.584.470**	**565.000.069.522**

Persentase kenaikan beban penyusutan dan amortisasi terbesar terdapat pada Beban Amortisasi Lisensi yaitu sebesar 31 persen

D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp9.396.535.303.119,00 dan Rp20.638.715.266.729,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan dalam Tabel V.D.1.2.8. berikut:

Tabel V.D.1.2.8.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	4.523.273.324.175	14.720.116.093.508
Beban Penyisihan Piutang PPN	3.158.282.836.539	(325.675.172.851)
Beban Penyisihan Piutang PPnBM	179.276.324.253	80.840.853.151
Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB	961.719.364.713	(330.770.978.196)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	573.917.357.177	6.494.169.650.215
Beban Penyisihan Piutang PNBP	608.235	(10.916.864)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	67.687.335	(8.317.125)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(2.199.308)	54.054.891
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**9.396.535.303.119**	**20.638.715.266.729**

D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional merupakan pos Pendapatan Operasional yang dikurangkan dengan Beban Operasional. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan dalam Tabel V.D.2. berikut:

Tabel V.D.2.
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kegiatan Operasional				
1. Pendapatan Operasional	**1.285.787.971.176.348**	**1.169.991.635.653.375**	**115.796.335.522.973**	**9,90**
a. Pendapatan Perpajakan	1.285.775.473.431.374	1.169.977.035.007.202	115.798.438.424.172	9,90
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak	12.497.744.974	14.600.646.173	(2.102.901.199)	(14,40)
c. Pendapatan Hibah	-	-	-	-
2. Beban Operasional	**16.133.099.566.831**	**27.187.334.603.702**	**(11.054.235.036.871)**	**(40,66)**
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	**1.269.654.871.609.517**	**1.142.804.301.049.673**	**126.850.570.559.844**	**11,10**

D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.3.a.
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kegiatan Non Operasional		
a. **Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar**	**5.128.764.701**	**2.829.351**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.504.660.305	6.791.422.524
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	3.375.895.604	6.788.593.173
b. **Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang**	-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
c. **Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**130.796.599.422**	**13.751.854.835**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	220.552.696.530	150.467.709.485
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	89.756.097.108	136.715.854.650
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**135.925.364.123**	**13.754.684.186**

Nilai Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari hasil pengurangan antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin. Rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.b.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.912.500	51.824.500
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.492.582.999	864.901.031
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	6.001.164.806	5.874.696.993
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	**8.504.660.305**	**6.791.422.524**

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp3.375.895.604,00 pada 31 Desember 2018 dan Rp6.788.593.173,00 pada 31 Desember 2017.

Tabel V.D.3.c.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Beban Kerugian Pelepasan Aset	3.375.895.604	6.788.593.173

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya paling besar diperoleh dari Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.d.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	332.925.036	512.115.609
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	874.839.521	1.105.583.785
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.160.442.373	6.384.012.318
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	73.948.656.508	54.457.916.213
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	9.843.000	3.242.095.401
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	7.975.799.112	84.765.986.159
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	135.250.190.980	-
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**220.552.696.530**	**150.467.709.485**

Tabel V.D.3.e.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	32.725.636.545	80.803.300.502
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	408.170.661	88.604.393
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.196.963.223	55.823.949.755
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	55.425.326.679	-
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**89.756.097.108**	**136.715.854.650**

Dari jumlah Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp32.725.636.545,00, di antaranya terdapat Beban Penyesuaian Nilai Persediaan Meterai sebesar Rp30.750.000000,00. Beban tersebut terjadi karena terdapat transaksi koreksi keluar meterai tempel Kopur 6000 sejumlah 125.000.000 keping (Rp30.750.000.000,00) pada tanggal pembukuan 31 Desember 2018 pada modul persediaan SAKTI. Hal ini dimaksudkan untuk mengkoreksi saldo akhir transaksi stock opname meterai tempel tanggal 30 Juni 2018 disesuaikan dengan data hasil Berita Acara Verifikasi Semester I Tahun 2018. Tujuan koreksi ini untuk mengeluarkan saldo meterai yang tidak seharusnya tercatat pada saat kondisi data awal 30 Juni 2018 karena terdapat meterai tempel Kopur 6000 sejumlah 125.000.000 keping (Rp30.750.000.000,00) yang tidak seharusnya ikut dihitung pada proses penyusunan laporan keuangan karena merupakan bagian dari barang pengadaan untuk Semester II Tahun 2018. Pada aplikasi SAKTI pengadaan baru dapat dicatat setelah barang diterima seutuhnya dan lengkap sesuai BAST, dalam hal ini meterai tempel yang diadakan jumlahnya harus lengkap terlebih dahulu sesuai dengan kontrak.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas adalah selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp47.229.463.697.182,00 sedangkan Ekuitas Awal per 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp23.700.106.897.795,00.

Tabel V.E.1.
Ekuitas Awal
Per 1 Januari 2018 dan 1 Januari 2017
(dalam rupiah)

Uraian	01 Januari 2018	01 Januari 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	47.229.463.697.182	23.700.106.897.795	23.529.356.799.387	99,28

E.2 SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah surplus sebesar Rp1.269.790.796.973.640,00. Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah senilai Rp0,00.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, dan Lain-lain. Nilai masing-masing komponen Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar dijelaskan di bawah ini.

Tabel V.E.4.
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	1.628.000	19.569.326	(17.941.326)	(91,68)
Selisih Revaluasi Aset	945.902.567	25.505.269.581.847	(25.504.323.679.280)	(99,99)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(39.269.586.602)	51.051.501.675	(90.321.088.277)	(176,92)
Lain-lain	29.994.138.191.495	23.274.896.131	29.970.863.295.364	128.769,05
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	**29.955.816.135.460**	**25.579.615.548.979**	**4.376.200.586.481**	**17,11**

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2018 terbesar terdapat pada Koreksi Lain-lain yaitu sebesar Rp29.994.138.191.495,00 Persentase kenaikan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas per 31 Desember 2018 terbesar juga terdapat pada Koreksi Lain-lain yaitu sebesar 128.769,05 persen.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai Persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas Nilai Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.628.000,00 dan Rp19.569.326,00.

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Koreksi Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi karena adanya revaluasi atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian Aset Tetap 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp945.902.567,00 dan Rp25.505.269.581.847,00.

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk 31 Desember 2018 adalah sebesar (Rp39.269.586.602,00) mengalami penurunan sebesar Rp90.321.088.277,00 dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang berjumlah Rp51.051.501.675,00. Koreksi ini berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp29.994.138.191.495,00 dan Rp23.274.896.131,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain dari Piutang Perpajakan. Dari total koreksi yang berakhir pada 31 Desember 2018, sebesar Rp29.992.675.499.236,00 berasal dari piutang perpajakan. Koreksi tersebut dikarenakan adanya perbaikan data inkracht dan reklasifikasi bunga penagihan baik pencatatan dan STP-nya (belum diketahui induknya) yang menjadi temuan pemeriksaan BPK RI, namun pada dasarnya koreksi ini digunakan untuk mencatat Piutang Pajak yang terjadi pada periode ini akan tetapi belum tercatat pada periode sebelumnya yang disebabkan adanya data baru yang diterima tahun ini oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga baru dapat diakui sebagai Piutang Pajak pada periode berjalan.

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp1.306.656.439.751.957,00) dan (Rp1.144.868.314.483.451,00). Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Diterima dari Entitas Lain	(1.313.347.887.239.719)	(1.151.077.845.435.270)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.734.369.688.357	6.234.464.194.451
Transfer Masuk	6.835.161.234.331	775.280.729.190
Transfer keluar	(6.879.451.991.486)	(800.846.381.817)
Pengesahan Hibah Langsung	1.368.556.560	632.410.000
Jumlah	**(1.306.656.439.751.957)**	**(1.144.868.314.483.451)**

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar (Rp1.313.347.887.239.719,00) sedangkan DKEL sebesar Rp6.734.369.688.357,00.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset/Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp6.835.161.234.331,00. Sedangkan Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar (Rp6.879.451.991.486,00).

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalan Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.368.556.560,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp0,00.

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir merupakan nilai Ekuitas Awal ditambah dengan kenaikan/penurunan Ekuitas. Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp40.319.637.054.325,00 atau turun sebesar Rp6.909.826.642.857,00 dari Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2017 yang sejumlah Rp47.229.463.697.182,00.

Tabel V.E.6.
Ekuitas Akhir
yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	47.229.463.697.182	23.700.106.897.795	23.529.356.799.387	99,28
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(6.909.826.642.857)	23.529.356.799.387	(30.439.183.442.244)	(129,37)
Ekuitas Akhir	**40.319.637.054.325**	**47.229.463.697.182**	**(6.909.826.642.857)**	**(14,63)**

F. CATATAN PENTING LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

F.1.1. Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gijzeling*) dan Pencegahan

Penyanderaan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan merupakan salah satu langkah strategis yang memberikan *deterrent effect* bagi Penanggung Pajak yang tidak patuh. Berkenaan dengan hal ini, lebih lanjut dijelaskan:

1. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara selektif, hati-hati, dan obyektif terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pelaksanaan penyanderaan tersebut didukung sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015 antara DJP dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri yang memuat sekurang-kurangnya identitas Penanggung Pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, dan tempat penyanderaan.
3. Masa penyanderaan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut, Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan ketentuan:
    a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas,
    b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi,
    c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
    d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.
4. Dasar hukum penyanderaan diantaranya adalah sebagai berikut:
    a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak.
    c. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
    d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.
5. Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyanderaan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* kepada Penangung Pajak yang bersangkutan maupun yang lainnya.
6. Terkait pelaksanaan penyanderaan di Tahun Anggaran 2018 disampaikan perkembangan sebagai berikut:

1) Menteri Keuangan menerbitkan 37 Surat Rahasia Menteri Keuangan mengenai pemberian izin penyanderaan terhadap 37 Wajib Pajak, yaitu 30 WP Badan dan 7 WP Orang Pribadi, yang terdiri atas 47 Penanggung Pajak dengan potensi pencairan sebesar Rp190.721.580.765,00;
2) Eksekusi penyanderaan terhadap 30 Wajib Pajak/38 Penanggung Pajak dirinci sebagai berikut;
   a) 21 Wajib Pajak/27 Penanggung Pajak melakukan pembayaran/pelunasan utang pajak, dengan total nilai pencairan utang pajak sebesar Rp39,157 miliar:
   b) 9 Wajib Pajak/9 Penanggung Pajak masih bertahan di Rutan/Lapas, dengan total nilai utang pajak sebesar Rp26.435 miliar.
3) Daftar KPP/Penanggung Pajak yang melakukan pembayaran/pelunasan utang pajak adalah:

Kantor Pelayanan Pajak	Jumlah Pelunasan (Rupiah)
Pratama Jakarta Gambir Empat	1.012.078.565
Penanaman Modal Asing Lima	940.053.347
Penanaman Modal Asing Empat	15.667.583.163
Pratama Padang Dua	487.266.829
Pratama Bekasi Barat	1.985.680.704
Pratama Singaraja	101.144.560
Pratama Surabaya Gubeng	260.018.281
Pratama Bekasi Barat	1.985.680.704
Madya Surabaya	2.338.851.026
Pratama Tanjung	1.010.388.914
Pratama Dumai	75.772.752
Pratama Cikupa	3.736.902.727
Pratama Raba Bima	224.088.513
Pratama Kuala Tungkal	323.819.222
Pratama Semarang Candisari	344.132.860
Pratama Mempawah	6.770.421.495
Pratama Pati	1.574.136.660

4) KPP/ Penanggung Pajak (PP) yang masih bertahan di Rutan, adalah:

Kantor Pelayanan Pajak	Utang Pajak (Rupiah)
Pratama Lubuk Linggau	5.809.013.120
Minyak dan Gas Bumi	4.163.556.304
Pratama Jakarta Pasar Rebo	1.271.501.955
Pratama Yogyakarta	1.426.382.378
Pratama Tanah Abang Satu	1.059.194.160
Pratama Jakarta Kembangan	1.923.561.703
Pratama Kuala Tungkal	2.737.986.244
Pratama Ternate	1.092.022.729
Pratama Makassar Utara	6.952.461.367

7. Data selama tahun 2018 menunjukkan pencairan piutang pajak dari penyanderaan sebesar 20,53% dari seluruh piutang pajak yang telah dilakukan tindakan penyanderaan. Persentase tersebut menunjukkan terdapatnya efek dari tindakan penagihan berupa penyanderaan, sehingga tindakan penyanderaan dapat dikatakan efektif dan efisien.

8. Data selama tahun 2018 untuk realisasi tindakan penagihan dari lelang barang sitaan senilai Rp.31.617.740.935 dengan rincian per Kanwil DJP sebagai berikut.

NAMA KANWIL	SURAT TEGURAN	SURAT PAKSA	LELANG
KANTOR WILAYAH DJP ACEH	48.987.716.314	6.653.821.970	7.279.350
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	89.410.780.891	41.243.129.023	-
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	132.930.206.168	10.777.185.612	91.663.475
KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	136.624.397.077	46.013.081.841	544.103.080
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	105.830.709.464	34.297.228.156	116.216.613
KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL	431.541.994.078	31.761.653.741	586.785.189
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	59.722.618.947	18.646.749.040	55.491.205
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	197.419.828.350	354.437.492.489	4.101.518
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT	105.922.848.223	117.187.967.654	54.104.863
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II	381.255.691.951	232.294.764.767	145.996.125
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	113.635.563.354	97.900.591.518	6.076.465
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA	107.063.528.657	128.895.341.301	18.643.450
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	1.415.430.842.167	758.237.863.183	4.582.283.747
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	167.028.075.151	100.337.365.574	915.317.351
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	154.761.751.944	91.284.485.583	585.245.455
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	112.219.238.095	118.179.863.871	13.771.614
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	135.246.839.320	82.913.023.171	2.837.501
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	78.943.577.141	30.709.862.847	74.787.430
KANTOR WILAYAH DJP D.I. YOGYAKARTA	26.372.079.452	24.295.293.663	2.035.051.325
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	53.096.473.538	68.847.433.334	247.890.219
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	82.780.687.319	68.031.622.276	17.031.480
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	177.654.039.442	22.784.380.138	36.477.500
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT	165.355.436.623	13.195.625.865	-
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH	387.558.058.137	82.656.802.783	133.930.000
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR	437.411.509.666	103.014.827.147	1.365.438.200
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA	76.220.280.322	52.666.775.790	114.626.647
KANTOR WILAYAH DJP SULUT, TENGAH, GORO DAN MALUT	51.159.531.464	19.428.666.192	243.466.227
KANTOR WILAYAH DJP BALI	35.751.433.308	83.856.132.729	177.921.980
KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	91.695.854.882	11.894.875.199	17.539.327
KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU	64.243.463.895	52.957.141.184	-
KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR	1.387.509.992.690	1.031.587.944.262	2.159.441.972
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II	477.467.956.149	168.079.351.680	63.377.022
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III	64.003.082.844	71.755.051.415	-
KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	32.399.591.892	13.221.154.497	-
JUMLAH	4.204.389.759.171	2.655.106.465.079	31.617.740.935

Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan i'tikad baiknya. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pencegahan dilakukan untuk memberikan deterrent effect pada Penanggung Pajak, khususnya bagi

Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur. Kegiatan pencegahan selama tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Nominal (Rp)
1	Penetapan	29	216	2.042.705.871,624,00
2	Perpanjangan	6	52	562.135.038.667,00
3	Pencabutan	4	31	299.440.949.087,04

Proses tindakan penagihan pajak baik penetapan maupun perpanjangan pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) pada tahun 2018 mencapai 303 PP dengan utang pajak sebesar Rp2.604.840.910.291,00. Terhadap tindakan pencegahan tersebut, dihasilkan pencairan piutang pajak sebesar 299.440.949.087,04 dari 35 PP.

Dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak, DJP menghimbau kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak untuk segera melakukan komunikasi dan bersikap kooperatif dengan Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat melunasi sekaligus tunggakan pajaknya atau melakukan pengangsuran atau penundaan tunggakan pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Secara prinsip, DJP menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban tunggakan pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajak maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak.

F.2. SENGKETA PAJAK

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Di samping itu, undang-undang perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
   a. Keberatan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
   b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);

2. Non Keberatan terdiri dari:
   a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
   b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
   c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
   d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidakbenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
   e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidakdidahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
   f. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU PBB;
   g. pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam UU PBB; dan

3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
e. Surat Tagihan Pajak (STP); dan
f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan) dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan, upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2018 adalah 88.670 ketetapan/keputusan/putusan dengan nominal sebesar Rp 241.359.344.125.089,00

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan sebagai berikut:
a. Atas ketetapan SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT/Keputusan/Putusan Kurang Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 69.498 berkas dengan nilai nominal Rp113.387.200.449.703,00 dan USD 4.437.899.123,16;
b. Atas ketetapan SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 4.757 berkas dengan nilai nominal Rp 51.626.040.602.416,40 dan USD 834.257.708,06; dan
c. Atas ketetapan SKPN/Keputusan/Putusan Nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 14.415 berkas berkas.

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan sebagai berikut:

a. Jumlah sengketa non keberatan adalah sebanyak 45.445 berkas dengan nilai nominal Rp5.046.910.780.362,23 dan USD 481.192.42,32
b. Jumlah sengketa keberatan adalah sebanyak 17.938 berkas dengan nilai nominal Rp55.273.856.719.466,40 dan USD 3.011.138.661,04
c. Jumlah sengketa Banding dan Gugatan adalah sebanyak 10.323 berkas dengan nilai nominal Rp67.882.245.491.623,60 dan USD 1.445.043.799,11; dan
d. Jumlah sengketa Peninjauan Kembali adalah sebanyak 14.964 berkas dengan nilai nominal Rp36.810.228.060.667,60 dan USD 767.855.128,75.

Atas sengketa pajak berupa keberatan, dan non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat menerbitkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan membatalkan. Sedangkan, pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan amar putusan menerima atau menolak permohonan pemohon peninjauan kembali.

F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS

Penatausahaan PBB didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani WP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT. Atas nilai ketetapan yang tercantum dalam SPPT tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang.
Khusus terhadap WP PBB Migas yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), terdapat perbedaan ketentuan pembayaran PBB Migas dari WP PBB pada umumnya, karena WP PBB Migas terikat pada kontrak dengan pemerintah (Kontrak Kerja Sama) sehingga diberlakukan ketentuan yang bersifat lex specialis sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama. Selain WP dan DJP, terdapat instansi lain yang terkait dalam proses penagihan dan pembayaran PBB terutang yaitu Direktorat Jenderal Anggaran Pada mulanya, mekanisme pembayaran PBB Migas adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas. Rekening migas merupakan rekening pemerintah yang menampung bagian pemerintah yang disetor oleh KKKS yang sudah berproduksi sesuai dengan kontrak. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 (PP 79/2010)

tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, terdapat mekanisme baru pembayaran PBB Migas yaitu WP membayar sendiri PBB Migasnya. Nantinya PBB Migas tersebut dapat dimintakan kembali sebagai cost recovery setelah WP berproduksi.

Secara umum, mekanisme pembayaran PBB Migas adalah sebagai berikut:

No	Rincian		PBB (Rp)
1	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2018		
	a	Tahun Pajak 2018	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	3.322.827.443.221
	2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	787.199.362.854
	3)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	7.627.247.102.223
		Sub Total	11.737.273.908.298
	b	Tahun Pajak 2017	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	137.708.000
		Sub Total	137.708.000
	c	Tahun Pajak 2016	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	798.098.931
	2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	34.299.700.000
		Sub Total	35.097.798.931
	d	Tahun Pajak 2014	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	27.657.021.790
		Sub Total	27.657.021.790
2	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2017		
	a	Tahun Pajak 2017	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	163.381.225
	2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	163.266.821.715
	3)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	250.225.708.400
		Sub Total	413.655.911.340
	b	Tahun Pajak 2016	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	75.028.816
	2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	13.993.584.869
	3)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	4.683.099.600
		Sub Total	18.751.713.285
	c	Tahun Pajak 2014	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	1.313.465.440
		Sub Total	1.313.465.440
3	SKP PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2018		
	a	Tahun Pajak 2018	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	3.807.730.995
		Sub Total	3.807.730.995
	b	Tahun Pajak 2017	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	1.731.161.242
		Sub Total	1.731.161.242
	c	Tahun Pajak 2016	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	3.790.620.738
		Sub Total	3.790.620.738
	d	Tahun Pajak 2015	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	3.597.029.292

		Sub Total	3.597.029.292
	e	Tahun Pajak 2014	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	23.899.248.243
		Sub Total	23.899.248.243
4	SKP PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2017		
	a	Tahun Pajak 2017	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	188.046.870
		Sub Total	188.046.870
	b	Tahun Pajak 2016	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	877.494.338
		Sub Total	877.494.338
	c	Tahun Pajak 2015	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	1.167.378.505
		Sub Total	1.167.378.505
	d	Tahun Pajak 2014	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	976.014.378
		Sub Total	976.014.378
	Total		12.273.922.251.685

1. Mekanisme Pemindahbukuan untuk PBB Migas atas Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani sebelum PP 79/2010 berlaku (sebelum 20 Desember 2010) sebagai berikut:
   a. DJP menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterima dari WP;
   b. Dirjen Pajak menyampaikan permintaan pembayaran PBB Migas kepada Dirjen Anggaran dengan dilengkapi salinan SPPT; dan
   c. Setelah melakukan penelitian, Direktur Jenderal Anggaran membuat surat permintaan pembayaran ke Direktur Jenderal Perbendaharaan;

2. Mekanisme Pembayaran Sendiri oleh Wajib Pajak untuk PBB Migas atas Kontrak Kerja Sama yang ditandatangani setelah PP 79/2010 berlaku (setelah 20 Desember 2010) adalah sebagai berikut:
   a. DJP menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterima dari WP; dan
   b. Wajib Pajak melunasi PBB terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT dengan melakukan pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik (MPN-G2).

   Aturan terkait penatausahaan PBB Migas yaitu:

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan nomor 131/PMK.03/2017.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi

   Rekapitulasi SPPT/SKP PBB Migas tahun 2018 yang mekanisme pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebesar Rp12.273.922.251.685 dengan rincian:

No	Rincian		PBB (Rp)
1	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2018		
	a	Tahun Pajak 2018	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	3.322.827.443.221
	2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	787.199.362.854
	3)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	7.627.247.102.223
		Sub Total	11.737.273.908.298
	b	Tahun Pajak 2017	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	137.708.000
		Sub Total	137.708.000
	c	Tahun Pajak 2016	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	798.098.931
	2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	34.299.700.000
		Sub Total	35.097.798.931
	d	Tahun Pajak 2014	
	1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	27.657.021.790
		Sub Total	27.657.021.790

F.4. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Dasar hukum Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP), adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa yng diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
3. Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018; dan
4. Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN).

Di tahun 2019 pagu dan realisasi PPh DTP adalah sebesar Rp 10.121.831.058.000 untuk pagu dan sebesar Rp. 10.111.762.370.778 untuk realisasi dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

NO	PPH DTP	PAGU APBN 2018	TAGIHAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Panas Bumi	1.837.960.000.000	2.513.346.963.094	1.837.960.000.000
II.	SBN Valas	8.218.348.183.000	8.765.663.990.640	8.218.348.183.000
III.	Penghapusan Piutang PDAM	65.019.488.000	54.950.800.778	54.950.800.778
IV.	Recurrent Cost SPAN	503.387.000	546.843.135	503.387.000
TOTAL (I + II + III + IV)		10.121.831.058.000	11.334.508.597.647	10.111.762.370.778

F.5. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai alat penyampaian data/informasi perpajakan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan telah dilakukan penagihan pajak sampai dengan Surat Teguran oleh DJBC. SP3DRI merupakan salah satu jenis data/informasi perpajakan eksternal yang perlakuannya sama dengan data/informasi perpajakan eksternal lainnya. Tindak lanjut DJP atas SP3DRI yang diterima dari DJBC menjadi hal penting untuk dilakukan pengawasan dalam rangka mendukung penerimaan pajak. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan, tindak lanjut, dan pengawasan terhadap SP3DRI yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJP serta selaras dengan ketentuan lain yang terkait, telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI).

Direktorat Jenderal Pajak telah menindaklanjuti SE di atas melalui S-30/PJ.08/2018 tanggal 31 Januari 2018 hal Permintaan Tindak Lanjut atas SP3DRI.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Kolom nilai dalam jutaan rupiah

TAHUN SP3DRI	Diterbitkan DJBC		TINDAK LANJUT DJP											
			TINDAK LANJUT		PENJELASAN/KET WP		DIBAYAR		KETETAPAN		DITERBITKAN		TIDAK VALID	
	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH
2010	62.557	442			4.614	48	21.963	98	7.750	61	28.231	235		
2011	325.648	247			1.134	27	203.407	97	71.253	25	49.854	98		
2012	75.782	438			4.295	28	55.931	154	2.621	36	12.934	220		
2013	89.545	195	288	4	1.494	35	5.281	51	6.524	24	75.958	81		
2014	373.189	666	906	29	2.857	84	112.444	105	214.301	13	42.682	435		
2015	89.564	60	167	14	59.124	2	203	8	3.548	3	26.521	33		
2016	81.053	128	429	5	55	4	13.317	27	5.487	34	61.766	58		
2017	10.168	190	3.901	92	4.536	33	1.044	32	239	15	448	18		
2018	196.873	210	113.279	124	53.439	21	5.131	36	24.744	9	240	17	41	3
Grand Total	**1.304.380**	**2.576**	**118.969**	**268**	**131.548**	**282**	**418.721**	**608**	**336.468**	**220**	**298.633**	**1.195**	**41**	**3**

F.6. PENATAUSAHAAN ASET

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut.

F.6.1.Sertifikasi Tanah

Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.388.370 m2. Selama Tahun Anggaran 2018 telah terbit sertifikat baru atas 18 bidang tanah Direktorat Jenderal Pajak sehingga per 31 Desember 2018 terdapat sebanyak 138 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menerbitkan surat himbauan kepada seluruh satuan kerja untuk melakukan sertipikasi tanah melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal nomor S-354/PJ.01/2018 tanggal 21 Februari 2018 hal Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah.
2. Menerbitkan surat permintaan koordinasi dengan Kantor Pertanahan untuk tidak menindaklanjuti proses permohonan sertipikasi dari pihak ketiga yang merupakan tanah-tanah yang dikuasai maupun dimiliki oleh DJP melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal nomor S-341/PJ.01/2018 tanggal 20 Februari 2018 hal Permintaan Untuk Berkoordinasi Dengan Kantor Pertanahan Setempat Dalam Rangka Pengamanan BMN.

3. Melakukan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian dengan cara verifikasi lapangan.
4. Melakukan proses sertipikasi dan berkoordinasi dengan Kantor-Kantor Pertanahan di setiap wilayah.
5. Melakukan Memory Of Understanding antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) Nomor MoU-09/MK.03/2015 (Nomor 8.1/SKB/V/2015) tanggal 20 Mei 2015 dan Nomor KEP-116/PJ/2015 (Nomor 8.2/SKB-100/V/2015.

F.6.2.Penghapusan BMN

Selama Tahun Anggaran 2018 Direktorat Jenderal Pajak telah mengajukan 439 usulan persetujuan pemindahtanganan/pemusnahan BMN dalam rangka penghapusan kepada Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang pada Kementerian Keuangan dan menerbitkan 263 Surat Keputusan Penghapusan BMN dengan nilai perolehan sebesar Rp139.402.788.125,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

F.6.3.Tindak Lanjut dan Langkah-langkah yang Telah Dilaksanakan Dalam Rangka Tertib Pengelolaan Rumah Negara

1. DJP pada tahun 2018 melakukan pemeliharaan rumah negara di wilayah DKI Jakarta Pemeliharaan Pemeliharaan dilakukan pada rumah negara sebagai berikut:

REKAPITULASI HARGA
PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUMAH NEGARA DI WILAYAH DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Lokasi Rumah Negara	Jumlah (Rp)	PPN	TOTAL
1	Jalan Penyelesaian Tomang III No. 14, Kel.Meruya Utara, Kec.Kembangan, Jakarta Barat	18.582.100,00	1.858.210,00	20.440.310,00
2	Jalan Penyelesaian Tomang III No. 11, Kel.Meruya Utara, Kec.Kembangan, Jakarta Barat	15.871.000,00	1.587.100,00	17.458.100,00
3	Komplek Pajak Meruya Selatan No.C10, Jalan H.Juhri, Kel.Meruya Selatan, Kec.Kembangan, Jakarta Barat	15.954.600,00	1.595.460,00	17.550.060,00
4	Komplek Pajak Meruya Selatan No.D1, Jalan H.Juhri, Kel.Meruya Selatan, Kec.Kembangan, Jakarta Barat	15.929.800,00	1.592.980,00	17.522.780,00
5	Komplek Pajak Meruya Selatan No.D2, Jalan H.Juhri, Kel.Meruya Selatan, Kec.Kembangan, Jakarta Barat	15.944.900,00	1.594.490,00	17.539.390,00
6	Komplek Pajak Meruya Selatan No.D7, Jalan H.Juhri, Kel.Meruya Selatan, Kec.Kembangan, Jakarta Barat	15.929.800,00	1.592.980,00	17.522.780,00
7	Komplek Pajak Meruya Selatan No.D8, Jalan H.Juhri, Kel.Meruya Selatan, Kec.Kembangan, Jakarta Barat	15.929.800,00	1.592.980,00	17.522.780,00
8	Komplek Pajak Meruya Selatan No.D13, Jalan H.Juhri, Kel.Meruya Selatan, Kec.Kembangan, Jakarta Barat	15.929.800,00	1.592.980,00	17.522.780,00
9	Jalan Sakti I No.21, Kemanggisan, Jakarta Barat	42.501.100,00	4.250.110,00	46.751.210,00
10	Jalan Asem II (Nusa Indah) 9, Cipete, Jakarta Selatan	41.815.200,00	4.181.520,00	45.996.720,00
11	Jalan H. Ayub 07, Pejaten Pasar Minggu	38.564.000,00	3.856.400,00	42.420.400,00
12	Jalan Perhubungan V No.36, Jati, Pulogadung, Jakarta	44.327.100,00	4.432.710,00	48.759.810,00
13	Jalan Perikani Raya No.6 Cipinang, Pulogadung, Jakar	44.289.600,00	4.428.960,00	48.718.560,00
	Total	**341.568.800,00**	**34.156.880,00**	**375.725.680,00**

2. DJP telah melakukan upaya penertiban rumah negara, yaitu sebagai berikut:
   a. Membuat Surat Himbauan kepada pihak ketiga
   b. Monitoring rumah negara di wilayah DKI Jakarta

DJP masih terus berupaya melakukan penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak dan melakukan pengamanan BMN berupa Rumah Negara, baik pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum.

Daftar Himbauan yang telah dilakukan:

a. Daftar Somasi yang ditujukan kepada penghuni rumah negara yang tidak berhak

Selama tahun 2018 telah diterbitkan 19 (sembilan belas) surat Somasi yang ditujukan kepada penghuni rumah negara yang tidak berhak, antara lain:

No.	Nomor Surat	Tanggal	Uraian
1.	S-44/PJ.014/2018	26 Februari 2018	Somasi pertama Rumah Negara Jalan Raya Tanjung Duren dan Jalan Delima Raya
2.	S-45/PJ.014/2018	26 Februari 2018	Somasi pertama Rumah Negara Jalan Raya Tanjung Duren dan Jalan Delima Raya
3.	S-46/PJ.014/2018	26 Februari 2018	Somasi pertama Rumah Negara Jalan Raya Tanjung Duren dan Jalan Delima Raya
4.	S-47/PJ.014/2018	26 Februari 2018	Somasi pertama Rumah Negara Jalan Raya Tanjung Duren dan Jalan Delima Raya
5.	S-48/PJ.014/2018	26 Februari 2018	Somasi pertama Rumah Negara Jalan Raya Tanjung Duren dan Jalan Delima Raya
6.	S-49/PJ.014/2018	26 Februari 2018	Somasi pertama Rumah Negara Jalan Raya Tanjung Duren dan Jalan Delima Raya
7.	S-50/PJ.014/2018	26 Februari 2018	Somasi pertama Rumah Negara Jalan Raya Tanjung Duren dan Jalan Delima Raya
8.	S-51/PJ.014/2018	26 Februari 2018	Somasi pertama Rumah Negara Jalan Raya Tanjung Duren dan Jalan Delima Raya
9.	S-52/PJ.014/2018	26 Februari 2018	Somasi pertama Rumah Negara Jalan Raya Tanjung Duren dan Jalan Delima Raya
10.	S-53/PJ.014/2018	26 Februari 2018	Somasi pertama Rumah Negara Jalan Raya Tanjung Duren dan Jalan Delima Raya
11.	S-54/PJ.014/2018	26 Februari 2018	Somasi pertama Rumah Negara Jalan Raya Tanjung Duren dan Jalan Delima Raya
12.	S-255/PJ.014/2018	2 Oktober 2018	Somasi untuk Meninggalkan Rumah Negara
13.	S-256/PJ.014/2018	2 Oktober 2018	Somasi untuk Meninggalkan Rumah Negara
14.	S-257/PJ.014/2018	2 Oktober 2018	Somasi untuk Meninggalkan Rumah Negara
15.	S-274/PJ.014/2018	16 Oktober 2018	Somasi Pertama Rumah Negara Komplek Pajak Perhubungan
16.	S-275/PJ.014/2018	16 Oktober 2018	Somasi Pertama Rumah Negara Komplek Pajak Perhubungan
17.	S-318/PJ.014/2018	17 Desember 2018	Somasi Kedua Rumah Negara Komplek Pajak Cipete
18.	S-318/PJ.014/2018	17 Desember 2018	Somasi Kedua Rumah Negara Komplek Pajak Cipete
19.	S-318/PJ.014/2018	17 Desember 2018	Somasi Kedua Rumah Negara Komplek Pajak Cipete

d. Daftar himbauan yang ditujukan kepada penghuni rumah negara yang tidak berhak

Selama tahun 2018 juga telah diterbitkan 17 (tujuh belas) surat Himbauan pengosongan rumah negara yang ditujukan kepada penghuni rumah negara yang tidak berhak.

No.	Nomor Surat	Tanggal	Uraian	Tujuan
1.	S-110/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Syafril Rasyid
2.	S-111/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Pranowo Budiyanto
3.	S-112/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Leonald Rosa Sidabutar
4.	S-113/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Ricart Sianipar
5.	S-114/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Siswantoro
6.	S-115/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Yulidarma
7.	S-116/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Sugeng Priyadi
8.	S-117/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Mochamad Yusman Amin
9.	S-118/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Arto Suharto Prawirodirjo
10.	S-119/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Abdul Ghofur
11.	S-120/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Heriyanto
12.	S-121/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Raden Agus Suparman
13.	S-122/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Robby Tampubolon
14.	S-123/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Rachmawan
15.	S-125/PJ.014/2018	4 Juli 2018	Himbauan Pengembalian Rumah Negara	Dirgo Handoko
16.	S-282/PJ.014/2018	24 Oktober 2018	Himbauan Untuk Mempersiapkan Pengembalian Rumah Negara	Amiruddin, Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Kemayoran
17.	S-311/PJ.014/2018	5 Desember 2018	Himbauan Pengosongan Lahan	Ibu Ribut

F.7. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai. Adapun untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012 s.d. 2017 temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah disusun rencana aksi sebagaimana terlampir.

F.8. REKENING PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2018

Inventarisasi rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening dapat diinformasikan bahwa terdapat 969 rekening bendahara pengeluaran yang dipertahankan, sebagaimana Tabel F.8 di bawah ini.

Tabel F.8.
Rekapitulasi Rekening Bendahara Pengeluaran TA 2018
Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

No	Nama Kanwil/Satker	Kode Kanwil DJP	Jumlah Rekening dipertahankan	jumlah Saldo	Jumlah Rekening Ditutup	Jumlah Saldo
1	Kanwil DJP Aceh	010	30	-	-	-
2	Kanwil DJP Sumatera Utara I	020	21	-	-	-
3	KANWIL DJP Sumatera Utara II	030	29	111.502	2	-
4	Kanwil DJP Riau	040	25	9.638.900	-	-
5	KANWIL DJP Sumatera Barat dan Jambi	050	22	984	17	-
6	KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL	060	41		-	-
7	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	070	31		-	-
8	Kanwil DJP Jakarta Pusat	080	34	-	-	-
9	Kanwil DJP Jakarta Barat	090	24	10.612.800	-	-
10	Kanwil DJP Jakarta Selatan Satu	100	18	-	-	-
11	KANWIL DJP Jakarta Timur	110	20	-	-	-
12	Kanwil DJP Jakarta Utara	120	18	-	-	-
13	Kanwil DJP Jakarta Khusus	130	21	-	-	-
14	Kanwil DJP Banten	140	25	-	-	-
15	Kanwil DJP Jawa Barat I	150	36	-	2	370
16	Kanwil DJP jawa Barat II	160	25	-	-	-
17	Kanwil DJP Jawa Tengah I	170	41	712.500	1	-
18	Kanwil DJP Jawa Tengah II	180	33	-	1	-
19	Kanwil DJP DIY	190	12	-	-	-
20	Kanwil DJP Jawa Timur I	200	28	-	-	-
21	KANWIL DJP Jawa Timur II	210	41	-	-	-
22	Kanwil DJP Jawa Timur III	220	39	1.000.000	-	-
23	Kanwil DJP Kalimantan Barat	230	24	9	-	-
24	Kanwil DJP Kalimantan selatan dan Tengah	240	40	-	-	-
25	KANTOR WILAYAH DJP Kalimantan Timur dan Utara	250	24	-	-	-
26	KANWIL DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	260	53	10.220	-	-
27	Kanwil DJP Bali	280	23	-	-	-
28	KANWIL DJP Nusa Tenggara	290	35	-	-	-
29	Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut	270	40	-	-	-
30	KANWIL DJP papua dan Maluku	300	31	31.673.756	-	-
31	Kanwil DJP WP Besar	310	10	20.000.000	-	-
32	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	320	20	-	-	-
33	Kanwil DJP Jawa Barat III	330	25	-	-	-
34	Kanwil DJP Kepulauan Riau	340	14	1.218	-	-
35	Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	330	2	-	-	-
36	Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Maka:	340	2	-	-	-
37	Kantor Pengolahan Data Eksternal	119091	2	-	-	-
38	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	672863	6	-	-	-
39	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	690311	2	-	-	-
40	Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi	100041	2	-	-	-
jumlah			969	73.761.889	23	370

djp

LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2018 *UNAUDITED* Revisi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

djp

DAFTAR LAMPIRAN

NO	LAMPIRAN	KETERANGAN
1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN s.d. 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN A
2	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN s.d. 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN B
3	LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA s.d. 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN C
4	NERACA PER 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN D
5	NERACA PERCOBAAN PER 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN E
6	LAPORAN OPERASIONAL s.d. 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN F
7	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS s.d. 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN G
8	PENERIMAAN PAJAK s.d. 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN H
9	DAFTAR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN dan KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN	LAMPIRAN I
10	PIUTANG PAJAK PER 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN J
11	PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI PER 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN K
12	HIBAH PER 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN L
13	BARANG MILIK NEGARA (BMN) PER 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN M
14	INFORMASI AKRUAL PER 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN N
15	TINDAK LANJUT BPK	LAMPIRAN O
16	PENCAPAIAN INDIKATOR KERJA UTAMA DJP PER 31 DESEMBER 2018	LAMPIRAN P

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

djp

LAMPIRAN A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
s.d. 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 29/04/19 9:15 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_es1_komparatif--

NO	URAIAN	2018				2017			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	1,423,995,493,162,000	1,313,322,214,394,922.36	110,673,278,767,077.64	92.23	1,283,565,861,674,975	1,151,028,064,274,849	132,537,797,400,126	90
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	4,445,300,000	25,672,844,797	(21,227,544,797)	578	3,899,118,433	49,781,160,426	(45,882,041,993)	1277
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	1,423,999,938,462,000	1,313,347,887,239,719.36	110,652,051,222,280.64	92.23	1,283,569,760,793,408	1,151,077,845,435,275	132,491,915,358,133	90
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	2,473,721,820,000	2,400,520,430,763	73,201,389,237	97	2,379,159,403,000	2,301,811,200,048	77,348,202,952	97
	BELANJA BARANG	3,991,228,444,000	3,792,354,372,694	198,874,071,306	95	3,806,926,602,000	3,621,582,600,559	185,344,001,441	95
	BELANJA MODAL	976,637,721,000	541,494,884,900	435,142,836,100	55	332,569,737,000	311,070,393,844	21,499,343,156	94
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	7,441,587,985,000	6,734,369,688,357	707,218,296,643	90	6,518,655,742,000	6,234,464,194,451	284,191,547,549	96
C	PEMBIAYAAN				0				0

djp

LAMPIRAN B

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN s.d. 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
41	PENDAPATAN PERPAJAKAN					
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	12,834,823,694,000	26,557,751,498,882	42,985,833	26,557,708,513,049	206.92
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	25,299,226,306,000	38,118,280,365,523	0	38,118,280,365,523	150.67
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	33,800,919,649	0	33,800,919,649	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	164,932,930,000,000	135,067,093,043,566	156,867,634,411	134,910,225,409,155	81.8
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	19,779,417,828,000	18,088,753,105,986	78,877,906,103	18,009,875,199,883	91.05
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	60,914,795,038,000	54,729,591,277,294	2,443,993,582	54,727,147,283,712	89.84
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	50,883,948,472,000	39,922,502,908,788	183,388,767,193	39,739,114,141,595	78.1
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	22,209,410,000,000	9,456,374,480,421	50,602,500,058	9,405,771,980,363	42.35
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	284,909,436,487,000	285,113,519,423,141.	32,980,597,939,802	252,132,921,483,339.	88.5
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	57,203,006,978,000	52,373,456,397,410	1,735,416,406,178	50,638,039,991,232	88.52
411128	Pendapatan PPh Final	142,645,646,471,000	115,860,172,237,089	400,839,154,589	115,459,333,082,500	80.94
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	3,398,989,830,000	144,492,751,195	2,567,751,496	141,924,999,699	4.18
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	0	355,936,972	23,617,200	332,319,772	0
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	12,987,522	0	12,987,522	0
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	0	167,200	0	167,200	0
411143	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	0	0	2,462,000	(2,462,000)	0
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	503,387,000	503,900,818	0	503,900,818	100.1
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	1,902,979,488,000	1,892,910,800,778	19,603,014	1,892,891,197,764	99.47
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	8,218,348,183,000	8,218,348,183,000	0	8,218,348,183,000	100
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	0	1,616,145	0	1,616,145	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4111	855,133,462,162,000	785,577,922,001,379.3	35,591,690,721,459	749,986,231,279,920.3	65.12
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	344,603,467,748,000	415,485,971,242,335	81,565,876,375,610	333,920,094,866,725	96.9
411212	Pendapatan PPN Impor	179,280,834,931,000	186,403,790,728,258	9,146,931,458	186,394,643,796,800	103.97
411219	Pendapatan PPN Lainnya	314,583,549,000	119,979,350,196	51,270,830,774	68,708,519,422	21.84
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	13,320,528,887,000	12,834,095,043,005	39,428,613,740	12,794,666,429,265	96.05
411222	Pendapatan PPnBM Impor	4,188,953,411,000	4,108,032,880,889	27,596,000	4,108,005,284,889	98.07
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	92,761,474,000	35,034,117,150	60,000,000,000	(24,965,882,850)	-26.91
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4112	541,801,130,000,000	618,986,903,361,833	81,725,750,347,582	537,261,153,014,251	64.99
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan					
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	1,648,612,667,000	2,213,778,793,077	25,201,323,173	2,188,577,469,904	132.75
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	364,385,090,000	761,402,519,155	5,164,785,190	756,237,733,965	207.54
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1,578,290,012,000	2,255,675,736,914	537,259,574,287	1,718,416,162,627	108.88
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	13,513,597,122,000	14,540,480,330,129	158,502,268,000	14,381,978,062,129	106.43
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	264,210,468,000	313,275,381,204	0	313,275,381,204	118.57
411319	Pendapatan PBB Lainnya	5,641,000	86,032,628,009	0	86,032,628,009	1525130.79
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4113	17,369,101,000,000	20,170,645,388,488	726,127,950,650	19,444,517,437,838	254,300.83
4116	Pendapatan Pajak Lainnya					
411611	Pendapatan Bea Meterai	2,733,140,734,000	1,470,432,796,442	38,948,000	1,470,393,848,442	53.8
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	4,614,090,247,000	3,985,405,294,453	0	3,985,405,294,453	86.37
411613	Pendapatan PPn Batubara	660,545,114,000	656,409,788,263	0	656,409,788,263	99.37
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	253,341,448,000	27,617,529,333	0	27,617,529,333	10.9
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	927,467,870,000	797,113,685,456	811,200,773,318	(14,087,087,862)	-1.52
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	501,131,035,000	519,797,175,181	19,529,952,723	500,267,222,458	99.83
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	717,759,000	1,166,073,449	0	1,166,073,449	162.46
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	1,365,793,000	3,139,994,377	0	3,139,994,377	229.9

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4116	9,691,800,000,000	7,461,082,336,954	830,769,674,041	6,630,312,662,913	92.64
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 41	1,423,995,493,162,000	1,432,196,553,088,654.	118,874,338,693,732	1,313,322,214,394,922.	38,205.96
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan					
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0	0
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4231	0	0	0	0	0
4232	Pendapatan Jasa					
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4232	0	0	0	0	0
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	21,255,000	104,919,620	0	104,919,620	493.62
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,776,000	10,912,500	0	10,912,500	614.44
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	6,581,000	2,492,582,999	0	2,492,582,999	37875.44
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	215,625,000	6,001,164,806	0	6,001,164,806	2783.15
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	586,707,000	5,669,327,951	7,675,616	5,661,652,335	964.99
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	108,000	0	0	0	0
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	28,000	7,370,171	0	7,370,171	26322.04
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	832,080,000	14,286,278,047	7,675,616	14,278,602,431	9,864.81
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	361,929,005	0	361,929,005	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	361,929,005	0	361,929,005	0
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	180,372,000	5,857,872	0	5,857,872	3.25

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1,028,805,000	2,368,096,627	0	2,368,096,627	230.18
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	123,530,000	412,796,434	0	412,796,434	334.17
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	19,438,000	181,818	0	181,818	0.94
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	1,352,145,000	2,786,932,751	0	2,786,932,751	142.14
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	11,485,000	1,384,123,720	0	1,384,123,720	12051.58
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	1,175,566,479	0	1,175,566,479	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	11,485,000	2,559,690,199	0	2,559,690,199	6,025.79
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	6,636,000	878,455,498	0	878,455,498	13237.73
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	140,779,000	2,038,795,471	0	2,038,795,471	1448.22
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	503,201,259	0	503,201,259	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	319,646,000	737,120,918	873,233	736,247,685	230.33
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,782,529,000	1,528,990,498	0	1,528,990,498	85.78
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	2,249,590,000	5,686,563,644	873,233	5,685,690,411	3,000.41
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	4,445,300,000	25,681,393,646	8,548,849	25,672,844,797	4,394.36
	JUMLAH PENDAPATAN	1,423,999,938,462,000	1,432,222,234,482,300.	118,874,347,242,581	1,313,347,887,239,719.	26,208.3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0100	DKI JAKARTA					
015408	KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II	43,147,000	7,398,351	0	7,398,351	17.15
015409	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU EMPAT	584,881,909,000	607,233,288,338	4,481,077,746	602,752,210,592	103.06
015410	KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI EMPAT	7,250,096,020,000	8,902,372,489,923	1,348,138,705,980	7,554,233,783,943	104.19
015412	KPP PRATAMA JAKARTA PESANGGRAHAN	934,910,244,000	900,223,877,416	28,277,680,100	871,946,197,316	93.27
119127	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	938,000	9,627,275	0	9,627,275	1026.36
119131	KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA	95,427,788,107,000	103,137,134,009,187	7,291,729,714,978	95,845,404,294,209	100.44
119152	KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING	6,657,281,448,000	5,880,311,980,003	333,750,759,133	5,546,561,220,870	83.32
119166	KPP Pratama Jakarta Jagakarsa	896,200,143,000	209,818,280,220	4,824,496,872	204,993,783,348	22.87
409411	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK	2,647,570,362,000	2,385,851,704,133	60,527,278,314	2,325,324,425,819	87.83
410078	KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING SATU	20,210,404,390,000	20,826,362,864,620	3,086,458,513,188	17,739,904,351,432	87.78
410166	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	988,000	35,560,139	0	35,560,139	3599.2
410248	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT	1,323,302,375,000	1,193,045,056,744	36,860,326,134	1,156,184,730,610	87.37
410254	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA	2,607,011,578,000	2,871,248,230,327	197,557,931,657	2,673,690,298,670	102.56
410430	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT	739,000	42,189,449	0	42,189,449	5708.99
449761	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT	17,831,784,165,000	16,626,751,589,107	779,668,962,451	15,847,082,626,656	88.87
449777	KPP Madya Jakarta Selatan I	24,761,289,862,000	21,633,035,906,034	987,005,350,944	20,646,030,555,090	83.38

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
449783	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR	11,054,253,462,000	10,669,421,392,899	526,543,778,850	10,142,877,614,049	91.76
449792	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA	12,471,276,540,000	12,039,782,371,656	473,587,081,059	11,566,195,290,597	92.74
524781	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PLUIT	4,544,068,493,000	4,738,807,726,823	59,244,629,062	4,679,563,097,761	102.98
560841	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA JATINEGARA	2,460,085,004,000	2,763,697,252,929	244,541,479,646	2,519,155,773,283	102.4
560855	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU	2,229,023,721,000	2,948,628,343,552	81,066,251,438	2,867,562,092,114	128.65
560862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET	3,919,946,489,000	4,187,286,145,781	100,690,089,750	4,086,596,056,031	104.25
560876	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING	4,507,540,192,000	4,440,440,450,147	104,245,446,883	4,336,195,003,264	96.2
560880	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PENJARINGAN	3,272,392,853,000	3,484,740,609,668	250,544,446,697	3,234,196,162,971	98.83
560897	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG	3,304,232,968,000	3,425,022,780,490	40,497,357,922	3,384,525,422,568	102.43
560902	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	2,801,957,744,000	2,657,975,907,763	168,685,966,067	2,489,289,941,696	88.84
560923	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	881,438,212,000	731,588,180,592	7,469,258,107	724,118,922,485	82.15
560930	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK	2,465,370,166,000	2,352,914,139,907	28,430,536,388	2,324,483,603,519	94.29
561012	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN	3,528,195,062,000	3,363,302,550,954	97,297,095,286	3,266,005,455,668	92.57
561300	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	986,447,979,000	874,355,132,018	40,951,119,017	833,404,013,001	84.49
561314	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI	1,949,482,701,000	1,774,454,032,323	76,257,299,202	1,698,196,733,121	87.11
561321	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU	5,090,995,790,000	6,536,067,349,109	1,111,068,468,941	5,424,998,880,168	106.56
561335	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU	7,414,752,922,000	8,134,257,497,514	316,048,560,562	7,818,208,936,952	105.44

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
561342	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA	5,250,577,859,000	5,210,760,913,943	211,709,855,005	4,999,051,058,938	95.21
561356	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN	4,936,548,818,000	7,680,742,720,657	2,217,221,826,445	5,463,520,894,212	110.67
561377	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CILANDAK	4,388,486,523,000	4,836,310,158,180	654,841,493,609	4,181,468,664,571	95.28
561381	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU	4,648,946,908,000	4,494,491,312,811	273,785,716,381	4,220,705,596,430	90.79
561398	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIUK	1,129,540,571,000	1,128,265,953,513	9,809,266,427	1,118,456,687,086	99.02
561403	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU	1,429,940,442,000	1,154,738,262,500	6,236,666,120	1,148,501,596,380	80.32
561410	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	6,184,675,670,000	6,122,680,995,483	783,543,835,643	5,339,137,159,840	86.33
561424	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SENEN	1,982,902,578,000	1,760,035,255,821	32,009,723,059	1,728,025,532,762	87.15
561431	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU	2,273,716,180,000	2,639,404,136,721	24,800,342,600	2,614,603,794,121	114.99
561445	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR	4,116,070,743,000	3,678,661,140,943	176,678,081,876	3,501,983,059,067	85.08
561452	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PALMERAH	3,704,559,085,000	3,625,031,605,893	745,848,047,996	2,879,183,557,897	77.72
561466	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU	1,725,628,813,000	1,760,632,872,599	7,176,607,541	1,753,456,265,058	101.61
561470	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMBORA	2,359,972,679,000	2,024,406,850,738	23,412,147,313	2,000,994,703,425	84.79
561487	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CENGKARENG	4,655,687,774,000	4,622,662,106,140	162,480,050,236	4,460,182,055,904	95.8
567982	KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA	36,460,522,067,000	34,188,438,675,924	2,349,793,861,770	31,838,644,814,154	87.32
604392	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA	4,043,583,235,000	3,586,112,900,823	94,689,153,970	3,491,423,746,853	86.34
604400	KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING DUA	21,393,913,690,000	21,209,594,283,740	1,783,220,090,175	19,426,374,193,565	90.8

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
604414	KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING TIGA	16,856,614,815,000	17,095,821,820,200	1,490,743,676,041	15,605,078,144,159	92.58
635553	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I	5,411,000	37,437,399	0	37,437,399	691.88
635621	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA	1,517,696,198,000	1,779,166,333,302	62,511,579,209	1,716,654,754,093	113.11
635638	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA	2,297,225,204,000	2,570,544,953,199	187,033,635,196	2,383,511,318,003	103.76
635642	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA	2,414,930,733,000	2,346,903,178,499	126,415,022,646	2,220,488,155,853	91.95
635659	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PANCORAN	1,837,157,149,000	2,180,300,347,211	217,543,016,030	1,962,757,331,181	106.84
635663	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN	3,180,701,752,000	2,938,991,243,877	28,632,116,417	2,910,359,127,460	91.5
635670	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KOJA	1,797,511,772,000	1,696,755,383,854	73,474,696,992	1,623,280,686,862	90.31
635684	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN	3,680,664,227,000	3,543,849,122,320	95,030,820,183	3,448,818,302,137	93.7
635691	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA	1,759,165,462,000	1,630,655,106,876	150,808,997,006	1,479,846,109,870	84.12
635706	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG	1,968,333,570,000	2,374,799,825,356	255,028,191,695	2,119,771,633,661	107.69
635710	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	2,889,154,959,000	3,207,153,843,014	227,794,301,669	2,979,359,541,345	103.12
635727	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA	4,111,931,824,000	4,179,615,902,276	559,086,240,452	3,620,529,661,824	88.05
635731	KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANANAM MODAL ASING EMPAT	8,912,604,681,000	10,157,440,330,380	2,432,308,374,462	7,725,131,955,918	86.68
635748	KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA	19,741,261,215,000	17,998,456,602,001	1,991,420,888,751	16,007,035,713,250	81.08
635972	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	1,761,350,602,000	1,542,337,676,691	49,074,268,754	1,493,263,407,937	84.78
635993	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	3,321,110,650,000	3,262,332,677,228	131,805,106,666	3,130,527,570,562	94.26

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
636008	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KALIDERES	1,936,274,144,000	1,874,660,215,346	13,387,596,521	1,861,272,618,825	96.13
636012	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER	4,654,739,195,000	4,594,133,707,564	86,395,466,305	4,507,738,241,259	96.84
648901	KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR	1,250,000	224,528,029	0	224,528,029	17962.24
648915	KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU	95,118,668,314,000	114,863,719,220,435	18,247,279,298,106	96,616,439,922,329	101.57
648922	KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA	144,251,936,821,000	148,609,219,839,867.3	20,966,973,968,632	127,642,245,871,235.3	88.49
655476	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	3,149,000	9,504,643	0	9,504,643	301.83
655480	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA	908,000	35,604,081	0	35,604,081	3921.15
655608	KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI	87,152,168,501,000	89,881,790,049,445	4,038,927,091,855	85,842,862,957,590	98.5
655612	KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM	12,052,624,739,000	11,146,812,868,326	949,436,551,944	10,197,376,316,382	84.61
662791	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT	34,731,901,931,000	33,483,999,261,285	6,836,228,928,850	26,647,770,332,435	76.72
662809	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR EMPAT	1,284,982,653,000	1,078,215,682,424	45,704,027,113	1,032,511,655,311	80.35
662813	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR	2,631,908,123,000	2,831,547,786,599	35,859,895,751	2,795,687,890,848	106.22
662820	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	1,767,947,040,000	2,327,656,027,888	538,478,605,347	1,789,177,422,541	101.2
662834	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG	5,226,372,775,000	5,695,631,959,283	1,024,551,061,420	4,671,080,897,863	89.38
675652	KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	98,466,172,396,000	104,773,277,444,832	5,901,521,218,319	98,871,756,226,513	100.41
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	932,022,422,511,000	969,685,291,545,550.36	94,207,161,070,872	875,478,130,474,678.36	489.5
0199	INSTANSI PUSAT					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
100041	KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN JAMBI	143,892,000	202,658,613	0	202,658,613	140.84
119091	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	10,123,609,303,000	10,119,727,010,805	0	10,119,727,010,805	99.96
672863	KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN	69,000	16,177,946	0	16,177,946	23446.3
689952	KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL	354,000	185,482	0	185,482	52.4
690311	KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN	0	77,671,056	0	77,671,056	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0199) - INSTANSI PUSAT	10,123,753,618,000	10,120,023,703,902	0	10,120,023,703,902	4,747.9
0200	JAWA BARAT					
020561	KANWIL DJP JAWA BARAT III	5,051,000	413,616,746	0	413,616,746	8188.81
025735	KPP PRATAMA BEKASI BARAT	1,331,143,259,000	1,262,003,872,667	22,036,131,505	1,239,967,741,162	93.15
025736	KPP PRATAMA PONDOK GEDE	1,433,850,814,000	1,368,381,947,651	38,146,882,145	1,330,235,065,506	92.77
025842	KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN	1,493,293,697,000	1,376,888,362,851	852,247,278	1,376,036,115,573	92.15
119168	KPP Madya Bogor	2,122,933,916,000	2,328,295,052,742	164,728,325,527	2,163,566,727,215	101.91
119326	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	9,739,000	55,333,419	0	55,333,419	568.16
119347	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOGOR	2,063,764,815,000	1,910,316,876,461	16,178,559,628	1,894,138,316,833	91.78
119351	KPP PRATAMA CIREBON SATU	1,394,190,392,000	1,430,322,843,724	30,588,450,806	1,399,734,392,918	100.4
119368	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI	1,307,670,521,000	1,134,498,317,798	16,984,775,308	1,117,513,542,490	85.46
119372	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARAWANG UTARA	3,108,738,777,000	3,384,165,763,127	247,346,439,151	3,136,819,323,976	100.9

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
119389	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TASIKMALAYA	894,882,992,000	758,478,356,555	3,244,187,522	755,234,169,033	84.39
409442	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJALAYA	982,953,393,000	1,001,969,777,764	33,492,523,492	968,477,254,272	98.53
409489	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUNINGAN	692,610,393,000	698,427,664,494	28,006,410,122	670,421,254,372	96.8
409509	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI SELATAN	2,524,682,367,000	2,387,091,163,559	74,268,558,157	2,312,822,605,402	91.61
409515	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GARUT	759,387,564,000	558,004,913,737	5,823,402,332	552,181,511,405	72.71
410084	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG	613,422,384,000	636,802,361,223	26,341,290,709	610,461,070,514	99.52
410260	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI	843,426,796,000	768,564,117,827	11,694,226,620	756,869,891,207	89.74
410449	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIMAHI	1,881,597,055,000	1,795,417,904,652	171,023,220,101	1,624,394,684,551	86.33
410455	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIANJUR	608,489,319,000	566,536,000,333	47,722,254,348	518,813,745,985	85.26
410461	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWAKARTA	1,310,833,607,000	1,538,911,638,764	312,773,219,111	1,226,138,419,653	93.54
440910	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI	18,408,169,596,000	17,514,542,732,757	1,082,408,067,307	16,432,134,665,450	89.27
449803	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG	11,918,639,186,000	10,686,228,090,097	477,125,617,701	10,209,102,472,396	85.66
524842	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG	2,843,409,821,000	2,759,306,471,780	124,204,127,542	2,635,102,344,238	92.67
524859	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA	1,244,502,667,000	1,186,079,773,442	11,868,940,442	1,174,210,833,000	94.35
560951	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES	1,461,412,653,000	1,427,490,398,319	22,821,325,005	1,404,669,073,314	96.12
561051	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALEGA	1,552,369,513,000	1,563,675,852,835	16,456,239,171	1,547,219,613,664	99.67
561072	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA	1,887,950,225,000	1,724,519,622,172	11,572,146,937	1,712,947,475,235	90.73

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
561089	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING	3,304,044,686,000	2,863,999,886,304	119,291,089,251	2,744,708,797,053	83.07
569069	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PELABUHAN RATU	156,000	742,400	0	742,400	475.9
635752	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK	1,396,306,077,000	1,203,821,039,836	23,451,472,043	1,180,369,567,793	84.54
635769	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBITUNG	1,729,158,328,000	1,810,819,719,611	45,628,109,915	1,765,191,609,696	102.08
635773	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CICADAS	1,397,589,217,000	1,260,070,730,051	18,170,127,047	1,241,900,603,004	88.86
636040	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG	1,912,579,977,000	2,034,073,847,762	395,554,829,114	1,638,519,018,648	85.67
636054	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA INDRAMAYU	695,125,707,000	712,462,656,138	15,866,612,449	696,596,043,689	100.21
636061	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG SELATAN	9,133,349,720,000	10,627,849,605,244	731,324,503,592	9,896,525,101,652	108.36
636075	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEUNGSI	1,899,424,068,000	1,834,376,452,425	61,387,517,950	1,772,988,934,475	93.34
636096	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARAWANG SELATAN	2,397,175,346,000	2,774,851,213,757	316,391,290,924	2,458,459,922,833	102.56
636427	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BANJAR	444,000	400	0	400	0.09
655497	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	185,000	220,743,762	0	220,743,762	119320.95
655523	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA	1,700,696,084,000	1,695,381,564,258	32,049,152,149	1,663,332,412,109	97.8
655565	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBANG	979,737,828,000	1,060,765,384,013	66,821,013,812	993,944,370,201	101.45
663555	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAMIS	637,214,658,000	491,365,345,727	1,666,237,992	489,699,107,735	76.85
689210	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MAJALENGKA	993,000	0	0	0	0
690239	KPP PRATAMA CIREBON DUA	260,726,816,000	278,648,711,259	2,688,019,809	275,960,691,450	105.84

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 9
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (0200) - JAWA BARAT	92,127,470,802,000	90,416,096,470,443	4,827,997,544,014	85,588,098,926,429	3,002.04
0300	JAWA TENGAH					
119436	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	9,672,000	105,493,376	0	105,493,376	1090.71
119440	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR	1,126,994,572,000	1,062,177,166,415	26,622,010,345	1,035,555,156,070	91.89
119457	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS	2,031,862,566,000	1,758,476,598,077	35,275,916,588	1,723,200,681,489	84.81
119461	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL	1,119,540,868,000	902,857,336,214	45,832,548,273	857,024,787,941	76.55
119478	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN	823,862,883,000	701,668,482,546	6,221,606,234	695,446,876,312	84.41
119482	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG	854,740,392,000	799,583,812,462	6,376,261,022	793,207,551,440	92.8
119499	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA	1,791,578,581,000	1,816,535,525,557	90,114,451,681	1,726,421,073,876	96.36
119504	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOKERTO	1,068,792,708,000	938,135,914,592	59,658,322,613	878,477,591,979	82.19
409546	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA	369,928,567,000	385,247,006,347	14,852,040,257	370,394,966,090	100.13
409552	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	939,551,812,000	910,471,292,572	30,695,193,969	879,776,098,603	93.64
409561	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOREJO	280,002,149,000	271,328,089,647	238,391,733	271,089,697,914	96.82
409577	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLORA	712,825,118,000	637,117,940,315	19,437,734,966	617,680,205,349	86.65
409583	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR	2,237,574,020,000	2,281,259,760,332	104,417,072,785	2,176,842,687,547	97.29
409592	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN	677,914,049,000	626,481,366,744	11,388,723,932	615,092,642,812	90.73
410305	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG	794,430,087,000	806,850,930,767	13,145,374,058	793,705,556,709	99.91

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 10
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
410351	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT	2,151,364,808,000	1,861,169,338,403	122,324,208,687	1,738,845,129,716	80.83
410418	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEPARA	763,054,087,000	745,594,265,241	94,952,096,795	650,642,168,446	85.27
410424	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURBALINGGA	696,687,237,000	576,308,646,941	9,155,975,204	567,152,671,737	81.41
410470	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI	784,594,652,000	636,931,059,150	6,657,435,159	630,273,623,991	80.33
410486	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEBUMEN	391,317,176,000	324,527,423,589	480,203,169	324,047,220,420	82.81
410492	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO	1,442,194,882,000	1,383,895,783,037	18,672,693,097	1,365,223,089,940	94.66
449812	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG	16,885,542,116,000	13,829,043,560,492	548,579,370,316	13,280,464,190,176	78.65
524931	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SALATIGA	961,627,409,000	903,957,628,120	27,508,923,081	876,448,705,039	91.14
524948	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP	1,619,965,987,000	1,370,780,604,317	12,964,866,970	1,357,815,737,347	83.82
550318	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SRAGEN	0	200	0	200	0
560965	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI	1,161,867,399,000	1,046,776,711,634	34,520,069,281	1,012,256,642,353	87.12
569094	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PURWODADI	229,000	19,065,000	0	19,065,000	8325.33
569102	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN REMBANG	84,000	1,020,000	0	1,020,000	1214.29
569137	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BUMIAYU	13,000	1,100,979	0	1,100,979	8469.07
569162	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN UNGARAN	0	4,728,120	0	4,728,120	0
635780	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU	577,355,754,000	498,560,495,877	20,421,399,233	478,139,096,644	82.82
636118	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEMAK	603,384,524,000	617,743,113,067	27,415,664,522	590,327,448,545	97.84

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 11
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
636473	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUNTILAN	2,398,000	0	0	0	0
636480	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN WONOSOBO	33,000	0	0	0	0
663562	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG SELATAN	398,093,824,000	337,989,180,897	5,939,206,875	332,049,974,022	83.41
663576	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG	756,223,977,000	956,838,121,469	62,674,647,139	894,163,474,330	118.24
663597	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI	652,890,318,000	578,092,664,545	24,117,893,072	553,974,771,473	84.85
668465	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	8,470,000	43,000,211	0	43,000,211	507.68
675535	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KENDAL	993,000	300,000	0	300,000	30.21
675542	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MAJENANG	993,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0300) - JAWA TENGAH	44,675,785,407,000	39,566,574,527,252	1,480,660,301,056	38,085,914,226,196	555.62
0400	DI YOGYAKARTA					
119525	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA	2,195,416,630,000	2,025,176,131,378	75,520,284,572	1,949,655,846,806	88.81
466065	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL	866,815,842,000	841,306,887,811	14,775,826,387	826,531,061,424	95.35
550481	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATES	215,880,568,000	206,292,493,785	3,563,406,247	202,729,087,538	93.91
550500	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI	211,568,765,000	173,964,977,360	1,162,786,194	172,802,191,166	81.68
635794	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN	1,994,310,473,000	1,860,786,026,872	15,206,181,428	1,845,579,845,444	92.54
655502	KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	11,368,000	94,712,244	0	94,712,244	833.15
	JUMLAH PENDAPATAN (0400) - DI YOGYAKARTA	5,484,003,646,000	5,107,621,229,450	110,228,484,828	4,997,392,744,622	214.24

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 12
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0500	JAWA TIMUR					
119532	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	21,942,000	707,171,695	0	707,171,695	3222.91
119546	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	760,702,496,000	647,161,755,172	19,460,001,403	627,701,753,769	82.52
119567	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GUBENG	1,870,524,766,000	1,728,983,032,002	60,307,120,257	1,668,675,911,745	89.21
119571	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MOJOKERTO	1,546,996,736,000	1,549,811,122,545	114,620,769,747	1,435,190,352,798	92.77
119588	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONEGORO	675,249,731,000	492,153,089,331	5,725,729,105	486,427,360,226	72.04
119592	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN	717,735,726,000	669,735,372,470	5,330,087,659	664,405,284,811	92.57
119600	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI	1,268,672,496,000	784,710,370,287	8,770,139,602	775,940,230,685	61.16
119614	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN	953,642,010,000	807,826,830,192	2,674,036,833	805,152,793,359	84.43
119621	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER	942,661,793,000	714,163,040,877	4,219,764,440	709,943,276,437	75.31
409603	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NGAWI	448,989,631,000	353,785,388,557	4,028,132,744	349,757,255,813	77.9
409612	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE	861,939,873,000	766,302,610,352	20,076,247,715	746,226,362,637	86.58
409634	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO SELATAN	889,183,073,000	796,630,859,201	13,684,122,602	782,946,736,599	88.05
409665	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKALAN	375,525,522,000	300,813,387,112	1,985,943,162	298,827,443,950	79.58
409671	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA	733,630,430,000	619,330,532,631	9,648,160,776	609,682,371,855	83.1
409680	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KRAKSAAN	125,000	0	0	0	0
409696	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SITUBONDO	459,461,330,000	399,846,006,237	1,786,651,728	398,059,354,509	86.64

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 13
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
410311	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK SELATAN	915,891,110,000	919,281,502,964	192,995,063,077	726,286,439,887	79.3
410506	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PROBOLINGGO	955,748,318,000	744,714,304,097	9,415,946,822	735,298,357,275	76.93
410512	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI	591,936,406,000	615,246,556,379	20,792,184,097	594,454,372,282	100.43
410619	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA	2,029,106,093,000	2,170,609,709,501	131,358,705,076	2,039,251,004,425	100.5
410631	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASURUAN	1,894,145,786,000	2,032,994,128,334	76,691,437,451	1,956,302,690,883	103.28
449828	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO	8,438,020,536,000	8,355,305,525,034	766,087,010,148	7,589,218,514,886	89.94
449834	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA	29,403,903,514,000	26,249,732,791,676	937,063,352,200	25,312,669,439,476	86.09
449840	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG	19,707,190,255,000	20,018,220,922,760	292,542,744,943	19,725,678,177,817	100.09
525041	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO BARAT	991,668,489,000	952,851,025,398	40,775,358,478	912,075,666,920	91.97
525097	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN CARUBAN	55,000	1,428,144	0	1,428,144	2596.63
525123	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI	779,581,169,000	640,410,252,512	6,524,862,154	633,885,390,358	81.31
548954	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAMEKASAN	515,351,650,000	482,731,766,828	574,658,034	482,157,108,794	93.56
550591	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN	694,898,731,000	588,050,054,079	2,373,720,096	585,676,333,983	84.28
550631	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PACITAN	198,000	1,415,400	0	1,415,400	714.85
550680	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN WLINGI	203,000	28,170,998	0	28,170,998	13877.34
550741	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BONDOWOSO	0	5,363,120	0	5,363,120	0
550812	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SUMENEP	124,000	1,212,756	0	1,212,756	978.03

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 14
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
560972	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GENTENG	1,343,779,847,000	1,359,989,659,821	26,023,932,625	1,333,965,727,196	99.27
560986	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	2,434,520,569,000	2,196,476,423,462	54,720,070,105	2,141,756,353,357	87.97
561509	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	881,056,844,000	735,022,517,709	26,318,820,350	708,703,697,359	80.44
569179	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SAMPANG	812,000	5,189,040	0	5,189,040	639.04
604421	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA	3,108,379,375,000	2,723,203,513,123	169,945,512,647	2,553,258,000,476	82.14
635574	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	2,294,000	48,670,995	0	48,670,995	2121.66
635802	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	1,298,803,040,000	1,176,122,639,088	149,940,728,638	1,026,181,910,450	79.01
635816	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA SIMOKERTO	366,631,581,000	391,647,066,514	23,558,739,016	368,088,327,498	100.4
635820	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	2,077,173,826,000	1,966,125,808,906	70,587,599,826	1,895,538,209,080	91.26
635837	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	1,436,172,153,000	1,280,916,926,538	113,577,431,547	1,167,339,494,991	81.28
635841	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA	1,379,361,805,000	1,348,383,932,197	81,835,553,145	1,266,548,379,052	91.82
635858	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG	737,167,668,000	589,700,922,912	1,755,116,940	587,945,805,972	79.76
635862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU	163,148,210,000	137,834,784,127	103,615,405	137,731,168,722	84.42
636139	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KARANGPILANG	1,567,516,250,000	1,258,602,184,376	26,636,016,350	1,231,966,168,026	78.59
636143	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	1,426,022,146,000	1,280,304,434,873	18,707,575,726	1,261,596,859,147	88.47
636150	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLITAR	544,281,475,000	385,208,479,715	2,769,728,327	382,438,751,388	70.26
636164	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BANGIL	0	10,133,333	0	10,133,333	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 15
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
636502	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MAGETAN	105,000	900,900	0	900,900	858
636520	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN NGANJUK	67,000	280,284	0	280,284	418.33
655519	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	29,299,000	15,071,469	0	15,071,469	51.44
663619	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN	629,950,787,000	487,958,087,566	11,927,020,057	476,031,067,509	75.57
663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	482,563,904,000	409,165,348,542	2,351,505,117	406,813,843,425	84.3
663630	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEPANJEN	944,749,393,000	765,603,298,222	4,525,435,615	761,077,862,607	80.56
673240	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MOJOSARI	125,000	2,997,999	0	2,997,999	2398.4
673254	KPP PRATAMA JOMBANG	167,053,724,000	142,637,606,861	0	142,637,606,861	85.38
	JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR	100,410,745,616,000	93,037,133,577,213	3,534,796,351,785	89,502,337,225,428	545.47
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
119642	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH	2,021,366,626,000	1,712,655,666,292	35,281,565,775	1,677,374,100,517	82.98
409722	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LANGSA	795,194,662,000	666,861,344,547	21,823,548,741	645,037,795,806	81.12
409731	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAPAKTUAN	269,976,999,000	201,893,785,638	336,818,067	201,556,967,571	74.66
410367	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUN	442,643,884,000	365,289,759,196	15,994,434,118	349,295,325,078	78.91
410521	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LHOKSEUMAWE	703,983,116,000	591,944,362,394	10,158,397,339	581,785,965,055	82.64
525144	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH	474,796,172,000	467,779,087,158	5,572,572,503	462,206,514,655	97.35
525151	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SABANG	55,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 16
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
636260	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SIGLI	0	377,465	0	377,465	0
663410	KANTOR WILAYAH DJP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	8,711,000	60,244,956	0	60,244,956	691.6
663487	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBULUSSALAM	332,021,417,000	255,016,145,554	26,071,609,559	228,944,535,995	68.95
663690	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KARANG BARU	14,000	14,000	0	14,000	100
681841	KPP PRATAMA ACEH BESAR	275,618,975,000	215,590,885,055	0	215,590,885,055	78.22
681858	KP2KP CALANG	993,000	380,000	0	380,000	38.27
681862	KP2KP SUKA MAKMUR	993,000	0	0	0	0
681879	KP2KP SINABANG	3,992,000	0	0	0	0
681883	KP2KP BLANGKEJERAN	993,000	0	0	0	0
681890	KP2KP TAKENGON	9,000	85,000	0	85,000	944.44
681905	KP2KP RIMBA RAYA	993,000	110,000	0	110,000	11.08
681912	KP2KP ACEH SINGKIL	993,000	3,664,800	0	3,664,800	369.06
681926	KP2KP LHOKSUKON	155,000	644,952	0	644,952	416.1
	JUMLAH PENDAPATAN (0600) - NANGGROE ACEH DARUSSALAM	5,315,619,752,000	4,477,096,557,007	115,238,946,102	4,361,857,610,905	160.77
0700	SUMATERA UTARA					
119660	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	13,926,000	122,313,975	0	122,313,975	878.31
119677	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT	601,524,607,000	634,564,843,912	9,247,718,322	625,317,125,590	103.96

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 17
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
119698	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEMATANG SIANTAR	843,689,902,000	827,011,808,295	240,389,293,709	586,622,514,586	69.53
409747	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KUALUH HULU	107,000	0	0	0	0
410141	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KISARAN	891,606,792,000	955,479,497,599	101,803,321,766	853,676,175,833	95.75
410181	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIGE	480,454,346,000	393,080,268,371	165,592,390	392,914,675,981	81.78
410537	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI	467,951,212,000	439,046,155,312	1,754,797,921	437,291,357,391	93.45
410543	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RANTAU PRAPAT	1,382,241,209,000	1,166,566,449,045	21,682,342,531	1,144,884,106,514	82.83
449746	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN	9,226,885,072,000	11,122,499,610,582	3,659,499,383,061	7,463,000,227,521	80.88
524270	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN	523,689,864,000	550,257,832,472	78,478,372,194	471,779,460,278	90.09
525165	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	1,103,020,304,000	1,102,915,742,419	79,268,645,785	1,023,647,096,634	92.8
525190	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH	1,705,155,345,000	1,656,047,533,023	30,290,097,137	1,625,757,435,886	95.34
525208	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DOLOK SANGGUL	55,000	1,456	0	1,456	2.65
549061	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN GUNUNG SITOLI	1,105,000	31	0	31	0
551050	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PANDAN	987,000	2,000,000	0	2,000,000	202.63
560820	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI	705,452,034,000	608,260,886,354	832,087,650	607,428,798,704	86.1
561520	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR	1,614,162,419,000	1,409,840,042,517	8,427,984,671	1,401,412,057,846	86.82
568931	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TANJUNG BALAI	356,000	1,653,028	0	1,653,028	464.33
635581	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA	2,014,748,747,000	1,697,318,823,975	32,954,635,708	1,664,364,188,267	82.61

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 18
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
635595	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA	1,580,532,122,000	1,492,343,090,581	24,114,479,842	1,468,228,610,739	92.89
635926	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA	556,083,166,000	474,434,812,795	11,698,220,650	462,736,592,145	83.21
636281	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SIDIKALANG	1,431,000	1,420,151	0	1,420,151	99.24
636295	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PENYABUNGAN	3,424,000	0	0	0	0
655551	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KOTA PINANG	987,000	237	0	237	0.02
663424	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	620,000	17,689,292	0	17,689,292	2853.11
663491	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHE	279,338,525,000	238,683,912,919	9,447,902,215	229,236,010,704	82.06
663509	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM	2,051,417,320,000	1,909,490,869,982	36,303,321,999	1,873,187,547,983	91.31
	JUMLAH PENDAPATAN (0700) - SUMATERA UTARA	26,027,975,984,000	26,677,987,258,323	4,346,358,197,551	22,331,629,060,772	221.91
0800	SUMATERA BARAT					
085568	KPP PRATAMA PADANG DUA	1,276,995,421,000	1,097,713,730,879	20,404,708,873	1,077,309,022,006	84.36
119710	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU	2,693,738,270,000	2,372,958,752,412	122,192,459,723	2,250,766,292,689	83.56
409762	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TUA PEJAT	987,000	4,600,810	0	4,600,810	466.14
409778	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH	294,896,980,000	249,595,024,617	2,938,786	249,592,085,831	84.64
477601	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUARO SIJUNJUNG	0	171	0	171	0
477610	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SIMPANG AMPAT	0	403	0	403	0
524287	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI	940,050,273,000	820,538,958,807	65,291,540,186	755,247,418,621	80.34

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 19
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
525212	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK	734,013,748,000	633,260,993,664	1,858,183,524	631,402,810,140	86.02
549082	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PADANG PANJANG	43,000	0	0	0	0
551128	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PAINAN	987,000	246	0	246	0.02
551132	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SAWAH LUNTO	987,000	0	0	0	0
551181	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BATUSANGKAR	987,000	0	0	0	0
568945	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PADANG ARO	987,000	1,116,773	0	1,116,773	113.15
568952	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN LUBUK BASUNG	200,000	1,306,426	0	1,306,426	653.21
568966	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PARIAMAN	311,000	0	0	0	0
663431	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	13,564,000	28,033,709	0	28,033,709	206.68
	JUMLAH PENDAPATAN (0800) - SUMATERA BARAT	5,939,713,745,000	5,174,102,518,917	209,749,831,092	4,964,352,687,825	116.13
0900	RIAU					
119731	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	1,253,990,394,000	1,103,434,708,696	53,533,865,096	1,049,900,843,600	83.72
409784	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG	1,196,436,959,000	1,241,401,776,391	39,152,902,220	1,202,248,874,171	100.49
410552	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DUMAI	1,602,149,123,000	1,383,594,746,202	38,372,433,575	1,345,222,312,627	83.96
410568	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RENGAT	1,503,430,477,000	1,509,576,043,244	147,832,676,574	1,361,743,366,670	90.58
410625	KANWIL DJP RIAU	26,675,000	88,030,715	0	88,030,715	330.01

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 20
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
440904	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU	5,581,864,998,000	5,132,616,630,528	592,187,417,732	4,540,429,212,796	81.34
549125	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TEMBILAHAN	1,069,000	441,982	0	441,982	41.35
551238	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BAGAN SIAPI-API	987,000	0	0	0	0
568991	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TELUK KUANTAN	1,042,000	608,424	0	608,424	58.39
569006	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SELAT PANJANG	31,000	0	0	0	0
569010	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DURI	987,000	0	0	0	0
635600	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	1,954,253,427,000	1,779,192,086,842	125,998,724,086	1,653,193,362,756	84.59
635947	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS	2,367,532,639,000	2,045,099,071,158	92,071,471,433	1,953,027,599,725	82.49
663513	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN KERINCI	1,757,330,393,000	1,695,292,781,395	82,437,612,298	1,612,855,169,097	91.78
	JUMLAH PENDAPATAN (0900) - RIAU	17,217,019,201,000	15,890,296,925,577	1,171,587,103,014	14,718,709,822,563	80.62
1000	JAMBI					
119163	KPP PRATAMA JAMBI PELAYANGAN	626,646,500,000	441,787,538,839	12,908,217,782	428,879,321,057	68.44
119766	KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA	2,814,848,509,000	2,763,056,610,022	566,790,921,346	2,196,265,688,676	78.02
410336	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN RIMBO BUJANG	987,000	0	0	0	0
410373	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKO	587,842,815,000	606,633,002,679	0	606,633,002,679	103.2
477581	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUARA TEBO	3,153,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 21
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
525282	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SENGETI	1,042,000	4,068,090	0	4,068,090	390.41
549132	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA BUNGO	691,725,029,000	737,306,284,776	40,748,113,704	696,558,171,072	100.7
549146	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUARA SABAK	987,000	0	0	0	0
549150	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SUNGAI PENUH	987,000	633,348	0	633,348	64.17
569027	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUARA BULIAN	987,000	0	0	0	0
663520	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUALA TUNGKAL	724,138,324,000	667,599,672,397	1,194,101,976	666,405,570,421	92.03
	JUMLAH PENDAPATAN (1000) - JAMBI	5,445,209,320,000	5,216,387,810,151	621,641,354,808	4,594,746,455,343	81.54
1100	SUMATERA SELATAN					
119770	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	9,655,000	256,405,420	0	256,405,420	2655.67
409810	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KAYU AGUNG	(59,703,751,000)	646,448,216,902	1,077,478,543,839	(431,030,326,937)	721.95
410291	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAHAT	558,476,347,000	473,024,737,031	17,238,904,900	455,785,832,131	81.61
410382	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRABUMULIH	2,381,244,231,000	2,351,307,588,908	299,846,420,116	2,051,461,168,792	86.15
410574	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATURAJA	554,214,329,000	441,454,225,375	392,675,000	441,061,550,375	79.58
449752	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG	3,890,726,362,000	3,427,671,130,659	309,295,359,291	3,118,375,771,368	80.15
525296	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK LINGGAU	621,051,985,000	550,383,416,493	29,889,836,082	520,493,580,411	83.81
549167	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PANGKALAN BALAI	987,000	5,640,000	0	5,640,000	571.43
551394	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,200,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 22
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	MUARA ENIM					
560834	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG	350,357,301,000	392,566,212,789	36,631,378,359	355,934,834,430	101.59
561541	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	2,128,030,265,000	1,867,285,740,680	56,862,716,444	1,810,423,024,236	85.08
635617	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT	1,524,679,558,000	1,505,361,764,885	25,179,879,046	1,480,181,885,839	97.08
663534	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEKAYU	1,556,040,602,000	1,380,877,992,315	22,044,710,708	1,358,833,281,607	87.33
673343	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUARA DUA	0	15	0	15	0
673364	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TEBING TINGGI	0	150	0	150	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1100) - SUMATERA SELATAN	13,505,129,071,000	13,036,643,071,622	1,874,860,423,785	11,161,782,647,837	315.43
1200	LAMPUNG					
119813	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG KARANG	1,190,982,743,000	1,136,734,092,126	21,698,802,644	1,115,035,289,482	93.62
409835	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR	1,719,987,560,000	1,481,199,075,166	23,660,553,477	1,457,538,521,689	84.74
410129	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON	1,179,418,120,000	1,136,349,939,034	35,514,023,503	1,100,835,915,531	93.34
410398	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI	1,300,596,841,000	1,027,791,370,082	3,765,961,474	1,024,025,408,608	78.74
477626	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SUKADANA	993,000	0	0	0	0
477632	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PRINGSEWU	0	351,000	0	351,000	0
477641	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN LIWA	41,000	292,146	0	292,146	712.55
477657	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BARADATU	993,000	2,450,102	0	2,450,102	246.74

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 23
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
525322	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA METRO	1,088,582,564,000	913,079,496,328	80,245,507,513	832,833,988,815	76.51
525350	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TELUK BETUNG	1,716,407,090,000	1,774,545,975,198	11,002,912,579	1,763,543,062,619	102.75
549200	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KALIANDA	0	3,848,714	0	3,848,714	0
569052	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MENGGALA	18,000	127,552	0	127,552	708.62
636359	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BANDAR JAYA	0	524,988	0	524,988	0
663445	KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	1,196,000	38,188,534	0	38,188,534	3193.02
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	8,195,978,159,000	7,469,745,730,970	175,887,761,190	7,293,857,969,780	385.04
1300	KALIMANTAN BARAT					
119162	KPP Pratama Pontianak Timur	594,455,248,000	513,654,678,556	2,316,789,349	511,337,889,207	86.02
119820	KPP PRATAMA PONTIANAK BARAT	2,319,489,364,000	2,262,293,105,977	27,490,910,505	2,234,802,195,472	96.35
409841	KANTOR PELAYANAN PAJAKPRATAMA MEMPAWAH	843,758,785,000	838,455,225,190	70,419,375,726	768,035,849,464	91.03
410599	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGKAWANG	871,151,321,000	661,476,230,457	1,271,752,413	660,204,478,044	75.79
525364	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT	3,529,000	182,021,919	0	182,021,919	5157.89
525371	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BENGKAYANG	0	925,031	0	925,031	0
525385	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SEKADAU	0	789	0	789	0
549221	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINTANG	848,524,315,000	708,128,772,660	1,353,771,490	706,775,001,170	83.29
551512	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KETAPANG	886,245,179,000	764,311,196,056	11,810,096,652	752,501,099,404	84.91

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 24
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
551530	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PUTUSIBAU	0	4,928,472	0	4,928,472	0
551551	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN NGABANG	0	1,850,000	0	1,850,000	0
569226	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN NANGAPINOH	560,000	136	0	136	0.02
636171	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SANGGAU	930,487,675,000	847,631,410,854	17,965,645,941	829,665,764,913	89.16
636541	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MEMPAWAH	489,000	6,341,281	0	6,341,281	1296.79
636558	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SAMBAS	10,000	4,345,229	0	4,345,229	43452.29
	JUMLAH PENDAPATAN (1300) - KALIMANTAN BARAT	7,294,116,475,000	6,596,151,032,607	132,628,342,076	6,463,522,690,531	3,367.57
1400	KALIMANTAN TENGAH					
119841	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMPIT	1,833,429,502,000	1,311,040,989,362	56,482,248,750	1,254,558,740,612	68.43
409850	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA TEWEH	761,218,808,000	706,347,953,105	9,989,692,136	696,358,260,969	91.48
410320	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KASONGAN	0	136	0	136	0
477462	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SUKAMARA	993,000	0	0	0	0
525392	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA	1,729,280,869,000	1,473,570,958,744	39,393,259,391	1,434,177,699,353	82.93
549256	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN NANGA BULIK	10,000	0	0	0	0
551593	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PURUK CAHU	0	850,000	0	850,000	0
569251	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BUNTOK	0	527,976	0	527,976	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 25
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
636579	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KUALA PEMBUANG	22,000	256	0	256	1.16
663644	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN BUN	1,819,923,056,000	1,564,681,826,649	22,488,386,627	1,542,193,440,022	84.74
	JUMLAH PENDAPATAN (1400) - KALIMANTAN TENGAH	6,143,853,260,000	5,055,643,106,228	128,353,586,904	4,927,289,519,324	32.87
1500	KALIMANTAN SELATAN					
119161	KPP Pratama Banjarmasin Selatan	659,508,817,000	723,354,951,650	0	723,354,951,650	109.68
119855	KPP PRATAMA BANJARMASIN UTARA	2,311,531,712,000	2,360,722,857,445	332,438,222,374	2,028,284,635,071	87.75
409866	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG	1,035,374,256,000	765,280,116,732	2,892,446,140	762,387,670,592	73.63
409872	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BARABAI	761,421,884,000	814,929,072,084	2,016,576,682	812,912,495,402	106.76
549260	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KOTABARU	500,000	544,770	0	544,770	108.95
551640	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PELAIHARI	0	10,000,000	0	10,000,000	0
551682	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PARINGIN	125,000	0	0	0	0
569268	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN RANTAU	0	2,461,200	0	2,461,200	0
635485	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MARTAPURA	91,000	186,875	0	186,875	205.36
635492	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN AMUNTAI	21,000	270,200	0	270,200	1286.67
635883	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARBARU	1,925,879,786,000	2,040,578,895,374	73,072,554,565	1,967,506,340,809	102.16
655572	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATULICIN	1,801,750,878,000	2,016,521,517,205	71,916,498,034	1,944,605,019,171	107.93

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 26
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
663466	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH	2,260,000	28,973,032	0	28,973,032	1281.99
	JUMLAH PENDAPATAN (1500) - KALIMANTAN SELATAN	8,495,470,330,000	8,721,429,846,567	482,336,297,795	8,239,093,548,772	266.99
1600	KALIMANTAN TIMUR					
119110	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR	9,123,000	70,680,265	0	70,680,265	774.75
119160	KPP Pratama Samarinda Ulu	466,957,495,000	441,904,130,940	0	441,904,130,940	94.63
119165	KPP Pratama Balikpapan Barat	258,576,263,000	258,315,643,258	0	258,315,643,258	99.9
119880	KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR	2,538,115,101,000	2,264,760,827,665	83,756,216,661	2,181,004,611,004	85.93
119897	KPP PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR	1,839,540,429,000	1,876,643,119,052	154,815,198,195	1,721,827,920,857	93.6
119902	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TARAKAN	920,322,049,000	835,424,472,153	4,041,194,565	831,383,277,588	90.34
409881	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TENGGARONG	3,522,712,276,000	4,078,206,691,062	114,474,136,790	3,963,732,554,272	112.52
409897	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENAJAM	720,666,277,000	895,222,763,366	225,651,040,716	669,571,722,650	92.91
409901	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG REDEB	1,553,820,041,000	1,456,401,573,824	118,397,981,326	1,338,003,592,498	86.11
449859	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN	5,557,249,825,000	5,834,806,612,535	509,791,140,373	5,325,015,472,162	95.82
551771	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TANAH GROGOT	0	168	0	168	0
635879	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BONTANG	3,476,023,585,000	2,483,606,056,271	31,429,443,438	2,452,176,612,833	70.55
	JUMLAH PENDAPATAN (1600) - KALIMANTAN TIMUR	20,853,992,464,000	20,425,362,570,559	1,242,356,352,064	19,183,006,218,495	141.42
1700	SULAWESI UTARA					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 27
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
119862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO	2,286,534,680,000	1,942,275,833,422	62,839,015,553	1,879,436,817,869	82.2
409917	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG	1,051,930,712,000	885,953,440,782	12,463,725,834	873,489,714,948	83.04
410172	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA	6,134,000	118,410,575	0	118,410,575	1930.4
549277	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TALAUD	55,000	234,109	0	234,109	425.65
551792	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TONDANO	48,000	12,502,732	0	12,502,732	26047.36
551821	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN AMURANG	50,000	330,000	0	330,000	660
569272	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TOMOHON	32,000	107,909,542	0	107,909,542	337217.32
636207	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAHUNA	204,339,770,000	156,636,599,147	2,994,618,175	153,641,980,972	75.19
663665	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTAMOBAGU	658,557,846,000	571,165,610,097	16,997,088	571,148,613,009	86.73
	JUMLAH PENDAPATAN (1700) - SULAWESI UTARA	4,201,369,327,000	3,556,270,870,406	78,314,356,650	3,477,956,513,756	40,734.21
1800	SULAWESI TENGAH					
119919	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU	1,436,089,664,000	1,223,247,911,433	6,759,744,474	1,216,488,166,959	84.71
525495	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK	704,473,726,000	549,649,879,373	6,770,436,731	542,879,442,642	77.06
551877	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BUNGKU	0	102,220	0	102,220	0
561555	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BUOL	0	600	0	600	0
636211	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOLI-TOLI	376,350,128,000	326,767,675,377	2,587,121,393	324,180,553,984	86.14

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 28
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
636228	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO	833,206,482,000	835,569,476,384	5,332,993,369	830,236,483,015	99.64
673322	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BANAWA	0	180,000	0	180,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1800) - SULAWESI TENGAH	3,350,120,000,000	2,935,235,225,387	21,450,295,967	2,913,784,929,420	49.65
1900	SULAWESI SELATAN					
119923	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN	1,986,000	14,301,263	0	14,301,263	720.1
119930	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA	1,222,529,895,000	1,264,690,446,218	57,596,076,234	1,207,094,369,984	98.74
409948	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT	1,086,356,248,000	1,013,981,516,831	15,795,488,397	998,186,028,434	91.88
409954	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN ENREKANG	336,000	144	0	144	0.04
409960	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE	466,362,207,000	377,076,034,816	2,246,343,242	374,829,691,574	80.37
410600	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE-PARE	567,308,337,000	464,585,405,963	949,587,794	463,635,818,169	81.73
449865	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR	4,091,662,865,000	3,739,370,643,959	241,311,504,908	3,498,059,139,051	85.49
477663	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SINJAI	993,000	0	0	0	0
477672	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN WATANSOPPENG	35,000	667,484	0	667,484	1907.1
477688	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PINRANG	993,000	0	0	0	0
477694	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SIDRAP	18,000	3,675,169	0	3,675,169	20417.61
525538	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TAKALAR	263,000	336	0	336	0.13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 29
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
549303	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALOPO	865,991,231,000	833,416,682,078	821,889,748	832,594,792,330	96.14
549310	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG	553,110,751,000	519,996,486,188	878,390,159	519,118,096,029	93.85
551910	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SUNGGUMINASA	3,177,000	816	0	816	0.03
551945	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BENTENG	24,000	5,186,480	0	5,186,480	21610.33
551966	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PANGKAJENE	42,000	5,234,500	0	5,234,500	12463.1
552027	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MAKALE	18,000	316	0	316	1.76
569289	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BONTOSUNGGU	0	180	0	180	0
635507	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MASAMBA	183,000	7,625,736	0	7,625,736	4167.07
635890	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN	1,519,673,668,000	1,405,225,808,937	85,153,990,749	1,320,071,818,188	86.87
636192	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS	638,393,764,000	566,710,112,746	6,340,995,377	560,369,117,369	87.78
663651	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BULUKUMBA	312,300,690,000	265,228,043,210	2,637,846,801	262,590,196,409	84.08
689891	KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASSAR	139,000	25,709,080	0	25,709,080	18495.74
	JUMLAH PENDAPATAN (1900) - SULAWESI SELATAN	11,323,697,863,000	10,450,343,582,450	413,732,113,409	10,036,611,469,041	3,361.25
2000	SULAWESI TENGGARA					
409979	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOLAKA	378,441,609,000	397,916,366,203	10,605,632,119	387,310,734,084	102.34
409985	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BAU BAU	571,100,827,000	426,477,075,525	3,567,182,860	422,909,892,665	74.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 30
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
477720	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN UNAAHA	993,000	74	0	74	0.01
524313	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI	1,060,837,190,000	1,044,982,289,990	11,329,550,154	1,033,652,739,836	97.44
552073	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN LASUSUA	125,000	0	0	0	0
552094	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN RAHA	0	43,900	0	43,900	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2000) - SULAWESI TENGGARA	2,010,380,744,000	1,869,375,775,692	25,502,365,133	1,843,873,410,559	45.64
2100	MALUKU					
119965	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON	1,938,836,493,000	1,652,055,510,891	15,961,218,765	1,636,094,292,126	84.39
549345	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MASOHI	3,434,000	0	0	0	0
673190	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN NAMLEA	987,000	5,668,080	0	5,668,080	574.27
673208	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PIRU	658,000	0	0	0	0
673229	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DOBO	824,000	824	0	824	0.1
673233	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SAUMLAKI	0	2,648,052	0	2,648,052	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2100) - MALUKU	1,938,842,396,000	1,652,063,827,847	15,961,218,765	1,636,102,609,082	109.79
2200	BALI					
119972	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR BARAT	860,599,804,000	869,381,577,256	6,567,032,740	862,814,544,516	100.26
410016	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TABANAN	434,943,166,000	418,047,580,580	530,877,033	417,516,703,547	95.99

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 31
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
410135	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN	1,263,201,242,000	1,227,884,426,051	83,632,029,373	1,144,252,396,678	90.58
440929	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR	5,315,851,702,000	4,779,416,161,888	155,765,455,420	4,623,650,706,468	86.98
524320	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA	331,037,936,000	336,711,917,995	2,136,952,174	334,574,965,821	101.07
525584	KANTOR WILAYAH DJP BALI	2,299,000	17,803,895	0	17,803,895	774.42
525606	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GIANYAR	727,606,265,000	702,262,764,204	5,278,697,892	696,984,066,312	95.79
552183	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN NEGARA	3,470,000	0	0	0	0
552212	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN AMLAPURA	265,000	0	0	0	0
552226	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN UBUD	0	2,500,000	0	2,500,000	0
635528	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KROBOKAN	0	136	0	136	0
635905	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR	939,770,140,000	881,803,094,794	11,588,132,990	870,214,961,804	92.6
636232	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA	660,038,527,000	631,304,203,074	3,017,539,420	628,286,663,654	95.19
	JUMLAH PENDAPATAN (2200) - BALI	10,533,054,816,000	9,846,832,029,873	268,516,717,042	9,578,315,312,831	117.91
2300	NUSA TENGGARA BARAT					
119986	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT	1,238,404,250,000	1,149,086,089,642	22,115,369,618	1,126,970,720,024	91
410022	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM TIMUR	383,755,253,000	326,267,878,133	5,038,129,985	321,229,748,148	83.71
525610	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA	372,361,765,000	353,388,880,399	7,461,362,064	345,927,518,335	92.9
525627	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRAYA	465,782,379,000	429,035,403,335	436,268,478	428,599,134,857	92.02

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 32
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
552247	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN GERUNG	0	2,900,145	0	2,900,145	0
552251	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SELONG	0	153,300	0	153,300	0
655530	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA BESAR	652,906,484,000	597,384,426,098	7,368,236,915	590,016,189,183	90.37
663470	KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	6,263,000	23,263,084	0	23,263,084	371.44
	JUMLAH PENDAPATAN (2300) - NUSA TENGGARA BARAT	3,113,216,394,000	2,855,188,994,136	42,419,367,060	2,812,769,627,076	102.68
2400	NUSA TENGGARA TIMUR					
119990	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG	1,373,567,736,000	1,165,783,922,670	15,630,327,448	1,150,153,595,222	83.73
410047	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ATAMBUA	318,294,189,000	274,419,571,976	2,038,397,882	272,381,174,094	85.58
410053	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RUTENG	307,143,860,000	280,183,415,712	19,905,138,897	260,278,276,815	84.74
525631	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAUMERE	263,165,979,000	249,583,597,680	6,491,385,538	243,092,212,142	92.37
525669	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BAA	0	120	0	120	0
549370	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ENDE	278,908,427,000	250,721,758,931	1,152,954,989	249,568,803,942	89.48
552301	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SOE	180,000	0	0	0	0
552357	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KALABAHI	0	5,595,000	0	5,595,000	0
636253	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WAINGAPU	306,914,558,000	291,730,875,174	62,349,079	291,668,526,095	95.03
	JUMLAH PENDAPATAN (2400) - NUSA TENGGARA TIMUR	2,847,994,929,000	2,512,428,737,263	45,280,553,833	2,467,148,183,430	58.99
2500	PAPUA					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 33
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
409382	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAYAPURA	2,882,003,964,000	2,373,954,557,703	129,714,524,669	2,244,240,033,034	77.87
410232	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIAK	675,702,246,000	510,359,181,695	75,966,460,940	434,392,720,755	64.29
525673	KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU	14,175,000	64,277,378	0	64,277,378	453.46
549441	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN WAMENA	139,000	520,518	0	520,518	374.47
549455	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN NABIRE	7,000	0	0	0	0
549462	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SERUI	5,192,000	210	0	210	0
655544	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIMIKA	2,722,231,908,000	2,491,655,998,245	4,612,925,451	2,487,043,072,794	91.36
663672	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MERAUKE	745,548,148,000	624,280,507,886	23,997,334,661	600,283,173,225	80.52
673151	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SARMI	84,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2500) - PAPUA	7,025,505,863,000	6,000,315,043,635	234,291,245,721	5,766,023,797,914	126.89
2600	BENGKULU					
409402	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU	1,386,451,900,000	1,163,348,579,756	26,442,551,353	1,136,906,028,403	82
410342	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR	625,819,522,000	545,264,627,024	18,566,335,993	526,698,291,031	84.16
549476	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MANNA	0	7,900,340	0	7,900,340	0
549497	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KEPAHIANG	32,000	3,001,050	0	3,001,050	9378.28
569336	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUKO MUKO	6,550,000	10,641,161	0	10,641,161	162.46

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 34
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
635960	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CURUP	234,857,831,000	185,878,253,655	18,120,600	185,860,133,055	79.14
	JUMLAH PENDAPATAN (2600) - BENGKULU	2,247,135,835,000	1,894,513,002,986	45,027,007,946	1,849,485,995,040	1,631.01
2800	MALUKU UTARA					
410000	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOBELO	523,303,112,000	464,812,110,330	29,519,526,426	435,292,583,904	83.18
410150	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TERNATE	1,092,299,781,000	992,339,982,152	6,739,058,146	985,600,924,006	90.23
635532	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MABA	0	2,689,780	0	2,689,780	0
673296	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SANANA	0	2,420,000	0	2,420,000	0
673301	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TIDORE	0	400	0	400	0
673318	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN LABUHA	125,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2800) - MALUKU UTARA	1,615,603,018,000	1,457,157,202,662	36,258,584,572	1,420,898,618,090	28.9
2900	BANTEN					
119164	KPP Pratama Serang Timur	676,942,908,000	581,291,896,873	0	581,291,896,873	85.87
119415	KPP PRATAMA SERANG BARAT	2,548,321,259,000	2,422,949,001,956	233,860,973,952	2,189,088,028,004	85.9
290460	KPP PRATAMA PONDOK AREN	3,348,968,557,000	3,075,500,641,066	61,940,888,147	3,013,559,752,919	89.98
290461	KPP PRATAMA CIKUPA	8,119,792,228,000	7,677,920,811,246	790,587,577,082	6,887,333,234,164	84.82
410402	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG TIMUR	3,461,912,289,000	3,447,330,350,263	77,032,215,301	3,370,298,134,962	97.35
417857	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANDEGLANG	760,763,362,000	675,810,733,618	462,413,724	675,348,319,894	88.77

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 35
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
440935	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG	14,300,267,137,000	12,795,951,917,733	540,101,999,615	12,255,849,918,118	85.7
524266	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG BARAT	4,404,236,897,000	4,555,837,338,557	43,123,870,155	4,512,713,468,402	102.46
524891	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGARAKSA	1,123,503,351,000	1,221,394,889,638	108,682,800,796	1,112,712,088,842	99.04
560944	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG	4,791,822,520,000	4,452,105,958,729	122,693,917,886	4,329,412,040,843	90.35
635560	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	15,042,000	116,094,786	0	116,094,786	771.8
636033	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOSAMBI	2,728,485,139,000	2,873,242,244,678	83,402,607,370	2,789,839,637,308	102.25
636370	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN RANGKASBITUNG	0	2,509,990	0	2,509,990	0
663541	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEGON	4,540,276,315,000	4,999,162,839,780	441,896,348,245	4,557,266,491,535	100.37
	JUMLAH PENDAPATAN (2900) - BANTEN	50,805,307,004,000	48,778,617,228,913	2,503,785,612,273	46,274,831,616,640	134.62
3000	BANGKA BELITUNG					
119791	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKAL PINANG	843,553,605,000	728,228,507,867	45,118,564,774	683,109,943,093	80.98
409825	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKA	1,246,814,988,000	1,017,629,689,934	63,891,588,927	953,738,101,007	76.49
410580	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PANDAN	459,275,873,000	405,853,406,559	22,945,427,763	382,907,978,796	83.37
569048	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SUNGAI LIAT	987,000	136	0	136	0.01
673385	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TOBOALI	993,000	0	0	0	0
673392	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KOBA	993,000	0	0	0	0
673407	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUNTOK	993,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 36
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
673411	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MANGGAR	1,944,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3000) - BANGKA BELITUNG	2,549,650,376,000	2,151,711,604,496	131,955,581,464	2,019,756,023,032	30.11
3100	GORONTALO					
119876	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GORONTALO	971,242,606,000	792,474,141,394	10,219,420,766	782,254,720,628	80.54
673261	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN LIMBOTO	987,000	0	0	0	0
673275	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MARISSA	0	186	0	186	0
673282	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN TILAMUTA	0	200	0	200	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3100) - GORONTALO	971,243,593,000	792,474,141,780	10,219,420,766	782,254,721,014	20.14
3200	KEPULAUAN RIAU					
119752	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG	880,531,678,000	765,421,655,934	9,362,702,083	756,058,953,851	85.86
325138	KPP PRATAMA BATAM SELATAN	895,293,672,000	933,608,218,886	2,722,621,573	930,885,597,313	103.98
409790	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN	291,626,386,000	438,915,684,197	115,495,402	438,800,188,795	150.47
477173	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM	3,250,590,718,000	2,546,266,130,062	134,649,850,899	2,411,616,279,163	74.19
477507	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN RANAI	993,000	0	0	0	0
477513	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DABO SINGKEP	993,000	100,000	0	100,000	10.07
525233	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM UTARA	815,062,931,000	761,196,020,806	4,992,524,148	756,203,496,658	92.78
635951	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	557,921,184,000	416,990,985,746	11,843,769,594	405,147,216,152	72.62

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 37
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (3200) - KEPULAUAN RIAU	6,691,028,555,000	5,862,398,795,631	163,686,963,699	5,698,711,831,932	73.75
3300	PAPUA BARAT					
409391	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SORONG	1,500,252,599,000	1,233,073,694,138	19,219,099,237	1,213,854,594,901	80.91
549420	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANOKWARI	1,252,004,160,000	1,078,043,220,214	151,697,754,230	926,345,465,984	73.99
673186	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KAIMANA	300,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3300) - PAPUA BARAT	2,752,257,059,000	2,311,116,914,352	170,916,853,467	2,140,200,060,885	51.63
3400	SULAWESI BARAT					
477708	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN POLEWALI	993,000	9,556	0	9,556	0.96
477714	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PASANGKAYU	993,000	3,280,700	0	3,280,700	330.38
549324	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MAMASA	2,566,000	200	0	200	0.01
552006	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAMUJU	461,588,181,000	388,686,956,681	4,145,408,784	384,541,547,897	83.31
636185	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE	283,678,574,000	233,913,521,949	1,041,627,094	232,871,894,855	82.09
	JUMLAH PENDAPATAN (3400) - SULAWESI BARAT	745,271,307,000	622,603,769,086	5,187,035,878	617,416,733,208	99.35
3500	KALIMANTAN UTARA					
417709	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MALINAU	22,000	22,419	0	22,419	101.9
635450	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN NUNUKAN	0	230,948	0	230,948	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3500) - KALIMANTAN UTARA	22,000	253,367	0	253,367	50.95

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 38
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN	1,423,999,938,462,000	1,432,222,234,482,300.	118,874,347,242,581	1,313,347,887,239,719.	1,450.697

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0100	DKI JAKARTA					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	12,834,823,694,000	26,353,583,156,024	0	26,353,583,156,024	205.33
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	25,299,226,306,000	38,117,771,914,245	0	38,117,771,914,245	150.67
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	27,915,047,888	0	27,915,047,888	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	81,068,301,203,000	65,074,471,674,355	42,470,205,594	65,032,001,468,761	80.22
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	8,411,954,329,000	8,627,382,463,131	70,422,264,983	8,556,960,198,148	101.72
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	47,168,868,051,000	43,101,547,951,162	1,592,433,005	43,099,955,518,157	91.37
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	30,911,766,884,000	23,463,863,977,037	128,676,153,309	23,335,187,823,728	75.49
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11,716,489,123,000	4,906,240,456,744	17,685,590,580	4,888,554,866,164	41.72
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	228,150,239,216,000	233,671,728,131,125.3	28,616,076,249,847	205,055,651,881,278.3	89.88
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	50,311,099,232,000	45,962,335,226,278	1,706,926,410,543	44,255,408,815,735	87.96
411128	Pendapatan PPh Final	76,626,624,406,000	63,076,057,191,436	349,131,895,751	62,726,925,295,685	81.86
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	1,723,835,063,000	111,905,968,874	430,197,676	111,475,771,198	6.47
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	23,617,200	(23,617,200)	0
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	1,891,000	0	1,891,000	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	184,379,949,852,000	243,289,471,418,710	62,180,254,557,969	181,109,216,860,741	98.23
411212	Pendapatan PPN Impor	143,931,618,789,000	145,517,396,257,603	4,505,754,000	145,512,890,503,603	101.1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411219	Pendapatan PPN Lainnya	131,154,511,000	54,444,918,537	51,270,830,774	3,174,087,763	2.42
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	10,709,821,305,000	9,758,706,656,560	38,632,273,746	9,720,074,382,814	90.76
411222	Pendapatan PPnBM Impor	4,078,309,699,000	4,037,847,617,298	27,596,000	4,037,820,021,298	99.01
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	28,233,799,000	19,787,175,089	60,000,000,000	(40,212,824,911)	-142.43
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	0	1,555,296,000	0	1,555,296,000	0
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	3,570,162,147	0	3,570,162,147	0
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	10,132,908,596,000	10,988,217,061,984	158,502,268,000	10,829,714,793,984	106.88
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	76,941,438,935	0	76,941,438,935	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	1,729,525,020,000	1,019,584,017,548	8,948,000	1,019,575,069,548	58.95
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	774,130,556,000	633,112,980,000	0	633,112,980,000	81.78
411613	Pendapatan PPn Batubara	658,228,766,000	656,153,997,798	0	656,153,997,798	99.68
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	86,420,855,000	1,808,912,920	0	1,808,912,920	2.09
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	788,451,857,000	736,107,188,143	772,118,234,980	(36,011,046,837)	-4.57
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	369,712,900,000	391,846,826,536	8,404,715,682	383,442,110,854	103.71
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	196,000	752,776,862	0	752,776,862	384069.83
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	26,162,000	247,745,216	0	247,745,216	946.97
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	2,429,000	37,725,620	0	37,725,620	1553.13
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	410,101,791	0	410,101,791	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	51,850,000	528,097,887	0	528,097,887	1018.51
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	106,412,000	936,893,281	0	936,893,281	880.44
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	1,359,000	0	1,359,000	0
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	50,000	0	50,000	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	106,757,000	0	0	0	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	305,852,000	679,018,078	0	679,018,078	222.01
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	110,247,000	66,213,333	0	66,213,333	60.06
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1,970,000	108,005,918	0	108,005,918	5482.53
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10,000	68,091,421	0	68,091,421	680914.21
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	57,754,805	0	57,754,805	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	6,476,000	19,352,013	873,233	18,478,780	285.34
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	10,138,000	21,385,218	0	21,385,218	210.94
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	932,022,422,511,000	969,685,291,545,550.36	94,207,161,070,872	875,478,130,474,678.36	22,922.43
0199	INSTANSI PUSAT					
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	0	3,314,294	0	3,314,294	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	0	552,300	0	552,300	0
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	20,596,000	0	20,596,000	0
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	0	398,400	0	398,400	0
411128	Pendapatan PPh Final	0	3,546,000	0	3,546,000	0
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	0	355,936,972	0	355,936,972	0
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	503,387,000	503,387,000	0	503,387,000	100
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	1,902,979,488,000	1,892,910,800,778	0	1,892,910,800,778	99.47
411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	8,218,348,183,000	8,218,348,183,000	0	8,218,348,183,000	100
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	690,296,466	0	690,296,466	0
411212	Pendapatan PPN Impor	0	778,185,320	0	778,185,320	0
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,912,500	0	10,912,500	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	57,682,000	0	57,682,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5,863,000	943,576,229	0	943,576,229	16093.74
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	68,525,000	1,268,154,849	0	1,268,154,849	1850.65
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	361,879,005	0	361,879,005	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	300,000	0	0	0	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	15,500,000	0	15,500,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	6,727,000	0	0	0	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2,055,000	83,265,556	0	83,265,556	4051.85
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	1,175,516,479	0	1,175,516,479	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,000	600,696,119	0	600,696,119	60069611.9
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	140,779,000	1,877,571,801	0	1,877,571,801	1333.7
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2,013,000	6,473,626	0	6,473,626	321.59
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,696,297,000	7,279,208	0	7,279,208	0.43
	JUMLAH PENDAPATAN (0199) - INSTANSI PUSAT	10,123,753,618,000	10,120,023,703,902	0	10,120,023,703,902	2,403,742.53
0200	JAWA BARAT					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	42,725,308,649	42,985,833	42,682,322,816	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	53,374,037	0	53,374,037	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	63,367,625	0	63,367,625	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	17,416,335,194,000	14,391,039,318,456	508,867,428	14,390,530,451,028	82.63
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	1,442,584,668,000	1,225,628,768,512	471,582,092	1,225,157,186,420	84.93
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	3,875,370,272,000	3,780,610,579,659	61,797,400	3,780,548,782,259	97.55
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	3,004,201,890,000	2,668,132,913,086	1,603,031,713	2,666,529,881,373	88.76
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2,705,956,890,000	1,163,299,676,072	3,519,718,566	1,159,779,957,506	42.86

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	9,089,566,831,000	7,855,688,811,629	1,001,674,773,692	6,854,014,037,937	75.41
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	2,304,646,965,000	2,526,448,598,018	527,064,584	2,525,921,533,434	109.6
411128	Pendapatan PPh Final	11,185,873,941,000	9,991,526,433,616	6,708,608,114	9,984,817,825,502	89.26
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	252,703,923,000	205,329,027	126,975,830	78,353,197	0.03
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	25,159,257,010,000	28,828,909,902,318	3,812,066,999,541	25,016,842,902,777	99.43
411212	Pendapatan PPN Impor	12,536,723,782,000	13,853,180,155,973	75,015,000	13,853,105,140,973	110.5
411219	Pendapatan PPN Lainnya	79,260,525,000	15,190,955,356	0	15,190,955,356	19.17
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	1,641,152,047,000	2,807,879,863,134	77,627,409	2,807,802,235,725	171.09
411222	Pendapatan PPnBM Impor	46,545,501,000	30,911,157,362	0	30,911,157,362	66.41
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	48,103,833,000	3,298,009,950	0	3,298,009,950	6.86
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	50,115,014,000	60,415,146,223	0	60,415,146,223	120.55
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	17,059,604,000	50,426,568,827	0	50,426,568,827	295.59
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	44,140,450,000	34,445,387,471	517,496,812	33,927,890,659	76.86
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	78,641,469,000	96,800,210,154	0	96,800,210,154	123.09
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	193,707,968,000	211,247,873,453	0	211,247,873,453	109.05
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	103,223,497	0	103,223,497	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	144,531,633,000	92,253,448,377	15,000,000	92,238,448,377	63.82

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	777,076,502,000	654,046,398,591	0	654,046,398,591	84.17
411613	Pendapatan PPn Batubara	296,000	49,820,000	0	49,820,000	16831.08
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	10,870,484,000	1,789,667,010	0	1,789,667,010	16.46
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	11,649,417,000	11,905,796,416	0	11,905,796,416	102.2
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	11,049,589,000	15,435,232,580	0	15,435,232,580	139.69
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	57,851,392	0	57,851,392	0
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	32,194,000	19,061,012	0	19,061,012	59.21
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	18,826,000	1,092,000	0	1,092,000	5.8
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	438,081,067	0	438,081,067	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	6,970,000	680,978,906	0	680,978,906	9770.14
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	72,785,000	317,117,602	0	317,117,602	435.69
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	6,011,171	0	6,011,171	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	11,395,000	195,953	0	195,953	1.72
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	119,722,000	175,990,086	0	175,990,086	147
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	20,225,000	0	20,225,000	0
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	8,407,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	199,000	505,522,724	0	505,522,724	254031.52
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	50,000	0	50,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	5,300,000	50,561,860	0	50,561,860	954
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42,572,682	0	42,572,682	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	43,610,000	64,336,914	0	64,336,914	147.53
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	25,696,000	5,526,996	0	5,526,996	21.51
	JUMLAH PENDAPATAN (0200) - JAWA BARAT	92,127,470,802,000	90,416,096,470,443	4,827,997,544,014	85,588,098,926,429	5,930.86
0300	JAWA TENGAH					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	18,738,704,581	0	18,738,704,581	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	3,876,690	0	3,876,690	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	123,488,190	0	123,488,190	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	6,666,463,315,000	5,620,177,109,867	284,151,525	5,619,892,958,342	84.3
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	986,030,222,000	695,388,380,122	112,132,975	695,276,247,147	70.51
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	1,427,547,576,000	1,012,670,760,022	183,753,114	1,012,487,006,908	70.92
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	969,075,511,000	830,727,281,331	668,568,041	830,058,713,290	85.65
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1,040,896,391,000	459,865,979,544	7,082,594,067	452,783,385,477	43.5
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	5,427,885,611,000	4,660,543,975,251	482,091,599,549	4,178,452,375,702	76.98

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	128,437,493,000	158,470,616,066	8,939,254	158,461,676,812	123.38
411128	Pendapatan PPh Final	6,164,759,459,000	5,134,407,107,945	2,951,016,384	5,131,456,091,561	83.24
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	86,367,963,000	1,679,785,057	56,335,000	1,623,450,057	1.88
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	17,681,434,178,000	16,927,791,097,787	976,129,905,597	15,951,661,192,190	90.22
411212	Pendapatan PPN Impor	3,274,143,796,000	3,337,478,112,200	735,010,458	3,336,743,101,742	101.91
411219	Pendapatan PPN Lainnya	2,892,965,000	4,594,745,321	0	4,594,745,321	158.82
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	68,515,234,000	21,861,735,022	0	21,861,735,022	31.91
411222	Pendapatan PPnBM Impor	2,367,569,000	1,863,510,835	0	1,863,510,835	78.71
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	5,771,835,000	2,137,603,662	0	2,137,603,662	37.04
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	30,662,447,000	34,070,510,672	0	34,070,510,672	111.11
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	41,913,433,000	129,340,162,515	0	129,340,162,515	308.59
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	6,704,258,000	5,581,561,221	1,059,509,922	4,522,051,299	67.45
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	39,900,093,000	37,070,735,194	0	37,070,735,194	92.91
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	2,569,222,000	10,401,355,749	0	10,401,355,749	404.84
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	1,848,433,135	0	1,848,433,135	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	57,920,327,000	46,208,961,000	0	46,208,961,000	79.78
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	556,501,295,000	403,211,336,836	0	403,211,336,836	72.45

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 10
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411613	Pendapatan PPn Batubara	0	597,000	0	597,000	0
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	4,305,284,000	3,250,922,772	0	3,250,922,772	75.51
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	655,776,000	2,047,239,453	9,296,785,170	(7,249,545,717)	-1105.49
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	1,743,187,000	3,139,021,002	0	3,139,021,002	180.07
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	479,000	6,132,083	0	6,132,083	1280.18
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	164,565,000	4,550,973	0	4,550,973	2.77
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,776,000	0	0	0	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	31,000	223,988,852	0	223,988,852	722544.68
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	18,269,000	235,013,715	0	235,013,715	1286.41
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	45,318,000	461,117,747	0	461,117,747	1017.52
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	226,823	0	226,823	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	49,500,000	767,500,000	0	767,500,000	1550.51
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	218,000	4,976,366	0	4,976,366	2282.74
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	24,145,408	0	24,145,408	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,516,000	0	4,516,000	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	38,546,000	117,808,768	0	117,808,768	305.63
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2,265,000	29,844,475	0	29,844,475	1317.64

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 11
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (0300) - JAWA TENGAH	44,675,785,407,000	39,566,574,527,252	1,480,660,301,056	38,085,914,226,196	17,046.84
0400	DI YOGYAKARTA					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	3,176,465,878	0	3,176,465,878	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	380,827	0	380,827	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	748,755	0	748,755	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	1,127,026,400,000	971,673,710,053	47,348,908	971,626,361,145	86.21
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	85,259,042,000	82,839,715,135	1,954,920	82,837,760,215	97.16
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	33,500,735,000	44,434,467,378	0	44,434,467,378	132.64
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	144,033,288,000	143,143,106,639	259,351,008	142,883,755,631	99.2
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	227,350,432,000	105,170,432,544	1,727,212,422	103,443,220,122	45.5
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	526,512,246,000	489,841,583,664	11,584,919,286	478,256,664,378	90.83
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	25,205,288,000	103,864,504,071	0	103,864,504,071	412.07
411128	Pendapatan PPh Final	1,270,549,643,000	979,431,247,805	587,909,864	978,843,337,941	77.04
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	25,000,000	43,857,616	263,352,936	(219,495,320)	-877.98
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	1,855,322,934,000	1,967,378,015,275	95,756,435,484	1,871,621,579,791	100.88
411212	Pendapatan PPN Impor	79,521,464,000	133,773,652,548	0	133,773,652,548	168.22
411219	Pendapatan PPN Lainnya	961,451,000	839,390,918	0	839,390,918	87.3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 12
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	7,307,848,000	3,873,626,240	0	3,873,626,240	53.01
411222	Pendapatan PPnBM Impor	0	10,651,825	0	10,651,825	0
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	45,591,000	135,361,647	0	135,361,647	296.9
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	7,473,000	10,374,499	0	10,374,499	138.83
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	102,915,000	111,838,294	0	111,838,294	108.67
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	652,694	0	652,694	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	10,212,601,000	8,343,175,000	0	8,343,175,000	81.69
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	89,663,033,000	67,565,745,000	0	67,565,745,000	75.36
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	352,492,000	296,930,865	0	296,930,865	84.24
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	329,440,000	341,015,123	0	341,015,123	103.51
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	683,481,000	932,874,879	0	932,874,879	136.49
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	0	4,192,945	0	4,192,945	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	226,681,165	0	226,681,165	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3,643,000	1,050,000	0	1,050,000	28.82
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15,356,000	95,562,493	0	95,562,493	622.31
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	319,150	0	319,150	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	11,500,000	35,320,800	0	35,320,800	307.14

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 13
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	7,750,000	0	7,750,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	142,000	341,000	0	341,000	240.14
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,670,530	0	2,670,530	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,621,000	0	1,621,000	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	208,000	11,745,180	0	11,745,180	5646.72
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	450,015	0	450,015	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0400) - DI YOGYAKARTA	5,484,003,646,000	5,107,621,229,450	110,228,484,828	4,997,392,744,622	222.18
0500	JAWA TIMUR					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	23,394,254,797	0	23,394,254,797	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	126,957,791	0	126,957,791	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	2,110,327,977	0	2,110,327,977	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	10,731,056,231,000	9,451,554,125,620	5,943,640,962	9,445,610,484,658	88.02
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	1,457,384,752,000	1,519,358,704,444	380,617,138	1,518,978,087,306	104.23
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	3,431,702,065,000	2,692,744,757,545	259,704,363	2,692,485,053,182	78.46
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	2,722,923,287,000	2,381,081,333,335	3,352,000,906	2,377,729,332,429	87.32
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2,330,032,888,000	1,017,309,343,994	7,800,384,263	1,009,508,959,731	43.33
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	16,909,825,640,000	12,978,731,776,507	954,333,459,366	12,024,398,317,141	71.11

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	817,025,002,000	807,627,207,326	6,367,742,881	801,259,464,445	98.07
411128	Pendapatan PPh Final	11,611,156,046,000	9,092,933,197,120	3,750,256,265	9,089,182,940,855	78.28
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	288,590,289,000	1,893,401,157	76,417,886	1,816,983,271	0.63
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	2,025,644	0	2,025,644	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	41,241,613,178,000	43,132,334,804,600	2,551,742,134,679	40,580,592,669,921	98.4
411212	Pendapatan PPN Impor	7,104,540,080,000	8,883,476,264,487	354,536,000	8,883,121,728,487	125.03
411219	Pendapatan PPN Lainnya	28,419,818,000	3,438,251,590	0	3,438,251,590	12.1
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	680,438,918,000	64,397,442,074	92,682,327	64,304,759,747	9.45
411222	Pendapatan PPnBM Impor	48,517,988,000	34,365,833,076	0	34,365,833,076	70.83
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	3,710,646,000	2,790,125,476	0	2,790,125,476	75.19
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	44,160,860,000	41,597,334,188	0	41,597,334,188	94.2
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	48,841,242,000	160,648,397,710	0	160,648,397,710	328.92
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	18,967,841,000	37,078,550,137	326,665,048	36,751,885,089	193.76
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	77,562,206,000	82,649,041,270	0	82,649,041,270	106.56
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	492,738,744	0	492,738,744	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	139,970,519,000	77,275,206,367	0	77,275,206,367	55.21
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	621,848,761,000	509,135,024,941	0	509,135,024,941	81.87

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 15
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411613	Pendapatan PPn Batubara	0	18,942,922	0	18,942,922	0
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	7,757,091,000	3,030,816,731	0	3,030,816,731	39.07
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	17,830,449,000	17,540,380,645	0	17,540,380,645	98.37
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	26,474,707,000	14,678,608,488	16,109,701	14,662,498,787	55.38
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	106,460,000	282,944,483	0	282,944,483	265.78
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	3,275,000	138,758,887	0	138,758,887	4236.91
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	222,095,394	0	222,095,394	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	42,821,000	1,436,627,983	0	1,436,627,983	3354.96
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	28,556,000	796,796,337	0	796,796,337	2790.29
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	108,000	0	0	0	0
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	27,000	0	0	0	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	55,000	21,475	0	21,475	39.05
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	166,981,000	200,186,532	0	200,186,532	119.89
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	13,283,000	19,035,712	0	19,035,712	143.31
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	3,222,000	181,818	0	181,818	5.64
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	116,000	555,375	0	555,375	478.77
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,463,745	0	11,463,745	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	16,493,459	0	16,493,459	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	28,082,000	141,943,562	0	141,943,562	505.46
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2,126,000	51,295,748	0	51,295,748	2412.78
	JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR	100,410,745,616,000	93,037,133,577,213	3,534,796,351,785	89,502,337,225,428	357.54
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	2,611,345,637	0	2,611,345,637	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	71,421,420	0	71,421,420	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	375	0	375	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	1,390,875,746,000	1,040,568,243,033	3,915,235	1,040,564,327,798	74.81
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	219,041,504,000	166,411,212,702	8,495,644	166,402,717,058	75.97
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	15,602,097,000	5,018,526,125	0	5,018,526,125	32.17
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	173,518,432,000	139,981,137,953	0	139,981,137,953	80.67
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	20,771,399,000	9,661,010,971	35,862,733	9,625,148,238	46.34
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	403,085,413,000	265,233,471,646	4,970,727,288	260,262,744,358	64.57
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	17,066,208,000	10,578,498,986	0	10,578,498,986	61.99
411128	Pendapatan PPh Final	673,481,096,000	479,963,616,799	389,015,264	479,574,601,535	71.21
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	8,237,234,000	25,157,495	12,400,000	12,757,495	0.15

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	0	167,200	0	167,200	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	2,098,902,896,000	2,124,042,998,755	109,818,529,938	2,014,224,468,817	95.97
411212	Pendapatan PPN Impor	72,049,740,000	16,470,282,293	0	16,470,282,293	22.86
411219	Pendapatan PPN Lainnya	1,161,953,000	531,293,265	0	531,293,265	45.72
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	2,438,987,000	2,910,879,297	0	2,910,879,297	119.35
411222	Pendapatan PPnBM Impor	0	2,478,439	0	2,478,439	0
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	35,917,100,000	39,821,627,450	0	39,821,627,450	110.87
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	1,437,686,000	1,833,704,355	0	1,833,704,355	127.55
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	4,343,766,000	7,443,998,471	0	7,443,998,471	171.37
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	73,849,325,000	95,702,738,185	0	95,702,738,185	129.59
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	52,106,708	0	52,106,708	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	7,007,252,000	6,522,685,000	0	6,522,685,000	93.08
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	93,781,539,000	59,756,487,000	0	59,756,487,000	63.72
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	2,279,788,000	1,200,664,802	0	1,200,664,802	52.67
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	607,539,000	94,675,089	0	94,675,089	15.58
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	120,274,000	334,783,363	0	334,783,363	278.35
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	1,000,000	0	1,000,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	380,000	0	380,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	8,426,000	151,384,293	0	151,384,293	1796.63
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14,338,000	78,452,581	0	78,452,581	547.17
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	55,000	3,029,997	0	3,029,997	5509.09
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	6,350,000	10,700,000	0	10,700,000	168.5
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,233,456	0	2,233,456	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18,136	0	18,136	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	12,586,000	4,145,730	0	4,145,730	32.94
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,023,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0600) - NANGGROE ACEH DARUSSALAM	5,315,619,752,000	4,477,096,557,007	115,238,946,102	4,361,857,610,905	260.23
0700	SUMATERA UTARA					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	11,418,363,846	0	11,418,363,846	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	89,343,776	0	89,343,776	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	2,985,977,993	0	2,985,977,993	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	4,347,245,375,000	3,539,264,776,558	818,401,575	3,538,446,374,983	81.4
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	735,545,934,000	420,207,214,546	175,890,541	420,031,324,005	57.1
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	1,320,769,367,000	1,016,836,394,774	2,719,000	1,016,833,675,774	76.99

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	1,245,457,283,000	921,174,537,483	1,389,209,173	919,785,328,310	73.85
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	795,990,898,000	342,571,076,824	1,044,457,728	341,526,619,096	42.91
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	2,659,466,302,000	3,650,150,158,836	205,926,631,442	3,444,223,527,394	129.51
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	265,938,064,000	156,722,475,469	142,550,854	156,579,924,615	58.88
411128	Pendapatan PPh Final	4,388,995,412,000	3,446,265,426,374	231,313,349	3,446,034,113,025	78.52
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	63,042,993,000	4,151,844,228	1,037,587,295	3,114,256,933	4.94
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	6,410,030,850,000	9,101,085,827,716	4,124,008,897,591	4,977,076,930,125	77.65
411212	Pendapatan PPN Impor	3,015,866,497,000	3,249,731,530,513	10,873,000	3,249,720,657,513	107.75
411219	Pendapatan PPN Lainnya	11,924,999,000	1,910,286,106	0	1,910,286,106	16.02
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	38,714,411,000	13,321,785,203	4,740,000	13,317,045,203	34.4
411222	Pendapatan PPnBM Impor	7,483,306,000	1,036,848,930	0	1,036,848,930	13.86
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	918,036,000	527,144,850	0	527,144,850	57.42
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	312,970,852,000	449,761,165,212	511,754,280	449,249,410,932	143.54
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	8,196,827,000	12,925,657,944	0	12,925,657,944	157.69
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	21,081,962,000	17,143,076,772	0	17,143,076,772	81.32
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	55,738,891,000	63,037,557,236	0	63,037,557,236	113.09
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	20,258,496,000	27,493,308,706	0	27,493,308,706	135.71

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 20
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	550,131,327	0	550,131,327	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	46,001,656,000	29,383,997,279	0	29,383,997,279	63.88
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	250,938,584,000	173,335,542,000	0	173,335,542,000	69.07
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	2,074,860,000	2,274,377,197	0	2,274,377,197	109.62
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	1,218,391,000	2,549,151,264	11,045,496,107	(8,496,344,843)	-697.34
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	2,007,676,000	19,301,063,112	0	19,301,063,112	961.36
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	6,507,518	0	6,507,518	0
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	0	2,006,351	0	2,006,351	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	355,093,587	0	355,093,587	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	19,685,265	0	19,685,265	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	22,673,000	275,227,840	7,675,616	267,552,224	1180.05
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	55,000	134,221	0	134,221	244.04
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	47,300,000	47,400,000	0	47,400,000	100.21
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	16,000,000	0	16,000,000	0
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	42,000	0	0	0	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	51,000	0	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	175,190	0	175,190	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	23,716,000	58,985,882	0	58,985,882	248.72
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	4,225,000	395	0	395	0.01
	JUMLAH PENDAPATAN (0700) - SUMATERA UTARA	26,027,975,984,000	26,677,987,258,323	4,346,358,197,551	22,331,629,060,772	91
0800	SUMATERA BARAT					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	2,070,619,035	0	2,070,619,035	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	9,245,206	0	9,245,206	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	14,403,922	0	14,403,922	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	1,338,463,625,000	1,136,232,360,383	431,907,876	1,135,800,452,507	84.86
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	241,031,669,000	155,749,339,777	0	155,749,339,777	64.62
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	8,090,866,000	6,499,716,981	0	6,499,716,981	80.33
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	366,144,547,000	272,291,802,605	0	272,291,802,605	74.37
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	124,658,906,000	57,537,540,866	168,373,218	57,369,167,648	46.02
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	970,286,482,000	869,063,273,243	62,473,011,266	806,590,261,977	83.13
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	11,215,275,000	12,972,651,423	0	12,972,651,423	115.67
411128	Pendapatan PPh Final	825,828,903,000	664,440,409,560	79,351,035	664,361,058,525	80.45
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	12,528,618,000	7,334,640	0	7,334,640	0.06
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	37,500	0	37,500	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	1,868,048,902,000	1,828,759,459,011	146,597,187,697	1,682,162,271,314	90.05
411212	Pendapatan PPN Impor	20,298,221,000	20,357,570,696	0	20,357,570,696	100.29
411219	Pendapatan PPN Lainnya	590,357,000	612,223,052	0	612,223,052	103.7
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	4,880,370,000	5,791,529,062	0	5,791,529,062	118.67
411222	Pendapatan PPnBM Impor	0	13,230,346	0	13,230,346	0
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	333,169,000	158,739,268	0	158,739,268	47.65
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	40,321,210,000	53,318,501,505	0	53,318,501,505	132.23
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	2,507,135,000	4,482,056,166	0	4,482,056,166	178.77
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	4,281,414,000	6,114,972,376	0	6,114,972,376	142.83
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	317,692,000	309,274,595	0	309,274,595	97.35
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	652,099,000	913,464,420	0	913,464,420	140.08
411611	Pendapatan Bea Meterai	10,592,318,000	11,126,819,000	0	11,126,819,000	105.05
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	87,710,469,000	64,087,235,236	0	64,087,235,236	73.07
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	839,359,000	760,948,034	0	760,948,034	90.66
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	37,616,000	42,643,052	0	42,643,052	113.36
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	15,024,000	114,433,215	0	114,433,215	761.67
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	0	66,102,000	0	66,102,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	74,089,588	0	74,089,588	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	987,000	16,039,814	0	16,039,814	1625.11
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	25,237,000	45,399,410	0	45,399,410	179.89
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	76,959	0	76,959	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	2,650,000	6,500,000	0	6,500,000	245.28
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	39,000	0	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,577,711	0	5,577,711	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	6,637,000	36,899,260	0	36,899,260	555.96
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	3,949,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0800) - SUMATERA BARAT	5,939,713,745,000	5,174,102,518,917	209,749,831,092	4,964,352,687,825	141.83
0900	RIAU					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	8,596,951,013	0	8,596,951,013	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	2,715,168	0	2,715,168	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	2,902,666	0	2,902,666	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	3,027,270,776,000	2,544,048,199,100	88,218,753,350	2,455,829,445,750	81.12
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	533,121,873,000	434,424,255,506	310,500	434,423,945,006	81.49
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	195,872,454,000	68,312,181,644	0	68,312,181,644	34.88

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	854,470,179,000	684,297,389,508	5,824,046,840	678,473,342,668	79.4
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	202,150,381,000	82,325,026,107	290,517,609	82,034,508,498	40.58
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	2,668,528,943,000	2,272,994,252,395	238,789,831,223	2,034,204,421,172	76.23
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	224,269,056,000	148,339,171,359	3,797,475	148,335,373,884	66.14
411128	Pendapatan PPh Final	1,676,876,071,000	1,383,288,191,509	18,802,694,485	1,364,485,497,024	81.37
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	24,300,913,000	1,751,844,983	0	1,751,844,983	7.21
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	5,845,595,536,000	6,162,658,607,249	782,899,647,255	5,379,758,959,994	92.03
411212	Pendapatan PPN Impor	282,796,168,000	232,079,491,921	0	232,079,491,921	82.07
411219	Pendapatan PPN Lainnya	1,616,950,000	1,518,502,361	0	1,518,502,361	93.91
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	11,068,167,000	14,106,477,704	0	14,106,477,704	127.45
411222	Pendapatan PPnBM Impor	33,684,000	19,834,029	0	19,834,029	58.88
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	1,167,848,000	3,019,599,804	0	3,019,599,804	258.56
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	195,972,539,000	280,306,412,998	19,296,599,548	261,009,813,450	133.19
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	53,492,118,000	87,026,639,754	651,753,439	86,374,886,315	161.47
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	4,560,671,000	7,664,140,560	0	7,664,140,560	168.05
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	1,258,299,549,000	1,358,638,023,263	0	1,358,638,023,263	107.97
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	2,113,610	0	2,113,610	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411611	Pendapatan Bea Meterai	27,479,371,000	14,768,900,140	0	14,768,900,140	53.75
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	114,300,033,000	96,920,067,364	0	96,920,067,364	84.79
411613	Pendapatan PPn Batubara	0	21,246,575	0	21,246,575	0
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	312,216,000	269,348,306	0	269,348,306	86.27
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	8,499,401,000	1,164,002,771	16,566,584,157	(15,402,581,386)	-181.22
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	4,893,958,000	1,484,914,737	242,567,133	1,242,347,604	25.39
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	17,249,534	0	17,249,534	0
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	2,378,000	3,500,000	0	3,500,000	147.18
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,071,000	0	6,071,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	4,643,000	96,788,106	0	96,788,106	2084.6
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,711,000	29,114,260	0	29,114,260	618.01
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	21,481,000	0	0	0	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	25,900,000	13,400,000	0	13,400,000	51.74
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	159,000	57,385,728	0	57,385,728	36091.65
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,831,723	0	4,831,723	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	7,126,000	17,146,032	0	17,146,032	240.61
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	3,948,000	35,090	0	35,090	0.89

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (0900) - RIAU	17,217,019,201,000	15,890,296,925,577	1,171,587,103,014	14,718,709,822,563	1,028.39
1000	JAMBI					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	2,037,994,627	0	2,037,994,627	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	37,840,811	0	37,840,811	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	42,800	0	42,800	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	863,366,748,000	670,318,812,964	3,138,420	670,315,674,544	77.64
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	194,591,725,000	166,100,330,684	0	166,100,330,684	85.36
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	7,101,763,000	10,273,572,628	0	10,273,572,628	144.66
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	246,952,795,000	202,150,187,085	86,014,214	202,064,172,871	81.82
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	62,641,219,000	31,935,871,448	131,803,949	31,804,067,499	50.77
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	681,546,747,000	732,513,318,458	19,465,659,498	713,047,658,960	104.62
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	5,776,212,000	23,426,848,659	0	23,426,848,659	405.57
411128	Pendapatan PPh Final	714,575,954,000	448,591,650,667	35,151,070	448,556,499,597	62.77
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	24,724,190,000	116,007,231	0	116,007,231	0.47
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	4,643,308	0	4,643,308	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	2,331,700,425,000	2,562,036,783,508	601,807,911,556	1,960,228,871,952	84.07
411212	Pendapatan PPN Impor	15,629,145,000	45,766,691,732	0	45,766,691,732	292.83

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411219	Pendapatan PPN Lainnya	355,224,000	509,891,664	0	509,891,664	143.54
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	3,237,559,000	3,968,556,347	0	3,968,556,347	122.58
411222	Pendapatan PPnBM Impor	3,652,000	213,309	0	213,309	5.84
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	112,000	28,269,184	0	28,269,184	25240.34
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	42,705,851,000	73,068,372,124	111,676,101	72,956,696,023	170.84
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	12,093,698,000	21,698,427,657	0	21,698,427,657	179.42
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	13,567,169,000	13,788,823,666	0	13,788,823,666	101.63
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	144,472,603,000	154,464,786,499	0	154,464,786,499	106.92
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	1,014,310,000	1,154,560,131	0	1,154,560,131	113.83
411611	Pendapatan Bea Meterai	6,356,520,000	1,159,025,909	0	1,159,025,909	18.23
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	72,305,065,000	49,792,071,000	0	49,792,071,000	68.86
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	465,260,000	376,427,361	0	376,427,361	80.91
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	517,094,848	0	517,094,848	0
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	202,728,934	0	202,728,934	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	211,029,000	0	211,029,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,273,000	25,587,966	0	25,587,966	598.83
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	55,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	5,600,000	37,066,081	0	37,066,081	661.89
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,294,284	0	2,294,284	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	661	0	661	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	11,447,000	60,681,000	0	60,681,000	530.1
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	3,999,000	11,305,916	0	11,305,916	282.72
	JUMLAH PENDAPATAN (1000) - JAMBI	5,445,209,320,000	5,216,387,810,151	621,641,354,808	4,594,746,455,343	805.87
1100	SUMATERA SELATAN					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	4,488,184,256	0	4,488,184,256	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	3,597,106	0	3,597,106	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	100,000	0	100,000	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	2,871,211,787,000	2,350,731,319,548	355,414,876	2,350,375,904,672	81.86
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	626,761,303,000	479,586,042,926	2,691,000	479,583,351,926	76.52
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	60,824,174,000	43,824,828,162	0	43,824,828,162	72.05
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	752,220,324,000	729,079,849,822	215,770,517	728,864,079,305	96.9
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	204,730,012,000	93,436,757,672	293,876,904	93,142,880,768	45.5
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	1,325,044,292,000	1,283,113,153,674	119,469,473,667	1,163,643,680,007	87.82
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	209,381,336,000	132,709,064,311	0	132,709,064,311	63.38

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411128	Pendapatan PPh Final	2,057,973,274,000	1,426,243,545,641	431,648,711	1,425,811,896,930	69.28
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	39,562,280,000	1,132,164,313	0	1,132,164,313	2.86
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	3,784,141,760,000	4,532,075,324,008	1,445,851,727,135	3,086,223,596,873	81.56
411212	Pendapatan PPN Impor	95,345,099,000	236,038,798,489	0	236,038,798,489	247.56
411219	Pendapatan PPN Lainnya	1,662,428,000	1,476,044,191	0	1,476,044,191	88.79
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	6,578,901,000	7,041,769,970	0	7,041,769,970	107.04
411222	Pendapatan PPnBM Impor	95,035,000	7,042,664	0	7,042,664	7.41
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	118,263,000	63,092,450	0	63,092,450	53.35
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	146,243,579,000	158,134,345,539	0	158,134,345,539	108.13
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	45,675,858,000	47,615,105,243	4,081,317,451	43,533,787,792	95.31
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	150,943,241,000	354,731,361,307	304,158,503,524	50,572,857,783	33.5
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	947,635,281,000	1,015,138,933,598	0	1,015,138,933,598	107.12
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	4,733,114,000	5,258,908,538	0	5,258,908,538	111.11
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	59,798,073	0	59,798,073	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	62,458,201,000	23,178,072,000	0	23,178,072,000	37.11
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	60,042,003,000	105,447,000,000	0	105,447,000,000	175.62
411613	Pendapatan PPn Batubara	0	110,000	0	110,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 30
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	28,397,853,000	891,810,078	0	891,810,078	3.14
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	12,318,285,000	286,200,002	0	286,200,002	2.32
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	10,859,373,000	461,799,516	0	461,799,516	4.25
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	105,412,000	3,874,000	0	3,874,000	3.68
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	0	2,606,699,189	0	2,606,699,189	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	36,000	5,640,000	0	5,640,000	15666.67
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,601,000	253,082,088	0	253,082,088	15807.75
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	18,600,000	21,224,000	0	21,224,000	114.11
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	23,816,000	0	23,816,000	0
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	1,040,000	0	0	0	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	14,000	862,796	0	862,796	6162.83
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,453,962	0	1,453,962	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	43,332,000	84,041,490	0	84,041,490	193.95
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,980,000	1,388,255,000	0	1,388,255,000	70113.89
	JUMLAH PENDAPATAN (1100) - SUMATERA SELATAN	13,505,129,071,000	13,036,643,071,622	1,874,860,423,785	11,161,782,647,837	2,681.03
1200	LAMPUNG					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	11,869,744,694	0	11,869,744,694	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	24,766,967	0	24,766,967	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	3,059,266	0	3,059,266	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	1,298,766,431,000	1,075,672,239,705	8,808,905	1,075,663,430,800	82.82
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	424,861,082,000	355,072,303,296	6,256,999,261	348,815,304,035	82.1
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	241,395,547,000	124,098,561,216	189,701,000	123,908,860,216	51.33
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	297,284,940,000	180,745,032,561	0	180,745,032,561	60.8
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	135,799,594,000	54,011,534,618	1,079,501,173	52,932,033,445	38.98
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	639,832,600,000	700,707,884,004	43,299,750,659	657,408,133,345	102.75
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	35,831,943,000	25,959,962,869	2,757,982,960	23,201,979,909	64.75
411128	Pendapatan PPh Final	1,161,624,455,000	965,028,443,061	15,069,278	965,013,373,783	83.07
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	30,565,910,000	11,812,672	0	11,812,672	0.04
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	14,120	0	14,120	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	3,197,541,312,000	3,217,206,056,748	120,221,021,634	3,096,985,035,114	96.86
411212	Pendapatan PPN Impor	503,371,102,000	548,852,227,841	1,728,398,000	547,123,829,841	108.69
411219	Pendapatan PPN Lainnya	1,240,746,000	1,008,812,357	0	1,008,812,357	81.31
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	11,456,151,000	11,230,315,179	0	11,230,315,179	98.03
411222	Pendapatan PPnBM Impor	616,756,000	2,720,309	0	2,720,309	0.44

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	3,094,000	83,428,401	0	83,428,401	2696.46
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	58,488,008,000	65,477,440,826	330,528,320	65,146,912,506	111.39
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	1,163,845,000	1,903,716,804	0	1,903,716,804	163.57
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	3,367,326,000	1,623,143,212	0	1,623,143,212	48.2
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	129,519,000	143,885,067	0	143,885,067	111.09
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	23,133,260,000	32,210,353,583	0	32,210,353,583	139.24
411611	Pendapatan Bea Meterai	65,881,391,000	9,989,834,000	0	9,989,834,000	15.16
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	47,177,222,000	84,704,118,000	0	84,704,118,000	179.54
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	70,784,000	315,516,233	0	315,516,233	445.75
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	11,252,577,000	950,706,774	0	950,706,774	8.45
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	3,988,233,000	726,189,526	0	726,189,526	18.21
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	1,080,358,000	0	0	0	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	351,000	0	351,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	11,898,000	6,298,290	0	6,298,290	52.94
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14,204,000	48,079,829	0	48,079,829	338.49
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	21,700,000	8,000,000	0	8,000,000	36.87
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	21,062,500	0	21,062,500	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,549,528	0	2,549,528	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	19,798,954	0	19,798,954	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	5,850,000	5,766,310	0	5,766,310	98.57
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	321,000	650	0	650	0.2
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	8,195,978,159,000	7,469,745,730,970	175,887,761,190	7,293,857,969,780	138.87
1300	KALIMANTAN BARAT					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	2,948,220,351	0	2,948,220,351	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	117,500	0	117,500	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	31,749,014	0	31,749,014	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	1,213,907,476,000	952,081,710,884	5,050,000	952,076,660,884	78.43
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	150,413,278,000	148,576,066,094	735,726,590	147,840,339,504	98.29
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	18,316,739,000	25,159,137,666	100,000	25,159,037,666	137.36
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	315,710,645,000	230,989,804,393	299,568,697	230,690,235,696	73.07
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	290,356,034,000	120,959,289,788	471,802,195	120,487,487,593	41.5
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	585,052,789,000	532,382,534,822	21,419,097,563	510,963,437,259	87.34
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	122,163,216,000	81,012,842,414	0	81,012,842,414	66.32
411128	Pendapatan PPh Final	1,087,798,593,000	977,705,076,542	41,470,312	977,663,606,230	89.88

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	7,870,451,000	538,319,244	0	538,319,244	6.84
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	3,170,844,151,000	3,091,725,147,289	107,584,693,101	2,984,140,454,188	94.11
411212	Pendapatan PPN Impor	61,579,246,000	81,151,124,549	0	81,151,124,549	131.78
411219	Pendapatan PPN Lainnya	1,188,555,000	1,376,779,945	0	1,376,779,945	115.84
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	3,307,863,000	6,129,544,144	162,170,908	5,967,373,236	180.4
411222	Pendapatan PPnBM Impor	26,286,000	6,029,877	0	6,029,877	22.94
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	71,853,000	12,091,875	0	12,091,875	16.83
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	137,694,360,000	224,363,986,175	1,151,452,800	223,212,533,375	162.11
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	17,984,920,000	28,679,351,067	0	28,679,351,067	159.46
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	10,380,073,000	15,428,808,550	757,209,910	14,671,598,640	141.34
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	242,981,717	0	242,981,717	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	18,056,305,000	6,828,334,400	0	6,828,334,400	37.82
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	80,361,969,000	65,869,800,000	0	65,869,800,000	81.97
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	643,244,000	722,811,277	0	722,811,277	112.37
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	104,070,000	574,085,627	0	574,085,627	551.63
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	257,702,000	239,943,748	0	239,943,748	93.11
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	500,000	0	500,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	607,000	272,902,832	0	272,902,832	44959.28
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,638,000	63,921,906	0	63,921,906	962.97
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	165,000	0	0	0	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	19,200,000	41,130,000	0	41,130,000	214.22
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	8,500,000	0	8,500,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	47,000	0	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13,118,917	0	13,118,917	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15,270,000	0	15,270,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1300) - KALIMANTAN BARAT	7,294,116,475,000	6,596,151,032,607	132,628,342,076	6,463,522,690,531	1,353.26
1400	KALIMANTAN TENGAH					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	3,414,822,364	0	3,414,822,364	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	3,049,400	0	3,049,400	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	9,753,435	0	9,753,435	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	950,985,220,000	830,663,131,174	92,689,949	830,570,441,225	87.34
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	209,182,117,000	125,548,109,287	0	125,548,109,287	60.02
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	14,465,980,000	10,572,383,808	0	10,572,383,808	73.08
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	485,011,367,000	291,407,642,156	4,520,806	291,403,121,350	60.08

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	22,465,151,000	10,191,860,633	635,028,518	9,556,832,115	42.54
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	1,047,393,613,000	843,278,272,644	27,242,531,944	816,035,740,700	77.91
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	157,428,552,000	72,808,274,966	0	72,808,274,966	46.25
411128	Pendapatan PPh Final	814,012,633,000	431,273,308,830	699,625,178	430,573,683,652	52.9
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	3,293,900,000	826,057,014	12,450,932	813,606,082	24.7
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	2,035,284,843,000	1,917,143,462,455	93,674,781,474	1,823,468,680,981	89.59
411212	Pendapatan PPN Impor	22,761,094,000	37,677,221,796	0	37,677,221,796	165.53
411219	Pendapatan PPN Lainnya	236,542,000	1,298,496,027	0	1,298,496,027	548.95
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	6,658,799,000	2,569,171,196	0	2,569,171,196	38.58
411222	Pendapatan PPnBM Impor	0	1,764,298	0	1,764,298	0
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	21,181,000	1,293,141,996	0	1,293,141,996	6105.2
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	204,196,746,000	253,761,175,393	2,534,313,860	251,226,861,533	123.03
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	32,452,705,000	63,155,655,232	431,714,300	62,723,940,932	193.28
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	76,297,505,000	109,324,837,577	1,927,315,646	107,397,521,931	140.76
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	1,310,107,000	2,081,443,349	0	2,081,443,349	158.88
411611	Pendapatan Bea Meterai	620,933,000	440,223,000	0	440,223,000	70.9
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	59,655,096,000	45,972,480,000	0	45,972,480,000	77.06

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 37
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411613	Pendapatan PPn Batubara	0	50,000	0	50,000	0
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	71,728,000	273,272,122	0	273,272,122	380.98
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	28,098,000	105,016,770	0	105,016,770	373.75
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	363,306,297	1,098,614,297	(735,308,000)	0
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	0	15,678,676	0	15,678,676	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	450,000	0	450,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	777,000	103,064,900	0	103,064,900	13264.47
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,039,000	15,195,087	0	15,195,087	251.62
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	385,251	0	385,251	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	7,750,000	11,700,000	0	11,700,000	150.97
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	35,013,889	0	35,013,889	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,235,086	0	4,235,086	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4,784,000	0	0	0	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	120	0	120	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1400) - KALIMANTAN TENGAH	6,143,853,260,000	5,055,643,106,228	128,353,586,904	4,927,289,519,324	596.27
1500	KALIMANTAN SELATAN					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	9,117,025,618	0	9,117,025,618	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	4,685,975	0	4,685,975	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	3,949,383	0	3,949,383	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	1,480,197,086,000	1,266,208,884,965	0	1,266,208,884,965	85.54
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	572,316,693,000	577,137,023,289	0	577,137,023,289	100.84
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	9,652,426,000	11,255,817,201	0	11,255,817,201	116.61
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	1,350,120,408,000	1,067,052,700,411	36,704,385,010	1,030,348,315,401	76.32
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	122,099,931,000	51,683,602,843	709,908,806	50,973,694,037	41.75
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	824,014,341,000	1,378,172,723,663	73,705,515,703	1,304,467,207,960	158.31
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	98,852,340,000	120,549,775,866	0	120,549,775,866	121.95
411128	Pendapatan PPh Final	1,225,554,253,000	905,459,344,619	30,104,239	905,429,240,380	73.88
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	33,301,603,000	443,601,308	0	443,601,308	1.33
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	1,106,850	0	1,106,850	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	2,329,509,875,000	2,756,616,904,143	360,992,001,765	2,395,624,902,378	102.84
411212	Pendapatan PPN Impor	22,177,451,000	41,856,816,790	0	41,856,816,790	188.74
411219	Pendapatan PPN Lainnya	1,010,051,000	1,822,778,477	0	1,822,778,477	180.46
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	12,580,491,000	20,505,072,346	0	20,505,072,346	162.99
411222	Pendapatan PPnBM Impor	50,438,000	18,632,727	0	18,632,727	36.94

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	2,523,000	553,680,950	0	553,680,950	21945.34
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	39,206,287,000	73,050,627,791	30,000,000	73,020,627,791	186.25
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	1,499,996,000	4,591,869,417	0	4,591,869,417	306.13
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	247,472,615,000	329,992,159,848	10,164,382,272	319,827,777,576	129.24
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	27,281,763,000	30,421,809,772	0	30,421,809,772	111.51
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	231,049,754	0	231,049,754	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	12,869,314,000	10,770,925,000	0	10,770,925,000	83.69
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	81,290,190,000	61,124,409,000	0	61,124,409,000	75.19
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	3,334,949,000	196,647,838	0	196,647,838	5.9
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	1,017,646,000	704,565,231	0	704,565,231	69.23
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	38,746,000	1,694,567,544	0	1,694,567,544	4373.53
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	104,192,108	0	104,192,108	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7,000,000	0	7,000,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,972,000	7,424,164	0	7,424,164	376.48
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	27,000	188,126	0	188,126	696.76
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	9,300,000	21,400,000	0	21,400,000	230.11
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	20,689,630	0	20,689,630	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	41,336	0	41,336	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	7,612,000	24,302,040	0	24,302,040	319.26
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	3,000	1,850,544	0	1,850,544	61684.8
	JUMLAH PENDAPATAN (1500) - KALIMANTAN SELATAN	8,495,470,330,000	8,721,429,846,567	482,336,297,795	8,239,093,548,772	2,422.16
1600	KALIMANTAN TIMUR					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	16,165,452,930	0	16,165,452,930	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	2,610,164	0	2,610,164	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	284,552,140	0	284,552,140	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	4,756,614,689,000	3,780,112,277,272	225,406,622	3,779,886,870,650	79.47
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	1,115,023,675,000	894,596,717,555	4,509,478	894,592,208,077	80.23
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	93,404,589,000	127,380,602,448	0	127,380,602,448	136.38
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	2,534,235,489,000	1,838,761,209,434	1,289,212,895	1,837,471,996,539	72.51
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	305,784,550,000	130,855,768,364	2,634,759,353	128,221,009,011	41.93
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	2,105,308,972,000	3,271,345,763,930	275,751,274,826	2,995,594,489,104	142.29
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	445,990,748,000	283,273,396,965	128,094,074	283,145,302,891	63.49
411128	Pendapatan PPh Final	2,580,884,812,000	1,786,049,312,270	509,006,181	1,785,540,306,089	69.18
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	186,010,219,000	5,156,275,134	0	5,156,275,134	2.77

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	111,650	0	111,650	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	4,987,254,647,000	6,077,340,055,229	748,444,557,795	5,328,895,497,434	106.85
411212	Pendapatan PPN Impor	275,743,090,000	482,235,956,989	0	482,235,956,989	174.89
411219	Pendapatan PPN Lainnya	1,910,991,000	1,112,018,963	0	1,112,018,963	58.19
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	16,893,392,000	12,634,319,571	0	12,634,319,571	74.79
411222	Pendapatan PPnBM Impor	37,777,000	476,477,818	0	476,477,818	1261.29
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	770,971,000	170,798,168	0	170,798,168	22.15
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	169,276,795,000	234,832,766,169	0	234,832,766,169	138.73
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	46,226,479,000	91,517,248,523	0	91,517,248,523	197.98
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	463,781,053,000	737,105,022,006	213,326,956,630	523,778,065,376	112.94
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	566,421,211,000	498,484,519,409	0	498,484,519,409	88.01
411611	Pendapatan Bea Meterai	29,449,981,000	24,058,059,768	0	24,058,059,768	81.69
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	140,240,868,000	89,368,051,000	0	89,368,051,000	63.72
411613	Pendapatan PPn Batubara	1,191,868,000	153,775,000	0	153,775,000	12.9
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	4,821,621,000	581,355,546	0	581,355,546	12.06
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	15,030,153,000	2,302,564,618	0	2,302,564,618	15.32
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	11,146,954,000	38,436,248,745	42,574,210	38,393,674,535	344.43

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	503,364,000	19,762,374	0	19,762,374	3.93
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	35,322,890	0	35,322,890	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3,061,000	329,880,187	0	329,880,187	10776.88
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	12,980,000	137,038,473	0	137,038,473	1055.77
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	13,700,000	21,135,975	0	21,135,975	154.28
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	364,000	3,314,455	0	3,314,455	910.56
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,416,442	0	1,416,442	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,410,135	0	21,410,135	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3,401,000	0	0	0	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,850	0	1,850	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1600) - KALIMANTAN TIMUR	20,853,992,464,000	20,425,362,570,559	1,242,356,352,064	19,183,006,218,495	408.89
1700	SULAWESI UTARA					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	1,564,654,742	0	1,564,654,742	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	4,144,850	0	4,144,850	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	654,370	0	654,370	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	877,121,931,000	725,802,992,567	0	725,802,992,567	82.75

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 43
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	110,099,730,000	92,111,769,607	1,373,845	92,110,395,762	83.66
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	13,916,886,000	23,068,127,129	0	23,068,127,129	165.76
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	193,979,328,000	167,507,188,131	30,470,505	167,476,717,626	86.34
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	82,920,686,000	36,425,102,109	114,656,776	36,310,445,333	43.79
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	293,630,786,000	223,814,100,196	6,627,422,384	217,186,677,812	73.97
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	10,714,615,000	13,847,300,556	1,678,949,276	12,168,351,280	113.57
411128	Pendapatan PPh Final	784,842,588,000	501,286,891,527	13,443,121	501,273,448,406	63.87
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	7,650,000	10,530,573	77,626,855	(67,096,282)	-877.08
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	520,000	0	520,000	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	1,676,000,400,000	1,602,159,434,021	69,582,969,704	1,532,576,464,317	91.44
411212	Pendapatan PPN Impor	21,966,062,000	37,062,030,796	0	37,062,030,796	168.72
411219	Pendapatan PPN Lainnya	1,984,375,000	257,591,294	0	257,591,294	12.98
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	3,730,020,000	2,378,290,504	0	2,378,290,504	63.76
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	154,779,000	67,005,093	0	67,005,093	43.29
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	443,326,000	382,858,380	0	382,858,380	86.36
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	137,620,000	175,583,240	0	175,583,240	127.59
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	44,524,248,000	60,248,167,843	187,444,184	60,060,723,659	134.89

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 44
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	14,830,082,000	19,091,552,390	0	19,091,552,390	128.74
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	867,799,261	0	867,799,261	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	4,272,623,000	2,991,901,000	0	2,991,901,000	70.02
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	65,787,080,000	44,300,733,091	0	44,300,733,091	67.34
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	292,928,000	124,888,223	0	124,888,223	42.63
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	256,464,323	0	256,464,323	0
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	168,702,937	0	168,702,937	0
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	6,805,308	0	6,805,308	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2,847,000	52,557,000	0	52,557,000	1846.05
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,922,000	105,021,800	0	105,021,800	2133.72
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	600,000	2,750,000	0	2,750,000	458.33
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	113,200,000	0	113,200,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2,000	703,002	0	703,002	35150.1
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,737,443	0	5,737,443	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3,211,000	7,117,100	0	7,117,100	221.65
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1700) - SULAWESI UTARA	4,201,369,327,000	3,556,270,870,406	78,314,356,650	3,477,956,513,756	1,099.57

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
1800	SULAWESI TENGAH					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	2,686,414,598	0	2,686,414,598	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	154,333	0	154,333	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	568,272,995,000	509,250,976,717	58,239,426	509,192,737,291	89.6
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	204,699,865,000	211,779,589,437	29,203,004	211,750,386,433	103.44
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	970,356,000	2,255,843,380	0	2,255,843,380	232.48
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	84,122,073,000	65,467,561,393	90,394,682	65,377,166,711	77.72
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	23,149,074,000	9,092,914,295	24,758,462	9,068,155,833	39.17
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	155,869,378,000	113,689,678,534	1,030,690,816	112,658,987,718	72.28
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	40,566,710,000	26,839,323,751	0	26,839,323,751	66.16
411128	Pendapatan PPh Final	768,353,169,000	510,984,184,322	5,479,891,045	505,504,293,277	65.79
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	26,162,000	54,522,605	0	54,522,605	208.4
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	1,414,455,543,000	1,397,084,707,460	14,737,118,532	1,382,347,588,928	97.73
411212	Pendapatan PPN Impor	3,178,070,000	8,881,654,073	0	8,881,654,073	279.47
411219	Pendapatan PPN Lainnya	226,493,000	97,623,833	0	97,623,833	43.1
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	2,398,582,000	3,779,162,772	0	3,779,162,772	157.56
411222	Pendapatan PPnBM Impor	0	394,546	0	394,546	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	1,356,000	3,367,682	0	3,367,682	248.35
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	12,400,464,000	14,801,735,872	0	14,801,735,872	119.36
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	550,578,000	1,058,323,436	0	1,058,323,436	192.22
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	5,082,173,000	6,688,309,088	0	6,688,309,088	131.6
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	6,737,556,000	8,645,305,112	0	8,645,305,112	128.32
411611	Pendapatan Bea Meterai	3,931,549,000	3,008,796,000	0	3,008,796,000	76.53
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	54,448,874,000	36,024,350,000	0	36,024,350,000	66.16
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	670,339,000	382,611,839	0	382,611,839	57.08
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	56,136,424	0	56,136,424	0
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	2,218,944,048	0	2,218,944,048	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3,878,000	199,379,997	0	199,379,997	5141.31
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,222,000	106,312,207	0	106,312,207	4784.53
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1,600,000	10,150,000	0	10,150,000	634.38
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	61,480,000	0	61,480,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	6,000	6,843,836	0	6,843,836	114063.93
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	422,177	0	422,177	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	403,000	18,051,620	0	18,051,620	4479.31

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	532,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1800) - SULAWESI TENGAH	3,350,120,000,000	2,935,235,225,387	21,450,295,967	2,913,784,929,420	3,872.23
1900	SULAWESI SELATAN					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	5,031,740,116	0	5,031,740,116	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	18,682,740	0	18,682,740	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	147,396,125	0	147,396,125	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	2,331,800,979,000	1,991,688,578,620	46,312,845	1,991,642,265,775	85.41
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	363,508,348,000	281,697,669,168	0	281,697,669,168	77.49
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	166,643,277,000	93,772,385,547	0	93,772,385,547	56.27
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	413,832,274,000	356,976,573,305	40,427,877	356,936,145,428	86.25
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	191,739,626,000	84,449,354,633	481,148,517	83,968,206,116	43.79
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	974,001,463,000	1,004,268,275,620	127,362,744,372	876,905,531,248	90.03
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	36,301,606,000	43,310,813,054	0	43,310,813,054	119.31
411128	Pendapatan PPh Final	2,092,328,872,000	1,548,904,345,441	888,604,074	1,548,015,741,367	73.99
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	13,018,997,000	166,937,121	0	166,937,121	1.28
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	2,414,450	0	2,414,450	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	4,115,043,718,000	4,451,014,265,433	284,912,875,724	4,166,101,389,709	101.24

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411212	Pendapatan PPN Impor	395,406,955,000	398,713,974,984	0	398,713,974,984	100.84
411219	Pendapatan PPN Lainnya	766,384,000	1,146,732,580	0	1,146,732,580	149.63
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	7,040,855,000	9,349,741,814	0	9,349,741,814	132.79
411222	Pendapatan PPnBM Impor	982,109,000	4,860,432	0	4,860,432	0.49
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	7,964,000	128,549,219	0	128,549,219	1614.13
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	8,082,599,000	11,602,832,282	0	11,602,832,282	143.55
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	149,997,000	1,166,855,309	0	1,166,855,309	777.92
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	39,257,300,000	35,109,796,217	0	35,109,796,217	89.44
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	1,576,347,000	1,823,417,377	0	1,823,417,377	115.67
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	7,005,967	0	7,005,967	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	24,650,547,000	21,076,382,000	0	21,076,382,000	85.5
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	136,667,899,000	103,743,705,000	0	103,743,705,000	75.91
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	8,622,595,000	1,070,625,844	0	1,070,625,844	12.42
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	504,536,000	1,694,055,181	0	1,694,055,181	335.76
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	1,659,766,000	1,470,116,369	0	1,470,116,369	88.57
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	500,000	0	500,000	0
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	0	1,772,800	0	1,772,800	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	140,575,333	0	140,575,333	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2,361,000	21,319,500	0	21,319,500	902.99
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	8,681,000	56,629,423	0	56,629,423	652.34
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	303,000	0	0	0	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	77,450,000	34,300,000	0	34,300,000	44.29
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	186,000	502,660,882	0	502,660,882	270247.79
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,000	7,775,362	0	7,775,362	777536.2
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1,750,000	12,047,700	0	12,047,700	688.44
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	12,118,000	7,919,502	0	7,919,502	65.35
	JUMLAH PENDAPATAN (1900) - SULAWESI SELATAN	11,323,697,863,000	10,450,343,582,450	413,732,113,409	10,036,611,469,041	26,364.88
2000	SULAWESI TENGGARA					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	417,289,687	0	417,289,687	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	2,313,182	0	2,313,182	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	75,000	0	75,000	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	538,166,626,000	430,804,317,399	1,700,000	430,802,617,399	80.05
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	106,506,749,000	105,913,966,911	20,248,245	105,893,718,666	99.42
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	645,223,000	1,218,743,878	0	1,218,743,878	188.89

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	90,938,972,000	90,911,589,120	18,711,619	90,892,877,501	99.95
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	19,157,813,000	7,825,200,080	46,948,354	7,778,251,726	40.6
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	13,407,407,000	32,986,478,147	581,398,221	32,405,079,926	241.7
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	3,740,230,000	10,693,884,673	0	10,693,884,673	285.92
411128	Pendapatan PPh Final	432,362,994,000	287,968,359,143	51,662,372	287,916,696,771	66.59
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	9,707,000	14,190,667	0	14,190,667	146.19
411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	0	513,818	0	513,818	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	718,954,449,000	798,858,759,108	24,781,696,322	774,077,062,786	107.67
411212	Pendapatan PPN Impor	3,113,733,000	3,509,229,258	0	3,509,229,258	112.7
411219	Pendapatan PPN Lainnya	451,423,000	262,118,119	0	262,118,119	58.06
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	816,242,000	675,074,901	0	675,074,901	82.71
411222	Pendapatan PPnBM Impor	133,000	0	0	0	0
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	104,170,000	11,762,215	0	11,762,215	11.29
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	6,711,799,000	11,651,895,526	0	11,651,895,526	173.6
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	25,420,000	321,626,000	0	321,626,000	1265.25
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	26,173,863,000	51,837,265,150	0	51,837,265,150	198.05
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	0	34,961,240	0	34,961,240	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	69,834,000	0	0	0	0
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	8,117,803	0	8,117,803	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	2,732,880,000	1,818,050,000	0	1,818,050,000	66.53
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	46,230,086,000	30,858,420,000	0	30,858,420,000	66.75
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	52,401,000	298,787,663	0	298,787,663	570.19
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	277,129,689	0	277,129,689	0
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	158,043,954	0	158,043,954	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	204,000	4,550,000	0	4,550,000	2230.39
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,654,000	11,407,128	0	11,407,128	429.81
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	27,000	0	0	0	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	2,200,000	13,100,000	0	13,100,000	595.45
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	16,000	1,053,644	0	1,053,644	6585.28
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,502,589	0	7,502,589	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2,830,000	0	0	0	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	659,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2000) - SULAWESI TENGGARA	2,010,380,744,000	1,869,375,775,692	25,502,365,133	1,843,873,410,559	363.24
2100	MALUKU					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	313,511,435	0	313,511,435	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	20,791,242	0	20,791,242	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	375,302,422,000	331,649,228,789	0	331,649,228,789	88.37
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	80,086,543,000	51,463,364,547	0	51,463,364,547	64.26
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	8,000,303,000	797,370,456	0	797,370,456	9.97
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	72,536,475,000	48,125,093,966	0	48,125,093,966	66.35
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	22,877,403,000	11,826,932,643	11,601,941	11,815,330,702	51.65
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	195,228,144,000	122,757,413,832	385,444,330	122,371,969,502	62.68
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	342,254,000	7,261,232,378	0	7,261,232,378	2121.59
411128	Pendapatan PPh Final	292,971,563,000	244,605,635,318	3,399,120,806	241,206,514,512	82.33
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	77,410,000	845,945,097	0	845,945,097	1092.81
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	839,868,521,000	790,106,429,540	12,165,051,688	777,941,377,852	92.63
411212	Pendapatan PPN Impor	1,466,702,000	2,398,027,475	0	2,398,027,475	163.5
411219	Pendapatan PPN Lainnya	669,763,000	120,285,061	0	120,285,061	17.96
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	6,445,000	321,399,684	0	321,399,684	4986.81
411222	Pendapatan PPnBM Impor	626,281,000	21,623,005	0	21,623,005	3.45
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	0	767,500	0	767,500	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	1,200,000,000	772,469,265	0	772,469,265	64.37
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	500,000,000	2,914,939,885	0	2,914,939,885	582.99
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	14,211,507,000	436,185,690	0	436,185,690	3.07
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	6,000,000,000	8,230,951,189	0	8,230,951,189	137.18
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	0	577,273,035	0	577,273,035	0
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	495,902,226	0	495,902,226	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	1,133,994,000	2,026,615,000	0	2,026,615,000	178.71
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	25,728,745,000	18,453,900,000	0	18,453,900,000	71.72
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	401,530,903	0	401,530,903	0
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	5,008,019,566	0	5,008,019,566	0
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	36,793,078	0	36,793,078	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	51,610,222	0	51,610,222	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,755,000	0	1,755,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,116,000	11,908,016	0	11,908,016	562.76
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	165,000	0	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	824,000	2,848,239	0	2,848,239	345.66
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4,816,000	6,074,565	0	6,074,565	126.13

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (2100) - MALUKU	1,938,842,396,000	1,652,063,827,847	15,961,218,765	1,636,102,609,082	322.85
2200	BALI					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	2,728,250,016	0	2,728,250,016	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	1,650,959	0	1,650,959	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	42,509,183	0	42,509,183	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	2,383,137,816,000	1,971,049,256,823	94,425,010	1,970,954,831,813	82.7
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	162,117,618,000	128,246,757,841	7,786,000	128,238,971,841	79.1
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	68,913,764,000	72,562,717,089	0	72,562,717,089	105.29
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	398,615,283,000	415,821,702,340	533,447,804	415,288,254,536	104.18
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	367,708,045,000	163,123,423,666	1,428,747,112	161,694,676,554	43.97
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	1,603,588,159,000	1,584,760,163,821	42,960,182,950	1,541,799,980,871	96.15
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	188,603,709,000	206,671,822,284	201,333,070	206,470,489,214	109.47
411128	Pendapatan PPh Final	2,475,062,580,000	2,228,452,884,898	2,655,190,008	2,225,797,694,890	89.93
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	132,858,200,000	598,439,742	0	598,439,742	0.45
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	2,497,222,545,000	2,824,089,588,550	210,288,134,879	2,613,801,453,671	104.67
411212	Pendapatan PPN Impor	104,080,835,000	118,740,204,980	224,197,000	118,516,007,980	113.87
411219	Pendapatan PPN Lainnya	715,654,000	1,073,837,500	0	1,073,837,500	150.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	13,275,673,000	7,863,325,442	0	7,863,325,442	59.23
411222	Pendapatan PPnBM Impor	1,322,953,000	16,480,864	0	16,480,864	1.25
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	671,570,000	334,998,011	0	334,998,011	49.88
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	824,403,000	723,076,793	0	723,076,793	87.71
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	571,729,000	566,503,170	0	566,503,170	99.09
411319	Pendapatan PBB Lainnya	5,641,000	1,123,939,664	0	1,123,939,664	19924.48
411611	Pendapatan Bea Meterai	68,048,634,000	13,676,987,587	0	13,676,987,587	20.1
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	377,102,000	91,197,750,000	0	91,197,750,000	24183.84
411613	Pendapatan PPn Batubara	0	300,000	0	300,000	0
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	40,945,493,000	1,390,793,379	0	1,390,793,379	3.4
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	18,426,097,000	1,581,665,290	397,901,509	1,183,763,781	6.42
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	5,849,950,000	10,060,331,179	9,725,371,700	334,959,479	5.73
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	1,848,000	2,500,000	0	2,500,000	135.28
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	39,342,000	89,243,447	0	89,243,447	226.84
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	9,210,000	85,686,257	0	85,686,257	930.36
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5,402,000	64,308,693	0	64,308,693	1190.46
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	683,984	0	683,984	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	50,200,000	66,049,500	0	66,049,500	131.57
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	7,967,790	0	7,967,790	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,376,436	0	4,376,436	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	5,361,000	9,548,444	0	9,548,444	178.11
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,304,251	0	2,304,251	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2200) - BALI	10,533,054,816,000	9,846,832,029,873	268,516,717,042	9,578,315,312,831	1,305.77
2300	NUSA TENGGARA BARAT					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	574,243,670	0	574,243,670	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	10,588,066	0	10,588,066	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	14,987,043	0	14,987,043	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	798,972,393,000	711,123,685,744	59,678,394	711,064,007,350	89
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	106,415,879,000	73,233,968,005	8,181,818	73,225,786,187	68.81
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	4,590,321,000	18,597,806,060	0	18,597,806,060	405.15
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	155,228,785,000	142,495,826,382	4,355,198	142,491,471,184	91.79
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	46,144,922,000	21,364,557,985	922,663,911	20,441,894,074	44.3
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	233,916,472,000	290,186,501,692	2,495,577,436	287,690,924,256	122.99
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	4,166,783,000	5,545,241,370	0	5,545,241,370	133.08

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411128	Pendapatan PPh Final	587,869,466,000	455,660,113,862	151,108,737	455,509,005,125	77.48
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	42,628,089,000	1,673,764,336	0	1,673,764,336	3.93
411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	223,000	0	223,000	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	1,002,435,053,000	996,439,421,615	38,777,801,566	957,661,620,049	95.53
411212	Pendapatan PPN Impor	5,815,131,000	5,463,252,178	0	5,463,252,178	93.95
411219	Pendapatan PPN Lainnya	331,275,000	316,485,577	0	316,485,577	95.54
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	2,317,872,000	2,089,311,517	0	2,089,311,517	90.14
411222	Pendapatan PPnBM Impor	1,325,358,000	29,529,069	0	29,529,069	2.23
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	3,932,000	609,909	0	609,909	15.51
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	552,506,000	440,398,536	0	440,398,536	79.71
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	702,768,000	957,044,323	0	957,044,323	136.18
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	32,974,600,000	69,301,597,400	0	69,301,597,400	210.17
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	861,873,839	0	861,873,839	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	18,855,960,000	3,742,737,922	0	3,742,737,922	19.85
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	66,791,389,000	53,461,623,000	0	53,461,623,000	80.04
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	448,839,000	468,471,310	0	468,471,310	104.37
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	631,587,000	419,708,507	0	419,708,507	66.45

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	62,621,000	488,103,774	0	488,103,774	779.46
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	714,000	160,152,820	0	160,152,820	22430.37
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7,096,000	19,859,803	0	19,859,803	279.87
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	395,260	0	395,260	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	8,000,000	23,600,000	0	23,600,000	295
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	30,000	2,952,763	0	2,952,763	9842.54
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	16,962,229	0	16,962,229	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	334,500	0	334,500	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	15,117,000	3,061,070	0	3,061,070	20.25
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	3,436,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2300) - NUSA TENGGARA BARAT	3,113,216,394,000	2,855,188,994,136	42,419,367,060	2,812,769,627,076	966.86
2400	NUSA TENGGARA TIMUR					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	335,303,410	0	335,303,410	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	2,412,283	0	2,412,283	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	1,750,871	0	1,750,871	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	704,698,187,000	584,372,463,859	51,457,656	584,321,006,203	82.92
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	138,238,991,000	71,475,772,213	12,493,571	71,463,278,642	51.7

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	627,219,000	3,612,964,003	0	3,612,964,003	576.03
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	79,296,082,000	59,669,111,665	18,189,519	59,650,922,146	75.23
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	35,579,219,000	18,279,128,599	156,651,194	18,122,477,405	50.94
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	209,940,296,000	188,804,319,558	704,319,576	188,099,999,982	89.6
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	206,330,000	2,965,615,330	0	2,965,615,330	1437.32
411128	Pendapatan PPh Final	667,774,928,000	443,559,631,615	557,686,685	443,001,944,930	66.34
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	27,511,000	330,926,841	0	330,926,841	1202.89
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	936,027,574,000	1,075,988,940,735	43,779,755,632	1,032,209,185,103	110.28
411212	Pendapatan PPN Impor	2,112,744,000	6,634,207,865	0	6,634,207,865	314.01
411219	Pendapatan PPN Lainnya	82,494,000	424,914,727	0	424,914,727	515.09
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	611,786,000	1,707,057,620	0	1,707,057,620	279.03
411222	Pendapatan PPnBM Impor	1,000	45,447,475	0	45,447,475	4544747.5
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	7,857,000	0	0	0	0
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	893,849,000	1,673,075,519	0	1,673,075,519	187.18
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	387,351,000	0	0	0	0
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1,670,691,000	780,886,066	0	780,886,066	46.74
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	316,280,000	1,720,339,567	0	1,720,339,567	543.93

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 60
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	873,213,584	0	873,213,584	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	6,224,486,000	1,276,754,500	0	1,276,754,500	20.51
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	45,177,922,000	44,876,820,840	0	44,876,820,840	99.33
411613	Pendapatan PPn Batubara	0	598,968	0	598,968	0
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	18,065,842,000	252,854,704	0	252,854,704	1.4
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	1,188,152,022	0	1,188,152,022	0
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	946,729,347	0	946,729,347	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	541,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,789,000	16,362,700	0	16,362,700	431.85
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1,556,000	0	0	0	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	11,300,000	35,750,000	0	35,750,000	316.37
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	5,701,000	59,665,291	0	59,665,291	1046.58
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	5,328,962	0	5,328,962	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	503,201,259	0	503,201,259	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	281,000	9,029,085	0	9,029,085	3213.2
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	4,121,000	6,180	0	6,180	0.15
	JUMLAH PENDAPATAN (2400) - NUSA TENGGARA TIMUR	2,847,994,929,000	2,512,428,737,263	45,280,553,833	2,467,148,183,430	119,881.74

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
2500	PAPUA					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	2,702,831,569	0	2,702,831,569	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	2,738,768	0	2,738,768	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	126,000	0	126,000	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	2,646,100,341,000	2,341,277,981,812	8,937,565	2,341,269,044,247	88.48
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	156,166,869,000	110,645,965,896	0	110,645,965,896	70.85
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	4,882,801,000	6,524,654,720	0	6,524,654,720	133.63
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	250,939,316,000	236,442,935,858	2,180,180	236,440,755,678	94.22
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	66,558,169,000	25,943,099,821	338,845,143	25,604,254,678	38.47
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	245,344,302,000	191,872,550,123	37,361,933,761	154,510,616,362	62.98
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	8,813,638,000	7,558,282,080	0	7,558,282,080	85.76
411128	Pendapatan PPh Final	950,955,888,000	671,682,828,330	6,673,498	671,676,154,832	70.63
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	88,377,913,000	4,638,317,952	353,755,520	4,284,562,432	4.85
411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	0	1,616,145	0	1,616,145	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	2,269,311,076,000	2,091,288,688,534	195,753,842,284	1,895,534,846,250	83.53
411212	Pendapatan PPN Impor	1,611,803,000	5,799,024,840	0	5,799,024,840	359.78
411219	Pendapatan PPN Lainnya	21,403,699,000	7,785,266,801	0	7,785,266,801	36.37

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	1,648,567,000	2,922,666,517	320,698,570	2,601,967,947	157.83
411222	Pendapatan PPnBM Impor	0	6,231,566	0	6,231,566	0
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	151,723,000	126,065,727	0	126,065,727	83.09
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	22,904,270,000	31,835,470,935	144,379,200	31,691,091,735	138.36
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	8,172,395,000	20,141,971,450	0	20,141,971,450	246.46
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	211,560,019,000	202,437,823,070	0	202,437,823,070	95.69
411611	Pendapatan Bea Meterai	20,986,498,000	3,291,294,000	0	3,291,294,000	15.68
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	35,374,209,000	34,237,062,000	0	34,237,062,000	96.79
411613	Pendapatan PPn Batubara	0	10,350,000	0	10,350,000	0
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	12,728,529,000	494,590,329	0	494,590,329	3.89
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	741,623,000	111,085,363	0	111,085,363	14.98
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	731,895,000	316,265,435	0	316,265,435	43.21
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	1,747,271	0	1,747,271	0
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	2,357,000	1,841,474	0	1,841,474	78.13
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1,734,000	6,530,000	0	6,530,000	376.59
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	13,322,000	205,259,682	0	205,259,682	1540.76
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	1,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	168,075	0	168,075	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1,600,000	400,000	0	400,000	25
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	157,000	42,003	0	42,003	26.75
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	188,400	0	188,400	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	881,089	0	881,089	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	19,890,000	200,000	0	200,000	1.01
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,259,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2500) - PAPUA	7,025,505,863,000	6,000,315,043,635	234,291,245,721	5,766,023,797,914	101.84
2600	BENGKULU					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	1,131,945,304	0	1,131,945,304	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	1,201,950	0	1,201,950	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	426,999,170,000	378,370,061,259	0	378,370,061,259	88.61
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	153,380,111,000	75,308,208,223	1,690,927	75,306,517,296	49.1
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	88,520,000	899,513,826	0	899,513,826	1016.17
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	83,770,378,000	58,027,226,224	0	58,027,226,224	69.27
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	15,678,725,000	6,492,987,620	18,899,673	6,474,087,947	41.29
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	209,947,446,000	177,299,351,457	7,521,539,508	169,777,811,949	80.87

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	3,678,719,000	3,266,521,635	0	3,266,521,635	88.8
411128	Pendapatan PPh Final	272,921,524,000	196,245,238,108	22,420,600	196,222,817,508	71.9
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	77,612,843	0	77,612,843	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	1,015,537,882,000	920,917,462,534	37,462,457,238	883,455,005,296	86.99
411212	Pendapatan PPN Impor	63,353,000	3,020,397,648	0	3,020,397,648	4767.57
411219	Pendapatan PPN Lainnya	0	298,667,901	0	298,667,901	0
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	3,429,389,898	0	3,429,389,898	0
411222	Pendapatan PPnBM Impor	0	39,000	0	39,000	0
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	0	1,622,000	0	1,622,000	0
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	20,553,861,000	28,649,490,277	0	28,649,490,277	139.39
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	125,266,000	307,857,048	0	307,857,048	245.76
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	6,655,965,000	6,486,988,323	0	6,486,988,323	97.46
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	2,315,505,000	2,639,386,062	0	2,639,386,062	113.99
411611	Pendapatan Bea Meterai	22,079,871,000	1,057,000,000	0	1,057,000,000	4.79
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	3,718,253,000	29,925,000,000	0	29,925,000,000	804.81
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	7,075,074,000	351,146,340	0	351,146,340	4.96
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	2,523,152,000	47,241,944	0	47,241,944	1.87

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	72,487,943	0	72,487,943	0
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	500,000	0	500,000	0
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	0	500,000	0	500,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	6,550,000	134,863,049	0	134,863,049	2058.98
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2,102,000	7,450,000	0	7,450,000	354.42
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,062,000	25,600,329	0	25,600,329	422.31
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1,950,000	15,950,000	0	15,950,000	817.95
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	191,961	0	191,961	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	500,000	2,740	0	2,740	0.55
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	5,896,000	3,899,200	0	3,899,200	66.13
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	340	0	340	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2600) - BENGKULU	2,247,135,835,000	1,894,513,002,986	45,027,007,946	1,849,485,995,040	319.28
2800	MALUKU UTARA					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	780,299,249	0	780,299,249	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	216,126	0	216,126	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	180	0	180	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	362,994,665,000	295,412,213,511	1,233,833	295,410,979,678	81.38

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	46,429,384,000	45,211,721,435	0	45,211,721,435	97.38
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	122,083,000	5,660,826,930	0	5,660,826,930	4636.87
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	74,734,150,000	68,903,565,218	97,138,199	68,806,427,019	92.07
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	28,910,859,000	12,807,848,827	270,200	12,807,578,627	44.3
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	36,541,762,000	26,413,242,865	1,503,758,691	24,909,484,174	68.17
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	2,981,306,000	1,379,501,774	0	1,379,501,774	46.27
411128	Pendapatan PPh Final	312,598,527,000	223,005,452,696	27,497,500	222,977,955,196	71.33
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	3,713,289,000	1,732,074,396	0	1,732,074,396	46.65
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	711,691,346,000	706,601,262,217	29,794,595,810	676,806,666,407	95.1
411212	Pendapatan PPN Impor	240,730,000	21,938,972,448	0	21,938,972,448	9113.52
411219	Pendapatan PPN Lainnya	1,366,724,000	51,740,888	0	51,740,888	3.79
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	1,233,317,000	340,794,208	0	340,794,208	27.63
411222	Pendapatan PPnBM Impor	2,151,000	17,000	0	17,000	0.79
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	1,014,517,000	2,181,436,238	0	2,181,436,238	215.02
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	2,635,332,000	1,112,142,160	0	1,112,142,160	42.2
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	10,369,484,000	30,942,914,412	4,834,090,339	26,108,824,073	251.79
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	38,000,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	87,216,000	0	87,216,000	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	954,973,000	45,000,000	0	45,000,000	4.71
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	16,953,701,000	12,255,300,000	0	12,255,300,000	72.29
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	76,282,000	99,367,202	0	99,367,202	130.26
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	6,981,882	0	6,981,882	0
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	173,300,940	0	173,300,940	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	4,200,000	0	4,200,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	163,000	320,000	0	320,000	196.32
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	246,000	3,431,699	0	3,431,699	1395
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	27,000	0	0	0	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	2,900,000	0	2,900,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	714	0	714	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	2,941,447	0	2,941,447	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2800) - MALUKU UTARA	1,615,603,018,000	1,457,157,202,662	36,258,584,572	1,420,898,618,090	492.14
2900	BANTEN					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	19,243,363,341	0	19,243,363,341	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	6,067,800	0	6,067,800	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	25,533,398	0	25,533,398	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	9,277,276,251,000	7,562,676,625,216	7,049,434,780	7,555,627,190,436	81.44
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	415,218,959,000	396,035,300,553	90,304,248	395,944,996,305	95.36
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	2,623,845,873,000	2,264,476,137,983	153,736,000	2,264,322,401,983	86.3
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	1,957,364,129,000	1,687,484,942,734	1,979,578,576	1,685,505,364,158	86.11
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	757,166,565,000	313,299,360,040	1,204,425,679	312,094,934,361	41.22
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	5,002,839,653,000	4,113,489,275,387	482,661,366,896	3,630,827,908,491	72.58
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	1,312,353,178,000	1,110,620,427,163	8,974,800,000	1,101,645,627,163	83.94
411128	Pendapatan PPh Final	6,237,111,374,000	5,307,068,162,935	1,045,850,419	5,306,022,312,516	85.07
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	201,208,563,000	4,285,390,470	120,651,566	4,164,738,904	2.07
411143	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	0	0	2,462,000	(2,462,000)	0
411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	0	0	19,603,014	(19,603,014)	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	15,316,757,429,000	16,686,724,468,395	1,997,056,508,920	14,689,667,959,475	95.91
411212	Pendapatan PPN Impor	7,320,651,157,000	8,985,561,311,519	1,513,148,000	8,984,048,163,519	122.72
411219	Pendapatan PPN Lainnya	17,506,103,000	14,246,581,737	0	14,246,581,737	81.38
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	53,416,102,000	35,729,656,386	137,970,780	35,591,685,606	66.63
411222	Pendapatan PPnBM Impor	137,894,000	1,313,541,315	0	1,313,541,315	952.57

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	2,346,600,000	266,607,480	0	266,607,480	11.36
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	9,499,675,000	7,352,832,665	0	7,352,832,665	77.4
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	5,378,225,000	9,954,404,787	0	9,954,404,787	185.09
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1,637,898,000	7,299,759,473	0	7,299,759,473	445.68
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	569,000	502,400	0	502,400	88.3
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	67,252,656	0	67,252,656	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	154,313,283,000	24,145,277,000	0	24,145,277,000	15.65
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	62,679,811,000	207,403,170,099	0	207,403,170,099	330.89
411613	Pendapatan PPn Batubara	721,189,000	0	0	0	0
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	3,891,388,000	907,860,105	0	907,860,105	23.33
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	25,983,311,000	4,493,241,667	1,775,771,395	2,717,470,272	10.46
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	45,906,586,000	13,907,571,385	0	13,907,571,385	30.3
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	5,422,624	0	5,422,624	0
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	0	1,086,077	0	1,086,077	0
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0	0	0
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	0
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 70
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	16,439,000	330,877,325	0	330,877,325	2012.76
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	64,842,000	139,096,300	0	139,096,300	214.52
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	3,371,000	32,598	0	32,598	0.97
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	10,050,000	36,200,000	0	36,200,000	360.2
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	5,000,000	0	5,000,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	13,000	8,627,550	0	8,627,550	66365.77
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,361,350	0	4,361,350	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	370,000	0	370,000	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	524,000	0	0	0	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,529,000	0	1,529,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2900) - BANTEN	50,805,307,004,000	48,778,617,228,913	2,503,785,612,273	46,274,831,616,640	1,567.96
3000	BANGKA BELITUNG					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	592,063,019	0	592,063,019	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	459,876,867,000	375,852,263,286	26,109,289	375,826,153,997	81.72
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	94,878,422,000	178,855,210,482	109,637,279	178,745,573,203	188.39
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	5,628,663,000	5,087,528,432	0	5,087,528,432	90.39
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	243,463,314,000	142,392,344,872	189,525,884	142,202,818,988	58.41

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	44,409,950,000	19,659,920,626	474,124,029	19,185,796,597	43.2
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	127,894,026,000	160,464,471,597	11,992,259,619	148,472,211,978	116.09
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	15,076,059,000	6,483,577,117	305,536,513	6,178,040,604	40.98
411128	Pendapatan PPh Final	314,501,969,000	268,339,902,519	25,366,833	268,314,535,686	85.31
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	29,476,464,000	1,909,149	0	1,909,149	0.01
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	1,060,452,362,000	851,476,545,819	118,242,754,399	733,233,791,420	69.14
411212	Pendapatan PPN Impor	12,026,322,000	13,500,762,867	0	13,500,762,867	112.26
411219	Pendapatan PPN Lainnya	244,679,000	441,736,202	0	441,736,202	180.54
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	2,732,777,000	782,080,587	0	782,080,587	28.62
411222	Pendapatan PPnBM Impor	0	868,385	0	868,385	0
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	4,803,000	0	0	0	0
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	30,440,966,000	33,764,305,312	590,267,619	33,174,037,693	108.98
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	493,033,000	748,839,656	0	748,839,656	151.88
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	65,817,037,000	69,243,865,518	0	69,243,865,518	105.21
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	8,424,000	0	8,424,000	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	1,494,625,000	1,184,217,000	0	1,184,217,000	79.23
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	23,344,201,000	22,177,561,000	0	22,177,561,000	95

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 72
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	4,370,891,000	167,995,849	0	167,995,849	3.84
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	9,043,903,000	378,792,378	0	378,792,378	4.19
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	3,911,769,000	36,871,560	0	36,871,560	0.94
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	11,949,000	13,578,000	0	13,578,000	113.63
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,136,000	23,986,854	0	23,986,854	579.95
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	34,878,000	0	0	0	0
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	6,400,000	10,425,575	0	10,425,575	162.9
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,418,182	0	1,418,182	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,615,773	0	8,615,773	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	8,924,000	11,522,880	0	11,522,880	129.12
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	987,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3000) - BANGKA BELITUNG	2,549,650,376,000	2,151,711,604,496	131,955,581,464	2,019,756,023,032	79.69
3100	GORONTALO					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	309,634,993	0	309,634,993	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	8,000	0	8,000	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	234,701,928,000	189,942,979,546	23,032,000	189,919,947,546	80.92
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	28,550,402,000	28,621,377,723	16,287,773	28,605,089,950	100.19

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	975,129,000	553,965,818	0	553,965,818	56.81
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	22,599,290,000	20,732,329,662	1,108,000	20,731,221,662	91.73
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	16,719,135,000	6,714,149,385	17,480,316	6,696,669,069	40.05
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	18,826,200,000	25,162,376,886	200,705,993	24,961,670,893	132.59
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	953,214,000	309,967,972	0	309,967,972	32.52
411128	Pendapatan PPh Final	193,043,405,000	110,494,637,445	309,868,651	110,184,768,794	57.08
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	93,927,000	941,381	0	941,381	1
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	421,099,329,000	386,495,674,083	9,135,586,588	377,360,087,495	89.61
411212	Pendapatan PPN Impor	2,285,286,000	1,732,714,749	0	1,732,714,749	75.82
411219	Pendapatan PPN Lainnya	569,240,000	225,082,955	0	225,082,955	39.54
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	232,281,000	398,037,746	0	398,037,746	171.36
411222	Pendapatan PPnBM Impor	0	2,585,127	0	2,585,127	0
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	219,000	0	0	0	0
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	3,533,045,000	4,032,584,263	500,351,445	3,532,232,818	99.98
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	789,399,000	0	0	0	0
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	176,617,000	94,248,800	0	94,248,800	53.36
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	107,885,405	0	107,885,405	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 74
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411611	Pendapatan Bea Meterai	1,910,463,000	1,034,781,000	15,000,000	1,019,781,000	53.38
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	23,968,605,000	15,414,150,000	0	15,414,150,000	64.31
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	204,738,000	82,946,549	0	82,946,549	40.51
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	2,291,333	0	2,291,333	0
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	500,000	0	500,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	6,753,953	0	6,753,953	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	354,000	1,536,620	0	1,536,620	434.07
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	10,400,000	0	0	0	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	386	0	386	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	987,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3100) - GORONTALO	971,243,593,000	792,474,141,780	10,219,420,766	782,254,721,014	55.32
3200	KEPULAUAN RIAU					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	2,072,354,547	0	2,072,354,547	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	1,372,566	0	1,372,566	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	50,000	0	50,000	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	1,729,195,880,000	1,415,811,545,733	10,008,623,880	1,405,802,921,853	81.3
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	78,206,034,000	84,275,916,278	1,653,885	84,274,262,393	107.76

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	88,876,481,000	141,129,593,735	0	141,129,593,735	158.79
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	279,831,534,000	248,245,995,910	9,620,294	248,236,375,616	88.71
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	163,167,349,000	73,992,006,976	36,837,693	73,955,169,283	45.32
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	1,513,922,461,000	1,340,009,571,245	98,622,885,516	1,241,386,685,729	82
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	361,447,158,000	292,495,825,343	7,393,204,694	285,102,620,649	78.88
411128	Pendapatan PPh Final	1,309,200,462,000	1,275,553,030,530	1,413,124,649	1,274,139,905,881	97.32
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	98,340,822,000	4,173,498	0	4,173,498	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	868,911,124,000	826,883,441,312	46,201,013,088	780,682,428,224	89.85
411212	Pendapatan PPN Impor	87,612,023,000	66,138,449,083	0	66,138,449,083	75.49
411219	Pendapatan PPN Lainnya	115,377,000	113,121,741	0	113,121,741	98.05
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	551,952,000	1,074,555,921	0	1,074,555,921	194.68
411222	Pendapatan PPnBM Impor	468,840,000	184,725	0	184,725	0.04
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	11,112,000	30,772,039	0	30,772,039	276.93
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	2,150,904,000	2,012,656,985	0	2,012,656,985	93.57
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	32,620,744,000	32,688,237,157	0	32,688,237,157	100.21
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	1,015,022,000	1,059,313,552	0	1,059,313,552	104.36
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	630,468,423	0	630,468,423	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411611	Pendapatan Bea Meterai	19,030,194,000	5,855,125,645	0	5,855,125,645	30.77
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	54,817,105,000	47,782,278,000	0	47,782,278,000	87.17
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	939,939,000	124,871,171	0	124,871,171	13.29
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	566,302,000	4,314,191,298	0	4,314,191,298	761.82
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	56,777,941	0	56,777,941	0
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	15,162,000	3,357,330	0	3,357,330	22.14
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3,632,000	100,000	0	100,000	2.75
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6,121,000	21,789,042	0	21,789,042	355.97
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	3,100,000	14,200,000	0	14,200,000	458.06
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,467,905	0	3,467,905	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	250,000	0	0	0	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,471,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3200) - KEPULAUAN RIAU	6,691,028,555,000	5,862,398,795,631	163,686,963,699	5,698,711,831,932	103.1
3300	PAPUA BARAT					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	206,883,861	0	206,883,861	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	18,340,050	0	18,340,050	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	492,367,175,000	414,173,324,297	11,902,202	414,161,422,095	84.12

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	85,535,837,000	53,482,979,909	5,870,386	53,477,109,523	62.52
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	3,062,933,000	8,085,029,880	0	8,085,029,880	263.96
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	72,010,965,000	43,500,358,407	1,057,000	43,499,301,407	60.41
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	14,939,927,000	5,913,747,184	7,744,396	5,906,002,788	39.53
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	56,900,647,000	59,395,982,578	172,962,787	59,223,019,791	104.08
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	32,287,583,000	7,103,297,760	0	7,103,297,760	22
411128	Pendapatan PPh Final	725,500,443,000	306,891,364,110	392,400,000	306,498,964,110	42.25
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	167,989,313	0	167,989,313	0
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	1,086,592,681,000	1,258,928,189,624	170,324,466,696	1,088,603,722,928	100.19
411212	Pendapatan PPN Impor	4,676,716,000	4,902,166,374	0	4,902,166,374	104.82
411219	Pendapatan PPN Lainnya	2,497,384,000	1,386,783,975	0	1,386,783,975	55.53
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	2,650,841,000	3,779,339,421	450,000	3,778,889,421	142.55
411222	Pendapatan PPnBM Impor	0	1,435,093	0	1,435,093	0
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	17,312,000	850,000	0	850,000	4.91
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	10,330,797,000	7,231,325,713	0	7,231,325,713	70
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	13,458,802,000	15,903,997,763	0	15,903,997,763	118.17
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	15,535,011,000	931,849,092	0	931,849,092	6

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 78
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	93,526,611,000	97,386,107,900	0	97,386,107,900	104.13
411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	368,860,987	0	368,860,987	0
411611	Pendapatan Bea Meterai	12,214,643,000	1,639,641,000	0	1,639,641,000	13.42
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	28,138,148,000	16,613,025,455	0	16,613,025,455	59.04
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	665,000	2,919,846,703	0	2,919,846,703	439074.69
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	14,963,769	0	14,963,769	0
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	161,663,959	0	161,663,959	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	395,000	2,205,075	0	2,205,075	558.25
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	11,000,000	2,800,000	0	2,800,000	25.45
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,565,100	0	2,565,100	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	543,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3300) - PAPUA BARAT	2,752,257,059,000	2,311,116,914,352	170,916,853,467	2,140,200,060,885	14,229.55
3400	SULAWESI BARAT					
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	704,101,025	0	704,101,025	0
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	2,125,575	0	2,125,575	0
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	26,000	0	26,000	0
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	177,857,072,000	143,013,340,157	8,846,306	143,004,493,851	80.4

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	44,274,221,000	26,386,368,452	0	26,386,368,452	59.6
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	520,505,000	27,234,009	49,700	27,184,309	5.22
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	37,558,855,000	24,918,260,362	728,727	24,917,531,635	66.34
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	4,408,734,000	2,109,516,900	5,304,578	2,104,212,322	47.73
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	4,047,847,000	2,656,584,112	138,240,127	2,518,343,985	62.21
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	446,956,000	4,648,124	0	4,648,124	1.04
411128	Pendapatan PPh Final	161,677,768,000	90,802,524,496	5,110,111	90,797,414,385	56.16
411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	4,164,577,000	325,218	0	325,218	0.01
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	276,674,367,000	303,647,802,088	5,028,756,329	298,619,045,759	107.93
411212	Pendapatan PPN Impor	362,545,000	1,494,005,381	0	1,494,005,381	412.09
411219	Pendapatan PPN Lainnya	64,416,000	45,391,175	0	45,391,175	70.47
411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	2,815,132,000	546,415,018	0	546,415,018	19.41
411222	Pendapatan PPnBM Impor	0	5,600,145	0	5,600,145	0
411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	5,323,000	2,877,505	0	2,877,505	54.06
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	9,136,565,000	11,125,265,752	0	11,125,265,752	121.77
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	333,358,000	794,372,884	0	794,372,884	238.29
411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	30,596,000	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM
Halaman : 80
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	273,281,000	140,254,184	0	140,254,184	51.32
411611	Pendapatan Bea Meterai	1,372,169,000	670,553,000	0	670,553,000	48.87
411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	16,863,932,000	13,231,700,000	0	13,231,700,000	78.46
411613	Pendapatan PPn Batubara	402,995,000	0	0	0	0
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	1,937,637,000	37,912,128	0	37,912,128	1.96
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	16,644,000	31,238,994	0	31,238,994	187.69
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	16,644,000	131,429,110	0	131,429,110	789.65
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	71,851,500	0	71,851,500	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,707,000	193,300	0	193,300	7.14
425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1,050,000	1,850,000	0	1,850,000	176.19
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,492	0	2,492	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4,424,000	0	0	0	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	987,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3400) - SULAWESI BARAT	745,271,307,000	622,603,769,086	5,187,035,878	617,416,733,208	80.71
3500	KALIMANTAN UTARA					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	22,000	253,367	0	253,367	1151.67
	JUMLAH PENDAPATAN (3500) - KALIMANTAN UTARA	22,000	253,367	0	253,367	1,151.67

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 29/04/19 9:17 AM

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN	1,423,999,938,462,000	1,432,222,234,482,300.	118,874,347,242,581	1,313,347,887,239,719.	53,525.12

djp

LAMPIRAN C

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
s.d. 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/04/19 9:11 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,532,578,559,000	1,698,379,293,000	1,677,206,818,285	150,207,692	1,677,056,610,593	98.74	21,322,682,407
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32,650,000	33,413,000	27,072,089	1,085,117	25,986,972	77.78	7,426,028
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	105,395,337,000	110,151,382,000	107,314,845,371	15,309,510	107,299,535,861	97.41	2,851,846,139
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	32,496,568,000	34,172,530,000	32,970,568,082	1,838,182	32,968,729,900	96.48	1,203,800,100
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	46,224,207,000	46,443,615,000	44,746,150,820	10,475,000	44,735,675,820	96.32	1,707,939,180
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	38,783,090,000	43,978,456,000	42,405,730,000	9,295,000	42,396,435,000	96.4	1,582,021,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	9,045,914,000	3,822,028,000	1,682,324,913	0	1,682,324,913	44.02	2,139,703,087
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	92,078,685,000	90,895,579,000	87,773,143,954	3,621,000	87,769,522,954	96.56	3,126,056,046
511129	Belanja Uang Makan PNS	302,073,656,000	305,747,505,000	291,833,303,521	51,545,792	291,781,757,729	95.43	13,965,747,271
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	232,750,000	232,250,000	198,175,000	1,025,000	197,150,000	84.89	35,100,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	2,882,900,000	2,848,920,000	2,802,595,000	17,700,000	2,784,895,000	97.75	64,025,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan	11,284,000	1,084,000	0	0	0	0	1,084,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	109,243,325,000	84,788,795,000	78,081,332,000	166,662,851	77,914,669,149	91.89	6,874,125,851
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,271,078,925,000	2,421,494,850,000	2,367,042,059,035	428,765,144	2,366,613,293,891	97.75	54,881,556,109
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	71,337,433,000	52,226,970,000	33,921,850,022	14,713,150	33,907,136,872	64.92	18,319,833,128
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	71,337,433,000	52,226,970,000	33,921,850,022	14,713,150	33,907,136,872	64.95	18,319,833,128
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,342,416,358,000	2,473,721,820,000	2,400,963,909,057	443,478,294	2,400,520,430,763	97.06	73201389237
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	418,057,399,000	414,235,374,000	403,657,979,488	23,520,110	403,634,459,378	97.44	10,600,914,622
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	5,344,589,000	4,747,165,000	4,340,161,138	0	4,340,161,138	91.43	407,003,862
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	91,078,439,000	120,873,693,000	113,881,838,952	9,450	113,881,829,502	94.22	6,991,863,498
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	70,102,662,000	68,879,489,000	66,691,435,698	22,283,500	66,669,152,198	96.79	2,210,336,802
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	146,165,017,000	131,199,219,000	122,218,490,163	16,820,809	122,201,669,354	93.14	8,997,549,646
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	730,748,106,000	739,934,940,000	710,789,905,439	62,633,869	710,727,271,570	96.06	29,207,668,430
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	136,490,610,000	126,661,611,000	106,736,013,467	34,626,075	106,701,387,392	84.24	19,960,223,608
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	19,725,391,000	18,296,221,000	13,092,133,544	10,500,000	13,081,633,544	71.5	5,214,587,456
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,159,052,615,000	993,270,385,000	968,101,797,590	75,116,425	968,026,681,165	97.46	25,243,703,835
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,315,268,616,000	1,138,228,217,000	1,087,929,944,601	120,242,500	1,087,809,702,101	95.58	50,418,514,899
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	167,799,104,000	187,568,352,000	180,952,383,672	1,001,000	180,951,382,672	96.47	6,616,969,328
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	149,955,900,000	161,792,866,000	161,779,095,800	0	161,779,095,800	99.99	13,770,200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/04/19 9:11 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	902,903,000	930,473,000	396,304,328	0	396,304,328	42.59	534,168,672
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	318,657,907,000	350,291,691,000	343,127,783,800	1,001,000	343,126,782,800	97.95	7,164,908,200
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	201,454,769,000	176,686,016,000	170,451,305,400	0	170,451,305,400	96.47	6,234,710,600
522112	Belanja Langganan Telepon	27,075,571,000	22,498,398,000	20,243,726,352	7,446,057	20,236,280,295	89.95	2,262,117,705
522113	Belanja Langganan Air	9,478,033,000	8,340,143,000	7,466,817,356	0	7,466,817,356	89.53	873,325,644
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	617,400,000	683,572,000	637,590,773	0	637,590,773	93.27	45,981,227
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,907,475,000	1,550,000,000	1,510,025,000	0	1,510,025,000	97.42	39,975,000
522141	Belanja Sewa	238,960,084,000	228,709,507,000	221,207,993,535	0	221,207,993,535	96.72	7,501,513,465
522151	Belanja Jasa Profesi	48,801,109,000	31,412,426,000	20,222,173,731	0	20,222,173,731	64.38	11,190,252,269
522191	Belanja Jasa Lainnya	56,192,385,000	54,424,270,000	51,895,580,307	79,698,638	51,815,881,669	95.21	2,608,388,331
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	584,486,826,000	524,304,332,000	493,635,212,454	87,144,695	493,548,067,759	94.15	30,756,264,241
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179,773,888,000	195,799,981,000	190,599,640,278	116,499,180	190,483,141,098	97.28	5,316,839,902
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	1,086,267,000	939,747,000	804,669,794	0	804,669,794	85.63	135,077,206
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	890,627,000	1,539,840,000	1,436,638,040	0	1,436,638,040	93.3	103,201,960
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	317,130,272,000	263,510,439,000	249,780,909,233	34,818,502	249,746,090,731	94.78	13,764,348,269
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	95,000,000	190,000,000	189,896,355	0	189,896,355	99.95	103,645
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,966,902,000	5,077,016,000	4,314,083,732	2,000,000	4,312,083,732	84.93	764,932,268
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	257,000,000	737,502,000	658,835,244	0	658,835,244	89.33	78,666,756
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	2,366,765,000	4,421,234,000	4,012,154,950	0	4,012,154,950	90.75	409,079,050
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	508,566,721,000	472,215,759,000	451,796,827,626	153,317,682	451,643,509,944	95.68	20,572,249,056
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	587,769,658,000	651,949,926,000	614,740,171,159	730,855,239	614,009,315,920	94.18	37,940,610,080
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82,351,912,000	63,407,933,000	50,388,134,895	45,895,000	50,342,239,895	79.39	13,065,693,105
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,384,800,000	4,245,660,000	2,297,516,738	0	2,297,516,738	54.11	1,948,143,262
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37,560,470,000	37,725,606,000	31,428,993,840	19,888,382	31,409,105,458	83.26	6,316,500,542
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	718,066,840,000	757,329,125,000	698,854,816,632	796,638,621	698,058,178,011	92.28	59,270,946,989
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	11,209,654,000	8,924,380,000	7,722,771,741	281,911,232	7,440,860,509	83.38	1,483,519,491
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	11,209,654,000	8,924,380,000	7,722,771,741	281,911,232	7,440,860,509	86.54	1,483,519,491
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,187,004,670,000	3,991,228,444,000	3,793,857,262,293	1,502,889,599	3,792,354,372,694	95.05	198874071306
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235,016,357,000	340,194,802,000	328,145,727,600	7,348,000	328,138,379,600	96.46	12,056,422,400
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0	9,200,000	8,400,000	0	8,400,000	91.3	800,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/04/19 9:11 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --rekon17

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	192,258,000	464,740,000	428,464,025	0	428,464,025	92.19	36,275,975
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	235,208,615,000	340,668,742,000	328,582,591,625	7,348,000	328,575,243,625	96.45	12,093,498,375
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76,077,980,000	68,349,791,000	64,297,414,043	0	64,297,414,043	94.07	4,052,376,957
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0	80,498,000	14,770,000	0	14,770,000	18.35	65,728,000
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	0	80,134,000	24,631,500	0	24,631,500	30.74	55,502,500
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	130,567,108,000	103,895,186,000	95,477,607,497	2,120,000	95,475,487,497	91.9	8,419,698,503
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	206,645,088,000	172,405,609,000	159,814,423,040	2,120,000	159,812,303,040	92.7	12,593,305,960
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534131	Belanja Modal Jaringan	411,798,000	4,011,959,000	3,951,213,451	0	3,951,213,451	98.49	60,745,549
534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan	0	86,226,000	82,065,500	0	82,065,500	95.17	4,160,500
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	472,753,000	458,018,984	0	458,018,984	96.88	14,734,016
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	411,798,000	4,570,938,000	4,491,297,935	0	4,491,297,935	98.26	79,640,065
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	490,220,752,000	458,992,432,000	48,616,040,300	0	48,616,040,300	10.59	410,376,391,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	490,220,752,000	458,992,432,000	48,616,040,300	0	48,616,040,300	10.59	410,376,391,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	932,486,253,000	976,637,721,000	541,504,352,900	9,468,000	541,494,884,900	55.45	435142836100
	JUMLAH BELANJA	7,461,907,281,000	7,441,587,985,000	6,736,325,524,250	1,955,835,893	6,734,369,688,357	90.52	707,218,296,643

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
0100	DKI JAKARTA							
015408	KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II	13,006,406,000	15,808,146,000	14,319,847,436	585,867	14,319,261,569	90.58	1,488,884,431
015409	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU EMPAT	25,545,006,000	18,645,006,000	16,116,586,712	590	16,116,586,122	86.44	2,528,419,878
015410	KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI EMPAT	12,838,127,000	12,480,982,000	11,447,234,629	5,449,685	11,441,784,944	91.67	1,039,197,056
015412	KPP PRATAMA JAKARTA PESANGGRAHAN	16,499,029,000	16,499,029,000	16,220,926,912	476	16,220,926,436	98.31	278,102,564
119127	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	15,146,546,000	14,846,546,000	13,785,780,409	3,313	13,785,777,096	92.86	1,060,768,904
119131	KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA	13,831,527,000	13,831,527,000	13,179,028,748	4,500,440	13,174,528,308	95.25	656,998,692
119152	KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING	13,631,683,000	14,117,387,000	13,725,169,195	1,777	13,725,167,418	97.22	392,219,582
409411	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK	11,693,252,000	11,691,170,000	10,408,611,503	134,785	10,408,476,718	89.03	1,282,693,282
410078	KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING SATU	13,272,103,000	13,735,764,000	13,236,076,459	6,427	13,236,070,032	96.36	499,693,968
410166	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	22,248,490,000	21,948,490,000	20,223,990,654	33,659,096	20,190,331,558	91.99	1,758,158,442
410248	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT	12,410,639,000	13,047,309,000	12,823,823,023	151,882	12,823,671,141	98.29	223,637,859
410254	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA	10,693,353,000	11,042,328,000	9,363,365,608	3,961,096	9,359,404,512	84.76	1,682,923,488
410430	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT	26,366,289,000	31,223,980,000	30,595,276,433	3,961,220	30,591,315,213	97.97	632,664,787
449761	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA BARAT	11,336,712,000	12,951,724,000	12,564,525,182	1,821	12,564,523,361	97.01	387,200,639
449777	KPP Madya Jakarta Selatan I	10,266,891,000	11,578,062,000	11,256,419,893	2,150	11,256,417,743	97.22	321,644,257
449783	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR	12,325,583,000	12,625,583,000	11,937,101,663	1,395	11,937,100,268	94.55	688,482,732
449792	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA UTARA	10,443,096,000	11,945,414,000	11,043,137,893	2,387	11,043,135,506	92.45	902,278,494
524781	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PLUIT	9,425,546,000	9,837,546,000	9,552,920,859	1,906	9,552,918,953	97.11	284,627,047
560841	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA JATINEGARA	10,304,985,000	10,304,985,000	10,238,163,946	3,619,037	10,234,544,909	99.32	70,440,091
560855	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU	10,879,694,000	11,687,722,000	11,665,060,235	3,032,706	11,662,027,529	99.78	25,694,471
560862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET	13,083,263,000	14,980,448,000	14,430,292,193	31,596,236	14,398,695,957	96.12	581,752,043
560876	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING	11,099,886,000	11,759,562,000	11,525,097,346	1,140	11,525,096,206	98.01	234,465,794
560880	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PENJARINGAN	9,135,061,000	10,341,687,000	10,235,490,649	373,279	10,235,117,370	98.97	106,569,630
560897	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG	11,759,813,000	12,205,601,000	11,229,053,832	724,569	11,228,329,263	91.99	977,271,737
560902	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	10,857,621,000	10,857,621,000	10,199,160,996	2,037	10,199,158,959	93.94	658,462,041
560923	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	10,246,910,000	10,246,910,000	9,857,316,425	32,011,178	9,825,305,247	95.89	421,604,753
560930	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK	10,431,420,000	10,431,420,000	9,827,710,753	210	9,827,710,543	94.21	603,709,457
561012	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN	10,259,404,000	10,397,081,000	9,357,325,544	4,806,080	9,352,519,464	89.95	1,044,561,536
561300	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	8,870,165,000	9,172,298,000	8,640,309,771	1,560	8,640,308,211	94.2	531,989,789
561314	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI	11,598,367,000	11,844,120,000	11,568,499,651	739	11,568,498,912	97.67	275,621,088
561321	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU	13,404,698,000	13,404,698,000	11,711,936,246	4,916,428	11,707,019,818	87.34	1,697,678,182
561335	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN	10,047,267,000	10,887,211,000	10,754,748,002	4,418	10,754,743,584	98.78	132,467,416
561342	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN	11,670,705,000	11,826,547,000	11,544,738,617	2,211	11,544,736,406	97.62	281,810,594
561356	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MAMPANG	9,708,635,000	11,269,823,000	11,173,055,441	1,191	11,173,054,250	99.14	96,768,750
561377	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CILANDAK	11,577,005,000	11,958,022,000	11,696,463,026	373,737	11,696,089,289	97.81	261,932,711

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
561381	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU	11,933,485,000	19,253,960,000	16,344,604,878	1,364,317	16,343,240,561	84.88	2,910,719,439
561398	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIUK	9,544,962,000	10,205,056,000	9,769,053,831	2,282	9,769,051,549	95.73	436,004,451
561403	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU	8,780,076,000	8,780,076,000	8,389,815,348	1,913	8,389,813,435	95.56	390,262,565
561410	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG	10,288,028,000	10,538,983,000	10,020,626,866	931	10,020,625,935	95.08	518,357,065
561424	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SENEN	9,522,604,000	9,522,604,000	9,429,172,264	558	9,429,171,706	99.02	93,432,294
561431	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU	8,385,061,000	8,385,061,000	7,519,229,255	2,861	7,519,226,394	89.67	865,834,606
561445	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR	10,357,461,000	10,357,461,000	9,851,859,598	961	9,851,858,637	95.12	505,602,363
561452	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PALMERAH	10,392,539,000	10,292,539,000	9,203,030,174	374,094	9,202,656,080	89.41	1,089,882,920
561466	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI	8,537,098,000	9,221,002,000	9,217,914,440	464	9,217,913,976	99.97	3,088,024
561470	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMBORA	9,158,448,000	9,726,356,000	9,292,725,708	2,370	9,292,723,338	95.54	433,632,662
561487	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CENGKARENG	9,533,100,000	10,015,100,000	9,890,664,227	371,281	9,890,292,946	98.75	124,807,054
567982	KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN MASUK BURSA	14,790,940,000	14,790,940,000	14,665,242,326	3,272	14,665,239,054	99.15	125,700,946
604392	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA	8,577,272,000	8,749,726,000	8,529,848,246	588	8,529,847,658	97.49	219,878,342
604400	KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING DUA	16,232,787,000	18,215,335,000	17,697,686,332	3,116,694	17,694,569,638	97.14	520,765,362
604414	KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING TIGA	13,777,718,000	14,723,229,000	14,442,923,056	10,957,453	14,431,965,603	98.02	291,263,397
635553	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I	15,182,904,000	15,620,380,000	14,724,098,260	2,038,738	14,722,059,522	94.25	898,320,478
635621	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA	10,771,548,000	11,022,681,000	10,260,549,794	5,050,051	10,255,499,743	93.04	767,181,257
635638	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA	9,979,811,000	11,117,243,000	10,353,878,138	1,112,077	10,352,766,061	93.12	764,476,939
635642	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN	9,679,753,000	10,850,422,000	10,689,400,449	161,226	10,689,239,223	98.51	161,182,777
635659	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PANCORAN	9,960,921,000	11,141,501,000	10,471,048,387	2,674	10,471,045,713	93.98	670,455,287
635663	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN	11,057,722,000	11,177,322,000	9,873,648,837	1,326	9,873,647,511	88.34	1,303,674,489
635670	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KOJA	10,738,560,000	10,982,286,000	9,414,413,405	8,627	9,414,404,778	85.72	1,567,881,222
635684	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GROGOL	11,605,343,000	11,705,343,000	11,412,683,162	1,584	11,412,681,578	97.5	292,661,422
635691	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA	9,399,696,000	9,557,094,000	9,249,815,705	1,733	9,249,813,972	96.78	307,280,028
635706	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG	11,910,784,000	11,910,784,000	11,141,582,758	50	11,141,582,708	93.54	769,201,292
635710	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	12,133,615,000	12,646,015,000	11,900,135,019	911	11,900,134,108	94.1	745,880,892
635727	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA	21,269,901,000	23,487,693,000	23,000,457,954	1,404,076	22,999,053,878	97.92	488,639,122
635731	KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANANAM MODAL ASING EMPAT	14,009,743,000	14,009,743,000	13,396,792,543	1,706,331	13,395,086,212	95.61	614,656,788
635748	KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING LIMA	12,903,566,000	13,712,533,000	13,109,143,881	2,253,763	13,106,890,118	95.58	605,642,882
635972	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	11,875,228,000	11,875,228,000	11,351,007,939	665	11,351,007,274	95.59	524,220,726
635993	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN	9,300,227,000	9,806,232,000	9,142,243,995	2,333	9,142,241,662	93.23	663,990,338
636008	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KALIDERES	10,251,241,000	10,251,241,000	9,872,379,995	4,092,195	9,868,287,800	96.26	382,953,200
636012	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER	11,294,855,000	11,633,855,000	10,754,203,151	742,361	10,753,460,790	92.43	880,394,210
636363	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,169,573,000	1,210,419,000	1,206,649,161	0	1,206,649,161	99.69	3,769,839
648901	KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR	34,159,189,000	42,946,411,000	40,436,489,249	24,993,561	40,411,495,688	94.1	2,534,915,312
648915	KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU	14,184,136,000	14,184,136,000	13,970,775,475	2,042	13,970,773,433	98.5	213,362,567

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
648922	KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA	14,925,318,000	15,201,039,000	14,985,166,142	6,452,759	14,978,713,383	98.54	222,325,617
655476	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	14,208,161,000	13,908,161,000	13,341,750,090	1,777	13,341,748,313	95.93	566,412,687
655480	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA	15,980,280,000	35,880,280,000	33,562,082,985	3,289,048	33,558,793,937	93.53	2,321,486,063
655608	KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI	18,062,389,000	16,666,901,000	16,200,757,813	772,495	16,199,985,318	97.2	466,915,682
655612	KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM	13,423,623,000	13,533,041,000	13,187,332,685	2,282	13,187,330,403	97.45	345,710,597
662791	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT	12,238,221,000	13,027,924,000	12,327,813,692	2,438	12,327,811,254	94.63	700,112,746
662809	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR EMPAT	9,468,284,000	9,468,284,000	8,865,088,817	1,412	8,865,087,405	93.63	603,196,595
662813	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR	12,540,210,000	12,540,210,000	11,101,238,922	7,960,089	11,093,278,833	88.46	1,446,931,167
662820	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	8,570,682,000	8,570,682,000	8,027,012,601	859	8,027,011,742	93.66	543,670,258
662834	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG	10,185,009,000	10,552,839,000	9,075,687,360	188,084	9,075,499,276	86	1,477,339,724
675652	KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	13,959,377,000	13,665,172,000	12,999,390,324	760	12,999,389,564	95.13	665,782,436
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0100	1,012,126,626,000	1,078,072,272,000	1,021,123,361,12	212,341,435	1,020,911,019,686	94.72	57,161,252,314
0199	INSTANSI PUSAT							
100041	KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN JAMBI	12,443,282,000	12,904,595,000	12,023,515,435	2,372,529	12,021,142,906	93.15	883,452,094
119091	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	2,828,626,838,000	2,505,271,392,000	2,040,105,246,958	866,952,909	2,039,238,294,049	81.4	466,033,097,951
672863	KANTOR PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN	54,891,588,000	49,195,854,000	44,543,724,706	20,690	44,543,704,016	90.54	4,652,149,984
689952	KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL	4,890,953,000	4,890,953,000	4,484,648,904	1,665,660	4,482,983,244	91.66	407,969,756
690311	KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN	28,501,959,000	19,584,960,000	18,571,143,756	2,457,853	18,568,685,903	94.81	1,016,274,097
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0199	2,929,354,620,000	2,591,847,754,000	2,119,728,279,75	873,469,641	2,118,854,810,118	81.78	472,992,943,882
0200	JAWA BARAT							
020561	KANWIL DJP JAWA BARAT III	65,428,444,000	70,247,340,000	62,117,694,787	2,564,400	62,115,130,387	88.42	8,132,209,613
025735	KPP PRATAMA BEKASI BARAT	18,355,932,000	18,355,932,000	15,855,493,358	871	15,855,492,487	86.38	2,500,439,513
025736	KPP PRATAMA PONDOK GEDE	16,803,864,000	16,803,864,000	16,472,936,122	1,006	16,472,935,116	98.03	330,928,884
025842	KPP PRATAMA DEPOK SAWANGAN	18,116,423,000	17,106,423,000	15,441,769,033	1,085	15,441,767,948	90.27	1,664,655,052
119326	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	25,816,408,000	25,144,496,000	23,224,699,209	1,484	23,224,697,725	92.36	1,919,798,275
119347	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOGOR	17,569,575,000	17,569,575,000	16,346,858,331	1,885	16,346,856,446	93.04	1,222,718,554
119351	KPP PRATAMA CIREBON SATU	12,033,884,000	21,498,964,000	19,873,517,975	2,104	19,873,515,871	92.44	1,625,448,129
119368	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKABUMI	10,108,440,000	10,492,598,000	10,320,802,204	1,712,208	10,319,089,996	98.35	173,508,004
119372	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARAWANG UTARA	9,473,382,000	10,634,302,000	10,248,648,652	347	10,248,648,305	96.37	385,653,695
119389	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TASIKMALAYA	10,332,678,000	10,876,061,000	10,592,499,157	56	10,592,499,101	97.39	283,561,899
409442	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJALAYA	8,860,062,000	10,073,455,000	9,513,483,566	1,300	9,513,482,266	94.44	559,972,734
409489	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUNINGAN	9,519,842,000	9,888,886,000	9,678,996,976	1,511	9,678,995,465	97.88	209,890,535
409509	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI SELATAN	11,453,070,000	11,952,552,000	11,465,503,396	142,380	11,465,361,016	95.92	487,190,984
409515	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GARUT	9,324,262,000	9,629,262,000	9,344,146,524	94	9,344,146,430	97.04	285,115,570
410084	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG	8,558,039,000	8,558,039,000	8,233,950,234	24,009,781	8,209,940,453	95.93	348,098,547
410260	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAWI	10,134,004,000	10,134,004,000	9,876,400,483	240	9,876,400,243	97.46	257,603,757

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
410449	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIMAHI	11,805,029,000	12,779,797,000	12,356,429,905	2,082	12,356,427,823	96.69	423,369,177
410455	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIANJUR	18,270,060,000	18,270,060,000	17,343,187,618	1,196,046	17,341,991,572	94.92	928,068,428
410461	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWAKARTA	23,593,734,000	23,593,734,000	22,897,811,126	4,329	22,897,806,797	97.05	695,927,203
440910	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI	11,155,297,000	11,742,018,000	11,508,493,772	3,793,352	11,504,700,420	97.98	237,317,580
449803	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BANDUNG	11,788,391,000	12,219,091,000	11,696,398,366	23,807,082	11,672,591,284	95.53	546,499,716
524842	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG	11,412,583,000	11,788,688,000	11,435,723,723	556,043	11,435,167,680	97	353,520,320
524859	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA	10,335,054,000	11,392,275,000	10,763,325,806	738	10,763,325,068	94.48	628,949,932
560951	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES	11,911,899,000	12,704,490,000	12,447,401,954	1,444,992	12,445,956,962	97.97	258,533,038
561051	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALEGA	10,322,936,000	10,322,936,000	10,026,343,079	1,924	10,026,341,155	97.13	296,594,845
561072	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA	10,833,700,000	10,833,700,000	10,535,411,696	1,856	10,535,409,840	97.25	298,290,160
561089	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING	13,301,022,000	13,301,022,000	12,526,390,182	2,149	12,526,388,033	94.18	774,633,967
569069	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,203,021,000	1,203,021,000	1,058,375,004	50	1,058,374,954	87.98	144,646,046
635752	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEPOK	10,050,863,000	10,250,553,000	9,777,990,514	2,550	9,777,987,964	95.39	472,565,036
635769	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBITUNG	10,996,608,000	11,724,524,000	11,459,296,880	1,126	11,459,295,754	97.74	265,228,246
635773	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CICADAS	10,075,703,000	10,564,598,000	10,160,425,522	2,180	10,160,423,342	96.17	404,174,658
636040	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOREANG	10,473,728,000	10,473,728,000	10,227,926,556	1,129	10,227,925,427	97.65	245,802,573
636054	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA INDRAMAYU	9,253,479,000	10,073,900,000	9,532,113,592	1,213,683	9,530,899,909	94.61	543,000,091
636061	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG SELATAN	10,987,440,000	11,837,850,000	11,809,248,858	605,644	11,808,643,214	99.75	29,206,786
636075	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEUNGSI	13,978,936,000	13,978,936,000	12,670,269,541	103,964	12,670,165,577	90.64	1,308,770,423
636096	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARAWANG SELATAN	10,325,055,000	11,310,321,000	10,916,926,285	1,478	10,916,924,807	96.52	393,396,193
636427	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,125,322,000	1,728,428,000	1,684,823,446	773	1,684,822,673	97.48	43,605,327
655497	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	19,915,868,000	20,691,775,000	20,015,283,496	20,421,240	19,994,862,256	96.63	696,912,744
655523	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA	10,417,639,000	10,417,639,000	10,416,366,325	1,014	10,416,365,311	99.99	1,273,689
655565	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBANG	9,151,258,000	9,656,377,000	9,417,087,565	3,046	9,417,084,519	97.52	239,292,481
663555	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAMIS	10,376,573,000	10,847,017,000	10,697,548,097	4,451,396	10,693,096,701	98.58	153,920,299
689210	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	1,036,875,000	1,148,288,000	1,134,088,009	0	1,134,088,009	98.76	14,199,991
690239	KPP PRATAMA CIREBON DUA	1,040,311,000	1,040,311,000	889,226,481	64	889,226,417	85.48	151,084,583
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0200	547,026,693,000	574,860,830,000	544,011,313,405	86,060,682	543,925,252,723	94.63	30,935,577,277
0300	JAWA TENGAH							
119436	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	20,725,539,000	20,425,539,000	19,908,294,976	3,103,160	19,905,191,816	97.45	520,347,184
119440	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR	9,466,011,000	9,466,011,000	9,318,772,749	2,161	9,318,770,588	98.44	147,240,412
119457	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS	10,388,504,000	11,262,612,000	11,166,079,462	283,007	11,165,796,455	99.14	96,815,545
119461	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEGAL	12,524,378,000	12,524,378,000	11,907,600,437	1,076	11,907,599,361	95.08	616,778,639
119478	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKALONGAN	11,809,052,000	11,809,052,000	11,117,540,742	2,542	11,117,538,200	94.14	691,513,800
119482	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG	11,969,635,000	12,411,175,000	11,744,224,255	2,992	11,744,221,263	94.63	666,953,737
119499	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA	11,937,635,000	12,674,627,000	12,270,323,043	1,217	12,270,321,826	96.81	404,305,174

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
119504	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOKERTO	15,003,113,000	14,674,256,000	14,064,586,958	1,258,064	14,063,328,894	95.84	610,927,106
409546	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA	7,727,539,000	7,727,539,000	7,074,204,645	1,645	7,074,203,000	91.55	653,336,000
409552	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	8,816,843,000	8,933,789,000	8,668,573,992	201,303	8,668,372,689	97.03	265,416,311
409561	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWOREJO	10,108,246,000	10,479,081,000	10,094,896,786	2,443,685	10,092,453,101	96.31	386,627,899
409577	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLORA	10,743,472,000	10,743,472,000	10,321,437,389	9,102,358	10,312,335,031	95.99	431,136,969
409583	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR	10,999,905,000	11,581,219,000	11,445,096,681	406,451	11,444,690,230	98.82	136,528,770
409592	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN	10,292,339,000	11,117,473,000	10,993,027,000	19,198,076	10,973,828,924	98.71	143,644,076
410305	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG	8,823,015,000	10,640,510,000	10,339,030,925	6,051	10,339,024,874	97.17	301,485,126
410351	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT	9,238,545,000	10,236,679,000	10,066,320,997	4,591,916	10,061,729,081	98.29	174,949,919
410418	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEPARA	9,332,592,000	9,820,308,000	9,776,059,264	1,764	9,776,057,500	99.55	44,250,500
410424	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURBALINGGA	10,123,295,000	10,221,382,000	10,164,203,082	3,974	10,164,199,108	99.44	57,182,892
410470	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI	11,695,925,000	11,981,925,000	11,189,552,656	1,280,473	11,188,272,183	93.38	793,652,817
410486	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEBUMEN	9,831,193,000	10,495,884,000	10,104,259,979	3,325	10,104,256,654	96.27	391,627,346
410492	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO	11,774,262,000	12,264,439,000	12,143,682,624	1,260,789	12,142,421,835	99.01	122,017,165
449812	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG	11,571,825,000	13,202,065,000	13,081,972,247	1,423	13,081,970,824	99.09	120,094,176
524931	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SALATIGA	10,246,556,000	10,246,556,000	9,908,060,679	8,313,811	9,899,746,868	96.62	346,809,132
524948	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILACAP	12,421,160,000	13,117,114,000	12,911,636,476	76,506	12,911,559,970	98.43	205,554,030
550318	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,161,913,000	1,161,913,000	1,123,885,591	300	1,123,885,291	96.73	38,027,709
550432	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,286,571,000	1,286,571,000	1,243,636,290	90	1,243,636,200	96.66	42,934,800
560965	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI	8,964,242,000	9,206,670,000	8,854,816,796	1,030	8,854,815,766	96.18	351,854,234
569094	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,323,362,000	1,323,362,000	1,172,207,379	1,007,000	1,171,200,379	88.5	152,161,621
569102	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	1,167,381,000	1,254,152,000	1,225,084,444	556	1,225,083,888	97.68	29,068,112
569137	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	1,043,910,000	1,043,910,000	1,003,650,321	118	1,003,650,203	96.14	40,259,797
569158	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	1,091,517,000	1,091,517,000	1,080,646,319	0	1,080,646,319	99	10,870,681
569162	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	986,672,000	1,246,672,000	1,060,365,968	0	1,060,365,968	85.06	186,306,032
635780	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU	7,681,965,000	7,681,965,000	6,928,289,977	2,307	6,928,287,670	90.19	753,677,330
636118	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DEMAK	9,227,267,000	9,445,007,000	9,049,725,913	151,644	9,049,574,269	95.81	395,432,731
636473	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	938,358,000	938,358,000	825,909,909	0	825,909,909	88.02	112,448,091
636480	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	1,169,549,000	1,229,300,000	1,201,609,370	450,000	1,201,159,370	97.71	28,140,630
663562	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG SELATAN	7,912,075,000	7,912,075,000	7,652,148,616	2,036	7,652,146,580	96.71	259,928,420
663576	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATANG	10,612,482,000	11,169,189,000	10,966,074,291	600,709	10,965,473,582	98.18	203,715,418
663597	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI	9,361,713,000	9,948,386,000	9,725,297,520	3,464	9,725,294,056	97.76	223,091,944
668465	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	20,389,833,000	20,089,833,000	16,884,228,010	8,837,150	16,875,390,860	84	3,214,442,140
675535	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,249,531,000	1,318,732,000	1,295,093,387	0	1,295,093,387	98.21	23,638,613
675542	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,357,301,000	1,221,451,000	1,075,142,437	27	1,075,142,410	88.02	146,308,590
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0300	354,496,221,000	366,626,148,000	352,147,250,582	62,604,200	352,084,646,382	96.05	14,541,501,618

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
0400	DI YOGYAKARTA							
119525	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA	13,188,208,000	13,188,208,000	12,013,927,137	2,058	12,013,925,079	91.1	1,174,282,921
466065	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL	9,794,101,000	11,009,602,000	10,904,431,964	3,453,295	10,900,978,669	99.01	108,623,331
550481	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATES	7,517,116,000	11,028,477,000	10,097,259,736	472	10,097,259,264	91.56	931,217,736
550500	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WONOSARI	8,621,581,000	8,621,581,000	8,195,161,716	3,063	8,195,158,653	95.05	426,422,347
635794	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN	12,337,107,000	12,337,107,000	12,109,641,057	1,717	12,109,639,340	98.16	227,467,660
655502	KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	20,859,430,000	20,816,999,000	18,590,036,348	1,258,338	18,588,778,010	89.3	2,228,220,990
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0400	72,317,543,000	77,001,974,000	71,910,457,958	4,718,943	71,905,739,015	93.39	5,096,234,985
0500	JAWA TIMUR							
119532	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	26,777,973,000	26,818,983,000	25,519,363,271	191	25,519,363,080	95.15	1,299,619,920
119546	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	7,110,381,000	7,365,448,000	7,310,633,526	1,612	7,310,631,914	99.26	54,816,086
119567	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GUBENG	9,180,735,000	9,616,780,000	9,491,404,447	1,307	9,491,403,140	98.7	125,376,860
119571	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MOJOKERTO	10,283,795,000	17,054,222,000	15,947,002,799	0	15,947,002,799	93.51	1,107,219,201
119588	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONEGORO	7,910,864,000	8,346,004,000	8,212,984,217	20,018,131	8,192,966,086	98.17	153,037,914
119592	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN	8,441,685,000	9,300,811,000	9,236,206,568	293	9,236,206,275	99.31	64,604,725
119600	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDIRI	9,140,814,000	9,140,814,000	8,966,062,422	1,321,669	8,964,740,753	98.07	176,073,247
119614	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN	9,326,080,000	9,850,372,000	9,790,953,639	3,615	9,790,950,024	99.4	59,421,976
119621	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER	9,842,897,000	9,842,897,000	9,488,039,860	3,074	9,488,036,786	96.39	354,860,214
409603	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NGAWI	8,391,961,000	8,391,961,000	8,025,589,922	118	8,025,589,804	95.63	366,371,196
409612	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE	10,295,088,000	10,591,595,000	10,255,963,462	2,202,437	10,253,761,025	96.81	337,833,975
409634	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO SELATAN	9,368,735,000	9,704,463,000	9,515,206,521	3,791	9,515,202,730	98.05	189,260,270
409665	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKALAN	7,752,625,000	8,137,806,000	7,976,096,981	390,645	7,975,706,336	98.01	162,099,664
409671	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA	9,133,257,000	9,889,846,000	9,734,242,230	2,367	9,734,239,863	98.43	155,606,137
409680	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	879,592,000	891,142,000	854,927,000	0	854,927,000	95.94	36,215,000
409696	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SITUBONDO	9,364,329,000	9,364,329,000	8,910,194,582	2,092	8,910,192,490	95.15	454,136,510
410311	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK SELATAN	9,010,356,000	9,499,056,000	9,389,693,123	0	9,389,693,123	98.85	109,362,877
410506	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PROBOLINGGO	11,316,941,000	11,000,884,000	10,621,745,690	4,505,589	10,617,240,101	96.51	383,643,899
410512	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI	9,874,202,000	11,088,965,000	11,085,995,540	2,318,117	11,083,677,423	99.95	5,287,577
410619	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA	8,749,496,000	9,302,541,000	9,301,415,332	3,933	9,301,411,399	99.99	1,129,601
410631	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASURUAN	12,029,336,000	11,679,336,000	11,505,375,383	5,828,752	11,499,546,631	98.46	179,789,369
449828	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO	11,097,439,000	11,255,026,000	11,118,199,952	0	11,118,199,952	98.78	136,826,048
449834	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA	10,186,198,000	10,186,198,000	9,718,385,607	884,765	9,717,500,842	95.4	468,697,158
449840	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG	10,977,926,000	10,977,926,000	10,824,656,148	1,661	10,824,654,487	98.6	153,271,513
525041	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO BARAT	9,013,146,000	9,823,987,000	9,734,070,813	194,098	9,733,876,715	99.08	90,110,285
525097	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	829,135,000	829,135,000	801,766,744	164	801,766,580	96.7	27,368,420
525123	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGOSARI	10,587,260,000	10,102,026,000	9,886,466,744	796,350	9,885,670,394	97.86	216,355,606

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
548954	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAMEKASAN	7,572,786,000	8,337,930,000	8,063,594,191	512,032	8,063,082,159	96.7	274,847,841
550591	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TUBAN	8,038,349,000	8,815,538,000	8,725,571,399	2,633,858	8,722,937,541	98.95	92,600,459
550631	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	1,310,529,000	1,310,529,000	1,207,483,880	0	1,207,483,880	92.14	103,045,120
550680	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	839,606,000	938,794,000	855,106,260	0	855,106,260	91.09	83,687,740
550741	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	1,074,155,000	1,074,155,000	1,041,283,258	0	1,041,283,258	96.94	32,871,742
550812	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	1,091,864,000	1,091,864,000	1,085,196,338	0	1,085,196,338	99.39	6,667,662
560972	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GENTENG	9,321,085,000	9,448,485,000	9,135,541,436	7,482,020	9,128,059,416	96.61	320,425,584
560986	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	10,542,727,000	10,774,127,000	9,856,029,257	1,746,919	9,854,282,338	91.46	919,844,662
561509	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	7,473,435,000	7,714,294,000	7,444,284,033	2,506,272	7,441,777,761	96.47	272,516,239
569179	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	1,077,137,000	1,125,681,000	1,121,953,516	615	1,121,952,901	99.67	3,728,099
569205	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	921,354,000	916,340,000	897,889,870	0	897,889,870	97.99	18,450,130
604421	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA	9,701,573,000	10,651,814,000	10,575,837,837	1,364,475	10,574,473,362	99.27	77,340,638
635574	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	21,699,935,000	21,524,127,000	19,146,598,782	977,108	19,145,621,674	88.95	2,378,505,326
635802	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA PABEAN	7,570,613,000	7,570,613,000	7,117,276,525	2,006	7,117,274,519	94.01	453,338,481
635816	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA SIMOKERTO	7,314,707,000	7,314,707,000	6,891,444,771	1,574	6,891,443,197	94.21	423,263,803
635820	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	8,453,856,000	8,453,856,000	8,227,404,481	3,178,520	8,224,225,961	97.28	229,630,039
635837	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	8,725,342,000	9,481,495,000	9,253,863,336	897	9,253,862,439	97.6	227,632,561
635841	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO UTARA	9,831,900,000	10,664,063,000	10,596,902,561	2,105	10,596,900,456	99.37	67,162,544
635858	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TULUNGAGUNG	10,147,571,000	10,447,607,000	10,070,043,013	2,574	10,070,040,439	96.39	377,566,561
635862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU	8,439,553,000	8,595,274,000	7,361,650,138	89,788	7,361,560,350	85.65	1,233,713,650
636139	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA	10,561,218,000	10,561,218,000	10,274,897,808	3,268,590	10,271,629,218	97.26	289,588,782
636143	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	8,805,027,000	8,805,027,000	8,780,402,923	1,018	8,780,401,905	99.72	24,625,095
636150	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLITAR	9,265,271,000	9,295,499,000	8,866,542,817	4,159,676	8,862,383,141	95.34	433,115,859
636164	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	1,286,336,000	1,286,336,000	1,268,201,335	0	1,268,201,335	98.59	18,134,665
636502	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	1,036,795,000	1,036,795,000	873,612,851	0	873,612,851	84.26	163,182,149
636520	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	730,129,000	730,129,000	691,421,406	0	691,421,406	94.7	38,707,594
636537	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	844,378,000	844,378,000	805,060,698	0	805,060,698	95.34	39,317,302
655519	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	22,183,187,000	21,137,448,000	20,122,895,213	0	20,122,895,213	95.2	1,014,552,787
663619	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAMONGAN	8,656,772,000	7,849,509,000	7,656,255,232	1,816	7,656,253,416	97.54	193,255,584
663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	7,846,921,000	7,846,921,000	7,814,289,333	101,443	7,814,187,890	99.58	32,733,110
663630	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEPANJEN	10,025,908,000	9,909,908,000	9,702,471,762	2,381	9,702,469,381	97.91	207,438,619
673240	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,092,303,000	1,092,303,000	1,077,695,186	0	1,077,695,186	98.66	14,607,814
673254	KPP PRATAMA JOMBANG	1,561,706,000	2,172,562,000	1,804,802,230	100,356	1,804,701,874	83.07	367,860,126
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0500	481,916,274,000	498,871,879,000	481,636,146,199	66,620,814	481,569,525,385	96.55	17,302,353,615
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
119642	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH	10,941,082,000	16,670,962,000	15,766,522,287	23,684,850	15,742,837,437	94.43	928,124,563

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
409722	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LANGSA	8,527,964,000	9,346,057,000	8,835,749,228	1,028	8,835,748,200	94.54	510,308,800
409731	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAPAKTUAN	7,006,516,000	7,166,337,000	6,978,481,750	1,667	6,978,480,083	97.38	187,856,917
410367	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUN	8,422,876,000	9,817,519,000	8,579,722,181	706	8,579,721,475	87.39	1,237,797,525
410521	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LHOKSEUMAWE	8,298,440,000	9,497,896,000	9,211,522,416	5,046	9,211,517,370	96.98	286,378,630
525144	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEULABOH	8,192,391,000	9,123,292,000	9,052,827,605	558,475	9,052,269,130	99.22	71,022,870
525151	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	768,998,000	967,850,000	962,236,468	0	962,236,468	99.42	5,613,532
548975	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	749,682,000	749,682,000	732,991,269	0	732,991,269	97.77	16,690,731
548982	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	940,020,000	1,035,139,000	1,028,666,204	0	1,028,666,204	99.37	6,472,796
636260	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	735,777,000	735,777,000	726,169,937	0	726,169,937	98.69	9,607,063
663410	KANTOR WILAYAH DJP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	14,302,911,000	15,531,848,000	14,789,358,950	941,044	14,788,417,906	95.21	743,430,094
663487	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBULUSSALAM	6,753,435,000	7,907,523,000	7,591,105,362	741,002	7,590,364,360	95.99	317,158,640
663690	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	603,326,000	603,326,000	602,403,148	0	602,403,148	99.85	922,852
681841	KPP PRATAMA ACEH BESAR	545,786,000	545,786,000	451,350,023	0	451,350,023	82.7	94,435,977
681858	KP2KP CALANG	0	791,984,000	744,349,878	0	744,349,878	93.99	47,634,122
681862	KP2KP SUKA MAKMUR	715,977,000	715,977,000	685,804,714	4,500,000	681,304,714	95.16	34,672,286
681879	KP2KP SINABANG	685,675,000	740,883,000	636,448,272	0	636,448,272	85.9	104,434,728
681883	KP2KP BLANGKEJERAN	768,240,000	768,240,000	649,310,320	0	649,310,320	84.52	118,929,680
681890	KP2KP TAKENGON	712,460,000	712,460,000	628,718,790	151	628,718,639	88.25	83,741,361
681905	KP2KP RIMBA RAYA	691,425,000	691,425,000	660,640,357	11,100	660,629,257	95.55	30,795,743
681912	KP2KP ACEH SINGKIL	744,198,000	809,495,000	783,433,590	0	783,433,590	96.78	26,061,410
681926	KP2KP LHOKSUKON	815,810,000	815,810,000	810,953,538	0	810,953,538	99.4	4,856,462
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0600	81,922,989,000	95,745,268,000	90,908,766,287	30,445,069	90,878,321,218	94.95	4,866,946,782
0700	SUMATERA UTARA							
119660	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	27,824,060,000	28,194,380,000	27,614,289,991	1,454	27,614,288,537	97.94	580,091,463
119677	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT	11,025,936,000	12,526,859,000	12,377,395,022	727,280	12,376,667,742	98.8	150,191,258
119698	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEMATANG SIANTAR	8,170,302,000	8,664,880,000	8,182,470,870	27	8,182,470,843	94.43	482,409,157
409747	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	1,236,502,000	1,408,392,000	1,263,197,933	0	1,263,197,933	89.69	145,194,067
409753	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	1,181,923,000	1,181,923,000	1,023,097,791	0	1,023,097,791	86.56	158,825,209
410141	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KISARAN	8,597,733,000	9,750,286,000	9,484,833,183	4,788,000	9,480,045,183	97.23	270,240,817
410181	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BALIGE	7,665,836,000	8,061,847,000	7,801,554,593	1,816	7,801,552,777	96.77	260,294,223
410537	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI	8,513,738,000	9,198,553,000	8,917,834,133	362,392	8,917,471,741	96.94	281,081,259
410543	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RANTAU PRAPAT	7,878,464,000	8,863,490,000	8,839,916,162	981	8,839,915,181	99.73	23,574,819
449746	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MEDAN	9,931,805,000	11,180,896,000	10,662,853,166	6,273,198	10,656,579,968	95.31	524,316,032
524270	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN	9,576,230,000	10,617,200,000	10,326,006,699	2,458	10,326,004,241	97.26	291,195,759
525165	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	9,549,719,000	9,967,169,000	9,832,403,392	3,550	9,832,399,842	98.65	134,769,158
525172	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	1,170,556,000	1,170,556,000	1,111,936,805	0	1,111,936,805	94.99	58,619,195

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 9
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
525190	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH	9,484,983,000	10,299,023,000	10,207,907,852	1,073	10,207,906,779	99.12	91,116,221
525208	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	1,118,027,000	1,118,027,000	1,020,448,169	0	1,020,448,169	91.27	97,578,831
549061	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	1,197,917,000	1,651,055,000	1,379,295,781	0	1,379,295,781	83.54	271,759,219
551050	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	992,135,000	1,133,868,000	1,128,183,426	0	1,128,183,426	99.5	5,684,574
560820	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI	10,619,462,000	11,907,118,000	11,539,254,634	5,099	11,539,249,535	96.91	367,868,465
561520	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR	10,244,902,000	11,150,436,000	9,912,785,000	911	9,912,784,089	88.9	1,237,651,911
568931	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	1,033,493,000	1,031,993,000	994,102,211	0	994,102,211	96.33	37,890,789
635581	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA	8,803,988,000	10,190,727,000	9,993,453,346	1,818,270	9,991,635,076	98.05	199,091,924
635595	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA	8,849,146,000	10,345,084,000	9,905,461,879	360,804	9,905,101,075	95.75	439,982,925
635926	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA	9,606,870,000	10,212,239,000	9,712,809,206	0	9,712,809,206	95.11	499,429,794
636281	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	954,503,000	954,503,000	850,307,314	555,000	849,752,314	89.03	104,750,686
636295	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	1,039,139,000	1,039,139,000	1,000,022,889	0	1,000,022,889	96.24	39,116,111
636300	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	943,150,000	1,102,240,000	885,370,496	0	885,370,496	80.32	216,869,504
655551	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	1,770,756,000	1,770,756,000	1,687,350,292	537	1,687,349,755	95.29	83,406,245
663424	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	16,990,846,000	16,398,785,000	15,892,498,159	185,027	15,892,313,132	96.91	506,471,868
663491	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHE	7,783,577,000	8,361,683,000	8,197,421,173	2,898	8,197,418,275	98.04	164,264,725
663509	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM	11,138,181,000	11,846,307,000	11,333,205,233	3,516	11,333,201,717	95.67	513,105,283
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0700	214,893,879,000	231,299,414,000	223,077,666,800	15,094,291	223,062,572,509	96.45	8,236,841,491
0800	SUMATERA BARAT							
085568	KPP PRATAMA PADANG DUA	9,530,871,000	9,530,871,000	9,126,424,898	8,512,370	9,117,912,528	95.67	412,958,472
119710	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU	10,080,401,000	10,473,737,000	10,429,517,664	1,740	10,429,515,924	99.58	44,221,076
409762	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	781,762,000	781,762,000	722,203,087	0	722,203,087	92.38	59,558,913
409778	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH	7,093,277,000	7,624,482,000	7,443,557,279	318	7,443,556,961	97.63	180,925,039
477590	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,450,377,000	1,327,368,000	1,316,968,457	0	1,316,968,457	99.22	10,399,543
477601	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,004,613,000	945,360,000	891,789,540	57	891,789,483	94.33	53,570,517
477610	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	939,644,000	1,094,706,000	1,082,009,710	62	1,082,009,648	98.84	12,696,352
524287	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI	9,418,905,000	10,050,615,000	9,839,572,244	3,148	9,839,569,096	97.9	211,045,904
525212	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK	8,895,140,000	9,501,683,000	9,218,151,301	3,008	9,218,148,293	97.02	283,534,707
549078	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,059,172,000	1,059,172,000	998,544,913	0	998,544,913	94.28	60,627,087
549082	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	949,424,000	1,070,108,000	998,318,712	0	998,318,712	93.29	71,789,288
551128	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	800,682,000	800,682,000	758,055,526	246	758,055,280	94.68	42,626,720
551132	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	658,373,000	658,373,000	645,786,148	0	645,786,148	98.09	12,586,852
551181	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,035,877,000	1,035,877,000	1,008,701,849	0	1,008,701,849	97.38	27,175,151
568945	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	891,170,000	854,839,000	850,171,881	0	850,171,881	99.45	4,667,119
568952	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	973,489,000	1,136,593,000	1,054,673,571	0	1,054,673,571	92.79	81,919,429
568966	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	704,412,000	704,412,000	646,396,678	0	646,396,678	91.76	58,015,322

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 10
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
663431	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	16,966,881,000	18,136,526,000	17,632,050,545	4,791,536	17,627,259,009	97.19	509,266,991
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0800	73,234,470,000	76,787,166,000	74,662,894,003	13,312,485	74,649,581,518	97.23	2,137,584,482
0900	RIAU							
119731	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN	9,736,733,000	10,433,899,000	10,326,305,793	61,922,726	10,264,383,067	98.38	169,515,933
409784	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG	9,516,380,000	10,448,276,000	10,351,147,030	2,171	10,351,144,859	99.07	97,131,141
410552	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DUMAI	10,017,799,000	10,782,939,000	10,582,554,912	16,269,645	10,566,285,267	97.99	216,653,733
410568	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RENGAT	9,764,954,000	10,220,699,000	10,106,096,852	1,274,917	10,104,821,935	98.87	115,877,065
410625	KANWIL DJP RIAU	24,858,990,000	38,567,506,000	34,962,555,795	1,171	34,962,554,624	90.65	3,604,951,376
440904	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU	10,693,264,000	11,888,452,000	11,705,727,416	4,024	11,705,723,392	98.46	182,728,608
549125	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	836,875,000	836,875,000	829,526,422	0	829,526,422	99.12	7,348,578
551238	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,178,783,000	1,178,783,000	1,072,376,000	252	1,072,375,748	90.97	106,407,252
568991	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	719,329,000	719,329,000	700,242,722	0	700,242,722	97.35	19,086,278
569006	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,062,320,000	1,062,320,000	836,800,106	0	836,800,106	78.77	225,519,894
569010	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	0	1,012,910,000	952,878,906	0	952,878,906	94.07	60,031,094
635600	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	10,879,533,000	11,576,123,000	11,370,276,393	2,441	11,370,273,952	98.22	205,849,048
635947	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS	31,573,412,000	15,017,825,000	14,717,988,620	1,220,289	14,716,768,331	98	301,056,669
636317	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,035,581,000	1,035,581,000	939,055,754	0	939,055,754	90.68	96,525,246
636321	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,176,839,000	1,176,839,000	1,041,827,092	0	1,041,827,092	88.53	135,011,908
663513	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN KERINCI	9,618,518,000	10,418,610,000	9,989,872,173	76,206,286	9,913,665,887	95.15	504,944,113
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0900	132,669,310,000	136,376,966,000	130,485,231,986	156,903,922	130,328,328,064	95.68	6,048,637,936
1000	JAMBI							
119766	KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA	11,216,654,000	21,136,398,000	20,587,670,508	10,688,029	20,576,982,479	97.35	559,415,521
410336	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,087,267,000	947,937,000	872,351,725	152	872,351,573	92.03	75,585,427
410373	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKO	7,873,994,000	8,877,134,000	8,644,011,792	500	8,644,011,292	97.37	233,122,708
477581	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	882,746,000	923,453,000	904,468,512	560	904,467,952	97.94	18,985,048
525282	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,062,003,000	1,062,003,000	851,837,874	1,910,000	849,927,874	80.03	212,075,126
549132	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA BUNGO	8,260,376,000	9,796,972,000	8,993,721,695	2,671	8,993,719,024	91.8	803,252,976
549146	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	593,903,000	681,682,000	664,916,280	0	664,916,280	97.54	16,765,720
549150	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	976,249,000	976,249,000	836,528,621	0	836,528,621	85.69	139,720,379
569027	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	663,724,000	663,724,000	621,649,827	0	621,649,827	93.66	42,074,173
636338	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	716,939,000	785,367,000	769,146,017	0	769,146,017	97.93	16,220,983
663520	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUALA TUNGKAL	7,206,040,000	7,793,751,000	7,647,331,541	5,582	7,647,325,959	98.12	146,425,041
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1000	40,539,895,000	53,644,670,000	51,393,634,392	12,607,494	51,381,026,898	95.8	2,263,643,102
1100	SUMATERA SELATAN							
119770	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN	25,536,491,000	25,136,491,000	24,603,415,367	11,475,211	24,591,940,156	97.83	544,550,844
409810	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KAYU AGUNG	9,763,954,000	10,350,591,000	9,237,720,866	788	9,237,720,078	89.25	1,112,870,922

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 11
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
410291	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LAHAT	6,884,461,000	7,959,216,000	7,851,640,438	1,895	7,851,638,543	98.65	107,577,457
410382	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRABUMULIH	13,767,499,000	15,002,123,000	13,688,086,661	1,556	13,688,085,105	91.24	1,314,037,895
410574	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATURAJA	8,598,638,000	9,559,880,000	9,536,651,814	1,076	9,536,650,738	99.76	23,229,262
449752	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG	10,204,985,000	10,708,710,000	9,944,829,107	3,728,360	9,941,100,747	92.83	767,609,253
525296	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK LINGGAU	7,050,125,000	8,015,810,000	7,954,894,512	360,634	7,954,533,878	99.24	61,276,122
549167	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	854,065,000	854,065,000	773,012,091	0	773,012,091	90.51	81,052,909
551394	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	910,147,000	910,147,000	796,217,444	0	796,217,444	87.48	113,929,556
560834	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG	8,461,008,000	9,465,972,000	9,124,128,838	160,475	9,123,968,363	96.39	342,003,637
561541	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	9,375,436,000	10,906,726,000	10,704,468,813	3,780	10,704,465,033	98.15	202,260,967
569031	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	947,811,000	982,526,000	947,608,586	0	947,608,586	96.45	34,917,414
635617	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT	8,263,338,000	10,441,237,000	10,260,841,661	4,575,314	10,256,266,347	98.23	184,970,653
636342	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,166,631,000	1,166,631,000	939,866,491	0	939,866,491	80.56	226,764,509
663534	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEKAYU	8,189,932,000	9,726,973,000	9,290,730,611	2,528	9,290,728,083	95.52	436,244,917
673343	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,129,420,000	1,191,308,000	1,188,976,314	9	1,188,976,305	99.8	2,331,695
673350	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	728,633,000	764,833,000	715,722,344	623,328	715,099,016	93.5	49,733,984
673364	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	988,754,000	1,058,503,000	1,011,090,516	150	1,011,090,366	95.52	47,412,634
673371	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	906,860,000	1,080,062,000	1,058,608,047	106	1,058,607,941	98.01	21,454,059
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1100	123,728,188,000	135,281,804,000	129,628,510,521	20,935,210	129,607,575,311	95.82	5,674,228,689
1200	LAMPUNG							
119813	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG KARANG	10,109,774,000	10,703,147,000	10,550,604,154	2,860,790	10,547,743,364	98.55	155,403,636
409835	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NATAR	10,285,331,000	11,401,258,000	11,143,016,227	631,016	11,142,385,211	97.73	258,872,789
410129	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEDATON	7,427,150,000	8,164,217,000	8,065,673,935	6,702,023	8,058,971,912	98.71	105,245,088
410398	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTABUMI	8,525,923,000	9,215,454,000	9,149,437,735	541,176	9,148,896,559	99.28	66,557,441
477626	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	897,134,000	897,134,000	884,459,319	600	884,458,719	98.59	12,675,281
477632	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,421,800,000	1,448,844,000	1,434,920,593	528	1,434,920,065	99.04	13,923,935
477641	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,063,185,000	1,259,219,000	1,182,420,281	30	1,182,420,251	93.9	76,798,749
477657	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	971,956,000	1,121,722,000	1,093,635,648	426	1,093,635,222	97.5	28,086,778
525322	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA METRO	9,532,027,000	9,835,227,000	9,638,521,744	3,190	9,638,518,554	98	196,708,446
525350	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TELUK BETUNG	7,358,634,000	8,145,710,000	8,030,095,254	2,458	8,030,092,796	98.58	115,617,204
549200	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,040,487,000	1,327,134,000	1,286,423,032	0	1,286,423,032	96.93	40,710,968
569052	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,019,105,000	1,019,105,000	996,435,877	358	996,435,519	97.78	22,669,481
636359	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,161,545,000	1,161,545,000	1,156,292,291	0	1,156,292,291	99.55	5,252,709
663445	KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	21,283,124,000	20,983,124,000	20,304,511,560	1,421,724	20,303,089,836	96.76	680,034,164
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1200	82,097,175,000	86,682,840,000	84,916,447,650	12,164,319	84,904,283,331	97.96	1,778,556,669
1300	KALIMANTAN BARAT							
119820	KPP PRATAMA PONTIANAK BARAT	10,757,897,000	18,209,029,000	17,927,829,293	2,922,651	17,924,906,642	98.44	284,122,358

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 12
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
409841	KANTOR PELAYANAN PAJAKPRATAMA MEMPAWAH	9,999,573,000	9,999,573,000	8,433,711,692	2,009,084	8,431,702,608	84.32	1,567,870,392
410599	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGKAWANG	9,650,343,000	10,165,683,000	9,435,704,322	2,760	9,435,701,562	92.82	729,981,438
525364	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT	16,586,578,000	17,116,477,000	16,058,807,126	2,557,678	16,056,249,448	93.81	1,060,227,552
525371	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,145,531,000	1,403,327,000	1,400,979,096	740,279	1,400,238,817	99.78	3,088,183
525385	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,178,136,000	1,259,880,000	1,226,825,249	92	1,226,825,157	97.38	33,054,843
549221	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINTANG	7,463,673,000	10,442,994,000	10,096,746,794	9,197,714	10,087,549,080	96.6	355,444,920
551512	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KETAPANG	8,578,016,000	9,108,559,000	8,708,565,230	4,072,680	8,704,492,550	95.56	404,066,450
551530	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,236,798,000	1,236,798,000	1,076,167,663	640	1,076,167,023	87.01	160,630,977
551551	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,816,295,000	1,901,520,000	1,696,979,701	370,000	1,696,609,701	89.22	204,910,299
569226	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,111,200,000	1,246,636,000	1,184,429,002	380	1,184,428,622	95.01	62,207,378
636171	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SANGGAU	8,514,214,000	8,699,674,000	8,096,197,353	743,346	8,095,454,007	93.05	604,219,993
636541	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,265,715,000	1,265,715,000	1,002,392,280	0	1,002,392,280	79.2	263,322,720
636558	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,046,361,000	1,177,060,000	1,143,056,593	0	1,143,056,593	97.11	34,003,407
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1300	80,350,330,000	93,232,925,000	87,488,391,394	22,617,304	87,465,774,090	93.84	5,767,150,910
1400	KALIMANTAN TENGAH							
119841	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMPIT	8,002,758,000	9,445,013,000	9,221,886,720	545,927	9,221,340,793	97.63	223,672,207
409850	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MUARA TEWEH	6,727,670,000	7,973,494,000	7,831,582,277	371,874	7,831,210,403	98.22	142,283,597
410320	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	889,073,000	844,909,000	798,938,314	426	798,937,888	94.56	45,971,112
477462	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	634,532,000	1,176,821,000	1,069,454,901	0	1,069,454,901	90.88	107,366,099
525392	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALANGKARAYA	9,911,077,000	10,576,248,000	10,343,366,043	4,440,188	10,338,925,855	97.76	237,322,145
525407	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,017,166,000	1,017,166,000	858,433,313	0	858,433,313	84.39	158,732,687
525411	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	804,128,000	955,456,000	929,804,587	0	929,804,587	97.32	25,651,413
549256	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	872,085,000	963,333,000	928,570,819	0	928,570,819	96.39	34,762,181
551572	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	775,006,000	945,271,000	923,668,087	177	923,667,910	97.71	21,603,090
551593	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,158,312,000	1,158,312,000	1,131,029,589	0	1,131,029,589	97.64	27,282,411
569251	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,174,044,000	1,327,910,000	1,287,105,619	0	1,287,105,619	96.93	40,804,381
636562	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	948,206,000	1,122,022,000	997,078,355	0	997,078,355	88.86	124,943,645
636579	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	715,220,000	715,220,000	691,943,050	1,295,306	690,647,744	96.56	24,572,256
663644	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKALAN BUN	11,573,736,000	11,573,736,000	9,862,609,036	3,471,617	9,859,137,419	85.19	1,714,598,581
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1400	45,203,013,000	49,794,911,000	46,875,470,710	10,125,515	46,865,345,195	94.14	2,929,565,805
1500	KALIMANTAN SELATAN							
119855	KPP PRATAMA BANJARMASIN UTARA	11,122,465,000	15,706,985,000	14,250,217,155	12,693,286	14,237,523,869	90.64	1,469,461,131
409866	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG	7,722,095,000	9,999,619,000	9,475,639,095	4,216,728	9,471,422,367	94.72	528,196,633
409872	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BARABAI	6,217,174,000	7,962,214,000	7,824,106,644	1,307,160	7,822,799,484	98.25	139,414,516
549260	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,106,187,000	1,309,607,000	1,258,435,672	124	1,258,435,548	96.09	51,171,452
551640	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	907,789,000	907,789,000	855,771,076	141,750	855,629,326	94.25	52,159,674

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
551657	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	730,499,000	730,499,000	694,898,770	0	694,898,770	95.13	35,600,230
551682	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	739,955,000	975,756,000	931,322,916	224	931,322,692	95.45	44,433,308
551732	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	676,704,000	774,527,000	750,603,538	0	750,603,538	96.91	23,923,462
569268	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	803,039,000	1,143,776,000	1,108,057,677	0	1,108,057,677	96.88	35,718,323
635485	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	639,137,000	853,895,000	837,640,194	0	837,640,194	98.1	16,254,806
635492	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	897,290,000	1,011,250,000	991,306,625	350	991,306,275	98.03	19,943,725
635883	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARBARU	10,239,033,000	11,529,089,000	11,502,499,528	922	11,502,498,606	99.77	26,590,394
655572	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATULICIN	10,468,189,000	10,463,189,000	10,241,180,465	1,110,604	10,240,069,861	97.87	223,119,139
663466	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN	15,214,111,000	23,814,400,000	22,891,615,638	3,341,648	22,888,273,990	96.11	926,126,010
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1500	67,483,667,000	87,182,595,000	83,613,294,993	22,812,796	83,590,482,197	95.91	3,592,112,803
1600	KALIMANTAN TIMUR							
119110	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR	21,975,193,000	21,675,193,000	20,271,790,307	500,000	20,271,290,307	93.52	1,403,902,693
119880	KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR	12,075,110,000	17,590,959,000	16,739,185,223	120,118	16,739,065,105	95.16	851,893,895
119897	KPP PRATAMA BALIKPAPAN TIMUR	9,496,351,000	22,299,909,000	22,008,991,757	3,771,839	22,005,219,918	98.68	294,689,082
119902	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TARAKAN	8,758,717,000	9,439,101,000	9,286,181,010	2,416	9,286,178,594	98.38	152,922,406
409881	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TENGGARONG	12,088,323,000	12,355,367,000	12,105,871,346	0	12,105,871,346	97.98	249,495,654
409897	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PENAJAM	8,976,419,000	8,976,419,000	7,909,739,384	2,358,000	7,907,381,384	88.09	1,069,037,616
409901	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG REDEB	11,166,867,000	11,650,476,000	11,273,303,303	115,424	11,273,187,879	96.76	377,288,121
449859	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN	10,109,321,000	10,624,279,000	9,963,054,017	3,205	9,963,050,812	93.78	661,228,188
551771	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,533,948,000	1,533,948,000	1,393,762,527	280	1,393,762,247	90.86	140,185,753
635464	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,130,717,000	1,350,051,000	1,114,605,179	0	1,114,605,179	82.56	235,445,821
635471	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,981,501,000	1,981,501,000	1,828,241,863	0	1,828,241,863	92.27	153,259,137
635879	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BONTANG	8,931,288,000	9,284,088,000	8,521,766,324	4,950,114	8,516,816,210	91.74	767,271,790
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1600	108,223,755,000	128,761,291,000	122,416,492,240	11,821,396	122,404,670,844	95.07	6,356,620,156
1700	SULAWESI UTARA							
119862	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO	11,370,236,000	12,200,985,000	11,562,855,904	388,510	11,562,467,394	94.77	638,517,606
409917	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG	11,757,156,000	12,743,590,000	12,335,699,705	1,471,659	12,334,228,046	96.79	409,361,954
410172	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO	22,522,710,000	22,991,815,000	21,677,755,697	74,579,854	21,603,175,843	93.96	1,388,639,157
549277	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,293,512,000	1,699,005,000	1,570,917,534	300	1,570,917,234	92.46	128,087,766
551792	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	984,801,000	1,299,052,000	1,292,206,416	600	1,292,205,816	99.47	6,846,184
551821	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,130,231,000	1,130,231,000	1,080,956,959	0	1,080,956,959	95.64	49,274,041
569272	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	2,012,736,000	1,277,842,000	1,195,685,478	0	1,195,685,478	93.57	82,156,522
636207	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TAHUNA	6,001,623,000	6,681,087,000	6,599,505,060	3,332,583	6,596,172,477	98.73	84,914,523
663665	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTAMOBAGU	9,534,809,000	9,635,803,000	9,248,977,603	353,354	9,248,624,249	95.98	387,178,751
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1700	66,607,814,000	69,659,410,000	66,564,560,356	80,126,860	66,484,433,496	95.56	3,174,976,504
1800	SULAWESI TENGAH							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 14
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
119919	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU	11,166,736,000	11,737,318,000	11,737,020,115	372,705	11,736,647,410	99.99	670,590
409932	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,140,111,000	1,140,111,000	1,086,463,750	210	1,086,463,540	95.29	53,647,460
525495	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK	7,671,050,000	8,038,737,000	7,973,069,777	3,142	7,973,066,635	99.18	65,670,365
551877	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,092,132,000	1,092,132,000	953,091,509	144	953,091,365	87.27	139,040,635
561555	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	895,461,000	895,461,000	793,645,114	0	793,645,114	88.63	101,815,886
636211	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOLI-TOLI	7,840,761,000	7,917,161,000	7,267,324,881	500	7,267,324,381	91.79	649,836,619
636228	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO	7,293,014,000	7,293,014,000	6,765,744,843	5,616,898	6,760,127,945	92.69	532,886,055
673322	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,030,381,000	1,075,381,000	1,039,785,846	550	1,039,785,296	96.69	35,595,704
673339	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,075,106,000	1,075,106,000	1,023,253,830	185,000	1,023,068,830	95.16	52,037,170
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1800	39,204,752,000	40,264,421,000	38,639,399,665	6,179,149	38,633,220,516	95.96	1,631,200,484
1900	SULAWESI SELATAN							
119923	KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN	25,132,819,000	24,832,819,000	22,002,115,068	15,176,463	21,986,938,605	88.54	2,845,880,395
119930	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA	9,353,528,000	10,309,050,000	10,017,359,709	11,450	10,017,348,259	97.17	291,701,741
409948	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT	9,927,123,000	11,019,903,000	10,558,380,875	23,450,466	10,534,930,409	95.6	484,972,591
409954	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,154,425,000	1,274,016,000	1,246,720,879	0	1,246,720,879	97.86	27,295,121
409960	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATAMPONE	8,636,518,000	9,617,920,000	9,352,876,403	722,928	9,352,153,475	97.24	265,766,525
410600	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE-PARE	31,544,574,000	31,115,545,000	29,750,567,253	0	29,750,567,253	95.61	1,364,977,747
449865	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR	11,085,610,000	12,041,515,000	11,940,506,795	188,510	11,940,318,285	99.16	101,196,715
477663	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	917,320,000	1,004,104,000	1,000,304,753	0	1,000,304,753	99.62	3,799,247
477672	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	912,266,000	912,266,000	778,541,593	0	778,541,593	85.34	133,724,407
477688	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,392,244,000	1,448,801,000	1,427,590,806	1,267	1,427,589,539	98.54	21,211,461
477694	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,083,096,000	1,273,142,000	1,234,202,481	472	1,234,202,009	96.94	38,939,991
525521	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	918,714,000	967,119,000	930,850,375	556,000	930,294,375	96.19	36,824,625
525538	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,661,490,000	2,058,894,000	1,687,257,691	956	1,687,256,735	81.95	371,637,265
549303	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALOPO	11,124,479,000	11,477,692,000	10,438,812,411	6,396,136	10,432,416,275	90.89	1,045,275,725
549310	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG	8,428,870,000	8,938,961,000	8,755,319,439	1,446,473	8,753,872,966	97.93	185,088,034
551910	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,204,829,000	1,242,689,000	1,194,742,845	5,363,340	1,189,379,505	95.71	53,309,495
551945	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	899,826,000	1,153,085,000	1,083,550,076	0	1,083,550,076	93.97	69,534,924
551966	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,048,820,000	1,546,249,000	1,512,699,369	0	1,512,699,369	97.83	33,549,631
552027	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	969,317,000	1,037,440,000	979,589,774	478	979,589,296	94.42	57,850,704
569289	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,089,346,000	1,124,935,000	1,109,807,880	296	1,109,807,584	98.66	15,127,416
569293	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	944,920,000	1,052,868,000	992,537,274	16	992,537,258	94.27	60,330,742
635507	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,155,322,000	1,155,322,000	1,116,139,848	422	1,116,139,426	96.61	39,182,574
635890	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN	9,266,064,000	10,974,462,000	10,865,931,401	10,331,827	10,855,599,574	98.92	118,862,426
636192	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS	8,902,262,000	9,434,727,000	9,092,085,133	364,000	9,091,721,133	96.36	343,005,867
663651	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BULUKUMBA	7,625,147,000	8,311,230,000	7,394,089,335	0	7,394,089,335	88.97	917,140,665

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 15
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
689891	KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN	12,241,926,000	19,288,317,000	17,112,173,661	3,433	17,112,170,228	88.72	2,176,146,772
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1900	168,620,855,000	184,613,071,000	173,574,753,127	64,014,933	173,510,738,194	94.02	11,102,332,806
2000	SULAWESI TENGGARA							
409979	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOLAKA	8,946,902,000	8,576,902,000	7,998,368,772	1,837	7,998,366,935	93.25	578,535,065
409985	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BAU BAU	9,288,535,000	11,005,838,000	10,281,554,250	41,690,657	10,239,863,593	93.04	765,974,407
477720	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	993,644,000	1,063,003,000	1,023,680,335	504	1,023,679,831	96.3	39,323,169
524313	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI	9,912,851,000	10,934,935,000	10,526,300,627	948,626	10,525,352,001	96.25	409,582,999
552073	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,091,592,000	898,818,000	837,496,363	0	837,496,363	93.18	61,321,637
552094	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,006,027,000	1,078,542,000	1,004,803,512	1,870,000	1,002,933,512	92.99	75,608,488
569301	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	949,212,000	1,034,081,000	987,524,662	0	987,524,662	95.5	46,556,338
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2000	32,188,763,000	34,592,119,000	32,659,728,521	44,511,624	32,615,216,897	94.41	1,976,902,103
2100	MALUKU							
119965	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON	17,337,973,000	17,337,973,000	15,885,111,455	3,252,493	15,881,858,962	91.6	1,456,114,038
549331	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,579,170,000	1,656,833,000	1,507,641,788	260	1,507,641,528	91	149,191,472
549345	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,929,356,000	2,007,218,000	1,817,313,340	0	1,817,313,340	90.54	189,904,660
673190	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,454,081,000	1,454,081,000	1,285,819,432	0	1,285,819,432	88.43	168,261,568
673208	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,672,253,000	1,995,825,000	1,906,419,333	66	1,906,419,267	95.52	89,405,733
673212	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,520,842,000	1,714,651,000	1,630,880,184	0	1,630,880,184	95.11	83,770,816
673229	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,455,940,000	1,455,940,000	1,406,967,515	0	1,406,967,515	96.64	48,972,485
673233	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,851,436,000	1,961,964,000	1,877,499,268	741,602	1,876,757,666	95.66	85,206,334
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2100	28,801,051,000	29,584,485,000	27,317,652,315	3,994,421	27,313,657,894	92.34	2,270,827,106
2200	BALI							
119972	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR BARAT	10,360,444,000	9,465,552,000	9,099,920,335	3,011	9,099,917,324	96.14	365,634,676
410016	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TABANAN	8,636,215,000	9,800,223,000	9,350,153,768	3,996,598	9,346,157,170	95.37	454,065,830
410135	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG SELATAN	9,009,246,000	9,327,081,000	9,049,650,160	2,345,296	9,047,304,864	97	279,776,136
440929	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR	10,839,530,000	15,763,191,000	12,657,648,037	2,400	12,657,645,637	80.3	3,105,545,363
524320	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA	7,718,211,000	8,169,358,000	7,770,043,347	1,002,405	7,769,040,942	95.1	400,317,058
525584	KANTOR WILAYAH DJP BALI	15,956,739,000	16,351,825,000	15,214,621,637	664,275	15,213,957,362	93.04	1,137,867,638
525606	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GIANYAR	9,863,319,000	9,393,672,000	9,162,957,432	843,596	9,162,113,836	97.53	231,558,164
552183	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	717,061,000	717,061,000	644,741,023	0	644,741,023	89.91	72,319,977
552212	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	573,235,000	675,568,000	625,858,679	0	625,858,679	92.64	49,709,321
552226	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	861,834,000	861,834,000	817,600,927	372	817,600,555	94.87	44,233,445
635528	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI	697,390,000	737,234,000	672,454,463	358	672,454,105	91.21	64,779,895
635905	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR	7,812,797,000	8,338,191,000	8,162,781,443	3,481,464	8,159,299,979	97.85	178,891,021
636232	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA	12,042,574,000	12,456,307,000	12,156,421,946	2,125,150	12,154,296,796	97.58	302,010,204
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2200	95,088,595,000	102,057,097,000	95,384,853,197	14,464,925	95,370,388,272	93.46	6,686,708,728

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 16
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
2300	NUSA TENGGARA BARAT							
119986	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM BARAT	9,288,143,000	10,154,808,000	9,574,339,279	73,160	9,574,266,119	94.28	580,541,881
410022	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MATARAM TIMUR	8,081,744,000	8,968,976,000	8,781,384,570	2,058	8,781,382,512	97.91	187,593,488
525610	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RABA BIMA	9,362,538,000	9,575,163,000	9,194,852,256	11,049,937	9,183,802,319	95.91	391,360,681
525627	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PRAYA	10,473,007,000	10,473,007,000	10,036,036,960	3,701,719	10,032,335,241	95.79	440,671,759
552247	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,044,116,000	1,044,116,000	998,273,372	190	998,273,182	95.61	45,842,818
552251	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,268,326,000	1,654,663,000	1,648,520,888	977,196	1,647,543,692	99.57	7,119,308
552272	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,088,267,000	1,356,801,000	1,316,483,048	601	1,316,482,447	97.03	40,318,553
636249	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	973,808,000	973,808,000	929,972,475	472	929,972,003	95.5	43,835,997
655530	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMBAWA BESAR	10,230,724,000	10,422,921,000	9,844,489,657	2,224,049	9,842,265,608	94.43	580,655,392
663470	KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	17,744,141,000	17,744,141,000	15,289,050,040	27	15,289,050,013	86.16	2,455,090,987
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2300	69,554,814,000	72,368,404,000	67,613,402,545	18,029,409	67,595,373,136	93.43	4,773,030,864
2400	NUSA TENGGARA TIMUR							
119990	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG	13,615,695,000	14,264,235,000	14,220,259,880	4,652,424	14,215,607,456	99.66	48,627,544
410047	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ATAMBUA	9,117,116,000	10,514,583,000	10,071,912,466	5,081	10,071,907,385	95.79	442,675,615
410053	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RUTENG	0	7,742,414,000	7,632,979,142	3,885,601	7,629,093,541	98.54	113,320,459
525631	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAUMERE	8,790,879,000	10,716,460,000	10,491,794,004	4,384	10,491,789,620	97.9	224,670,380
525669	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,243,061,000	1,243,061,000	881,755,357	0	881,755,357	70.93	361,305,643
549370	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ENDE	8,498,610,000	10,641,731,000	8,607,438,932	1,243,271	8,606,195,661	80.87	2,035,535,339
549387	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	828,684,000	828,684,000	694,358,952	0	694,358,952	83.79	134,325,048
549409	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,094,396,000	1,159,359,000	1,113,199,115	0	1,113,199,115	96.02	46,159,885
552301	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,053,287,000	1,053,287,000	1,018,811,140	0	1,018,811,140	96.73	34,475,860
552357	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,032,320,000	1,032,320,000	863,413,008	0	863,413,008	83.64	168,906,992
552382	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,008,027,000	1,666,954,000	1,664,348,963	0	1,664,348,963	99.84	2,605,037
561576	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	860,224,000	1,250,794,000	1,227,416,820	0	1,227,416,820	98.13	23,377,180
636253	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WAINGAPU	7,280,764,000	8,313,365,000	7,612,432,117	3,087	7,612,429,030	91.57	700,935,970
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2400	54,423,063,000	70,427,247,000	66,100,119,896	9,793,848	66,090,326,048	93.86	4,336,920,952
2500	PAPUA							
409382	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAYAPURA	11,520,111,000	12,588,332,000	12,323,288,354	3,298,201	12,319,990,153	97.87	268,341,847
410232	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIAK	10,703,361,000	11,153,239,000	10,772,774,115	2,546,415	10,770,227,700	96.57	383,011,300
525673	KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU	18,328,708,000	18,028,708,000	17,034,332,714	13,489,136	17,020,843,578	94.41	1,007,864,422
549441	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	2,077,511,000	2,077,511,000	1,755,148,767	0	1,755,148,767	84.48	322,362,233
549455	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,712,529,000	1,712,529,000	1,698,248,286	544	1,698,247,742	99.17	14,281,258
549462	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,407,102,000	1,407,102,000	1,321,826,936	610	1,321,826,326	93.94	85,275,674
655544	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIMIKA	9,945,566,000	9,945,566,000	9,208,977,129	2,851,216	9,206,125,913	92.57	739,440,087
663672	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MERAUKE	9,269,260,000	9,515,440,000	8,859,153,953	685	8,859,153,268	93.1	656,286,732

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 17
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
673151	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,568,191,000	1,568,191,000	1,265,104,696	0	1,265,104,696	80.67	303,086,304
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2500	66,532,339,000	67,996,618,000	64,238,854,950	22,186,807	64,216,668,143	94.47	3,779,949,857
2600	BENGKULU							
409402	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU	8,511,866,000	9,255,366,000	9,132,105,931	1,975,094	9,130,130,837	98.65	125,235,163
410342	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA ARGAMAKMUR	7,040,416,000	7,991,092,000	7,932,089,928	1,288,644	7,930,801,284	99.25	60,290,716
525694	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	923,220,000	1,130,963,000	1,125,552,560	0	1,125,552,560	99.52	5,410,440
549476	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	865,294,000	1,126,164,000	1,111,614,994	0	1,111,614,994	98.71	14,549,006
549497	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,125,956,000	1,125,956,000	1,114,577,317	0	1,114,577,317	98.99	11,378,683
569336	KANTOR PELAYANAN PERPAJAKAN DAN KONSULTASI	733,019,000	1,308,792,000	1,293,184,050	0	1,293,184,050	98.81	15,607,950
635960	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CURUP	6,936,771,000	7,500,966,000	7,213,667,785	2,985,000	7,210,682,785	96.13	290,283,215
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2600	26,136,542,000	29,439,299,000	28,922,792,565	6,248,738	28,916,543,827	98.25	522,755,173
2800	MALUKU UTARA							
410000	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TOBELO	6,538,812,000	7,188,352,000	6,957,932,127	1,888	6,957,930,239	96.79	230,421,761
410150	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TERNATE	9,489,520,000	10,269,767,000	9,333,317,008	185,948	9,333,131,060	90.88	936,635,940
635532	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,223,845,000	1,295,045,000	1,233,646,088	0	1,233,646,088	95.26	61,398,912
673296	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,293,986,000	1,193,986,000	1,144,527,961	0	1,144,527,961	95.86	49,458,039
673301	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,158,659,000	1,158,659,000	1,149,779,468	590	1,149,778,878	99.23	8,880,122
673318	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,134,517,000	1,134,517,000	1,127,698,136	472,000	1,127,226,136	99.36	7,290,864
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2800	20,839,339,000	22,240,326,000	20,946,900,788	660,426	20,946,240,362	94.18	1,294,085,638
2900	BANTEN							
119415	KPP PRATAMA SERANG BARAT	11,223,962,000	14,985,445,000	14,279,228,292	2,515,651	14,276,712,641	95.27	708,732,359
290460	KPP PRATAMA PONDOK AREN	10,769,870,000	12,177,007,000	11,240,437,594	15,933,887	11,224,503,707	92.18	952,503,293
290461	KPP PRATAMA CIKUPA	11,000,171,000	12,293,862,000	11,954,587,751	2,747	11,954,585,004	97.24	339,276,996
410402	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG TIMUR	12,235,218,000	12,235,218,000	11,735,548,635	3,323	11,735,545,312	95.92	499,672,688
417857	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANDEGLANG	7,667,688,000	8,744,804,000	8,190,579,009	1,469	8,190,577,540	93.66	554,226,460
440935	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG	23,340,715,000	23,340,715,000	21,173,310,966	846	21,173,310,120	90.71	2,167,404,880
524266	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG BARAT	11,615,105,000	11,714,655,000	11,536,249,279	4,561,216	11,531,688,063	98.44	182,966,937
524891	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGARAKSA	26,665,398,000	26,105,802,000	24,837,543,455	980	24,837,542,475	95.14	1,268,259,525
560944	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SERPONG	11,510,806,000	11,949,787,000	11,840,657,552	1,716	11,840,655,836	99.09	109,131,164
635560	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	20,246,413,000	20,246,413,000	18,739,200,175	1,020	18,739,199,155	92.56	1,507,213,845
636033	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOSAMBI	10,490,468,000	10,954,467,000	10,535,758,421	1,966	10,535,756,455	96.18	418,710,545
636370	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	996,732,000	996,732,000	982,565,336	550	982,564,786	98.58	14,167,214
663541	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEGON	9,795,515,000	11,161,158,000	10,974,513,486	539	10,974,512,947	98.33	186,645,053
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2900	167,558,061,000	176,906,065,000	168,020,179,951	23,025,910	167,997,154,041	94.98	8,908,910,959
3000	BANGKA BELITUNG							
119791	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PANGKAL PINANG	8,135,721,000	9,081,844,000	8,531,056,530	2,323,098	8,528,733,432	93.91	553,110,568

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 18
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
409825	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKA	8,457,209,000	9,665,628,000	9,346,755,522	837	9,346,754,685	96.7	318,873,315
410580	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PANDAN	7,584,614,000	7,584,614,000	7,307,559,527	2,440	7,307,557,087	96.35	277,056,913
569048	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,024,152,000	1,216,079,000	1,185,992,964	340	1,185,992,624	97.53	30,086,376
673385	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	787,780,000	971,050,000	873,765,576	0	873,765,576	89.98	97,284,424
673392	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	707,893,000	816,198,000	799,771,151	370,000	799,401,151	97.94	16,796,849
673407	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	889,772,000	1,020,200,000	955,747,705	0	955,747,705	93.68	64,452,295
673411	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,093,923,000	1,104,968,000	1,082,779,165	0	1,082,779,165	97.99	22,188,835
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3000	28,681,064,000	31,460,581,000	30,083,428,140	2,696,715	30,080,731,425	95.62	1,379,849,575
3100	GORONTALO							
119876	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GORONTALO	11,075,264,000	12,038,285,000	11,854,297,197	2,150,651	11,852,146,546	98.45	186,138,454
673261	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,225,472,000	1,225,472,000	1,154,127,721	0	1,154,127,721	94.18	71,344,279
673275	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,145,703,000	1,145,703,000	1,085,409,862	124	1,085,409,738	94.74	60,293,262
673282	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,359,978,000	1,174,878,000	968,326,957	300	968,326,657	82.42	206,551,343
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3100	14,806,417,000	15,584,338,000	15,062,161,737	2,151,075	15,060,010,662	96.65	524,327,338
3200	KEPULAUAN RIAU							
119752	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG PINANG	9,521,769,000	10,102,486,000	9,864,827,240	3,096,533	9,861,730,707	97.62	240,755,293
325138	KPP PRATAMA BATAM SELATAN	25,975,395,000	25,005,035,000	24,248,868,843	706	24,248,868,137	96.98	756,166,863
409790	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN	8,552,054,000	8,847,537,000	8,557,182,566	987	8,557,181,579	96.72	290,355,421
477173	KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM	11,263,548,000	12,771,437,000	11,540,402,315	18	11,540,402,297	90.36	1,231,034,703
477507	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	940,262,000	940,262,000	931,311,425	0	931,311,425	99.05	8,950,575
477513	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	739,814,000	739,814,000	734,508,452	0	734,508,452	99.28	5,305,548
525233	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM UTARA	10,495,748,000	10,876,432,000	9,923,740,498	3,399	9,923,737,099	91.24	952,694,901
568987	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	949,271,000	949,271,000	928,758,079	0	928,758,079	97.84	20,512,921
635951	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN	7,707,439,000	7,768,336,000	7,543,900,602	556	7,543,900,046	97.11	224,435,954
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3200	76,145,300,000	78,000,610,000	74,273,500,020	3,102,199	74,270,397,821	95.22	3,730,212,179
3300	PAPUA BARAT							
409391	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SORONG	12,155,434,000	14,511,577,000	13,680,055,715	9,446,992	13,670,608,723	94.2	840,968,277
549413	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,365,235,000	1,365,235,000	1,272,015,980	4,900,000	1,267,115,980	92.81	98,119,020
549420	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANOKWARI	19,240,556,000	10,288,586,000	9,491,541,320	1,325,337	9,490,215,983	92.24	798,370,017
673165	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,702,953,000	1,702,953,000	1,563,485,711	0	1,563,485,711	91.81	139,467,289
673172	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,405,481,000	1,405,481,000	1,182,979,680	1,425,000	1,181,554,680	84.07	223,926,320
673186	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,559,499,000	1,559,499,000	1,459,192,806	63	1,459,192,743	93.57	100,306,257
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3300	37,429,158,000	30,833,331,000	28,649,271,212	17,097,392	28,632,173,820	92.92	2,201,157,180
3400	SULAWESI BARAT							
477708	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,113,444,000	1,113,444,000	953,280,269	84	953,280,185	85.62	160,163,815
477714	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	758,832,000	782,362,000	760,288,522	0	760,288,522	97.18	22,073,478

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
549324	KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI	852,727,000	993,355,000	981,458,629	350	981,458,279	98.8	11,896,721
552006	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAMUJU	7,381,874,000	8,272,382,000	7,944,490,593	452,047	7,944,038,546	96.03	328,343,454
636185	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAJENE	6,281,783,000	6,690,060,000	6,286,919,351	1,333,446	6,285,585,905	93.95	404,474,095
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3400	16,388,660,000	17,851,603,000	16,926,437,364	1,785,927	16,924,651,437	94.82	926,951,563
3500	KALIMANTAN UTARA							
417709	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,568,134,000	1,568,134,000	1,475,162,738	740,019	1,474,422,719	94.02	93,711,281
417710	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	1,622,061,000	1,944,268,000	1,844,537,290	370,000	1,844,167,290	94.85	100,100,710
635450	KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI	2,125,851,000	2,125,851,000	2,004,217,873	0	2,004,217,873	94.28	121,633,127
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3500	5,316,046,000	5,638,253,000	5,323,917,901	1,110,019	5,322,807,882	94.42	315,445,118
	JUMLAH BELANJA	7,461,907,281,000	7,441,587,985,000	6,736,325,524,250	1,955,835,893	6,734,369,688,357	90.52	707,218,296,643

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / JENIS BELANJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.3
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
0100	DKI JAKARTA							
51	BELANJA PEGAWAI	539,636,771,000	559,265,169,000	532,051,350,478	56,226,297	531,995,124,181	95.12	27,270,044,819
52	BELANJA BARANG	472,464,863,000	501,189,643,000	473,062,312,965	156,115,138	472,906,197,827	94.36	28,283,445,173
53	BELANJA MODAL	24,992,000	17,617,460,000	16,009,697,678	0	16,009,697,678	90.87	1,607,762,322
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0100	1,012,126,626,000	1,078,072,272,000	1,021,123,361,121	212,341,435	1,020,911,019,686	94.72	57,161,252,314
0199	INSTANSI PUSAT							
51	BELANJA PEGAWAI	243,364,533,000	264,211,917,000	262,274,854,196	40,670,710	262,234,183,486	99.25	1,977,733,514
52	BELANJA BARANG	1,875,417,625,00	1,618,875,181,000	1,567,317,787,20	832,798,931	1,566,484,988,26	96.76	52,390,192,731
53	BELANJA MODAL	810,572,462,000	708,760,656,000	290,135,638,363	0	290,135,638,363	40.94	418,625,017,63
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0199	2,929,354,620,000	2,591,847,754,000	2,119,728,279,759	873,469,641	2,118,854,810,118	81.78	472,992,943,882
0200	JAWA BARAT							
51	BELANJA PEGAWAI	214,541,018,000	231,273,969,000	223,460,489,039	4,247,131	223,456,241,908	96.62	7,817,727,092
52	BELANJA BARANG	258,058,727,000	262,300,984,000	243,583,455,094	80,813,551	243,502,641,543	92.83	18,798,342,457
53	BELANJA MODAL	74,426,948,000	81,285,877,000	76,967,369,272	1,000,000	76,966,369,272	94.69	4,319,507,728
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0200	547,026,693,000	574,860,830,000	544,011,313,405	86,060,682	543,925,252,723	94.63	30,935,577,277
0300	JAWA TENGAH							
51	BELANJA PEGAWAI	187,383,154,000	195,318,188,000	192,114,095,248	26,997,582	192,087,097,666	98.35	3,231,090,334
52	BELANJA BARANG	165,049,468,000	161,104,874,000	150,301,715,655	35,606,618	150,266,109,037	93.27	10,838,764,963
53	BELANJA MODAL	2,063,599,000	10,203,086,000	9,731,439,679	0	9,731,439,679	95.38	471,646,321
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0300	354,496,221,000	366,626,148,000	352,147,250,582	62,604,200	352,084,646,382	96.05	14,541,501,618
0400	DI YOGYAKARTA							
51	BELANJA PEGAWAI	37,236,095,000	38,625,778,000	37,472,241,319	3,464,207	37,468,777,112	97	1,157,000,888
52	BELANJA BARANG	35,081,448,000	34,117,771,000	30,692,005,701	1,254,736	30,690,750,965	89.96	3,427,020,035
53	BELANJA MODAL	0	4,258,425,000	3,746,210,938	0	3,746,210,938	87.97	512,214,062
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0400	72,317,543,000	77,001,974,000	71,910,457,958	4,718,943	71,905,739,015	93.39	5,096,234,985
0500	JAWA TIMUR							
51	BELANJA PEGAWAI	252,268,021,000	259,494,324,000	255,446,007,167	46,800,365	255,399,206,802	98.42	4,095,117,198
52	BELANJA BARANG	226,742,757,000	227,815,536,000	215,138,971,646	19,820,449	215,119,151,197	94.43	12,696,384,803
53	BELANJA MODAL	2,905,496,000	11,562,019,000	11,051,167,386	0	11,051,167,386	95.58	510,851,614
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0500	481,916,274,000	498,871,879,000	481,636,146,199	66,620,814	481,569,525,385	96.55	17,302,353,615
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
51	BELANJA PEGAWAI	35,213,316,000	40,187,659,000	38,770,331,967	25,945,069	38,744,386,898	96.41	1,443,272,102
52	BELANJA BARANG	46,372,555,000	48,846,170,000	45,595,179,423	4,500,000	45,590,679,423	93.34	3,255,490,577
53	BELANJA MODAL	337,118,000	6,711,439,000	6,543,254,897	0	6,543,254,897	97.49	168,184,103
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0600	81,922,989,000	95,745,268,000	90,908,766,287	30,445,069	90,878,321,218	94.95	4,866,946,782
0700	SUMATERA UTARA							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / JENIS BELANJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.3
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI	106,931,163,000	111,992,003,000	108,470,174,173	4,987,291	108,465,186,882	96.85	3,526,816,118
52	BELANJA BARANG	107,962,716,000	113,882,612,000	109,318,398,761	10,107,000	109,308,291,761	95.98	4,574,320,239
53	BELANJA MODAL	0	5,424,799,000	5,289,093,866	0	5,289,093,866	97.5	135,705,134
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0700	214,893,879,000	231,299,414,000	223,077,666,800	15,094,291	223,062,572,509	96.45	8,236,841,491
0800	SUMATERA BARAT							
51	BELANJA PEGAWAI	29,673,157,000	31,711,384,000	31,094,652,464	6,223,485	31,088,428,979	98.04	622,955,021
52	BELANJA BARANG	43,383,529,000	41,640,919,000	40,379,050,498	7,089,000	40,371,961,498	96.95	1,268,957,502
53	BELANJA MODAL	177,784,000	3,434,863,000	3,189,191,041	0	3,189,191,041	92.85	245,671,959
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0800	73,234,470,000	76,787,166,000	74,662,894,003	13,312,485	74,649,581,518	97.23	2,137,584,482
0900	RIAU							
51	BELANJA PEGAWAI	50,033,742,000	47,378,718,000	46,566,429,800	23,927,713	46,542,502,087	98.24	836,215,913
52	BELANJA BARANG	82,635,568,000	81,857,147,000	77,512,495,275	132,976,209	77,379,519,066	94.53	4,477,627,934
53	BELANJA MODAL	0	7,141,101,000	6,406,306,911	0	6,406,306,911	89.71	734,794,089
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0900	132,669,310,000	136,376,966,000	130,485,231,986	156,903,922	130,328,328,064	95.68	6,048,637,936
1000	JAMBI							
51	BELANJA PEGAWAI	19,070,343,000	20,161,109,000	19,565,338,397	9,494	19,565,328,903	97.04	595,780,097
52	BELANJA BARANG	21,469,552,000	24,039,099,000	22,593,865,281	4,130,000	22,589,735,281	93.97	1,449,363,719
53	BELANJA MODAL	0	9,444,462,000	9,234,430,714	8,468,000	9,225,962,714	97.69	218,499,286
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1000	40,539,895,000	53,644,670,000	51,393,634,392	12,607,494	51,381,026,898	95.8	2,263,643,102
1100	SUMATERA SELATAN							
51	BELANJA PEGAWAI	60,509,239,000	66,230,822,000	63,316,618,468	5,738,190	63,310,880,278	95.59	2,919,941,722
52	BELANJA BARANG	60,648,101,000	61,866,043,000	59,326,463,432	15,197,020	59,311,266,412	95.87	2,554,776,588
53	BELANJA MODAL	2,570,848,000	7,184,939,000	6,985,428,621	0	6,985,428,621	97.22	199,510,379
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1100	123,728,188,000	135,281,804,000	129,628,510,521	20,935,210	129,607,575,311	95.82	5,674,228,689
1200	LAMPUNG							
51	BELANJA PEGAWAI	36,349,032,000	38,596,392,000	38,263,611,188	12,164,319	38,251,446,869	99.11	344,945,131
52	BELANJA BARANG	44,985,642,000	45,331,549,000	44,176,515,875	0	44,176,515,875	97.45	1,155,033,125
53	BELANJA MODAL	762,501,000	2,754,899,000	2,476,320,587	0	2,476,320,587	89.89	278,578,413
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1200	82,097,175,000	86,682,840,000	84,916,447,650	12,164,319	84,904,283,331	97.96	1,778,556,669
1300	KALIMANTAN BARAT							
51	BELANJA PEGAWAI	32,282,852,000	34,516,777,000	31,519,001,133	19,376,804	31,499,624,329	91.26	3,017,152,671
52	BELANJA BARANG	48,067,478,000	51,488,187,000	48,926,421,132	3,240,500	48,923,180,632	95.02	2,565,006,368
53	BELANJA MODAL	0	7,227,961,000	7,042,969,129	0	7,042,969,129	97.44	184,991,871
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1300	80,350,330,000	93,232,925,000	87,488,391,394	22,617,304	87,465,774,090	93.84	5,767,150,910
1400	KALIMANTAN TENGAH							
51	BELANJA PEGAWAI	18,726,632,000	20,544,180,000	19,949,033,040	8,696,515	19,940,336,525	97.06	603,843,475

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / JENIS BELANJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.3
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG	26,476,381,000	26,396,084,000	24,490,570,321	1,429,000	24,489,141,321	92.78	1,906,942,679
53	BELANJA MODAL	0	2,854,647,000	2,435,867,349	0	2,435,867,349	85.33	418,779,651
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1400	45,203,013,000	49,794,911,000	46,875,470,710	10,125,515	46,865,345,195	94.14	2,929,565,805
1500	KALIMANTAN SELATAN							
51	BELANJA PEGAWAI	31,159,918,000	34,030,961,000	33,736,814,068	22,311,046	33,714,503,022	99.07	316,457,978
52	BELANJA BARANG	36,323,749,000	40,282,153,000	37,693,505,433	501,750	37,693,003,683	93.57	2,589,149,317
53	BELANJA MODAL	0	12,869,481,000	12,182,975,492	0	12,182,975,492	94.67	686,505,508
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1500	67,483,667,000	87,182,595,000	83,613,294,993	22,812,796	83,590,482,197	95.91	3,592,112,803
1600	KALIMANTAN TIMUR							
51	BELANJA PEGAWAI	45,638,689,000	48,205,449,000	47,171,368,459	9,229,977	47,162,138,482	97.84	1,043,310,518
52	BELANJA BARANG	58,668,689,000	69,226,156,000	64,321,926,894	2,591,419	64,319,335,475	92.91	4,906,820,525
53	BELANJA MODAL	3,916,377,000	11,329,686,000	10,923,196,887	0	10,923,196,887	96.41	406,489,113
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1600	108,223,755,000	128,761,291,000	122,416,492,240	11,821,396	122,404,670,844	95.07	6,356,620,156
1700	SULAWESI UTARA							
51	BELANJA PEGAWAI	25,614,962,000	25,486,672,000	24,571,080,635	5,163,479	24,565,917,156	96.39	920,754,844
52	BELANJA BARANG	40,992,852,000	41,514,741,000	39,431,305,533	74,963,381	39,356,342,152	94.8	2,158,398,848
53	BELANJA MODAL	0	2,657,997,000	2,562,174,188	0	2,562,174,188	96.39	95,822,812
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1700	66,607,814,000	69,659,410,000	66,564,560,356	80,126,860	66,484,433,496	95.56	3,174,976,504
1800	SULAWESI TENGAH							
51	BELANJA PEGAWAI	16,574,104,000	17,231,710,000	16,653,691,256	4,666,649	16,649,024,607	96.62	582,685,393
52	BELANJA BARANG	22,630,648,000	22,034,435,000	21,023,632,409	1,512,500	21,022,119,909	95.41	1,012,315,091
53	BELANJA MODAL	0	998,276,000	962,076,000	0	962,076,000	96.37	36,200,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1800	39,204,752,000	40,264,421,000	38,639,399,665	6,179,149	38,633,220,516	95.96	1,631,200,484
1900	SULAWESI SELATAN							
51	BELANJA PEGAWAI	63,623,610,000	70,891,501,000	69,639,695,848	17,441,216	69,622,254,632	98.21	1,269,246,368
52	BELANJA BARANG	83,327,131,000	87,834,205,000	79,394,181,176	46,573,717	79,347,607,459	90.34	8,486,597,541
53	BELANJA MODAL	21,670,114,000	25,887,365,000	24,540,876,103	0	24,540,876,103	94.8	1,346,488,897
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1900	168,620,855,000	184,613,071,000	173,574,753,127	64,014,933	173,510,738,194	94.02	11,102,332,806
2000	SULAWESI TENGGARA							
51	BELANJA PEGAWAI	13,550,210,000	15,246,030,000	14,907,596,405	41,881,624	14,865,714,781	97.51	380,315,219
52	BELANJA BARANG	18,638,553,000	18,085,133,000	16,505,363,734	2,630,000	16,502,733,734	91.25	1,582,399,266
53	BELANJA MODAL	0	1,260,956,000	1,246,768,382	0	1,246,768,382	98.87	14,187,618
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2000	32,188,763,000	34,592,119,000	32,659,728,521	44,511,624	32,615,216,897	94.41	1,976,902,103
2100	MALUKU							
51	BELANJA PEGAWAI	7,703,278,000	8,383,625,000	7,708,583,558	3,994,421	7,704,589,137	91.9	679,035,863
52	BELANJA BARANG	17,214,573,000	17,176,334,000	15,819,351,908	0	15,819,351,908	92.1	1,356,982,092

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / JENIS BELANJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.3
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
53	BELANJA MODAL	3,883,200,000	4,024,526,000	3,789,716,849	0	3,789,716,849	94.17	234,809,151
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2100	28,801,051,000	29,584,485,000	27,317,652,315	3,994,421	27,313,657,894	92.34	2,270,827,106
2200	BALI							
51	BELANJA PEGAWAI	48,955,357,000	50,079,114,000	49,035,234,563	9,640,551	49,025,594,012	97.9	1,053,519,988
52	BELANJA BARANG	42,179,462,000	42,060,281,000	39,235,525,111	4,824,374	39,230,700,737	93.27	2,829,580,263
53	BELANJA MODAL	3,953,776,000	9,917,702,000	7,114,093,523	0	7,114,093,523	71.73	2,803,608,477
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2200	95,088,595,000	102,057,097,000	95,384,853,197	14,464,925	95,370,388,272	93.46	6,686,708,728
2300	NUSA TENGGARA BARAT							
51	BELANJA PEGAWAI	29,074,314,000	30,435,206,000	29,617,313,981	6,006,786	29,611,307,195	97.29	823,898,805
52	BELANJA BARANG	40,480,500,000	40,654,727,000	36,736,219,658	12,022,623	36,724,197,035	90.33	3,930,529,965
53	BELANJA MODAL	0	1,278,471,000	1,259,868,906	0	1,259,868,906	98.54	18,602,094
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2300	69,554,814,000	72,368,404,000	67,613,402,545	18,029,409	67,595,373,136	93.43	4,773,030,864
2400	NUSA TENGGARA TIMUR							
51	BELANJA PEGAWAI	19,822,548,000	25,803,076,000	25,086,891,471	2,882,424	25,084,009,047	97.21	719,066,953
52	BELANJA BARANG	31,671,260,000	39,076,721,000	35,929,310,870	6,911,424	35,922,399,446	91.93	3,154,321,554
53	BELANJA MODAL	2,929,255,000	5,547,450,000	5,083,917,555	0	5,083,917,555	91.64	463,532,445
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2400	54,423,063,000	70,427,247,000	66,100,119,896	9,793,848	66,090,326,048	93.86	4,336,920,952
2500	PAPUA							
51	BELANJA PEGAWAI	23,275,762,000	25,248,761,000	24,447,132,123	9,152,807	24,437,979,316	96.79	810,781,684
52	BELANJA BARANG	43,256,577,000	41,160,920,000	38,308,211,327	13,034,000	38,295,177,327	93.04	2,865,742,673
53	BELANJA MODAL	0	1,586,937,000	1,483,511,500	0	1,483,511,500	93.48	103,425,500
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2500	66,532,339,000	67,996,618,000	64,238,854,950	22,186,807	64,216,668,143	94.47	3,779,949,857
2600	BENGKULU							
51	BELANJA PEGAWAI	12,311,660,000	12,669,105,000	12,310,438,921	2,690,738	12,307,748,183	97.15	361,356,817
52	BELANJA BARANG	13,824,882,000	15,495,403,000	15,363,494,394	3,558,000	15,359,936,394	99.13	135,466,606
53	BELANJA MODAL	0	1,274,791,000	1,248,859,250	0	1,248,859,250	97.97	25,931,750
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2600	26,136,542,000	29,439,299,000	28,922,792,565	6,248,738	28,916,543,827	98.25	522,755,173
2800	MALUKU UTARA							
51	BELANJA PEGAWAI	8,119,316,000	8,493,261,000	8,314,508,763	188,426	8,314,320,337	97.89	178,940,663
52	BELANJA BARANG	12,720,023,000	12,936,060,000	11,827,655,630	472,000	11,827,183,630	91.43	1,108,876,370
53	BELANJA MODAL	0	811,005,000	804,736,395	0	804,736,395	99.23	6,268,605
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2800	20,839,339,000	22,240,326,000	20,946,900,788	660,426	20,946,240,362	94.18	1,294,085,638
2900	BANTEN							
51	BELANJA PEGAWAI	67,122,571,000	72,889,168,000	71,322,678,443	4,019,410	71,318,659,033	97.85	1,570,508,967
52	BELANJA BARANG	99,438,632,000	98,103,233,000	90,933,102,065	19,006,500	90,914,095,565	92.67	7,189,137,435
53	BELANJA MODAL	996,858,000	5,913,664,000	5,764,399,443	0	5,764,399,443	97.48	149,264,557

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / JENIS BELANJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.E1.3
Tanggal : 29/04/19 9:16 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2900	167,558,061,000	176,906,065,000	168,020,179,951	23,025,910	167,997,154,041	94.98	8,908,910,959
3000	BANGKA BELITUNG							
51	BELANJA PEGAWAI	12,965,538,000	14,233,253,000	13,677,899,030	920,715	13,676,978,315	96.09	556,274,685
52	BELANJA BARANG	15,715,526,000	16,649,975,000	15,832,136,410	1,776,000	15,830,360,410	95.08	819,614,590
53	BELANJA MODAL	0	577,353,000	573,392,700	0	573,392,700	99.31	3,960,300
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3000	28,681,064,000	31,460,581,000	30,083,428,140	2,696,715	30,080,731,425	95.62	1,379,849,575
3100	GORONTALO							
51	BELANJA PEGAWAI	5,718,484,000	5,773,764,000	5,625,489,567	2,151,075	5,623,338,492	97.39	150,425,508
52	BELANJA BARANG	9,087,933,000	8,849,063,000	8,509,052,810	0	8,509,052,810	96.16	340,010,190
53	BELANJA MODAL	0	961,511,000	927,619,360	0	927,619,360	96.48	33,891,640
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3100	14,806,417,000	15,584,338,000	15,062,161,737	2,151,075	15,060,010,662	96.65	524,327,338
3200	KEPULAUAN RIAU							
51	BELANJA PEGAWAI	26,618,388,000	28,901,382,000	27,453,439,368	3,102,199	27,450,337,169	94.98	1,451,044,831
52	BELANJA BARANG	49,118,443,000	47,388,468,000	45,141,008,566	0	45,141,008,566	95.26	2,247,459,434
53	BELANJA MODAL	408,469,000	1,710,760,000	1,679,052,086	0	1,679,052,086	98.15	31,707,914
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3200	76,145,300,000	78,000,610,000	74,273,500,020	3,102,199	74,270,397,821	95.22	3,730,212,179
3300	PAPUA BARAT							
51	BELANJA PEGAWAI	13,690,444,000	11,408,925,000	11,053,629,181	10,623,633	11,043,005,548	96.79	365,919,452
52	BELANJA BARANG	22,852,258,000	17,793,685,000	16,010,501,531	6,473,759	16,004,027,772	89.94	1,789,657,228
53	BELANJA MODAL	886,456,000	1,630,721,000	1,585,140,500	0	1,585,140,500	97.2	45,580,500
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3300	37,429,158,000	30,833,331,000	28,649,271,212	17,097,392	28,632,173,820	92.92	2,201,157,180
3400	SULAWESI BARAT							
51	BELANJA PEGAWAI	7,171,271,000	8,225,598,000	7,878,594,483	825,927	7,877,768,556	95.77	347,829,444
52	BELANJA BARANG	9,217,389,000	9,415,776,000	8,842,430,531	960,000	8,841,470,531	93.9	574,305,469
53	BELANJA MODAL	0	210,229,000	205,412,350	0	205,412,350	97.71	4,816,650
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3400	16,388,660,000	17,851,603,000	16,926,437,364	1,785,927	16,924,651,437	94.82	926,951,563
3500	KALIMANTAN UTARA							
51	BELANJA PEGAWAI	486,866,000	576,870,000	417,600,857	1,110,019	416,490,838	72.2	160,379,162
52	BELANJA BARANG	4,829,180,000	4,739,176,000	4,584,138,044	0	4,584,138,044	96.73	155,037,956
53	BELANJA MODAL	0	322,207,000	322,179,000	0	322,179,000	99.99	28,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3500	5,316,046,000	5,638,253,000	5,323,917,901	1,110,019	5,322,807,882	94.42	315,445,118
	JUMLAH BELANJA	7,461,907,281,000	7,441,587,985,000	6,736,325,524,250	1,955,835,893	6,734,369,688,357	90.52	707,218,296,643

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 29/04/19 9:11 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
12	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak							
1655	Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	39,047,688,000	36,200,323,000	31,809,400,945	0	31,809,400,945	87.87	4,390,922,055
1656	Pembinaan, Pemantauan dan Dukungan Teknis di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Perpajakan	290,927,045,000	147,890,976,000	137,572,382,611	0	137,572,382,611	93.02	10,318,593,389
1657	Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis	6,070,345,000	11,164,051,000	10,634,668,854	10,500,000	10,624,168,854	95.16	539,882,146
1658	Peningkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan	6,644,489,000	5,255,269,000	4,945,483,289	1,250,000	4,944,233,289	94.08	311,035,711
1659	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Intelijen Perpajakan	10,333,586,000	10,333,586,000	9,250,198,757	9,201,748	9,240,997,009	89.43	1,092,588,991
1660	Peningkatan Pelayanan di Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding	12,559,542,000	12,559,542,000	12,007,121,929	0	12,007,121,929	95.6	552,420,071
1661	Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi	23,278,559,000	21,694,456,000	18,933,303,321	53,303,244	18,880,000,077	87.03	2,814,455,923
1662	Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan	15,000,435,000	15,872,304,000	14,046,660,980	0	14,046,660,980	88.5	1,825,643,020
1663	Perumusan Kebijakan, Standardisasi dan Bimbingan Teknis, Evaluasi dan Pelaksanaan di Bidang Analisis dan Evaluasi Penerimaan	9,064,185,000	8,175,937,000	7,766,035,971	13,257,583	7,752,778,388	94.82	423,158,612
1664	Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai	12,890,200,000	7,391,916,000	5,785,923,141	4,029,732	5,781,893,409	78.22	1,610,022,591
1665	Perumusan Kebijakan di Bidang PPh	20,403,840,000	9,422,418,000	7,539,478,917	43,807,599	7,495,671,318	79.55	1,926,746,682
1666	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi	629,226,041,000	584,018,615,000	170,297,873,887	0	170,297,873,887	29.16	413,720,741,113
1667	Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di Daerah	721,565,597,000	784,852,485,000	731,519,478,377	234,822,959	731,284,655,418	93.17	53,567,829,582
1668	Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah	3,798,745,138,000	4,045,599,429,000	3,867,965,592,453	847,539,860	3,867,118,052,593	95.59	178,481,376,407
1669	Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan	84,467,749,000	86,279,719,000	78,164,062,706	4,062,312	78,160,000,394	90.59	8,119,718,606
1670	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJP	1,720,946,535,000	1,603,577,136,000	1,584,192,419,448	617,357,565	1,583,575,061,883	98.75	20,002,074,117
5236	Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Umum Perpajakan dan Pengelolaan Pengaduan	28,501,959,000	19,584,960,000	18,571,143,756	2,457,853	18,568,685,903	94.81	1,016,274,097
5879	Peningkatan Kegiatan Penyidikan	21,685,638,000	21,685,638,000	17,025,340,912	94,244,400	16,931,096,512	78.08	4,754,541,488

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2018

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 29/04/19 9:11 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_es1 --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5880	Perumusan Kebijakan dan Standardisasi Perpajakan Internasional	10,548,710,000	9,793,665,000	8,173,651,166	20,001,038	8,153,650,128	83.25	1,640,014,872
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 12	7,461,907,281,000	7,441,352,425,000	6,736,200,221,420	1,955,835,893	6,734,244,385,527	86.667	**707,108,039,473**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	7,461,907,281,000	7,441,352,425,000	6,736,200,221,420	1,955,835,893	6,734,244,385,527	86.667	**707,108,039,473**
09	HIBAH LUAR NEGERI							
12	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak							
1661	Peningkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan Pengembangan Organisasi	0	235,560,000	125,302,830	0	125,302,830	53.19	110,257,170
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 12	0	235,560,000	125,302,830	0	125,302,830	53.19	**110,257,170**
	JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI	0	235,560,000	125,302,830	0	125,302,830	53.19	**110,257,170**
	JUMLAH	**7,461,907,281,000**	**7,441,587,985,000**	**6,736,325,524,250**	**1,955,835,893**	**6,734,369,688,357**	**84.99**	**707,218,296,643**

djp

LAMPIRAN D

NERACA
per 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NERACA

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018 DAN 2017

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_es1_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	400,884,959	475,898,919	(75,013,960)	(15.76)
Kas Lainnya dan Setara Kas	32,450,722	11,800,540	20,650,182	174.99
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	121,230,933,293	56,899,350,176	64,331,583,117	113.06
Uang Muka Belanja (prepayment)	255,496,173	566,529,066	(311,032,893)	(54.90)
Piutang Perpajakan	68,090,740,725,765	54,160,090,238,676	13,930,650,487,089	25.72
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	(41,098,667,934,037)	(27,725,482,667,272)	(13,373,185,266,765)	48.23
PIUTANG PERPAJAKAN (NETTO)	26,992,072,791,728	26,434,607,571,404	557,465,220,324	2.11
Piutang Bukan Pajak	121,646,902	0	121,646,902	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(608,235)	0	(608,235)	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	121,038,667	0	121,038,667	0.00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	44,204,985	44,808,000	(603,015)	(1.35)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(221,025)	(224,040)	3,015	(1.35)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	43,983,960	44,583,960	(600,000)	(1.35)
Persediaan	213,988,601,157	230,766,815,535	(16,778,214,378)	(7.27)
JUMLAH ASET LANCAR	**27,328,146,180,659**	**26,723,372,549,600**	**604,773,631,059**	**2.26**
ASET TETAP				
Tanah	30,513,082,118,507	30,560,848,847,468	(47,766,728,961)	(0.16)
Peralatan dan Mesin	5,033,638,332,737	4,888,740,018,318	144,898,314,419	2.96
Gedung dan Bangunan	6,350,977,037,134	6,295,130,265,102	55,846,772,032	0.89
Jalan, Irigasi dan Jaringan	52,401,905,655	50,871,947,750	1,529,957,905	3.01
Aset Tetap Lainnya	4,627,741,604	7,609,789,809	(2,982,048,205)	(39.19)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	151,901,409,029	78,422,698,733	73,478,710,296	93.70
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,643,652,907,676)	(4,270,051,143,221)	(373,601,764,455)	8.75
JUMLAH ASET TETAP	**37,462,975,636,990**	**37,611,572,423,959**	**(148,596,786,969)**	**(0.40)**
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	719,559,620	691,309,821	28,249,799	4.09
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(719,559,620)	(654,068,578)	(65,491,042)	10.01
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	0	37,241,243	(37,241,243)	(100.00)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**0**	**37,241,243**	**(37,241,243)**	**(100.00)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	424,555,022,710	421,503,504,074	3,051,518,636	0.72
Aset Lain-lain	525,172,940,657	461,534,158,232	63,638,782,425	13.79
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(801,395,837,416)	(725,513,441,980)	(75,882,395,436)	10.46
JUMLAH ASET LAINNYA	**148,332,125,951**	**157,524,220,326**	**(9,192,094,375)**	**(5.84)**
JUMLAH ASET	**64,939,453,943,600**	**64,492,506,435,128**	**446,947,508,472**	**0.69**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				

NERACA

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018 DAN 2017

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_es1_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2018	2017	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Utang kepada Pihak Ketiga	14,440,788,207	13,216,148,018	1,224,640,189	9.27
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	24,604,009,233,369	17,248,585,899,463	7,355,423,333,906	42.64
Pendapatan Diterima Dimuka	965,982,740	757,350,896	208,631,844	27.55
Uang Muka dari KPPN	400,884,959	475,898,919	(75,013,960)	(15.76)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	7,440,650	(7,440,650)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**24,619,816,889,275**	**17,263,042,737,946**	**7,356,774,151,329**	**42.62**
JUMLAH KEWAJIBAN	**24,619,816,889,275**	**17,263,042,737,946**	**7,356,774,151,329**	**42.62**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	40,319,637,054,325	47,229,463,697,182	(6,909,826,642,857)	(14.63)
JUMLAH EKUITAS	**40,319,637,054,325**	**47,229,463,697,182**	**(6,909,826,642,857)**	**(14.63)**
JUMLAH EKUITAS	**40,319,637,054,325**	**47,229,463,697,182**	**(6,909,826,642,857)**	**(14.63)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**64,939,453,943,600**	**64,492,506,435,128**	**446,947,508,472**	**0.69**

djp

LAMPIRAN E

NERACA PERCOBAAN
per 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	355,150,709	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	45,734,250	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	32,450,722	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	121,230,933,293	0
0.0	114211	Uang Muka Belanja Pegawai (prepayment)	255,496,173	0
0.0	115121	Piutang PPh Pasal 21	1,179,013,937,280	0
0.0	115122	Piutang PPh Pasal 22	513,491,595,695	0
0.0	115124	Piutang PPh Pasal 23	1,274,118,662,166	0
0.0	115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1,583,276,185,064	0
0.0	115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	16,109,153,823,702	0
0.0	115127	Piutang PPh Pasal 26	1,692,189,385,192	0
0.0	115128	Piutang PPh Final	1,818,771,827,092	0
0.0	115131	Piutang PPN Dalam Negeri	23,743,183,930,888	0
0.0	115141	Piutang PPnBM dalam Negeri	504,887,065,463	0
0.0	115153	Piutang PBB Perkebunan	1,302,383,004,670	0
0.0	115154	Piutang PBB Kehutanan	611,275,366,842	0
0.0	115155	Piutang PBB Pertambangan	6,033,394,958,747	0
0.0	115159	Piutang PBB Lainnya	21,618,657,418	0
0.0	115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	2,025,634,020	0
0.0	115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	6,594,205,443,940	0
0.0	115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	4,914,538,121,192	0
0.0	115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	193,213,126,394	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	121,646,902	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	44,204,985	0
0.0	116112	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas	0	15,584,661,925,618
0.0	116113	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPN	0	12,810,774,960,496
0.0	116114	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM	0	450,265,209,931
0.0	116115	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB	0	2,692,417,811,730
0.0	116117	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	0	9,560,548,026,262
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP	0	608,235
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	221,025
0.0	117111	Barang Konsumsi	121,308,783,499	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,391,474,685	0
0.0	117114	Suku Cadang	362,372,703	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	88,536,417,594	0
0.0	117131	Bahan Baku	0	0
0.0	117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,389,552,676	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	30,513,082,118,507	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,033,638,332,737	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,350,977,037,134	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	8,355,614,800	0
0.0	134112	Irigasi	7,018,063,800	0
0.0	134113	Jaringan	37,028,227,055	0
0.0	134213	Jaringan Belum Diregister	0	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	4,627,741,604	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	151,901,409,029	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,242,737,268,018
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	381,901,235,225
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	4,557,198,812
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	655,758,237
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	13,737,970,504
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	63,476,880
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	719,559,620	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	719,559,620
0.0	162151	Software	231,696,255,518	0
0.0	162161	Lisensi	192,633,173,516	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	225,593,676	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	481,068,152,661	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	44,104,787,996	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	462,733,777,542
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	221,176,793,948
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	74,118,270,372
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	43,366,995,554
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	9,966,204,318
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	4,442,133,167
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	32,450,722
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	219111	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	0	6,698,614,305,724
0.0	219112	Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	0	17,900,745,312,320
0.0	219114	Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	0	4,649,615,325
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	858,282,740
0.0	219212	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka	0	107,700,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	400,884,959
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,734,369,688,357
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,313,347,887,239,719.36	0
0.0	313211	Transfer Keluar	6,879,451,991,486	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	6,835,161,234,331
0.0	391111	Ekuitas	0	47,229,463,697,182
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	1,628,000
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	945,902,567
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	32,240,493,823	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	7,029,092,779	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	29,994,138,191,495
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	1,368,556,560
3.0	411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	26,557,137,258,102
3.1	411111	Pengembalian Pendapatan PPh Minyak Bumi	42,985,833	0
3.0	411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	38,118,280,365,523
3.0	411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	33,800,919,649
3.0	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	0	135,075,359,420,630
3.1	411121	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 21	156,867,634,411	0
3.0	411122	Pendapatan PPh Pasal 22	0	18,115,809,572,854
3.1	411122	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22	78,877,906,103	0
3.0	411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	54,729,242,278,204
3.1	411123	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	2,443,993,582	0
3.0	411124	Pendapatan PPh Pasal 23	0	37,068,563,336,614
3.1	411124	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 23	183,388,767,193	0
3.0	411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	9,562,271,074,579
3.1	411125	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	50,602,500,058	0
3.0	411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	273,619,063,050,403.36
3.1	411126	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	32,980,597,939,802	0
3.0	411127	Pendapatan PPh Pasal 26	0	50,870,263,656,155
3.1	411127	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 26	1,735,416,406,178	0
3.0	411128	Pendapatan PPh Final	0	113,448,713,722,051
3.1	411128	Pengembalian Pendapatan PPh Final	400,839,154,589	0
3.0	411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	144,046,803,313
3.1	411129	Pengembalian Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	2,567,751,496	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	0	258,667,435
3.1	411131	Pengembalian Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	23,617,200	0
3.0	411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	12,987,522
3.0	411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	0	167,200
3.1	411143	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	2,462,000	0
3.0	411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	0	503,900,818
3.0	411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	0	1,892,910,800,778
3.1	411146	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	19,603,014	0
3.0	411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	0	8,218,348,183,000
3.0	411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	0	1,616,145
3.0	411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	405,281,839,286,927
3.1	411211	Pengembalian Pendapatan PPN Dalam Negeri	81,565,876,375,610	0
3.0	411212	Pendapatan PPN Impor	0	186,402,447,149,445
3.1	411212	Pengembalian Pendapatan PPN Impor	9,146,931,458	0
3.0	411219	Pendapatan PPN Lainnya	0	119,626,470,244
3.1	411219	Pengembalian Pendapatan PPN Lainnya	51,270,830,774	0
3.0	411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	12,758,141,219,481
3.1	411221	Pengembalian Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	39,428,613,740	0
3.0	411222	Pendapatan PPnBM Impor	0	4,106,670,968,489
3.1	411222	Pengembalian Pendapatan PPnBM Impor	27,596,000	0
3.0	411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	0	35,034,117,150
3.1	411229	Pengembalian Pendapatan PPnBM Lainnya	60,000,000,000	0
3.0	411313	Pendapatan PBB Perkebunan	0	2,416,176,217,276
3.1	411313	Pengembalian Pendapatan PBB Perkebunan	25,201,323,173	0
3.0	411314	Pendapatan PBB Kehutanan	0	699,293,280,849
3.1	411314	Pengembalian Pendapatan PBB Kehutanan	5,164,785,190	0
3.0	411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	2,662,625,387,515
3.1	411315	Pengembalian Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	537,259,574,287	0
3.0	411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	0	14,698,982,598,129
3.1	411316	Pengembalian Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	158,502,268,000	0
3.0	411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	0	313,275,381,204
3.0	411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	72,321,877,435
3.0	411611	Pendapatan Bea Meterai	0	1,470,432,796,442
3.1	411611	Pengembalian Pendapatan Bea Meterai	38,948,000	0
3.0	411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	0	3,985,405,294,453
3.0	411613	Pendapatan PPn Batubara	0	656,409,788,263
3.0	411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	28,230,225,569
3.0	411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	977,619,492,885
3.1	411621	Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPh	811,200,773,318	0
3.0	411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	481,146,391,562

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	411622	Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPN	19,529,952,723	0
3.0	411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	26,406,406,436
3.0	411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	0	3,139,994,377
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
3.0	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	0	104,919,620
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,912,500
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,492,582,999
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	6,001,164,806
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,568,573,803
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7,675,616	0
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	7,370,171
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	361,929,005
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	5,850,667
3.0	425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	2,368,096,627
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	332,925,036
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,384,123,720
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	1,175,566,479
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	874,839,521
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,160,442,373
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	873,233
3.1	425991	Pengembalian Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	873,233	0
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,528,990,498
3.0	491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	73,948,656,508
3.0	491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	0	135,250,190,980
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	9,843,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	7,975,799,112
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,678,814,610,783	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	150,207,692
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	27,072,816	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	1,085,032
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	107,287,841,157	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	15,309,510
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	32,962,032,860	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	1,838,182
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	44,743,389,660	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	10,475,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	42,385,475,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	9,295,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,679,986,215	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	87,834,476,934	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	3,621,000
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	291,409,319,751	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	51,545,792
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	198,175,000	0
3.1	511135	Pengembalian Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	1,025,000
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	2,802,595,000	0
3.1	511138	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	0	17,700,000
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	78,291,991,370	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	165,222,851
3.0	512211	Beban Uang Lembur	33,930,245,172	0
3.1	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	14,713,150
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	403,702,010,132	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	23,520,110
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	4,342,161,138	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	113,998,599,639	0
3.1	521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	9,450
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	66,691,435,698	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	22,283,500
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	120,967,314,888	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	16,820,809
3.0	521211	Beban Bahan	106,458,150,827	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	34,626,075
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	13,092,133,544	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	10,500,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	967,814,747,589	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	75,116,425
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	169,587,985,486	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	20,215,606,547	0
3.1	522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	0	7,446,057
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,417,249,397	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	637,590,773	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	262,016,051	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,510,025,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	158,255,838,192	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	20,217,273,731	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	51,895,580,307	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0	79,698,638
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190,986,138,034	0
3.1	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	116,499,180
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,436,638,040	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	249,453,670,596	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	34,818,502
3.0	523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	189,896,355	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	658,835,244	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	4,012,154,950	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	614,741,541,159	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	730,855,239
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,388,134,895	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	45,895,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,297,516,738	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31,428,993,840	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	19,888,382
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	7,722,771,741	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	281,911,232
3.0	526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	141,109,986,410	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	342,633,051,689	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	235,151,840,374	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,450,822,445	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	419,149,582	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	938,289,694	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4,458,960	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	5,098,882,114	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	17,097,310,576	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	317,283,115	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	7,508,495,921	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	192,274,757,224	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,748,927,084	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	41,755,524	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	0	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	3,268,618,395	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	32,725,636,545	0
3.0	594112	Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	4,523,273,324,175	0
3.0	594113	Beban Penyisihan Piutang PPN	3,158,282,836,539	0
3.0	594114	Beban Penyisihan Piutang PPnBM	179,276,324,253	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	594115	Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB	961,719,364,713	0
3.0	594117	Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	573,917,357,177	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	608,235	0
3.0	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	67,687,335	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	2,199,308
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2,662,522,664	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	30,816,500	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	3,375,895,604	0
3.0	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	408,170,661	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1,196,963,223	0
3.0	596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	55,425,326,679	0
JUMLAH			**1,566,853,022,757,656.36**	**1,566,853,022,757,656.36**

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	707,218,296,643	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	0	110,652,051,222,280.64
2.0	411111	Estimasi Pendapatan PPh Minyak Bumi Yang Dialokasikan	12,834,823,694,000	0
2.0	411112	Estimasi Pendapatan PPh Gas Bumi Yang Dialokasikan	25,299,226,306,000	0
2.0	411121	Estimasi Pendapatan PPh Pasal 21 Yang Dialokasikan	164,932,930,000,000	0
2.0	411122	Estimasi Pendapatan PPh Pasal 22 Yang Dialokasikan	19,779,417,828,000	0
2.0	411123	Estimasi Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Yang Dialokasikan	60,914,795,038,000	0
2.0	411124	Estimasi Pendapatan PPh Pasal 23 Yang Dialokasikan	50,883,948,472,000	0
2.0	411125	Estimasi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Yang Dialokasikan	22,209,410,000,000	0
2.0	411126	Estimasi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Yang Dialokasikan	284,909,436,487,000	0
2.0	411127	Estimasi Pendapatan PPh Pasal 26 Yang Dialokasikan	57,203,006,978,000	0
2.0	411128	Estimasi Pendapatan PPh Final Yang Dialokasikan	142,645,646,471,000	0
2.0	411129	Estimasi Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Yang Dialokasikan	3,398,989,830,000	0
2.0	411144	Estimasi Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah Yang Dialokasikan	503,387,000	0
2.0	411146	Estimasi Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah Yang Dialokasikan	1,902,979,488,000	0
2.0	411147	Estimasi Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah Yang Dialokasikan	8,218,348,183,000	0
2.0	411211	Estimasi Pendapatan PPN Dalam Negeri Yang Dialokasikan	344,603,467,748,000	0
2.0	411212	Estimasi Pendapatan PPN Impor Yang Dialokasikan	179,280,834,931,000	0
2.0	411219	Estimasi Pendapatan PPN Lainnya Yang Dialokasikan	314,583,549,000	0
2.0	411221	Estimasi Pendapatan PPnBM Dalam Negeri Yang Dialokasikan	13,320,528,887,000	0
2.0	411222	Estimasi Pendapatan PPnBM Impor Yang Dialokasikan	4,188,953,411,000	0
2.0	411229	Estimasi Pendapatan PPnBM Lainnya Yang Dialokasikan	92,761,474,000	0
2.0	411313	Estimasi Pendapatan PBB Perkebunan Yang Dialokasikan	1,648,612,667,000	0
2.0	411314	Estimasi Pendapatan PBB Kehutanan Yang Dialokasikan	364,385,090,000	0
2.0	411315	Estimasi Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Dialokasikan	1,578,290,012,000	0
2.0	411316	Estimasi Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Yang Dialokasikan	13,513,597,122,000	0
2.0	411317	Estimasi Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi Yang Dialokasikan	264,210,468,000	0
2.0	411319	Estimasi Pendapatan PBB Lainnya yang Dialokasikan	5,641,000	0
2.0	411611	Estimasi Pendapatan Bea Meterai Yang Dialokasikan	2,733,140,734,000	0
2.0	411612	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Benda Materai Yang Dialokasikan	4,614,090,247,000	0
2.0	411613	Estimasi Pendapatan PPn Batubara Yang Dialokasikan	660,545,114,000	0
2.0	411619	Estimasi Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Yang Dialokasikan	253,341,448,000	0
2.0	411621	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PPh Yang Dialokasikan	927,467,870,000	0
2.0	411622	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PPN Yang Dialokasikan	501,131,035,000	0
2.0	411623	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM Yang Dialokasikan	717,759,000	0
2.0	411624	Estimasi Pendapatan Bunga Penagihan PTLL Yang Dialokasikan	1,365,793,000	0
2.0	423117	Estimasi Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423129	Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
		Yang Dialokasikan		
2.0	423141	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423221	Estimasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423225	Estimasi Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423752	Estimasi Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423922	Estimasi Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423991	Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Yang Dialokasikan	0	0
2.0	423999	Estimasi Pendapatan Anggaran Lain-lain Yang Dialokasikan	0	0
2.0	425113	Estimasi Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan Yang Dialokasikan	21,255,000	0
2.0	425121	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	1,776,000	0
2.0	425122	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Yang Dialokasikan	6,581,000	0
2.0	425129	Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Yang Dialokasikan	215,625,000	0
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	586,707,000	0
2.0	425132	Estimasi Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin Yang Dialokasikan	108,000	0
2.0	425139	Estimasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya Yang Dialokasikan	28,000	0
2.0	425764	Estimasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Yang Dialokasikan	180,372,000	0
2.0	425781	Estimasi Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa Yang Dialokasikan	1,028,805,000	0
2.0	425791	Estimasi Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Yang Dialokasikan	123,530,000	0
2.0	425792	Estimasi Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Yang Dialokasikan	19,438,000	0
2.0	425811	Estimasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Yang Dialokasikan	11,485,000	0
2.0	425911	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan	6,636,000	0
2.0	425912	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan	140,779,000	0
2.0	425991	Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Yang Dialokasikan	319,646,000	0
2.0	425999	Estimasi Pendapatan Anggaran Lain-lain Yang Dialokasikan	1,782,529,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	1,698,379,293,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	33,413,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	110,151,382,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	34,172,530,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	46,443,615,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	43,978,456,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	3,822,028,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	90,895,579,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	305,747,505,000
2.0	511135	Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	232,250,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	2,848,920,000
2.0	511147	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	1,084,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
		Dalam dan Luar Negeri		
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	84,788,795,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	52,226,970,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	414,235,374,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	4,747,165,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	120,873,693,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	68,879,489,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	131,199,219,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	126,661,611,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	18,296,221,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	993,270,385,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	187,568,352,000
2.0	521813	Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	161,792,866,000
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	930,473,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	176,686,016,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	22,498,398,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	8,340,143,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	683,572,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	1,550,000,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	228,709,507,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	31,412,426,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	54,424,270,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	195,799,981,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	939,747,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	1,539,840,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	263,510,439,000
2.0	523122	Allotment Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	190,000,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	5,077,016,000
2.0	523133	Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	737,502,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	4,421,234,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	651,949,926,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	63,407,933,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	4,245,660,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	37,725,606,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	8,924,380,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	340,194,802,000
2.0	532113	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	0	9,200,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	464,740,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	68,349,791,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	533113	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	80,498,000
2.0	533115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	80,134,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	103,895,186,000
2.0	534131	Allotment Belanja Modal Jaringan	0	4,011,959,000
2.0	534132	Allotment Belanja Modal Bahan Baku Jaringan	0	86,226,000
2.0	534161	Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	472,753,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	458,992,432,000
3.0	411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	26,557,751,498,882
3.1	411111	Pengembalian Pendapatan PPh Minyak Bumi	42,985,833	0
3.0	411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	0	38,118,280,365,523
3.0	411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	33,800,919,649
3.0	411121	Pendapatan PPh Pasal 21	0	135,067,093,043,566
3.1	411121	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 21	156,867,634,411	0
3.0	411122	Pendapatan PPh Pasal 22	0	18,088,753,105,986
3.1	411122	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22	78,877,906,103	0
3.0	411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	54,729,591,277,294
3.1	411123	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	2,443,993,582	0
3.0	411124	Pendapatan PPh Pasal 23	0	39,922,502,908,788
3.1	411124	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 23	183,388,767,193	0
3.0	411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	9,456,374,480,421
3.1	411125	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	50,602,500,058	0
3.0	411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	285,113,519,423,141.36
3.1	411126	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	32,980,597,939,802	0
3.0	411127	Pendapatan PPh Pasal 26	0	52,373,456,397,410
3.1	411127	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 26	1,735,416,406,178	0
3.0	411128	Pendapatan PPh Final	0	115,860,172,237,089
3.1	411128	Pengembalian Pendapatan PPh Final	400,839,154,589	0
3.0	411129	Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	144,492,751,195
3.1	411129	Pengembalian Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	2,567,751,496	0
3.0	411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	0	355,936,972
3.1	411131	Pengembalian Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	23,617,200	0
3.0	411141	Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	12,987,522
3.0	411142	Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	0	167,200
3.1	411143	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah	2,462,000	0
3.0	411144	Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	0	503,900,818
3.0	411146	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	0	1,892,910,800,778
3.1	411146	Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah	19,603,014	0
3.0	411147	Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	0	8,218,348,183,000
3.0	411148	Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	0	1,616,145
3.0	411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	415,485,971,242,335

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	411211	Pengembalian Pendapatan PPN Dalam Negeri	81,565,876,375,610	0
3.0	411212	Pendapatan PPN Impor	0	186,403,790,728,258
3.1	411212	Pengembalian Pendapatan PPN Impor	9,146,931,458	0
3.0	411219	Pendapatan PPN Lainnya	0	119,979,350,196
3.1	411219	Pengembalian Pendapatan PPN Lainnya	51,270,830,774	0
3.0	411221	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	12,834,095,043,005
3.1	411221	Pengembalian Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	39,428,613,740	0
3.0	411222	Pendapatan PPnBM Impor	0	4,108,032,880,889
3.1	411222	Pengembalian Pendapatan PPnBM Impor	27,596,000	0
3.0	411229	Pendapatan PPnBM Lainnya	0	35,034,117,150
3.1	411229	Pengembalian Pendapatan PPnBM Lainnya	60,000,000,000	0
3.0	411313	Pendapatan PBB Perkebunan	0	2,213,778,793,077
3.1	411313	Pengembalian Pendapatan PBB Perkebunan	25,201,323,173	0
3.0	411314	Pendapatan PBB Kehutanan	0	761,402,519,155
3.1	411314	Pengembalian Pendapatan PBB Kehutanan	5,164,785,190	0
3.0	411315	Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	2,255,675,736,914
3.1	411315	Pengembalian Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	537,259,574,287	0
3.0	411316	Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	0	14,540,480,330,129
3.1	411316	Pengembalian Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	158,502,268,000	0
3.0	411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	0	313,275,381,204
3.0	411319	Pendapatan PBB Lainnya	0	86,032,628,009
3.0	411611	Pendapatan Bea Meterai	0	1,470,432,796,442
3.1	411611	Pengembalian Pendapatan Bea Meterai	38,948,000	0
3.0	411612	Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	0	3,985,405,294,453
3.0	411613	Pendapatan PPn Batubara	0	656,409,788,263
3.0	411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	27,617,529,333
3.0	411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	797,113,685,456
3.1	411621	Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPh	811,200,773,318	0
3.0	411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	519,797,175,181
3.1	411622	Pengembalian Pendapatan Bunga Penagihan PPN	19,529,952,723	0
3.0	411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	0	1,166,073,449
3.0	411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	0	3,139,994,377
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0
3.0	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
3.0	425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	0	104,919,620
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,912,500
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,492,582,999
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	6,001,164,806
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,669,327,951

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7,675,616	0
3.0	425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	7,370,171
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	361,929,005
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	5,857,872
3.0	425781	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	2,368,096,627
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	412,796,434
3.0	425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	181,818
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,384,123,720
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	1,175,566,479
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	878,455,498
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,038,795,471
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	503,201,259
3.0	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	737,120,918
3.1	425991	Pengembalian Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	873,233	0
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,528,990,498
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,677,206,818,285	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	150,207,692
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27,072,089	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,085,117
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	107,314,845,371	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	15,309,510
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	32,970,568,082	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	1,838,182
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	44,746,150,820	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	10,475,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	42,405,730,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	9,295,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,682,324,913	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	87,773,143,954	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	3,621,000
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	291,833,303,521	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	51,545,792
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	198,175,000	0
3.1	511135	Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	1,025,000
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	2,802,595,000	0
3.1	511138	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	17,700,000
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	78,081,332,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	166,662,851

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	33,921,850,022	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	14,713,150
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	403,657,979,488	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	23,520,110
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4,340,161,138	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	113,881,838,952	0
3.1	521114	Pengembalian Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	9,450
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	66,691,435,698	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	22,283,500
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	122,218,490,163	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	16,820,809
3.0	521211	Belanja Bahan	106,736,013,467	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	34,626,075
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	13,092,133,544	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	10,500,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	968,101,797,590	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	75,116,425
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	180,952,383,672	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	1,001,000
3.0	521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	161,779,095,800	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	396,304,328	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	170,451,305,400	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	20,243,726,352	0
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	7,446,057
3.0	522113	Belanja Langganan Air	7,466,817,356	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	637,590,773	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	1,510,025,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	221,207,993,535	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	20,222,173,731	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	51,895,580,307	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	79,698,638
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190,599,640,278	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	116,499,180
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	804,669,794	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,436,638,040	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	249,780,909,233	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	34,818,502
3.0	523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	189,896,355	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,314,083,732	0
3.1	523123	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,000,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2018

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PAJAK

Tgl. Cetak 29/04/2019 9:15 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	658,835,244	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	4,012,154,950	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	614,740,171,159	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	730,855,239
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,388,134,895	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	45,895,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,297,516,738	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	31,428,993,840	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	19,888,382
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	7,722,771,741	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	281,911,232
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	328,145,727,600	0
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	7,348,000
3.0	532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	8,400,000	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	428,464,025	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64,297,414,043	0
3.0	533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	14,770,000	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	24,631,500	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	95,477,607,497	0
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	2,120,000
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	3,951,213,451	0
3.0	534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan	82,065,500	0
3.0	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	458,018,984	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	48,616,040,300	0
3.1	536111	Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	0
JUMLAH			**1,550,317,829,525,474**	**1,550,317,829,525,474**

djp

LAMPIRAN F

LAPORAN OPERASIONAL
s.d. 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 1
Tgl Data : 29/4/19 6:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	731,862,897,059,516.36	662,384,817,019,592	69,478,080,039,924.36	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	526,978,008,864,154	479,398,124,117,652	47,579,884,746,502	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	20,136,546,791,758	17,128,469,834,287	3,008,076,957,471	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	1,216,911,547	(1,216,911,547)	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	6,798,020,715,946	11,064,407,124,124	(4,266,386,408,178)	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	1,285,775,473,431,374.36	1,169,977,035,007,202	115,798,438,424,172.36	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	12,497,744,974	14,600,646,173	(2,102,901,199)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	12,497,744,974	14,600,646,173	(2,102,901,199)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,285,787,971,176,348.36	1,169,991,635,653,375	115,796,335,522,973.36	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	2,401,925,173,509	2,298,480,578,507	103,444,595,002	-
Beban Persediaan	195,543,375,619	202,211,090,958	(6,667,715,339)	-
Beban Barang dan Jasa	2,229,458,220,539	2,205,074,811,926	24,383,408,613	-
Beban Pemeliharaan	451,407,514,645	458,575,675,037	(7,168,160,392)	-
Beban Perjalanan Dinas	705,500,408,520	666,004,355,548	39,496,052,972	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	141,109,986,410	153,272,755,475	(12,162,769,065)	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

Kode Lap : LO.ES1
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 2
Tgl Data : 29/4/19 6:00 AM
Prog ID : lap_lo_es1 --

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	611,619,584,470	565,000,069,522	46,619,514,948	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	9,396,535,303,119	20,638,715,266,729	(11,242,179,963,610)	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	16,133,099,566,831	27,187,334,603,702	(11,054,235,036,871)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	1,269,654,871,609,517.36	1,142,804,301,049,673	126,850,570,559,844.36	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	5,128,764,701	2,829,351	5,125,935,350	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8,504,660,305	6,791,422,524	1,713,237,781	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	3,375,895,604	6,788,593,173	(3,412,697,569)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	130,796,599,422	13,751,854,835	117,044,744,587	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	220,552,696,530	150,467,709,485	70,084,987,045	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	89,756,097,108	136,715,854,650	(46,959,757,542)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	135,925,364,123	13,754,684,186	122,170,679,937	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1,269,790,796,973,640.36	1,142,818,055,733,859	126,972,741,239,781.36	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	1,269,790,796,973,640.36	1,142,818,055,733,859	126,972,741,239,781.36	-

djp

LAMPIRAN G

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
per 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN TAHUN 2017
(dalam rupiah)

Kode Lap : Lpe.es1
Tanggal : 28/04/19 10:11
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_es1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 04 DITJEN PAJAK

URAIAN	2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	47,229,463,697,182	23,700,106,897,795	23,529,356,799,387	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	1,269,790,796,973,640.36	1,142,818,055,733,859	126,972,741,239,781.36	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	29,955,816,135,460	25,579,615,548,979	4,376,200,586,481	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1,628,000	19,569,326	(17,941,326)	-
SELISIH REVALUASI ASET	945,902,567	25,505,269,581,847	(25,504,323,679,280)	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(39,269,586,602)	51,051,501,675	(90,321,088,277)	-
LAIN-LAIN	29,994,138,191,495	23,274,896,131	29,970,863,295,364	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,306,656,439,751,957.36)	(1,144,868,314,483,451)	(161,788,125,268,506.36)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(6,909,826,642,857)	23,529,356,799,387	(30,439,183,442,244)	-
EKUITAS AKHIR	40,319,637,054,325	47,229,463,697,182	(6,909,826,642,857)	-

djp

LAMPIRAN H

PENERIMAAN PAJAK
s.d. 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT POTENSI KEPATUHAN DAN PENERIMAAN
JALAN GATOT SUBROTO KAV.40-42 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208; 5251609 FAXSIMILE (021) 52921040; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA
NOMOR BA- 02 /PJ.084/2019

Sehubungan dengan telah selesainya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2018, penerimaan pajak netto tahun 2018 adalah sebesar Rp1.313.322.214.395.010,00 dari target Rp1.423.995.493.162.000,00 dengan pencapaian sebesar 92,23% (rincian kinerja penerimaan per KPP terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Mei 2019

Kepala Bagian Keuangan KPDJP	Kasubdit Administrasi dan Evaluasi Penerimaan	Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur
Ngadenan	Samingun	Petrus Martono

Lampiran Berita Acara
Nomor : BA-02/PJ.084/2019
Tanggal : 3 Mei 2019

Kinerja Penerimaan Per Unit Kerja
Tahun 2018

Kode Kanwil	Kode KPP	Nama Kantor	Target	Realisasi Penerimaan Bruto	Restitusi	Pemindahbukuan		Realisasi Penerimaan Netto	Capaian
						Kirim	Terima		
010	010	Kanwil DJP Aceh	5,315,576,974,000	4,476,846,212,814	115,238,946,102	37,936,973,455	39,883,657,841	4,363,553,951,098	82.09%
010	101	KPP Pratama Banda Aceh	2,021,366,570,000	1,712,627,898,556	34,929,906,556	7,725,819,053	9,165,268,563	1,679,137,441,510	83.07%
010	102	KPP Pratama Lhokseumawe	703,981,717,000	591,926,107,684	10,158,397,339	5,477,538,816	7,500,820,619	583,790,992,148	82.93%
010	103	KPP Pratama Meulaboh	474,795,777,000	467,779,024,548	5,572,572,503	4,966,260,295	4,846,139,693	462,086,331,443	97.32%
010	104	KPP Pratama Bireuen	442,642,384,000	365,154,636,087	15,994,434,118	1,495,906,120	1,544,275,529	349,208,571,378	78.89%
010	105	KPP Pratama Langsa	795,187,536,000	666,860,541,686	21,823,548,741	13,950,165,764	13,080,993,726	644,167,820,907	81.01%
010	106	KPP Pratama Tapaktuan	269,966,543,000	201,892,936,957	336,818,067	1,063,332,011	217,150,868	200,709,937,747	74.35%
010	107	KPP Pratama Subulussalam	332,018,465,000	255,014,642,921	26,071,609,559	2,290,870,592	2,157,466,160	228,809,628,930	68.91%
010	108	KPP Pratama Aceh Besar	275,617,982,000	215,590,424,375	351,659,219	967,080,804	1,371,542,683	215,643,227,035	78.24%
020	020	Kanwil DJP Sumatera Utara I	20,023,523,310,000	21,080,187,987,402	3,880,140,404,968	331,059,962,870	293,994,994,734	17,162,982,614,298	85.71%
020	111	KPP Pratama Medan Barat	601,522,401,000	634,546,093,144	9,247,718,322	5,717,159,718	8,879,470,274	628,460,685,378	104.48%
020	112	KPP Pratama Medan Belawan	523,688,146,000	550,130,960,374	78,478,372,194	13,974,532,743	5,799,200,333	463,477,255,770	88.50%
020	113	KPP Pratama Medan Timur	1,614,158,552,000	1,409,832,396,593	8,427,984,671	6,637,737,030	26,258,698,459	1,421,025,373,351	88.04%
020	119	KPP Pratama Binjai	705,451,737,000	608,247,955,076	832,087,650	1,769,391,071	4,015,610,877	609,662,087,232	86.42%
020	121	KPP Pratama Medan Polonia	2,014,739,273,000	1,697,255,082,557	32,954,635,708	111,406,689,806	36,663,303,849	1,589,557,060,892	78.90%
020	122	KPP Pratama Medan Kota	1,580,529,228,000	1,492,296,438,861	24,106,804,226	21,990,180,929	31,026,449,482	1,477,225,903,188	93.46%
020	123	KPP Madya Medan	9,226,863,232,000	11,122,397,120,052	3,659,499,383,061	86,297,601,203	106,816,079,324	7,483,416,215,112	81.10%
020	124	KPP Pratama Medan Petisah	1,705,154,287,000	1,655,999,125,652	30,290,097,137	58,227,972,578	45,443,852,706	1,612,924,908,643	94.59%
020	125	KPP Pratama Lubuk Pakam	2,051,416,454,000	1,909,482,815,093	36,303,321,999	25,038,697,792	29,092,329,430	1,877,233,124,732	91.51%
030	030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	6,004,354,612,000	5,597,026,568,541	466,210,116,967	42,915,522,560	53,084,215,243	5,140,985,144,257	85.62%
030	114	KPP Pratama Tebing Tinggi	467,947,482,000	439,027,390,856	1,754,797,921	2,754,540,438	4,058,297,209	438,576,349,706	93.72%
030	115	KPP Pratama Kisaran	891,604,663,000	955,473,135,942	101,803,321,766	5,827,103,823	6,484,105,657	854,326,816,010	95.82%
030	116	KPP Pratama Rantau Prapat	1,382,240,175,000	1,166,516,267,482	21,682,342,531	10,686,082,678	12,952,376,444	1,147,100,218,717	82.99%
030	117	KPP Pratama Pematang Siantar	843,684,970,000	826,988,269,382	240,389,293,709	8,587,209,932	8,033,656,013	586,045,421,754	69.46%
030	118	KPP Pratama Padang Sidempuan	1,103,012,638,000	1,102,858,982,258	79,268,645,785	7,860,925,907	9,783,324,557	1,025,512,735,123	92.97%
030	126	KPP Pratama Sibolga	556,077,620,000	474,428,536,055	11,698,220,650	1,646,366,236	2,288,383,029	463,372,332,198	83.33%
030	127	KPP Pratama Balige	480,449,099,000	393,069,145,596	165,592,390	3,907,330,655	6,289,696,749	395,285,919,300	82.27%
030	128	KPP Pratama Kabanjahe	279,337,965,000	238,664,840,970	9,447,902,215	1,645,962,891	3,194,375,585	230,765,351,449	82.61%
040	040	Kanwil DJP Riau	17,216,951,233,000	15,890,072,153,638	1,171,587,103,014	174,409,779,974	173,556,123,009	14,717,631,393,659	85.48%
040	211	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	1,253,989,055,000	1,103,427,247,662	53,533,865,096	7,083,370,877	8,146,777,251	1,050,956,788,940	83.81%
040	212	KPP Pratama Dumai	1,602,144,049,000	1,383,594,005,571	38,372,433,575	7,504,593,312	12,765,535,541	1,350,482,514,225	84.29%
040	213	KPP Pratama Rengat	1,503,427,809,000	1,509,571,695,632	147,832,676,574	14,558,061,114	16,002,960,068	1,363,183,918,012	90.67%
040	216	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	1,954,249,987,000	1,779,177,788,842	125,998,724,086	30,805,921,410	28,166,591,248	1,650,539,734,594	84.46%
040	218	KPP Madya Pekanbaru	5,581,860,896,000	5,132,606,158,440	592,187,417,732	17,814,420,421	31,279,550,479	4,553,883,870,766	81.58%
040	219	KPP Pratama Bengkalis	2,367,529,234,000	2,045,099,071,158	92,071,471,433	10,266,819,924	8,523,281,303	1,951,284,061,104	82.42%
040	221	KPP Pratama Bangkinang	1,196,435,370,000	1,241,400,142,802	39,152,902,220	51,666,965,407	47,173,948,695	1,197,754,223,870	100.11%
040	222	KPP Pratama Pangkalan Kerinci	1,757,314,833,000	1,695,196,043,531	82,437,612,298	34,709,627,509	21,497,478,424	1,599,546,282,148	91.02%
050	050	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	11,384,858,192,000	10,389,891,679,418	831,391,185,900	115,236,403,053	107,487,056,512	9,550,751,146,977	83.89%
050	201	KPP Pratama Padang Satu	2,693,737,094,000	2,372,926,309,953	122,192,459,723	33,613,436,133	22,503,808,012	2,239,624,222,109	83.14%
050	202	KPP Pratama Bukit Tinggi	940,039,102,000	820,537,401,753	65,291,540,186	4,278,689,585	18,274,210,483	769,241,382,465	81.83%
050	203	KPP Pratama Solok	734,012,360,000	633,174,596,238	1,858,183,524	16,056,152,323	9,765,260,824	625,025,521,215	85.15%
050	204	KPP Pratama Payakumbuh	294,893,107,000	249,514,930,971	2,938,786	2,136,266,213	2,016,150,834	249,391,876,806	84.57%
050	205	KPP Pratama Padang Dua	1,276,992,583,000	1,097,698,595,260	20,404,708,873	7,902,751,626	9,399,400,681	1,078,790,535,442	84.48%
050	331	KPP Pratama Jambi Telanaipura	2,814,846,122,000	2,762,933,872,618	566,765,107,845	18,102,420,291	24,271,659,466	2,202,338,003,948	78.24%
050	332	KPP Pratama Muara Bungo	691,724,055,000	737,127,969,835	40,748,113,704	8,506,973,170	10,675,371,217	698,548,254,178	100.99%
050	333	KPP Pratama Bangko	587,838,842,000	606,617,815,338	-	9,202,593,816	3,488,217,904	600,903,439,426	102.22%
050	334	KPP Pratama Kuala Tungkal	724,128,427,000	667,572,648,613	1,194,101,976	14,657,520,066	5,666,590,762	657,387,617,333	90.78%
050	335	KPP Pratama Jambi Pelayangan	626,646,500,000	441,787,538,839	12,934,031,283	779,599,830	1,426,386,329	429,500,294,055	68.54%
060	060	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep.	16,054,645,570,000	15,186,506,753,518	2,006,816,005,249	163,925,696,036	120,016,677,626	13,135,781,729,859	81.82%
060	301	KPP Pratama Palembang Ilir Timur	2,128,023,765,000	1,867,269,070,453	56,862,716,444	67,799,879,242	23,305,285,419	1,765,911,760,186	82.98%
060	302	KPP Pratama Baturaja	554,212,246,000	441,454,017,136	392,675,000	5,964,210,377	5,434,560,643	440,531,692,402	79.49%
060	303	KPP Pratama Lubuk Linggau	621,051,128,000	550,344,630,327	29,889,836,082	2,683,738,942	2,735,414,410	520,506,469,713	83.81%
060	304	KPP Pratama Pangkal Pinang	843,515,837,000	728,186,196,857	45,118,564,774	3,283,075,504	3,210,893,306	682,995,449,885	80.97%
060	305	KPP Pratama Tanjung Pandan	459,261,060,000	405,851,723,915	22,945,427,763	3,876,813,185	3,299,518,120	382,329,001,087	83.25%
060	306	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	350,349,181,000	392,555,469,089	36,631,378,359	3,094,824,272	2,747,359,599	355,576,626,057	101.49%
060	307	KPP Pratama Palembang Ilir Barat	1,524,675,629,000	1,505,345,805,672	25,179,879,046	14,202,165,622	13,134,019,195	1,479,097,780,199	97.01%
060	308	KPP Madya Palembang	3,890,719,128,000	3,427,669,317,261	309,295,359,291	18,006,895,662	24,386,930,508	3,124,753,992,816	80.31%
060	309	KPP Pratama Lahat	558,473,831,000	473,023,332,265	17,238,904,900	4,448,772,602	17,508,575,728	468,844,230,491	83.95%
060	312	KPP Pratama Kayu Agung	(59,705,228,000)	646,434,605,732	1,077,478,543,839	7,921,752,694	5,710,166,301	(433,255,524,500)	-525.66%
060	313	KPP Pratama Prabumulih	2,381,229,185,000	2,349,902,311,660	299,846,420,116	21,668,755,652	7,163,971,479	2,035,551,107,371	85.48%
060	314	KPP Pratama Sekayu	1,556,033,603,000	1,380,866,136,691	22,044,710,708	5,603,460,308	5,752,118,253	1,358,970,083,928	87.34%
060	315	KPP Pratama Bangka	1,246,806,205,000	1,017,604,136,460	63,891,588,927	5,371,351,974	5,627,864,665	953,969,060,224	76.51%
070	070	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	10,443,036,961,000	9,363,958,869,276	220,914,769,136	127,808,897,978	125,949,025,640	9,141,184,227,802	87.53%
070	311	KPP Pratama Bengkulu	1,386,441,716,000	1,163,259,940,372	26,442,551,353	6,731,194,879	4,884,610,849	1,134,970,804,989	81.86%
070	321	KPP Pratama Metro	1,088,571,240,000	913,076,540,774	80,245,507,513	8,694,772,130	15,166,857,283	839,303,118,414	77.10%
070	322	KPP Pratama Tanjung Karang	1,190,960,836,000	1,136,715,237,105	21,698,802,644	9,119,112,603	8,439,680,725	1,114,337,002,583	93.57%
070	323	KPP Pratama Kedaton	1,179,416,021,000	1,136,340,402,705	35,514,023,503	23,271,277,021	19,197,907,105	1,096,753,009,286	92.99%
070	324	KPP Pratama Teluk Betung	1,716,399,376,000	1,774,529,475,926	11,002,912,579	47,638,492,326	46,238,518,619	1,762,126,589,640	102.66%
070	325	KPP Pratama Natar	1,719,985,310,000	1,481,186,563,096	23,660,553,477	8,609,346,866	8,271,012,471	1,457,187,675,224	84.72%
070	326	KPP Pratama Kotabumi	1,300,591,403,000	1,027,785,604,303	3,765,961,474	14,072,365,022	13,435,902,589	1,023,383,180,396	78.69%
070	327	KPP Pratama Curup	234,854,537,000	185,802,599,325	18,120,600	1,025,030,447	552,129,523	185,311,577,801	78.90%
070	328	KPP Pratama Arga Makmur	625,816,522,000	545,262,505,670	18,566,335,993	8,647,306,684	9,762,406,476	527,811,269,469	84.34%
080	080	Kanwil DJP Jakarta Pusat	78,326,753,180,000	77,509,313,574,192	10,816,843,406,506	632,177,720,865	720,472,304,365	66,780,764,751,186	85.26%
080	021	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	1,429,938,450,000	1,154,737,708,148	6,236,666,120	12,530,750,344	12,496,362,171	1,148,466,653,855	80.32%
080	022	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	6,184,673,161,000	6,122,654,304,324	783,543,835,643	34,012,286,956	122,141,729,896	5,427,239,911,621	87.75%
080	023	KPP Pratama Jakarta Senen	1,982,901,692,000	1,760,026,426,751	32,009,723,059	26,310,082,688	37,252,090,626	1,738,958,711,630	87.70%
080	024	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	881,433,547,000	731,576,934,310	7,469,258,107	5,063,433,359	5,873,634,468	724,917,877,312	82.24%
080	025	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	2,273,714,658,000	2,639,398,104,822	24,800,342,600	7,228,910,231	7,308,935,924	2,614,677,787,915	115.00%
080	026	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	4,116,069,892,000	3,678,624,272,278	176,678,081,876	15,161,635,382	16,086,435,636	3,502,870,990,656	85.10%
080	027	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	2,801,951,432,000	2,657,965,054,307	168,685,966,067	13,141,269,070	15,092,538,438	2,491,230,357,608	88.91%
080	028	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	4,043,583,073,000	3,586,036,050,481	94,689,153,970	37,938,592,302	25,256,953,325	3,478,665,257,534	86.03%
080	029	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	2,889,154,190,000	3,207,145,391,112	227,794,301,669	21,771,765,716	20,287,889,217	2,977,867,212,944	103.07%
080	071	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	4,111,919,608,000	4,179,455,266,378	559,085,367,219	42,854,384,415	40,439,690,770	3,617,955,205,514	87.99%
080	072	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	1,968,326,538,000	2,374,794,198,477	255,028,191,695	13,856,496,786	15,120,743,642	2,121,030,253,638	107.76%
080	073	KPP Madya Jakarta Pusat	34,731,884,147,000	33,483,968,204,291	6,836,228,928,850	117,720,859,333	103,307,378,550	26,633,325,794,658	76.68%
080	074	KPP Pratama Jakarta Gambir Empat	1,284,979,753,000	1,078,195,170,496	45,704,027,113	23,860,538,148	25,352,593,293	1,033,983,198,528	80.47%
080	075	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	2,631,907,059,000	2,831,528,643,375	35,859,895,751	213,332,185,202	209,567,330,950	2,791,903,893,372	106.08%
080	076	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	1,767,946,690,000	2,327,646,260,659	538,478,605,347	10,803,159,529	14,921,494,538	1,793,285,990,321	101.43%
080	077	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	5,226,369,290,000	5,695,561,583,983	1,024,551,061,420	36,591,371,404	49,966,502,921	4,684,385,654,080	89.63%
090	090	Kanwil DJP Jakarta Barat	46,294,778,767,000	43,810,504,228,346	2,164,068,139,235	302,970,958,582	299,385,966,500	41,642,851,097,029	89.95%
090	031	KPP Pratama Jakarta Palmerah	3,704,531,435,000	3,625,024,946,038	745,848,047,996	27,498,626,794	25,970,474,837	2,877,648,746,085	77.68%
090	032	KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu	1,725,626,313,000	1,760,632,870,869	7,176,607,541	16,540,570,362	16,621,845,417	1,753,537,538,383	101.62%
090	033	KPP Pratama Jakarta Tambora	2,359,966,798,000	2,024,391,755,782	23,412,147,313	14,038,539,939	13,623,957,907	2,000,565,026,437	84.77%
090	034	KPP Pratama Jakarta Cengkareng	4,655,686,378,000	4,622,641,379,140	162,480,050,236	18,720,318,443	18,021,436,556	4,459,462,447,017	95.79%

Kode Kanwil	Kode KPP	Nama Kantor	Target	Realisasi Penerimaan Bruto	Restitusi	Pemindahbukuan		Realisasi Penerimaan Netto	Capaian
						Kirim	Terima		
090	035	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	2,465,356,490,000	2,352,906,480,360	28,430,536,388	32,700,187,141	31,455,659,151	2,323,231,415,982	94.24%
090	036	KPP Pratama Jakarta Grogol Petambura	3,680,647,860,000	3,543,845,396,704	95,030,820,183	32,005,241,404	26,992,485,440	3,443,801,820,557	93.57%
090	037	KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua	1,759,164,927,000	1,630,643,812,780	150,808,997,006	15,141,531,312	15,881,215,776	1,480,574,500,238	84.16%
090	038	KPP Madya Jakarta Barat	17,831,772,835,000	16,626,747,965,567	779,668,962,451	93,648,539,455	95,837,490,067	15,849,267,953,728	88.88%
090	039	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua	2,647,558,379,000	2,385,818,642,075	60,527,278,314	19,159,965,881	17,776,778,696	2,323,908,176,576	87.78%
090	085	KPP Pratama Jakarta Kalideres	1,936,273,812,000	1,874,652,262,960	13,387,596,521	8,407,897,119	10,608,837,589	1,863,465,606,909	96.24%
090	086	KPP Pratama Jakarta Kembangan	3,528,193,540,000	3,363,198,716,071	97,297,095,286	25,109,540,732	26,595,785,064	3,267,387,865,117	92.61%
100	**100**	**Kanwil DJP Jakarta Selatan I**	**52,700,085,837,000**	**56,561,482,481,923**	**6,366,259,024,943**	**606,538,817,456**	**579,621,995,907**	**50,168,306,635,431**	**95.20%**
100	011	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu	5,090,993,251,000	6,536,042,514,108	1,111,068,468,941	93,510,436,177	80,233,206,991	5,411,696,815,981	106.30%
100	014	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapata	4,936,547,691,000	7,680,739,395,845	2,217,221,826,445	55,103,789,552	55,592,114,290	5,464,005,894,138	110.68%
100	015	KPP Pratama Jakarta Tebet	3,919,826,712,000	4,187,255,085,411	100,690,089,750	36,017,215,732	37,778,420,181	4,088,326,200,110	104.30%
100	018	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua	2,297,176,958,000	2,570,540,303,927	187,033,635,196	26,980,085,355	24,303,624,294	2,380,830,207,670	103.64%
100	061	KPP Pratama Jakarta Pancoran	1,837,157,099,000	2,180,279,002,415	217,543,016,030	25,415,032,904	24,500,514,995	1,961,821,468,476	106.79%
100	062	KPP Madya Jakarta Selatan I	24,761,282,591,000	21,633,024,788,231	987,005,350,944	140,955,183,243	119,539,374,547	20,624,603,628,591	83.29%
100	063	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	2,607,011,154,000	2,871,234,533,657	197,557,931,657	34,965,770,396	34,156,099,517	2,672,866,931,121	102.53%
100	067	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat	7,250,090,381,000	8,902,366,858,329	1,348,138,705,980	193,591,304,097	203,518,641,092	7,564,155,489,344	104.33%
110	**110**	**Kanwil DJP Jakarta Timur**	**26,585,774,302,000**	**26,969,960,857,213**	**1,158,303,460,172**	**225,184,443,190**	**233,392,199,806**	**25,819,865,153,657**	**97.12%**
110	001	KPP Pratama Jakarta Matraman	986,444,864,000	874,347,045,382	40,951,119,017	17,453,524,208	11,446,697,915	827,389,100,072	83.88%
110	002	KPP Pratama Jakarta Jatinegara	2,460,084,374,000	2,763,692,367,673	244,541,479,646	29,526,420,202	39,591,796,041	2,529,216,263,866	102.81%
110	003	KPP Pratama Jakarta Pulogadung	3,304,232,327,000	3,424,964,307,739	40,497,357,922	25,172,355,015	28,958,989,681	3,388,253,584,483	102.54%
110	004	KPP Pratama Jakarta Cakung Satu	2,229,022,362,000	2,948,575,242,968	81,066,251,438	7,617,203,820	8,144,033,301	2,868,035,821,011	128.67%
110	005	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	1,949,477,202,000	1,774,433,335,939	76,257,299,202	22,936,362,011	28,984,765,497	1,704,224,440,223	87.42%
110	006	KPP Pratama Jakarta Cakung Dua	1,517,695,025,000	1,779,162,517,649	62,511,579,209	44,518,304,586	31,686,358,002	1,703,818,991,856	112.26%
110	007	KPP Madya Jakarta Timur	11,054,196,563,000	10,669,416,210,724	526,543,778,850	48,887,892,819	49,934,649,287	10,143,919,188,342	91.77%
110	008	KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	1,323,271,645,000	1,193,039,294,760	36,860,326,134	15,857,713,002	21,216,840,809	1,161,538,096,433	87.78%
110	009	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo	1,761,349,940,000	1,542,330,534,379	49,074,268,754	13,214,667,527	13,428,069,273	1,493,469,667,371	84.79%
120	**120**	**Kanwil DJP Jakarta Utara**	**35,557,710,712,000**	**35,061,715,117,058**	**1,085,933,149,842**	**308,728,979,884**	**318,142,381,297**	**33,985,195,368,629**	**95.58%**
120	041	KPP Pratama Jakarta Penjaringan	3,272,388,612,000	3,484,724,199,880	250,544,446,697	19,627,015,651	19,289,723,936	3,233,842,461,468	98.82%
120	042	KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok	1,129,540,490,000	1,128,255,221,277	9,809,266,427	10,980,970,921	13,154,804,308	1,120,619,788,237	99.21%
120	043	KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	4,507,538,083,000	4,440,432,938,876	104,245,446,883	29,601,588,272	32,494,677,538	4,339,080,581,259	96.26%
120	044	KPP Pratama Jakarta Pademangan	3,180,701,351,000	2,938,987,544,249	28,632,116,417	17,934,658,649	20,307,301,337	2,912,728,070,520	91.58%
120	045	KPP Pratama Jakarta Koja	1,797,511,401,000	1,696,748,518,524	73,474,696,992	18,140,751,141	17,993,646,852	1,623,126,717,243	90.30%
120	046	KPP Madya Jakarta Utara	12,471,224,664,000	12,039,773,794,772	473,587,081,059	78,001,485,935	79,851,794,062	11,568,037,021,840	92.76%
120	047	KPP Pratama Jakarta Pluit	4,544,068,084,000	4,738,729,225,401	59,244,629,062	101,535,621,956	100,579,865,537	4,678,528,839,920	102.96%
120	048	KPP Pratama Jakarta Sunter	4,654,738,027,000	4,594,063,674,079	86,395,466,305	32,906,887,359	34,470,567,727	4,509,231,888,142	96.87%
130	**130**	**Kanwil DJP Jakarta Khusus**	**229,437,299,229,000**	**228,384,232,616,883**	**18,456,059,807,319**	**745,237,166,924**	**883,151,776,383**	**210,066,087,419,023**	**91.56%**
130	052	KPP Penanaman Modal Asing Satu	20,210,403,000,000	20,826,318,061,058	3,086,458,513,188	86,683,652,850	108,778,825,168	17,761,954,720,188	87.89%
130	053	KPP Badan dan Orang Asing (Badora)	6,657,251,229,000	5,880,227,828,875	333,750,759,133	21,325,115,074	25,036,889,503	5,550,188,844,171	83.37%
130	054	KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB)	36,460,519,000,000	34,188,429,731,550	2,349,793,861,770	145,998,923,815	178,496,632,484	31,871,133,578,449	87.41%
130	055	KPP Penanaman Modal Asing Dua	21,393,908,000,000	21,209,580,576,906	1,783,220,090,175	47,555,086,187	88,692,668,211	19,467,498,068,755	91.00%
130	056	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	16,856,609,000,000	17,095,676,812,689	1,490,743,676,041	48,461,340,252	49,502,043,499	15,605,973,839,895	92.58%
130	057	KPP Penanaman Modal Asing Empat	8,912,583,000,000	10,157,365,750,330	2,432,308,374,462	64,991,219,719	68,483,076,151	7,728,549,232,300	86.72%
130	058	KPP Penanaman Modal Asing Lima	19,741,251,000,000	17,998,400,925,413	1,991,420,888,751	67,382,004,395	78,968,739,001	16,018,566,771,268	81.14%
130	059	KPP Penanaman Modal Asing Enam	12,052,615,000,000	11,146,469,415,055	949,436,551,944	55,140,889,969	57,798,387,025	10,199,690,360,167	84.63%
130	081	KPP Minyak dan Gas Bumi	87,152,160,000,000	89,881,763,515,006	4,038,927,091,855	207,698,934,663	227,394,515,341	85,862,532,003,829	98.52%
140	**140**	**Kanwil DJP Banten**	**50,805,211,765,000**	**48,778,091,134,792**	**2,503,785,612,273**	**388,755,109,481**	**379,111,687,007**	**46,264,662,100,045**	**91.06%**
140	401	KPP Pratama Serang Barat	2,548,320,351,000	2,422,907,233,105	206,865,535,138	21,453,919,109	24,761,371,277	2,219,349,150,135	87.09%
140	402	KPP Pratama Tangerang Barat	4,404,229,397,000	4,555,788,302,317	43,123,870,155	24,516,972,041	24,176,889,275	4,512,324,349,396	102.45%
140	411	KPP Pratama Serpong	4,791,813,018,000	4,451,970,639,511	122,693,917,886	48,888,528,113	47,325,758,583	4,327,713,952,095	90.31%
140	415	KPP Madya Tangerang	14,300,266,067,000	12,795,923,066,770	540,101,999,615	85,609,573,040	73,030,950,005	12,243,242,444,120	85.62%
140	416	KPP Pratama Tangerang Timur	3,461,904,581,000	3,447,330,219,356	77,032,215,301	21,024,360,336	31,889,518,371	3,381,163,162,090	97.67%
140	417	KPP Pratama Cilegon	4,540,276,027,000	4,999,043,018,433	441,896,348,245	39,405,002,788	43,451,608,899	4,561,193,276,299	100.46%
140	418	KPP Pratama Kosambi	2,728,437,638,000	2,873,225,796,735	83,402,607,370	26,661,070,993	16,075,958,796	2,779,238,077,168	101.86%
140	419	KPP Pratama Pandeglang	760,762,110,000	675,803,297,250	462,413,724	8,173,169,906	8,043,623,272	675,211,336,892	88.75%
140	451	KPP Pratama Tigaraksa	1,123,502,556,000	1,221,392,785,860	108,682,800,796	7,290,708,207	7,519,660,260	1,112,938,937,117	99.06%
140	452	KPP Pratama Cikupa	8,119,792,212,000	7,677,914,857,863	790,587,577,082	65,630,639,521	62,256,413,094	6,883,953,054,354	84.78%
140	453	KPP Pratama Pondok Aren	3,348,964,900,000	3,075,500,020,719	61,940,888,147	31,740,580,617	31,909,043,049	3,013,727,595,004	89.99%
140	454	KPP Pratama Serang Timur	676,942,908,000	581,291,896,873	26,995,438,814	8,360,584,810	8,670,892,126	554,606,765,375	81.93%
150	**150**	**Kanwil DJP Jawa Barat I**	**32,430,870,564,000**	**30,041,322,327,197**	**1,680,062,485,141**	**301,655,191,194**	**281,429,936,974**	**28,341,034,587,836**	**87.39%**
150	405	KPP Pratama Sukabumi	1,307,664,320,000	1,134,476,160,464	16,984,775,308	10,839,366,322	10,350,053,882	1,117,002,072,716	85.42%
150	406	KPP Pratama Cianjur	608,479,839,000	566,437,548,819	47,722,254,348	11,226,521,286	14,755,878,105	522,244,651,290	85.83%
150	409	KPP Pratama Purwakarta	1,310,827,093,000	1,538,747,959,980	312,773,219,111	14,682,783,382	11,844,706,351	1,223,136,663,838	93.31%
150	421	KPP Pratama Cimahi	1,881,591,362,000	1,795,357,376,201	171,023,220,101	18,519,750,108	14,944,991,247	1,620,759,397,239	86.14%
150	422	KPP Pratama Bandung Tegallega	1,552,367,688,000	1,563,672,226,440	16,456,239,171	16,241,974,022	18,394,042,970	1,549,368,056,217	99.81%
150	423	KPP Pratama Bandung Cibeunying	3,304,013,488,000	2,863,935,835,587	119,291,089,251	30,681,792,111	23,438,264,088	2,737,401,218,313	82.85%
150	424	KPP Pratama Bandung Karees	1,461,411,187,000	1,427,460,178,380	22,821,325,005	22,508,489,692	23,208,688,340	1,405,339,052,023	96.16%
150	425	KPP Pratama Tasikmalaya	894,835,822,000	758,447,449,344	3,244,187,522	5,551,390,895	5,122,140,164	754,774,011,091	84.35%
150	428	KPP Pratama Bandung Bojonagara	1,887,949,484,000	1,724,512,273,102	11,572,146,937	13,476,343,035	13,023,085,872	1,712,486,869,002	90.71%
150	429	KPP Pratama Bandung Cicadas	1,397,577,819,000	1,260,053,026,233	18,170,127,047	10,846,666,173	15,076,617,242	1,246,112,850,255	89.16%
150	441	KPP Madya Bandung	11,918,633,155,000	10,686,184,830,034	477,125,617,701	90,317,700,291	69,595,476,398	10,188,336,988,440	85.48%
150	442	KPP Pratama Ciamis	637,211,473,000	491,326,438,848	1,666,237,992	14,958,600,904	16,230,830,530	490,932,430,482	77.04%
150	443	KPP Pratama Garut	759,385,868,000	557,948,792,160	5,823,402,332	6,109,036,168	4,411,960,016	550,428,313,676	72.48%
150	444	KPP Pratama Majalaya	982,951,780,000	1,001,956,234,125	33,492,523,492	22,104,497,405	24,081,917,441	970,441,130,669	98.73%
150	445	KPP Pratama Soreang	1,912,573,946,000	2,034,031,372,706	395,554,829,114	10,409,005,034	12,781,328,082	1,640,848,866,640	85.79%
150	446	KPP Pratama Sumedang	613,396,240,000	636,774,624,774	26,341,290,709	3,181,274,366	4,169,956,246	611,422,015,945	99.68%
160	**160**	**Kanwil DJP Jawa Barat II**	**40,499,624,330,000**	**41,987,651,399,615**	**2,599,118,070,036**	**309,130,813,091**	**276,496,342,595**	**39,355,898,859,083**	**97.18%**
160	408	KPP Pratama Karawang Utara	3,108,727,689,000	3,384,119,199,957	247,346,439,151	32,508,365,114	30,443,904,484	3,134,708,300,176	100.84%
160	413	KPP Pratama Cikarang Selatan	9,133,348,931,000	10,627,820,285,506	731,324,503,592	40,462,351,868	39,387,995,047	9,895,421,425,093	108.34%
160	414	KPP Pratama Cikarang Utara	1,700,696,082,000	1,695,377,313,833	32,049,152,149	16,156,691,933	14,310,416,689	1,661,481,886,440	97.69%
160	426	KPP Pratama Cirebon Satu	1,394,164,545,000	1,430,310,655,858	30,588,450,806	13,121,123,318	10,701,102,239	1,397,302,183,973	100.23%
160	431	KPP Madya Bekasi	18,408,163,350,000	17,514,299,804,851	1,082,408,067,307	107,922,434,893	97,271,358,827	16,421,240,661,478	89.21%
160	433	KPP Pratama Karawang Selatan	2,397,175,238,000	2,774,820,340,567	316,391,290,924	54,099,923,312	39,851,538,754	2,444,180,665,085	101.96%
160	435	KPP Pratama Cibitung	1,729,155,058,000	1,810,806,057,359	45,628,109,915	20,679,143,769	20,774,082,442	1,765,272,886,117	102.09%
160	437	KPP Pratama Indramayu	695,119,774,000	712,437,748,112	15,866,612,449	7,973,152,695	7,428,424,187	696,026,407,155	100.13%
160	438	KPP Pratama Kuningan	692,610,012,000	698,416,048,068	28,006,410,122	5,994,482,099	5,333,270,243	669,748,426,090	96.70%
160	439	KPP Pratama Subang	979,737,828,000	1,060,596,734,245	66,821,013,812	3,107,245,739	3,763,076,167	994,431,550,861	101.50%
160	455	KPP Pratama Cirebon Dua	260,725,823,000	278,647,211,259	2,688,019,809	7,105,898,351	7,231,173,516	276,084,466,615	105.89%
170	**170**	**Kanwil DJP Jawa Tengah I**	**32,167,579,948,000**	**27,792,185,519,302**	**1,129,930,071,720**	**279,703,739,301**	**275,505,999,100**	**26,658,057,707,381**	**82.87%**
170	501	KPP Pratama Tegal	1,119,533,193,000	902,801,683,533	45,832,548,273	5,376,226,810	5,112,486,149	856,705,394,599	76.52%
170	502	KPP Pratama Pekalongan	823,857,642,000	701,598,426,201	6,221,606,234	8,145,940,587	8,712,171,341	695,943,050,721	84.47%
170	503	KPP Pratama Semarang Barat	2,151,363,288,000	1,861,167,897,603	122,324,208,687	20,387,603,256	17,622,479,177	1,736,078,564,837	80.70%
170	504	KPP Pratama Semarang Timur	1,126,989,321,000	1,062,118,573,115	26,622,010,345	59,930,439,522	60,015,918,445	1,035,582,041,693	91.89%
170	505	KPP Pratama Salatiga	961,627,148,000	903,937,662,582	27,508,923,081	25,329,941,186	7,576,033,738	858,674,832,053	89.29%
170	506	KPP Pratama Kudus	2,031,861,589,000	1,758,470,354,936	35,275,916,588	13,126,526,677	10,797,108,733	1,720,865,020,404	84.69%
170	507	KPP Pratama Pati	784,592,558,000	636,911,470,072	6,657,435,159	6,582,598,327	6,053,926,033	629,725,362,619	80.26%
170	508	KPP Pratama Semarang Selatan	398,089,319,000	337,972,855,984	5,939,206,875	30,756,550,040	29,586,250,791	330,863,349,860	83.11%
170	509	KPP Pratama Semarang Tengah Dua	369,926,101,000	385,206,352,788	14,852,040,257	2,775,930,183	4,226,443,973	371,804,826,321	100.51%
170	511	KPP Madya Semarang	16,885,540,599,000	13,829,029,141,965	548,579,370,316	47,734,751,526	70,197,924,613	13,302,912,944,736	78.78%
170	512	KPP Pratama Semarang Tengah Satu	577,353,579,000	498,518,190,124	20,421,399,233	7,929,132,241	10,180,082,064	480,347,740,714	83.20%
170	513	KPP Pratama Batang	756,223,147,000	956,821,629,343	62,674,647,139	8,052,713,001	7,418,399,951	893,512,669,154	118.15%
170	514	KPP Pratama Blora	712,822,437,000	637,112,501,978	19,437,734,966	3,214,578,892	3,159,498,856	617,619,686,976	86.64%
170	515	KPP Pratama Demak	603,381,387,000	617,738,028,737	27,415,664,522	7,403,656,582	6,552,718,639	589,471,426,272	97.69%
170	516	KPP Pratama Jepara	763,025,891,000	745,572,749,619	94,952,096,795	15,953,745,623	11,083,686,279	645,750,593,480	84.63%
170	517	KPP Pratama Semarang Candisari	1,161,861,402,000	1,046,747,090,477	34,520,069,281	9,247,202,425	8,051,966,097	1,011,031,784,868	87.02%

Kode Kanwil	Kode KPP	Nama Kantor	Target	Realisasi Penerimaan Bruto	Restitusi	Pemindahbukuan		Realisasi Penerimaan Netto	Capaian
						Kirim	Terima		
170	518	KPP Pratama Semarang Gayamsari	939,531,347,000	910,460,910,245	30,695,193,969	7,756,202,423	9,158,904,221	881,168,418,074	93.79%
180	**180**	**Kanwil DJP Jawa Tengah II**	**12,508,049,536,000**	**11,772,519,869,798**	**350,730,229,336**	**197,538,299,827**	**199,762,901,663**	**11,424,014,242,298**	**91.33%**
180	521	KPP Pratama Purwokerto	1,068,786,416,000	938,104,865,993	59,658,322,613	8,838,708,833	8,713,936,587	878,321,771,134	82.18%
180	522	KPP Pratama Cilacap	1,619,961,911,000	1,370,681,601,166	12,964,866,970	14,238,877,166	14,597,292,953	1,358,075,149,983	83.83%
180	523	KPP Pratama Kebumen	391,316,532,000	324,475,119,546	480,203,169	8,422,548,861	7,980,607,345	323,552,974,861	82.68%
180	524	KPP Pratama Magelang	854,737,494,000	799,519,499,523	6,376,261,022	5,267,841,648	7,345,783,342	795,221,180,195	93.04%
180	525	KPP Pratama Klaten	677,913,354,000	626,370,330,261	11,388,723,932	6,916,380,714	5,807,230,358	613,872,455,973	90.55%
180	526	KPP Pratama Surakarta	1,791,576,008,000	1,815,772,653,157	90,114,451,681	56,274,835,028	57,444,319,420	1,726,827,685,868	96.39%
180	527	KPP Pratama Boyolali	652,889,440,000	578,092,639,633	24,117,893,072	6,473,589,401	6,778,007,410	554,279,164,570	84.90%
180	528	KPP Pratama Karanganyar	2,237,568,129,000	2,281,245,187,702	104,417,072,785	15,129,495,398	15,729,489,996	2,177,428,109,515	97.31%
180	529	KPP Pratama Purbalingga	696,686,987,000	576,301,463,743	9,155,975,204	9,454,163,679	9,567,164,904	567,258,489,764	81.42%
180	531	KPP Pratama Purworejo	279,997,917,000	271,274,501,328	238,391,733	2,590,271,841	2,576,844,440	271,022,682,194	96.79%
180	532	KPP Pratama Sukoharjo	1,442,187,427,000	1,383,845,214,274	18,672,693,097	53,892,809,198	53,468,713,962	1,364,748,425,941	94.63%
180	533	KPP Pratama Temanggung	794,427,921,000	806,836,793,472	13,145,374,058	10,038,778,060	9,753,510,946	793,406,152,300	99.87%
190	**190**	**Kanwil DJP D.I. Yogyakarta**	**5,483,972,797,000**	**5,107,237,718,117**	**110,228,484,828**	**56,675,768,950**	**54,059,206,222**	**4,994,392,670,561**	**91.07%**
190	541	KPP Pratama Yogyakarta	2,195,413,922,000	2,025,099,704,091	75,520,284,572	22,059,175,056	20,879,681,354	1,948,399,925,817	88.75%
190	542	KPP Pratama Sleman	1,994,308,105,000	1,860,777,555,561	15,206,181,428	15,048,279,538	12,976,121,197	1,843,499,215,792	92.44%
190	543	KPP Pratama Bantul	866,806,120,000	841,257,585,981	14,775,826,387	14,115,919,595	14,332,562,407	826,698,402,406	95.37%
190	544	KPP Pratama Wates	215,877,235,000	206,291,552,311	3,563,406,247	2,231,801,040	2,464,573,853	202,960,918,877	94.02%
190	545	KPP Pratama Wonosari	211,567,415,000	173,811,320,173	1,162,786,194	3,220,593,721	3,406,267,411	172,834,207,669	81.69%
200	**200**	**Kanwil DJP Jawa Timur I**	**46,895,802,576,000**	**42,441,233,009,633**	**1,658,260,093,119**	**881,318,359,100**	**895,917,429,749**	**40,797,571,987,163**	**87.00%**
200	604	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	2,029,103,493,000	2,170,605,103,925	131,358,705,076	12,725,969,754	12,163,122,552	2,038,683,551,647	100.47%
200	605	KPP Pratama Surabaya Krembangan	760,701,189,000	647,120,510,139	19,460,001,403	10,867,730,795	10,378,498,155	627,171,276,096	82.45%
200	606	KPP Pratama Surabaya Gubeng	1,870,523,858,000	1,728,951,618,513	60,307,120,257	16,198,873,627	17,041,513,828	1,669,487,138,457	89.25%
200	607	KPP Pratama Surabaya Tegalsari	881,044,668,000	734,994,984,495	26,318,820,350	5,080,981,898	5,500,942,012	709,096,124,259	80.48%
200	609	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	2,434,516,154,000	2,196,422,596,020	54,720,070,105	16,386,801,676	16,073,334,837	2,141,389,059,076	87.96%
200	611	KPP Pratama Surabaya Genteng	1,343,773,639,000	1,359,989,042,777	26,023,932,625	9,004,947,555	10,207,415,331	1,335,167,577,928	99.36%
200	613	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikar	1,298,797,270,000	1,176,087,382,821	149,940,728,638	19,074,065,858	19,828,273,356	1,026,900,861,681	79.07%
200	614	KPP Pratama Surabaya Sawahan	2,077,170,790,000	1,966,121,987,994	70,587,599,826	11,146,090,751	12,147,156,326	1,896,535,453,743	91.30%
200	615	KPP Pratama Surabaya Rungkut	1,436,169,037,000	1,280,908,434,526	113,577,431,547	21,902,364,760	13,326,447,251	1,158,755,085,470	80.68%
200	616	KPP Pratama Surabaya Simokerto	366,624,121,000	391,642,931,305	23,558,739,016	4,694,433,831	4,124,617,100	367,514,375,558	100.24%
200	618	KPP Pratama Surabaya Karangpilang	1,567,514,207,000	1,258,534,682,050	26,636,016,350	8,041,401,182	10,661,086,052	1,234,518,350,570	78.76%
200	619	KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	1,426,013,336,000	1,280,132,994,992	18,707,575,726	16,266,163,987	16,153,021,957	1,261,312,277,236	88.45%
200	631	KPP Madya Surabaya	29,403,850,814,000	26,249,720,740,076	937,063,352,200	729,928,533,426	748,312,000,992	25,331,040,855,442	86.15%
210	**210**	**Kanwil DJP Jawa Timur II**	**21,976,754,172,000**	**20,571,989,815,982**	**1,414,240,185,818**	**181,576,743,730**	**205,749,510,042**	**19,181,922,396,476**	**87.28%**
210	601	KPP Pratama Bojonegoro	675,242,723,000	492,145,026,836	5,725,729,105	8,707,346,039	3,437,704,320	481,149,656,012	71.26%
210	602	KPP Pratama Mojokerto	1,546,992,295,000	1,549,793,774,349	114,283,854,489	9,188,017,590	8,523,282,636	1,434,845,184,906	92.75%
210	603	KPP Pratama Sidoarjo Barat	991,664,000,000	952,839,526,460	40,775,358,478	9,375,373,367	10,165,556,580	912,854,351,195	92.05%
210	608	KPP Pratama Pamekasan	515,349,000,000	482,701,366,722	574,658,034	3,639,089,485	3,486,361,233	481,973,980,436	93.52%
210	612	KPP Pratama Gresik Utara	3,108,376,000,000	2,723,037,801,289	169,945,512,647	18,784,760,072	21,943,824,972	2,556,251,353,542	82.24%
210	617	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	889,180,000,000	796,625,294,963	13,684,122,602	10,959,515,809	10,614,726,148	782,596,382,700	88.01%
210	621	KPP Pratama Madiun	717,732,000,000	669,718,573,844	5,330,087,659	5,237,651,802	6,662,374,151	665,813,208,534	92.77%
210	641	KPP Madya Sidoarjo	8,438,013,344,000	8,355,277,186,658	766,087,010,148	60,904,894,346	88,521,838,957	7,616,807,121,121	90.27%
210	642	KPP Pratama Gresik Selatan	915,884,969,000	919,206,841,160	192,995,063,077	9,124,072,780	10,871,590,874	727,959,296,177	79.48%
210	643	KPP Pratama Sidoarjo Utara	1,379,360,000,000	1,348,367,537,735	81,835,553,145	14,579,964,836	12,323,828,862	1,264,275,848,616	91.66%
210	644	KPP Pratama Bangkalan	375,522,000,000	300,772,710,849	1,985,943,162	1,793,227,497	1,091,681,769	298,085,221,959	79.38%
210	645	KPP Pratama Lamongan	629,947,031,000	487,899,834,162	11,927,020,057	15,650,057,369	15,677,880,198	476,000,636,934	75.56%
210	646	KPP Pratama Ngawi	448,987,105,000	353,771,888,049	4,028,132,744	3,297,006,686	3,039,882,475	349,486,631,094	77.84%
210	647	KPP Pratama Ponorogo	482,555,000,000	409,159,468,217	2,351,505,117	2,117,527,631	2,147,402,251	406,837,837,720	84.31%
210	648	KPP Pratama Tuban	694,895,000,000	588,035,377,828	2,373,720,096	6,512,841,206	5,568,614,457	584,717,430,983	84.14%
210	649	KPP Pratama Jombang	167,053,705,000	142,637,606,861	336,915,258	1,705,397,215	1,672,960,159	142,268,254,547	85.16%
220	**220**	**Kanwil DJP Jawa Timur III**	**31,537,903,491,000**	**30,021,014,054,460**	**462,296,072,848**	**846,808,957,755**	**838,774,751,713**	**29,550,683,775,570**	**93.70%**
220	622	KPP Pratama Kediri	1,268,668,179,000	784,662,998,919	8,770,139,602	5,548,278,510	5,830,038,572	776,174,619,379	61.18%
220	623	KPP Pratama Malang Selatan	953,639,054,000	807,814,166,804	2,674,036,833	19,151,939,521	18,536,490,552	804,524,681,002	84.36%
220	624	KPP Pratama Pasuruan	1,894,145,735,000	2,032,902,660,547	76,691,437,451	22,846,517,939	13,754,999,692	1,947,119,704,849	102.80%
220	625	KPP Pratama Probolinggo	955,744,614,000	744,692,790,294	9,415,946,822	3,480,266,298	3,071,263,798	734,867,840,972	76.89%
220	626	KPP Pratama Jember	942,659,468,000	714,124,858,978	4,219,764,440	8,929,059,301	7,309,672,565	708,285,707,802	75.14%
220	627	KPP Pratama Banyuwangi	591,934,757,000	614,821,936,021	20,792,184,097	12,473,402,805	12,434,754,482	593,991,103,601	100.35%
220	628	KPP Pratama Batu	163,147,801,000	137,831,100,215	103,615,405	4,758,304,339	1,714,817,747	134,683,998,218	82.55%
220	629	KPP Pratama Tulungagung	737,160,126,000	589,662,888,783	1,755,116,940	4,368,809,383	4,165,413,867	587,704,376,327	79.73%
220	651	KPP Madya Malang	19,707,187,490,000	20,018,154,356,735	292,542,744,943	693,267,276,111	698,464,939,831	19,730,809,275,512	100.12%
220	652	KPP Pratama Malang Utara	733,628,809,000	619,325,599,835	9,648,160,776	10,553,253,678	9,912,411,430	609,036,596,811	83.02%
220	653	KPP Pratama Blitar	544,280,679,000	385,001,408,596	2,769,728,327	4,067,703,614	6,932,174,216	385,096,150,871	70.75%
220	654	KPP Pratama Kepanjen	944,735,111,000	765,526,051,588	4,525,435,615	31,770,264,508	31,105,330,067	760,335,681,532	80.48%
220	655	KPP Pratama Pare	861,935,579,000	766,293,772,613	20,076,247,715	6,480,171,197	5,906,810,981	745,644,164,682	86.51%
220	656	KPP Pratama Situbondo	459,459,108,000	399,838,237,526	1,786,651,728	10,586,003,304	10,091,757,141	397,557,339,635	86.53%
220	657	KPP Pratama Singosari	779,576,981,000	640,361,227,006	6,524,862,154	8,527,707,247	9,543,876,772	634,852,534,377	81.44%
230	**230**	**Kanwil DJP Kalimantan Barat**	**7,294,089,818,000**	**6,595,736,188,952**	**132,628,342,076**	**105,480,419,354**	**97,524,709,415**	**6,455,152,136,937**	**88.50%**
230	701	KPP Pratama Pontianak Barat	2,319,483,018,000	2,262,269,274,829	14,779,281,119	59,641,987,766	60,751,301,765	2,248,599,307,709	96.94%
230	702	KPP Pratama Singkawang	871,150,561,000	661,472,268,372	1,271,752,413	8,311,244,774	11,284,396,727	663,173,667,912	76.13%
230	703	KPP Pratama Ketapang	886,242,944,000	764,308,086,444	11,810,096,652	8,370,290,523	8,583,208,677	752,710,907,946	84.93%
230	704	KPP Pratama Mempawah	843,747,153,000	838,401,210,675	70,419,375,726	17,203,754,741	5,049,553,441	755,827,633,649	89.58%
230	705	KPP Pratama Sanggau	930,487,078,000	847,508,707,507	17,965,645,941	6,735,769,052	6,626,273,184	829,433,565,698	89.14%
230	706	KPP Pratama Sintang	848,523,816,000	708,121,962,569	1,353,771,490	2,245,321,153	2,241,198,279	706,764,068,205	83.29%
230	707	KPP Pratama Pontianak Timur	594,455,248,000	513,654,678,556	15,028,418,735	2,972,051,345	2,988,777,342	498,642,985,818	83.88%
240	**240**	**Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Te**	**14,639,285,326,000**	**13,776,715,820,513**	**610,689,884,699**	**284,552,558,635**	**196,977,454,819**	**13,078,450,831,998**	**89.34%**
240	711	KPP Pratama Palangkaraya	1,729,272,832,000	1,473,447,899,977	39,393,259,391	12,398,087,213	13,562,760,371	1,435,219,313,744	83.00%
240	712	KPP Pratama Sampit	1,833,425,456,000	1,311,013,435,748	56,482,248,750	15,459,789,092	13,817,237,706	1,252,888,635,612	68.34%
240	713	KPP Pratama Pangkalan Bun	1,819,922,506,000	1,564,676,673,296	22,488,386,627	13,236,916,645	12,778,695,728	1,541,730,065,752	84.71%
240	714	KPP Pratama Muarateweh	761,213,116,000	706,335,052,874	9,989,692,136	33,879,480,523	11,739,567,961	674,205,448,176	88.57%
240	731	KPP Pratama Banjarmasin Utara	2,311,524,393,000	2,360,711,358,636	327,921,004,529	85,516,067,391	22,653,241,583	1,969,927,528,299	85.22%
240	732	KPP Pratama Banjarbaru	1,925,878,987,000	2,040,526,064,995	73,072,554,565	37,247,474,300	35,044,151,632	1,965,250,187,762	102.04%
240	733	KPP Pratama Barabai	761,419,845,000	814,862,727,026	2,016,576,682	15,525,564,160	16,362,906,102	813,683,492,286	106.86%
240	734	KPP Pratama Batulicin	1,801,750,718,000	2,016,515,428,839	71,916,498,034	60,038,006,161	59,709,152,855	1,944,270,077,499	107.91%
240	735	KPP Pratama Tanjung	1,035,368,656,000	765,272,227,472	2,892,446,140	7,902,225,211	7,596,817,577	762,074,373,698	73.60%
240	736	KPP Pratama Banjarmasin Selatan	659,508,817,000	723,354,951,650	4,517,217,845	3,348,947,939	3,712,923,304	719,201,709,170	109.05%
250	**250**	**Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utar**	**20,853,958,958,000**	**20,424,813,050,150**	**1,242,356,352,064**	**178,595,989,942**	**205,216,930,237**	**19,209,077,638,381**	**92.11%**
250	721	KPP Pratama Balikpapan Timur	1,839,538,233,000	1,876,624,654,151	129,363,804,020	27,170,664,056	26,275,938,840	1,746,366,124,915	94.94%
250	722	KPP Pratama Samarinda Ilir	2,538,110,656,000	2,264,668,405,553	65,696,882,053	32,202,403,945	28,720,300,717	2,195,489,420,272	86.50%
250	723	KPP Pratama Tarakan	920,321,728,000	835,419,370,970	4,041,194,565	6,270,667,786	10,203,344,402	835,310,853,021	90.76%
250	724	KPP Pratama Bontang	3,476,020,116,000	2,483,605,006,224	31,429,443,438	12,939,398,883	32,343,321,533	2,471,579,485,436	71.10%
250	725	KPP Madya Balikpapan	5,557,242,876,000	5,834,788,015,488	509,791,140,373	51,688,805,615	64,142,122,713	5,337,450,192,213	96.04%
250	726	KPP Pratama Penajam	720,664,804,000	895,169,049,599	225,651,040,716	7,419,646,715	5,077,312,153	667,175,674,321	92.58%
250	727	KPP Pratama Tanjung Redeb	1,553,819,192,000	1,456,401,422,604	118,397,981,326	12,669,682,457	7,869,917,294	1,333,203,676,115	85.80%
250	728	KPP Pratama Tenggarong	3,522,707,595,000	4,077,917,351,362	114,474,136,790	24,976,251,422	27,679,604,046	3,966,146,567,196	112.59%
250	729	KPP Pratama Balikpapan Barat	258,576,263,000	258,315,643,258	25,451,394,175	1,361,636,712	1,164,821,082	232,667,433,453	89.98%
250	741	KPP Pratama Samarinda Ulu	466,957,495,000	441,904,130,940	18,059,334,608	1,896,832,351	1,740,247,457	423,688,211,438	90.73%
260	**260**	**Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dar**	**14,079,229,306,000**	**12,941,428,388,873**	**444,421,514,420**	**183,060,994,683**	**195,463,819,806**	**12,509,409,699,576**	**88.85%**
260	801	KPP Pratama Makassar Utara	1,222,519,202,000	1,264,680,540,070	57,596,076,234	9,350,648,732	16,713,868,822	1,214,447,683,926	99.34%
260	802	KPP Pratama Parepare	567,306,214,000	464,092,185,932	949,587,794	6,263,249,884	4,368,802,980	461,248,151,234	81.30%
260	803	KPP Pratama Palopo	865,988,798,000	833,415,568,918	821,889,748	29,169,120,931	16,589,224,342	820,013,782,581	94.69%
260	804	KPP Pratama Makassar Barat	1,086,353,748,000	1,013,904,057,985	15,795,488,397	7,562,473,073	17,897,290,140	1,008,443,386,655	92.83%
260	805	KPP Pratama Makassar Selatan	1,519,662,457,000	1,405,219,478,968	85,153,990,749	20,988,190,185	27,862,851,436	1,326,940,149,470	87.32%
260	806	KPP Pratama Bulukumba	312,300,375,000	265,221,571,472	2,637,846,801	5,748,717,767	7,413,183,656	264,248,190,560	84.61%

Kode Kanwil	Kode KPP	Nama Kantor	Target	Realisasi Penerimaan Bruto	Restitusi	Pemindahbukuan		Realisasi Penerimaan Netto	Capaian
						Kirim	Terima		
260	807	KPP Pratama Bantaeng	553,110,304,000	519,990,607,374	878,390,159	6,899,052,918	4,431,227,823	516,644,392,120	93.41%
260	808	KPP Pratama Watampone	466,358,736,000	377,063,691,003	2,246,343,242	8,981,526,416	4,688,637,814	370,524,459,159	79.45%
260	809	KPP Pratama Maros	638,391,547,000	566,616,113,030	6,340,995,377	7,210,610,935	6,706,798,809	559,771,305,527	87.68%
260	811	KPP Pratama Kendari	1,060,834,375,000	1,044,951,910,921	11,329,550,154	15,003,816,545	25,777,231,814	1,044,395,776,036	98.45%
260	812	KPP Madya Makassar	4,091,603,632,000	3,739,356,539,996	241,311,504,908	34,380,779,904	43,726,005,321	3,507,390,260,505	85.72%
260	813	KPP Pratama Majene	283,674,637,000	233,843,265,929	1,041,627,094	7,277,208,547	1,690,417,258	227,214,847,546	80.10%
260	814	KPP Pratama Mamuju	461,587,502,000	388,686,605,865	4,145,408,784	2,831,824,436	2,979,972,441	384,689,345,086	83.34%
260	815	KPP Pratama Kolaka	378,441,434,000	397,915,042,921	10,605,632,119	11,475,774,072	5,847,566,298	381,681,203,028	100.86%
260	816	KPP Pratama Bau-bau	571,096,345,000	426,471,208,489	3,567,182,860	9,918,000,338	8,770,740,852	421,756,766,143	73.85%
270	**270**	**Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Go**	**10,138,303,536,000**	**8,740,425,629,234**	**146,242,657,955**	**250,587,268,917**	**170,270,164,974**	**8,513,865,867,336**	**83.98%**
270	821	KPP Pratama Manado	2,286,531,049,000	1,942,249,189,768	62,839,015,553	30,600,293,632	24,027,106,247	1,872,836,986,830	81.91%
270	822	KPP Pratama Gorontalo	971,231,852,000	792,465,850,821	10,219,420,766	59,971,764,653	24,872,199,286	747,146,864,688	76.93%
270	823	KPP Pratama Bitung	1,051,930,222,000	885,937,965,384	12,463,725,834	26,138,806,675	28,172,794,102	875,508,226,977	83.23%
270	824	KPP Pratama Kotamobagu	658,557,346,000	571,165,070,769	16,997,088	14,637,353,928	4,796,363,778	561,307,083,531	85.23%
270	825	KPP Pratama Tahuna	204,339,126,000	156,631,558,140	2,994,618,175	736,988,902	434,319,103	153,334,270,166	75.04%
270	831	KPP Pratama Palu	1,436,084,093,000	1,223,145,915,211	6,759,744,474	38,223,173,144	36,079,823,422	1,214,242,821,015	84.55%
270	832	KPP Pratama Luwuk	704,472,015,000	549,376,372,780	6,770,436,731	14,119,340,071	6,664,193,701	535,150,789,679	75.96%
270	833	KPP Pratama Poso	833,205,466,000	835,549,775,236	5,332,993,369	12,230,063,274	7,986,151,010	825,972,869,603	99.13%
270	834	KPP Pratama Toli-toli	376,349,785,000	326,760,522,323	2,587,121,393	4,662,228,315	936,086,100	320,447,258,715	85.15%
270	942	KPP Pratama Ternate	1,092,299,514,000	992,336,677,851	6,739,058,146	47,944,796,753	35,017,936,489	972,670,759,441	89.05%
270	943	KPP Pratama Tobelo	523,303,068,000	464,806,730,951	29,519,526,426	1,322,459,570	1,283,191,736	435,247,936,691	83.17%
280	**280**	**Kanwil DJP Bali**	**10,532,984,643,000**	**9,846,591,104,518**	**268,516,717,042**	**105,006,963,513**	**113,760,855,023**	**9,586,828,278,986**	**91.02%**
280	901	KPP Pratama Denpasar Barat	860,590,640,000	869,351,828,185	6,567,032,740	15,002,655,569	15,055,758,512	862,837,898,388	100.26%
280	902	KPP Pratama Singaraja	331,037,240,000	336,693,255,529	2,136,952,174	4,159,607,469	4,196,013,669	334,592,709,555	101.07%
280	903	KPP Pratama Denpasar Timur	939,769,845,000	881,797,552,007	11,588,132,990	13,945,431,237	14,508,578,107	870,772,565,887	92.66%
280	904	KPP Madya Denpasar	5,315,814,045,000	4,779,378,830,272	155,765,455,420	27,246,281,642	32,232,137,986	4,628,599,231,196	87.07%
280	905	KPP Pratama Badung Selatan	1,263,200,963,000	1,227,794,728,762	83,632,029,373	18,863,584,803	23,516,534,218	1,148,815,648,804	90.94%
280	906	KPP Pratama Badung Utara	660,034,517,000	631,293,424,190	3,017,539,420	9,933,391,533	6,809,253,064	625,151,746,301	94.72%
280	907	KPP Pratama Gianyar	727,605,240,000	702,261,462,773	5,278,697,892	11,881,054,431	12,969,330,159	698,071,040,609	95.94%
280	908	KPP Pratama Tabanan	434,932,153,000	418,020,022,800	530,877,033	3,974,956,829	4,473,249,308	417,987,438,246	96.10%
290	**290**	**Kanwil DJP Nusa Tenggara**	**5,961,149,641,000**	**5,366,761,069,477**	**87,699,920,893**	**99,787,590,273**	**92,336,556,533**	**5,271,610,114,844**	**88.43%**
290	911	KPP Pratama Mataram Barat	1,238,403,152,000	1,149,081,998,267	22,115,369,618	10,901,769,668	13,698,472,341	1,129,763,331,322	91.23%
290	912	KPP Pratama Raba Bima	372,360,374,000	353,229,414,709	7,461,362,064	5,171,983,971	2,973,425,016	343,569,493,690	92.27%
290	913	KPP Pratama Sumbawa Besar	652,894,607,000	597,352,068,278	7,368,236,915	12,448,528,711	5,700,293,304	583,235,595,956	89.33%
290	914	KPP Pratama Mataram Timur	383,747,579,000	326,267,572,674	5,038,129,985	3,899,422,127	10,486,805,134	327,816,825,696	85.43%
290	915	KPP Pratama Praya	465,776,289,000	429,030,621,763	436,268,478	27,985,369,596	21,939,995,470	422,548,979,159	90.72%
290	921	KPP Pratama Maumere	263,164,002,000	249,580,075,208	6,491,385,538	5,634,217,897	4,833,145,247	242,287,617,020	92.07%
290	922	KPP Pratama Kupang	1,373,559,760,000	1,165,757,072,616	15,630,327,448	12,847,095,594	9,402,476,359	1,146,682,125,933	83.48%
290	923	KPP Pratama Ende	278,894,939,000	250,667,484,154	1,152,954,989	2,691,785,660	2,205,618,636	249,028,362,141	89.29%
290	924	KPP Pratama Ruteng	307,142,210,000	280,175,678,828	19,905,138,897	5,162,124,311	7,395,399,011	262,503,814,631	85.47%
290	925	KPP Pratama Atambua	318,293,672,000	273,894,478,400	2,038,397,882	9,292,615,781	9,214,956,103	271,778,420,840	85.39%
290	926	KPP Pratama Waingapu	306,913,057,000	291,724,604,580	62,349,079	3,752,676,957	4,485,969,912	292,395,548,456	95.27%
300	**300**	**Kanwil DJP Papua dan Maluku**	**11,716,547,496,000**	**9,963,200,350,368**	**421,169,317,953**	**111,662,127,462**	**111,795,646,334**	**9,542,164,551,287**	**81.44%**
300	941	KPP Pratama Ambon	1,938,834,475,000	1,651,989,631,805	15,961,218,765	51,375,376,307	43,804,081,510	1,628,457,118,243	83.99%
300	951	KPP Pratama Sorong	1,500,248,454,000	1,233,068,689,063	19,219,099,237	11,152,529,949	10,856,849,093	1,213,553,908,970	80.89%
300	952	KPP Pratama Jayapura	2,881,994,949,000	2,373,879,257,411	129,714,524,669	20,830,000,001	21,610,039,566	2,244,944,772,307	77.90%
300	953	KPP Pratama Timika	2,722,231,128,000	2,491,651,024,584	4,612,925,451	3,674,500,848	10,607,964,465	2,493,971,562,750	91.61%
300	954	KPP Pratama Biak	675,699,297,000	510,300,479,953	75,966,460,940	12,336,597,466	12,534,714,152	434,532,135,699	64.31%
300	955	KPP Pratama Manokwari	1,251,996,667,000	1,078,040,655,114	151,697,754,230	7,150,564,211	6,514,388,818	925,706,725,491	73.94%
300	956	KPP Pratama Merauke	745,542,526,000	624,270,612,438	23,997,334,661	5,142,558,680	5,867,608,730	600,998,327,827	80.61%
310	**310**	**Kanwil DJP Wajib Pajak Besar**	**433,264,553,607,000**	**471,383,217,265,264**	**52,407,504,200,035**	**14,537,389,166,491**	**14,581,357,817,596**	**419,019,681,716,334**	**96.71%**
310	051	KPP Wajib Pajak Besar Tiga	95,427,785,251,000	103,137,103,604,152	7,291,729,714,978	7,311,208,481,406	7,259,250,939,902	95,793,416,347,670	100.38%
310	091	KPP Wajib Pajak Besar Satu	95,118,664,262,000	114,863,692,883,160	18,247,279,298,106	2,630,165,992,556	2,642,095,720,047	96,628,343,312,545	101.59%
310	092	KPP Wajib Pajak Besar Dua	144,251,933,633,000	148,609,157,323,324	20,966,973,968,632	1,823,530,497,559	1,859,040,774,562	127,677,693,631,695	88.51%
310	093	KPP Wajib Pajak Besar Empat	98,466,170,461,000	104,773,263,454,627	5,901,521,218,319	2,772,484,194,970	2,820,970,383,085	98,920,228,424,423	100.46%
320	**320**	**Kanwil DJP Jakarta Selatan II**	**29,854,764,736,000**	**30,001,931,356,392**	**1,752,189,009,587**	**303,905,361,424**	**307,350,987,321**	**28,253,187,972,702**	**94.64%**
320	012	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Sa	7,414,751,468,000	8,134,230,437,191	316,048,560,562	52,203,021,453	46,659,379,085	7,812,638,234,261	105.37%
320	013	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	5,250,570,832,000	5,210,706,502,262	211,709,855,005	50,609,182,848	55,524,514,262	5,003,911,978,671	95.30%
320	016	KPP Pratama Jakarta Cilandak	4,388,481,706,000	4,836,289,723,719	654,841,493,609	47,776,381,900	49,349,988,864	4,183,021,837,074	95.32%
320	017	KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	4,648,941,803,000	4,494,431,712,596	273,736,326,805	67,004,976,891	66,978,416,361	4,220,668,825,261	90.79%
320	019	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru D	2,414,930,383,000	2,346,714,425,561	126,415,022,646	29,564,471,197	27,585,662,598	2,218,320,594,316	91.86%
320	064	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Ti	3,321,108,157,000	3,262,305,599,177	131,805,106,666	41,809,043,919	43,514,818,709	3,132,206,267,301	94.31%
320	065	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Ek	584,870,096,000	607,220,169,819	4,481,077,746	6,140,107,489	6,060,729,131	602,659,713,715	103.04%
320	066	KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan	934,910,148,000	900,214,505,846	28,277,680,100	8,355,243,557	11,208,972,185	874,790,554,374	93.57%
320	068	KPP Pratama Jakarta Jagakarsa	896,200,143,000	209,818,280,220	4,873,886,448	442,932,170	468,506,126	204,969,967,728	22.87%
330	**330**	**Kanwil DJP Jawa Barat III**	**19,196,662,998,000**	**18,384,814,480,668**	**548,816,988,837**	**267,518,509,958**	**251,076,528,173**	**17,819,555,510,046**	**92.83%**
330	403	KPP Pratama Cibinong	2,843,409,121,000	2,759,290,815,140	124,204,127,542	47,113,464,252	30,920,980,083	2,618,894,203,429	92.10%
330	404	KPP Pratama Bogor	2,063,764,765,000	1,910,288,942,630	16,178,559,628	32,052,743,886	31,563,758,458	1,893,621,397,574	91.76%
330	407	KPP Pratama Bekasi Utara	1,244,462,345,000	1,185,938,192,158	11,868,940,442	14,497,748,665	13,223,647,705	1,172,795,150,756	94.24%
330	412	KPP Pratama Depok Cimanggis	1,396,305,719,000	1,203,816,751,940	23,451,472,043	18,673,839,558	16,917,639,602	1,178,609,079,941	84.41%
330	427	KPP Pratama Bekasi Barat	1,331,140,230,000	1,261,978,359,118	22,036,131,505	15,332,547,075	15,307,184,059	1,239,916,864,597	93.15%
330	432	KPP Pratama Bekasi Selatan	2,524,671,672,000	2,387,084,349,438	74,268,558,157	28,536,483,539	23,990,103,470	2,308,269,411,212	91.43%
330	434	KPP Pratama Ciawi	843,415,435,000	768,516,038,616	11,694,226,620	11,229,606,652	11,212,917,066	756,805,122,410	89.73%
330	436	KPP Pratama Cileungsi	1,899,421,636,000	1,834,349,449,474	60,155,457,867	56,933,839,528	63,558,389,506	1,780,818,541,585	93.76%
330	447	KPP Pratama Pondok Gede	1,433,844,845,000	1,368,370,380,791	38,146,882,145	13,816,093,804	14,976,506,183	1,331,383,911,025	92.85%
330	448	KPP Pratama Depok Sawangan	1,493,293,314,000	1,376,886,148,621	852,247,278	19,559,163,932	20,360,593,202	1,376,835,330,613	92.20%
330	449	KPP Madya Bogor	2,122,933,916,000	2,328,295,052,742	165,960,385,610	9,772,979,067	9,044,808,839	2,161,606,496,904	101.82%
340	**340**	**Kanwil DJP Kepulauan Riau**	**6,691,013,981,000**	**5,862,359,238,685**	**163,686,963,699**	**66,061,821,578**	**72,825,467,327**	**5,705,435,920,735**	**85.27%**
340	214	KPP Pratama Tanjung Pinang	880,529,602,000	765,408,174,942	9,362,702,083	3,694,701,390	6,192,604,886	758,543,376,355	86.15%
340	215	KPP Pratama Batam Utara	815,060,667,000	761,190,245,982	4,992,524,148	4,565,974,712	4,920,416,037	756,552,163,159	92.82%
340	217	KPP Madya Batam	3,250,588,291,000	2,546,258,453,061	134,649,850,899	18,925,941,967	19,894,266,492	2,412,576,926,687	74.22%
340	223	KPP Pratama Tanjung Balai Karimun	557,920,484,000	416,990,980,736	11,843,769,594	4,264,834,284	4,337,653,289	405,220,030,147	72.63%
340	224	KPP Pratama Bintan	291,622,991,000	438,907,345,662	115,495,402	20,346,140,810	22,577,589,891	441,023,299,341	151.23%
340	225	KPP Pratama Batam Selatan	895,291,946,000	933,604,038,302	2,722,621,573	14,264,228,415	14,902,936,732	931,520,125,046	104.05%
		PPh DTP	**10,121,831,058,000**	**10,113,615,196,530**	-	-	-	**10,113,615,196,530**	**99.92%**
		TOTAL	**1,423,995,493,162,000**	**1,432,196,553,088,740**	**118,874,338,693,732**	**23,750,903,077,486**	**23,750,903,077,486**	**1,313,322,214,395,010**	**92.23%**

Kepala Bagian Keuangan
KPDJP

Ngadenan

Kasubdit Administrasi
dan Evaluasi Penerimaan

Samingun

Kasubdit Pemantauan Sistem
dan Infrastruktur

Petrus Martono

Lampiran Berita Acara
Nomor : BA- 02 /PJ.084/2019
Tanggal : 3 Mei 2019

Kinerja Penerimaan Per Kode Akun Pajak
Tahun 2018

Kode Akun Pajak	Realisasi Penerimaan Bruto	Restitusi	Realisasi Penerimaan Netto	Penyesuaian Pbk		Setelah Penyesuaian
				Kirim	Terima	
411111	26,557,751,498,887	42,985,833	26,557,708,513,054	325,970,942,314	14,854,161,796	26,246,591,732,536
411112	38,118,280,365,530	-	38,118,280,365,530	2,557,932,427	614,843,130	38,116,337,276,233
411113	-	-	-	1,307,436	-	(1,307,436)
411119	33,800,919,649	-	33,800,919,649	3,272,902,786	-	30,528,016,863
411121	135,067,093,043,566	156,867,634,411	134,910,225,409,155	1,940,808,414,663	947,398,918,006	133,916,815,912,498
411122	18,088,753,105,986	78,877,906,103	18,009,875,199,883	913,457,310,450	646,544,186,943	17,742,962,076,376
411123	54,729,591,277,294	2,443,993,582	54,727,147,283,712	16,674,806,595	18,598,437,120	54,729,070,914,237
411124	39,922,502,908,788	183,388,767,193	39,739,114,141,595	716,203,067,025	554,511,869,024	39,577,422,943,594
411125	9,456,374,480,421	49,648,163,219	9,406,726,317,202	66,499,479,494	135,913,515,128	9,476,140,352,836
411126	285,113,519,423,207	32,981,850,696,812	252,131,668,726,395	6,573,099,693,740	7,909,118,153,881	253,467,687,186,536
411127	52,373,456,397,414	1,735,416,406,178	50,638,039,991,236	994,985,090,575	1,290,338,801,545	50,933,393,702,206
411128	115,860,172,237,091	400,831,773,015	115,459,340,464,076	1,641,003,093,578	1,492,743,344,245	115,311,080,714,742
411129	144,492,751,195	2,567,751,496	141,924,999,699	20,518,146,452	569,073,174	121,975,926,421
411131	355,936,972	30,998,774	324,938,198	-	-	324,938,198
411141	12,987,522	-	12,987,522	-	-	12,987,522
411142	167,200	-	167,200	-	-	167,200
411143		2,462,000	(2,462,000)	-	-	(2,462,000)
411144	503,900,818	-	503,900,818	-	-	503,900,818
411146	1,892,910,800,778	19,603,014	1,892,891,197,764	-	-	1,892,891,197,764
411147	8,218,348,183,000	-	8,218,348,183,000	-	-	8,218,348,183,000
411148	1,616,145	-	1,616,145	-	-	1,616,145
411211	415,485,971,242,335	81,565,577,955,439	333,920,393,286,896	9,137,473,540,653	9,928,060,839,411	334,710,980,585,654
411212	186,403,790,728,258	9,146,931,458	186,394,643,796,800	58,936,363,869	69,386,252,856	186,405,093,685,787
411219	119,979,350,196	51,270,830,774	68,708,519,422	73,375,837,294	3,124,851,013	(1,542,466,859)
411221	12,834,095,043,005	39,428,613,740	12,794,666,429,265	1,178,162,195,421	678,659,959,031	12,295,164,192,875
411222	4,108,032,880,889	27,596,000	4,108,005,284,889	215,459,355	-	4,107,789,825,534
411229	35,034,117,150	60,000,000,000	(24,965,882,850)	28,150,885,394	84,240,754	(53,032,527,490)
411311						
411313	2,213,778,793,077	25,201,323,173	2,188,577,469,904	5,307,500,352	5,197,140,736	2,188,467,110,288
411314	761,402,519,155	5,164,785,190	756,237,733,965	10,095,771,603	15,838,614,704	761,980,577,066
411315	2,255,675,736,914	537,259,574,287	1,718,416,162,627	18,946,968,537	19,010,051,860	1,718,479,245,950
411316	14,540,480,330,129	158,502,268,000	14,381,978,062,129	-	-	14,381,978,062,129
411317	313,275,381,204	-	313,275,381,204	-	-	313,275,381,204
411319	86,032,628,009	-	86,032,628,009	148,079,973	7,505,050	85,892,053,086
411411						
411611	1,470,432,796,442	38,948,000	1,470,393,848,442	14,241,859,562	7,543,118,305	1,463,695,107,185
411612	3,985,405,294,453	-	3,985,405,294,453	3,157,106,941	10,854,428,000	3,993,102,615,512
411613	656,409,788,263	-	656,409,788,263	546,360,000	-	655,863,428,263
411619	27,617,529,333	-	27,617,529,333	4,951,059,309	159,282	22,666,629,306
411621	797,113,685,457	811,200,773,318	(14,087,087,861)	1,472,302,402	424,615,587	(15,134,774,676)
411622	519,797,175,181	19,529,952,723	500,267,222,458	667,099,286	1,505,996,905	501,106,120,077
411623	1,166,073,449	-	1,166,073,449	2,500,000	-	1,163,573,449
411624	3,139,994,377	-	3,139,994,377	-	-	3,139,994,377
Grand Total	**1,432,196,983,691,520**	**118,874,338,693,732**	**1,313,322,214,395,010**	**23,750,903,077,486**	**23,750,903,077,486**	**1,313,322,214,395,010**

djp

LAMPIRAN I

DAFTAR KAS
DI BENDAHARA PENGELUARAN dan KAS LAINNYA DI BENDAHARA PENGELUARAN
per 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
TINGKAT ESELON I
S.D. 31 DESEMBER 2018 *AUDITED*

Kode Kanwil	Kode Satker	Nama Satker	UP	TUP	Total Kas di Bendahara Pengeluaran	Keterangan
010	410367	KPP Pratama Bireuen	-	36.073.000	36.073.000	Telah disetor tanggal 4 Januari 2019
050	568966	KP2KP Pariaman	1.146.982	-	1.146.982	Telah disetor tanggal 18 Januari 2019
080	662791	KPP Madya Jakarta Pusat	98.262	1.250	99.512	Telah disetor tanggal 8 Januari 2019
090	561470	KPP Pratama Jakarta Tambora	10.612.800	-	10.612.800	Telah disetor tanggal 2 Januari 2019
140	524266	KPP Pratama Tangerang Barat	200.000.000	-	200.000.000	Saldo Kas VAT *Refund for Tourist*
190	635794	KPP Pratama Sleman	15.000.000	-	15.000.000	Saldo Kas VAT *Refund for Tourist*
210	635841	KPP Pratama Sidoarjo Utara	17.313.683	-	17.313.683	Saldo Kas VAT *Refund for Tourist*
260	552027	KP2KP Makale	10.220	-	10.220	Telah disetor tanggal 2 Januari 2019
280	410135	KPP Pratama Badung Selatan	61.918.762	-	61.918.762	Saldo Kas VAT *Refund for Tourist*
290	410053	KPP Pratama Ruteng	-	9.660.000	9.660.000	Telah disetor tanggal 4 Januari 2019
300	673190	KP2KP Namlea	49.050.000	-	49.050.000	Telah disetor tanggal 21 Januari 2019
Total			**355.150.709**	**45.734.250**	**400.884.959**	

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
TINGKAT ESELON I
S.D. 31 DESEMBER 2018 AUDITED

Kode Kanwil	Kode Satker	Nama Satker	Saldo
160	635769	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBITUNG	2.137.500
170	663562	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG SELATAN	712.500
300	119965	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON	25.043.422
300	409391	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SORONG	3.557.300
220	635574	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	1.000.000
TOTAL			**32.450.722**

djp

LAMPIRAN J

PIUTANG PAJAK
per 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA SELATAN 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609, EXT. 50606; FAKSIMILI (021) 5225912 SITUS www.pajak.go.id;
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI PIUTANG PAJAK

Nomor: BA-02/Piutang/DJP/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi data piutang pajak antara Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-E1 dengan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Laporan Perkembangan Piutang Pajak, masing-masing pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan menyampaikan data dan atau dokumen berupa Neraca dan Neraca Percobaan UAPPA-E1 Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2018. Sedangkan Penanggung Jawab Laporan Perkembangan Piutang Pajak menyampaikan data dan atau dokumen berupa:

1. Piutang Pajak Berdasarkan Jenis Pajak Per 31 Desember 2018 *Audited*;
2. Piutang Pajak Berdasarkan Umur Per 31 Desember 2018 *Aaudited*; dan
3. Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2018 *Audited*.

Setelah dilakukan rekonsiliasi data piutang pajak sebagaimana tersebut di atas dengan data piutang pajak di neraca dan atau neraca percobaan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil rekonsiliasi menunjukkan terdapat perbedaan antara data piutang pajak pada Neraca dan Laporan Perkembangan Piutang Pajak dimana data Neraca sebesar Rp68.090.740.725.765,00 dan data Laporan Perkembangan Piutang Pajak sebesar Rp 68.090.740.725.779,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp14,00.
2. Hasil rekonsiliasi menunjukkan terdapat perbedaan antara data penyisihan piutang pajak pada Neraca dan Laporan Perkembangan Piutang Pajak dimana data Neraca sebesar Rp41.098.667.934.037,00 dan data Laporan Perkembangan Piutang Pajak sebesar Rp 41.098.667.933.923,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp114,00.
3. Selisih data piutang pajak antara Neraca dan Laporan Perkembangan Piutang Pajak disebabkan karena adanya pembulatan pada aplikasi SAIBA.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal
Kepala Bagian Keuangan

Ngadenan
NIP 19690716 199003 1 002

a.n. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan
Kepala Sub Direktorat Penagihan

Paryan
NIP 19710510 199203 1 002

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Piutang Pajak berdasarkan Jenis Pajak
per 31 Desember 2018 *Audited*
(dalam rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Neraca Percobaan	Laporan Perkembangan Piutang Pajak	Selisih
115121	Piutang PPh Pasal 21	1.179.013.937.280	1.179.013.937.285	5
115122	Piutang PPh Pasal 22	513.491.595.695	513.491.595.695	-
115124	Piutang PPh Pasal 23	1.274.118.662.166	1.274.118.662.163	(3)
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.583.276.185.064	1.583.276.185.065	1
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	16.109.153.823.702	16.109.153.823.723	21
115127	Piutang PPh Pasal 26	1.692.189.385.192	1.692.189.385.192	-
115128	Piutang PPh Final	1.818.771.827.092	1.818.771.827.081	(11)
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	23.743.183.930.888	23.743.183.930.891	3
115141	Piutang PPnBM Dalam Negeri	504.887.065.463	504.887.065.463	-
115153	Piutang PBB Perkebunan	1.302.383.004.670	1.302.383.004.670	-
115154	Piutang PBB Kehutanan	611.275.366.842	611.275.366.842	-
115155	Piutang PBB Pertambangan	6.033.394.958.747	6.033.394.958.748	1
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	21.618.657.418	21.618.657.418	-
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	2.025.634.020	2.025.634.020	-
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	6.594.205.443.940	6.594.205.443.937	(3)
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	4.914.538.121.192	4.914.538.121.192	-
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	193.213.126.394	193.213.126.394	-
Jumlah Piutang Pajak Bruto		**68.090.740.725.765**	**68.090.740.725.779**	**14**
116112	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPh Non Migas	(15.584.661.925.618)	(15.584.661.925.590)	28
116113	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPN	(12.810.774.960.496)	(12.810.774.960.496)	-
116114	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PPnBM	(450.265.209.931)	(450.265.209.931)	-
116115	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(2.692.417.811.730)	(2.692.417.811.710)	20
116117	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Pajak Lainnya	(9.560.548.026.262)	(9.560.548.026.196)	66
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		**(41.098.667.934.037)**	**(41.098.667.933.923)**	**114**
Piutang Pajak Netto		**26.992.072.791.728**	**26.992.072.791.856**	**128**

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Penyisihan Piutang Pajak berdasarkan Jenis Pajak
per 31 Desember 2018 *Audited*
(dalam rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Saldo Piutang Pajak	Penyisihan Piutang
115121	Piutang PPh Psl. 21	1.179.013.937.280	616.099.269.318
115122	Piutang PPh Psl. 22	513.491.595.695	446.229.879.426
115124	Piutang PPh Psl. 23	1.274.118.662.166	803.219.488.132
115125	Piutang PPh Psl. 25 OP	1.583.276.185.064	1.033.587.036.282
115126	Piutang PPh Psl. 25 Badan	16.109.153.823.702	10.700.855.609.294
115127	Piutang PPh Psl. 26	1.692.189.385.192	1.262.209.926.919
115128	Piutang PPh Psl.4 Ayat (2)	1.818.771.827.092	722.460.716.219
115131	Piutang PPN	23.743.183.930.888	12.810.774.960.496
115141	Piutang PPn BM	504.887.065.463	450.265.209.931
115153	Piutang PBB Perkebunan	1.302.383.004.670	291.519.767.712
115154	Piutang PBB Kehutanan	611.275.366.842	152.092.808.326
115155	Piutang PBB Pertambangan	6.033.394.958.747	2.246.642.892.701
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	21.618.657.418	2.162.342.971
115172	Piutang PTLL	2.025.634.020	447.920.802
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	6.594.205.443.940	5.462.335.197.087
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	4.914.538.121.192	3.951.311.196.487
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	193.213.126.394	146.453.711.820
Grand Total		**68.090.740.725.765**	**41.098.667.933.923**

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Piutang Pajak berdasarkan Umur
per 31 Desember 2018 *Audited*
(dalam rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	s.d 1 th	1 s.d 2 thn	2 s.d. 3 thn	3 sd 4 thn	4 sd 5 thn	diatas 5 th	JUMLAH
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	1.080.540.080.479	2.895.854.841.741	2.010.181.854.415	148.842.177.991	9.628.877.858	449.157.611.453	6.594.205.443.937
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	474.643.029.343	2.875.424.875.691	1.459.610.315.773	62.605.091.978	20.151.946.267	22.102.862.140	4.914.538.121.192
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	28.074.826.814	49.016.964.745	59.245.826.216	56.428.325.682	-	447.182.937	193.213.126.394
115154	Piutang PBB Kehutanan	207.635.950.688	107.579.175.222	94.156.820.685	90.508.276.732	51.536.505.831	59.858.637.684	611.275.366.842
115153	Piutang BB Perkebunan	527.831.074.037	171.886.216.340	183.511.051.028	171.412.171.563	159.947.865.124	87.794.626.578	1.302.383.004.670
115155	Piutang PBB Pertambangan	2.221.500.975.010	403.763.336.770	544.337.881.644	1.098.247.149.405	351.158.568.692	1.414.387.047.227	6.033.394.958.748
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	10.420.812.684	2.025.795.171	6.695.913.504	2.476.136.059	-	-	21.618.657.418
115121	Piutang PPh Psl. 21	442.797.162.841	209.550.476.948	124.835.877.894	128.883.034.367	98.709.543.051	174.237.842.184	1.179.013.937.285
115122	Piutang PPh Psl. 22	67.341.920.022	10.485.897.489	2.583.984.710	6.292.581.855	5.199.743.111	421.587.468.508	513.491.595.695
115124	Piutang PPh Psl. 23	427.725.860.874	115.067.041.116	104.569.364.445	111.487.605.700	140.419.276.337	374.849.513.691	1.274.118.662.163
115126	Piutang PPh Psl. 25 Badan	3.632.261.544.934	2.641.233.262.622	2.706.150.308.618	1.718.199.267.662	1.288.704.344.884	4.122.605.095.003	16.109.153.823.723
115125	Piutang PPh Psl. 25 OP	444.723.459.965	208.093.102.767	163.878.354.466	322.937.817.230	172.576.669.096	271.066.781.541	1.583.276.185.065
115127	Piutang PPh Psl. 26	402.550.218.186	44.190.288.737	99.773.990.653	708.952.475.108	96.037.405.572	340.685.006.936	1.692.189.385.192
115128	Piutang PPh Psl.4 Ayat (2)	1.002.697.280.331	278.761.678.359	146.662.088.365	151.441.418.068	174.009.156.312	65.200.205.646	1.818.771.827.081
115131	Piutang PPN	9.005.647.665.974	3.678.593.702.313	2.103.445.901.963	2.216.740.633.823	2.127.934.042.025	4.610.821.984.793	23.743.183.930.891
115141	Piutang PPn BM	56.079.979.507	1.244.368.167	6.801.303.365	223.860.195.407	2.782.803.469	214.118.415.548	504.887.065.463
115172	Piutang PTLL	1.965.556.020	-	60.078.000	-	-	-	2.025.634.020
Jumlah		**20.034.437.397.709**	**13.692.771.024.198**	**9.816.500.915.744**	**7.219.314.358.630**	**4.698.796.747.629**	**12.628.920.281.869**	**68.090.740.725.779**

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Piutang Pajak berdasarkan Kualitas
per 31 Desember 2018 *Audited*
(dalam rupiah)

Kode Akun	Jenis Pajak	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	79.485.121.242,00	608.986.363.740,00	1.009.006.735.857,00	4.896.727.223.098,00	6.594.205.443.937,00
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	71.863.311.365,00	561.227.495.736,00	772.185.076.838,00	3.509.262.237.253,00	4.914.538.121.192,00
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	5.310.851.418,00	23.113.421.245,00	41.346.076.588,00	123.442.777.143,00	193.213.126.394,00
115154	Piutang PBB Kehutanan	207.635.950.688,00	201.735.995.907,00	142.044.782.563,00	59.858.637.684,00	611.275.366.842,00
115153	Piutang PBB Perkebunan	527.831.074.037,00	355.397.267.368,00	331.360.036.687,00	87.794.626.578,00	1.302.383.004.670,00
115155	Piutang PBB Pertambangan	2.221.500.975.010,00	946.284.152.119,00	1.449.405.718.097,00	1.416.204.113.522,00	6.033.394.958.748,00
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	10.420.812.684,00	8.721.708.675,00	2.476.136.059,00	-	21.618.657.418,00
115121	Piutang PPh Psl. 21	200.781.341.294,00	268.402.144.035,00	242.428.939.655,00	467.401.512.301,00	1.179.013.937.285,00
115122	Piutang PPh Psl. 22	33.028.324.093,00	27.317.064.174,00	19.625.614.664,00	433.520.592.764,00	513.491.595.695,00
115124	Piutang PPh Psl. 23	236.886.579.050,00	153.975.477.104,00	192.684.412.028,00	690.572.193.981,00	1.274.118.662.163,00
115126	Piutang PPh Psl. 25 Badan	1.338.500.431.556,00	2.066.610.785.584,00	4.407.791.474.140,00	8.296.251.132.443,00	16.109.153.823.723,00
115125	Piutang PPh Psl. 25 OP	184.981.772.148,00	268.715.948.985,00	247.430.375.311,00	882.148.088.621,00	1.583.276.185.065,00
115127	Piutang PPh Psl. 26	250.891.546.962,00	141.084.226.324,00	106.730.871.640,00	1.193.482.740.266,00	1.692.189.385.192,00
115128	Piutang PPh Psl.4 Ayat (2)	355.439.848.204,00	632.026.188.406,00	345.830.125.629,00	485.475.664.842,00	1.818.771.827.081,00
115131	Piutang PPN	3.503.504.878.312,00	5.684.974.462.871,00	4.617.661.801.951,00	9.937.042.787.757,00	23.743.183.930.891,00
115141	Piutang PPn BM	47.577.735.034,00	3.191.893.055,00	8.818.610.850,00	445.298.826.524,00	504.887.065.463,00
115172	Piutang PTLL	9.360.000,00	1.466.740.020,00	496.668.000,00	52.866.000,00	2.025.634.020,00
Jumlah		**9.275.649.913.097,00**	**11.953.231.335.348,00**	**13.937.323.456.557,00**	**32.924.536.020.777,00**	**68.090.740.725.779,00**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR KETETAPAN
YANG DIAJUKAN KEBERATAN, NON KEBERATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI
BERDASARKAN PER JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2018 *AUDITED*
SELURUH INDONESIA

No.	Jenis Pajak		Sengketa Pajak					Keterangan
			Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan (Non Keberatan)	Keberatan	Banding/Gugatan	Peninjauan Kembali	Jumlah	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PPh Pasal 25 OP	Rp	74.323.343.367	63.564.017.497	302.896.412.281	87.059.590.236	527.843.363.381	
		USD	-	-	-	-	-	
2	PPh Pasal 25 Badan	Rp	1.157.603.829.958	20.282.343.294.206	26.231.245.312.725	18.825.036.484.341	66.496.228.921.231	
		USD	34.386.133,52	563.935.480,04	977.549.993,45	564.138.069,68	2.140.009.676,69	
3	PPh Pasal 21	Rp	97.746.680.650	209.691.369.934	299.938.422.121	241.483.982.139	848.860.454.844	
		USD	-	-	-	-	-	
4	PPh Pasal 22	Rp	21.660.404.279	2.785.695.556.299	62.434.774.875	32.135.629.275	2.901.926.364.728	
		USD	-	-	-	-	-	
5	PPh Pasal 23	Rp	300.693.930.625	1.595.535.080.329	1.263.397.878.614	610.652.905.490	3.770.279.795.058	
		USD	-	-	102.095,78	64.376.034,00	64.478.129,78	
6	PPh Pasal 26	Rp	84.015.686.996	2.099.618.239.415	2.374.154.623.014	1.531.198.062.577	6.088.986.612.002	
		USD	-	-	43.205.549,90	138.166.255,26	181.371.805,16	
7	PPh Final (Pasal 4(2), Pasal 15, Pasal 19 dsb)	Rp	157.805.924.281	3.237.508.560.167	4.224.540.688.434	458.079.076.891	8.077.934.249.773	
		USD	13.587.160,93	10.012,00	408.578.192,44	706.592,00	422.881.957,37	
8	PPN	Rp	2.560.921.989.262	24.864.314.176.120	30.934.282.702.582	14.520.513.962.901	72.880.032.830.865	
		USD	-	2.447.193.169,00	14.646.619,55	468.177,81	2.462.307.966,36	
9	PPnBM	Rp	1.259.779.767	14.080.135.400	289.022.263.143	12.464.495.321	316.826.673.631	
		USD	-	-	-	-	-	
10	Bunga Penagihan	Rp	394.461.062.901	-	4.507.291.640	47.445.873	399.015.800.414	
		USD	145.947,87	-	-	-	145.947,87	
11	PKK	Rp	-	-	-	-	-	
		USD	-	-	-	-	-	

No.	Jenis Pajak		Sengketa Pajak					Keterangan
			Pembetulan, Pengurangan, Penghapusan, Pembatalan (Non Keberatan)	Keberatan	Banding/Gugatan	Peninjauan Kembali	Jumlah	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	PBB Sektor Perikanan	Rp	-	-	-	-	-	
		USD	-	-	-	-	-	
13	PBB Sektor Perkotaan/Pedesaan	Rp	-	-	-	-	-	
		USD	-	-	-	-	-	
14	PBB Sektor Perkebunan	Rp	89.504.499.615	46.619.712.259	386.199.985.486	79.869.071.787	602.193.269.147	
		USD	-	-	-	-	-	
15	PBB Sektor Perhutanan	Rp	16.265.479.189	52.686.187.285	-	35.181.210.682	104.132.877.156	
		USD	-	-	-	-	-	
16	PBB Sektor Pertambangan Non Migas	Rp	90.259.165.454	20.327.222.652	512.226.823.990	304.582.897.515	927.396.109.611	
		USD	-	-	961.348,00	-	961.348,00	
17	PBB Sektor Pertambangan Migas	Rp	389.004.018	1.873.167.903	997.398.312.719	71.923.245.640	1.071.583.730.280	
		USD	-	-	-	-	-	
18	BPHTB	Rp	-	-	-	-	-	
		USD	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	Rp	**5.046.910.780.362**	**55.273.856.719.466**	**67.882.245.491.624**	**36.810.228.060.668**	**165.013.241.052.120**	
		USD	**48.119.242,32**	**3.011.138.661,04**	**1.445.043.799,12**	**767.855.128,75**	**5.272.156.831,23**	

sesuai lampiran III.4.1 PER-08/PJ/2009

djp

LAMPIRAN K

PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI
per 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 8-10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230 (20 saluran) Pes. 6248, 3812337; FAKSIMILIE (021) 3852146; LAMAN www.kemenkeu.go.id

Berita Acara Rekonsiliasi

Pada tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data Kerugian Negara Lingkup Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan antara dua pihak:

1. Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

Dengan

2. Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Kegiatan Rekonsiliasi Data Kerugian Negara dilaksanakan secara bersama-sama untuk periode penatausahaan tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 dengan melakukan proses pencocokan data terhadap 60 kasus kerugian negara dengan rincian kasus kerugian negara sebagai berikut:

a. 42 kasus kerugian negara dicatat sebagai piutang dalam Laporan Keuangan dengan saldo sebesar Rp763.764.605,18.
b. 9 kasus kerugian negara sudah lunas dan telah dicatat dalam laporan keuangan namun belum dicatat dalam Laporan Perkembangan Kerugian Negara karena belum ada laporan kepada Menteri Keuangan beserta dokumen pengakuan piutang yaitu SKTM/SKPGR. Terhadap 9 kasus kerugian negara dimaksud agar segera dikoordinasikan dengan satker terkait untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan.
c. 9 kasus kerugian negara yang belum dicatat dalam Laporan Keuangan dengan saldo sebesar Rp149.585.195,00 dan telah dicatat dalam Laporan Perkembangan Kerugian Negara (6 kasus belum lunas, 2 kasus sudah lunas dan 1 kasus belum ada penetapan nilai dari TPKN). Terhadap 9 kasus kerugian negara dimaksud agar segera dilengkapi dokumen SKTJM/SKPGR untuk dapat dimasukkan dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.

Dari hasil rekonsiliasi data kerugian negara diketahui **tidak terdapat perbedaan saldo piutang** antara Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Bagian Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk penyajian data piutang TGR/TP kedua belah pihak sepakat bahwa saldo kerugian negara yang dicatat dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2018 adalah sebesar **Rp763.764.605,18** yang terdiri dari (**Bagian Lancar** sebesar **Rp44.204.985,00** dan **TP/TGR** sebesar **Rp719.559.620,18**). Sedangkan 9 kasus dengan saldo kerugian negara sebesar **Rp149.585.195,00** pada huruf c di atas, akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pada Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 19 Februari 2019

Perwakilan
Bagian Perbendaharaan
Biro Perencanaan dan Keuangan

Frank Sinatra
NIP 19690701 199603 1 002

Perwakilan
Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat
Jenderal Pajak

Hatri Andria
NIP 19721221 199412 1 001

Perwakilan
Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Perencanaan dan Keuangan

Isa Ashari Kuswandono
NIP 197212221993021001

Data Realisasi Pembayaran Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan
Periode pencatatan sampai dengan 31 Desember 2018
Versi Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

No.	Unit/Penanggung Jawab	TP/TGR	Nilai Kerugian Negara yg Dilaporkan	Realisasi Januari s.d Desember 2018	Akumulasi Realisasi s.d Desember 2018	Saldo Kerugian Negara s.d Desember 2018	Bagian Lancar s.d Desember 2019	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Bagian Lancar)	TP/TGR	Aset Lain-lain	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (jangka panjang)	Keterangan/ Kualitas Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8*13)	10 (7-8)	11	12 (10*13)	13
1	II. KANWIL DJP SUMATERA UTARA I **Juadi (Pensiun di KPP Pratama Binjai)** **NIP 060047102** Diketahui: 08-03-2006 Dilaporkan: 25-07-2007 Diserahkan pengurusan piutangnya ke DJKN nomor S-524/MK.1/2010 tanggal 03-09-2010	**TGR**	11.200.000,00	0,00	3.409.090,00	7.790.910,00	0,00	0,00	7.790.910,00	0,00	7.790.910,00	Macet
2	IV. KANWIL DJP JAKARTA BARAT **Drs. M. Rais (Pensiun di KPP Pratama Kebon Jeruk)** **NIP 060045952** Diketahui: 08-07-2003 Dilaporkan: 14-04-2004 Diserahkan pengurusan piutangnya ke DJKN nomor S-370/MK.1/2010 tanggal 16-06-2010	**TGR**	40.000.000,00	0,00	37.911.390,91	2.088.609,09	0,00	0,00	2.088.609,09	0,00	2.088.609,09	Macet
3	KPP PBB Jakarta Pusat/Barat **Drs. Jatmoedi (Pensiun)** **NIP 060024578** Dilaporkan: 19-07-1991 Diserahkan pengurusan piutangnya ke DJKN nomor 678/SJ/2010 tanggal 13-10-1998	**TGR**	241.798.018,00	0,00	11.199.993,00	230.598.025,00	0,00	0,00	230.598.025,00	0,00	230.598.025,00	Macet
4	**Drs. RM. Bahaudin** **NIP 060030728** Diketahui: 07-10-1989 Dilaporkan: 19-07-1991 Diserahkan pengurusan piutangnya ke DJKN nomor 678/SJ/2010 tanggal 13-10-1998	**TGR**	88.310.000,00	0,00	15.089.090,91	73.220.909,09	0,00	0,00	73.220.909,09	0,00	73.220.909,09	Macet
5	KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu **Rochma (Pensiun)** **NIP 060019085** Diketahui: 26-03-1999 Dilaporkan: 09-06-1999 Diserahkan pengurusan piutangnya ke DJKN nomor S-506/SJ/2005 tanggal 15-09-2005	**TGR**	19.000.000,00	0,00	1.600.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00	Macet
6	KPP Pratama Jakarta Kebayoran **Drs. Sahala L. Gaol (Pensiun)** **NIP 060027105** Diketahui: 19-06-1998 Dilaporkan: 07-08-1998 Diserahkan pengurusan piutangnya ke DJKN nomor S-506/SJ/2005 tanggal 15-09-2005	**TGR**	16.500.000,00	0,00	1.500.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	Macet
7	KPP Jakarta Matraman **Suprijo Harjo Warsito (Pensiun)** **NIP 060027651** Diketahui: 20-09-2000 Dilaporkan: 08-10-2000 Diserahkan pengurusan piutangnya ke DJKN nomor S-456/SJ/2003 tanggal 25-06-2003	**TGR**	32.400.000,00	0,00	45.455,00	32.354.545,00	0,00	0,00	32.354.545,00	0,00	32.354.545,00	Macet
8	KPP Pratama Jakarta Cakung/KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR **Edi Ruswandi (Pensiun)** **NIP 060032419** Diketahui: 19-06-1998 Dilaporkan: 07-08-1998 Diserahkan pengurusan piutangnya ke DJKN nomor S-506/SJ/2005 tanggal 15-09-2005	**TGR**	24.300.000,00	0,00	15.187.500,00	9.112.500,00	0,00	0,00	9.112.500,00	0,00	9.112.500,00	Macet

Data Realisasi Pembayaran Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan
Periode pencatatan sampai dengan 31 Desember 2018
Versi Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

No.	Unit/Penanggung Jawab	TP/TGR	Nilai Kerugian Negara yg Dilaporkan	Realisasi Januari s.d Desember 2018	Akumulasi Realisasi s.d Desember 2018	Saldo Kerugian Negara s.d Desember 2018	Bagian Lancar s.d Desember 2019	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Bagian Lancar)	TP/TGR	Aset Lain-lain	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (jangka panjang)	Keterangan/ Kualitas Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8*13)	10 (7-8)	11	12 (10*13)	13
	VIII. KANWIL DJP BANTEN											
	KPP Pratama Serpong											
9	**R. Sutopo Yuwono (Pensiun)**	**TGR**	24.300.000,00	0,00	4.500.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00	19.800.000,00	Macet
	NIP 060027761											
	Dilaporkan: 08-07-1998											
	Diserahkan pengurusan piutangnya ke DJKN											
	nomor S-506/SJ/2005 tanggal 15-09-2005											
	XIV. KANWIL DJP JATIM II											
	KP PBB Gresik											
10	**Drs. Boediono (ex-pegawai KPPBB Gresik)**	**TGR**	23.900.000,00	2.181.816,00	20.909.067,00	2.990.933,00	0,00	0,00	2.990.933,00	0,00	2.990.933,00	Macet
	NIP 060033047											
	Diketahui: 25-11-2001											
	Dilaporkan: 14-12-2001											
	Diserahkan pengurusan piutangnya ke DJKN											
	nomor 64/MK.1/2009 tanggal 12-02-2009											
	XVI. KANWIL DJP KALTIM											
11	**Sjahrul S.R. (dipecat tidak hormat di KPP Balikpapan)**	**TGR**	35.000.000,00	0,00	5.677.550,00	29.322.450,00	0,00	0,00	29.322.450,00	0,00	29.322.450,00	Macet
	NIP 060061057											
	Diketahui: 14-02-1996											
	Dilaporkan: 03-08-1998											
	Diserahkan pengurusan piutangnya ke DJKN											
	nomor 64/MK.1/2009 tanggal 12-02-2009											
	XVII. KANWIL DJP SULSEL, BARAT, & TENGGARA											
	KPP Pratama Makassar Selatan											
12	**M. Ramli Parinringi**	**TGR**	37.500.000,00	0,00	35.454.561,00	2.045.439,00	0,00	0,00	2.045.439,00	0,00	2.045.439,00	Macet
	NIP 060048245											
	Diketahui: 04-01-2002											
	Dilaporkan: 23-12-2002											
	Diserahkan pengurusan piutangnya ke DJKN											
	nomor 68/MK.1/2009 tanggal 12-02-2009											
	KPP Pratama Kepanjen											
13	**Erwin Agung Prasetyo**	**TGR**	186.075.300,00	0,00	25.100.000,00	160.975.300,00	0,00	0,00	160.975.300,00	0,00	160.975.300,00	Macet
	NIP 19760916 199803 1 001											
	Diketahui: 2011											
	Dilaporkan: 08-03-2013											
	Kanwil DJP Jakarta Selatan I											
14	**Baharuddin**	**TGR**	96.000.000,00	0,00	47.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	Macet
	NO Taspen 06001908600											
	Diketahui: 2003/2010											
	Dilaporkan: 23-12-2013											
	KPP Pratama Rantau Prapat											
15	**Doli Martua Nasution**	**TGR**	67.860.000,00	0,00	0,00	67.860.000,00	0,00	0,00	67.860.000,00	0,00	67.860.000,00	Macet
	NIP 19910321201310100 4											
	Diketahui : 02-03-2016											
	Dilaporkan : 29-03-2017											
	SKTJM tanggal 2 Maret 2016											
	KPP Pratama Natar											
16	**Sumartiyo**	**TGR**	13.500.000,00	9.562.500,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lancar
	NIP 196212141983111001											
	Diketahui : 16-04-2017											
	Dilaporkan : 05-06-2017											
	SKTJM tanggal 24 Mei 2017											

Data Realisasi Pembayaran Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan
Periode pencatatan sampai dengan 31 Desember 2018
Versi Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

No.	Unit/Penanggung Jawab	TP/TGR	Nilai Kerugian Negara yg Dilaporkan	Realisasi Januari s.d Desember 2018	Akumulasi Realisasi s.d Desember 2018	Saldo Kerugian Negara s.d Desember 2018	Bagian Lancar s.d Desember 2019	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Bagian Lancar)	TP/TGR	Aset Lain-lain	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (jangka panjang)	Keterangan/ Kualitas Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8*13)	10 (7-8)	11	12 (10*13)	13
17	KPP Pratama Prabumulih **Sasmito Sudio Usodo** **NIP 196803231989011001** Diketahui : 13-06-2017 Dilaporkan : 19-07-2017 SKTJM tanggal 19 Juli 2017	**TGR**	8.253.885,00	4.816.000,00	8.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lancar
18	KPP Pratama Teluk Betung **Muhammad Ridwan** **NIP 197111220199509100 1** Diketahui : 02-01-2018 Dilaporkan : 07-03-2018 SKTJM tanggal 20 Maret 2018	**TGR**	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lancar
19	Kanwil DJP Jakarta Barat **RR Nurul Setyawati** **NIP 198110142002122001** Diketahui : 09-02-2015 Dilaporkan : 15-04-2015 SKTJM tanggal 2 April 2018	**TGR**	4.583.333,00	4.583.333,00	4.583.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DJP telah menetapkan nilai ke
20	KPP Pratama Yogyakarta **Budi Handayani** **NIP 19841220 200701 2 001** Diketahui : 30-10-2015 Dilaporkan : 08-03-2016 SKTJM tanggal 13 Maret 2018	**TGR**	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lap-170/WPJ.23/KP.02/2016 t
21	KPP Pratama Binjai **Dody Surya Lubis** **NIP 198201192009011008** Diketahui : 24-06-2017 Dilaporkan : 08-10-2018 SKTJM tanggal 27 September 2018	**TGR**	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lap-9/WPJ.03/KP.04/2018 tgl 5
22	KPP Pratama Sumedang **Yayat Sobari** **NIP 198207222002121003** Diketahui : 29-06-2018 Dilaporkan : 10-07-2018 SKTJM tanggal 11 Juli 2018	**TGR**	12.229.985,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.229.985,00	7.229.985,00	36.149,93	0,00	0,00	0,00	Lap-21/WPJ.03/KP.15/2018 tg
23	KPP PMA VI **Irawan** **NIP 197112081992031001** Diketahui : 14-05-2017 Dilaporkan : 02-08-2018 SKTJM tanggal 14 Juli 2017	**TGR**	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lap-1510/WPJ.03/KP.09/2018
24	KPP Wajib Pajak Besar Dua **Eliani Angga Safitri** **NIP 19870429 200812 2 001** Diketahui : 31-12-2014 Dilaporkan : 20-04-2015	**TGR**	14.750.000,00	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lap-002/WPJ.19/KP.02/2015 t Telah diterbitkan SPGR tangga
25	KPP Pratama Soreang **Ika Kusumawati** **NIP 19920118 201411 2 001** Diketahui : 16-04-2018 Dilaporkan : 21-11-2018	**TGR**	52.200.000,00	15.225.000,00	15.225.000,00	36.975.000,00	36.975.000,00	184.875,00	0,00	0,00	0,00	LAP-117/WPJ.09/KP.13/2018

Data Realisasi Pembayaran Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan
Periode pencatatan sampai dengan 31 Desember 2018
Versi Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

No.	Unit/Penanggung Jawab	TP/TGR	Nilai Kerugian Negara yg Dilaporkan	Realisasi Januari s.d Desember 2018	Akumulasi Realisasi s.d Desember 2018	Saldo Kerugian Negara s.d Desember 2018	Bagian Lancar s.d Desember 2019	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Bagian Lancar)	TP/TGR	Aset Lain-lain	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (jangka panjang)	Keterangan/ Kualitas Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8*13)	10 (7-8)	11	12 (10*13)	13
26	KP2KP Tondano **Theodorus Franklin Johny Sagay** **NIP 198707072007011002** Diketahui : 26-06-2018 Dilaporkan : 23-07-2018 SKTJM tanggal 26 Juni 2018	**TGR**	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SKTL nomor S-194/WPJ.16/PI
27	KP2KP Tondano **Reky Adri Solang** **NIP 196202151982101001** Diketahui : 26-06-2018 Dilaporkan : 23-07-2018 SKTJM tanggal 26 Juni 2018	**TGR**	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SKTL nomor S-195/WPJ.16/PI
28	KPP Pratama Sampit **Habib Asfiya** **NIP 19900705 201210 1 002** Diketahui : 26-06-2018 Dilaporkan : 23-07-2018 SKTJM tanggal 26 Juni 2018	**TGR**	23.263.889,00	23.263.889,00	23.263.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lap-378/WPJ.29/KP.04/2018 BPN tanggal 17-12-2018 SKTM 19-12-2018
29	Kanwil DJP Sumut II **Suyadi** **NIP 197102221992031001** Diketahui : 18-07-2017 Dilaporkan : 26-06-2018 SKTJM tanggal 26 Juni 2018	**TGR**	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lap-789/WPJ.26/TGR/2018 Tanggal 26 Juni 2018
30	KPP Pratama Ngawi **Umi Fitriyani Fauziyah** **NIP 198509102007102001** Diketahui : 2 April 2018 Dilaporkan : 31 Oktober 2018 SKTJM tanggal 31 Oktober 2018	**TGR**	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lap-104/WPJ.24/KP.13/2018 Tanggal 31 Oktober 2018
31	KPP Pratama Rabo Bima **Muhamad Ikhwan** **NIP 196308061985031001** Diketahui : 17-06-2016 Dilaporkan : 27-02-2018 SKTJM tanggal 26 September 2016	**TGR**	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lunas dan sudah lapor kepada Menkeu
32	KPP Pratama Blora **Muhammad Alwi Niam** **NIP 198512022007011002** Diketahui : 05-12-2017 Dilaporkan : 05-03-2018 SKTJM tanggal 11 Desember 2017	**TGR**	34.722.222,00	0,00	34.722.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lunas
33	KPDP Makassar **Armitha Arieska Putri** **NIP 198904092010122002** Diketahui : 21-12-2006 Dilaporkan : 23-02-2018 SKTJM tanggal 23 Februari 2018	**TGR**	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lunas
34	KPP Pratama Payakumbuh **Basrul** **NIP 19591022 198503 1 001** Diketahui : 18-11-2017 Dilaporkan : 02-03-2018 SKTJM tanggal 30 September 2017	**TGR**	13.130.557,00	0,00	13.130.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lunas

Data Realisasi Pembayaran Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan
Periode pencatatan sampai dengan 31 Desember 2018
Versi Bagian Perbendaharaan Biro Perencanaan dan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

No.	Unit/Penanggung Jawab	TP/TGR	Nilai Kerugian Negara yg Dilaporkan	Realisasi Januari s.d Desember 2018	Akumulasi Realisasi s.d Desember 2018	Saldo Kerugian Negara s.d Desember 2018	Bagian Lancar s.d Desember 2019	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Bagian Lancar)	TP/TGR	Aset Lain-lain	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (jangka panjang)	Keterangan/ Kualitas Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8*13)	10 (7-8)	11	12 (10*13)	13
35	KPP Pratama Banjarmasin **Wahyu Tasmin** **NIP 198706212008121002** Diketahui : 26-04-2016 Dilaporkan : 01-03-2018 SKTJM tanggal 26 April 2016	**TGR**	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lunas
36	KPP Madya Jakarta Timur **Tito Pranoto** **NIP 19960430 201612 1 002** Diketahui : 15-12-2017 Dilaporkan : 06-03-2018 SKTJM tanggal 15 Desember 2017	**TGR**	15.708.333,00	0,00	15.708.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lancar
37	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo **Hendy Dwi Mandegani** **NIP 19880624 200912 1 002** Diketahui : 28-09-2017 Dilaporkan : 23-02-2018 SKTJM tanggal 28 September 2017	**TGR**	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lancar
38	KPP Pratama Bandung Cicadas **Rizki Arief Nugroho** **NIP 198507102200701 1001** Diketahui : 29-12-2016 Dilaporkan : 05-03-2018 SKTJM tanggal September 2016	**TGR**	37.312.000,00	0,00	37.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lunas
39	KPP Pratama Duren Sawit **Rizka Fitrianto Nugroho** **NIP 198904092010122002** Diketahui : 17-06-2016 Dilaporkan : 21-02-2018 SKTJM tanggal 24 Januari 2017	**TGR**	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lunas
40	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo **Rois Hasyim** **NIP 198904302010121003** Diketahui : 2 September 2016 Dilaporkan : 27 Februari 2018 SKTJM tanggal 31 Agustus 2016	**TGR**	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lunas
41	KPP Pratama Probolinggo **Widayat** **NIP 196310181985031001** Diketahui : 12-09-2014 Dilaporkan : 10-08-2017 SKTJM tanggal April 2017	**TGR**	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lunas
42	KPP Pratama Gorontalo **Jumran** **NIP 196208131981081001** Diketahui : 12-02-2007 Dilaporkan : 05-03-2018 SKTJM tanggal Februari 2015	**TGR**	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lap-2/WPJ.16/KP.02/2018 Tanggal 5 Maret 2018
Jumlah			**1.298.547.522,00**	**133.582.538,00**	**534.785.031,82**	**763.764.605,18**	**44.204.985,00**	**221.024,93**	**719.559.620,18**	**0,00**	**719.559.620,18**	

Keterangan :
- Pengakuan piutang didasarkan pada dokumen pengakuan piutang yaitu SKTM dan SKPGR
*SKTM : Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak
*SKPGR : Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi
*SPGR : Surat Pemberitahuan Ganti Rugi

Terdapat Pelunasan Kerugian Negara Dan Dicatat Pada Laporan Keuangan Namun Belum Dicatat Pada Laporan Perkembangan Kerugian Negara
Direktorat Jenderal Pajak

No.	Unit/Penanggung Jawab	TP/TGR	Nilai Kerugian Negara yg Dilaporkan	Realisasi Januari s.d Desember 2018	Akumulasi Realisasi s.d Desember 2018	Saldo Kerugian Negara s.d Desember 2018	Bagian Lancar s.d Desember 2019	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Bagian Lancar)	TP/TGR	Aset Lain-lain	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (jangka panjang)	Keterangan/ Kualitas Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8*13)	10 (7-8)	11	12 (10*13)	13
	0	**0**	0,00									
	Kantor Pusat DJP											
1	**Indri Dwi Prasasti** **NIP 19890630 201012 2 002** Diketahui : 05-08-2015 Dilaporkan : -	**TGR**	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	-	-	-	-	-	Kasus belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan
	KPP Pratama Makassar Utara											
2	**Ikbal Lutfi** **NIP -** Diketahui : - Dilaporkan : -	**TGR**	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	-	-	-	-	-	Kasus belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan
	Kanwil DJP Banten											
3	**Tuti Handayani** **NIP 198911092010122003** Diketahui : Dilaporkan :	**TGR**	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	0,00	-	-	-	-	-	Kasus belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan
	KPP Pratama Surabaya Tegalsari											
4	**Zaky Muala** **NIP -** Diketahui : Dilaporkan : SKTJM tanggal	**TGR**	9.285.714,00	9.285.714,00	9.285.714,00	0,00	-	-	-	-	-	Kasus belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan
	KPP Pratama Pontianak											
5	**Lukman Hakim Prasetyo** **NIP 19890514 201012 1 002** Diketahui : Dilaporkan : SKTJM tanggal	**TGR**	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	-	-	-	-	-	Kasus belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan
	KPP Pratama Palangkaraya											
6	**Muhammad Rizqi Adi Putranto** **NIP 19910317 201210 1 002** Diketahui : Dilaporkan : SKTJM tanggal	**TGR**	11.750.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	-	-	-	-	-	Kasus belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan
	KPP Pratama Serpong											
7	**Eriko Wistaria Anggoro** **NIP -** Diketahui : Dilaporkan : SKTJM tanggal	**TGR**	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-	-	-	-	-	Kasus belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan
	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga											
8	**Muhammad Novianto** **NIP -** Diketahui : Dilaporkan : SKTJM tanggal	**TGR**	41.180.000,00	41.180.000,00	41.180.000,00	0,00	-	-	-	-	-	Kasus belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan
	KP DJP											
9	**Desy Primaningtyas** **NIP -** Diketahui : Dilaporkan : SKTJM tanggal	**TGR**	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	-	-	-	-	-	Kasus belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan
Jumlah			**109.965.714,00**	**79.465.714,00**	**109.965.714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Data Kasus Kerugian Negara Yang Belum Diakui Sebagai Piutang
Direktorat Jenderal Pajak

No.	Unit/Penanggung Jawab	TP/TGR	Nilai Kerugian Negara yg Dilaporkan	Realisasi Januari s.d Desember 2018	Akumulasi Realisasi s.d Desember 2018	Saldo Kerugian Negara s.d Desember 2018	Bagian Lancar s.d Desember 2019	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Bagian Lancar)	TP/TGR	Aset Lain-lain	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (jangka panjang)	Keterangan/ Kualitas Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8*13)	10 (7-8)	11	12 (10*13)	13
1	KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan **Mochamad Ferdiansa** **NIP 198211 07 200412 1 001** Diketahui : 16-04-2013 Dilaporkan : 03-08-2016	**TGR**	63.750.000,00	0,00	0,00	63.750.000,00	-	-	-	-	-	Ikatan Dinas DIII dan DIV SKTM belum diperoleh dan sudah diterbitkan SPGR Tanggal 12 Juni 2017
2	KPP Pratama Tobelo **Candra Ferdiansyah** **NIP 19880905200912 1003** Diketahui : 04-03-2014 Dilaporkan : 10-04-2017	**TGR**	17.250.000,00	0,00	0,00	17.250.000,00	-	-	-	-	-	SKTM sudah diperoleh, namun belum ada pembayaran Ikatan Dinas
3	KPP Pratama Menteng III **Lamria Noviana R.** **NIP 19860122200812 2002** Diketahui : 29-01-2010 Dilaporkan : 31-10-2016	**TGR**	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	-	-	-	-	-	Ikatan Dinas Lap-89/WPJ.06/KP.15/2016 tgl 28 Oktober 2016 SKTM belum diperoleh (sudah terbit SPGR bulan Juli 2018)
4	KPP Pratama Tobelo **Arky Ristiandicta** **NIP 19890911200912 1001** Diketahui : 18-07-2014 Dilaporkan : 10-04-2017	**TGR**	16.250.000,00	0,00	0,00	16.250.000,00	-	-	-	-	-	Lap-01/WPJ.16/KP.11/2017 tanggal 10 April 2017 SKTM belum diperoleh (sudah terbit SPGR bulan Juli 2018) Ikatan Dinas
5	KPP Pratama Lubuk Linggau **Agus Setiyadi** **NIP 19890816201012 1005** Diketahui : 31-10-2014 Dilaporkan : 05-09-2018	**TGR**	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	-	-	-	-	-	LAP-9/WPJ.03/KP.04/2018 SKTM belum diperoleh, BMN
6	KPP Pratama Luwuk **Taufiqurrahman** **NIP 19930401 201411 1 001** Diketahui : 31-05-2018 Dilaporkan : 08-06-2018	**TGR**	61.480.000,00	61.480.000,00	61.480.000,00	0,00	-	-	-	-	-	SR-491/PJ.012/2018 Pelunasan berdasarkan data E-Rekon BMN KDO
7	KPP Sidoarjo Selatan **Teguh Ariyanto** **NIP 19700407 199103 1 002** Diketahui : 31-12-2014 Dilaporkan : 20-04-2015	**TGR**	26.925.000,00	0,00	0,00	26.925.000,00	-	-	-	-	-	S-9230/WPJ.24/KP.02/2018 Telah diterbitkan SPK Tanggal 21 Desember 2018 Kehilangan KDO Roda 2
8	KPP Pratama Palembang Ilir Barat **N/A** **NIP -** Diketahui : 12-11-2018 Dilaporkan : 28-11-2018	**TGR**	11.910.195,00	0,00	0,00	11.910.195,00	-	-	-	-	-	LAP-01.TPKN/WPJ.03/KP.0101/2018 Kehilangan KDO Roda 2, CS yang dikenakan TGR dalam laporannya, telah diminta untuk diperbaiki agar diganti pegawai yang dikenakan TGR nya
9	KPP Pratama Tobelo **Guntur Luthfi Fadholi** **NIP 19960421201612002** Diketahui : 26-10-2018 Dilaporkan : 26-10-2018	**TGR**	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	LAP-14/WPJ.16/KP.11/2018 Kehilangan KDO Roda 2 Belum ada nilai yg ditetapkan oleh TPKN
Jumlah			**230.065.195,00**	**80.480.000,00**	**80.480.000,00**	**149.585.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

djp

LAMPIRAN L

HIBAH
per 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 8 – 10, JALAN DR. WAHIDIN NO. 1 JAKARTA 10710 KOTAK POS 21
TELP. 021-3449230 (20 SALURAN) PSW. 6248, FAX. 385-2146, LAMAN WWW.KEMENKEU.GO.ID

BERITA ACARA KONFIRMASI

Nomor BA- 12 /SJ.1.1/2019

Pada hari Selasa tanggal Tiga Puluh April tahun dua ribu sembilan belas telah diselenggarakan konfirmasi data penerimaan pinjaman dan/atau hibah untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2018 antara Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Bagian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Konfirmasi dituangkan ke dalam Berita Acara Konfirmasi dengan dilampiri Laporan Hasil Konfirmasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Konfirmasi ini;
2. Sebagai bahan konfirmasi, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyampaikan nota dinas ND-12/SJ.1/2019 tentang Permintaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang didanai PHLN (LPK-PHLN) serta Konfirmasi Hibah Triwulan IV TA 2018;
3. Berdasarkan konfirmasi yang telah dilakukan bersama, hasilnya telah sesuai antara Bagian Keuangan, DJP dengan Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2018 DJP **tidak menerima pinjaman dan hanya menerima hibah** sebagaimana laporan terlampir;
4. Dalam rangka melaksanakan amanat PMK 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan atas PMK 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah serta PMK 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah, Bagian Keuangan DJP akan selalu melakukan Konfirmasi Data Penerimaan Pinjaman dan/atau Hibah dengan Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika pada tahun 2019 terdapat hibah langsung yang diterima oleh DJP, maka Bagian Keuangan akan segera melaporkannya kepada Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan format yang telah ditentukan dan melakukan penatausahaan penerimaan hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Bag. Perencanaan Biro Perencanaan dan Keuangan,	Perwakilan Bag. AKLAP Biro Perencanaan dan Keuangan,	Perwakilan Bag. Keuangan Ditjen Pajak,
Rachmad Arijanto	Isa Ashari Kuswandono	Harri Andria

LAMPIRAN BERITA ACARA KONFIRMASI
Nomor : BA- 12 / SJ.1.1/ 2019
Tanggal : 30 APRIL 2019

LAPORAN HASIL KONFIRMASI
PENERIMAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH TA 2018

NO	REGISTER	NAMA PINJAMAN / HIBAH	SUMBER DANA	JENIS	PAGU DIPA 2018	REALISASI s.d. Q4		STATUS/KETERANGAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
						NILAI	%		
BERDASARKAN DATA LPK-PHLN TERDAPAT DATA SEBAGAI BERIKUT									
1	2H816GHA	*Public Financial Management Multi Donor Trust (PFM-MDTF) II*	*European Union (EU) melalui WB*	HIBAH TERENCANA BARANG/JASA	235.560.000	125.302.830	53,19%	-	Direktorat KITSDA, DJP
2	71484001	*Australia-Indonesia Partnership For Economic Governance (AIPEG)*	AIPEG	HIBAH LANGSUNG JASA		3.762.282.381		HIBAH LANGSUNG YANG BELUM DISAHKAN	Direktorat KITSDA, DJP
3	71012601	*Government Partnership Fund (GPF) Phase II*	AIPEG	HIBAH LANGSUNG JASA		2.751.612.930		-	Direktorat KITSDA, DJP
4	905001	*Project For Enhancing Tax Monitoring and Enforcement in the DGT Throught The Prevention of Tax Disputes and Improvement in The Management of Human Resource and Management*	JICA	HIBAH LANGSUNG JASA		1.630.118.600		HIBAH LANGSUNG YANG BELUM DISAHKAN	Direktorat KITSDA, DJP
BERDASARKAN DATA E-REKON LK TERDAPAT DATA SEBAGAI BERIKUT :									
5	2462ZUXA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA BANGUNAN MUSHOLLA	PAGUYUBAN PEGAWAI KPP PRATAMA MUARA BUNGO	HIBAH LANGSUNG BARANG		20.000.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN	KPP PRATAMA MUARA BUNGO
6	28EYVB1A	HIBAH LANGSUNG BARANG	PEMDA KAB. PASANGKAYU	HIBAH LANGSUNG BARANG		254.491.577		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN	KP2KP PASANG KAYU
7	2UD9SLUA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA TANAH BANGUNAN	PEMDA KAB.PASAMAN BARAT	HIBAH LANGSUNG BARANG		140.026.645		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN	KP2KP SIMPANG AMPAT
8	2DXCX49A	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA BANGUNAN MUSHOLA	PAGUYUBAN PEGAWAI KPP PRATAMA BARABAI	HIBAH LANGSUNG BARANG		387.505.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN	KPP PRATAMA BARABAI
9	2ACAQSRA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA PARTISI/MEJA KERJA	M. REZA MUSLIM, DKK	HIBAH LANGSUNG BARANG		15.200.000		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN	KP2KP MARTAPURA
10	2CT8EMBA	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA TANAH BANGUNAN	PEMDA KAB. SOLOK SELATAN	HIBAH LANGSUNG BARANG		440.732.400		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN	KP2KP PADANG ARO
11	25AWNA3A	HIBAH LANGSUNG BARANG BERUPA TANAH	PEMDA KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	HIBAH LANGSUNG BARANG		110.600.938		HIBAH LANGSUNG SUDAH DISAHKAN	KPP BATURAJA

Perwakilan Bagian Perencanaan
Biro Perencanaan dan Keuangan,

Rachmad Arijanto

Perwakilan Bagian AKLAP
Biro Perencanaan dan Keuangan,

Isa Ashari Kuswandono

Perwakilan Bagian Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Harri Andria

djp

LAMPIRAN M

BARANG MILIK NEGARA (BMN) per 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190,
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5734795; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor: BA-01 /AUDITED/DJP/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2018 *Audited* antara Bagian Perlengkapan dengan Bagian Keuangan.

Bagian Perlengkapan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2018 *Audited* sebagai bahan rekonsiliasi, berupa Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2018 dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara Tahun 2018 *Audited*.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya **SAMA** antara data SIMAK sebesar **Rp37.825.296.364.098,00** dengan data SAI yang terdapat pada aplikasi e-Rekon LK sebesar **Rp37.825.296.364.098,00** yang dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan dilampiri Kertas Kerja Rekonsiliasi Aset Tahun Anggaran 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Kasubbag Inventarisasi, Pemeliharaan, dan Penghapusan	Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan
Rochandry	Harri Andria

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TAHUN 2018 *AUDITED*

Akun	Uraian	SAIBA	SIMAK	SELISIH
117111	Barang Konsumsi	121.308.783.499	121.308.783.499	-
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2.391.474.685	2.391.474.685	-
117114	Suku Cadang	362.372.703	362.372.703	-
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	88.536.417.594	88.536.417.594	-
117199	Persediaan Lainnya	1.389.552.676	1.389.552.676	-
131111	Tanah	30.513.082.118.507	30.513.082.118.507	-
132111	Peralatan dan Mesin	5.033.638.332.737	5.033.638.332.737	-
133111	Gedung dan Bangunan	6.350.977.037.134	6.350.977.037.134	-
134111	Jalan dan Jembatan	8.355.614.800	8.355.614.800	-
134112	Irigasi	7.018.063.800	7.018.063.800	-
134113	Jaringan	37.028.227.055	37.028.227.055	-
135121	Aset Tetap Lainnya	4.627.741.604	4.627.741.604	-
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	151.901.409.029	151.901.409.029	-
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 4.242.737.268.018	- 4.242.737.268.018	-
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 381.901.235.225	- 381.901.235.225	-
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	- 4.557.198.812	- 4.557.198.812	-
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	- 655.758.237	- 655.758.237	-
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	- 13.737.970.504	- 13.737.970.504	-
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	- 63.476.880	- 63.476.880	-
162151	Software	231.696.255.518	231.696.255.518	-
162161	Lisensi	192.633.173.516	192.633.173.516	-
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	225.593.676	225.593.676	-
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	481.068.152.661	481.068.152.661	-
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	44.104.787.996	44.104.787.996	-
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	- 462.733.777.542	- 462.733.777.542	-
169315	Akumulasi Amortisasi Software	- 221.176.793.948	- 221.176.793.948	-
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	- 74.118.270.372	- 74.118.270.372	-
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	- 43.366.995.554	- 43.366.995.554	-
JUMLAH		**37.825.296.364.098**	**37.825.296.364.098**	**-**

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2018
TAHUN ANGGARAN 2018

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAPPB- : 04 DITJEN PAJAK

Tanggal : 07/05/19 9:53 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_es1

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	121,308,783,499
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,391,474,685
117114	Suku Cadang	362,372,703
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	88,536,417,594
117199	Persediaan Lainnya	1,389,552,676
131111	Tanah	30,513,082,118,507
132111	Peralatan dan Mesin	5,033,638,332,737
133111	Gedung dan Bangunan	6,350,977,037,134
134111	Jalan dan Jembatan	8,355,614,800
134112	Irigasi	7,018,063,800
134113	Jaringan	37,028,227,055
135121	Aset Tetap Lainnya	4,627,741,604
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	151,901,409,029
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,242,737,268,018)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(381,901,235,225)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(4,557,198,812)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(655,758,237)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(13,737,970,504)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(63,476,880)
162151	Software	231,696,255,518
162161	Lisensi	192,633,173,516
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	225,593,676
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	481,068,152,661
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	44,104,787,996
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(462,733,777,542)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(221,176,793,948)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(74,118,270,372)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(43,366,995,554)
J U M L A H		**37,825,296,364,098**

djp

LAMPIRAN N

INFORMASI AKRUAL
per 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2018 AUDITED

Kode Kanwil	Kode Satker	Uraian Satker	Belanja Barang yang Dibayar Di Muka	Uang Muka Belanja Pegawai	Total
-	119091	Kantor Pusat DJP		Rp 2.002.034	Rp 2.002.034
010	410521	KPP Pratama Lhokseumawe		Rp 9.137.670	Rp 9.137.670
020	119660	Kanwil DJP Sumatera Utara I		Rp 1.813.350	Rp 1.813.350
020	525190	KPP Pratama Medan Petisah		Rp 1.666.700	Rp 1.666.700
020	663509	KPP Pratama Lubuk Pakam	Rp 55.440.000		Rp 55.440.000
030	410181	KPP Pratama Balige	Rp 232.284.258		Rp 232.284.258
030	525165	KPP Pratama Padang Sidempuan	Rp 112.200.000		Rp 112.200.000
040	119731	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan		Rp 3.957.200	Rp 3.957.200
040	410552	KPP Pratama Dumai	Rp 24.074.074		Rp 24.074.074
040	410568	KPP Pratama Rengat		Rp 3.189.626	Rp 3.189.626
040	410625	Kanwil DJP Riau	Rp 6.151.628.250	Rp 6.748.700	Rp 6.158.376.950
040	635947	KPP Pratama Bengkalis	Rp 2.772.000.000	Rp 285.930	Rp 2.772.285.930
050	085568	KPP Pratama Padang Dua	Rp 22.500.000		Rp 22.500.000
050	119710	KPP Pratama Padang Satu		Rp 1.467.550	Rp 1.467.550
050	119766	KPP Pratama Jambi Telanaipura	Rp 21.500.000	Rp 2.817.235	Rp 24.317.235
050	409778	KPP Pratama Payakumbuh		Rp 3.642.560	Rp 3.642.560
050	524287	KPP Pratama Bukit Tinggi	Rp 40.664.000		Rp 40.664.000
050	525212	KPP Pratama Solok	Rp 84.048.039		Rp 84.048.039
050	549132	KPP Pratama Muara Bungo	Rp 5.000.000		Rp 5.000.000
050	663520	KPP Pratama Kuala Tungkal	Rp 25.000.000		Rp 25.000.000
060	119770	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung		Rp 1.259.000	Rp 1.259.000
060	409810	KPP Pratama Kayu Agung	Rp 99.000.000		Rp 99.000.000
060	409825	KPP Pratama Bangka	Rp 59.753.081	Rp 5.500.200	Rp 65.253.281
060	410291	KPP Pratama Lahat	Rp 106.944.446		Rp 106.944.446
060	410574	KPP Pratama Baturaja	Rp 304.333.334		Rp 304.333.334
060	525296	KPP Pratama Lubuk Linggau	Rp 82.500.000		Rp 82.500.000
060	560834	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu		Rp 3.479.600	Rp 3.479.600
060	561541	KPP Pratama Palembang Ilir Timur		Rp 5.160.950	Rp 5.160.950
060	635617	KPP Pratama Palembang Ilir Barat		Rp 4.764.056	Rp 4.764.056
070	409402	KPP Pratama Bengkulu	Rp 63.525.000		Rp 63.525.000
070	409835	KPP Pratama Natar	Rp 1.300.666.667	Rp 25.162.200	Rp 1.325.828.867
070	410398	KPP Pratama Kotabumi	Rp 117.694.444		Rp 117.694.444
070	525322	KPP Pratama Metro	Rp 38.500.000	Rp 7.213.950	Rp 45.713.950
070	663445	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung		Rp 5.092.740	Rp 5.092.740
080	662834	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga		Rp 6.804.360	Rp 6.804.360
090	410430	Kanwil DJP Jakarta Barat	Rp 15.457.534.247		Rp 15.457.534.247
090	561012	KPP Pratama Jakarta Kembangan	Rp 2.595.286.333		Rp 2.595.286.333
110	635621	KPP Pratama Jakarta Cakung Dua	Rp 2.962.195.434		Rp 2.962.195.434
120	655480	Kanwil DJP Jakarta Utara	Rp 16.344.919.169		Rp 16.344.919.169
130	567982	KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB)	Rp 174.929.700		Rp 174.929.700
140	290460	KPP Pratama Pondok Aren	Rp 110.079.299		Rp 110.079.299
140	440935	KPP Madya Tangerang	Rp 6.238.551.806		Rp 6.238.551.806
140	524266	KPP Pratama Tangerang Barat	Rp 8.666.667		Rp 8.666.667
140	524891	KPP Pratama Tigaraksa	Rp 7.860.066.667		Rp 7.860.066.667
140	636033	KPP Pratama Kosambi	Rp 30.525.000		Rp 30.525.000
150	119389	KPP Pratama Tasikmalaya		Rp 1.323.300	Rp 1.323.300
150	409515	KPP Pratama Garut		Rp 1.298.640	Rp 1.298.640
150	663555	KPP Pratama Ciamis	Rp 11.137.500		Rp 11.137.500
160	119351	KPP Pratama Cirebon Satu	Rp 3.825.000.000	Rp 4	Rp 3.825.000.004
160	119372	KPP Pratama Karawang Utara		Rp 8.087.820	Rp 8.087.820
160	409489	KPP Pratama Kuningan		Rp 4.344.460	Rp 4.344.460
160	440910	KPP Madya Bekasi		Rp 2.643.680	Rp 2.643.680
160	636054	KPP Pratama Indramayu		Rp 3.659.820	Rp 3.659.820
160	655565	KPP Pratama Subang		Rp 2.935.550	Rp 2.935.550
170	119440	KPP Pratama Semarang Timur		Rp 2.315.280	Rp 2.315.280
170	119457	KPP Pratama Kudus		Rp 1.520.900	Rp 1.520.900
170	119478	KPP Pratama Pekalongan		Rp 2.736.240	Rp 2.736.240
170	409546	KPP Pratama Semarang Tengah Dua		Rp 8.347.700	Rp 8.347.700
170	409552	KPP Pratama Semarang Gayamsari		Rp 1.750.980	Rp 1.750.980

Kode Kanwil	Kode Satker	Uraian Satker	Belanja Barang yang Dibayar Di Muka	Uang Muka Belanja Pegawai	Total
170	409577	KPP Pratama Blora		Rp 2.087.760	Rp 2.087.760
170	410418	KPP Pratama Jepara		Rp 10.301.990	Rp 10.301.990
170	410470	KPP Pratama Pati		Rp 2.435.720	Rp 2.435.720
170	449812	KPP Madya Semarang		Rp 1.772.789	Rp 1.772.789
170	524931	KPP Pratama Salatiga		Rp 1.576.040	Rp 1.576.040
170	560965	KPP Pratama Semarang Candisari		Rp 6.474.660	Rp 6.474.660
170	663562	KPP Pratama Semarang Selatan	Rp 800.000.000	Rp 2.014.500	Rp 802.014.500
180	410492	KPP Pratama Sukoharjo		Rp 1.341.390	Rp 1.341.390
190	655502	Kanwil DJP D.I. Yogyakarta		Rp 3.643.050	Rp 3.643.050
200	560986	KPP Pratama Surabaya Wonocolo		Rp 1.576.040	Rp 1.576.040
210	119571	KPP Pratama Mojokerto	Rp 1.067.320.167		Rp 1.067.320.167
210	119592	KPP Pratama Madiun	Rp 36.667.000		Rp 36.667.000
210	409665	KPP Pratama Bangkalan		Rp 432.420	Rp 432.420
210	449828	KPP Madya Sidoarjo	Rp 82.683.333		Rp 82.683.333
210	550591	KPP Pratama Tuban		Rp 1.493.837	Rp 1.493.837
220	119621	KPP Pratama Jember		Rp 4.988.300	Rp 4.988.300
220	410506	KPP Pratama Probolinggo	Rp 56.250.000		Rp 56.250.000
220	410512	KPP Pratama Banyuwangi		Rp 9.014.400	Rp 9.014.400
220	410631	KPP Pratama Pasuruan	Rp 56.250.000		Rp 56.250.000
220	635574	Kanwil DJP Jawa Timur III		Rp 7.864.920	Rp 7.864.920
220	636150	KPP Pratama Blitar	Rp 65.250.000	Rp 994.259	Rp 66.244.259
230	119820	KPP Pratama Pontianak Barat	Rp 750.000.000		Rp 750.000.000
230	549221	KPP Pratama Sintang	Rp 1.055.833.300		Rp 1.055.833.300
240	409850	KPP Pratama Muarateweh	Rp 142.500.000		Rp 142.500.000
240	409866	KPP Pratama Tanjung	Rp 675.000.000		Rp 675.000.000
240	409872	KPP Pratama Barabai	Rp 105.000.000	Rp 6.437.700	Rp 111.437.700
240	635883	KPP Pratama Banjarbaru		Rp 7.361.440	Rp 7.361.440
240	655572	KPP Pratama Batulicin	Rp 1.273.500.000		Rp 1.273.500.000
240	663644	KPP Pratama Pangkalan Bun	Rp 78.750.000		Rp 78.750.000
250	119897	KPP Pratama Balikpapan Timur	Rp 6.513.431.100		Rp 6.513.431.100
250	119902	KPP Pratama Tarakan	Rp 72.000.000		Rp 72.000.000
250	409901	KPP Pratama Tanjung Redeb	Rp 64.950.000		Rp 64.950.000
250	635879	KPP Pratama Bontang	Rp 374.000.000		Rp 374.000.000
260	119923	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara		Rp 2.313.220	Rp 2.313.220
260	409979	KPP Pratama Kolaka	Rp 310.000.000		Rp 310.000.000
260	524313	KPP Pratama Kendari	Rp 162.000.000		Rp 162.000.000
260	549303	KPP Pratama Palopo	Rp 36.666.667	Rp 8.695.800	Rp 45.362.467
260	636192	KPP Pratama Maros		Rp 8.496.600	Rp 8.496.600
260	663651	KPP Pratama Bulukumba		Rp 7.832.320	Rp 7.832.320
270	410000	KPP Pratama Tobelo		Rp 5.308.020	Rp 5.308.020
270	410150	KPP Pratama Ternate		Rp 8.909.013	Rp 8.909.013
290	410053	KPP Pratama Ruteng	Rp 1.781.250.000		Rp 1.781.250.000
290	549370	KPP Pratama Ende	Rp 13.750.000		Rp 13.750.000
310	648915	KPP Wajib Pajak Besar Satu	Rp 64.402.800		Rp 64.402.800
320	015409	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat	Rp 4.386.394.000		Rp 4.386.394.000
320	015412	KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan	Rp 5.233.333.333		Rp 5.233.333.333
330	025735	KPP Pratama Bekasi Barat	Rp 5.356.972.500		Rp 5.356.972.500
330	025736	KPP Pratama Pondok Gede	Rp 5.681.280.000		Rp 5.681.280.000
330	025842	KPP Pratama Depok Sawangan	Rp 2.354.000.000		Rp 2.354.000.000
330	119347	KPP Pratama Bogor	Rp 3.604.166.678		Rp 3.604.166.678
340	325138	KPP Pratama Batam Selatan	Rp 11.455.020.000		Rp 11.455.020.000
340	635951	KPP Pratama Tanjung Balai Karimun	Rp 184.165.000		Rp 184.165.000
TOTAL			**Rp 121.230.933.293**	**Rp 255.496.173**	

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
PER 31 DESEMBER 2018 AUDITED

Kode Kanwil	Kode Satker	Uraian Satker	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Total
-	100041	KPDDP Jambi		Rp 38.018.731	Rp 38.018.731
010	119642	KPP Pratama Banda Aceh	Rp 134.186.650		Rp 134.186.650
010	409731	KPP Pratama Tapaktuan	Rp 40.311.000		Rp 40.311.000
010	410521	KPP Pratama Lhokseumawe	Rp 56.055.000		Rp 56.055.000
010	525144	KPP Pratama Meulaboh		Rp 16.897.500	Rp 16.897.500
020	119660	Kanwil DJP Sumatera Utara I		Rp 380.389.623	Rp 380.389.623
020	119677	KPP Pratama Medan Barat	Rp 10.507.000	Rp 59.208.137	Rp 69.715.137
020	449746	KPP Madya Medan		Rp 3.545.391	Rp 3.545.391
020	524270	KPP Pratama Medan Belawan	Rp 78.840.000	Rp 177.890.068	Rp 256.730.068
020	525190	KPP Pratama Medan Petisah	Rp 50.629.002	Rp 91.492.803	Rp 142.121.805
020	560820	KPP Pratama Binjai	Rp 58.971.000		Rp 58.971.000
020	560820	KPP Pratama Binjai		Rp 62.927.212	Rp 62.927.212
020	561520	KPP Pratama Medan Timur		Rp 2.046.138	Rp 2.046.138
020	635581	KPP Pratama Medan Polonia	Rp 200.019.144	Rp 14.428.502	Rp 214.447.646
020	635595	KPP Pratama Medan Kota	Rp 143.103.000	Rp 104.528.952	Rp 247.631.952
020	663509	KPP Pratama Lubuk Pakam	Rp 70.017.000	Rp 19.640.622	Rp 89.657.622
030	119698	KPP Pratama Pematang Siantar		Rp 18.216.417	Rp 18.216.417
030	410181	KPP Pratama Balige		Rp 1.620.609	Rp 1.620.609
030	410543	KPP Pratama Rantau Prapat		Rp 119.186.325	Rp 119.186.325
030	525165	KPP Pratama Padang Sidempuan		Rp 66.813.978	Rp 66.813.978
040	440904	KPP Madya Pekanbaru	Rp 67.724.000		Rp 67.724.000
050	409778	KPP Pratama Payakumbuh		Rp 3.359.640	Rp 3.359.640
050	410373	KPP Pratama Bangko		Rp 20.138.676	Rp 20.138.676
050	525212	KPP Pratama Solok		Rp 169.400	Rp 169.400
050	663431	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	Rp 31.164.000	Rp 25.935.437	Rp 57.099.437
050	663520	KPP Pratama Kuala Tungkal	Rp 150.762.000		Rp 150.762.000
070	119813	KPP Pratama Tanjung Karang	Rp 56.987.000	Rp 381.100	Rp 57.368.100
070	409402	KPP Pratama Bengkulu		Rp 22.942.722	Rp 22.942.722
070	409835	KPP Pratama Natar	Rp 57.701.000	Rp 436.000	Rp 58.137.000
070	410129	KPP Pratama Kedaton	Rp 56.294.000		Rp 56.294.000
070	410342	KPP Pratama Arga Makmur		Rp 18.820.851	Rp 18.820.851
070	410398	KPP Pratama Kotabumi		Rp 34.300	Rp 34.300
070	525350	KPP Pratama Teluk Betung	Rp 56.987.000		Rp 56.987.000
070	663445	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	Rp 65.816.700		Rp 65.816.700
080	119127	Kanwil DJP Jakarta Pusat	Rp 7.049.898		Rp 7.049.898
080	560923	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	Rp 154.545.000		Rp 154.545.000
080	561403	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	Rp 101.790.872		Rp 101.790.872
080	561410	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	Rp 187.844.217		Rp 187.844.217
080	561431	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	Rp 55.015.320		Rp 55.015.320
080	561445	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	Rp 116.504.200		Rp 116.504.200
080	635710	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	Rp 121.559.986		Rp 121.559.986
080	635727	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	Rp 180.176.261		Rp 180.176.261
080	662791	KPP Madya Jakarta Pusat	Rp 80.673.000		Rp 80.673.000
080	662813	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	Rp 116.214.692		Rp 116.214.692
080	662820	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	Rp 88.188.240		Rp 88.188.240
090	561466	KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu	Rp 247.112.908	Rp 55.313.500	Rp 302.426.408
120	560880	KPP Pratama Jakarta Penjaringan	Rp 274.091.366		Rp 274.091.366
120	561398	KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok	Rp 175.110.650		Rp 175.110.650
120	635663	KPP Pratama Jakarta Pademangan	Rp 58.358.000		Rp 58.358.000
120	655480	Kanwil DJP Jakarta Utara	Rp 63.259.450		Rp 63.259.450
130	410078	KPP Penanaman Modal Asing Satu	Rp 136.587.834		Rp 136.587.834
130	410166	Kanwil DJP Jakarta Khusus	Rp 17.675.000		Rp 17.675.000
130	604400	KPP Penanaman Modal Asing Dua	Rp 11.994.426		Rp 11.994.426
130	604414	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	Rp 43.029.969		Rp 43.029.969
130	655608	KPP Minyak dan Gas Bumi	Rp 60.218.760		Rp 60.218.760

Kode Kanwil	Kode Satker	Uraian Satker	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Total
140	119415	KPP Pratama Serang Barat	Rp 41.059.600	Rp 52.568.730	Rp 93.628.330
140	290460	KPP Pratama Pondok Aren		Rp 6.949.333	Rp 6.949.333
140	290461	KPP Pratama Cikupa	Rp 93.520.000	Rp 63.487.168	Rp 157.007.168
140	410402	KPP Pratama Tangerang Timur		Rp 51.857.515	Rp 51.857.515
140	417857	KPP Pratama Pandeglang	Rp 94.007.070	Rp 21.754.530	Rp 115.761.600
140	440935	KPP Madya Tangerang		Rp 44.014.805	Rp 44.014.805
140	524266	KPP Pratama Tangerang Barat	Rp 56.823.150	Rp 44.000.535	Rp 100.823.685
140	524891	KPP Pratama Tigaraksa	Rp 49.104.000	Rp 53.868.631	Rp 102.972.631
140	560944	KPP Pratama Serpong	Rp 154.484.000	Rp 64.625.763	Rp 219.109.763
140	636033	KPP Pratama Kosambi	Rp 45.840.000	Rp 49.359.835	Rp 95.199.835
140	663541	KPP Pratama Cilegon	Rp 58.360.000	Rp 39.438.669	Rp 97.798.669
150	119326	Kanwil DJP Jawa Barat I		Rp 18.228.378	Rp 18.228.378
150	119368	KPP Pratama Sukabumi	Rp 48.901.300	Rp 77.821.329	Rp 126.722.629
150	119389	KPP Pratama Tasikmalaya		Rp 25.842.430	Rp 25.842.430
150	409442	KPP Pratama Majalaya		Rp 21.431.046	Rp 21.431.046
150	409515	KPP Pratama Garut		Rp 24.953.687	Rp 24.953.687
150	410084	KPP Pratama Sumedang		Rp 6.955.149	Rp 6.955.149
150	410461	KPP Pratama Purwakarta		Rp 24.522.426	Rp 24.522.426
150	449803	KPP Madya Bandung		Rp 5.530.345	Rp 5.530.345
150	560951	KPP Pratama Bandung Karees	Rp 55.318.000	Rp 39.200.000	Rp 94.518.000
150	561051	KPP Pratama Bandung Tegallega	Rp 55.216.500	Rp 3.639.649	Rp 58.856.149
150	561072	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Rp 116.474.700	Rp 50.007.414	Rp 166.482.114
150	561089	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Rp 60.870.000	Rp 18.765.862	Rp 79.635.862
150	635773	KPP Pratama Bandung Cicadas		Rp 23.293.935	Rp 23.293.935
150	636040	KPP Pratama Soreang		Rp 17.555.247	Rp 17.555.247
150	663555	KPP Pratama Ciamis		Rp 62.776.570	Rp 62.776.570
160	119351	KPP Pratama Cirebon Satu		Rp 34.612.764	Rp 34.612.764
160	119372	KPP Pratama Karawang Utara		Rp 27.397.553	Rp 27.397.553
160	409489	KPP Pratama Kuningan		Rp 39.261.844	Rp 39.261.844
160	440910	KPP Madya Bekasi		Rp 3.167.189	Rp 3.167.189
160	635769	KPP Pratama Cibitung		Rp 33.018.920	Rp 33.018.920
160	636054	KPP Pratama Indramayu		Rp 42.219.487	Rp 42.219.487
160	636061	KPP Pratama Cikarang Selatan		Rp 34.369.593	Rp 34.369.593
160	636096	KPP Pratama Karawang Selatan		Rp 11.322.897	Rp 11.322.897
160	655497	Kanwil DJP Jawa Barat II		Rp 35.238.022	Rp 35.238.022
160	655523	KPP Pratama Cikarang Utara		Rp 39.400.121	Rp 39.400.121
160	655565	KPP Pratama Subang		Rp 39.739.246	Rp 39.739.246
160	690239	KPP Pratama Cirebon Dua		Rp 23.471.612	Rp 23.471.612
170	119436	Kanwil DJP Jawa Tengah I		Rp 4.873.398	Rp 4.873.398
170	119440	KPP Pratama Semarang Timur		Rp 44.837.967	Rp 44.837.967
170	119457	KPP Pratama Kudus	Rp 69.125.000	Rp 49.198.061	Rp 118.323.061
170	119461	KPP Pratama Tegal	Rp 18.128.576	Rp 69.886.322	Rp 88.014.898
170	119478	KPP Pratama Pekalongan	Rp 43.890.736	Rp 16.520.699	Rp 60.411.435
170	409546	KPP Pratama Semarang Tengah Dua	Rp 102.556.920	Rp 27.554.611	Rp 130.111.531
170	409552	KPP Pratama Semarang Gayamsari	Rp 40.552.180	Rp 3.328.603	Rp 43.880.783
170	409577	KPP Pratama Blora	Rp 61.790.000	Rp 67.490.244	Rp 129.280.244
170	410351	KPP Pratama Semarang Barat	Rp 57.680.000	Rp 23.100.943	Rp 80.780.943
170	410418	KPP Pratama Jepara	Rp 44.714.128	Rp 51.438.161	Rp 96.152.289
170	410470	KPP Pratama Pati	Rp 17.611.505	Rp 70.070.424	Rp 87.681.929
170	449812	KPP Madya Semarang	Rp 35.865.600	Rp 1.425.286	Rp 37.290.886
170	524931	KPP Pratama Salatiga		Rp 7.947.150	Rp 7.947.150
170	560965	KPP Pratama Semarang Candisari		Rp 40.579.693	Rp 40.579.693
170	635780	KPP Pratama Semarang Tengah Satu	Rp 90.070.698	Rp 4.433.000	Rp 94.503.698
170	636118	KPP Pratama Demak		Rp 39.609.903	Rp 39.609.903
170	663562	KPP Pratama Semarang Selatan		Rp 40.235.955	Rp 40.235.955
170	663576	KPP Pratama Batang		Rp 2.689.170	Rp 2.689.170
180	119482	KPP Pratama Magelang	Rp 55.420.832	Rp 75.258.727	Rp 130.679.559
180	410305	KPP Pratama Temanggung	Rp 286.552.000	Rp 21.405.500	Rp 307.957.500
180	410424	KPP Pratama Purbalingga		Rp 1.064.940	Rp 1.064.940
180	410492	KPP Pratama Sukoharjo		Rp 163.000	Rp 163.000
180	663597	KPP Pratama Boyolali	Rp 39.370.560	Rp 13.073.500	Rp 52.444.060

Kode Kanwil	Kode Satker	Uraian Satker	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Total
180	668465	Kanwil DJP Jawa Tengah II		Rp 245.500	Rp 245.500
190	119525	KPP Pratama Yogyakarta		Rp 33.957.603	Rp 33.957.603
190	466065	KPP Pratama Bantul	Rp 87.433.900	Rp 37.173.697	Rp 124.607.597
190	550481	KPP Pratama Wates	Rp 5.769.213	Rp 26.771.352	Rp 32.540.565
190	550500	KPP Pratama Wonosari	Rp 5.868.780	Rp 36.499.551	Rp 42.368.331
190	635794	KPP Pratama Sleman	Rp 75.884.900	Rp 2.800.000	Rp 78.684.900
190	655502	Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	Rp 987.808		Rp 987.808
210	119571	KPP Pratama Mojokerto	Rp 69.904.000	Rp 21.023.230	Rp 90.927.230
210	119588	KPP Pratama Bojonegoro		Rp 69.000	Rp 69.000
210	409603	KPP Pratama Ngawi	Rp 71.760.378	Rp 384.510	Rp 72.144.888
210	409665	KPP Pratama Bangkalan		Rp 4.279.888	Rp 4.279.888
210	410311	KPP Pratama Gresik Selatan	Rp 80.299.160		Rp 80.299.160
210	525041	KPP Pratama Sidoarjo Barat	Rp 40.228.000	Rp 2.448.100	Rp 42.676.100
210	548954	KPP Pratama Pamekasan	Rp 101.518.000	Rp 984.010	Rp 102.502.010
210	604421	KPP Pratama Gresik Utara	Rp 878.940		Rp 878.940
210	635841	KPP Pratama Sidoarjo Utara		Rp 1.363.400	Rp 1.363.400
210	663623	KPP Pratama Ponorogo	Rp 111.987.024	Rp 105.600	Rp 112.092.624
210	673254	KPP Pratama Jombang	Rp 44.668.000	Rp 20.919.500	Rp 65.587.500
220	119614	KPP Pratama Malang Selatan	Rp 16.514.400		Rp 16.514.400
220	119621	KPP Pratama Jember		Rp 665.880	Rp 665.880
220	409612	KPP Pratama Pare	Rp 95.038.000		Rp 95.038.000
220	409671	KPP Pratama Malang Utara	Rp 60.554.000	Rp 30.131.122	Rp 90.685.122
220	409671	KPP Pratama Malang Utara			Rp -
220	409696	KPP Pratama Situbondo	Rp 47.883.000	Rp 6.059.225	Rp 53.942.225
220	410506	KPP Pratama Probolinggo		Rp 436.400	Rp 436.400
220	410512	KPP Pratama Banyuwangi	Rp 35.920.000	Rp 2.385.080	Rp 38.305.080
220	410631	KPP Pratama Pasuruan	Rp 33.869.000	Rp 80.139.267	Rp 114.008.267
220	449840	KPP Madya Malang	Rp 19.989.900	Rp 30.705.984	Rp 50.695.884
220	525123	KPP Pratama Singosari	Rp 26.686.700		Rp 26.686.700
220	635858	KPP Pratama Tulungagung	Rp 73.768.000		Rp 73.768.000
220	635862	KPP Pratama Batu	Rp 45.942.000	Rp 8.689.410	Rp 54.631.410
220	636150	KPP Pratama Blitar		Rp 71.000	Rp 71.000
230	119162	KPP Pratama Pontianak Timur	Rp 70.651.000	Rp 23.941.734	Rp 94.592.734
230	119820	KPP Pratama Pontianak Barat		Rp 4.785.000	Rp 4.785.000
230	409841	KPP Pratama Mempawah		Rp 5.487.365	Rp 5.487.365
230	410599	KPP Pratama Singkawang	Rp 43.780.250	Rp 111.077.664	Rp 154.857.914
230	549221	KPP Pratama Sintang	Rp 40.432.000	Rp 41.706.692	Rp 82.138.692
230	551512	KPP Pratama Ketapang	Rp 38.642.350	Rp 40.984.075	Rp 79.626.425
230	636171	KPP Pratama Sanggau		Rp 48.697.145	Rp 48.697.145
240	119841	KPP Pratama Sampit		Rp 802.484	Rp 802.484
240	119855	KPP Pratama Banjarmasin Utara		Rp 3.526.717	Rp 3.526.717
240	409850	KPP Pratama Muarateweh		Rp 1.847.654	Rp 1.847.654
240	409866	KPP Pratama Tanjung		Rp 38.751.901	Rp 38.751.901
240	409872	KPP Pratama Barabai		Rp 26.071.299	Rp 26.071.299
240	663466	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	Rp 48.230.000	Rp 41.746.687	Rp 89.976.687
240	663644	KPP Pratama Pangkalan Bun		Rp 116.800	Rp 116.800
250	119110	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara		Rp 19.033.617	Rp 19.033.617
250	119880	KPP Pratama Samarinda Ilir		Rp 49.861.050	Rp 49.861.050
250	119902	KPP Pratama Tarakan		Rp 16.133.159	Rp 16.133.159
250	409881	KPP Pratama Tenggarong		Rp 5.327.654	Rp 5.327.654
250	409897	KPP Pratama Penajam		Rp 620.597	Rp 620.597
250	449859	KPP Madya Balikpapan	Rp 275.491.050		Rp 275.491.050
250	635879	KPP Pratama Bontang		Rp 1.723.919	Rp 1.723.919
260	119923	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara		Rp 8.390.701	Rp 8.390.701
260	409960	KPP Pratama Watampone		Rp 9.202.728	Rp 9.202.728
260	409979	KPP Pratama Kolaka		Rp 11.149.606	Rp 11.149.606
260	410600	KPP Pratama Parepare		Rp 280.250	Rp 280.250
260	449865	KPP Madya Makassar	Rp 72.917.100		Rp 72.917.100
260	524313	KPP Pratama Kendari	Rp 52.030.000		Rp 52.030.000
260	549303	KPP Pratama Palopo	Rp 56.996.700		Rp 56.996.700
260	549310	KPP Pratama Bantaeng		Rp 321.800	Rp 321.800

Kode Kanwil	Kode Satker	Uraian Satker	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Total
260	552006	KPP Pratama Mamuju		Rp 7.088.198	Rp 7.088.198
260	636185	KPP Pratama Majene	Rp 62.756.000		Rp 62.756.000
260	636192	KPP Pratama Maros	Rp 27.570.000		Rp 27.570.000
260	663651	KPP Pratama Bulukumba	Rp 44.387.000		Rp 44.387.000
270	119876	KPP Pratama Gorontalo		Rp 1.386.100	Rp 1.386.100
270	119919	KPP Pratama Palu	Rp 191.307.632		Rp 191.307.632
270	409917	KPP Pratama Bitung	Rp 53.831.000	Rp 38.745.192	Rp 92.576.192
270	410150	KPP Pratama Ternate	Rp 12.192.000		Rp 12.192.000
270	410150	KPP Pratama Ternate		Rp 13.219.435	Rp 13.219.435
270	525495	KPP Pratama Luwuk		Rp 72.810.691	Rp 72.810.691
270	636211	KPP Pratama Toli-toli		Rp 21.816.565	Rp 21.816.565
270	636228	KPP Pratama Poso	Rp 140.611.278	Rp 10.850.032	Rp 151.461.310
270	663665	KPP Pratama Kotamobagu		Rp 94.109.731	Rp 94.109.731
280	119972	KPP Pratama Denpasar Barat	Rp 178.031.966		Rp 178.031.966
280	410016	KPP Pratama Tabanan	Rp 132.841.912	Rp 1.155.200	Rp 133.997.112
280	440929	KPP Madya Denpasar	Rp 139.219.008		Rp 139.219.008
280	524320	KPP Pratama Singaraja	Rp 119.998.200		Rp 119.998.200
280	525606	KPP Pratama Gianyar	Rp 254.989.312	Rp 147.100	Rp 255.136.412
280	635905	KPP Pratama Denpasar Timur	Rp 245.354.264		Rp 245.354.264
280	636232	KPP Pratama Badung Utara	Rp 237.189.833	Rp 350.965	Rp 237.540.798
290	119986	KPP Pratama Mataram Barat		Rp 24.578.669	Rp 24.578.669
290	525627	KPP Pratama Praya	Rp 42.248.000	Rp 501.534	Rp 42.749.534
290	525627	KPP Pratama Praya			Rp -
320	015408	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	Rp 68.351.000		Rp 68.351.000
320	015409	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat	Rp 151.076.958		Rp 151.076.958
320	561335	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	Rp 174.136.913		Rp 174.136.913
320	561377	KPP Pratama Jakarta Cilandak	Rp 110.568.504		Rp 110.568.504
320	635993	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga	Rp 150.638.385		Rp 150.638.385
330	119347	KPP Pratama Bogor		Rp 19.241.028	Rp 19.241.028
TOTAL			**Rp 9.966.204.318**	**Rp 4.442.133.167**	

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PNBP DITERIMA DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2018 AUDITED

Kode Kanwil	Kode Satker	Uraian Satker	Pendapatan diterima di Muka		
			Pendapatan Sewa	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	Total
020	119660	Kanwil DJP Sumatera Utara I	Rp 52.719.333		Rp 52.719.333
070	525322	KPP Pratama Metro	Rp 14.919.166		Rp 14.919.166
070	663445	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	Rp 10.350.000		Rp 10.350.000
140	410402	KPP Pratama Tangerang Timur	Rp 26.583.333		Rp 26.583.333
140	560944	KPP Pratama Serpong	Rp 86.878.000		Rp 86.878.000
140	636033	KPP Pratama Kosambi	Rp 125.808.335		Rp 125.808.335
150	119389	KPP Pratama Tasikmalaya	Rp 56.551.250		Rp 56.551.250
150	663555	KPP Pratama Ciamis	Rp 27.940.500		Rp 27.940.500
170	409577	KPP Pratama Blora	Rp 4.452.500		Rp 4.452.500
180	410305	KPP Pratama Temanggung	Rp 11.777.500		Rp 11.777.500
180	668465	Kanwil DJP Jawa Tengah II	Rp 12.243.000		Rp 12.243.000
190	119525	KPP Pratama Yogyakarta	Rp 14.458.167		Rp 14.458.167
190	466065	KPP Pratama Bantul	Rp 1.295.750		Rp 1.295.750
190	655502	Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	Rp 79.311.583		Rp 79.311.583
210	119571	KPP Pratama Mojokerto	Rp 4.492.000		Rp 4.492.000
210	409603	KPP Pratama Ngawi	Rp 3.000.000		Rp 3.000.000
210	409665	KPP Pratama Bangkalan	Rp 3.090.667		Rp 3.090.667
210	655519	Kanwil DJP Jawa Timur II	Rp 1.911.000		Rp 1.911.000
210	663619	KPP Pratama Lamongan	Rp 38.250.000		Rp 38.250.000
220	119621	KPP Pratama Jember	Rp 22.520.000		Rp 22.520.000
220	409671	KPP Pratama Malang Utara	Rp 14.220.000		Rp 14.220.000
220	525123	KPP Pratama Singosari	Rp 14.612.000		Rp 14.612.000
220	635858	KPP Pratama Tulungagung	Rp 14.958.000		Rp 14.958.000
220	663630	KPP Pratama Kepanjen	Rp 19.364.000		Rp 19.364.000
250	119880	KPP Pratama Samarinda Ilir	Rp 31.443.750		Rp 31.443.750
260	549303	KPP Pratama Palopo	Rp 20.224.333		Rp 20.224.333
260	636192	KPP Pratama Maros	Rp 17.471.073		Rp 17.471.073
270	119919	KPP Pratama Palu	Rp 64.312.500		Rp 64.312.500
270	119862	KPP Pratama Manado		Rp 107.700.000	Rp 107.700.000
320	561342	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	Rp 10.000.000		Rp 10.000.000
330	409509	KPP Pratama Bekasi Selatan	Rp 53.125.000		Rp 53.125.000
TOTAL			**Rp 858.282.740**	**Rp 107.700.000**	

djp

LAMPIRAN O

TINDAK LANJUT BPK
per 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKKK Tahun 2017

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (Diusulkan selesai/ Dalam Proses)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SPI					
1.1.1	1	Pengendalian Penetapan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Potensi Pokok dan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda Belum Memadai	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar : a. Menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP tahun lalu terkait permasalahan yang sama: 1) Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;	**Diusulkan Sesuai Rekomendasi**	Dit. TTKI (AESI), Dit. PKP (AEP), Dit. TIP (PSI), Dit. TPB (PPH), Dit. PP I (PPN Perdagangan)
	2		2) Menyinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran PPN; dan	***On Progress***	Dit. TTKI (AESI), Dit. PKP (AEP), Dit. TIP (PSI), Dit. TPB (PPH), Dit. PP I (PPN Perdagangan)
	3		3) Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember	***On Progress***	Dit. PP I (KUP dan PPSP)
	4		b. Memperbaiki Aplikasi Persandingan PKPM sehingga dapat digunakan untuk mengawasi pengkreditan faktur pajak	***On Progress***	Dit. TTKI (AESI), Dit. PKP (AEP), Dit. TIP (PSI), Dit. TPB (PPH), Dit. PP I (PPN Perdagangan)
	5		c. Menindaklanjuti indikasi pengkreditan PM lebih dari sekali oleh WP sebesar Rp103.801.382.146,00 sesuai ketentuan yang berlaku	**Diusulkan Selesai**	Dit. PKP (AEP)
	6		d. Melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas 1) Sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar Rp4.490.730.223.484,00 dan USD8,986,362; dan	***On Progress***	Dit. PKP (AEP)
	7		2) Hak negara dari potensi penerimaan PPh Pasal 25 sebesar Rp150.962.056.451,00 dan penerimaan PPN yang dipungut oleh WAPU sebesar Rp967.360.950.295,00; dan	**Diusulkan Selesai**	Dit. PKP (AEP)
	8		e. Merumuskan IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/ sanksi administrasi yang seharusnya	**Diusulkan Selesai**	Bagian Organta

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (Diusulkan selesai/ Dalam Proses)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.2	9	Perbedaan Perlakuan DJP atas Beberapa Permasalahan yang Sama Sehingga Mengakibatkan Ketidakpastian Hukum Bagi Wajib Pajak	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar : a. Menetapkan peraturan yang mengatur secara tegas dan rinci mengenai transfer pricing atas pemeriksaan PPN untuk penyerahan ekspor serta dampak perpajakannya dan perlakuan perpajakan atas cadangan premi Asuransi Jiwa; dan	***On Progress***	Dit P2 (Teknik Pemeriksaan dan Transus), Dit. PP I (PPN Industri dan PPN Perdagangan)
	10		b. Mengkaji perlakuan perpajakan atas kegiatan usaha kelapa sawit yang terintegrasi dengan mempertimbangkan hasil putusan Pengadilan Pajak dan MA..	***On Progress***	Dit P2 (Teknik Pemeriksaan dan Transus), Dit. PP I (PPN Industri dan PPN Perdagangan)
1.1.3	11	Pengendalian Sistem Pembayaran dan Pencatatan Akun Pajak Belum Menjamin Ketepatan Klasifikasi Akun	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar : a. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengendalian input berupa validasi data masukkan untuk menjamin ketepatan klasifikasi akun penerimaan perpajakan pada sistem billing;	***On Progress***	Dit. TTKI (AESI), Dit. TPB (PPH), Dit. TIP (PSI), Dit. PKP (AEP)
	12		b. Melakukan perubahan atas PMK tentang Bagan Akun Standar agar tidak mengakomodir jenis akun penerimaan perpajakan lainnya yang tidak terkorelasi dalam UU Perpajakan dan memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menyesuaikan PER-38/PJ/2009 dengan BAS yang baru; dan	***On Progress***	Dit. TTKI (AESI), Dit. TPB (PPH), Dit. TIP (PSI), Dit. PKP (AEP)
	13		c. Mengintegrasikan sistem pemindahbukuan akun pada DJP dengan sistem akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.	***On Progress***	Bagian Keuangan dan Dit. PKP (AEP)
1.1.4	14	Ketidakselarasan Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan PPN dan PPh Pasal 22 Impor yang Dibayar Melalui Surat Ketetapan DJBC	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar : Menyusun kajian terkait permasalahan penetapan pajak oleh DJP dan DJBC sehingga terjadi keselarasan, dan menetapkan hasil kajian tersebut untuk dijadikan dasar penyelarasan aturan-aturan terkait.	***On Progress***	DJBC Dit. PKP (AEP), Dit. P2 (Penagihan), Dit. PP I
1.1.5	15	Terdapat Transaksi Pengalihan Participating Interest yang Belum Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Minimal Sebesar Rp10.716.835.500,00	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar merevisi PMK Nomor 228 Tahun 2017 agar mengatur penyampaian informasi pengalihan interest oleh SKK Migas kepada DJP dilakukan sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi pengalihan interest.	***On Progress***	Dit. PP II (Harmon) dan Dit. P2 (Transus)
1.3.2	16	Belum Terdapat Kebijakan yang Jelas Terkait Penyelesaian Piutang Pajak Daluwarsa yang Telah Dihapusbuku dan Dicatat Secara Ekstrakomptabel	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Menyusun kebijakan yang jelas mengatur penghapusbukuan dan penghapusan tagihan piutang pajak; dan	**Diusulkan Selesai**	Dit. P2 Penagihan dan Dit. PP I (KUP dan PPSP)

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (Diusulkan selesai/ Dalam Proses)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	17		b. Melakukan penelitian /pemeriksaan lebih lanjut atas piutang daluarsa dan mengidentifikasi penyebabnya serta melakukan langkah-langkah penyelesaian.	**Diusulkan Selesai**	Dit. P2 (Penagihan)
1.3.3	18	Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan Masih Memiliki Kelemahan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan: b. Direktur Jenderal Pajak untuk: 1) Memutakhirkan sistem informasi : a) terkait pengelolaan, penatausahaan, dan pencatatan aset barang sitaan;	***On Progress***	Dit. P2 (Penagihan), Dit. TTKI (AESI)
	19		b) Untuk memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak yang valid;	***On Progress***	Dit. P2 (Penagihan), Dit. TTKI (AESI)
	20		2) Menyusun kebijakan akuntansi terkait : a) penyisihan piutang pajak atas STPBP yang diterbitkan setelah SKP Induk Daluwarsa penagihan; dan	***On Progress***	Dit. P2 (Penagihan), Dit. TTKI (AESI), Dit. PP I (KUP dan PPSP)
	21		b) penyisihan piutang pajak PBB dengan mempertimbangkan kondisi lainnya yang berpengaruh sehingga dapat menyajikan nilai penyisihan piutang yang lebih menggambarkan kondisi sebenarnya;	***On Progress***	Dit. P2 (Penagihan), Dit. TTKI (AESI), Dit. PP I (KUP dan PPSP), Dit. Eksten (Penilaian II)
1.3.4	22	Sistem Pengendalian Intern Dalam Rekonsiliasi dan Penatausahaan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor Memiliki Kelemahan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Menyusun kajian dalam rangka penyempurnaan PMK Nomor 71/PMK.04/2012 yang belum mencakup tata cara penghapusan atas Piutang Bea Keluar dan Piutang Perpajakan dalam rangka ekspor maupun impor yang ditetapkan oleh DJBC, dan menetapkan hasil kajian untuk dijadikan dasar penyempurnaan PMK tersebut PMK dimaksud.	***On Progress***	DJBC, Setjen Dit. PKP (AEP)
	23		b. Menyempurnakan kebijakan akuntansi dalam SE Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 menyesuaikan penyempurnaan PMK Nomor 71/PMK.04/2012.	***On Progress***	Setjen, DJBC, DJPB Dit. PKP (AEP)
	24		c. Menginstruksikan Dirjen Pajak bersama dengan Dirjen Bea dan Cukai agar menyelenggarakan rekonsiliasi data SP3DRI secara bulanan; mengimplementasikan pertukaran data penetapan PDRI oleh DJBC	**Diusulkan Selesai**	DJP, DJBC, Setjen Dit. PKP (AEP)

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (Diusulkan selesai/ Dalam Proses)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	25		d. Menginstruksikan Dirjen Pajak untuk: 1) Segera menindaklanjuti SP3DRI yang masih outstanding dan belum dilakukan penetapan dan penagihan pajaknya;	***On Progress***	Dit. PKP (AEP)
	26		2) Menyusun suatu sistem pengendalian intern untuk meningkatkan monitoring dan pengawasan tindak lanjut SP3DRI;	**Diusulkan Selesai**	Dit. PKP (AEP) dan Dit. TTKI (AESI)
	27		3) Memutakhirkan Sistem Informasi yang ada untuk mengakomodasi pelaksanaan penatausahaan dan pencatatan tindak lanjut SP3DRI.	**Diusulkan Selesai**	Dit. PKP (AEP) dan Dit. TTKI (AESI)
KEPATUHAN					
1.1.3	28	Restitusi Pajak Tidak Dikompensasikan dengan Utang Pajak WP Sebesar Rp364.688.934.376,90 dan Terdapat Restitusi Ganda Sebesar Rp365.656.246,00.	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan: a. Direktur Jenderal Pajak untuk: 1) Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait kompensasi utang pajak WP dalam pembayaran restitusi;	***On Progress***	Dit. PKP (AEP)
	29		2) Memperbaiki sistem informasi penatausahaan pengembalian kelebihan pajak dengan menambahkan fitur (fasilitas) monitoring/pengawasan penerbitan SPMKP; dan	**Diusulkan Selesai**	Dit. PKP (AEP), Dit. P2 (Penagihan), Dit. TTKI (AESI)
	30		3) Membuat kajian dan menetapkan prosedur pengenaan sanksi kepada petugas pajak yang dinyatakan lalai atau sengaja tidak mengkompensasikan utang pajak wajib pajak dengan pembayaran restitusi.	**Diusulkan Selesai**	Dit. KITSDA (KI dan II)
1.1.4	31	Penerbitan Ketetapan Pajak dan Sanksi Administrasi Berdasarkan Putusan Pidana Perpajakan atas PT B2 Tidak Tepat dan Menimbulkan Imbalan Bunga Minimal Sebesar Rp8.688.442.483,00	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan supaya melakukan pemeriksaan atas penerbitan SKPKB/SKPKBT, dan apabila ditemukan unsur kelalaian serta indikasi kerugian negara agar diselesaikan sesuai ketentuan berlaku.	**Diusulkan Selesai**	Dit. PP II (PPh Badan) dan Dit. P2 (Transus)
1.1.2	32	Terdapat Kelebihan Pembayaran dan Denda Belum Dikenakan	BPK merekomendasikan: a. PPK terkait untuk menagih kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan atas perhitungan denda serta menyetorkan ke kas negara sebesar Rp2.674.755.251,00 (Rp1.820.032.162,00 + Rp854.723.089,00); dan	**Diusulkan Selesai**	Dit. TIP (PPK dan PSI)

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKKK Tahun 2016

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SPI					
1.1.1	0	Proses Pencatatan dan Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan Belum memadai	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Menginstruksikan Sekjen, Dirjen Pajak, serta Dirjen Bea dan Cukai untuk merelasikan seluruh database di lingkungan Kemenkeu yang terkait dengan pelaporan keuangan Kemenkeu; dan	**Tidak Terdapat Tindak Lanjut**	Setjen, DJP, DJBC
1.1.2	1	Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) Tidak Konsisten	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. Mempercepat langkah untuk memfasilitasi Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas dalam melakukan percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty untuk memberikan kepastian bagian Negara dari pelaksanaan PSC; dan	**Diusulkan Selesai**	1. DJP (PP2, PI dan P2) 2. Dit. PNBP, DJA 3. PKPN, BKF 4. Ditjen Migas, Kementerian ESDM 5. SKK Migas
1.1.5	2	Pengendalian Penagihan Sanksi Administrasi Pajak Berupa Bunga dan/atau Denda Belum Memadai	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk: a. Melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa denda dan bunga sebesar Rp6.164.443.859.417,78 dan USD1,206,603.62 (ekuivalen dengan Rp16.211.926.238,32);	**Diusulkan Selesai**	PKP, P2, TIP
	3		b. Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN; dan	**Diusulkan selesai**	DJPB TPB, PP1, TIP, TTKI
	4		c. Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember.	**Diusulkan selesai**	PP1, TPB, PKP, P2
1.2.2	5	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: b. Menginstruksikan Dirjen Pajak untuk: 1) Melakukan inventarisasi atas semua dokumen sumber piutang pajak, memutakhirkan saldo piutang pajak, serta memastikan bahwa penilaian piutang pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;	**Diusulkan selesai**	P2, Eksten, DKB, TTKI, TPB, KITSDA
	6		2) Memperbaiki sistem informasi pada DJP terkait penatausahaan piutang pajak yang terintegrasi meliputi penerbitan keputusan dan pencatatan keputusan tersebut ke dalam laporan	**Diusulkan selesai**	TPB, P2, TIP, TTKI, KITSDA

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			piutang atas seluruh proses bisnis di DJP dilengkapi dengan standar operasi dan prosedur yang memastikan bahwa seluruh proses telah berjalan memadai, dengan melakukan evaluasi dan mengintegrasikan sistem informasi yang terkait dengan penatausahaan dan pengawasan piutang pajak yang sudah ada saat ini;		
	7		3) Melaksanakan pertukaran data dengan Sekretariat Pengadilan Pajak atas Putusan Banding;	**Diusulkan selesai**	Dit. TIP, DKB
	8		4) Mengevaluasi kembali status piutang yang dikategorikan daluwarsa pada tahun yang sama sesuai dengan Pasal 22 UU KUP untuk memastikan kelayakannya; dan	**Diusulkan selesai**	Dit. P2
	9		5) Memerintahkan kepada KPP untuk mengoptimalkan penggunaan SIDJP dalam memastikan bahwa penerbitan ketetapan telah memperhatikan batas daluwarsa masa pajaknya	**Diusulkan selesai**	Dit. P2
1.2.4	10	Tindakan Penagihan atas Piutang Pajak Tidak Memadai Hingga Menjadi Daluwarsa	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk: a. Menyempurnakan SIDJP yang dapat memberikan notifikasi atas ketetapan pajak yang akan daluwarsa penagihan kepada KPP, Kanwil, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan, serta Dit. KITSDA untuk segera dilakukan tindakan penagihan; dan	**Diusulkan selesai**	P2, TPB, KITSDA, TTKI
	11		b. Menyusun mekanisme pengawasan internal yang dapat memastikan bahwa tindakan penagihan telah dilaksanakan secara memadai.	**Diusulkan selesai**	P2, TPB, PP1.
1.2.5	12	Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor yang Dilimpahkan dari DJBC ke DJP Belum Memadai	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar segera membuat kajian tentang pengakuan piutang terkait ketetapan yang diterbitkan atas PDRI oleh DJBC sebagai dokumen yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Pajak dan menetapkan kebijakan berdasarkan kajian tersebut.	***On Progress***	Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen DJP (P2, PKP, TPB) DJBC

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEPATUHAN					
1.1.1	13	Pajak Masukan yang Dilaporkan oleh PKP di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Utara Melebihi Jangka Waktu Pelaporan yang Diperbolehkan Sebesar Rp8,23 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk melakukan kajian untuk menyempurnakan sistem informasi yang dapat mendeteksi pengkreditan faktur pajak yang melewati masa pengkreditan dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil kajian tersebut.	***On Progress***	PP I, TPB, TTKI dan Kanwil DJP Jakarta Utara
1.1.2	14	PPN yang Dipungut oleh Wajib Pungut Tidak Ditemukan Setorannya pada MPN Sebesar Rp274,97 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: 1) Melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menagih kekurangan penyetoran pajak sebesar Rp274.967.899.354,00 dan sanksi bunga sebesar Rp82.271.887.453,00; dan	**Diusulkan Selesai**	P2, PKP
	15		2) Memerintahkan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) untuk memastikan indikasi tidak disetornya pajak ke Kas Negara oleh WAPU sebesar Rp274.967.899.354,00 dan sanksi bunga sebesar Rp82.271.887.453,00	**Diusulkan Selesai**	KITSDA
	16		b. Mengembangkan sistem informasi yang dapat menyelaraskan antara data seluruh pajak yang dipungut oleh WAPU dengan data pembayaran dan dapat memastikan bahwa kewajiban WAPU dalam hal penyetoran pajak yang dipungutnya telah dilaksanakan.	**Diusulkan Selesai**	TTKI, TIP
1.1.3	17	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2016 pada DJP Tidak Memperhitungkan Piutang kepada Wajib Pajak Sebesar Rp879,02 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar mengistruksikan: a. Direktur Jenderal Pajak untuk membuat mekanisme konfirmasi melalui sistem informasi yang terintegrasi untuk menjamin Pejabat yang memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah memperhitungkan seluruh piutang kepada WP; dan	**Diusulkan Selesai**	
1.1.4	18	Pengkreditan Pajak Masukan PT D.1 Sebesar Rp3,32 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan	b. Dalam hal hasil reviu Inspektur Jenderal mengindikasikan adanya pajak yang tidak seharusnya dikembalikan, maka Dirjen Pajak diinstruksikan untuk mempertimbangkan hasil reviu Inspektur Jenderal tersebut sebagai dasar	**Diusulkan Selesai**	PP I, Kanwil DJP WP Besar, KPP Pratama LTO 1

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pemeriksaan ulang untuk menerbitkan ketetapan pajak.		
1.2.1	19	Denda Keterlambatan Pekerjaan pada BPDPKS, DJP, dan DJBC Belum/Kurang Dikenakan/Ditetapkan/Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp10,75 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar mengistruksikan Kepala BPDPKS, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai untuk: a. Melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan PPHP pada BPDPKS, Kantor Pusat DJP, Direktorat P2 Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC Sumbagsel, dan PSO Tanjung Balai Karimun DJBC yang belum sepenuhnya mematuhi pedoman pengenaan denda keterlambatan; dan	**Diusulkan Selesai**	DJPB, DJP (KITSDA, Bagian Umum dan TIP), DJBC
	20		b. Menagih denda keterlambatan dan kekurangan penerimaan serta menyetorkan ke kas negara sebesar Rp10.758.187.020,27.	***On Progress***	Bagian Umum dan TIP
1.2.2	21	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp26 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Melakukan pembinaan kepada para KPA pada satker BDK Pontianak, Pusdiklat Pajak, LPDP, Kantor Pusat DJP, KPP Pratama Ende, KPP Pratama Atambua, Kanwil DJP Kalimatan Timur, KPP Kotamobagu, KPP Kayu Agung, Kanwil DJBC Sumbagsel, Direktorat P2 DJBC dan PSO Tanjung Balai Karimun yang belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian intern pelaksanaan pekerjaan;	**Diusulkan Selesai**	Dit. KITSDA
	22		b. Menginstruksikan para KPA terkait untuk melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan PPHP pada satker BDK Pontianak, Pusdiklat Pajak, LPDP, Kantor Pusat DJP, KPP Pratama Ende, KPP Pratama Atambua, Kanwil DJP Kalimatan Timur, KPP Kotamobagu, KPP Kayu Agung, Kanwil DJBC Sumbagsel, Direktorat P2 DJBC, dan PSO Tanjung Balai Karimun yang belum sepenuhnya optimal dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan;	**Diusulkan Selesai**	Dit. KITSDA
	23		c. Menagih kelebihan pembayaran serta menyetorkan ke kas negara sebesar Rp25.669.759.385,07; dan.	**Diusulkan Selesai**	Bagian Perlengkapan, KPP Pratama Ende, KPP Pratama Atambua

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2.4	24	Pekerjaan pada Kemenkeu Tahun 2016 Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak Sebesar Rp15,10 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Kepala BPPK dan Dirjen Pajak untuk: a. Melakukan pembinaan kepada para KPA pada satker BDK Pontianak, Pusdiklat Pajak, Kanwil DJP Banten, Kantor Pusat DJP dan KPP Pratama Wates;	**Diusulkan Selesai**	Dit. KITSDA
	25		b. Memerintahkan para KPA terkait untuk melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan PPHP pada BDK Pontianak, Pusdiklat Pajak, Kanwil DJP Banten, Kantor Pusat DJP dan KPP Pratama Wates yang belum sepenuhnya optimal dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan; dan	**Diusulkan Selesai**	Dit. KITSDA
1.3.1	26	Penatausahaan Aset Tanah dan Aset Gedung dan Bangunan Belum Sesuai Dengan Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: b. Kepala Satuan Kerja menagih nilai sewa atas pemanfaatan BMN yang telah dilakukan.	**Diusulkan selesai**	Bagian Umum, Bagian Perlengkapan, Kanwil Kaltimut, Kanwil Sulutenggomalut

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKKK Tahun 2015

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SPI					
1.1.1	1	DJP Belum Menagih Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Sebesar Rp8,44 Triliun	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk: a. Melakukan penelitian untuk menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa denda dan bunga sebesar Rp8.441.249.125.652,00;	**Diusulkan selesai**	PKP dan P2
	2		b. Menyempurnakan informasi pemungut PPN dalam Surat Setoran Pajak/Surat Setoran Elektronik dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN; dan	**Diusulkan selesai**	Koordinator TPB, PP1, TIP, TTKI, PKP, P2
	3		c. Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember.	**Diusulkan selesai**	Koordinator PP1, TPB, PKP, P2
1.1.2	4	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas Penyetoran Penerimaan Negara yang Mengakibatkan Penerimaan Negara Senilai total Rp2,99 Triliun Tidak Sesuai Dengan Substansi MAP dan/atau Profil/Jenis Wajib Pajak Penyetor	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk: a. Meningkatkan pengendalian atas penatausahaan penyetoran penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara;	**Diusulkan selesai**	PKP dan TIP
	5		b. Meningkatkan pengawasan atas pemotongan dan penyetoran PPN oleh Wajib Pajak yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan	**Selesai**	PKP dan TIP
	6		c. Melakukan perbaikan sistem yang mampu memberikan notifikasi atas pembayaran PPN dalam negeri masa (kode akun 411211 kode setor 100) oleh WP non-PKP untuk dilakukan penelitian dalam rangka menetapkan WP PKP.	**Diusulkan selesai**	PKP dan TIP
1.1.3	7	Data Modul Penerimaan Negara (MPN) yang Didistribusikan ke SIDJP Secara Harian Belum Menggunakan Data MPN Rekonsiliasi Bawah	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk menyusun ketentuan untuk melakukan distribusi data penerimaan negara secara harian	**Selesai**	Dit. TIP, DJPB
1.1.4	8	Pengendalian Pencatatan Penerimaan PBB Belum Menjamin Kesesuaian Pelaporan pada KPP penerbit SPPT-nya	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk menginstruksikan kepada pihak yang terkait untuk: a. Melakukan penelusuran atas pembayaran PBB yang belum ditemukan KPP penerbitnya; dan	**Selesai**	PKP, TIP, TTKI Eksten

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	9		b. Mengintegrasikan sistem billing dengan sistem penerbitan SPPT.	**Diusulkan Selesai**	Dit. TIP, TTKI, PKP, Eksten
1.1.5	10	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tidak Konsisten Terhadap Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk membuat penegasan terkait perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III.	**Diusulkan Selesai**	DJP (PP 1), Kementerian ESDM
1.1.7	11	Pengendalian atas Pengelolaan dan Penatausahaan Penerbitan NTPN Sebagai Bukti Sahnya Penerimaan Negara pada Direktorat Jenderal Pajak Masih Lemah	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk meningkatkan pengendalian atas penatausahaan, pencatatan dan dokumentasi atas penyetoran penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara.	**Selesai**	Dit. TIP
1.1.8	12	Pemerintah Belum Menyelesaikan Permasalahan Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran 2015 Minimal Sebesar USD66.37 Juta Ekuivalen Rp915,59 Miliar	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. Memfasilitasi Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas dalam melakukan percepatan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC; dan	**Diusulkan Selesai**	1. DJP (koordinator PP2, P2, PI); 2. Kemen. ESDM; 3. SKK Migas
	13		b. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM untuk menginstruksikan Kepala SKK Migas untuk mengamankan kepentingan negara dalam pelaksanaan PSC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	**Diusulkan Selesai**	1. DJP (koordinator PP2, P2, PI); 2. Kemen. ESDM; 3. SKK Migas
1.2.2	14	Realisasi Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan Pada Direktorat Jenderal Pajak Tidak Menggunakan MAK Belanja Barang untuk Persediaan serta Terdapat Kesalahan Posting Akun Belanja Barang Operasional	Memerintahkan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai untuk melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada KPA supaya menganggarkan persediaan dengan memperhatikan ketentuan Bagan Akun Standar dan KPB untuk melakukan pencatatan persediaan secara akurat di dalam Aplikasi Persediaan.	**Diusulkan Selesai**	Koordinator Dit. KITSDA, Kanwil DJP Jaksel I, Kanwil DJP Jaksel II, Kanwil DJP Jakpus dan Kanwil DJP Jakbar
1.3.1	15	Penatausahaan Laporan Perkembangan Piutang Perpajakan dan Kertas Kerja Penyusunan Piutang PBB Belum Memadai	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk: a. Melakukan penelusuran atas realisasi Penerimaan PBB yang belum diketahui atau salah NOP dan mengurangkan piutang sesuai dengan NOP dalam SIDJP.	**Selesai**	Koordinator P2, Ekten, TTKI, TIP

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	16		b. Mengintegrasikan sistem informasi yang mendukung penatausahaan piutang PBB dan pelunasannya	**Selesai**	Koordinator P2, Eksten, TTKI, TIP
	17		c. Menyempurnakan pengendalian input ketetapan PBB pada SIDJP agar tidak terjadi nilai negatif pada penambahan kohir.	**Selesai**	Koordinator P2, Eksten, TTKI, TIP
1.3.2	18	Piutang Pajak Macet Sebesar Rp38,22 Triliun Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Memadai Diantaranya Piutang Pajak Daluwarsa Sebesar Rp14,68 Triliun	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk: a. Segera melakukan tindakan penagihan atas ketetapan pajak yang dimaksud	**Diusulkan Selesai**	Dit. P2
	19		b. Meneliti dan memproses piutang daluwarsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	**Diusulkan Selesai**	Dit. P2
	20		c. Memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, petugas penagihan pajak, supervisor pemeriksaan, kepala seksi pemeriksaan, kepala seksi penagihan, Kepala kepala kantor terkait, dan pejabat terkait daluwarsa penetapan dan daluwarsa penagihan	**Diusulkan Selesai**	Koordinator KITSDA, P2, KPP dan Kanwil Terkait
	21		d. Menyusun mekanisme pengendalian pada SIDJP yang memberikan notifikasi atas ketetapan pajak yang akan daluwarsa penagihan kepada KPP, Kanwil, Dit. Pemeriksaan dan Penagihan, serta Dit. KITSDA untuk segera dilakukan tindakan penagihan.	**Diusulkan Selesai**	Koordinator P2, KITSDA, TTKI, TPB
1.3.3	22	Terdapat Selisih Data Mutasi Pengurang Piutang Pajak pada LP3 yang Berasal dari Pembayaran dengan Data Pembayaran Piutang pada MPN	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk: a. Menginstruksikan kepada pegawai yang melakukan penatausahaan piutang agar melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi mutasi piutang pajak didukung dengan dokumen sumber yang sah; dan	**Selesai**	P2, TTKI, TIP
	23		b. Menyempurnakan pengendalian input terkait mutasi piutang pajak pada SIDJP.	**Diusulkan Selesai**	P2, TTKI, TIP
1.3.7	24	Penatausahaan Barang Persediaan pada Satuan Kerja (Satker) yang Berada di Bawah Lingkungan Kementerian Keuangan Belum Memadai	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk melakukan peningkatan kompetensi kepada para Kuasa Pengguna Barang, Operator Persediaan, dan Penanggung Jawab Persediaan di lingkungan Kementerian Keuangan.	**Selesai untuk DJP**	Setjen

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3.10	25	BMN Peralatan dan Mesin pada KP DJPB dan Kanwil DJP WP Besar Tidak Ditemukan	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: b. Memerintahkan Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pajak untuk menelusuri aset yang tidak ditemukan untuk menentukan ada tidaknya unsur TGR, serta melakukan pembinaan kepada Kuasa Pengguna barang, Penatausaha, dan pengelola aset di KP DJPB dan DJP yang belum optimal melaksanakan fungsinya.	**Diusulkan Selesai**	Bagian Perlengkapan dan Kanwil WP Besar
1.4.2	26	Penyajian Beban Provisi atas Penjualan Meterai pada Laporan Keuangan DJP TA 2015 Belum Tepat Sebesar Rp3,23 Miliar	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk menyusun ketentuan terkait pengukuran biaya yang masih harus dibayar dan beban provisi atas pendapatan penjualan meterai.	**Diusulkan Selesai**	Keuangan, PKP, PP1, Perlengkapan
KEPATUHAN					
1.1.5	27	Pemanfaatan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Belum Dikenakan Tarif Sewa, dan Kurang Penetapan Sewa Rumah Negara Sebesar Rp104,21 Juta	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: b. menginstruksikan Dirjen Pajak untuk: 1) melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pelaksana Bagian Perlengkapan dan Atasan Langsung pada KPDJP untuk mengevaluasi dan menetapkan perhitungan Biaya Sewa Rumah Negara sesuai ketentuan yang berlaku; dan 2) menagih kekurangan penetapan sewa rumah negara serta menyetorkan ke kas negara minimal sebesar Rp104.216.650,00.	**Diusulkan selesai**	Setjen, DJKN dan DJP (Bagian Perlengkapan)
1.2.1	28	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp5,94 Miliar	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. menginstruksikan Sekretaris Jenderal, Kepala BPPK, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai untuk menagih kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan selain kekurangan volume serta menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp5.949.817.437,60 (Rp3.893.867.871,46 + Rp2.055.949.566,14).	**Diusulkan selesai**	Setjen, BPPK, DJA, DJP, DJPB dan DJBC (Bagian Umum, Bagian Perlengkapan, PMA 2)

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	29		b. menginstruksikan Sekretaris Jenderal, Kepala BPPK, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea dan Cukai untuk melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kuasa Pengguna Anggaran pada satker di lingkungan masing-masing yang kurang melakukan pengawasan; dan 2) PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada satker di lingkungan masing-masing yang kurang cermat dalam pengendalian pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan.	**Diusulkan selesai**	Setjen, BPPK, DJA, DJP, DJPB dan DJBC (Bagian Umum, Bagian Perlengkapan, PMA 2)
1.3.1	30	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2015 pada DJP tidak Memperhitungkan Piutang kepada Wajib Pajak sebesar Rp580,57 Miliar	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Mewajibkan pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk memperhitungkan seluruh piutang kepada wajib pajak sesuai ketentuan; dan	**Diusulkan selesai**	Dit. PKP, Dit. P2
	31		b. Memerintahkan kepada Dirjen Pajak untuk membuat mekanisme konfirmasi terintegrasi untuk menjamin Pejabat yang memberikan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah memperhitungkan seluruh piutang kepada Wajib Pajak	**Diusulkan selesai**	Dit. PKP, Dit. P2
1.3.4	32	Belum Adanya Mekanisme Penagihan Bersama antara DJP dan DJBC yang Menimbulkan Potensi Tidak Tertagihnya Piutang Bea Masuk Minimal Senilai Rp10,69 Miliar dan SE-17/MK.01/2015 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual Tidak Mengatur Penjurnalan Pengalihan PDRI dan PPN Cukai dari DJBC ke DJP	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai dan Dirjen Pajak untuk mengoptimalkan kerja sama pertukaran data sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 194/KMK.03/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Pertukaran Data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan segera memfinalisasi Peraturan Bersama terkait mekanisme pertukaran data dan informasi dan penagihan bersama piutang Bea Masuk, Cukai dan Pajak	**Diusulkan Selesai**	Dit. PKP, Dit. P2

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3.6	33	Kuasa Pengguna Barang belum Optimal dalam Melakukan Pengelolaan Terhadap 638 Bidang Tanah yang Belum Bersertipikat dan 70 Bidang Tanah yang Masih Dalam Sengketa/Dikuasai Pihak Lain/Dalam Proses Pengadilan	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tanah di lingkungan Kementerian Keuangan; dan	**Diusulkan selesai**	DJP dan DJBC (Bagian Perlengkapan, Kanwil DJP Jakarta Selatan I, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama)
	34		b. memerintahkan Kuasa Pengguna Barang untuk sepenuhnya mempedomani ketentuan yang berlaku terkait pengamanan dan pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pensertipikatan atas aset tanah minimal 638 bidang tanah yang belum bersertipikat dan 70 bidang tanah dalam sengketa/dikuasai pihak lain/dalam proses pengadilan.	**Diusulkan selesai**	DJP dan DJBC (Bagian Perlengkapan, Kanwil DJP Jakarta Selatan I, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama)
1.3.7	35	Penghunian Sebagian Rumah Negara Tidak Sesuai Dengan Ketentuan	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Bea dan Cukai dan Dirjen Pajak memberikan pembinaan dan memerintahkan Kuasa Pengguna Barang DJBC dan DJP untuk menyelesaikan permasalahan atas penghunian 338 Rumah Negara dan Rumah Negara lainnya yang tidak sesuai ketentuan.	**Diusulkan selesai**	DJP dan DJBC (Bagian Perlengkapan dan Bagian Umum)
1.3.8	36	Pemanfaatan Barang Milik Negara atas Sebagian Aset Gedung dan Bangunan pada Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak Tidak Sesuai Ketentuan Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Bea dan Cukai, dan Dirjen Pajak untuk memerintahkan: a. Kuasa Pengguna Barang pada KP DJBC dan Kanwil DJBC Banten, dan KPDJP agar menyelesaikan permasalahan pemanfaatan aset BMN dan menetapkan nilai sewa BMN sesuai ketentuan yang berlaku; dan	**Dalam proses**	DJP (Bagian Umum)
	37		b. Kuasa Pengguna Barang pada Kanwil DJBC Banten untuk menagih sewa pemanfaatan aset sebesar Rp7.156.000,00, dan Kuasa Pengguna Barang KPDJP untuk menagih sewa penempatan ATM Mandiri sebesar Rp52.800.000,00 dan menyetorkan ke kas negara	**Diusulkan selesai**	DJP (Bagian Umum)

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKKK Tahun 2014

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (Diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SPI					
1.1.1	1	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tidak Konsisten Terhadap Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan membuat penegasan terkait perlakuan penyerahan batubara oleh PKP2B Generasi III.	**Diusulkan Selesai**	DIT. PP1
1.1.2	2	Pajak Penghasilan (PPh) DTP Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp4,71 Triliun Tidak Dihitung Dengan Mempertimbangkan Ketentuan Tax Treaty	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar membuat kebijakan pembebasan PPh atas pemberian bunga dan imbal jasa SBN Valas sesuai ketentuan perundangan	**Diusulkan Selesai**	DIT. PKP dan DIT. PP2
1.1.3	3	Pemerintah Belum Menyelesaikan Permasalahan Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran 2014 Minimal Sebesar USD91.17 Juta Ekuivalen Rp1,13 Triliun	BPK merekomendasikan kembali kepada Menteri Keuangan agar meminta Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk segera melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC.	**Diusulkan Selesai**	DIT. PP2
1.1.4	4	Penatausahaan Master File Wajib Pajak sebagai Bagian dari Data Sumber Pembentuk NTPN Tidak Memadai	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak supaya cermat dalam mengelola sistem MFWP Nasional	**Diusulkan Selesai**	
1.1.5	5	Pemungutan PPN Sebesar Rp3,19 Triliun Dilakukan oleh Wajib Pajak yang Belum Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk: a. melakukan proses pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada WP non PKP yang menerbitkan faktur pajak;	**Diusulkan Selesai**	DIT. PKP dan DIT. TIP
	6		b. memastikan bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh WP non PKP tidak dikreditkan oleh WP lawan transaksi sesuai temuan BPK;	**Diusulkan Selesai**	DIT. PKP dan DIT. TIP
	7		c. memperbaiki sistem MPN agar mampu meminimalisir adanya pembayaran PPN dalam negeri masa (kode akun 411211 kode setor 100) oleh WP non-PKP.	**Diusulkan Selesai**	DIT. PKP dan DIT. TIP
1.1.6	8	Pencatatan Pendapatan dan Belanja pada Aplikasi Sistem Akuntansi Umum (SAU) – Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Belum Sepenuhnya Memadai Sehingga Terdapat	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: b. memerintahkan Sekretaris Jenderal, Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan	**Diusulkan Selesai**	

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (Diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perbedaan Realisasi Penerimaan Perpajakan, Pengembalian Penerimaan Perpajakan, PNBP, Belanja, dan Pengembalian Belanja antara Data SAU dan SAI yang Belum Dapat Ditelusuri	Negara, Kepala BPPK dan Kepala BKF untuk melakukan penelusuran atas data SAI dan SAU unmatch penerimaan perpajakan, pengembalian penerimaan perpajakan, PNBP, belanja dan pengembalian belanja.		
1.3.1	9	Pemeriksaan, Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan Mengakibatkan Potensi Pajak Tidak Dapat Ditetapkan, Ketetapan Pajak Daluwarsa, dan Piutang Pajak Daluwarsa Tanpa Tindakan Penagihan Aktif sebesar Rp243,67 Miliar	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, Account Representative, supervisor, kepala seksi penagihan dan petugas penagihan pajak, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait daluwarsa.	**Diusulkan Selesai**	Dit. P2 Pemeriksaan
1.3.2	10	Penatausahaan Piutang Pajak Belum Memadai Sehingga Masih Memunculkan Data ALPP yang Tidak Valid dan Belum Mengakomodir Data Pengurang dan Penambah Piutang	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak melakukan hal-hal sebagai berikut: a. memperbaiki sistem informasi yang terintegrasi pada DJP terkait pengelolaan, penatausahaan piutang pajak, penyusunan kertas kerja penggolongan kualitas, dan penghitungan penyisihan piutang pajak serta pelaporannya dalam penyusunan laporan keuangan;	**Diusulkan selesai**	Dit P2 dan Dit TIP
	11		b. menginstruksikan kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk melakukan pembenahan terhadap SPI dalam ALPP Modul Penagihan	**Diusulkan selesai**	Dit P2 dan Dit TIP
	12		c. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada petugas penatausahaan piutang, Kepala Seksi Penagihan, Kepala Kantor, dan pejabat terkait lainnya pada masing-masing KPP	**Diusulkan selesai**	Dit P2 dan Dit KITSDA
1.3.3	13	SPI atas Pengelolaan dan Penatausahaan Pengajuan dan Putusan Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali pada DJP Masih Belum Memadai	a. menginstruksikan Direktur Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) untuk mengintegrasikan SIDJP dengan ALPP;	**Diusulkan selesai**	Dit Kebban, Dit P2 dan Dit TIP
	14		b. menginstruksikan Direktur Keberatan dan Banding untuk melakukan administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Pengajuan dan Putusan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali dengan memanfaatkan SIDJP.	**Selesai**	Dit Keban, Dit TIP

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (Diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.3.4	15	Pengelolaan Piutang PDRI yang Dilimpahkan oleh DJBC Kepada DJP Belum Memadai	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. menetapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan PDRI yang diserahkan penagihannya oleh DJBC kepada DJP;	**selesai di DJP**	DJP dan DJBC (Kemenkeu)
			b. memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk merevisi Perdirjen Bea dan Cukai Nomor 31/BC/2013 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Bea dan Cukai Nomor 47/BC/2010 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di DJBC, sehingga selaras dengan Standar Akuntasi Pemerintahan dan Bultek SAP Nomor 06;		DJBC
	16		c. memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak untuk meningkatkan koordinasi terkait penatausahaan piutang PDRI dengan mempertimbangkan daluwarsa penetapan pajak	**Selesai di DJP**	DJP (Dit P2) dan DJBC
	17		d. memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk segera menindaklanjuti SP3DRI dari DJBC	**Selesai**	Dit P2
1.3.7	18	Pencatatan dan Pelaporan Persediaan pada Neraca BA 015 Kementerian Keuangan Per 31 Desember 2014 Belum Memadai	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan: a. Direktur Jenderal Pajak untuk: 1) merevisi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai antara DJP dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KEP-151/PJ.01/2014 atau Nomor PKS-108/DIRUT/0614 Pasal 4 tentang Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai supaya mengatur mengenai mekanisme benda meterai in transit;	**Diusulkan selesai**	Dit PKP, Dit PP1, Perlengkapan, Umum, Keuangan
	19		2) merevisi uraian jabatan dan petunjuk pengawasan terhadap pengelolaan dan penjualan benda meterai yang tertuang dalam SE-38/PJ/2013 supaya mengakomodasi pelaksanaan pengelolaan benda meterai di lapangan.	**Diusulkan selesai**	Dit PKP, Dit PP1, Perlengkapan, Umum, Keuangan
1.3.9	20	Pemanfaatan Barang/Jasa Dilakukan Tidak Sesuai dengan Rencana yang Ditetapkan atas Sebagian Aset Tanah Pada KPP Pratama Jakarta Menteng Dua Seluas 147 m2	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. segera menetapkan tarif PNBP atas pemanfaatan tanah di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua;	**Dalam Proses**	Bag. Perlengkapan Dan KPP Jakarta Menteng Dua

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (Diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	21		b. memerintahkan Direktur Jenderal Pajak agar melakukan pembinaan secara berjenjang kepada Kepala KPP Pratama Jakarta Menteng Dua selaku KPB agar lebih cermat dalam penggunaan aset tanah dan bangunan yang menjadi tanggung jawabnya	**Selesai**	Dit KITSDA dan KPP Jakarta Menteng Dua
KEPATUHAN					
1.1.1	22	Direktorat Jenderal Pajak Terlalu Besar Memberikan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi) Pajak kepada WP Sebesar Rp99,55 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengembalikan kelebihan pengeluaran negara sebesar Rp99.552.190.906,20; dan	**Selesai di DJP (Dispute)**	Dit. P2, Kanwil DJP WP Besar, KPP LTO 1, dan KPP LTO 3
	23		b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan	**Selesai di DJP (Selesai)**	Dit. KITSDA, Kanwil DJP WP Besar, KPP LTO 1, dan KPP LTO 3
1.1.2	24	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak kepada PT B33 Sebesar Rp61,80 Miliar Diragukan Kewajarannya	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. melakukan penelitian ketepatan pemberian fasilitas SJB PPN impor kepada PT B33; dan	**Dispute**	Dit. KITSDA, Dit. P2 dan Kanwil DJP Sumut I
	25		b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Tim Pemeriksa DJP, Tim QA, dan Kepala Kantor terkait.	**Selesai**	Dit. KITSDA dan Kanwil DJP Sumut I
1.1.3	26	Keterlambatan Penyampaian Pemberitahuan Pemeriksaan Sehingga Dimanfaatkan Oleh Wajib Pajak untuk Melakukan Pembetulan SPT	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. membuat peraturan terkait pemberian sanksi atas keterlambatan penyampaian SP2; dan	**Selesai di DJP (selesai)**	Dit. P2
	27		b. menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Tim Pemeriksa DJP serta Kepala KPP Pratama Karawang Selatan, KPP Pratama Tegal, KPP Pratama Batang, KPP Pratama Semarang Barat, dan KPP Madya Jakarta Selatan.	**Diusulkan selesai**	Dit. KITSDA
1.1.4	28	DJP Tidak/Kurang Menetapkan Penerimaan PBB Pertambangan Sektor Mineral	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk: a. meneliti kembali perhitungan PBB	**Selesai di DJP**	Dit. Eksten

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (Diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan Batubara Minimal Sebesar Rp248,87 Miliar	Pertambangan Sektor Minerba sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segera menerbitkan ketetapan pajak dalam hal PBB kurang ditetapkan;		
	29		b. membangun sistem informasi yang memadai terkait PBB Pertambangan Sektor Minerba dan mengintegrasikan data menyangkut PBB Pertambangan Sektor Minerba antara KPP Lokasi dengan KPP tempat WP terdaftar; dan	**Diusulkan selesai (SIDJP Modul Konversi PBB)**	Dit. TTKI dan Dit. Eksten
	30		c. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada penilai, kepala seksi, dan kepala kantor terkait pengelolaan PBB Pertambangan Sektor Minerba.	**Selesai di DJP**	Dit. KITSDA dan Dit. Ekten
1.1.11	31	Denda Keterlambatan atas Tiga Pekerjaan pada Kementerian Keuangan Sebesar Rp106,67 Juta Belum Dipungut	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Direktur Jenderal Pajak, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan: a. memberikan pembinaan sesuai ketentuan kepada PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Direktorat Jenderal Pajak, dan Sekretariat Jenderal yang kurang optimal dalam pengawasan dan pengendalian penyelesaian pekerjaan serta pengenaan denda keterlambatan; dan	**Diusulkan selesai**	BPPK (STAN) DJP (Dit. KITSDA dan Dit TIP) Setjen
	32		b. memerintahkan kepada PPK di lingkungannya untuk menagih denda keterlambatan kepada para penyedia jasa dan menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp106.679.186,62 serta meneliti tanggal konfigurasi cisco secara sistem guna menghitung jumlah hari keterlambatan pekerjaan pemeliharaan.	**Selesai di DJP**	Dit. TTKI dan Dit. Eksten
1.2.1	33	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp10,97 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. menginstruksikan Sekretaris Jenderal, Kepala BPPK, Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Pajak, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Bea dan Cukai, dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk: 1) memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada satker di lingkungan Setjen, BPPK, DJKN, DJP, DJPB, DJBC dan DJPPR Kementerian Keuangan agar meningkatkan pengawasan;	**selesai di DJP**	Setjen, BPPK, DJKN, DJP (Dit KITSDA, Bag Perlengkapan, Dit TIP, KPP Subang), DJPB, DJBC dan DJPPR

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (Diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	34		2) memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada satker di lingkungan Setjen, BPPK, DJKN, DJP, DJPB, DJBC dan DJPPR Kementerian Keuangan agar lebih cermat dalam pengendalian pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan;	**selesai di DJP**	Setjen, BPPK, DJKN, DJP (Dit KITSDA, Bag Perlengkapan, Dit TIP, KPP Subang), DJPB, DJBC dan DJPPR
			3) memerintahkan PPK pada DJBC untuk memperhatikan Surat Edaran dari Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Nomor 758/DJPPI.1/Kominfo.11.2011 tanggal 29 November 2011, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Layanan Jasa Akses Internet, Komunikasi antar Kantor secara Virtual dan Closed User Group dalam menunjuk penyedia jasa pertukaran data elektronik; dan		DJBC
	35		4) memerintahkan PPK untuk menyetorkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada satker di lingkung an Setjen, BPPK, DJKN, DJP, DJPB, dan DJBC Kementerian Keuangan sebesar Rp10.882.874.543,60 (Rp10.970.474.543,60 – Rp87.600.000,00).	**selesai di DJP**	Setjen, BPPK, DJKN, DJP (Dit KITSDA, Bag Perlengkapan, Dit TIP, KPP Subang), DJPB, DJBC dan DJPPR
	36		d. menginstruksikan Dirjen Pajak untuk memerintahkan PPK melaksanakan workshop atas kegiatan pemeliharaan software bank data.	**Selesai di DJP**	DJP (Dit TIP)
1.2.2	37	Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Kontrak Sebesar Rp3,44 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak, Kepala BPPK, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, dan Dirjen Bea dan Cukai Keuangan Kementerian Keuangan untuk: a. memberikan pembinaan sesuai ketentuan kepada PPK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Pusat DJP, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Kantor Pusat DJPB, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Setjen, KPKNL Pekanbaru, dan Kantor Pusat DJBC yang kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa;	**selesai di DJP**	DJP (Dit KITSDA dan Dit P2 Humas) BPPK (STAN) DJPB DJKN DJBC

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (Diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	38		b. memberikan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Kantor Pusat DJP, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Kantor Pusat DJPB, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Setjen, KPKNL Pekanbaru, dan Kantor Pusat DJBC yang kurang melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;	**selesai di DJP**	DJP (Dit KITSDA) BPPK (STAN) DJPB DJKN DJBC
	39		c. memerintahkan PPK pada Kantor Pusat DJP, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Kantor Pusat DJPB, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Setjen, KPKNL Pekanbaru, dan Kantor Pusat DJBC untuk mengganti aset yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak sebesar Rp3.447.109.482,70 atau memperhitungkan selisih nilai aset yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan menyetorkan ke kas negara; dan	**selesai di DJP**	DJP (Dit KITSDA dan Dit P2 Humas) BPPK (STAN) DJPB DJKN DJBC
1.2.4	40	Proses Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp78,94 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. memerintahkan Setjen, Dirjen Pajak dan Kepala BPPK untuk memberikan pembinaan sesuai ketentuan kepada: 1) KPA yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan;	**Diusulkan selesai**	Setjen DJP (Dit KITSDA) BPPK
	41		2) PPK yang tidak cermat dalam memilih jenis kontrak, menyusun HPS, dan segera mencairkan jaminan penawaran; dan	**Diusulkan selesai**	Setjen DJP (Dit KITSDA) BPPK
	42		3) Kelompok kerja ULP Kementerian Keuangan yang tidak teliti dalam menyeleksi peserta yang melakukan penawaran.	**Diusulkan selesai**	Setjen DJP (Dit KITSDA) BPPK
	43		c. menyampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas para penyedia jasa yang berindikasi memiliki itikad tidak baik dalam proses lelang pengadaan pekerjaan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.	**(Selesai di DJP)**	Setjen, DJP (KPP Prabumulih)
1.2.6	44	Pengeluaran Keuangan Negara untuk Perangkat Teknologi Informasi dan Sarana Pendukungnya Paket I Sebesar Rp1,39 Miliar Tidak Didukung Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia Sesuai yang Diatur Dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk: a. memberikan pembinaan sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak cermat dalam menerima hasil pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan terkait persyaratan penggunaan Bahasa Indonesia dalam buku petunjuk penggunaan sebagai kelengkapan printer kartu tersebut;	**Selesai di DJP**	Dit TTKI dan Dit KITSDA

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (Diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bagi Produk Telematika dan Elektronik			
	45		b. meminta PPK menyerahkan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan barang berbahasa Indonesia kepada BPK; dan	**Selesai di DJP**	Dit TTKI dan Dit KITSDA
	46		c. meminta PPK untuk membuktikan bahwa petunjuk penggunaan dan kartu jaminan barang berbahasa Indonesia yang telah diserahkan penyedia barang telah terdaftar pada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Kementerian Perdagangan.	**Selesai di DJP** (	Dit TTKI dan Dit KITSDA
	47	DJP Kurang Menetapkan Nilai Pajak Terutang kepada WP Sebesar Rp309,93 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. melakukan penelitian kembali dan/atau mengupayakan penagihan atas potensi kekurangan piutang pajak sebesar Rp309.936.372.098,47; dan	**Selesai di DJP**	DJP Dit. KITSDA, Dit. P2, Kanwil LTO, Kanwil Jaksus, Kanwil Sumut I
	48		b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan.	**Selesai di DJP**	DJP Dit. KITSDA, Dit. P2, Kanwil LTO, Kanwil Jaksus, Kanwil Sumut I
1.3.2	49	DJP Belum Menagih Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Sebesar Rp3,14 Triliun	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada AR, Pelaksana Seksi Penagihan, fungsional pemeriksa, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultansi, dan Kepala Seksi Penagihan serta Kepala KPP yang terkait;	**Selesai di DJP**	Dit KITSDA
	50		b. menyempurnakan informasi pemungut PPN dalam Surat Setoran Pajak dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;	**Selesai di DJP**	Dit PKP, Dit TIP
	51		c. menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo untuk diakui sebagai piutang pajak per 31 Desember; dan	**Diusulkan selesai**	Dit PKP, Dit PP1
	52		d. melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengenakan sanksi administrasi pajak sebesar Rp3.147.374.525.879,16.	**Diusulkan selesai**	Dit PKP
1.3.3	53	Terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Tidak Dikompensasikan dengan Utang Pajak Sebesar Rp6,36 Miliar	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada AR dan Pelaksana Seksi Penagihan pada KPP;	**Diusulkan selesai**	Dit KITSDA

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan (Diusulkan selesai/ *On Progress*)	UIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	54		b. menyempurnakan Sistem penerbitan SPMKP/SKPKPP yang belum terintegrasi dengan data tunggakan secara realtime; dan	**Diusulkan selesai**	Dit TIP
	55		c. menyempurnakan ALPP sebagai aplikasi pelaporan piutang yang belum terintegrasi dengan data transaksi yang mempengaruhi piutang.	**Diusulkan selesai**	Dit P2
56	1.3.5	Pelaksanaan Pertukaran Data Penagihan antara DJP dan DJBC Belum Optimal yang Menimbulkan Potensi Tidak Tertagihnya Piutang Bea Masuk dan Cukai Minimal Senilai Rp1,50 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pertukaran data sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 194/KMK.03/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Pertukaran Data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan melakukan koordinasi untuk penagihan.	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit P2) DJBC

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKKK Tahun 2013

No. Rekomen-dasi	Butir Dan No Temuan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Keterangan	PIC
SPI					
1	1.1.1 (1)	Ketidakjelasan Basis Regulasi terkait Metode Perhitungan Witholding Tax atas Empat Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Karya Pertambangan Mengakibatkan Ketidakpastian Potensi Penerimaan Negara	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menetapkan secara jelas mengenai basis regulasi terkait metode perhitungan *witholding tax* atas Wajib Pajak Kontrak Karya sebelum tahun 2013 dan menyelaraskan ketentuan antara Kontrak Karya dengan undang-undang dan aturan pelaksana dibawah undang-undang.	**Selesai**	Dit P2 dan Dit PP2
2	1.1.2 (2)	DJP Belum Mengatur dengan Jelas Transaksi Cash Pooling Sehingga Kompensasi Kerugian Fiskal yang Dilaporkan Lebih Besar dari yang Seharusnya Sebesar Rp112,04 Miliar.	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan memerintahkan Dirjen Pajak untuk melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan melalui pengaturan transaksi *cash pooling*.	**Dalam Proses**	Dit P2 dan Dit PP2
	1.1.3 (3)	PPh DTP Surat Berharga Negara Sebesar Rp3,11 Triliun Dihitung Berdasarkan Dokumen Sumber yang Kurang Memadai	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. memerintahkan Dirjen PU untuk melakukan monitoring atas transaksi SBN Valas Internasional; dan	**DJPPPR** **Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan Yang Sah**	DJPPPR
3			b. memerintahkan kepada Dirjen Pajak untuk meningkatkan koordinasi dengan Dirjen PU terkait dengan perhitungan PPh DTP Pasal 26 atas SBN Valas Internasional.	**Selesai TPTD**	DJP (PP2 dan PKP) DJPPR
4	1.1.4 (4)	Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar USD145,713,443.44 Ekuivalen Rp1,78 Triliun	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk melakukan amandemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC.	**Selesai di DJP**	DJP (P2 dan PP2) SKK Migas Kemen ESDM
5	1.1.5 (5)	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan Perpajakan Menggunakan Modul Penerimaan Negara Kurang Memadai	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar melakukan pembinaan kepada: a. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pajak yang tidak cermat dalam pengawasan dan pencatatan atas transaksi reversal dan atas penerimaan/pelunasan piutang yang berisiko tidak dilimpahkan ke Kas Negara;	**Diusulkan selesai**	DJPB DJP (Dit KITSDA dan Dit TIP)
			b. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang tidak cermat dalam mengawasi ketepatan waktu pengakuan Penerimaan Negara oleh Bank Persepsi dan menginstruksikan untuk memberikan sanksi kepada Bank Persepsi terkait; dan	**DJPB (selesai)**	DJPB
6			c. Direktur Jenderal Pajak yang tidak cermat dalam mengelola sistem NTPN *Generator* dan *Master File* Wajib Pajak Nasional dan menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memperbaiki sistem dan teknologi MPN	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit TIP)

No. Rekomen-dasi	Butir Dan No Temuan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Keterangan	PIC
			agar mencatat NTPN secara lengkap baik pada saat di NTPN *Generator* maupun pada tahap selanjutnya dan agar mampu mendeteksi keterlambatan pembayaran pajak.		
7	1.1.6 (6)	Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Masa Sebesar Rp1,61 Triliun oleh Wajib Pajak yang Belum Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk: a. memperbaiki sistem MPN agar mampu mendeteksi pembayaran PPN oleh wajib pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP;	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit TIP)
8			b. memerintahkan Kepala KPP yang bersangkutan untuk melakukan proses pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada wajib pajak non-PKP yang menerbitkan faktur pajak;	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit KITSDA, Dit PP1, Dit PP1)
9			c. memerintahkan Kepala KPP yang bersangkutan untuk memastikan bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh wajib pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak dikreditkan oleh Wajib Pajak lawan transaksi; dan	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit PKP)
10			d. memberikan pembinaan kepada Kepala KPP terkait untuk meningkatkan pengawasan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh wajib pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP.	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit KITSDA)
11	1.1.7 (7)	Pengelolaan PBB Migas Belum Didukung dengan Data yang Valid Sehingga Penetapan Nilai PBB Migas Tidak Akurat	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. melakukan penyempurnaan atas PMK Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak bumi, panas bumi dan gas bumi, dalam hal: 1) Verifikasi atas SPOP oleh DJA dan SKK Migas untuk menjamin akurasi penetapan SPPT;	**Selesai**	DJP (Eksten)
12			2) Validasi keberadaan dan status KKKS oleh SKK Migas dan penyampaian data hasil validasi kepada DJP;	**Diusulkan Selesai**	
13			b. memerintahkan Direktur Jenderal Pajak segera memastikan akurasi dan menetapkan SPPT yang telah diverifikasi ulang oleh SKK Migas serta mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan dalam penatausahaan PBB Migas; dan	**Diusulkan selesai**	DJP (Eksten dan TTKI)
14			c. menyempurnakan metode perhitungan nilai bumi dan NJOP *offshore* dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan azas keadilan.	**Selesai**	DJP (Eksten)
15	1.3.1 (8)	Penatausahaan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Belum Memadai	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk: a. memberikan pembinaan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, Direktur P2 dan Direktur Keberatan dan	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit KITSDA dan Dit P2 dan Dit Kebban)

No. Rekomen-dasi	Butir Dan No Temuan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Keterangan	PIC
			Banding yang tidak cermat dalam melakukan rekonsiliasi data piutang dan meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan data penerimaan dan dalam penyusunan laporan keuangan DJP; dan		
16			b. menyempurnakan desain SIDJP dan ALPP agar dapat diandalkan sebagai sumber data dan penatausahaan piutang pajak.	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit P2, Dit TIP dan Dit TTKI)
17	1.3.2 (9)	Terdapat SKP/STP Sejumlah 420 Ketetapan Sebesar Total Rp55,86 Miliar Diterbitkan Menjelang Daluwarsa Penagihan	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk: a. melakukan pembinaan sesuai ketentuan kepada Kepala Kanwil DJP terkait selaku atasan langsung yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan penerbitan SKPKB/SKPKBT/STPoleh KPP dan Kepala KPP terkait yang tidak cermat dalam menerbitkan SKPKB/SKPKBT/STP secara tepat waktu; dan	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit KITSDA)
18			b. melimpahkan upaya penelusuran kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas keterlambatan penerbitan SKPKB/SKPKBT/STP daluwarsa sebesar Rp55.868.889.230,00 dan melakukan upaya pemulihan atas penerimaan pajak yang tidak dapat direalisasikan.	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit P2) ITJEN
19	1.3.3 (10)	Piutang Pajak atas 571 NPWP Sebesar Rp1,08 Miliar Tidak Dapat Teridentifikasi pada *Master File* Wajib Pajak Nasional	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan memerintahkan Direktur Jenderal Pajak agar: a. memberikan pembinaan kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang kurang cermat dalam mengadministrasikan dan mengelola data MFWP dan data Piutang Pajak; dan	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit KITSDA, Dit TIP dan Dit P2)
20			b. menginstruksikan kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk melakukan pembenahan terhadap sistem pengendalian intern dalam ALPP Modul Penagihan agar data piutang pajak terintegrasi dengan data *masterfile* nasional Wajib Pajak.	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit TIP)
21	1.3.4 (11)	Piutang Pajak yang Penagihannya Belum Daluwarsa dengan Status NPWP Wajib Pajak Dihapuskan Berpotensi Tidak Tertagih Sebesar Rp42,83 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan memerintahkan Direktur Jenderal Pajak agar: a. melakukan penelitian ulang terhadap NPWP yang telah dihapuskan dan piutang pajaknya belum lunas untuk dinormalkan kembali; dan	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit P2)
22			b. melakukan pembenahan terhadap sistem pengendalian intern dalam sistem informasi terkait penghapusan NPWP agar penghapusan NPWP terintegrasi dengan data piutang pajak.	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit P2), Dit. TTKI

No. Rekomen-dasi	Butir Dan No Temuan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Keterangan	PIC
23	1.3.8 (12)	Aset Tetap Belum Disertai Bukti Kepemilikan dan Inventarisasi Aset Belum Selesai Dilaksanakan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. memerintahkan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai untuk menginstruksikan secara berjenjang kepada Kuasa Pengguna Barang di Kanwil DJP Banten dan KPUBC Batam untuk mengamankan aset dengan melengkapi bukti kepemilikan tanah dan kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya; dan	**Selesai di DJP**	DJP(Bag Perlengkapan) DJBC
24			b. memerintahkan Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Pajak untuk memberikan pembinaan secara berjenjang kepada pengelola barang terkait yang tidak cermat dalam penatausahaan barang yang menjadi tanggung jawabnya dan segera menyelesaikan sensus BMN.	**Diusulkan selesai**	DJP (Dit KITSDA) DJBC
25	1.3.9 (13)	Kas di Bendahara Pengeluaran Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp39,58 Miliar per 31 Desember 2013 dan Penggunaan Rekening Pribadi Berpotensi Merugikan Keuangan Negara Sebesar Rp19,72 Juta	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Pengelolaan Utang, Dirjen Anggaran, Kepala BKF, Sekjen dan Dirjen Pajak untuk Menginstruksikan para bendahara pengeluaran pada DJKN, DJPU, DJA, BKF, Sekretariat Jenderal dan DJP untuk segera mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dan mencatat pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan s.d. akhir tahun di akun Kas Lainnya dan Setara Kas di Neraca.	**Selesai untuk DJP**	DJKN DJPU DJA BKF SETJEN DJP (Keuangan)
26	1.3.10 (14)	Penatausahaan Persediaan Meterai pada KPDJP Belum Tertib	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk: a. menyempurnakan SE-38/PJ/2013 dan Perjanjian Kerjasama antara DJP dengan PT Pos Indonesia (Persero) terkait pengelolaan dan penatausahaan persediaan meterai;	**Selesai**	Dit PKP, Dit PP1, Bag Perlengkapan, Bag Umum, Bag Keuangan
27			b. meminta penggantian meterai yang cacat produksi kepada Peruri;	**Selesai**	
28			c. menginstruksikan kepada satker terkait untuk mematuhi penatausahaan dan pengelolaan persediaan; dan	**Selesai**	
29			d. memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan *stock opname* persediaan meterai pada satker di lingkungan DJP.	**Selesai**	
KEPATUHAN					
30	1.1.1 (15)	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kurang Menetapkan Nilai Pajak Terutang kepada WP Sebesar Rp338,02 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, peneliti keberatan, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan;	**Diusulkan selesai**	Dit P2 dan Dit KITSDA

No. Rekomen-dasi	Butir Dan No Temuan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Keterangan	PIC
31			b. melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memulihkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp338.023.832.352,00; dan	**Diusulkan selesai**	Dit P2
32			c. meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penelitian keberatan, dan penelitian atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 36 UU KUP.	**Diusulkan selesai**	Dit P2
33	1.1.2 (16)	Pemeriksaan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan dan Keterlambatan Menindaklanjuti SPT Lebih Bayar Wajib Pajak Mengakibatkan Pemberian Imbalan Bunga Sebesar Rp2,82 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kepala KPP Pratama Pangkalan Kerinci dan Kepala KPP Madya Jakarta Pusat yang lalai dalam memproses penyelesaian permohonan restitusi PT A.4.1 sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.	**Diusulkan selesai**	Dit KITSDA
34	1.1.3 (17)	DJP Belum Menagih Sanksi Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Sebesar Rp482,29 Miliar	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada AR dan pelaksana seksi penagihan, kepala seksi penagihan terkait, serta kepala kantor terkait;	**Diusulkan selesai**	Dit KITSDA
35			b. meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran masa dan bunga penagihan; dan	**Diusulkan selesai**	Dit PKP dan Dit P2
36			c. menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait, untuk segera menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran setoran masa dan bunga penagihan sebesar Rp482.291.378.765,30.	**Diusulkan selesai**	Dit PKP
37	1.3.1 (18)	Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan yang Mengakibatkan Piutang Pajak Daluwarsa sebesar Rp800,88 Miliar	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. menerbitkan instruksi terkait dengan kegiatan pemeriksaan pajak dengan memperhatikan waktu daluwarsa penetapan pajak;	**Selesai**	Dit P2
38			b. memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, petugas penagihan, kepala seksi penagihan, kepala KPP terkait; Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Peraturan Perpajakan I, dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; dan	**Diusulkan selesai**	Dit KITSDA
39			c. meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak secara aktif.	**Diusulkan selesai**	Dit P2
40	1.3.2 (19)	Pemeriksaan Ulang atas PT B.1.1 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku Sehingga DJP Tidak	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemeriksa	**Selesai**	Dit KITSDA

No. Rekomen-dasi	Butir Dan No Temuan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Keterangan	PIC
		Dapat Menagih SKPKB Sebesar Rp554,52 Miliar dan Tidak Dapat Mengeksekusi Barang Sitaan Sebesar Rp259,06 Miliar	dan pejabat lainnya yang terkait.		

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKKK Tahun 2012

No. Rekomen-dasi	Butir Dan No. Temuan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Keterangan	PIC
SPI					
	1.1.1. (1)	Transaksi Pembatalan (Reversal) Penerimaan Perpajakan Sebesar Rp77,69 Miliar dan Selisih SAI/SAU Penerimaan Perpajakan Sebesar Rp196,51 Miliar Belum Dapat Dijelaskan	BPK merekomendasikan kepada Menkeu agar lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan dalam penatausahaan data reversal dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan serta memerintahkan: a. Dirjen Perbendaharaan untuk menindaklanjuti data reversal yang belum dapat diyakini dan lebih cermat dalam melakukan penelitian data reversal serta melakukan perbaikan mekanisme penyelesaian transaksi reversal;	DJPB	DJPB
			b. Dirjen Perbendaharaan melakukan pembinaan kepada Bank/Pos Persepsi untuk lebih cermat meng-input data transaksi pembayaran perpajakan;	DJPB	DJPB
1			c. Sekjen Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaa, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai untuk melakukan pembinaan kepada petugas rekonsiliasi penerimaan perpajakan yang tercatat dalam SAI dan SAU agar lebih teliti dalam melaksanakan rekonsiliasi data; dan	selesai	DJP (TIP)
2			d. Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai untuk meningkatkan ketelitian dan menyempurnakan kembali sistem pencatatan penerimaan perpajakan dan mekanisme rekonsiliasi dengan memperhatikan adanya pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem secara memadai.	selesai	DJP (TIP)
3	1.1.3. (2)	Pengelolaan PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah Sebesar Rp1,38 Triliun Belum Dapat Direalisasikan dan Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh dan Bagi Hasil Migas Tidak Konsisten Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,30 Trilliun	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. menetapkan SOP terkait koordinasi antara DJP, DJA, dan SKK Migas untuk menindaklanjuti PMK Nomor 79/PMK.02/2012 Pasal 16;	Selesai di DJP	DJP (Dit P2 dan PP2) DJA SKK Migas
4			b. menagih sanksi denda administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak dari KKKS sebesar USD3,415,356.35 ekuivalen sebesar Rp33.026.495.863,89; dan	Selesai	
5			c. menindaklanjuti rekomendasi BPK tentang amandemen PSC dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk mencegah berkurangnya penerimaan negara dari bagi hasil migas dan PPh Migas.	selesai	

No. Rekomen-dasi	Butir Dan No. Temuan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Keterangan	PIC
6	1.1.4 (3)	Kehilangan potensi penerimaan PPh Migas Minimal Sebesar Rp8,69 Miliar atas kebijakan penangguhan pengenaan pajak *First Trance Petroleum* dari Kontraktor Kontrak Kerjasama yang melakukan pengalihan *Participating Interest*	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menetapkan kebijakan pengenaan pajak terhadap penghasilan dari FTP dalam hal KKKS melepaskan *participating interest* sebelum dicapainya ETBS.	Selesai	DJP
7	1.1.5 (4)	Sistem pengelolaan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan Non Mlgas Valuta Asing belum memadai	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar mengistruksikan: a. Dirjen Pajak dan Dirjen Perbendaharaan untuk meningkatkan pengelolaan penerimaan PPh Pasal 25/29 Valas; dan	Selesai	DJP
8			b. Dirjen Pajak mengenakan sanksi keterlambatan minimal sebesar USD1,271,380.68 atau setara dengan Rp12.294.251.183,33 kepada KKKS yang terlambat membayar pajak.	Selesai	DJP
9	1.1.6 (5)	Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan belum memadai	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar mengistruksikan Dirjen Pajak untuk: a. Melakukan rekonsiliasi penyajian nilai realisasi PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB P2) antara Laporan Mingguan Penerimaan (LMP) PBB, nilai realisasi yang tersaji pada Transaksi Pembayaran Elektronik (TPE), data pelimpahan PBB P2 dari Bank Persepsi ke BO III dan penyajian nilai tersebut pada LK Kemenkeu	Selesai	DJP
10			b. Melakukan penelitian atas realisasi penerimaan PBB P2 sesuai dengan hak Negara yang seharusnya (tidak memasukkan nilai penerimaan atas daerah yang telah dilimpahkan ke Pemda)	Selesai	DJP
11			c. Melakukan kompensasi utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Diusulkan selesai	Dit. PP1, Dit. TIP
12	1.2.3 (6)	Penentuan jenis kontrak pemeliharaan fire extinguisher di DJP tidak sesuai sifat pekerjaan dan penyelesaian pembangunan gedung KPP Pratama Sekayu berlarut-larut	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan: a. Dirjen Pajak untuk melakukan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan pengadaan pekerjaan khususnya penentuan jenis kontrak; dan	Selesai	DJP
13			b. Dirjen Pajak untuk mengambil keputusan segera tentang penyelesaian pembangunan gedung kantor KPP Pratama Sekayu	Selesai	DJP
14	1.3.1 (7)	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN belum dilaksanakan dengan tertib dan terdapat aset sebesar Rp214.007.644.685,00 belum dilakukan inventarisasi dan penilaian	BPK merekomendasikan: a. Dirjen Pajak, Dirjen Perbendaharaan, dan Dirjen Kekayaan Negara melaksanakan IP atas BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004; dan	Diusulkan selesai	
15			b. Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, Kepala BPPK, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Anggaran, dan Kepala BKF untuk meningkatkan upaya pengamanan BMN melalui penatausahaan yang tertib dan	Selesai	DJP

No. Rekomen-dasi	Butir Dan No. Temuan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Keterangan	PIC
			secara berjenjang melakukan pembinaan terhadap petugas SIMAK BMN dan Petugas Persediaan serta Atasan Langsungnya.		
16	1.3.3 (8)	Penatausahaan kas bendahara pengeluaran di tiga satker pada DJBC dan DJP, dan persediaan pada Balai Diklat Keuangan Manado belum tertib	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan: a. Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, dan Kepala BPPK melakukan pembinaan kepada Bendahara Pengeluaran KPPBC Tipe B Blitar dan Kanwil DJBC Jatim II, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji dan Tunjangan KPDJP serta Petugas Persediaan di BDK Manado untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; dan	Selesai	DJP
17			b. Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Pajak, dan Kepala BPPK menginstruksikan atasan langsung Bendahara Pengeluaran KPPBC Tipe B Blitar dan Kanwil DJBC Jatim II, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji dan Tunjangan KPDJP serta Petugas Persediaan di BDK Manado untuk mengintensifkan pengawasan dan pengendalian.	Selesai	DJP
18	1.3.4 (9)	Pencatatan dan Pelaporan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Tidak Dapat Dijelaskan sebesar Rp37.551.743.861,00	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar merevisi PMK terkait dengan pengelolaan SP3DRI dan tindak lanjutnya di DJP dan menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk: a. Menyusun SOP rekonsiliasi data penerbitan SKPKB/STP antara SIDJP dan ALPP;	Diusulkan selesai	Dit. P2
19			b. Membuat menu monitoring status upaya hukum atas SKPKB yang tidak disetujui WP pada ALPP dan otomatisasi penambahan piutang akibat tidak diajukannya upaya hukum;	Diusulkan selesai	Dit. P2
20			c. Menyusun SOP mengenai input data pengajuan upaya hukum dan keputusan upaya hukum kedalam SIDJP dan menggunakannya sebagai data masukan dalam ALPP;	Diusulkan selesai	Dit. P2
21			d. Menyusun SOP rekonsiliasi data pengajuan upaya hukum dan keputusan upaya hukum antara ALPP, SIDJP, dan Data Direktorat Keberatan dan Banding;	Diusulkan selesai	Dit. P2
22			e. Menyusun SOP rekonsiliasi data antara Laporan Keuangan dan LP3 PBB terkait penerimaan PBB dan pengurangan piutang PBB; dan	Diusulkan selesai	Dit. P2
23			f. Menyusun SOP rekonsiliasi terkait dengan pengurang piutang dan pembayaran piutang melalui mekanisme potongan SPM (e-pay point).	Diusulkan selesai	Dit. P2
24	1.3.6. (10)	Terdapat Aset pada Kementerian Keuangan yang Dikuasai oleh Pihak Ketiga, Tidak Didukung Dokumen Sertifikat, dan Tidak Diketahui Keberadaannya	BPK merekomendasikan kepada Menkeu memerintahkan: a. Kuasa Pengguna Barang pada DJPB, DJBC, dan DJP menertibkan aset dikuasai pihak yang tidak berhak;	Dalam proses	SETJEN DJP (Bag Perleng-kapan) DJBC DJPB

No. Rekomen-dasi	Butir Dan No. Temuan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Keterangan	PIC
25			b. Kuasa Pengguna Barang pada Setjen, DJPB, BPPK, DJP dan DJBC mengurus tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kemenkeu; dan	Dalam proses	BPPK
26			c. Kuasa Pengguna Barang pada DJP, DJBC dan DJPB menelusuri aset tidak diketahui keberadaannya.	Dalam proses	
KEPATUHAN					
	1.1.1 (11)	Pengelolaan PBB Migas Tahun 2012 Belum Sepenuhnya Memadai dan Pemerintah Menanggung PBB Migas KKKS Yang Tidak Seharusnya Sebesar Rp1,05 Miliar	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menunjuk Bank Persepsi tempat pembayaran PBB Migas untuk KKKS yang menandatangani kontrak (tunduk pada) PP Nomor 79 Tahun 2010;		DJPB
27			2. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SPPT dan menyampaikannya kepada KKKS yang menandatangani kontrak (tunduk pada) PP Nomor 79 Nomor Tahun 2010 untuk segera dapat direalisasikan pembayaran PBB migas yang terutang;	Selesai	DJP
28			3. Direktur Jenderal Pajak segera menagihkan kembali atas pembayaran PBB Migas senilai Rp1.046,42 juta kepada WP yang bersangkutan dan menyampaikan tindak lanjut penagihan PBB tersebut kepada DJA; dan	Diusulkan Selesai	DJP
29			4. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak untuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam rangka penyelesaian kewajiban PBB Panas Bumi PT. Geo Dipa Energi	Selesai	DJP
30	1.1.2 (12)	Putusan Keberatan atas SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tubuh Bumi KKKS BUT Petrochina International (Bermuda) Ltd Tahun 2012 oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus tidak sesuai ketentuan yang berlaku	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak agar: a. mempertimbangkan aspek hokum formal tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi Wajib Pajak dalam membuat keputusan keberatan pajak; dan	Selesai	DJP
31			b. Memberikan pembinaan kepada pejabat dan petugas terkait yang tidak cermat dalam menyelesaikan proses keberatan.	Selesai	DJP
32	1.2.7 (13)	Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Sewa atas Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Minimal Sebesar Rp210.764.897,00 dan Denda Keterlambatan Sebesar Rp81.693.776,10 Belum Dipungut serta Pemanfaatan Aset Belum Didukung Perjanjian dan Persetujuan Pengelola Barang	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan: a. Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pajak untuk memberikan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Barang pada GKN Manado, KP DJP, KPP Pratama Cakung Dua, dan GKN Palembang yang tidak cermat dalam mengelola Barang Milik Negara khususnya tentang pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain;	Selesai	DJP

No. Rekomen-dasi	Butir Dan No. Temuan	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi BPK	Keterangan	PIC
33	1.2.8 (14)	Realisasi Belanja Sebesar Rp6,74 Miliar Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Sah	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan: b. Dirjen Pajak untuk memberikan pembinaan kepada PPK dan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas supaya lebih cermat mempertanggungjawabkan belanja barang dan menginstruksikan atasan langsung terkait untuk meningkatkan pengendalian.	Selesai	DJP
34	1.2.11. (15)	Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak Sebesar Rp2,02 Miliar Tidak Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk: a. Memberikan pembinaan kepada petugas dan pejabat pajak di KPP Pratama Karawang Selatan dan KPP Pratama Cibeunying yang lalai dalam memproses imbalan Bunga dan pemindahbukuan;	Selesai	DJP (Dit KITSDA)
35			b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan proses pemberian imbalan bunga dan pemindahbukuan; dan	Selesai	DJP
36			c. Mengupayakan pengembalian imbalan bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan.	Dalam proses	DJP (Dit KITSDA)

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKKK Tahun 2011

NO REKO-MENDASI	BUTIR DAN NO TEMUAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI BPK	STATUS	PIC
1	1.1.1 (1)	Penerimaan Perpajakan Menurut Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sebesar Rp6,18 Miliar tidak dapat direkonsiliasi dengan penerimaan menurut Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Transaksi Pembatalan Penerimaan Perpajakan Sebesar Rp218,27 miliar belum dapat diyakini	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak dan Dirjen Perbendaharaan untuk menyempurnakan kembali sistem pencatatan Penerimaan Perpajakan dan mekanisme rekonsiliasi dengan memperhatikan adanya pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem yang memadai. Rekomendasi 1c	Selesai MPN G2	Dit TIP
2	1.1.3. (2)	Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga penerimaan PPh Migas dan sanksi administrasi sebesar Rp747,08 Miliar belum dapat direalisasikan serta pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar Rp2,35 triliun dari inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan bagi hasil migas	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan pihak BP MIGAS dan Kementerian ESDM untuk mengamankan pendapatan dari sektor migas dengan mengupayakan amandemen PSC dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty*. Rekomendasi nomor 4	Diusulkan selesai	Dit PP2 dan P2
3	1.1.5. (3)	Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan belum memadai	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk: 1. Menunjuk dan membuka rekening Bank Tempat Pembayaran PBB manual maupun elektronik serta melaporkannya kepada Menteri Keuangan;	Selesai	Dit PKP
4			2. Menetapkan mekanisme pengawasan dan monitoring penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tingkat Bank Tempat Pembayaran kepada Bank Persepsi;	Selesai	
5			3. Membina KPP yang lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu belum sepenuhnya melaksanakan pemutakhiran data penerimaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan pada SISMIOP;	Selesai	
6			4. Menetapkan *Standard Operating Procedures* mengenai rekonsiliasi data penerimaan pada Bank TP dengan nilai penerimaan yang tercatat pada Bank Persepsi (MPN); dan	Selesai	
7			5. Melakukan penelitian lebih lanjut atas transaksi reversal dan transaksi yang ditolak pemindahbukuan pada tingkat Bank Tempat Pembayaran serta memerintahkan Bank TP untuk segera memindahbukukan penerimaaan PBB ke rekening Bank Persepsi atas penerimaan yang masih berada di rekening Bank TP.	Diusulkan selesai	
8	1.1.6. (4)	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Belum Memiliki Sistem Pengawasan Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang Terintegrasi	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menyusun aplikasi pengawasan penerbitan SPMKP dan mengintegrasikannya dengan aplikasi pemberian imbalan bunga.	Selesai	DJP

NO REKO-MENDASI	BUTIR DAN NO TEMUAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI BPK	STATUS	PIC
9	1.3.3. (5)	Pencatatan dan pelaporan piutang pajak kurang tertib	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar: a. Memerintahkan Dirjen Pajak dan Dirjen BC untuk: 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang menangani pencatatan dan pelaporan piutang pajak di seluruh unit vertikal di lingkungannya masing-masing serta meningkatkan fungsi Kantor Wilayah dalam hal pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan piutang pajak; dan	selesai	Dit P2 DJBC
10			2) Meningkatkan koordinasi dan membuat aturan yang jelas antara DJP dan DJBC dalam hal menegaskan wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak atas pencatatan piutang pajak dalam rangka impor yang telah dilimpahkan.	selesai	
11			b. Menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak agar memerintahkan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP untuk segera melakukan: 1) Penelusuran lebih lanjut atas piutang pajak yang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp239.120.903.102,50; dan	Diusulkan selesai	
12			2) Penelusuran lebih lanjut atas kejelasan status SP3DRI yang masih dalam proses penelitian sebesar Rp443.500.045.083,00.	Diusulkan selesai	
13			3) Perbaikan prosesur administrasi pencatatan dan pelaporan piutang pajak terkait faktor penambah dan pengurang piutang pajak dari hasil rekonsiliasi dan membuat prosedur rekonsiliasi atas faktor pengurang piutang pajak yang berasal dari potongan SPMKP.	Selesai	
14	1.3.4 (6)	Bendahara Barang pada DJP dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Tidak Melaksanakan Stock Opname Persediaan Secara Tertib dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Belum Menetapkan Pejabat Pengurus Persediaan	Dirjen Pajak untuk merevisi ketentuan pengelolaan persediaan materai dan leges agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;	Selesai	DJP
KEPATUHAN					
15	1.1.1 (7)	Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas) atas Areal Onshore Sebesar Rp3,96 Triliun Tidak Sesuai Dengan UU PBB dan UU Migas	BPK merekomendasikan agar Menteri Keuangan menginstruksikan Dirjen Pajak untuk menetapkan secara jelas objek pajak PBB Migas sesuai dengan UU PBB dan UU Migas serta memperbaiki petunjuk pengisian SPOP dan mekanisme penetapan PBB Migas.	Selesai	DJP
16	1.3.9 (8)	Realisasi Belanja Imbalan Bunga Tidak Berdasarkan PMK Nomor 40/PMK.03/2005	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menginstruksikan kepada	Dalam Proses	Kanwil DJP Jakarta Khusus,

NO REKO-MENDASI	BUTIR DAN NO TEMUAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI BPK	STATUS	PIC
		dan Direktorat Jenderal Pajak Terlambat Menyelesaikan Dua Permohonan Restitusi Sehingga Mengakibatkan Pengeluaran Negara yang Tidak Seharusnya Sebesar Rp1.602.310.747,00	Dirjen Pajak untuk: a. menarik kembali imbalan bunga yang tidak sesuai PMK Nomor 40/PMK.03/2005 yang telah diberikan kepada wajib pajak.		Dit. KITSDA
17			b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada petugas yang lalai sehingga penyelesaian permohonan restitusi menjadi terlambat dan membebani keuangan negara sebesar nilai imbalan bunga kepada WP.	Selesai	Kanwil DJP Jakarta Khusus, Dit. KITSDA

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKKKTahun 2010

No Rekomendasi	No	Judul Temuan	Rekomendasi	Keterangan	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SPI					
1	1	Penerimaan Perpajakan DJP Senilai Rp1,21 Triliun Tercatat di SAI tetapi tidak tercatat di SAU dan senilai Rp1,081 triliun tercatat di SAU tetapi tidak tercatat di SAI, dan terdapat potensi penerimaan sebesar Rp1,59 Triliun yang tercatat di MPN tidak dapat direkonsiliasi dengan SAU, serta terdapat selisih sebesar Rp178,44 Miliar antara SAI dan SAU dalam Penerimaan Perpajakan DJBC yang tidak dapat ditelusuri ke dokumen sumber	BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar menyempurnakan aplikasi pencatatan penerimaan perpajakan dan mekanisme rekonsiliasi	**Selesai**	Dit. PKP
2	2	Sistem pengendalian atas pencatatan piutang pajak dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2010 kurang memadai	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk: 1. Membangun aplikasi sistem yang teritegrasi pada seluruh transaksi-transaksi perpajakan khususnya untuk pencatatan dan pelaporan piutang pajak;	**Selesai**	DJP (Dit. TTKI)
3			2. Menginstruksikan kepada Dirjen Pajak untuk: a. Membuat buku pembantu piutang per wajib pajak yang mencantumkan nilai hak (kelebihan bayar) dan kewajiban (utang) wajib pajak; b. Membuat kertas kerja untuk pencatatan dalam LP3; c. Melakukan pencatatan piutang pajak secara sistem sehingga menghasilkan nilai piutang pajak yang akurat dan dapat dipercaya d. Melakukan pembinaan kepada petugas pengelola piutang pajak pada seluruh satuan kerja	**Selesai**	DJP (Dit. P2, Dit, KITSDA)
4			3. Menginstruksikan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak untuk meningkatkan koordinasi terkait pengelolaan SP3DRI	**Selesai**	DJP
			4. Menetapkan kebijakan akuntansi terkait pelaporan dan pencatatan SP3DRI	**Diusulkan Selesai**	Setjen Rocankeu
5	3	Pelaksanaan penatausahaan dan pencatatan barang persediaan pada Kementerian Keuangan belum berjalan secara optimal	Menteri Keuangan agar menginstruksikan kepada Dirjen Pajak, Dirjen Perbendaharaan dan Ketua Bapepam LK agar memerintahkan kepada seluruh Bendahara barang untuk melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan yang dikelolanya dan melakukan koreksi yang diperlukan serta meningkatkan pengawasan atasan langsung petugas persediaan.	**Selesai**	Bagian Umum, Bagian Perlengkapan

6	4	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap di Lingkungan Kementerian Keuangan Belum Sepenuhnya Memadai	Menteri Keuangan agar memerintahkan seluruh kepala satuan kerja mengelola dan mengamankan aset sesuai ketentuan yang berlaku	**Selesai**	Bagian Umum, Bagian Perlengkapan
7	5	Pembangunan gedung sebesar Rp54,03 miliar di satker DJP dan GKN yang tidak terselesaikan berpotensi menimbulkan inefisiensi	Menteri Keuangan agar menginstruksikan kepada 1. Dirjen Pajak dan Setjen Kementerian Keuangan untuk melakukan perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan kemampuan anggaran, ukuran, biaya serta pelaksanaan maupun penyelesaiannya dan mengoptimal kan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan yang memerlukan pelaksanaan pekerjaan lebih dari satu tahun anggaran	**Selesai**	DJP
			2. Itjen Kemenkeu melakukan pemeriksaan atas proses belanja modal gedung GKN Jayapura yang tidak ada ijin dari Menkeu	**Selesai**	Itjen
Kepatuhan					
8	6	Penyelesaian PPN sebesar Rp11,28 triliun melalui mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah tidak sesuai dengan UU PPN;	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menerapkan mekanisme penyelesaian PPN DTP sesuai dengan UU PPN	**Selesai**	Setjen Kemenkeu, DJP
9	7	Penetapan, penagihan, dan pembayaran PBB Migas tidak sesuai dengan UU PBB dan UU Migas sehingga realisasi PBB Migas sebesar Rp19,30 triliun tidak diyakini kewajarannya;	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: 1) Mengatur lebih jelas mengenai objek PBB Migas dengan mempertimbangkan UU PBB dan UU Migas;	**Selesai**	DJP
10			2) Memperbaiki mekanisme penetapan dan penagihan PBB Migas; dan	**Selesai**	DJP
11			3) Melakukan Inventarisasi dan memperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya atas dampak-dampak yang diakibatkan oleh pembayaran-pembayaran PBB Migas, yaitu Belanja Transfer ke Daerah dan Upah Pungut	**Selesai**	DJP
12	8	Belanja barang dan jasa tidak melalui pelelangan umum dan dipecah dalam beberapa kontrak sebesar Rp3,84 miliar	Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk memberikan pembinaan dan pada masa yang akan datang membuat perencanaan pengadaan atas seluruh belanja yang tercantum dalam DIPA dan melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	**Selesai**	DJP
13	9	Bendahara Pengeluaran Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) belum memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa jaringan sebesar Rp523,67 juta;	Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak: 1) untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran yang lalai. 2) menagih dan menyetorkan PPh 23 atas pengadaan sewa jaringan sebesar Rp523,66 juta.	**Selesai**	DJP

14	10	Realisasi belanja tidak didukung bukti yang valid sebesar Rp28,63 miliar.	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan: c. Dirjen Pajak untuk memungut dan menyetorkan kelebihan pembayaran pekerjaan tersebut ke kas negara atau memperhitungkan kelebihan pembayaran tersebut pada perhitungan akhir.	**Selesai**	DJP

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKKK Tahun 2009

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	Penerimaan Perpajakan DJP Senilai Rp1,21 Triliun Tercatat di SAI tetapi tidak tercatat di SAU dan senilai Rp1,081 triliun tercatat di SAU tetapi tidak tercatat di SAI, dan terdapat potensi penerimaan sebesar Rp1,59 Triliun yang tercatat di MPN tidak dapat direkonsiliasi dengan SAU, serta terdapat selisih sebesar Rp178,44 Miliar antara SAI dan SAU dalam Penerimaan Perpajakan DJBC yang tidak dapat ditelusuri ke dokumen sumber.	BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar menyempurnakan aplikasi pencatatan penerimaan perpajakan dan mekanisme rekonsiliasi	Selesai	Dit. PKP
2	2	Pengaturan Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) Belum Jelas	BPK merekomendasikan Pemerintah untuk membuat pengaturan secara rinci mengenai jenis mekanisme pengendalian dengan mekanisme DTP	Selesai	DJP
3	3	Penerimaan dari Penjualan Bea Meterai yang disajikan dalam LRA Tidak Sesuai dengan Data Sumber Laporan Penjualan PT Pos Indonesia dan Masih Terdapat Selisih Sebesar Rp9,38 Miliar	agar mengoptimalkan verifikasi bersama atas penjualan dan persediaan Benda Meterai setiap kuartal/ perempat tahun dengan membandingkan data MPN/LRA dan penjualan menurut PT Pos Indonesia	Selesai	DJP
4	4	Penyajian Piutang Pajak pada Kementerian Keuangan sebesar Rp4,48 Triliun Tidak di Dukung dan Tidak Sesuai dengan Dokumen Sumber sehingga Belum Dapat Diyakini Kewajarannya serta Penyisihan Piutang Pajak Kurang Diungkap sebesar Rp33,12 Miliar	Agar Kementerian Keuangan meningkatkan sistem pengendalian intern atas monitoring pengakuan, pencatatan, dan penagihan Piutang Pajak dengan cara: 1. Membuat Prosedur rekonsiliasi pengurangan Piutang Pajak antara SSP di LP3 dengan SSP di MPN, sehingga menyajikan saldo Piutang Pajak yang akurat;	Selesai	DJP
	5		2. Melakukan pencatatan Piutang Pajak berdasarkan dokumen sumber yang sah;	Selesai	DJP
	6		3. Mengungkap SP3DRI dalam LK Tingkat Eselon I (DJP dan DJBC) dan LK Kementerian Keuangan secara memadai;	Selesai	DJP
	7		4. Memperbaharui dan Menyeragamkan sistem pencatatan Piutang Pajak untuk mengakomodasi peraturan yang ada serta memantau keputusan keberatan dan banding, sehingga pencatatan Piutang Pajak lebih akurat.	Selesai	

No. Temuan	No. Rekomen-dasi	Temuan	Rekomendasi	Keterangan	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepatuhan					
5	8	Realisasi Belanja Modal Akhir Tahun sebesar Rp11,78 Miliar tidak didukung bukti yang valid	BPK merekomendasikan agar Menteri Keuangan memerintahkan satuan kerja terkait untuk menagihkan denda keterlambatan sebesar Rp519,57 juta dan memastikan penerimaan tersebut masuk ke kas negara serta memberikan sanksi kepada pejabat terkait.	**Pembahasan Januari 2019** **DJP:** **Diusulkan TPTD** **BPK:** **Belum Sesuai**	KPP Kotamobagu dan KPP Bitung, Bagian Perlengkapan, Dit. KITSDA
6	9	Realisasi Pembayaran Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu Tidak sesuai dengan prestasi fisiknya sehingga terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp3,42 Miliar.	BPK merekomendasikan agar meminta pertanggungjawaban kepada pihak terkait dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	**Selesai**	KPP Kotamobagu, Bagian Perlengkapan, Dit. KITSDA

djp

LAMPIRAN P

PENCAPAIAN
INDIKATOR KERJA UTAMA DJP
per 31 DESEMBER 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NILAI KINERJA ORGANISASI
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2018

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target Q4	Realisasi Q4	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Capaian	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						25,00%		23,06%
1	Penerimaan pajak negara yang optimal								92,24%
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	92,24%	Max	E/M	21%	100,00%	92,24%	92,24%
	Customer Perspective						15,00%		15,83%
2	Pelayanan publik yang prima								102,13%
2	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	4,23	4,32	Max	E/M	21%	100,00%	102,13%	102,13%
3	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi								108,89%
3	Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan	55,00%	59,89%	Max	P/M	14%	100,00%	108,89%	108,89%
3a	Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	65,00%	69,30%	Max	P/M	14%	50,00%	106,62%	106,62%
3b	Persentase WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran	45,00%	50,48%	Max	P/M	14%	50,00%	112,18%	112,18%
	Internal Process Perspective						30,00%		33,18%
4	Perumusan kebijakan yang berkualitas								105,88%
4	Indeks efektivitas peraturan	8,00	8,47	Max	P/L	19%	100,00%	105,88%	105,88%
5	Penyuluhan dan kehumasan yang efektif								108,52%
5	Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan	60,00%	86,30%	Max	P/M	14%	35,00%	120,00%	42,00%
6	Tingkat efektivitas kehumasan	80,00	81,87	Max	E/L	26%	65,00%	102,34%	66,52%
6	Pelayanan perpajakan yang optimal								104,33%
7	Persentase penyampaian SPT melalui *e-Filing*	82,00%	85,55%	Max	P/M	14%	100,00%	104,33%	104,33%
7	Ekstensifikasi perpajakan yang optimal								116,20%
8	Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100,00%	116,20%	Max	P/M	14%	100,00%	116,20%	116,20%
8	Pengawasan wajib pajak yang efektif								116,34%
9	Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti	100,00%	116,34%	Max	P/M	14%	100,00%	116,34%	116,34%
9	Pemeriksaan yang efektif								110,04%
10	Audit Coverage Ratio	100,00%	147,44%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00%	60,00%
11	Persentase keberhasilan penugasan *Joint Audit*	80,00%	80,07%	Max	P/M	14%	50,00%	100,09%	50,04%
10	Penagihan yang efektif								120,00%
12	Persentase pencairan piutang pajak	66,00%	96,62%	Max	E/M	21%	100,00%	120,00%	120,00%
11	Penyidikan yang efektif								120,00%
13	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	60,00%	105,83%	Max	E/L	26%	100,00%	120,00%	120,00%
12	Penanganan putusan banding/gugatan WP yang optimal								108,85%
14	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak	40,00%	43,54%	Max	E/L	26,00%	100,00%	108,85%	108,85%
13	Pengendalian mutu yang optimal								104,84%
15	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang ditindaklanjuti	89,00%	96,46%	Max	P/M	14%	50,00%	108,38%	54,19%
16	Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang ditindaklanjuti	89,00%	90,16%	Max	P/M	14%	50,00%	101,30%	50,65%
14	Data perpajakan yang optimal								101,44%
17	Persentase data eksternal teridentifikasi	64,00%	64,92%	Max	P/M	14%	100,00%	101,44%	101,44%
	Learning & Growth Perspective						30,00%		31,36%
15	SDM yang kompetitif								100,26%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target Q4	Realisasi Q4	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Capaian	Indeks Capaian
18	Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	94,00%	94,24%	Max	P/M	14%	100,00%	**100,26%**	**100,26%**
16	Organisasi yang *fit for purpose*								**105,91%**
19	Persentase implementasi inisiatif RBTK	92,00%	95,00%	Max	P/M	14%	33,33%	**103,26%**	**34,42%**
20	Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK	100,00%	146,21%	Max	P/M	14%	33,33%	**120,00%**	**40,00%**
21	Indeks Persepsi Integritas	85	80,29	Max	P/M	14%	33,33%	**94,46%**	**31,49%**
17	Sistem informasi manajemen yang andal								**112,30%**
22	Tingkat *downtime* sistem TIK	0,35%	0,0076%	Min	P/M	14%	56,00%	**120,00%**	**67,20%**
23	Persentase kapabilitas tata kelola TIK	75,00%	76,87%	Max	P/H	11%	44,00%	**102,49%**	**45,10%**
18	Pengelolaan anggaran yang berkualitas								**99,68%**
24	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	94,70%	Max	E/M	21%	100,00%	**99,68%**	**99,68%**
Nilai Kinerja Organisasi									**103,42%**


djp